

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 serta agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berjalan secara konsisten, maka perlu disusun dan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah Tahun 2025.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam:

a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2025.

Pasal 3

Sistematika perubahan RKPD disusun sebagai berikut

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan Satu Tahun 2025;
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
f. BAB VI : Penutup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 197701112005011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika RKPD I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Administratif II-1
2.1.1.2 Topografi II-5
2.1.1.3 Hidrologi II-11
2.1.1.4 Klimatologi II-14
2.1.1.5 Penggunaan Lahan II-15
2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah II-17
2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana II-23
2.1.1.8 Kondisi Demografi II-25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-29
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-30
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-51
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-69
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-70
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II-104
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-155
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... ..... II-174

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-178
2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Umum II-195
2.1.3.7 Unsur Kewilayahan II-199
2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum II-200
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-204
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-208
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ... II-214
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi II-217
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-220
2.1.4.5 Inovasi II-223
2.2 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 ..... II-225
2.2.1 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2024 terhadap Target RPJMD 2021–2026 ..... II-226
2.2.2 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 ..... II-229
2.2.3 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 ..... II-237
2.2.4 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ..... II-256
2.3 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... II-301
2.3.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas Daerah II-301
2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-302
2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-302
2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-310
2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-326

2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... II-336
2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-337
2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ... II-341
2.3.2.7 Unsur Kewilayahan..... II-342
2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum II-343
2.3.3 Isu Strategis Daerah Tahun 2026 ..... II-343

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-4
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-5
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-8
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-20

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 IV-30
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 IV-30
4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-37
4.2.3 Keselarasan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Tahun 2026..... IV-43
4.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... IV-45
4.2.5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... IV-46
4.2.5.1 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... IV-59

4.2.5.2 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan IV-62
4.2.5.3 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* IV-65
4.2.5.4 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran..... IV-72
4.2.5.5 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pembangunan Kewilayahan. IV-75
4.2.5.6 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Hasil Perencanaan Partisipatif. IV-78
4.2.5.7 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pembangunan Daerah Jangka Panjang..... IV-79
4.2.5.8 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Inovasi Daerah IV-90

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026..... V-1
5.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah V-3
5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-3
5.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.. V-3
5.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan... V-4
5.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang..... V-6
5.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman V-9
5.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat V-10
5.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial..... V-11
5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... V-12
5.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja. V-12

5.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak V-12
5.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan..... V-13
5.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan V-14
5.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup..... V-15
5.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil..... V-16
5.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... V-17
5.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-19
5.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan V-19
5.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika V-20
5.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah..... V-21
5.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal..... V-22
5.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga V-23
5.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik V-24
5.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian V-25
5.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan .. V-25
5.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan V-26
5.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan . V-26
5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan V-27
5.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan V-27
5.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata . V-28
5.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian .. V-29
5.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan . V-30

5.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian V-31
5.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. V-31
5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... V-32
5.2.4.1 Sekretariat Daerah..... V-32
5.2.4.2 Sekretariat DPRD..... V-34
5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... V-34
5.2.5.1 Perencanaan V-34
5.2.5.2 Keuangan..... V-35
5.2.5.3 Kepegawaian V-36
5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan V-36
5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan..... V-37
5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Umum. V-37
5.2.6.1 Inspektorat Daerah V-37
5.2.7 Unsur Kewilayahan..... V-38
5.2.7.1 Kecamatan..... V-38
5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum V-39
5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik V-39

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2026... VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026.. VI-2
6.3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2026 ..... VI-13

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora..... II-2

Tabel II.2 Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Blora Menurut Kecamatan Tahun 2024..... II-5

Tabel II.3 Ketinggian dari Permukaan Air Laut Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora..... II-5

Tabel II.4 Kemiringan Lereng Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora II-8

Tabel II.5 Jumlah Curah Hujan per Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-14

Tabel II.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-15

Tabel II.7 Kawasan Lindung di Kabupaten Blora..... II-20

Tabel II.8 Kawasan Budidaya yang Ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blora..... II-22

Tabel II.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-23

Tabel II.10 Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 II-26

Tabel II.11 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-27

Tabel II.12 Jumlah Penduduk menurut Umur di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-29

Tabel II.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional II-31

Tabel II.14 Perkembangan dan Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 .. II-32

Tabel II.15 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-33

Tabel II.16 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-34

Tabel II.17 PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-38

Tabel II.18 Perbandingan PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 dengan Target Daerah II-39

Tabel II.19 Perbandingan PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 dengan Target Daerah II-39

Tabel II.20 Perbandingan Inflasi Kabupaten Blora dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2020–2024..... II-41

Tabel II.21 Distribusi Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Blora 2020–2024..... II-42

Tabel II.22 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024 ..... II-45

Tabel II.23 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024..... II-48

Tabel II.24 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Blora menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-49

Tabel II.25 Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2024..... II-50

Tabel II.26 Perkembangan Indikator IPM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-54

Tabel II.27 Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Blora Tahun 2024 ..... II-55

Tabel II.28 Perkembangan IPM Kabupaten Blora dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020–2024..... II-56

Tabel II.29 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2020–2024 ..... II-57

Tabel II.30 Perbandingan Target dan Kinerja IPM Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-58

Tabel II.32 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024 ..... II-61

Tabel II.33 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-63

Tabel II.34 Jumlah Kematian Ibu, Bayi, Balita, AKI, AKB dan AKba Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-65

Tabel II.36 APK dan APM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-70

Tabel II.37 Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Blora Tahun 2020–2024..... II-71

Tabel II.38 Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Blora Per Kecamatan Tahun 2024 ... II-72

Tabel II.39 Indikator Kecukupan Akses Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-72

Tabel II.40 Akreditasi Sekolah SD Sederajat Dan SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-73

Tabel II.41 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tahun 2020–2024 ..... II-74

Tabel II.42 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-75

Tabel II.43 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-78

Tabel II.44 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-79

Tabel II.45 Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-80

Tabel II.46 Kondisi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2020–2024 ..... II-81

Tabel II.47 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020–2024 ..... II-84

Tabel II.48 Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-88

Tabel II.49 Kondisi Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-91

Tabel II.50 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 ..... II-93

Tabel II.51 Kondisi Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-95

Tabel II.52 Perkembangan Penyiapan Masyarakat Tangguh Bencana untuk Mitigasi Risiko Bencana di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-99

Tabel II.53 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-100

Tabel II.54 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-101

Tabel II.55 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-103

Tabel II.56 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-105

Tabel II.57 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-107

Tabel II.58 PoV dan IKP Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-109

Tabel II.59 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-112

Tabel II.60 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pertanahan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-115

Tabel II.61 Capaian IKLH Kabupaten Blora Tahun 2020–2024..... II-116

Tabel II.62 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-118

Tabel II.63 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-120

Tabel II.64 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-121

Tabel II.65 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-124

Tabel II.66 Persebaran Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Blora Tahun 2024 ..... II-127

Tabel II.67 Kondisi Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Blora II-129

Tabel II.68 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-133

Tabel II.69 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 .. II-137

Tabel II.70 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-139

Tabel II.71 Kerja Sama dengan Investor Tahun 2024 ..... II-141

Tabel II.72 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-142

Tabel II.73 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-145

Tabel II.74 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Persandian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-147

Tabel II.75 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-148

Tabel II.76 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-151

Tabel II.77 Kondisi Pembangunan Urusan Kearsipan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-153

Tabel II.78 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-156

Tabel II.79 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-159

Tabel II.80 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-162

Tabel II.81 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Blora II-165

Tabel II.82 II-166

Tabel II.83 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-167

Tabel II.84 II-170

Tabel II.85 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-173

Tabel II.86 Kondisi Pembangunan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-174

Tabel II.87 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 .... II-176

Tabel II.88 Kondisi Pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024.... II-178

Tabel II.89 Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-179

Tabel II.90 Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-182

Tabel II.91 Profil ASN berdasar Komponen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-186

Tabel II.92 Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-188

Tabel II.93 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.... II-190

Tabel II.94 Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-190

Tabel II.95 Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-193

Tabel II.96 Kondisi Pembangunan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 .... II-196

Tabel II.97 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-199

Tabel II.98 Kondisi Pembangunan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-201

Tabel II.99 Perbandingan Nilai Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora Tahun 2022, 2023, dan 2024 ..... II-205

Tabel II.100 Nilai Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 dan 2024 ..... II-205

Tabel II.101 Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Blora dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020–2024..... II-211

Tabel II.102 Perbandingan Nilai Tukar Petani, indeks LT dan Indeks LB Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ..... II-213

Tabel II.103 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) di Kabupaten Blora 2020–2024.... II-214

Tabel II.104 Jenis Fasilitas Penginapan di Kabupaten Blora Tahun 2024 ..... II-216

Tabel II.105 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 ..... II-219

Tabel II.106 Jumlah Penduduk dengan Kualifikasi S1, S2 dan S3 Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-220

Tabel II.107 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-222

Tabel II.108 Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024..... II-224

Tabel II.109 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-225

Tabel II.110 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-226

Tabel II.111 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029..... II-227

Tabel II.112 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-229

Tabel II.113 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 ..... II-231

Tabel II.114 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-237

Tabel II.115 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029..... II-239

Tabel II.116 Indikator Kinerja Program Menurut Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 ..... II-256

Tabel II.117 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Tahun 2021–2026..... II-258

Tabel III.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... III-7

Tabel III.2 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026... III-20

Tabel III.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... III-21

Tabel III.4 Capaian dan Proyeksi Pendanaan Kabupaten Blora Tahun 2024-2026..... III-1

Tabel IV.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... IV-3

Tabel IV.2 Target Tujuan Sasaran Daerah beserta Outcome dan Program Prioritas Daerah IV-5

Tabel IV.3 Dukungan Arah Kebijakan untuk Asta Cita IV-30

Tabel IV.4 Dukungan Terhadap 17 Program Prioritas Nasional IV-34

Tabel IV.5 Dukungan Terhadap Program Terbaik Tercepat IV-35

Tabel IV.6 IV-38

Tabel IV.7 Program Prioritas Daerah pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 yang Mendukung Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-39

Tabel IV.8 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan Provinsi Tahun 2026 ..... IV-44

Tabel IV.9 Persandingan Sasaran Makro RKPD Kabupaten Blora dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-45

Tabel IV.10 Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-47

Tabel IV.11 Program Prioritas yang Mendukung untuk Prioritas Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026..... IV-54

Tabel IV.12 Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Blora Tahun 2026..... IV-59

Tabel IV.13 Dukungan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-60

Tabel IV.14 Strategi dan Program Prioritas Tahun 2026 yang Mendukung IV-63

Tabel IV.15 Daftar Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2026 ..... IV-68

Tabel IV.16 Strategi dan Program Prioritas Tahun 2026 yang Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka IV-74

Tabel IV.17 Intervensi Program Spasial Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2026..... IV-77

Tabel IV.18 Dukungan Program yang Mendukung Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... IV-79

Tabel V.1 Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... V-2

Tabel V.2 Rencana Program Prioritas Kabupaten Blora Tahun 2026 V-40

Tabel VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... VI-2

Tabel VI.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2026 ..... VI-2

Tabel VI.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Blora dan Target Tahun 2026 ..... VI-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026 ..... I-3

Gambar I.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8

Gambar II.1 Peta Orientasi Kabupaten Blora dalam Konstelasi Regional Jawa Tengah II-3

Gambar II.2 Peta Administrasi Kabupaten Blora II-4

Gambar II.3 Peta Kelerengan Kabupaten Blora..... II-7

Gambar II.4 Peta Struktur Geologi Kabupaten Blora II-9

Gambar II.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Blora..... II-10

Gambar II.6 Peta Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Blora..... II-12

Gambar II.7 Peta Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai di Kabupaten Blora..... II-13

Gambar II.8 Grafik Curah Hujan Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-15

Gambar II.9 Grafik Kontribusi Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-16

Gambar II.10 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora II-16

Gambar II.11 Peta Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Blora.. II-19

Gambar II.12 Peta Kawasan Budidaya di Kabupaten Blora II-21

Gambar II.13 Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora..... II-25

Gambar II.14 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-27

Gambar II.15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora II-28

Gambar II.16 Grafik Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora Tahun 2020-2024..... II-36

Gambar II.17 Grafik Perbandingan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Blora dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024..... II-36

Gambar II.18 Grafik Rasio Gini Kabupaten Blora Tahun 2020-2024.. II-44

Gambar II.19 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-46

Gambar II.20 Grafik Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 ..... II-47

Gambar II.21 Grafik Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 II-47

Gambar II.22 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-52

Gambar II.23 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Blora, Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-54

Gambar II.24 IPM Kabupaten /Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-56

Selama kurun waktu 2020-2024 Nilai IPG Kabupaten Blora terus mengalami kenaikan akan tetapi nilai IPG Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.25 berikut:..... II-58

Gambar II.26 Grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-59

Gambar II.27 IDG Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2023 ..... II-60

Gambar II.28 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-62

Gambar II.31 II-69

Gambar II.31 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 ..... II-83

Gambar II.32 Peta Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Prioritas Kabupaten di Kabupaten Blora Tahun 2023..... II-89

Gambar II.33 Grafik Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021-2024 ..... II-91

Gambar II.34 Capaian SPM Perumahan Permukiman pada Pengadaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 ..... II-94

Gambar II.35 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-98

Gambar II.37 Persentase Penempatan Terhadap Penawaran Kerja di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 ..... II-106

Gambar II.38 Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Kabupaten Blora Tahun 2024..... II-110

Gambar II.39 Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan II-112

Gambar II.42 Perkembangan Jumlah Desa Maju di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-123

Gambar II.43 Grafik Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-124

Gambar II.44 Grafik *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-125

Gambar II.46 Grafik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-136

Gambar II.47 Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-136

Gambar II.48 Persentase UMKM Berbadan Hukum di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-138

Gambar II.49 Jenis Layanan Online Investasi di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-141

Gambar II.50 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Blora Tahun 2019–2024 ..... II-141

Gambar II.51 Grafik Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-144

Gambar II.52 Grafik Jumlah Dokumen Sesuai Kebutuhan Perencanaan di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024..... II-145

Gambar II.53 Grafik Persentase SKPD dengan Buku Profil di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-146

Gambar II.54 Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-149

Gambar II.55 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ... II-150

Gambar II.56 Persentase Arsip yang Tersimpan dengan Baik di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-154

Gambar II.57 Grafik Jumlah Arsip Sudah Diduplikasi dalam *Softfile* di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-155

Gambar II.58 Produksi Perikanan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-157

Gambar II.59 Jumlah Industri Pengolahan Ikan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-158

Gambar II.60 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-161

Gambar II.62 Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024..... II-164

Gambar II.64 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 .. II-170

Gambar II.65 Persentase Pelaku IKM yang termasuk Kategori Klaster Industri Berkembang di Kabupaten Blora pada Tahun 2020-2024..... II-172

Gambar II.66 Grafik Kinerja IKM di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024II-177

Gambar II.68 Grafik Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2020-2023 ..... II-185

Gambar II.69 Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti II-197

Gambar II.70 Grafik Kapabilitas APIP Tahun 2020–2024 ..... II-198

Gambar II.71 Jumlah Ormas dan LSM di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-203

Gambar II.72 Grafik Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi Makanan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023 ..... II-210

Gambar II.73 Grafik Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi Non Makanan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023. II-211

Gambar II.74 Grafik Nilai Tukar Petani Kabupaten Blora Tahun 2017-2023 ..... II-212

Gambar II.76 Grafik Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 ..... II-223

Gambar II.77 Diagram Rekapitulasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024 ..... II-230

Gambar II.78 Diagram Rekapitulasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 ..... II-237

Gambar II.79 Diagram Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Target RPJMD II-257

Gambar IV.1 Akur Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi *Stunting* IV-67

Gambar IV.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Serta Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019–2023 ..... IV-72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian integral dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blora tahun 2026 dilakukan terhadap RKPD sebagai dokumen perencanaan di tingkat pemerintah dan secara paralel terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 memuat gambaran kondisi umum Kabupaten Blora yang dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah; evaluasi perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2024; kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026; rencana kerja dan pendanaan daerah; serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026, RKPD Kabupaten Blora Tahun

2026 berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang yang termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029. Selain berpedoman pada Rancangan RPJMD, RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang memuat prioritas nasional; dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Selain itu, RKPD juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021–2041, serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan baik di tingkat global, nasional maupun regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2026, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025.

Penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses (Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-bawah dan bawah-atas) dan berorientasi pada substansi (Holistik-tematik, Integratif dan Spasial), memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD dan Renja PD disusun secara terpadu berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah melalui perumusan program/kegiatan/sub kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur, fokus pada prioritas, bermanfaat langsung bagi masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, dan daya saing daerah serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

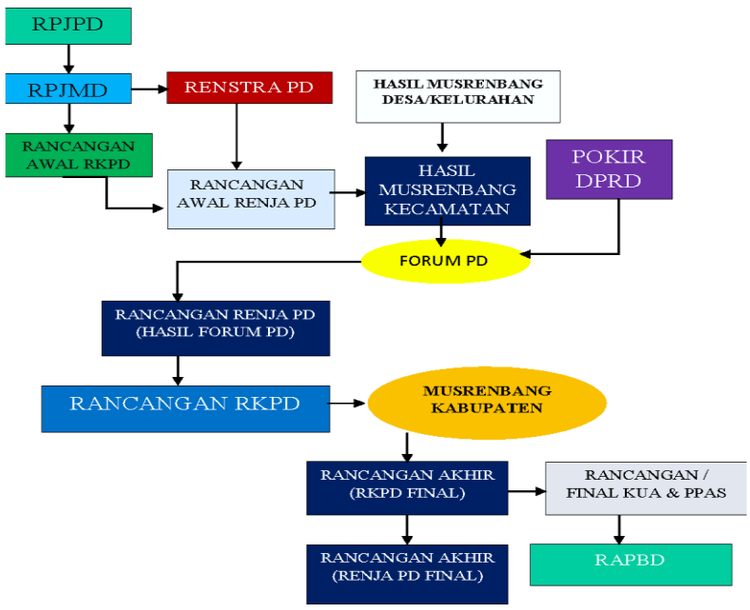
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan penyusunan RKPD** melalui pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi tentang RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi;
2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD** melalui pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi

perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD dalam Konsultasi Publik;

3. **Penyusunan Rancangan RKPD** sebagai bahan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD;
4. **Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD** yang didahului kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan, Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah;
5. **Perumusan Rancangan Akhir RKPD** berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; dan
6. **Penetapan RKPD** dengan Peraturan Bupati.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana Gambar I.1 berikut:



Gambar I.1

Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7));
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2054 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

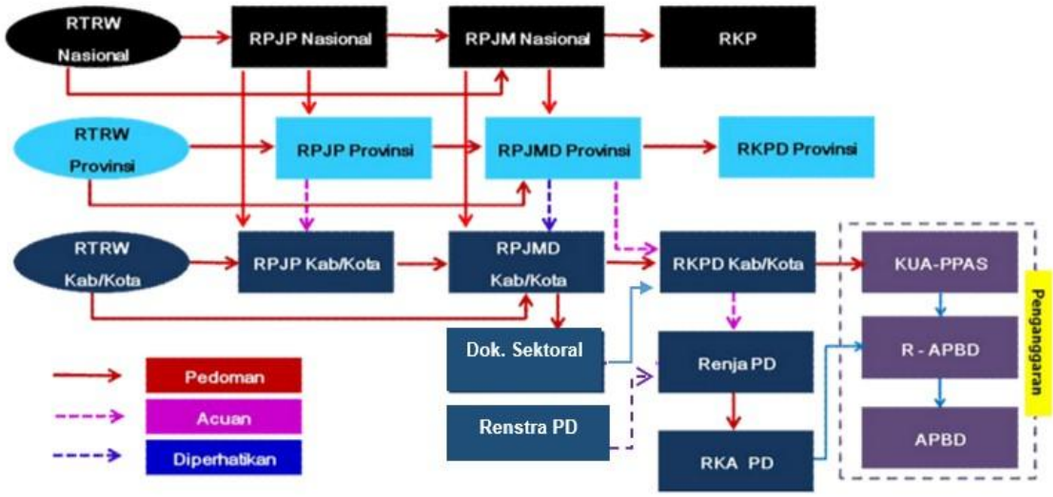
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan siklus manajemen pembangunan, sehingga dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

Dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hubungan antara dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar I.2 sebagai berikut:



Gambar I.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan masing-masing dokumen perencanaan terkait diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan RKP 2026.

   Isu strategis dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2026 menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Blora 2026. Tema RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah "Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan". Tema ini menekankan pentingnya penguatan sistem produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Kabupaten Blora sebagai salah satu simpul lumbung pangan nasional. Fokus diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah pertanian, penguatan rantai pasok hasil tani, serta perluasan layanan dasar di desa-desa sentra produksi pangan. Tema ini juga mendukung ASTA CITA 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, melalui pembangunan dan penguatan ekosistem produksi pangan yang mandiri dan efisien berbasis potensi lokal.

2. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

   RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menjadi acuan dalam menyusun RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026. Isu strategis dan prioritas provinsi Jawa Tengah yang terkait di wilayah BANGLOR. Secara khusus arah pengembangan wilayah diarahkan kepada pusat

bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala Internasional di wilayah Cepu, serta peningkatan aksesibilitas pusat ekonomi.

3. Hubungan RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

   Perencanaan spasial dalam RKPD 2025 merujuk pada rencana program pengembangan wilayah yang diatur dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

4. Hubungan RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029.

   RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program dan target tahunan yang tercantum dalam RPJMD tahun pertama untuk mencapai visi **"Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan"**.

5. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah.

   Prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2026, juga berasal dari identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan sektoral tahun rencana yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang disinkronkan dengan proses *bottom up* melalui Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan diselaraskan juga dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Penyelarasan dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan RKPD Tahun 2026. Setelah disepakati melalui proses Musrenbang RKPD Kabupaten Blora, RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

6. Hubungan RKPD dengan dokumen Sektoral

   Sesuai dengan prinsip pengarusutamaan pembangunan, maka RKPD Kabupaten Blora 2026 memperhatikan Road Map (Peta Jalan), Rencana Aksi, Rencana Induk (Master Plan) dan sejenisnya, di antaranya:

a. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2016-2030,
b. Standar Pelayanan Minimal (SPM),
c. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora Tahun 2021-2045;
d. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Blora Tahun 2023-2025;
e. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2024-2026;
f. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
g. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042;
h. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024-2026;
i. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026;
j. Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora;
k. Rencana Nasional Pangan dan Gizi;
l. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH);
m. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
n. Masterplan Persampahan;
o. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2014-2028;
p. Strategi Sanitasi Kabupaten Blora 2022-2027;
q. Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Air Minum;
r. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
s. Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah;
t. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) Tahun 2023-2027;
u. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Tahun 2015-2030;
v. Masterplan Drainase Perkotaan Jepon - Blora – Tunjungan;
w. Masterplan Drainase Kecamatan Cepu.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026;

2. Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, antartingkat pemerintahan, pembangunan antarwilayah, dan antar sektor pembangunan dan antarurusan pemerintahan daerah;
3. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuannya adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 memuat sistematika dan substansi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD 2026 yang memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perencanaan RKPD, agar urgensi dan kepentingan penyusunan serta keselarasan antar bab dapat dengan mudah dipahami.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing daerah; hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2024 dengan memperhatikan substansi dokumen RPJMD 2025-2029 dan substansi dokumen RKPD tahun 2024, dan gambaran permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi dan capaian indikator makro ekonomi tahun 2024 dan prediksi 2026. Informasi mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; dan arah kebijakan keuangan daerah, yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta menyajikan persandingan tema dan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai landasan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada bagian ini disajikan pagu indikatif program prioritas dan keterkaitan dukungannya pada prioritas nasional, prioritas provinsi, dan *mandatory* sektoral khusus.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menyajikan penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 diperlukan sinergi yang

kokoh dan terpadu di jajaran pemerintah Kabupaten Blora, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah Kabupaten Blora dapat digambarkan melalui 4 aspek, yaitu: 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, 3) aspek pelayanan umum, dan 4) aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Penjelasan mengenai aspek geografi dan demografi dibagi ke dalam beberapa sub bagian, yaitu kondisi geografis dan batas wilayah administrasi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan kondisi demografi.

2.1.1.1 Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah pada bagian timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km^2 atau sekitar 6,01 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, letak Kabupaten Blora di perbatasan antar provinsi memberikan dampak positif baik kerja sama antar daerah dalam pelayanan publik maupun dalam *market share* untuk produk Kabupaten Blora dalam pengembangan kawasan tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara garis 111°160'–111°338' Bujur Timur dan garis 6°528'–7°248' Lintang Selatan. Letak pada posisi lintang memberikan sinar matahari sepanjang tahun yang mendukung perkembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Tabel II.1 di bawah ini menunjukkan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Blora, baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi Jawa Timur.

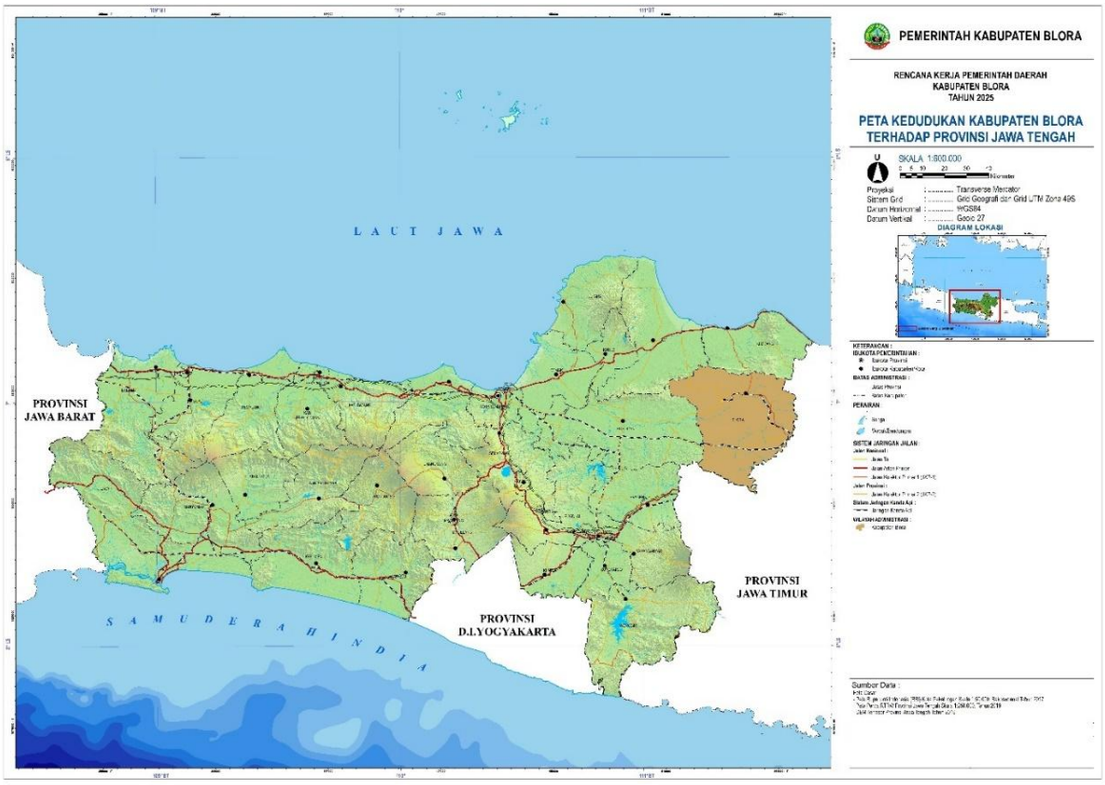
Tabel II.1

Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora

No	Batas Wilayah	Wilayah Administrasi Lain	Kecamatan di Kabupaten Blora yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	Todanan, Japah, Tunjungan, Blora, Jepon, Bogorejo
2	Sebelah Timur	Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur	Bogorejo, Jiken, Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur	Kradenan, Randublatung, Jati
4	Sebelah Barat	Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah	Todanan, Kunduran, Jati

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 Kabupaten Blora masuk dalam Wilayah Pengembangan Rembang-Blora (WP Banglor) bersama dengan Kabupaten Rembang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Banglor (Rembang-Blora) yang berpusat di Kawasan Perkotaan Cepu. Wilayah Banglor direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, dan untuk beberapa fungsi memiliki layanan pada skala provinsi yaitu pada bandara, terminal, serta pengembangan kawasan industri, perdagangan dan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Blora juga termasuk dalam Kawasan Strategis Perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, bersama dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam kerja sama pengembangan wilayah Ratubangnegoro (Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro). Selain itu juga tergabung dalam kerja sama pengembangan wilayah Wironegoro (Ngawi, Blora dan Bojonegoro).



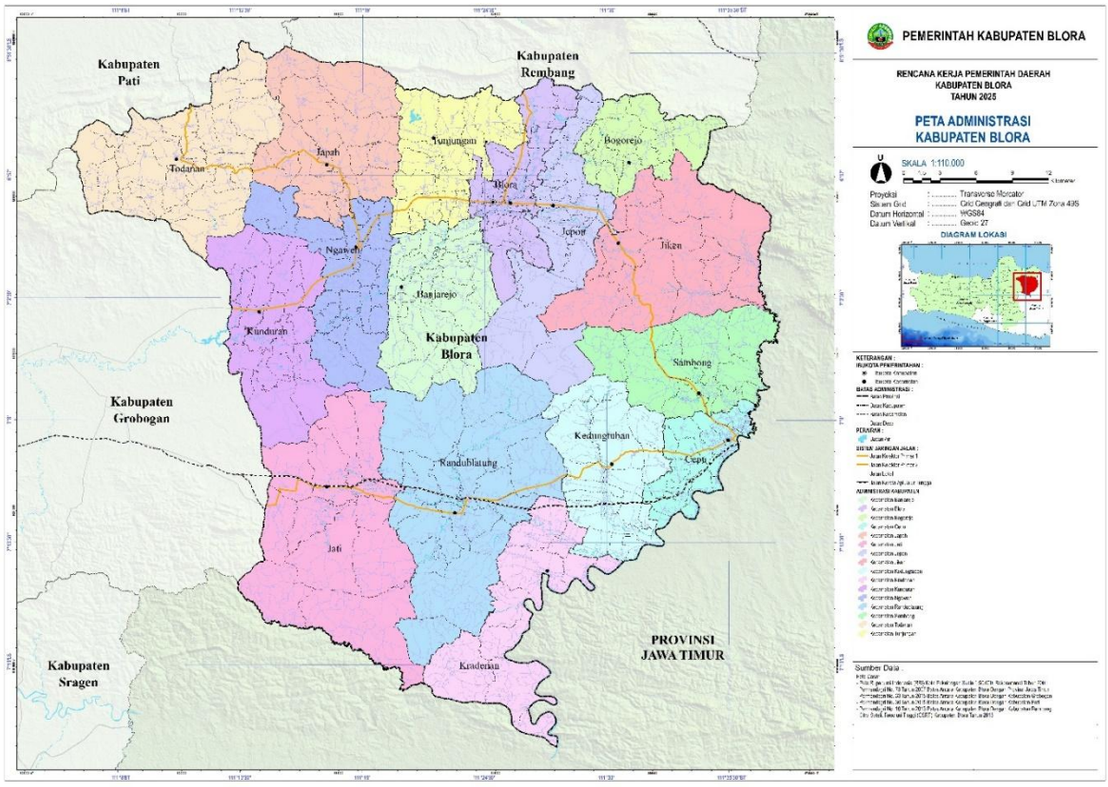
Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.1

Peta Orientasi Kabupaten Blora dalam Konstelasi Regional Jawa Tengah

Orientasi Kabupaten Blora pada konstelasi regional, terutama pada lingkup Jawa Tengah, membuka peluang pengembangan fungsi tertentu yang dapat melayani pada skala regional. Pada skala provinsi, Kabupaten Blora memiliki bandara yang dapat mengembangkan aksesibilitas perbatasan timur provinsi dan mendongkrak produktivitas ekonomi pada sektor-sektor basisnya. Intervensi terhadap aksesibilitas diharapkan dapat mendorong berkembangnya aktivitas bernilai tambah tinggi, mengingat kurangnya kemampuan sektor pertambangan di Blok Cepu untuk menyebarkan pertumbuhan pada masyarakat lokal.

Kabupaten Blora terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dengan indeks kawasan perkotaan tertinggi berada di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Gambar II.2 menunjukkan wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Blora.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.2

Peta Administrasi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora dibagi ke dalam 16 kecamatan dan 295 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Randublatung, sedangkan kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Cepu. Jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Ngawen. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini:

Tabel II.2
Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Blora Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Jati	215.38	12
2	Randublatung	235.92	18
3	Kradenan	112.04	10
4	Kedungtuban	108.45	17
5	Cepu	49.04	17
6	Sambong	102.68	10
7	Jiken	165.40	11
8	Bogorejo	60.82	14
9	Jepon	119.19	25
10	Blora	72.33	28
11	Banjarejo	110.64	20
12	Tunjungan	89.36	15
13	Japah	129.23	18
14	Ngawen	104.86	29
15	Kunduran	124.72	26
16	Todanan	155.77	25
Jumlah		**1.955.82**	**295**

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

2.1.1.2 Topografi

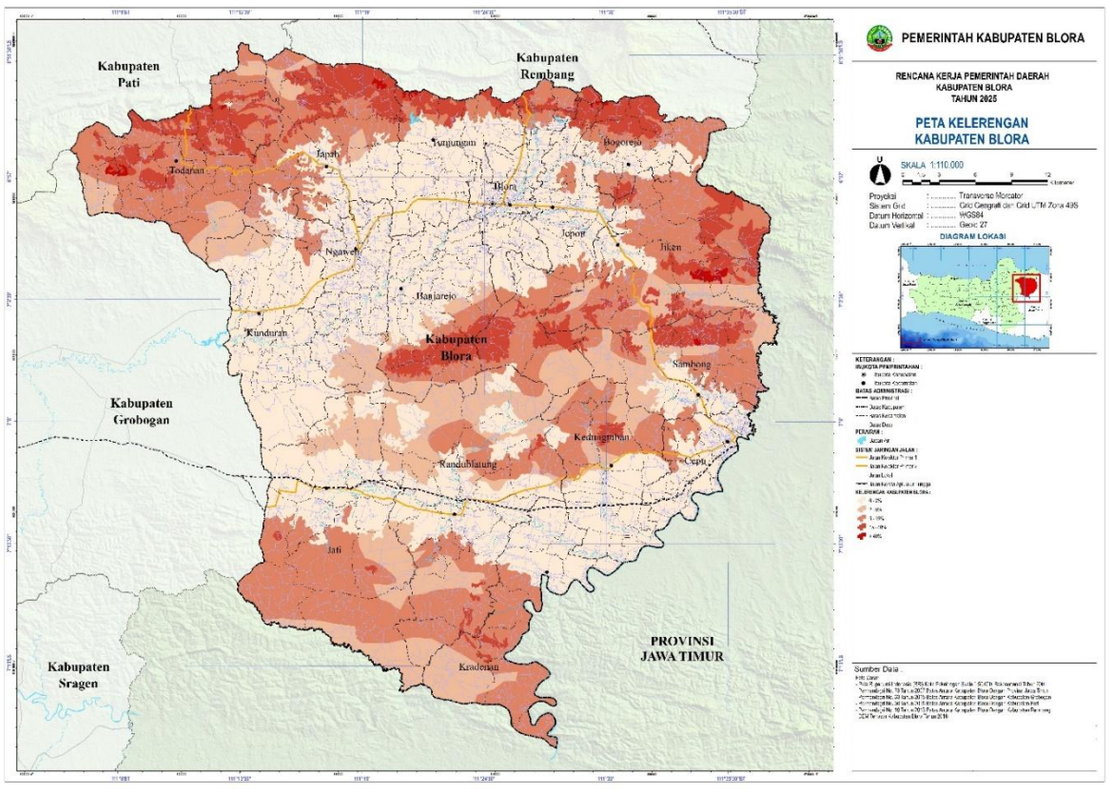
Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Blora didominasi oleh wilayah dengan ketinggian di atas 41 mdpl (sekitar 98 persen dari total wilayah). Sedangkan sebagian kecil merupakan wilayah dengan ketinggian antara 360–420 mdpl. Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang berada pada ketinggian antara 360-420 mdpl, yaitu Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan dengan luas total 515.53 hektar. Luasan terbesar berada pada ketinggian 0-100 mdpl seluas lebih dari 80.000 hektar. Sementara itu, pada ketinggian 220-280 mdpl, terdapat 78.094 hektar wilayah yang tersebar pada seluruh kecamatan. Tabel II.3 merinci luas wilayah pada setiap kecamatan berdasarkan ketinggiannya dari pemukaan laut.

Tabel II.3
Ketinggian dari Permukaan Air Laut Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora

No	Kecamatan	Luas berdasarkan ketinggian (Hektar)					
		0-100 mdpl	120-200 mdpl	220-280 mdpl	280-360 mdpl	360-420 mdpl	Total
1	Jati	7.320,02	3.546.96	10.584,87	85,81	0,00	21.537,66
2	Randublatung	9.212,95	2.058.72	12.029,85	290,31	0,00	23.591,82
3	Kradenan	4.002,73	2.047.34	4.910,62	243,66	0,00	11.204,35
4	Kedungtuban	5.598,14	0,00	4.971,68	275,40	0,00	10.845,22
5	Cepu	4.161,63	0,00	742,22	0,00	0,00	4.903,85
6	Sambong	2.097,17	549,99	6.005,26	1.583,79	31,57	10.267,78
7	Jiken	1.778,34	1.855,39	9.067,01	3.607,83	231,38	16,539,96
8	Bogorejo	2.029,95	0,00	2.431,82	1.610,06	10,32	6.082,15
9	Jepon	5,184,55	0,00	4.684,01	2.024,63	25,73	11.918,93
10	Blora	5.653,.50	0,00	1.068,35	510,68	0,00	7.232,53
11	Banjarejo	6.171,81	0,00	3.147,06	1.745,21	0,00	11.064,08
12	Tunjungan	6.789,83	0,00	975,98	1.127,46	42,70	8.935,97
13	Japah	3.901,40	878,05	5.186,02	2.898,57	58,52	12.922,56
14	Ngawen	7.941,74	281,59	2.262,77	0,00	0,00	10.486,11
15	Kunduran	11.244,13	936,15	291,99	0,00	0,00	12.472,27
16	Todanan	17,94	2.103,60	9.735,35	3.604,81	115,31	15.577,00
Total		**83.105,83**	**14.257,79**	**78.094,86**	**19.608.22**	**515,53**	**195.582,24**

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Dengan distribusi wilayah pada ketinggian seperti diperlihatkan pada Tabel II.3, komoditas yang dapat dikembangkan adalah padi dan palawija. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan padi sudah tepat bila dilihat dari potensi fisik dasar kabupaten. Pertanian padi telah lama menjadi sektor ekonomi produktif dan dominan di Kabupaten Blora. Dengan dukungan sektor fisik dasar dari aspek topografi, padi diharapkan dapat terus produktif. Apabila terjadi penurunan produktivitas padi, maka diperlukan intervensi seperti teknis produksi seperti pola tanam, sistem pengairan, pemilihan bibit, pemupukan, maupun manajemen pengolahan pasca panen (pemanenan, penyimpanan dan pengangkutan).



Sumber: *RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041*

Gambar II.3

Peta Kelerengan Kabupaten Blora

Kabupaten Blora memiliki topografi yang kompleks dan beraneka ragam sesuai dengan tipikal wilayah. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% hingga >40% (datar sampai dengan sangat curam) sebagaimana Gambar II.3 di atas. Berdasarkan aspek kelerengan wilayah, Kabupaten Blora didominasi oleh kelerengan datar hingga landai (0-15%) dengan luas sebesar 175.458,19 hektar. Pada kelerengan 15-40% terdapat luas 19.608,50 hektar. Sedangkan pada kelerengan curam (>40%) terdapat 515,53 hektar atau sekitar 0,26% dari seluruh wilayah Kabupaten Blora. Klasifikasi kemiringan lahan dibagi menjadi 5 (lima) kelas dan hubungan kelas kemiringan/lereng dengan luas sebenarnya dapat dilihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4

Kemiringan Lereng Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora

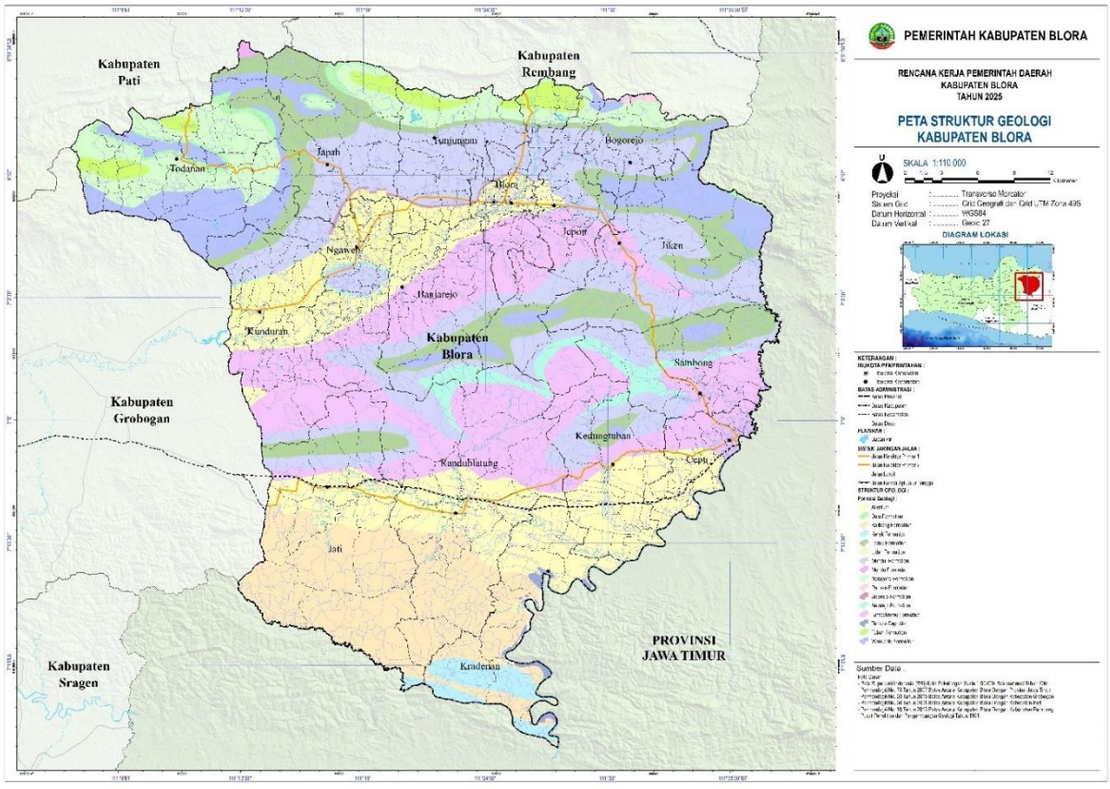
No	Kecamatan	Luas berdasarkan kemiringan (Hektar)					
		0-2 %	2-5 %	5-15 %	15–40 %	> 40 %	Total
1	Jati	7.320,02	5.275,32	8.856,51	85,81	0,00	21.537,66
2	Randublatung	9.212,95	7.464,07	6.624,49	290,31	0,00	23.591,82
3	Kradenan	4.002,73	2.047,34	4.910,62	243,66	0,00	11.204,35
4	Kedungtuban	5.598,14	1.731,07	3.240,61	275,40	0,00	10.845,22
5	Cepu	4.161,63	742,22	0,00	0,00	0,00	4.903,85
6	Sambong	2.097,17	3.123,74	3.431,22	1.584,07	31,57	10.267,78
7	Jiken	1.778,34	2.253,27	8.669,13	3.607,83	231,38	16.539,96
8	Bogorejo	2.029,95	0,00	2.431,82	1.610,06	10,32	6.082,15
9	Jepon	5.184,55	1.264,67	3.419,35	2.024,63	25,73	11.918,93
10	Blora	5.653,50	1,84	1.066,51	510,68	0	7.232,53
11	Banjarejo	6.171,81	1.261,21	1.885,84	1.745,21	0	11.064,08
12	Tunjungan	6.789,83	0,00	975,98	1.127,46	42,70	8.935,97
13	Japah	3.901,40	878,05	5.186,02	2.898,57	58,52	12.922,56
14	Ngawen	7.941,22	1.683,86	861,03	0,00	0	10.486,11
15	Kunduran	11.244,13	1.059,10	169,04	0,00	0	12.472,27
16	Todanan	17,94	2.103,60	9.735,35	3.604,81	115,31	15.577,00
	Total	**83.105,31**	**30.889,36**	**61.463,52**	**19.608,50**	**515,53**	**195.582,24**

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Wilayah kecamatan yang mempunyai kelerengan rendah (datar/landai) antara lain Kecamatan Cepu, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Kunduran. Ketiga kecamatan ini mempunyai kesesuaian untuk berbagai kegiatan budidaya, seperti pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa dengan tetap mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Jiken dan Kecamatan Todanan mempunyai luas wilayah dengan kelerengan tinggi (40%) cukup besar. Sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam melakukan kegiatan di kawasan tersebut. Pengendalian dan pemantauan yang ketat dalam pengembangan kawasan terbangun melalui pembatasan intensitas bangunan. Untuk itu, perlu diterapkan prosedur pengendalian dalam perizinan pendirian bangunan yang berada pada wilayah dengan kelerengan yang tinggi. Selain itu, untuk wilayah dengan kelerengan tinggi perlu ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kabupaten Blora memiliki bentang alam perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga lebih dari 400 mdpl. Secara formasi geologis, bagian utara Kabupaten Blora adalah kawasan perbukitan yang

merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara. Selain itu, bagian selatan Kabupaten Blora juga merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng yang merupakan pegunungan kapur mulai dari sebelah timur Kota Semarang hingga Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Ibukota Kabupaten Blora berlokasi di Kecamatan Blora, yang berada pada cekungan Pegunungan Kapur Utara. Secara spasial, formasi geologi Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar II.4.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

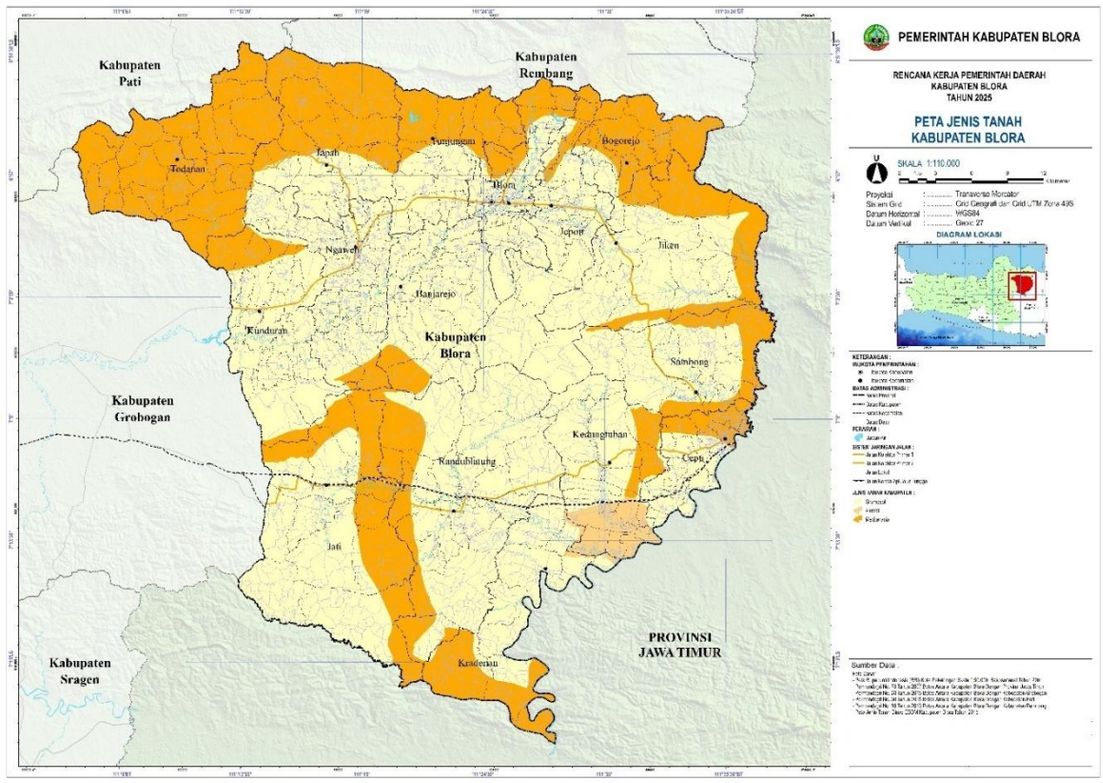
Gambar II.4

Peta Struktur Geologi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora memiliki formasi geologi berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yang menyebabkan masalah utama dalam ketersediaan sumber air baku untuk berbagai kegiatan. Sebagian besar wilayah ini menghadapi krisis air, baik untuk kebutuhan minum maupun irigasi, terutama selama musim kemarau, khususnya di daerah pegunungan kapur. Sebaliknya, pada musim hujan, beberapa kawasan rawan mengalami banjir dan longsor. Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi bencana guna mengantisipasi kemungkinan peningkatan intensitas bencana di masa depan.

Kabupaten Blora juga memiliki kawasan karst, bagian dari Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, yang mencakup sekitar 753 hektar di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Di kawasan karst ini, perlu ada pembatasan kegiatan yang dapat merusak atau mengubah fungsi lindungnya.

Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Blora didominasi oleh grumosol (56%) dan mediteran (39%). Sisanya berupa tanah aluvial dengan persentase sebesar 5%. Gambar II.5 di bawah menunjukkan Peta Jenis Tanah Kabupaten Blora.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.5

Peta Jenis Tanah Kabupaten Blora

Tanah grumusol memiliki tingkat produktivitas sedang dan dimanfaatkan untuk pertanian serta perkebunan. Warna tanah ini berkisar dari kelabu hingga hitam. Jenis tanah ini tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Blora. Namun, karena porositasnya yang tinggi, tanah grumusol cenderung rawan kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien. Salah satu wilayah dengan tanah grumusol adalah Kecamatan Jati. Setiap musim kemarau, wilayah ini sering kekurangan air bersih, sehingga

pengiriman air bersih (*dropping*) sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sementara itu, tanah mediteran memiliki tingkat produktivitas yang berkisar dari sedang hingga tinggi. Tanah ini dimanfaatkan untuk sawah, tegalan, perkebunan, dan kehutanan. Berwarna merah kecokelatan, tanah mediteran banyak ditemukan di wilayah dengan ketinggian sedang hingga tinggi, yang mencakup sebagian besar kecamatan di Kabupaten Blora.

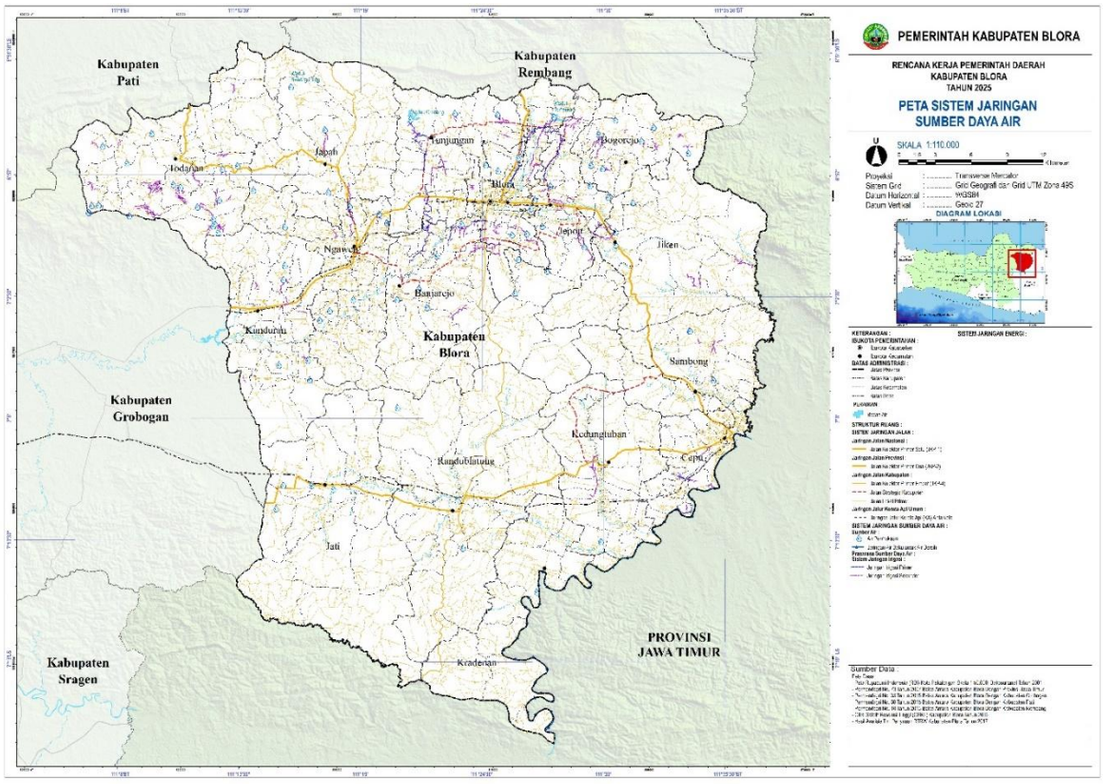
2.1.1.3 Hidrologi

Data hidrologi berperan penting dalam menginventarisasi potensi sumber daya air, mengelola pemanfaatannya secara tepat, dan merehabilitasi sumber daya alam seperti air, tanah, serta hutan yang telah mengalami kerusakan. Informasi tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi acuan untuk mengidentifikasi wilayah dengan potensi pengembangan, terutama yang didukung oleh ketersediaan air baku dan irigasi dari sungai. Selain itu, data ini juga digunakan untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap banjir karena kedekatannya dengan sungai.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041, sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Blora meliputi sebagian Wilayah Sungai Jratun Seluna sebagai wilayah sungai strategis nasional dan sebagian Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo sebagai wilayah sungai lintas provinsi. WS Jratun Seluna di Kabupaten Blora terdiri atas sebagian dari DAS Serang-Lusi; sebagian dari DAS Juwana; sebagian dari DAS Gede Klete; sebagian dari DAS Cepluk; sebagian dari DAS Randugunting; dan sebagian dari DAS Widodaren. Sedangkan WS Bengawan Solo meliputi sebagian dari DAS Bengawan Solo.

Sub DAS Lusi merupakan daerah aliran sungai terbesar yang melintasi Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Jiken, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan bagian selatan. Sementaraitu, DAS Bengawan Solo yang berada di wilayah Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu dan Kecamatan Sambong.

Gambar II.6 di bawah ini menunjukkan peta sebaran jaringan sumber daya air di Kabupaten Blora.

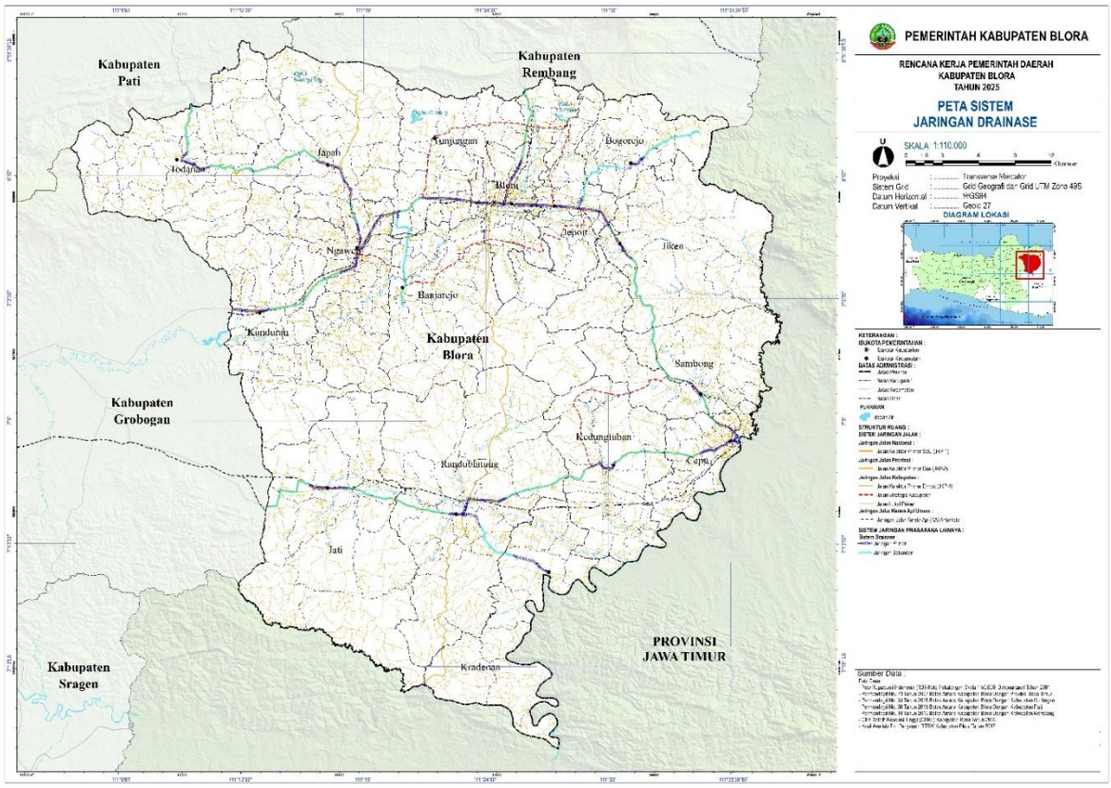


Sumber: *RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041*

Gambar II.6

Peta Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Blora

Jaringan sumber daya air di Kabupaten Blora berupa air permukaan, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan irigasi, baik jaringan irigasi primer maupun jaringan irigasi sekunder. Sedangkan sistem jaringan drainase di Kabupaten Blora sudah terkoneksi dengan sungai sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.7 di bawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.7

Peta Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai di Kabupaten Blora

Drainase adalah jaringan saluran yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air, baik yang berasal dari hujan maupun luapan sungai, terutama di wilayah permukiman. Sistem ini sangat penting di kawasan berpenghuni karena membantu mencegah berbagai masalah, seperti:

1. **Banjir** yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur.
2. **Kenaikan permukaan air tanah** yang bisa menyebabkan genangan di area tertentu.
3. **Erosi tanah** yang dapat mengganggu kestabilan tanah di sekitar bangunan.
4. **Kerusakan jalan dan bangunan** akibat genangan air yang tidak terkelola.

Sistem drainase yang baik harus dirancang secara terhubung dan saling mendukung antar saluran, sehingga air dapat mengalir secara efektif menuju sungai atau tempat pembuangan akhir. Hal ini memastikan air tidak tersumbat dan mengurangi risiko masalah selama musim hujan.

2.1.1.4 Klimatologi

Kabupaten Blora memiliki iklim tropis dengan bulan hujan umumnya lebih banyak dibandingkan bulan kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung antara Bulan Oktober sampai April, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung antara Bulan Mei sampai September.

Dalam lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi ada di tahun 2021 dengan total curah hujan sebesar 2.126 mm/tahun dan Kembali menurun di tahun 2022 menjadi 1.582 mm/tahun. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah curah hujan kembali turun dengan angka sebesar 1.479 mm/tahun. Pada tahun 2024 jumlah curah hujan meningkat kembali menjadi 1.503 mm/tahun. Bulan November hingga April pada setiap tahunnya merupakan periode bulan dengan curah hujan tertinggi. Tabel II.5 menyajikan secara detail data jumlah curah hujan per bulan di Kabupaten Blora pada periode 2020–2024.

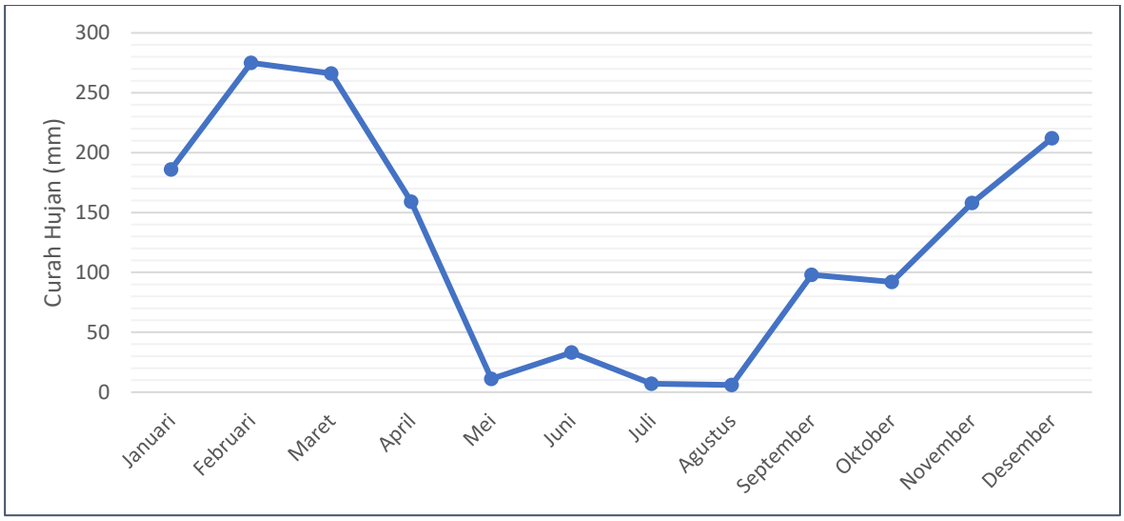
Tabel II.5

Jumlah Curah Hujan per Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Januari	205	509	294	242	186
2.	Februari	246	261	275	185	275
3.	Maret	128	479	187	262	266
4.	April	182	134	136	176	159
5.	Mei	61	62	86	59	11
6.	Juni	0	0	61	64	33
7.	Juli	24	0,3	33	0	7
8.	Agustus	39	39	21	12	6
9.	September	31	58	36	12	98
10.	Oktober	98	82	80	10	92
11.	November	179	297	149	160	158
12.	Desember	245	202	224	298	212
Total		**1.431**	**2.126**	**1.582**	**1.479**	**1.503**

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2021–2025 (diolah)

Siklus curah hujan di setiap tahunnya hampir seragam, di mana dalam bulan Januari curah hujan tinggi dan berangsur turun di bulan Juli kemudian berangsur naik sampai bulan Desember. Siklus tahunan curah hujan seperti tergambar dalam grafik berikut ini.



Gambar II.8

Grafik Curah Hujan Kabupaten Blora Tahun 2024

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

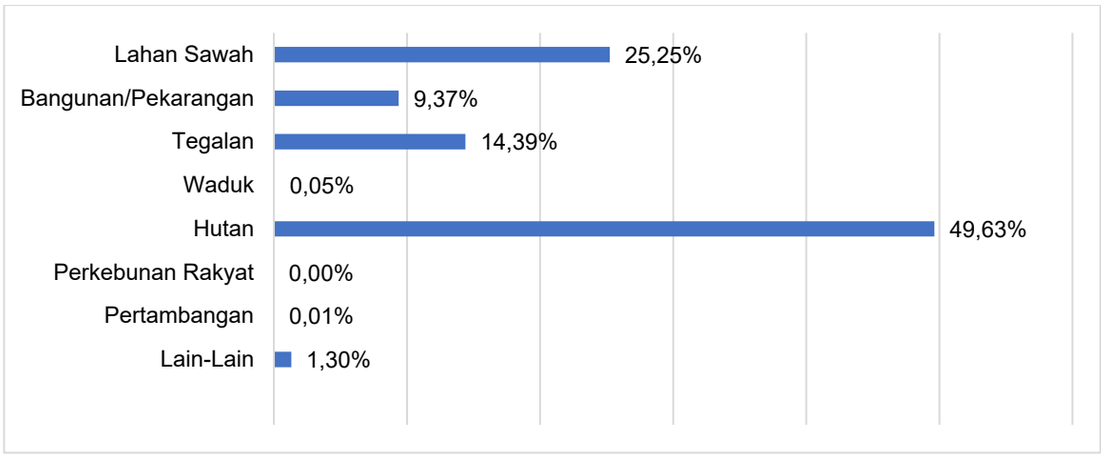
Penggunaan lahan di Kabupaten Blora terbagi menjadi delapan jenis di mana lahan hutan mendominasi dengan luas 90.416,12 hektare, atau 49,63% dari total wilayah. Lahan sawah menempati posisi kedua dengan luas 45.948,19 hektare, atau 25,23%. Lahan bangunan atau pekarangan berada di urutan ketiga, mencakup 17.049,32 hektare, atau 9,36%. Lahan tegalan menyusul dengan kontribusi sebesar 14,38%, sedangkan lahan waduk hanya mencakup 0,05%, sedangkan perkebunan rakyat tidak memberikan kontribusi terhadap penggunaan lahan. Sementara itu, lahan pertambangan hanya mencakup 0,01% dan kategori penggunaan lainnya sebesar 1,3%.

Tabel II.6

Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lahan Sawah	45.885,16	45.885,16	45.948,19	45.948,19	45.948,19
2	Bangunan/Pekarangan	17.156,16	17.156,16	17.049,32	17.049,32	17.049,32
3	Tegalan	26.144,58	26.153,13	26.188,37	26.188,37	26.188,37
4	Waduk	56,96	89,36	89,36	89,36	89,36
5	Hutan	90.416,52	90.416,52	90.416,12	90.416,15	90.416,15
6	Perkebunan Rakyat	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	Pertambangan	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
8	Lain-Lain	2.373,82	2.426,25	2.373,82	2.373,82	2.373,82

Sumber : Satu Data Blora 2024

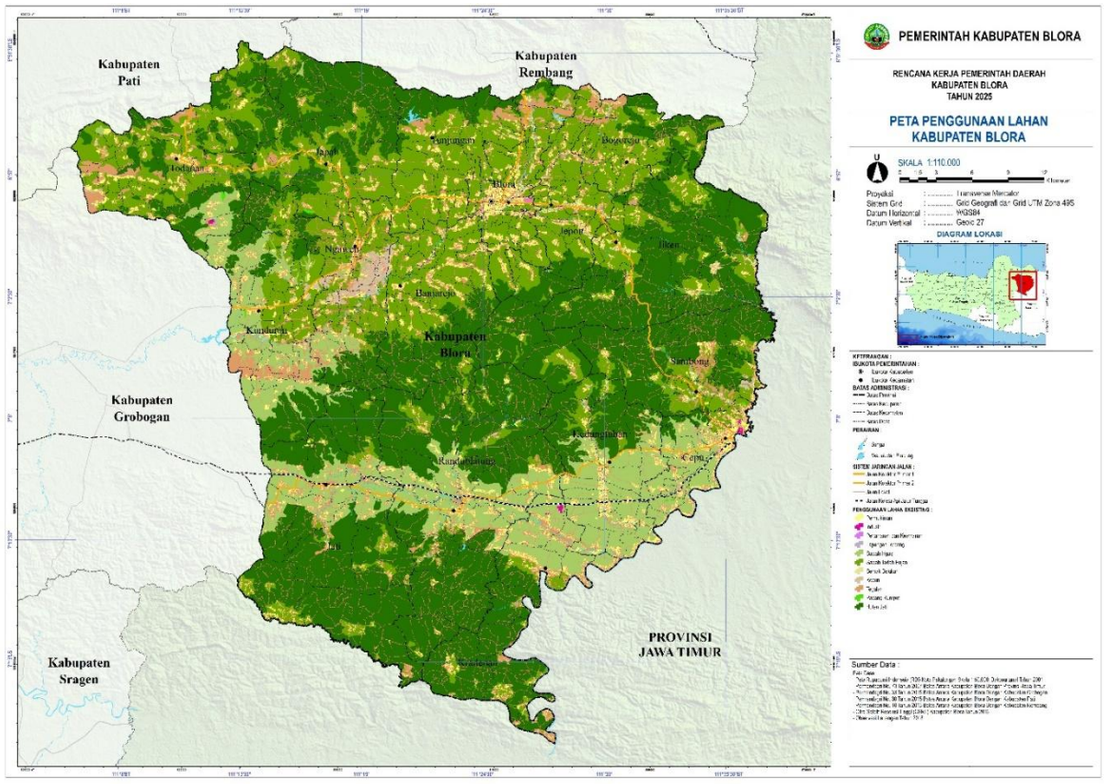


Sumber : Satu Data Blora 2024

Gambar II.9

Grafik Kontribusi Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2024

Untuk menunjukkan dominasi penggunaan lahan berupa hutan dan sawah, Gambar II.10 memperlihatkan Peta penggunaan lahan di Kabupaten Blora.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.10

Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Pemerataan pembangunan masih menjadi prioritas utama dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Blora. Upaya pengembangan ekonomi berdasarkan potensi wilayah dilakukan secara merata dengan memastikan keselarasan, integrasi, dan sinergi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Blora.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 Kabupaten Blora masuk dalam Wilayah Pengembangan Rembang-Blora (WP Banglor) dengan arahan pengembangan wilayahnya sebagai berikut:

1. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
2. mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai Pusat Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Skala Internasional;
3. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi PKW;
4. mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang;
6. mengembangkan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai;
7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
8. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan
9. menerpadukan pembangunan Wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Pengembangan wilayah Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041 diarahkan pada:

1. pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem;
2. pengembangan wilayah berbasis wanatani;
3. pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan;
4. penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan;

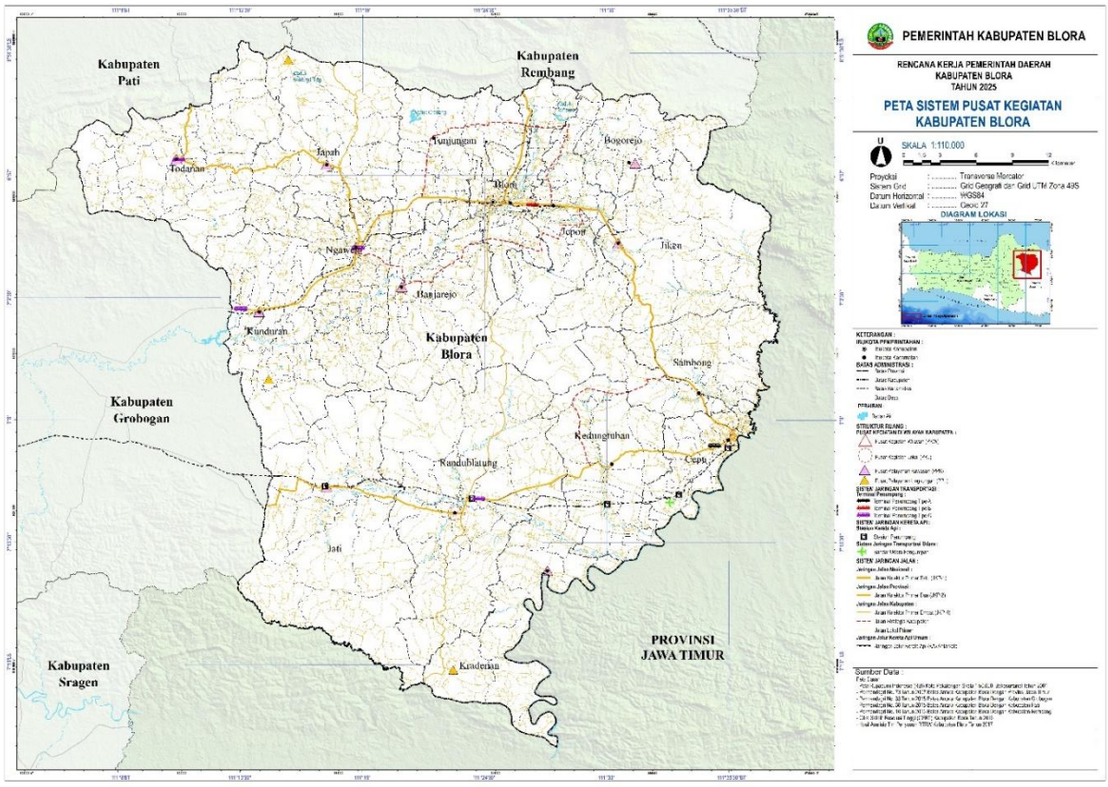
5. pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
6. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
7. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; dan
8. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis.

Upaya optimalisasi pengembangan wilayah di Kabupaten Blora dicapai dengan menetapkan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pengendalian terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

2.1.1.6.1 Sistem Pusat Permukiman

Berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, sistem pusat kegiatan di Kabupaten Blora sebagaimana Gambar II.11 antara lain:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kawasan Perkotaan Cepu, yang mencakup Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong dan Kecamatan Kedungtuban;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kawasan Perkotaan Blora, yang mencakup Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon dan Kecamatan Tunjungan;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kawasan Perkotaan Randublatung, yang mencakup Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Jati;
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi:
    a. Kawasan Perkotaan Kunduran;
    b. Kawasan Perkotaan Todanan;
    c. Kawasan Perkotaan Banjarejo;
    d. Kawasan Perkotaan Japah;
    e. Kawasan Perkotaan Bogorejo;
    f. Kawasan Perkotaan Jiken;
    g. Kawasan Perkotaan Ngawen.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.11

Peta Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Blora

Beberapa strategi yang telah ditempuh pada RTRW 2021–2041 untuk memastikan perwujudan struktur ruang antara lain:

1. membagi wilayah fungsional kabupaten Blora berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi;
2. mengembangkan pusat pelayanan baru;
3. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai pusat kegiatan;
4. mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa;
5. mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian, kawasan rawan bencana dan daya dukung lahan; dan
6. merencanakan Kawasan Strategis Kabupaten Blora.

2.1.1.6.2 Rencana Pola Ruang

Selain struktur ruang, potensi pengembangan wilayah juga dipengaruhi oleh pola ruang. Secara umum, rencana pola ruang di Kabupaten Blora terbagi menjadi dua kategori, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang sudah terbangun didominasi oleh permukiman, sementara kawasan budidaya yang belum terbangun didominasi oleh hutan dan lahan pertanian. Kegiatan pembangunan di

Kabupaten Blora berkaitan erat dengan kondisi penggunaan lahan, baik yang digunakan untuk kegiatan terbangun maupun non-terbangun.

2.1.1.6.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Blora yang terbesar berupa Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu 25.668 hektar. Di mana yang terluas adalah CAT Randublatung disusul CAT Semarang-Demak dan yang terkecil CAT Watuputih. Kawasan lindung berikutnya adalah kawasan lindung geologi yang berupa kawasan lindung karst. Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang berada di wilayah Kabupaten Blora terdapat di Kecamatan Todanan dan sebagian kecil di Kecamatan Kunduran. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu juga terdapat cagar alam (Cabak I/II dan Bekutuk) yang mempunyai peran strategis dalam sisi lingkungan hidup. Tabel II.7 menunjukkan luas dan sebaran kawasan lindung di Kabupaten Blora sesuai RTRW Kabupaten Blora 2021–2041.

Tabel II.7
Kawasan Lindung di Kabupaten Blora

No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Lokasi
1.	Hutan lindung	6	Kec. Kradenan
2.	Resapan air	355	Kec. Jiken, Kec. Sambong dan Kec. Todanan
3.	Sempadan sungai	1.050	16 Kec. di Kabupaten Blora
4.	Sempadan/sekitar waduk/embung	179	16 Kec. di Kabupaten Blora
5.	Cagar alam (CA Cabak I/II dan CA Bekutuk)	56	Kec. Jiken dan Kec. Randublatung
6.	Cagar alam geologi (karst Sukolilo)	1.648	Kec. Todanan dan Kec. Kunduran
7.	Imbuhan air tanah/cekungan air tanah (CAT)	1.496	Cekungan Watuputih di Kec. Blora, Kec. Jepon dan Kec. Bogorejo
		2.489	Cekungan Semarang-Demak di Kec. Kunduran dan Kec. Ngawen
		21.683	Cekungan Randublatung di Kec Cepu, Kec. Kedungtuban, Kec. Kradenan, Kec. Randublatung dan Kec. Jati

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

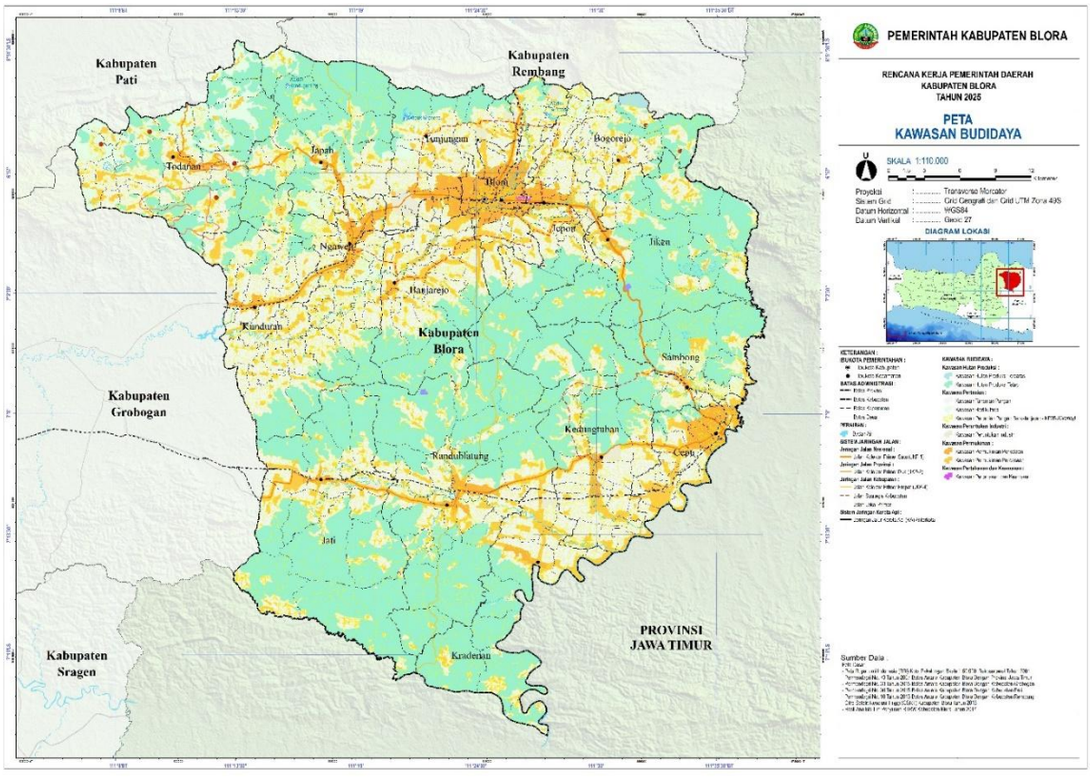
Kawasan lindung berfungsi sebagai pembatas bagi pembangunan, dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan pengembangan wilayah. Di daerah yang

memiliki kawasan lindung luas, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam proses perizinan pembangunan. Hal ini untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan pembangunan tidak merusak kawasan lindung. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif atau dukungan kepada pengembang yang menjalankan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, agar mereka tetap bisa berkontribusi pada perekonomian tanpa merusak alam

2.1.1.6.2.2 Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan di kawasan budidaya di Kabupaten Blora mayoritas digunakan untuk permukiman dan pertanian. Dengan dominasi kedua jenis penggunaan lahan ini, dapat dilihat bahwa ekonomi Kabupaten Blora sangat bergantung pada kebutuhan hunian dan pengelolaan lahan untuk pertanian.

Peta sebaran kawasan budidaya secara lengkap tersaji dalam Gambar II.12 berikut:



Sumber: *RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041*

Gambar II.12

Peta Kawasan Budidaya di Kabupaten Blora

Peruntukan permukiman terkonsentrasi pada Kecamatan Cepu, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Kunduran. Sementara itu, lahan sawah tersebar di wilayah Kabupaten Blora dengan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebesar 48.967 hektar. Keberadaan LP2B merupakan potensi pengembangan pertanian yang kuat untuk mendorong produktivitas ekonomi. Hal ini menjadi penting karena kapasitas ruang pengembangan Kabupaten Blora yang rentan bila dilihat dari data kondisi wilayah dari aspek geologi, topografi dan kerawanan bencana. Tabel II.8 di bawah ini menunjukkan sebaran kawasan budidaya berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Blora.

Tabel II.8

Kawasan Budidaya yang Ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blora

No.	Jenis Kawasan budidaya	Luas (ha)	Lokasi
1.	**Kawasan pertanian**		
1.1.	Tanaman pangan	65.675	16 Kec. Di Kab. Blora*
1.2.	Hortikultura	6.747	16 Kec. Di Kab Blora*
2.	**Kawasan peruntukan industri**	1.224	11 Kec. di Kab. Blora*
3.	**Kawasan peruntukan permukiman**		
3.1.	Permukiman perkotaan	8.751	16 Kec. Di Kab Blora*
3.2.	Permukiman perdesaan	17.080	16 Kec. Di Kab Blora*
4.	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	45	16 Kec. Di Kab Blora
5.	**Kawasan Hutan Produksi**		
5.1	Hutan Produksi Terbatas	270,20	Kec. Bogorejo
5.2	Hutan Produksi Tetap	90.404,48	16 Kec. di Kab Blora

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Dominasi pertanian di Kabupaten Blora menjadi salah satu potensi utama perekonomian yang terus dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan, baik di tingkat lokal maupun untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, bersarnya luas tanah kering yang cukup signifikan membuka peluang pengembangan berbagai aktivitas ekonomi yang memiliki dampak lebih luas, seperti sektor perdagangan, perhotelan, restoran, industri pengolahan produk pertanian, wisata kuliner, wisata alam, serta wisata religi. Namun, dalam mengembangkan aktivitas yang membangun, sangat penting untuk tetap memperhatikan kapasitas lingkungan agar pengembangan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak alam.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Di Kabupaten Blora, jenis bencana yang sering terjadi adalah longsor (gerakan tanah), banjir, dan kekeringan.

Bencana longsor merupakan konsekuensi dari kondisi bentang alam Kabupaten Blora yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan karakteristik topografi, sekitar sepertiga wilayah Kabupaten Blora memiliki kemiringan lereng yang berkisar antara 16% hingga lebih dari 40% terutama di sekitar pegunungan Kendeng, sehingga menjadikan wilayah ini rawan terhadap bencana longsor. Bencana banjir sering terjadi sebagai dampak dari kondisi geologi Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur. Pegunungan ini memiliki tingkat porositas tinggi, sehingga tidak mampu menahan air secara memadai. Akibatnya, pada musim penghujan, air dengan cepat mengalir ke wilayah dataran rendah, seperti di Kecamatan Cepu dan dataran cekungan di Kecamatan Blora, yang menjadi kawasan rawan banjir.

Bencana kekeringan juga menjadi ancaman utama di Kabupaten Blora, terutama selama musim kemarau. Karakteristik Pegunungan Kapur, yang tidak mampu menyimpan air dalam jumlah besar, memperparah risiko kekeringan. Wilayah kecamatan yang berada jauh dari aliran sungai menjadi daerah yang paling terdampak oleh kekeringan.

Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Blora antara lain kekeringan, angin kencang, tanah longsor, dan banjir. Kejadian bencana kekeringan hampir terjadi di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Todanan. Untuk bencana banjir kejadian yang intensitasnya tinggi berada di Kecamatan Cepu yang merupakan wilayah yang dilalui sungai bengawan solo. Disusul Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, dan Kecamatan Jepon yang merupakan daerah hulu sungai Lusi. Tabel II.9 di bawah menunjukkan jumlah dan lokasi bencana alam yang terjadi pada rentang waktu 2020–2024.

Tabel II.9

Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Bencana Alam	Jumlah Kejadian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Longsor	15	9	22	12	31
2.	Banjir	13	9	13	5	21
3.	Kekeringan	0	171	145	185	196
4.	Gempa	0	0	0	0	0
5.	Angin puting beliung	12	17	31	18	56
6.	Kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	2	18
7.	Kegagalan teknologi	0	0	0	0	0

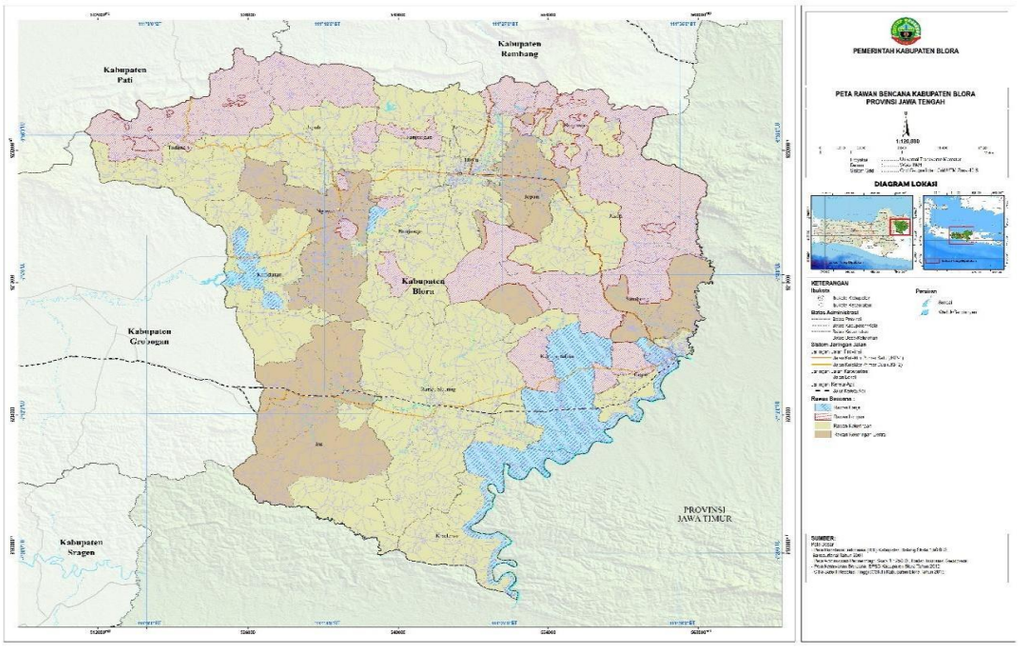
Sumber: Satu Data Blora, 2024

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021–2041, terdapat wilayah rawan bencana banjir yang meliputi:

1. Kawasan sekitar DAS Lusi, yang meliputi Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Japah, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kunduran.
2. Wilayah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dan cekungan Randublatung, yang meliputi Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Jati.
3. Wilayah yang rawan bencana tanah longsor berada di Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Japah, dan Kecamatan Todanan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng Utara.

Selain itu, Kabupaten Blora juga memiliki potensi bencana gempa bumi, yang tersebar di Kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Blora, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtu ban, dan Kecamatan Kradenan.

Gambar II.12 di bawah ini menujukan sebaran area kerawanan bencana alam di Kabupaten Blora disajikan dalam dokumen RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041.



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Gambar II.13

Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora

Dengan demikian, upaya mitigasi bencana alam merupakan prioritas penting, terutama untuk menghadapi bencana alam yang dapat diprediksi seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, pengembangan kegiatan ekonomi dan penyediaan layanan publik yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, agar kondisi pembangunan yang ada tetap terjaga dan tidak semakin memburuk.

2.1.1.8 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Blora pada tahun 2024 sebanyak 907.993 jiwa dengan rincian sebanyak 454.063 jiwa penduduk laki-laki dan 453.930 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 50,07 persen laki-laki dan 49,99 persen perempuan atau hampir seimbang, sehingga kebutuhan untuk penyediaan layanan yang setara semakin besar. Pemahaman mengenai rasio jenis kelamin akan memberikan dasar untuk menyusun perencanaan berbasis gender dalam rangka memastikan pembangunan yang lebih setara.

Tabel II.10

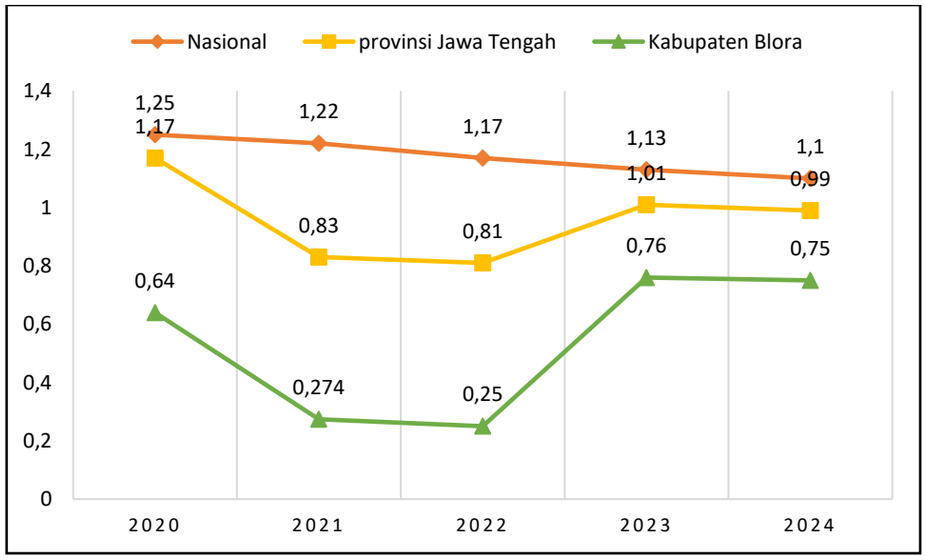
Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jati	215,38	49.143	49.340	49.507	50.398	50.852
2	Randublatung	235,92	77.649	77.692	77.687	78.813	79.250
3	Kradenan	112,04	41.062	41.125	41.163	41.800	42.074
4	Kedungtuban	108,45	57.447	57.531	57.578	58.465	58.842
5	Cepu	49,04	76.370	76.474	76.530	77.702	78.197
6	Sambong	102,68	27.659	27.823	27.970	28.527	28.839
7	Jiken	165,40	38.374	38.314	38.415	38.701	38.833
8	Bogorejo	60,82	24.805	24.827	24.834	25.202	25.350
9	Jepon	119,19	62.824	62.952	63.040	64.049	64.500
10	Blora	72,33	93.779	93.691	94.175	94.762	95.148
11	Banjarejo	110,64	62.152	62.426	62.661	63.813	64.414
12	Tunjungan	89,36	47.981	48.098	48.185	48.975	49.340
13	Japah	129,23	35.310	35.362	35.392	35.937	36.170
14	Ngawen	104,86	60.559	60.773	60.948	62.015	62.545
15	Kunduran	124,72	66.189	66.337	66.443	67.519	68.007
16	Todanan	155,77	63.030	63.382	63.696	64.943	65.632
Jumlah		**1.955,82**	**884.333**	**886.147**	**888.224**	**901.621**	**907.993**

Sumber: Satu Data Blora 2024 dan RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Rerata pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 sebesar 0,75 persen per tahun, sedangkan rerata pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar di angka 0,67 per tahun per tahun dan Nasional sebesar 1,1 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia secara keseluruhan.

Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Sumber: Satu Data Blora 2024

Gambar II.14

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tabel II.11

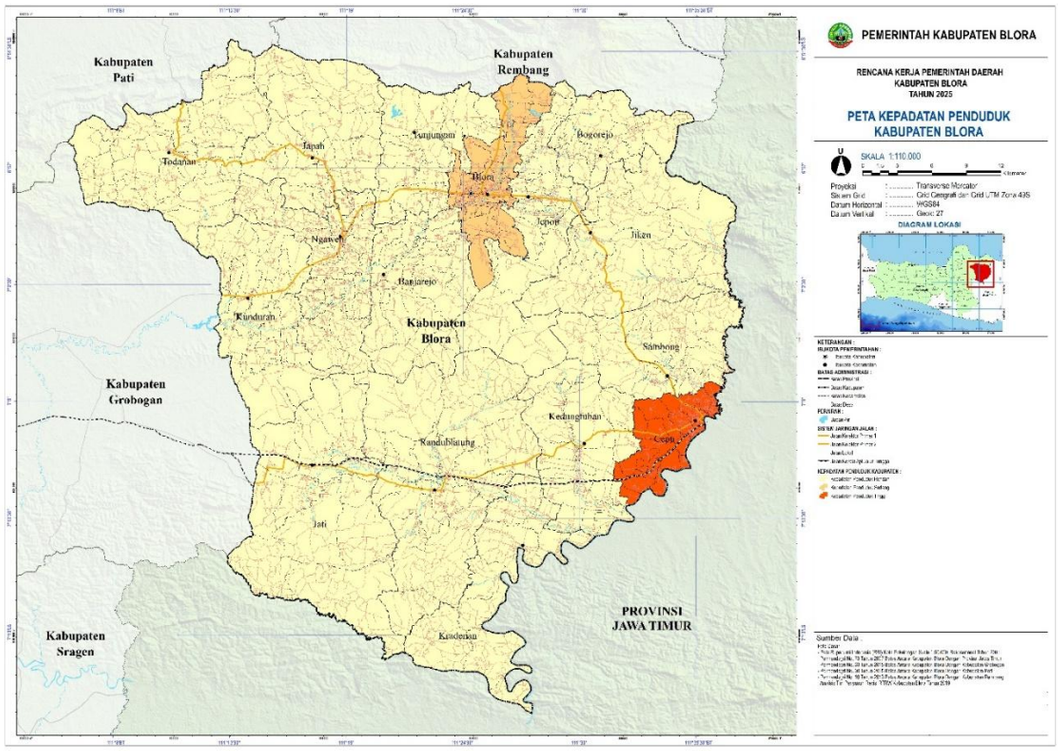
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jati	215,38	228,2	229,1	229,9	234	236
2	Randublatung	235,92	329,1	329,3	329,3	334	336
3	Kradenan	112,04	366,5	367,1	367,4	373	376
4	Kedungtuban	108,45	529,7	530,5	530,9	539	543
5	**Cepu**	**49,04**	**1.557,3**	**1559,4**	**1560,6**	**1.584**	**1.595**
6	Sambong	102,68	269,4	271,0	272,4	278	281
7	Jiken	165,40	232,0	231,6	232,3	234	235
8	Bogorejo	60,82	407,8	408,2	408,3	414	417
9	Jepon	119,19	527,1	528,2	528,9	537	541
10	**Blora**	**72,33**	**1.296,5**	**1295,3**	**1302,0**	**1.310**	**1.315**
11	Banjarejo	110,64	561,7	564,2	566,4	577	582
12	Tunjungan	89,36	536,9	538,2	539,2	548	552
13	Japah	129,23	273,2	273,6	273,9	278	280
14	Ngawen	104,86	577,5	579,6	581,2	591	596
15	Kunduran	124,72	530,7	531,9	532,7	541	545
16	Todanan	155,77	404,6	406,9	408,9	417	421
Jumlah		**1.955,82**	**452,2**	**453,1**	**454,1**	**461**	**464**

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2023 dan RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Kepadatan penduduk jika dilihat per wilayah paling tinggi pada berada di Kecamatan Cepu yaitu sebesar 1.559 jiwa per km^2 dan penduduk dengan kepadatan terendah di Kecamatan Jiken yaitu 235 jiwa per km^2 sebagaimana Tabel II.10 di atas.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Blora terkonsentrasi di Kecamatan Cepu, yang merupakan pusat pengembangan wilayah, karena di kawasan ini terdapat berbagai fasilitas ekonomi dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan daerah. Selain itu, Kecamatan Blora juga menjadi lokasi utama bagi kegiatan pemerintahan kabupaten, menjadikannya pusat administratif dan pelayanan publik. Konsentrasi penduduk yang tinggi di kedua kecamatan ini menunjukkan peran pentingnya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Blora. Tingkat kepadatan penduduk apabila digambarkan dalam bentuk peta tersaji pada Gambar II.15 di bawah.



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Gambar II.15

Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora

Pemahaman tentang struktur penduduk menurut kelompok umur sangat penting untuk perencanaan sektor produktif dengan lebih tepat. Dengan memahami proporsi jumlah penduduk berdasarkan usia, perencanaan dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa beban

ketergantungan yang ditimbulkan oleh kelompok umur non-produktif (seperti anak-anak dan lansia) dapat ditanggung oleh kelompok umur produktif (yaitu penduduk usia kerja). Selain itu, pemahaman ini juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yakni pembangunan yang tidak hanya fokus pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan hak dan kesejahteraan kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, pemuda, dan lansia, agar mereka mendapatkan akses yang setara terhadap kesempatan, perlindungan, dan pelayanan yang dibutuhkan. Informasi mengenai jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Blora antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel II.12 berikut.

Tabel II.12

Jumlah Penduduk menurut Umur di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
0-4	52.260	51.405	51.642	61.955	64.603
5-9	59.267	62.554	60.098	51.452	49.942
10-14	63.791	68.401	67.675	61.469	60.613
15-19	68.364	68.216	66.083	65.758	64.632
20-24	66.468	70.978	70.109	68.034	68.332
25-29	65.296	67.317	65.896	65.737	66.141
30-34	66.351	65.390	63.674	65.533	65.330
35-39	65.826	70.469	66.018	65.720	65.911
40-44	68.332	73.390	71.869	66.512	65.750
45-49	64.253	66.925	64.840	66.508	67.180
50-54	61.990	64.242	64.660	62.266	62.481
55-59	56.855	61.707	60.455	58.994	59.458
60-64	46.821	53.094	51.770	51.187	52.517
65-69	35.400	38.775	36.073	39.910	41.216
70-75	20.154	24.680	22.568	26.363	28.375
75 +	22.905	39.451	27.818	24.223	25.512

Sumber: Satu Data Blora

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembahasan mengenai aspek kesejahteraan masyarakat dibagi ke dalam 2 bagian yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta fokus kesejahteraan sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial. Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniahnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencitakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Pemerataan ekonomi adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan. Pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan meratakan distribusi sumber lahan dan faktor produksi. Pemerataan ekonomi juga dapat dicapai dengan meratakan peran dan kesempatan perempuan.

Di Kabupaten Blora Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto, PDRB per Kapita, Laju Inflasi, Ketimpangan dan Tingkat Kemiskinan. Adapun Indikator Utama Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora diukur dengan Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, Jumlah tamu wisatawan mancanegara, Rasio kewirausahaan daerah, Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, Return on Asset (ROA) BUMD, Disparitas harga, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Dalam memahami dinamika ekonomi wilayah Kabupaten Blora, pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan indikator produksi. Dengan menghitung kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu lima tahun, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Blora. Pertumbuhan ekonomi Blora dalam konstelasi regional disajikan pada Tabel II.13 berikut ini.

Tabel II.13
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020–2024

No.	Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
1.	Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	**5,03**
2.	Provinsi Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	4,97	4,95
3.	**Kabupaten Blora**	**-4,56**	**3,68**	**2,66**	**3,10**	3,06
4.	Kabupaten Rembang	-1,49	3,85	5,55	5,20	5,08
5.	Kabupaten Pati	-1,15	3,38	5,56	5,02	5,13
6.	Kabupaten Grobogan	-1,57	3,78	5,98	4,98	5,41
7.	Kabupaten Jepara	-1,94	4,63	5,95	5,17	4,22
8.	Kabupaten Kudus	-3,53	-1,54	2,21	2,19	2,78

Sumber: Blora Dalam Angka dan Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2020-2025, diolah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora menunjukkan tren fluktuatif. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020, mencapai 8,61 persen, bahkan mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 8,24 persen, namun kembali mengalami penurunan sebesar 1,02 persen pada tahun 2022. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tahun 2024 menunjukkan kembalinya ada penurunan dari 2023. Meskipun cukup fluktuatif, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora masih relatif rendah dibandingkan daerah sekitarnya.

Sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora perlu didorong sehingga akan menarik pergerakan pada sektor pendukung. Upaya promosi investasi dan penciptaan kondusivitas wilayah ramah investasi memegang peranan penting di samping penyediaan kawasan peruntukan industri beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Lembaga Pendidikan dan pelatihan mesti menyediakan materi yang sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga ketersediaan tenaga kerja terampil dan tanggap terhadap perkembangan pasar tenaga kerja yang dinamis dapat dipenuhi. Untuk melihat Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.14 berikut ini.

Tabel II.14
Perkembangan dan Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha	PDRB ADHB (dalam juta Rp.)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.840.315,29	6.025.868,51	6.440.056,29	6.809.777,47	7.029.160
B	Pertambangan dan Penggalian	4.527.615,56	6.522.083,39	8.489.280,24	7.451.135,41	7.225.040
C	Industri Pengolahan	2.601.491,16	2.755.105,29	3.029.837,50	3.334.702,20	3.627.270
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.968,80	16.605,70	17.599,58	18.728,56	22.010
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.410,63	9.840,63	10.272,72	11.170,81	12.640
F	Konstruksi	1.027.340,37	1.167.743,60	1.353.189,88	1.480.977,54	1.621.390
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.914.254,05	4.165.784,47	4.518.245,26	4.888.097,21	5.309.250
H	Transportasi dan Pergudangan	537.932,91	569.691,64	918.815,78	1.084.073,63	1.1171.560
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850.276,03	926.366,07	1.110.943,87	1.240.485,50	1.364.450
J	Informasi dan Komunikasi	327.052,25	340.758,26	351.106,92	377.827,99	409.970
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	774.173,88	816.985,72	892.851,90	946.046,54	978.670
L	Real Estate	316.484,69	325.077,49	345.617,75	367.316,77	389.860
M,N	Jasa Perusahaan	78.966,34	82.727,85	91.792,83	101.957,93	111.980
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	790.569,53	769.995,11	808.495,23	861.661,44	950.510
P	Jasa Pendidikan	1.618.231,04	1.642.680,67	1.703.905,31	1.814.623,16	1.962.200
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255.595,15	259.519,74	270.921,80	294.857,37	325.770
R,S, T,U	Jasa Lainnya	518.532,38	531.774,33	607.006,07	669.485,86	719.520
	PDRB dengan Migas	**24.004.210,06**	**26.928.608,47**	**30.959.938,93**	**31.752.925,39**	**33.231.250**
	PDRB tanpa Migas	**19.905.864,05**	**20.857.611,19**	**22.960.438,73**	**24.818.486,32**	**26.557.850**
	PDRB Migas	4.098.346,01	6.070.997,28	7.999.500,20	6.934.439,07	**6.673.400**

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Sementara itu, perkembangan distribusi PDRB ADHK di Kabupaten Blora untuk setiap klasifikasi lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,33	22,38	20,80	21,45	21,15
B	Pertambangan dan Penggalian	18,86	24,22	27,42	23,47	21,74
C	Industri Pengolahan	10,84	10,23	9,79	10,50	10,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,28	4,34	4,37	4,66	4,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,31	15,47	14,59	15,39	15,98
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,12	2,97	3,41	3,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,54	3,44	3,59	3,91	4,11
J	Informasi dan Komunikasi	1,36	1,27	1,13	1,19	1,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	3,03	2,88	2,98	2,95
L	Real Estate	1,32	1,21	1,12	1,16	1,17
M, N	Jasa Perusahaan	0,33	0,31	0,30	0,32	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	2,86	2,61	2,71	2,86
P	Jasa Pendidikan	6,74	6,1	5,50	5,71	5,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	0,96	0,88	0,93	0,98
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,16	1,97	1,96	2,11	2,17
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
PDRB tanpa Migas		**82,92**	**77,45**	**74,16**	**78,16**	**79,92**
PDRB Migas		17,08	22,55	25,84	21,84	20,08

Sumber : Satu Data Blora

Kontribusi terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora Tahun 2024 pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Perlu kajian berkaitan nilai tukar petani untuk mengkonfirmasi kondisi ini mengingat tingkat imbal hasil rendah pada sektor pertanian, kehutanan dan peternakan berdampak tidak saja pada ketahanan pangan daerah namun juga ketersediaan tenaga kerja yang berminat untuk memasuki sektor ini rendah padahal sejauh ini masih menjadi sektor utama di Kabupaten Blora. Upaya mendorong tumbuhnya petani milenial mendapatkan tantangan yang kian berat.

Tumbuhnya lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran baik dalam kontribusinya terhadap PDRB maupun laju pertumbuhannya memberikan makna positif bagi berkembangnya sektor

sekunder dan tersier di Kabupaten Blora. Tabel II.16 menunjukkan data laju pertumbuhan lapangan usaha di Kabupaten Blora. Kontribusi industri pengolahan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 10,92 % dari 10,50% di tahun 2023, demikian juga lapangan usaha perdagangan besar dan eceran memberikan peningkatan kontribusi menjadi sebesar 15,98 % sementara tahun 2023 sebesar 15,39%. Iklim investasi yang baik, kemudahan proses perizinan dan kondusivitas wilayah berperan besar untuk menarik minat investor masuk ke Kabupaten Blora untuk mengembangkan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Tabel II.16

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Kode	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,87	2,31	2,51	-0,14	0,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-12,96	5,32	-7,86	-0.62	-3,80
C	Industri Pengolahan	-1,85	3,03	4,52	5,31	5,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,64	4,8	5,22	5,20	8,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,39	3,46	2,98	7,63	7,09
F	Konstruksi	-6,54	9,44	8,32	5,62	8,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,65	4,92	4,19	4,33	6,38
H	Transportasi dan Pergudangan	-21,08	2,32	52,31	8,40	5,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,00	6,65	15,49	10,34	9,22
J	Informasi dan Komunikasi	14,22	4,11	2,78	7,31	7,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,09	0,80	3,43	2,78
L	Real Estate	-0,42	1,56	4,49	5,07	5,24
M,N	Jasa Perusahaan	-5,43	3,27	6,21	6,72	7,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,38	-1,67	2,16	4,19	6,94
P	Jasa Pendidikan	-0,24	0,17	3,17	5,36	5,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	0,38	2,79	6,36	8,47
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-5,03	1,55	9,62	7,54	5,37
	PDRB DENGAN MIGAS	**-4,56**	**3,68**	**2,66**	**3,10**	**3,06**
	PDRB TANPA MIGAS	**-1.57**	**3.19**	**5,93**	**4,07**	**4,85**

Sumber : Satu Data Blora

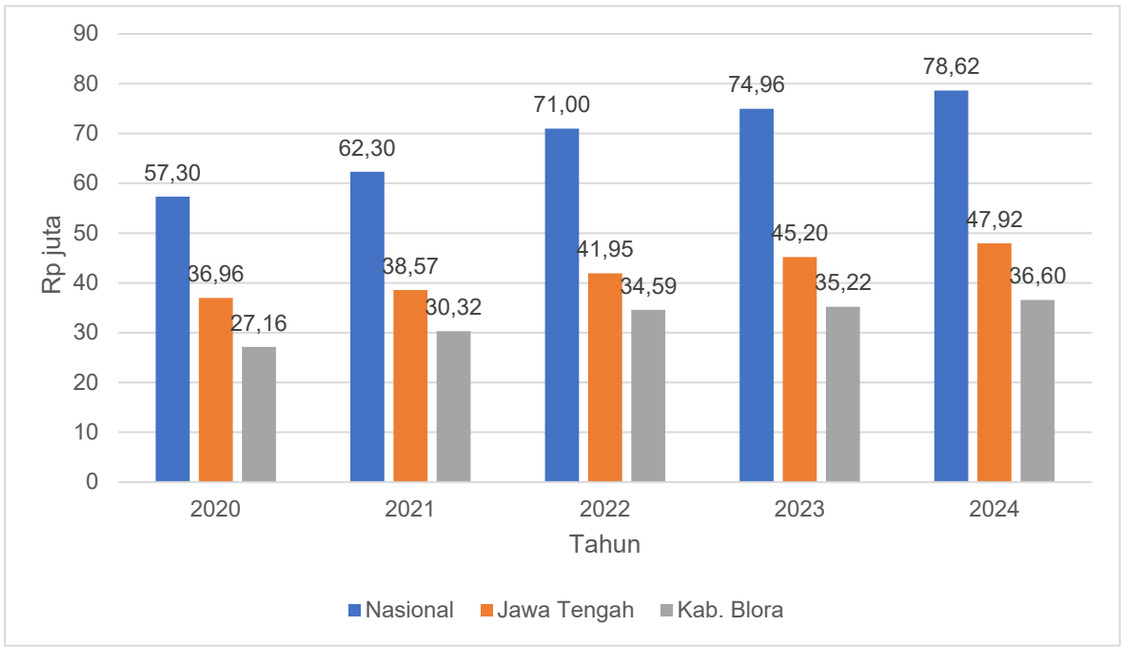
Tahun 2024, ekonomi Kabupaten Blora mengalami penurunan sebesar 3,06 persen dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 3,10 persen. Penurunan Kinerja perekonomian ini dipengaruhi oleh penurunan yang cukup besar pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai salah satu kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora sebesar 3,80 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 0, 62 persen.

Lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik adalah Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,22 persen. Sepanjang tahun 2024, terdapat berbagai acara, baik hiburan maupun keagamaan, sehingga faktor tersebut tumbuh pesat. Sektor informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 7,90 persen. Diharapkan pertumbuhan ini selaras dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas baik dalam kehidupan sosial, menunjang aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan literasi masyarakat maupun dalam kegiatan ekonomi baik untuk menjaring mitra kerja maupun promosi produk-produk unggulan di Kabupaten Blora. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang masif perlu didukung dengan penguatan pendidikan karakter di masyarakat utamanya generasi mudah sehingga tidak mudah terbawa pada arus budaya yang merusak sendi kehidupan bermasyarakat.

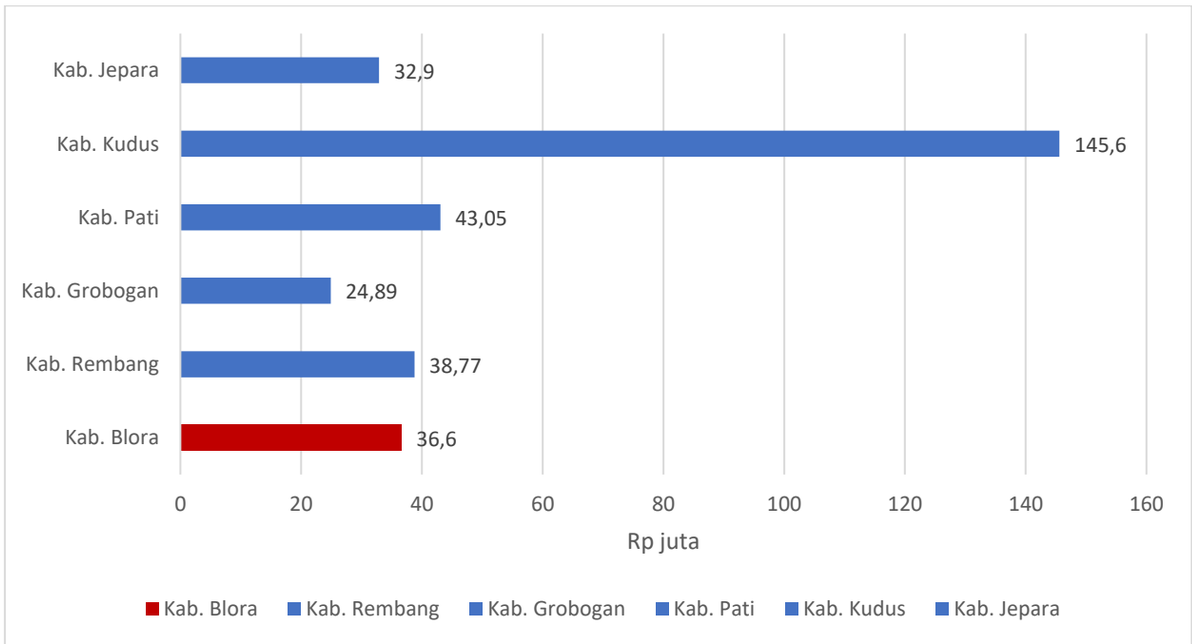
2.1.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, PDRB per kapita Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, dari 27,16 pada tahun 2020 meningkat di tahun 2024 sebesar 36,60. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, PDRB Per kapita Kabupaten Blora masih berada di bawahnya. Tren kenaikan ini menunjukkan stabilitas perekonomian daerah, meskipun masih perlu intervensi Pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PDRB per kapita.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita dipandang sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi riil dalam menjelaskan kondisi wilayah. Deskripsi PDRB menurut pengeluaran untuk *proxy* pendapatan disajikan dalam Gambar II.16 berikut ini.



Gambar II.16
Grafik Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora Tahun 2020-2024



Gambar II.17
Grafik Perbandingan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Blora dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Blora masih di bawah rerata Provinsi Jawa Tengah, namun di atas Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara. Hal ini menandakan kemampuan ekonomi masyarakat Blora masih di bawah rerata wilayah

sekitar. Kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah tercermin dari proporsi pengeluaran makan dan non makanan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangan, Pengeluaran per kapita merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak konsumsi yang dilakukan. Artinya, besarnya nilai pengeluaran menggambarkan daya beli penduduk kabupaten Blora terhadap harga-harga sejumlah komoditas pangan maupun bukan pangan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur yaitu: (1) kondisi rumah tangga baik, apabila pengeluaran non pangan 50%≤; (2) kondisi sedang, jika pengeluaran non pangan di kisaran 20-49%; (3) kondisi buruk, jika pengeluaran non pangan kurang dari 20%.

Tabel II.17

PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Wilayah	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah)														
	Makanan					Bukan Makanan					Jumlah				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
Provinsi Jawa Tengah	496.173	519.009	572.808	608.340	608.340	522.314	529.600	548.986	608.340	608.340	1.018.487	1.048.609	1.121.794	1,209,906	1,209,906
Kabupaten Blora	**467.340**	**500.984**	**562.948**	**573.581**	**573.581**	**434.792**	**407.278**	**450.251**	**520.277**	**520.277**	**902.132**	**908.262**	**1.013.199**	**1,093,858**	**1,093,858**
Kabupaten Grobogan	451.270	440.938	534.845	563.869	563.869	376.907	378.747	421.084	440.427	440.427	828.177	819.685	955.929	1,004,297	1,004,297
Kabupaten Rembang	490.540	554.101	554.101	620.893	620.893	464.023	470.087	489.781	538.670	538.670	954.563	1.024.187	1.139.1999	1,159,563	1,159,563
Kabupaten Pati	509.800	562.729	690.428	695.833	695.833	528.861	544.095	628.613	668.215	668.215	1.038.662	1.106.824	1.319.559	1,364,048	1,364,048
Kabupaten Kudus	491.693	523.244	589.877	631.414	631.414	538.487	582.247	630.529	701.630	701.630	1.030.180	1.105.491	1.220.405	1,333,044	1,333,044
Kabupaten Jepara	424.772	525.570	607.266	569.721	569.721	423.342	488.846	556.355	485.344	485.344	848.114	1.014.416	1.163.621	1,055,066	1,055,066
Kabupaten Demak	584.033	577.570	663.971	661.983	661.983	521.244	511.707	532.887	573.332	573.332	1.105.278	1.089.278	1.196.858	1,235,315	1,235,315

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2025

**) Data belum rilis*

Tingkat konsumsi non pangan masyarakat kabupaten Blora sejak 2020 menunjukkan tren menurun di bawah 50%, namun masih di atas 40%. Pada tahun 2024, konsumsi non pangan membesar seiring membaiknya roda ekonomi pasca pandemi, namun belum lebih dari 50%. Dilihat dari proporsi pengeluaran non makanan yang semakin menurun, hal ini mengindikasikan adanya stagnasi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menandakan pemanfaatan pendapatan masyarakat masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu bahan makanan. Dengan demikian kondisi rumah tangga rata-rata penduduk Kabupaten Blora termasuk kategori kesejahteraan menengah/sedang. Besarnya pengeluaran makanan, terutama pada kelompok pendapatan terendah, memberikan sinyal kerentanan masyarakat terhadap inflasi. Hal ini perlu diperhatikan dalam perencanaan pada tahun 2026 dengan mempersiapkan jaring pengaman berupa bantuan atau insentif terutama pada kebutuhan pokok.

Tabel II.18
Perbandingan PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 dengan Target Daerah

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Prosentase Capaian (%)	Target	Nilai (Rp)	Prosentase Capaian (%)
2020	34.100.000	27.157.770	79,64%	22.150.000	19.780.840	89,30%
2021	34.700.000	30.315.550	87,36%	22.300.000	20.406.300	91,51%
2022	35.300.000	34.590.290	97,99%	22.450.000	20.790.650	92,61%
2023	35.900.000	35.217.600	98,10%	22.600.000	21.278.250	94,15%
2024	36.500.000	36.600.000	99,72%	21.428.250	21.780.000	98,38%

Tabel II.19
Perbandingan PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 dengan Target Daerah

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Prosentase Capaian (%)	Target	Nilai (Rp)	Prosentase Capaian (%)
2020	26.600.000	19.905.860	74,83%	17.650.000	13.654.820	77,36%
2021	27.200.000	20.857.610	76,68%	17.800.000	14.090.340	79,16%
2022	27.800.000	22.937.300	82,51%	17.950.000	14.926.150	83,15%
2023	28.400.000	24.800.240	87,32%	18.100.000	15.533.970	85,82%
2024	29.000.000	26.557.850	91,58%	18.250.000	16.287.460	89,25%

Pemerintah Kabupaten Blora mencapai kemajuan signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah selama periode 2020-2024. Capaian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil.

Capaian PDRB :

1. PDRB atas dasar harga berlaku per kapita dengan Migas: Rata-rata capaian selama 5 tahun mencapai 90,62% dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah.
2. PDRB atas dasar harga konstan per kapita dengan Migas: Rata-rata capaian selama 5 tahun mencapai 92,85% dari target RKPD, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten.
3. PDRB atas dasar harga berlaku per kapita tanpa Migas: Rata-rata capaian selama 5 tahun mencapai 82,58 % dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah.
4. PDRB atas dasar harga konstan per kapita tanpa Migas: Rata-rata capaian selama 5 tahun mencapai 82,95 % dari target RKPD, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten.

Adapun faktor yang berkontribusi dalam capaian dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yaitu pengembangan infrastruktur strategis, peningkatan sektor pariwisata dan industri kreatif, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kebijakan ekonomi yang efektif dan kontribusi sektor migas.

Capaian PDRB yang signifikan selama tahun 2019-2023 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi daerah. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Pemerintah Kabupaten Blora mencapai prestasi gemilang dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan ekonomi daerah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Blora pada tahun 2024 mencapai 3,67%, jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan sebesar 5,3%. Capaian ini menunjukkan penurunan signifikan dalam angka pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Kabupaten

Blora juga memenuhi target RKP Wilayah Jetibanglor yang ditetapkan yaitu sebesar 4.27 - 3.88. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,57%. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blora masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata wilayah setara yaitu 3,255%. Capaian Kabupaten Blora lebih baik dari capaian nasional yaitu 4,91%.

Pertumbuhan Kabupaten Blora pada tahun 2024 mencapai 3,06 %, hal ini menunjukkan bahwa target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan sebesar 3-5% tercapai. Kabupaten Blora belum dapat memenuhi target RKP Wilayah Banglor yang ditetapkan yaitu sebesar 4,93 - 5,53%. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blora masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata wilayah setara yaitu 4,27%. Capaian Kabupaten Blora lebih rendah dari capaian nasional yaitu 5,03%.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu penanda stabilitas ekonomi pada skala wilayah. Tingkat inflasi yang stabil menunjukkan kemapanan daya beli masyarakat yang akhirnya mendukung berjalannya pembangunan. Pada masyarakat dengan pendapatan rentan, inflasi merupakan pintu pemburukan kondisi akibat kenaikan harga bahan pangan pokok serta kebutuhan pokok lain non-pangan seperti bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Tabel II.20 di bawah ini menunjukkan dinamika angka inflasi pada Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dari tahun 2020–2024.

Tabel II.20
Perbandingan Inflasi Kabupaten Blora dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2020–2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1.68	1.87	5.51	2,61	1,57
Jawa Tengah	1.56	1.70	5.63	2,89	2,98
Kab. Blora*)	1.37	1.59	6,40	2,96	1,71

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, 2020-2025. *) Kudus (kota IHK)*

2.1.2.1.4 Ketimpangan

Ketimpangan adalah kondisi tidak seimbang atau adanya jarak di tengah masyarakat. Ketimpangan dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Ketimpangan ekonomi adalah keadaan tidak meratanya distribusi pendapatan dan kesempatan di masyarakat. Ketimpangan ekonomi dapat terjadi di berbagai negara dan menjadi isu kritis yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Blora diukur dengan ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan Gini Ratio. Gini Ratio merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk suatu negara. Ketimpangan pendapatan tidak saja dapat memicu konflik sosial namun secara ekonomi dalam jangka panjang dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kesenjangan dapat dihitung dari pendapatan atau PDRB per kapita pada kelompok-kelompok pendapatan, seperti menggunakan perhitungan indeks Gini. Bank Dunia menggunakan perhitungan 40-40-20 untuk membagi penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita. Pengeluaran pada 40 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kesenjangan. Tabel II.21 di bawah menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Blora tahun 2020–2024.

Tabel II.21
Distribusi Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Blora 2020–2024

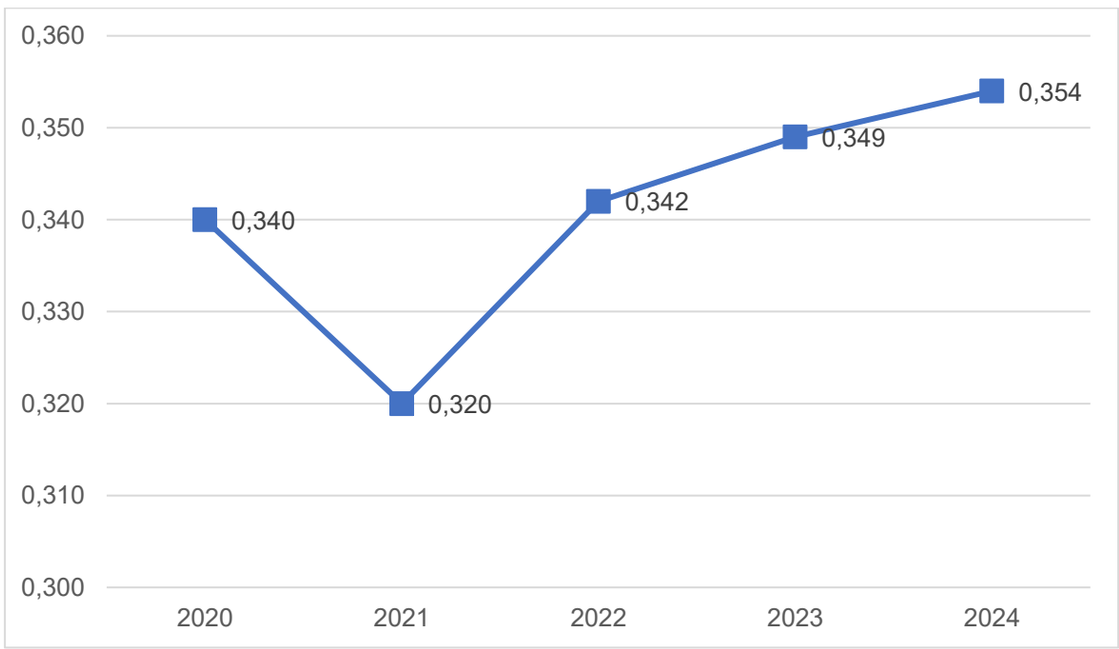
Tahun	Persentase Rata-rata Pengeluaran		
	40 persen penduduk berpendapatan rendah	40 persen penduduk berpendapatan menengah	20 persen penduduk berpendapatan tinggi
2020	19,95	37,05	43,01
2021	20,75	38,62	40,62
2022	19,76	37,63	42,60
2023	20,11	35,85	44,04
2024	19,21	37,04	43,75

Sumber: Satu Data Blora,

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
2. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
3. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Tabel II.21 di atas mengindikasikan kondisi ketimpangan di Kabupaten Blora dalam ketimpangan rendah di mana persentase rata-rata pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah sebesar 19,21 (lebih besar dari 17 persen). Hal ini berkesesuaian Rasio Gini Rasio di Kabupaten Blora untuk tahun 2024 pada koefisien 0,354 yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024 (lihat Gambar II.18). Penanggulangan kemiskinan menjadi bagian solusi upaya merapatkan ketimpangan dengan mendorong penduduk berpendapatan rendah untuk naik kelas menjadi lebih sejahtera.



Gambar II.18
Grafik Rasio Gini Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

2.1.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Blora dapat dilihat dari persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Persentase penduduk miskin adalah angka yang menunjukkan berapa persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora Tahun 2024 sebesar 11,42 persen menurun 0,07 persen dibanding Tahun 2023. Jumlah penduduk miskin Tahun 2024 sebanyak 99,83 ribu orang menurun 0,22 persen dibanding Tahun 2023. Garis Kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah Rp464.959 per kapita per bulan. Angka ini naik Rp39.824 dari Tahun 2023. Menurunnya persentase penduduk miskin yang kurang signifikan juga dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan. Meningkatnya garis kemiskinan dari tahun ke tahun didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

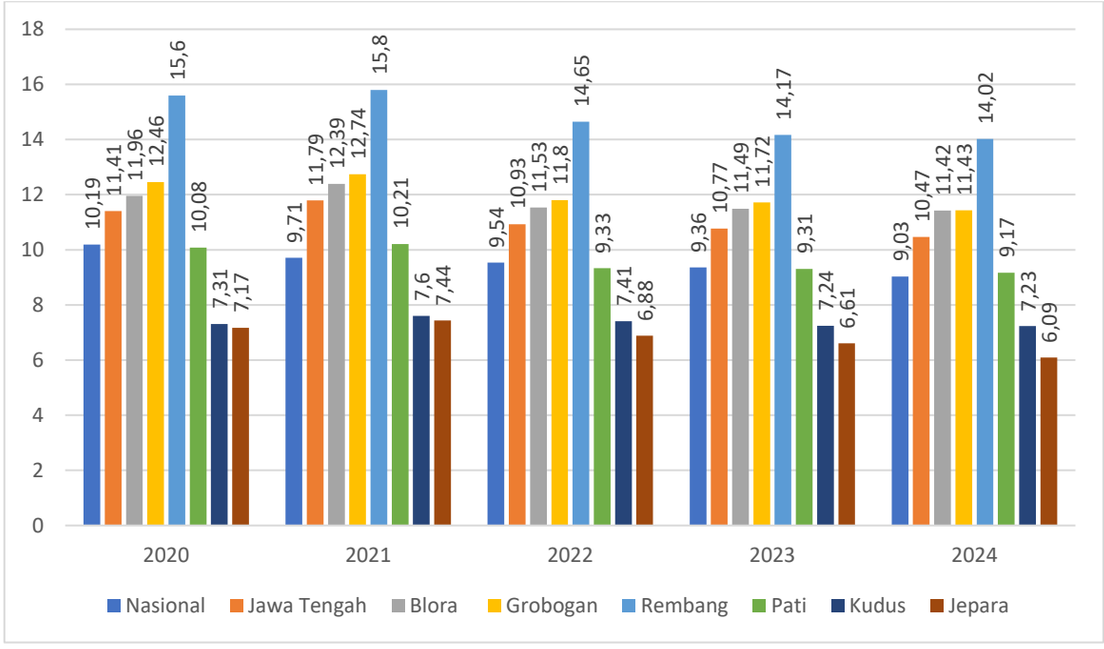
Tabel II.22

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

Kabupaten / Kota	Kemiskinan														
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)					Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Nasional	486.160	486.168	505.469	550.458	582.932	27.550	27.540	26.160	25.900	25,22jt	10,19	9,71	9,54	9,36	9,03
Jawa Tengah	395.407	409.193	438.833	477.580	507.001	3.980,9	4.109,75	3.831,44	3.791,50	3.704,33	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47
Blora	353.259	363.649	390.478	425.135	464.959	103,70	107,05	99,83	99,61	99,137	11,96	12,39	11,53	11,49	11,42
Grobogan	395.001	404.456	428.597	464.514	489.208	172,30	175,70	163,20	162,52	158,996	12,46	12,74	11,80	11,72	11,43
Rembang	403.932	414.977	441.482	477.514	518.607	100,10	101,40	94,56	91,97	91,448	15,60	15,80	14,65	14,17	14,02
Pati	445.913	458.616	486.855	532.545	559.499	127,40	128,70	118,04	118,18	116,843	10,08	10,21	9,33	9,31	9,17
Kudus	429.666	450.992	482.806	520.830	550.075	64,20	67,10	66,06	65,16	65,687	7,31	7,60	7,41	7,24	7,23
Jepara	407.056	419.028	442.618	479.131	503.832	91,10	95,20	89,08	86,75	80,843	7,17	7,44	6,88	6,61	6,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar II.19 menunjukkan dinamika persentase penduduk miskin pada tahun 2020–2024 di Kabupaten Blora dan kabupaten sekitar.

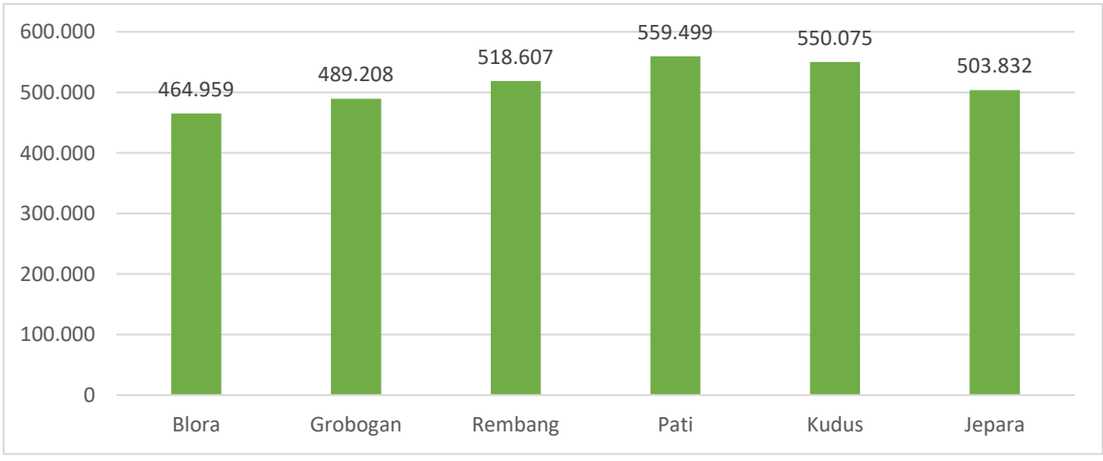


Gambar II.19
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat kemiskinan dikontribusikan oleh tingginya garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Blora sebenarnya paling rendah di antara daerah sekitar di Jawa Tengah. Hal ini senada dengan PDRB per kapita dari aspek pengeluaran, kabupaten Blora terendah nomor 5 dari 6 daerah sekitar. Kondisi ini menggambarkan rendahnya daya beli masyarakat khususnya dari keluarga miskin di Blora. Dibutuhkan kajian lanjutan untuk mengetahui pekerjaan utama dari keluarga miskin di Kabupaten Blora sehingga dapat mengidentifikasi faktor kemiskinan yang dialaminya dari sisi pekerjaan sebagai sumber pendapatan.



Gambar II.20
Grafik Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Blora Tahun 2020-2024



Gambar II.21
Grafik Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Fenomena kemiskinan tidak hanya dilihat dari banyaknya orang miskin, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman memengaruhi besaran usaha pemerintah mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin. Berikut ini disajikan data keparahan dan kedalaman kemiskinan di Blora dan perbandingan dengan daerah sekitar.

Tabel II.23
Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

Wilayah	Kedalaman Kemiskinan (P1)					Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53*	1,53*	0,47	0,42	0,379	0,377*	0,35
Jawa Tengah	1.72	1.94	1,77	1,75	1,75*	0.34	0.46	0,418	0,42	0,37
Blora	1.39	1.82	1,8	1,35	1,35*	0.21	0.40	0,42	0,25	0,32
Grobogan	1.17	1.66	1,95	1,48	1,48*	0.18	0.37	0,45	0,28	0,43
Rembang	2.44	2.77	2,41	2,52	2,52*	0.53	0.68	0,59	0,73	0,84
Pati	1.37	1.69	1,20	1,64	1,64*	0.26	0.42	0,25	0,42	0,25
Kudus	1.01	1.23	0,69	0,99	0,99*	0.18	0.27	0,19	0,22	0,23
Jepara	0.60	0.88	1,22	1,01	1,01*	0.07	0.17	0,30	0,26	0,15

Sumber: BPS Jawa Tengah 2025

Tahun 2024 Indeks kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,35 pada Maret 2023 menjadi 1,59 pada Maret 2024. Kenaikan tersebut menandai sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,25 menjadi 0,32. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Blora sehingga mempengaruhi pengeluaran per kapita. Kenaikan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang naik berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Selain itu hal ini juga berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan penduduk kaya di Kabupaten Blora semakin besar. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang naik berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Hal ini berarti penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Blora tidak merata dan beragam.

Dari kondisi di atas upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Blora perlu usaha yang keras. Dimulai dengan perbaikan data dan pemetaan kelompok penduduk miskin sehingga intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran dan berdampak lebih serius. Untuk kelompok penduduk miskin ekstrem perlu dipastikan agar memperoleh program-program bantuan langsung tunai dan pelayanan

dasar. Kemudian kelompok penduduk miskin umur produktif agar memperoleh program pemberdayaan dan program padat karya. Program bantuan infrastruktur baik berupa Rumah Tidak Layak Huni, Jamban Sehat, Listrik, Sumber air bersih diberikan bertahap mulai dari prioritas 1. Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin harus berkesinambungan dengan mempertahankan dan memperluas sinergi lintas sektor dan melibatkan semua pihak. Pelibatan pihak swasta yang terwadahi dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan penduduk kaya juga perlu dipetakan.

Penurunan kemiskinan ditargetkan sebagai prioritas utama RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026. Tren kemiskinan di Kabupaten Blora menunjukkan kondisi positif. Langkah lebih lanjut yang perlu terus diupayakan adalah melihat lebih dalam lagi persebaran penduduk miskin di Kabupaten Blora guna memetakan intervensi prioritas berbasis wilayah. Tabel II.24 di bawah ini menunjukkan sebaran penduduk miskin di Kabupaten Blora menurut kecamatan.

Tabel II.24

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Blora menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	DTKS Periode Desember 2024	
		Jumlah Individu (orang)	Jumlah Keluarga
1	Jiken	14.212	6.128
2	Bogorejo	13.825	5.963
3	Sambong	14.432	5.740
4	Japah	18.751	8.150
5	Jati	19.664	8.414
6	Tunjungan	22.585	9.621
7	Jepon	23.422	9.831
8	Kunduran	29.168	13.161
9	Kradenan	28.073	11.238
10	Ngawen	31.413	13.114
11	Kedungtuban	33.962	13.710
12	Blora	35.635	15.147
13	Cepu	36.033	14.081
14	Todanan	37.581	15.627
15	Banjarejo	40.108	15.823
16	Randublatung	40.806	16.799
	Jumlah	**650.704**	**269.999**

Sumber: DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) per Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI No. 25 Tahun 2022, Kabupaten Blora ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024. Kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari U$ 1,9 PPP *(purchasing power parities).* Pada tahun 2023, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 11.924 per kapita per hari Rp.362.692 per kapita per bulan.

Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah 0,89 persen. Angka tersebut sudah memenuhi target RKP Tahun 2024 yaitu 0-1 persen namun masih di atas angka kemiskinan ekstrem nasional yaitu 0,83 persen. Berikut ini disajikan data angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Blora Tahun 2024 dan perbandingan dengan daerah sekitar.

Tabel II.25
Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	2024	
		Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)
1	Nasional	233,728	0,83
2	Jawa Tengah	314,89	0,89
3	Blora	7,76	0,89
4	Grobogan	12,32	0,89
5	Rembang	20,77	3,18
6	Pati	7,83	0,61
7	Kudus	2,59	0,28
8	Jepara	11,09	0,84

Kolaborasi antara Pemerintah dan semua sumber daya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2024 merupakan kunci dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora. Selain menggerakkan TJSP/CSR di Kabupaten Blora untuk turut serta mengintervensi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora, Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blora juga memperoleh Dana Insentif Fiskal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk penghargaan kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dana Insentif Fiskal tersebut selanjutnya juga digunakan sebagian untuk mengintervensi penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Blora terutama di lokus prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem. Berikut ini disajikan data 51 Desa Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Blora Tahun 2024.

Tabel II.4

Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Blora Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	No	Kecamatan	Desa
1	Banjarejo	Bacem	27	Kedungtuban	Kalen
2		Balongsari	28		Kemantren
3		Karangtalun	29		Pulo
4		Sendanggayam	30		Tanjung
5		Sidomulyo	31	Kradenan	Medalem
6		Sumberagung	32		Megeri
7		Wonosemi	33		Mojorembun
8	Blora	Purworejo	34		Nglebak
9	Bogorejo	Gandu	35	Kunduran	Botoreco
10		Jeruk	36		Karanggeneng
11		Jurangjero	37	Ngawen	Kedungsatriyan
12		Nglengkir	38		Sambonganyar
13	Cepu	Cabean	39		Sumberejo
14		Ngloram	40	Randublatung	Bodeh
15	Japah	Kalinanas	41		Kadengan
16	Jati	Gempol	42		Tanggel
17		Jegong	43		Temulus
18		Kepoh	44		Tlogotuwung
19	Jepon	Bangsri	45	Sambong	Giyanti
20		Palon	46		Ledok
21	Jiken	Janjang	47		Sambong
22		Ketringan	48		Sambongrejo
23		Nglebur	49		Temengeng
24	Kedungtuban	Bajo	50	Todanan	Bedingin
25		Gondel	51	Tunjungan	Kedungrejo
26		Jimbung			

Sumber: Bappeda provinsi jawa tengah, 2023

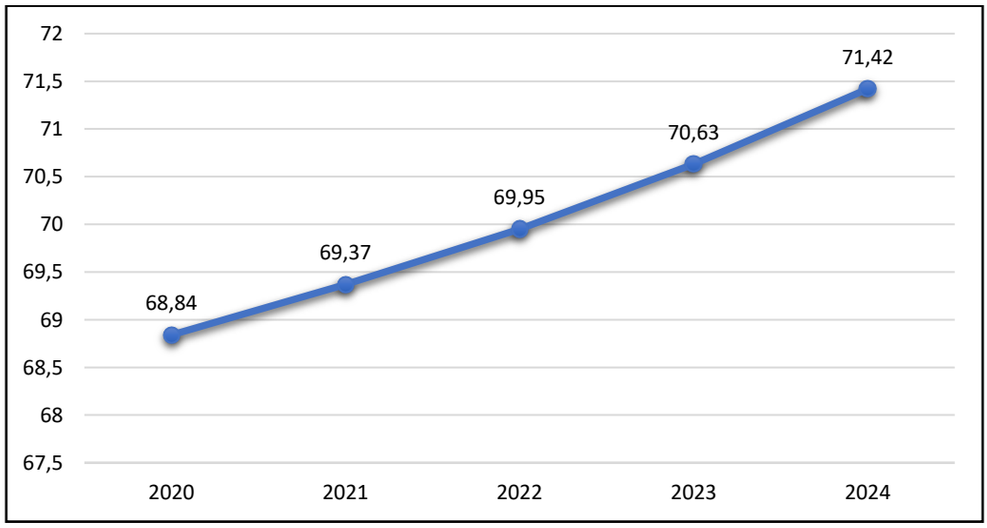
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu

wilayah, berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai bayi baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur melalui dua indikator, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai gambaran tingkat pendidikan yang telah dicapai, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai proyeksi lama pendidikan yang diharapkan akan ditempuh. Sementara itu, dimensi ekonomi diukur melalui pengeluaran per kapita, yang mencerminkan standar kesejahteraan hidup masyarakat

Perkembangan IPM Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar II.22
Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Blora terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Blora meningkat dari 69,37 pada tahun 2021 menjadi 71,42 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Blora rata-rata tumbuh sebesar 0,92 persen per tahun. IPM Kabupaten Blora tahun 2024 tercatat sebesar 71,42 atau tumbuh 1,12 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Blora, IPM tetap tumbuh positif dari tahun 2020-2024. Dalam rentang tahun tersebut, pertumbuhan IPM tahun 2021 paling kecil yaitu 0,77 persen. Selanjutnya tahun 2022 tumbuh 0,84 persen dan tahun 2023 tumbuh 0,97 persen.

Jika kenaikan Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan pada beberapa komponen pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2024 tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama empat tahun terakhir, dari 2021 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,41 tahun, atau rata-rata tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2024, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Blora mencapai 74,92 tahun. Artinya, pada tahun 2024, rata-rata umur bayi baru lahir diperkirakan akan hidup 74,92 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator penyusun, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selama periode 2021 hingga 2024, HLS Kabupaten Blora telah meningkat rata-rata 0,81 persen per tahun, sementara angka RLS juga meningkat 1,54 persen per tahun. Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 12,60 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 diharapkan akan dapat bersekolah hingga 12,60 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Selanjutnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 sebesar 7,26 tahun artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,26 tahun atau setara dengan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP=Purchasing Power Parity) atas dasar harga konstan 2012. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Blora mencapai Rp. 10.926 ribu per orang per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 10.541 ribu per orang per tahun atau mengalami

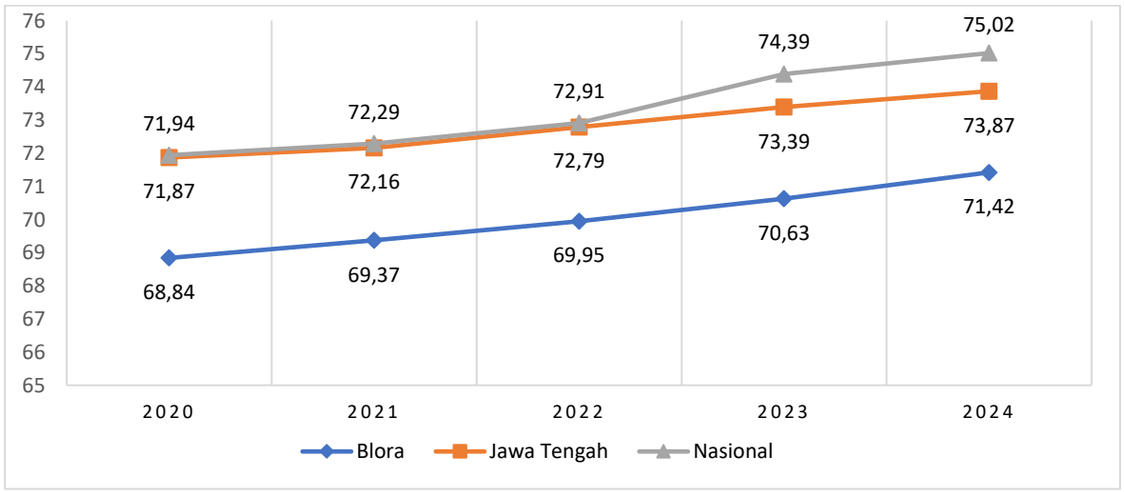
kenaikan sebesar 3,65 persen. Selama periode 2021 hingga 2024, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Blora telah meningkat rata-rata 3,38 persen per tahun. Meskipun laju kenaikan pengeluaran per kapita tahun 2024 melambat dibandingkan periode sebelumnya, namun kondisi perekonomian masih stabil.

Tabel II.26

Perkembangan Indikator IPM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,51	74,60	74,71	75,49
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,2	12,35	12,44	12,51	12,60
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,83	6,99	7,01	7,08	7,26
4.	Pengeluaran Per kapita	Ribu Rupiah/ Orang/Tahun	9.571	9.669	10.067	10.541	10.926
IPM			**68,84**	**69,37**	**69,95**	**70,63**	**71,42**

Sumber: Satu Data Blora, 2024



Gambar II.23

Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Blora, Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Meskipun IPM Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan. Akan tetapi capaian setiap komponen IPM Kabupaten Blora jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masih sangat rendah. Dari keempat komponen pembentuk IPM, hanya Usia Harapan Hidup yang berada di atas Jawa Tengah dan Nasional. Kesenjangan yang paling signifikan dari empat komponen pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan provinsi dan nasional adalah komponen

pengeluaran per kapita, di mana selisih angka di tahun 2024 lebih dari satu juta rupiah. Pada komponen rata-rata lama sekolah capaian Kabupaten Blora juga masih di bawah dari rata-rata provinsi dan nasional. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan dan kondisi perekonomian di Kabupaten Blora masih jauh di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

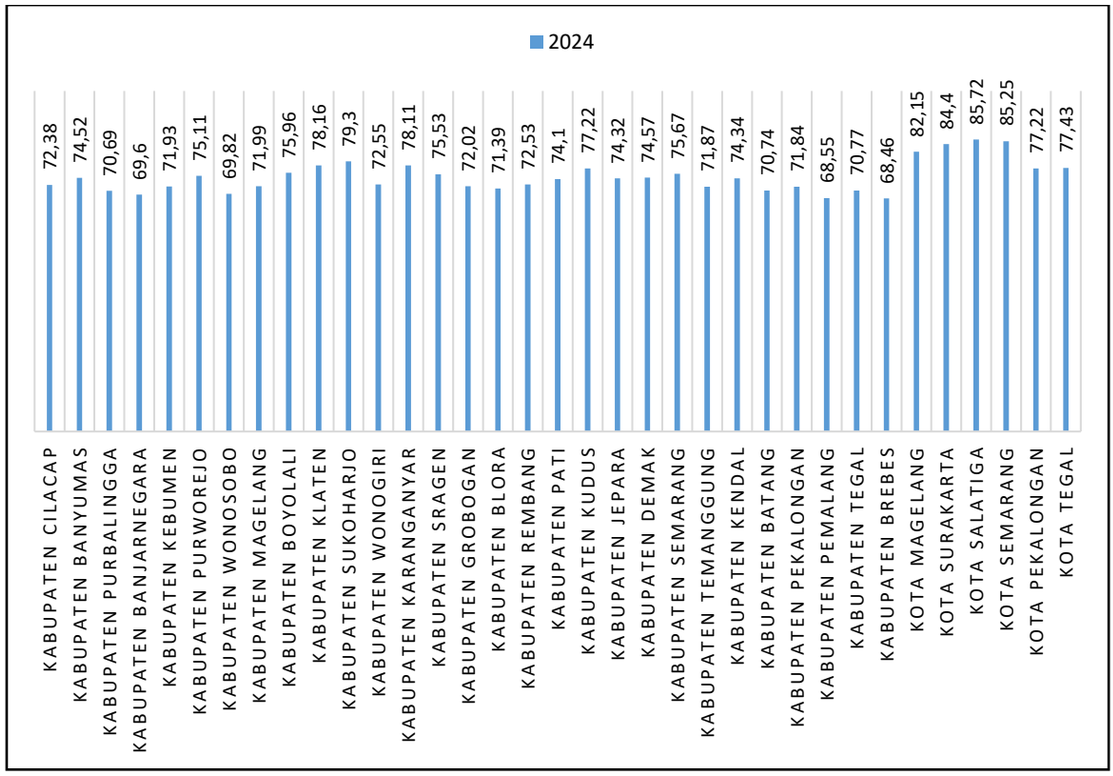
Tabel II.27

Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Blora Tahun 2024

No	Komponen	Satuan	Blora	Jawa Tengah	Nasional
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,92	74,91	75,49
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,60	12,86	13,21
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,26	8,02	8,85
4	Pengeluaran Per kapita	Rp.000	10.926	12.276	12.341
IPM			**71,42**	**73,87**	**75,02**

Sumber: Satu Data Blora , 2024

IPM Kabupaten Blora tercatat sebesar 71,42 sehingga sudah dalam kategori “Tinggi”, namun masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah yaitu 73,87 dan Nasional yaitu 75,02. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat dibanding tahun lalu. Kabupaten Blora masih menempati rangking 28 dari 37 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Angka IPM dengan urutan terendah ditempati oleh Kabupaten Pemalang (68,65), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Salatiga (85,72). Status capaian pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) diraih oleh empat kabupaten/kota yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: Satu Data Blora, 2024

Gambar II.24

IPM Kabupaten /Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Apabila dibandingkan secara regional dengan beberapa kabupaten sekitar di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir Kabupaten Blora masih berada pada posisi terendah. Hal ini menandakan bahwa keadaan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora masih rendah dibandingkan kabupaten sekitarnya.

Tabel II.28

Perkembangan IPM Kabupaten Blora dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020–2024

No	Wilayah	IPM				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kab Grobogan	69,87	70,41	70,97	71,49	72,02
2	**Kab Blora**	**68,84**	**69,37**	**69,95**	**70,63**	**71,42**
3	Kab Rembang	70,02	70,43	71	71,89	72,53
4	Kab Pati	71,77	72,28	73,14	73,59	74,10
5	Kab Kudus	75	75,16	75,89	76,71	77,21
6	Kab Jepara	71,99	72,36	73,19	73,85	74,32

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Jika kita melihat komponen IPM Kabupaten Blora dengan wilayah sekitarnya, dari semua komponen untuk setiap tahunnya Kabupaten Blora hampir menempati posisi terendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kabupaten Blora hanya lebih baik dibanding Kabupaten Rembang untuk capaian komponen Harapan Lama Sekolah. Sejak tahun 2023 angka harapan lama sekolah Kabupaten Blora lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Grobogan. Pertumbuhan tersebut karena adanya kerja sama dan peran serta seluruh *stakeholder* dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui program pendataan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) yang terintegrasi ke dalam aplikasi SILAT.

Tabel II.29
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No	Komponen Pembentuk IPM	Tahun	Nilai					
			Kab. Grobogan	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
1	AHH (tahun) No 6 (2021)	2020	74,75	74,41	74,55	76,22	76,6	75,84
		2021	74,84	74,51	76,61	76,27	76,68	75,91
		2022	74,93	74,6	74,68	76,32	76,76	75,97
		2023	75,04	74,71	74,77	76,39	76,86	76,04
		2024	75,24	74,84	74,97	76,56	77,08	76,21
2	Harapan Lama Sekolah (tahun) No 5 (2021)	2020	12,3	12,2	12,11	12,65	13,23	12,79
		2021	12,44	12,35	12,12	12,94	13,24	12,76
		2022	12,45	12,44	12,13	12,95	13,25	12,77
		2023	12,46	12,51	12,15	12,96	13,26	12,85
		2024	12,48	12,6	12,3	12,98	13,28	12,86
3	Rata-rata lama sekolah (tahun) No 6 (2021)	2020	6,91	6,83	7,16	7,44	8,75	7,68
		2021	7,11	6,99	7,3	7,48	8,76	7,79
		2022	7,26	7,01	7,41	7,79	9,06	8,09
		2023	7,28	7,08	7,72	7,8	9,34	8,26
		2024	7,29	7,26	7,73	7,82	9,35	8,27
4.	Pengeluaran Per kapita Disesuaikan (000 Rp PPP) No 6 (2021)	2020	10.221	9.571	10.328	10.390	11.160	10.343
		2021	10.294	9.669	10.519	10.506	11.272	10.536
		2022	10.600	10.067	10.937	10.948	11.609	10.913
		2023	11.083	10.541	11.399	11.385	12.088	11.306
		2024	11.548	10.926	11.830	11.829	12.533	11.729

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya membangun masyarakat di wilayahnya. Karena itu, IPM dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 yaitu Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter dengan Tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pemerintah Kabupaten Blora telah mengupayakan setiap program dapat mendukung pada peningkatan nilai IPM. Jika melihat target RPJMD Tahun 2024, komponen pembentuk IPM sudah memenuhi target terhadap umur harapan hidup,harapan lama sekolah dan Pengeluaran per kapita (PPP). Namun untuk rata-rata lama sekolah capaian Tahun 2024 masih di bawah target RPJMD Tahun 2024. Secara total nilai IPM tahun 2024 telah mencapai target.

Tabel II.30

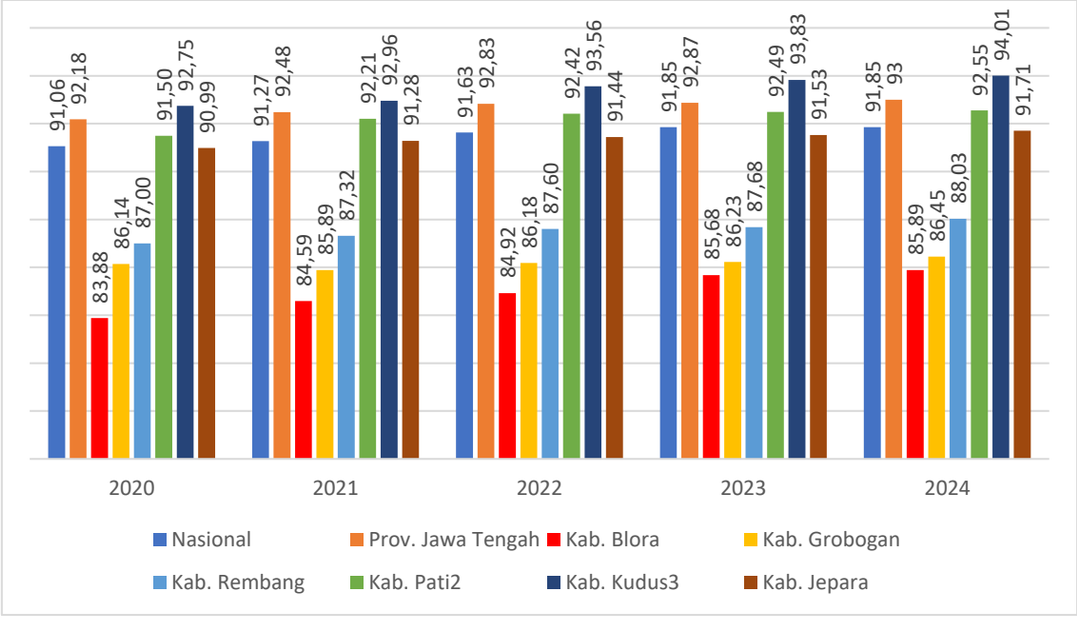
Perbandingan Target dan Kinerja IPM Kabupaten Blora Tahun 2024

Komponen	Target	Realisasi
IPM	69,64	71,42
UHH (tahun)	74,85	74,92
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,4	12,60
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,31	7,26
Pengeluaran Per kapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	905.797	10.926

Sumber: Satu Data Blora, 2024

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam pembangunan suatu wilayah. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia berdasarkan gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Angka 100 merupakan angka standar dalam menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Selama kurun waktu 2020-2024 Nilai IPG Kabupaten Blora terus mengalami kenaikan akan tetapi nilai IPG Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut:

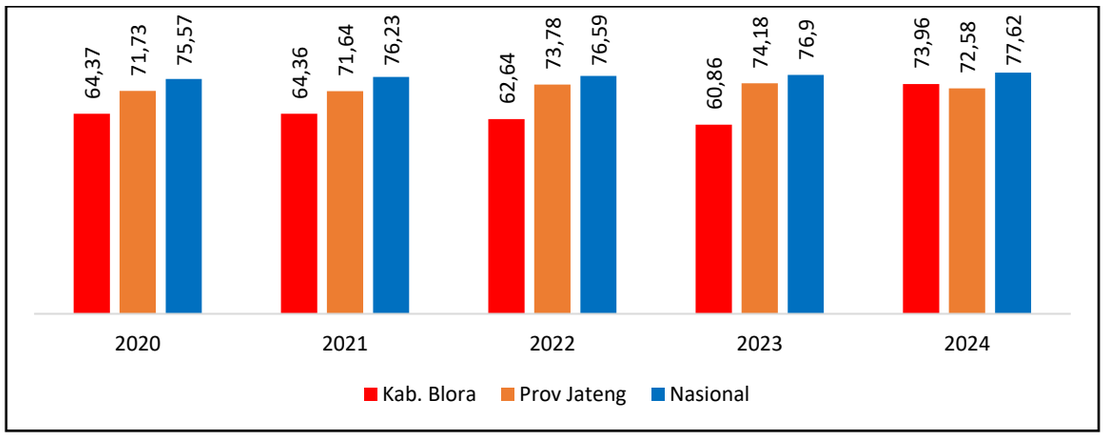


Gambar II.25
Grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Selain IPG, indikator selanjutnya untuk menilai kesetaraan gender adalah dikenal IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender. IDG adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG fokus pada bagaimana perempuan berperan dan memiliki akses terhadap sumber daya serta posisi strategis di masyarakat, sehingga menjadi indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender secara lebih spesifik dalam hal pemberdayaan. Indeks Pemberdayaan Gender dibentuk dari tiga aspek yang menunjukkan kontribusi perempuan dalam bidang sosial ekonomi dan politik yaitu Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Perkembangan IDG Kabupaten Blora Selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan trend peningkatan dari angka 64,37 pada tahun 2020 di mana tahun 2024 berada pada angka 73,96, peningkatan ini menjadikan IDG Kabupaten Blora lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dimana nilai IDG Provinsi Jawa Tengan Tahun 2024 sebesar 72,58, tetapi masih lebih rendah dari IDG nasional. Pelibatan partisipasi politik dan ekonomi perempuan di Kabupaten Blora perlu terus digalakkan untuk meningkatkan nilai IDG Kabupaten Blora. Perkembangan IDG Kabupaten

Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar II.26

IDG Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2023

Peningkatan IDG yang cukup siginikfikan pada Tahun 2024 berasal dari angka keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2023 sebesar 6,67 persen meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2024, komponen proporsi perempuan sebagai tenaga profesional meningkat tetapi sangat kecil yaitu tahun 2023 sebesar 52,17 meningkat sebesar 52,54 di tahun 2024, sedangkan angka sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Blora mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 35,09 persen menurun sebesar 34,82 persen. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan terhadap peluang kerja dengan pendapatan tinggi atau dominasi pekerjaan informal di kalangan perempuan. Pemerintah Kabupaten Blora perlu intervensi kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, memperluas akses mereka ke pendidikan dan pelatihan kerja, serta memastikan kesetaraan upah dan kondisi kerja yang lebih adil.

2.1.2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas). Angkatan kerja mencakup orang yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran aktif). TPAK menggambarkan sejauh mana penduduk suatu wilayah terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan memberikan

gambaran tentang ketersediaan tenaga kerja produktif dan masalah seperti pengangguran.

Tabel II.31
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

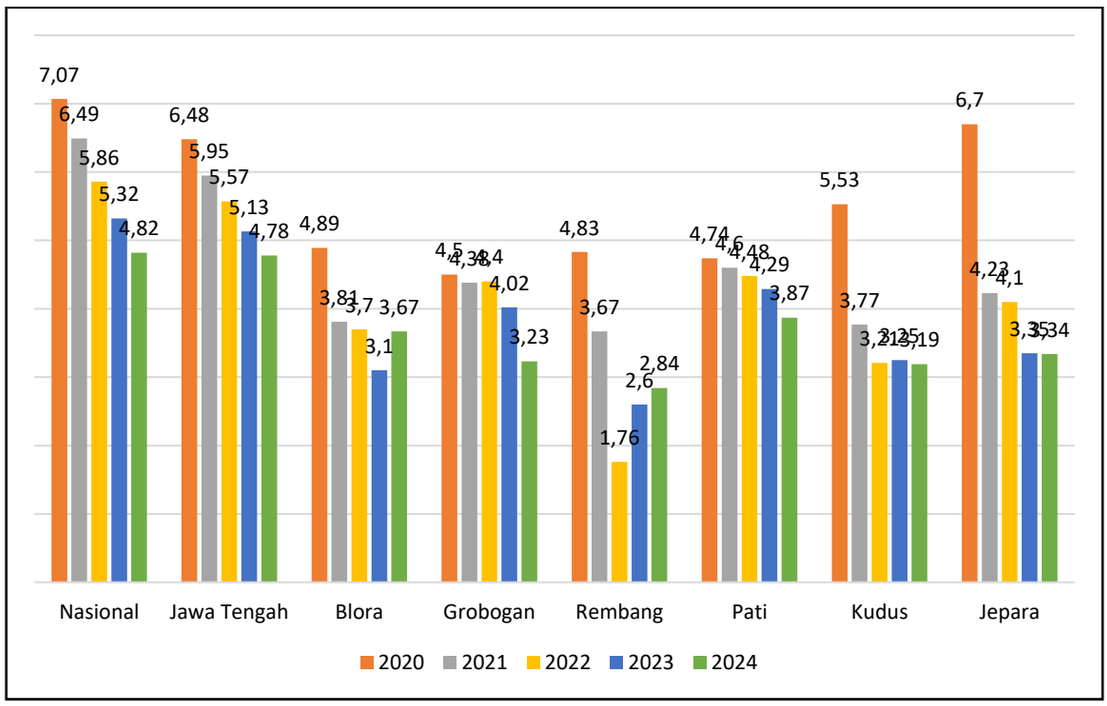
Kabupaten / Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PROVINSI JAWA TENGAH	69.43	69.58	70,84	71,72	73,74
Kabupaten Grobogan	69.77	72.88	72,05	75,81	76,56
Kabupaten Blora	**69,05**	**70.54**	**75,08**	**78,02**	**73,51**
Kabupaten Rembang	65.17	70.67	73,98	72,75	74,50
Kabupaten Pati	63.85	68.99	71,52	73.10	76,75
Kabupaten Kudus	74.50	74.77	70,99	72.19	75,53
Kabupaten Jepara	69.92	69.55	69,74	71.57	71,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025.

TPAK Kabupaten Blora menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Meskipun TPAK Blora masih berada pada level yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, tren penurunan yang terjadi pada dua tahun terakhir menunjukkan perlunya langkah strategis untuk mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Blora. Untuk mendukung peningkatan TPAK di Kabupaten Blora, beberapa strategi yang dapat diusulkan yaitu pengembangan lapangan kerja baru dengan cara mendorong investasi di sektor produktif seperti industri kreatif, pertanian berbasis teknologi, dan pariwisata untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan vokasional dan sertifikasi keahlian untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, penguatan ekonomi desa dengan cara meningkatkan potensi lokal melalui program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengembangan produk unggulan desa, kolaborasi antarsektor dengan cara meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Dengan pelaksanaan program-program strategis ini, diharapkan Kabupaten Blora dapat mengatasi tantangan penurunan TPAK dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Pengangguran terbuka mengacu pada orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. TPT digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar kerja dan memberikan gambaran tentang seberapa efektif pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja.



Gambar II.27
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa TPT Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami penurunan. Namun, terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024, yaitu menjadi 3,67 persen. Secara persentase, TPT di Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Blora memiliki jumlah pengangguran terbuka yang relatif rendah. Kabupaten Blora menempati posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Kudus.

Tabel II.32
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2024

Wilayah	Jumlah Pengangguran					Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2020	2021	2022	2023	2024*	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	9.765.754	9.102.052	8.425.931	7.855.080	7.855.080	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Jawa Tengah	1.214.342	1.128.223	1.084.475	1.080.000	1.080.000	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Blora	24.058	18.507	19.243	17.627	17.627	4,89	3,81	3,70	3,10	3,67
Grobogan	33.496	34.317	34.305	35.386	35.386	4,50	4,38	4,40	4,02	3,23
Rembang	15.896	13.293	6.723	9.896	9.896	4,83	3,67	1,76	2,60	2,84
Pati	30.244	31.935	32.270	33.915	33.915	4,74	4,60	4,48	4,29	3,87
Kudus	28.336	19.651	16.072	15.874	15.874	5,53	3,77	3,21	3,25	3,19
Jepara	45.521	29.076	28.683	22.692	22.692	6,70	4,23	4,1	3,35	3,34

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Angka TPT yang lebih rendah dari rata-rata wilayah menunjukkan bahwa sektor produktif di Kabupaten Blora relatif baik dalam menyerap tenaga kerja lokal. Namun, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

Permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan serapan lapangan kerja. Identifikasi potensi dan permasalahan di masing-masing sektor produksi dapat mendukung penyusunan kebijakan untuk mengintervensi tenaga kerja, pendidikan, dan kegiatan ekonomi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Blora. Berbagai program pembangunan telah diupayakan untuk menurunkan tingkat pengangguran, terbukti dari tren penurunan TPT Kabupaten Blora. Meski demikian, perhatian perlu diberikan pada kondisi tenaga kerja dengan pendapatan rendah dan status pekerja kontrak yang rentan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pengembangan sektor ekonomi potensial sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.

2.1.2.2.5 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKBa)

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional secara menyeluruh. Masalah

kesehatan ibu dan anak merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian yang lebih karena mempunyai dampak yang besar terhadap pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

AKB adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKB mencerminkan tingkat kesehatan bayi, akses terhadap pelayanan kesehatan, status gizi ibu dan bayi, serta kualitas kebersihan lingkungan. AKI adalah jumlah kematian ibu yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat komplikasi kehamilan atau persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI menunjukkan kualitas layanan kesehatan ibu hamil, penanganan persalinan, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Sedangkan AKBa adalah jumlah kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKBa mencerminkan tingkat kesejahteraan anak, status gizi, serta efektivitas program imunisasi dan pencegahan penyakit.

Pemerintah telah berupaya secara intensif untuk mencegah dan mengurangi risiko kematian, terutama terkait kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa), yang merupakan indikator makro utama dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu agenda utama SDGs adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian Balita. Pemeriksaan antenatal yang berkualitas dan teratur selama kehamilan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. Upaya penurunan jumlah kematian Ibu dan anak dilakukan melalui intervensi spesifik yang dilakukan saat dan sebelum kelahiran. Kementerian Kesehatan RI menetapkan pemeriksaan ibu hamil atau *antenatal care* (ANC) dilakukan minimal sebanyak 6 kali selama masa kehamilan sebagai bentuk komitmen untuk penyediaan layanan esensial bagi Ibu hamil. Untuk mendukung aktivitas ini, Kemenkes tengah dalam proses menyediakan USG di Seluruh Provinsi di Indonesia. Sebelumnya pemeriksaan USG hanya dapat dilakukan di RS atau Klinik, saat ini ibu hamil sudah dapat melakukan pemeriksaan di Puskesmas.

Tabel II.33 menunjukkan indikator permasalahan kesehatan berupa angka kematian bayi, angka kematian ibu dan balita pada tahun 2020–2024.

Tabel II.33
Jumlah Kematian Ibu, Bayi, Balita, AKI, AKB dan AKba Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Tahun	Kematian Ibu		Kematian Bayi		Kematian Balita	
	Jumlah	AKI per 100.000 KH	Jumlah	AKB per 1.000 KH	Jumlah	AKBa per 1.000 KH
2020	10	86,40	99	11,50	16	13,00
2021	23	210,20	118	11,12	18	12,43
2022	10	96,84	118	11,43	21	13,46
2023	13	132,10	132	13,31	24	2,24
2024*	14	183*	143	13,5*	24	2,24*

Sumber: Satu Data Blora

AKI, AKB, dan AKBa di Kabupaten Blora selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Angka AKI per 100.000 KH menunjukkan kenaikan pada Tahun 2021 diduga merupakan dampak lanjutan Covid 19 di mana layanan rumah sakit terbatas karena penuh untuk layanan Covid. Sehingga, kelahiran risiko tinggi diduga tidak terdeteksi karena kurang insentifnya pemeriksaan kehamilan dengan lengkap. Setelah menurun pada tahun 2022. AKI kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 132,10 /100.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan target penurunan AKI sesuai komitmen SDGs yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2030. Kenaikan ini disebabkan perbedaan metode perhitungan dengan adanya pemberlakuan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN).

Jumlah kematian ibu mengalami kenaikan menjadi 13 kasus (7 kasus merupakan orang Blora dan meninggal di Blora sedangkan 6 kasus lainnya merupakan orang Blora yang meninggal di luar Blora). Upaya penurunan jumlah kematian ibu di Kabupaten Blora, didukung dengan tersedianya USG untuk Skrining ANC oleh dokter umum di 26 Puskesmas, ketersediaan Dokter Terlatih/Kompeten Skrining ANC dengan USG pada setiap Eks Kawedanan, Pendampingan Dokter SPOG dalam Skrining ANC melalui USG *telemedicine*, Terpenuhinya USG untuk Skrining ANC Dokter Umum pada 26 Puskesmas, cakupan pemeriksaan ibu hamil yang capaiannya sudah memenuhi target dan kualitas ANC terpadu yang makin adekuat. Pengelolaan layanan ANC, Persalinan dan Nifas di puskesmas PONED dan Puskesmas mampu persalinan sudah semakin baik sehingga sangat mendukung meningkatnya derajat kesehatan ibu hamil, bersalin

dan nifas. Akan tetapi pelayanan kesehatan untuk menurunkan jumlah kematian ibu masih perlu ditingkatkan, di antaranya karena masih belum terlaksananya sistem rujukan maternal secara optimal yang sangat berpengaruh terhadap kejadian kasus kematian maternal, mengingat kesiapan Rumah Sakit menerima suatu rujukan merupakan salah satu kunci dalam upaya penyelamatan ibu hamil, bersalin dan ibu nifas yang memerlukan pertolongan segera.

Banyaknya kasus penyerta pada kematian ibu menunjukkan bahwa skrining ibu hamil yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil, pelaksanaan ANC terpadu sangat di butuhkan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit agar penyakit penyerta bisa ditekan. Faktor mobilitas penduduk dalam hal ini adalah sasaran ibu hamil yang semula sudah tinggal di wilayah suami namun ingin melahirkan dikampung halaman, sehingga karena riwayat kesehatan kehamilan tidak terdeteksi oleh petugas setempat maka penanganan dasar dan rujukan tidak bisa maksimal.

Upaya penurunan jumlah kematian bayi ini harus terus dilakukan dengan meningkatnya kualitas layanan tatalaksana bayi baru lahir, tatalaksana kegawatdaruratan neonatal dan layanan bayi sakit, peningkatan program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI eksklusif program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Untuk sarana dan prasarana masih banyak perlu ditingkatkan. Baik di layanan tingkat dasar maupun tingkat rujukan. Di tingkat layanan dasar saranan prasarana untuk tatalaksana kegawatdaruratan neonatal masih perlu banyak di tingkatkan, masih ada beberapa puskesmas yang harusnya mampu menangani jenis kegawatdaruratan tertentu sesuai kewenangan, akan tetapi tidak bisa melayani karena keterbatasan alat. Demikian juga di tingkat rujukan. Masih banyak rujukan dari tingkat dasar yang belum bisa terlayani dengan baik ditingkat rujukan karena keterbatasan jumlah ruangan dan alat terstandar yang dimiliki layanan rujukan. Belum semua lini layanan memiliki Sarana dan Prasarana Manajemen Tatalaksana Bayi dan Balita Sakit (MTBS).

Sebanyak 70 persen kematian yang terjadi pada ibu dan bayi baru lahir adalah kasus yang dapat dicegah. Pencegahan, antara lain, dapat berupa skrining kesehatan sebelum, selama, dan setelah kehamilan, serta penguatan sistem kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi diharapkan

turun sesuai target pemerintah. Faktor penyebab kematian ibu, antara lain, standar pelayanan rumah sakit belum optimal dan keterampilan sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai. Penyebab lainnya, pendarahan, infeksi, dan eklampsia. Kendala lain di fasilitas kesehatan yang bisa menyebabkan kematian ibu adalah kesiapan logistik, alat kesehatan, sarana, dan prasarana yang belum memadai. Laila menambahkan, 30 persen faktor penyebab kematian ibu adalah keluarga terlambat mencari pertolongan medis. Sama seperti kematian ibu, kematian bayi juga berhubungan dengan tidak optimalnya layanan kesehatan serta keterlambatan masyarakat mencari pertolongan medis. Faktor lain yang menyebabkan kematian bayi adalah berat badan lahir rendah dan asfiksia (kurang oksigen saat lahir).

Pencegahan pertama adalah dengan menghindari faktor risiko kematian pada ibu hamil. Ibu yang berisiko dalam kehamilan, antara lain, adalah mereka yang hamil saat berusia di atas 35 tahun, telah hamil lebih dari empat kali, hamil anak kembar, dan yang air ketubannya pecah dini. Faktor risiko lain ialah diabetes, hipertensi, anemia, konsumsi alkohol dan rokok, dan ada riwayat retensi plasenta (plasenta tidak keluar 30 menit setelah melahirkan). Kementerian Kesehatan tengah menggalakkan skrining kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Pemeriksaan kehamilan yang sebelumnya empat kali ditambah menjadi enam kali. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) juga bisa diakses di puskesmas. Selain itu, ada program skrining layak hamil bagi calon pengantin dan pasangan berusia subur

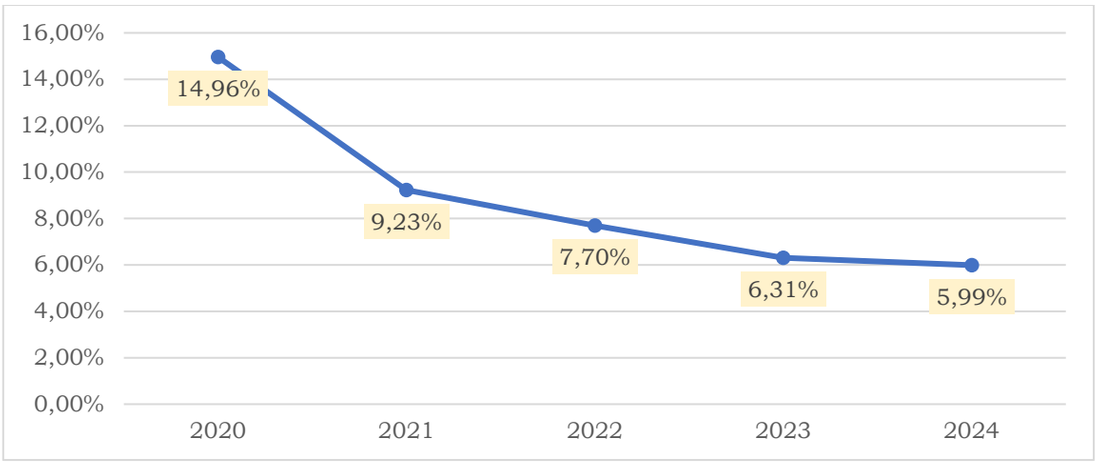
Perlu peningkatan efektivitas upaya pemerintah yang selama ini sudah dilakukan. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus AKI, AKB dan AKBa yaitu Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan (Dokter Umum, Bidan, Perawat) tentang pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal di Puskesmas, Optimalisasi fungsi PONED, Penguatan Koordinasi lintas Program melalui GERDU KIA KB, Penguatan Pelayanan Ibu dan Anak melalui DOKTER SABIAN (Dokter Sayang Ibu dan Anak), Penguatan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMPSR), Penguatan surveilans kesehatan ibu bayi dan balita melalui E-Kohort KIA, Peningkatan kapasitas Kader dalam pendampingan Bayi Balita Berisiko melalui KALIBABAR (Kader Peduli Bayi Balita Berisiko), Peningkatan kapasitas Petugas dalam Srining Bayi dan Balita melaui orientasi SDIDTK dan MTBS, Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang

penatalaksanaan Pelayanan Skrining maupun Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Pengembangan *Telemedicine* guna deteksi dini resiko maternal neonatal, Penguatan sistem rujukan maternal neonatal, Penguatan skrining anemia pada remaja putri sebagai calon ibu hamil melalui REMBO SETIA (Remaja Blora Sehat tanpa Anemia), Peningkatan skrining kesehatan remaja melalui Posyandu Remaja, dan Penguatan Puskesmas PKPR dalam meningkatkan derajat kesehatan remaja.

2.1.2.2.6 Permasalahan Gizi Balita

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2023 menunjukkan, terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia yaitu: *stunting*, *wasting*, *underweight*, dan *overweight*. *Stunting* atau ukuran badan pendek dan sangat pendek merupakan salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian pemerintah dan publik karena prevalensinya kini masih cukup tinggi, mencapai 21,5% pada 2023 pada tingkat nasional. Angka tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa *stunting* di Indonesia masih tergolong kronis. Prevalensi *stunting* tingkat nasional tahun 2023 hanya turun 0,1 poin dari 2022 yang sebesar 21,6%. Namun jika dibandingkan 2019, prevalensi balita *stunting* Indonesia telah menurun 1,3 dari 27,7%. Permasalahan gizi lainnya, *wasting* atau kurus. Menurut SKI 2023, prevalensi balita *wasting* di Indonesia turun 1,3 poin dari 7,7% menjadi 6,4% pada tahun lalu. Di sisi lain, prevalensi balita *overweight* atau kegemukan badan sebesar 4,2% pada 2023 atau naik 0,7 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian, prevalensi balita *underweight* sebesar 12,9% pada 2023 atau turun 4,2 poin dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten lokus *stunting* di Jawa Tengah karena angka stunting di Kabupaten Blora masih cukup tinggi. Data prevalensi stunting di Kabupaten Blora menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 14,96%, dan terus menurun setiap tahunnya hingga mencapai 5,99% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya intervensi pemerintah daerah dalam penanganan masalah gizi anak, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta program pemberian makanan tambahan dan perbaikan sanitasi.



Gambar II.28

Prevalensi *Stunting* Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Upaya percepatan penurunan *stunting* sangat memerlukan kerja sama, kemitraan dan kontribusi dari setiap unsur pemangku kepentingan antara lain perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan mitra pembangunan lain termasuk masyarakat; penerapan kearifan dan keunggulan lokal untuk meningkatkan aspek penerimaan masyarakat dan keberlanjutan program.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum mencakup segala bentuk jasa pelayanan, baik berupa barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai.

Kondisi umum pelayanan publik di suatu daerah dijelaskan melalui berbagai aspek, meliputi: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, elemen pendukung urusan pemerintahan, elemen penunjang urusan pemerintahan, elemen pengawasan urusan pemerintahan, elemen kewilayahan, serta elemen pemerintahan umum. Pelayanan publik yang baik merupakan indikator penting keberhasilan suatu pemerintah dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibagi ke dalam 6 bidang urusan, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dan sosial.

2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar bahwa salah satu tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya melalui Pendidikan. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah. Sedangkan, APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang Pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang Pendidikan tertentu, sementara APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Tabel II.34
APK dan APM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
APK SD/MI	%	102,62	106,26	105,21	102,06	101,9
APK SMP/MTs	%	101,85	98,25	97,95	100,78	101
APM SD/MI	%	95,20	95,44	95,62	93,18	93,54
APM SMP/MTs	%	80,01	70,87	69,56	74,24	75,2

Sumber: Satu Data Blora ,2024

Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Blora selama 2020–2024 semakin mendekati angka 100. Pada tahun 2024 nilai APK SD/MI menurun dari 102,06 menjadi 101,09. APK SD/MI mengalami penurunan dan semakin mendekati 100. Data tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten Blora untuk jenjang SD/MI, jumlah penduduk yang bersekolah di SD/MI masih lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia jenjang SD/MI. Namun setiap tahun semakin menuju kondisi yang ideal. Masih adanya siswa yang menempuh Pendidikan di jenjang yang tidak sesuai dengan usia jenjang sekolah seharusnya disebabkan karena beberapa hal seperti pendaftaran siswa usia dini, pengulangan kelas, dan siswa dari luar Kabupaten Blora. Sebaliknya, dengan penurunan pada APK SD/MI maka Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun 2024 mengalami kenaikan.

Nilai APK SMP/MTs Tahun 2024 masih di atas 100 hal tersebut memperlihatkan bahwa di Kabupaten Blora jumlah penduduk yang bersekolah di SMP/MTs masih lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah jenjang SMP/MTs.

Tabel II.35
Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat	%	0,04	0,01	0,0058	0,002	0,31
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	%	0,09	0,08	0,0070	0,008	2,04

Sumber: Satu Data Blora

Pada tahun 2024 angka putus sekolah pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Sederajat sebesar 0,31 dan SMP Sederajat 2,04. Masih adanya siswa yang putus sekolah di tahun 2024 diakibatkan beberapa persoalan yang masih terus dihadapi Pemerintah Kabupaten Blora dalam

mengentaskan Anak Tidak Sekolah seperti perkawinan anak, anak yang bekerja dan masalah kemiskinan.

Tabel II.36

Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Blora Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Siswa Putus Sekolah SD Sederajat	SMP Sederajat
Jati	14	20
Randublatung	25	54
Kradenan	8	23
Kedungtuban	16	16
Cepu	19	20
Sambong	8	2
Jiken	8	15
Bogorejo	7	16
Jepon	14	42
Blora	14	56
Banjarejo	15	72
Tunjungan	12	24
Japah	0	14
Ngawen	9	41
Kunduran	19	87
Todanan	6	68

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Tabel II.37

Indikator Kecukupan Akses Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	Belum tersedia
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	Belum tersedia
3.	Angka Kelulusan (AL) Kejar Paket A/B/C	%	100	100	100	100	Belum tersedia
4.	Angka melek huruf	%	87.42	71,90	88,30	88,33	88,73
5.	Rasio guru/1.000 murid	%	61,11	67,59	68,49	69,39	Belum tersedia
6.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	%	73,77	79,06	79,96	80,86	Belum tersedia
7.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D IV/S1						Belum tersedia
	TK	%	82	73,55	74,27	80,81	80,81
	SD	%	92	97,37	98,36	100	Belum Tersedia
	SMP	%	98	98,76	98,23	100	Belum Tersedia

Keterangan:

Sumber: Satu Data Blora,2024

**) data belum tersedia*

Dari data yang disajikan, yang perlu menjadi perhatian adalah data persentase guru yang memenuhi kualifikasi DIV/S1. Meskipun mengalami kenaikan, indikator tersebut merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang ditargetkan untuk dapat dipenuhi 100 persen. Selanjutnya yang perlu dprioritaskan adalah angka melek huruf. Angka melek huruf Kabupaten Blora pada tahun 2024 sebesar 88,73 persen. Hal tersebut diartikan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Blora yang dapat membaca dan menulis huruf latin sebesar 88,73 persen dan masih terdapat 11 persen penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin.

Kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah juga dapat diindikasikan melalui nilai akreditasi sekolah. Perkembangan akreditasi sekolah di Kabupaten Blora tahun 2020–2024 ditampilkan pada Tabel II.38 berikut:

Tabel II.38
Akreditasi Sekolah SD Sederajat Dan SMP Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Jenjang Sekolah	Jenis Akreditasi	Jumlah Sekolah				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	SD	A	101	153	142	156	155
		B	390	413	407	429	433
		C	3	3	4	3	2
		Non	50	NA	NA	4	1
2	SMP	A	31	46	45	42	45
		B	31	31	33	38	40
		C	14	14	14	15	14
		Non	3	NA	NA	7	5

Sumber: Satu Data Blora,2024

Faktor penting menjadi indikator yang mendukung nilai akreditasi suatu sekolah adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah, kualitas guru, manajemen sekolah, proses belajar mengajar dan mutu lulusan. Untuk sekolah yang belum diakreditasi dikarenakan ada sekolah yang masih menunggu jadwal akreditasi dan ada juga yang merupakan sekolah baru. Dari sekian jumlah sekolah yang belum diakreditasi, semuanya adalah sekolah berstatus swasta.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota adalah jenjang PAUD, Dasar dan Kesetaraan. Indikator SPM yang mencakup aspek partisipasi dan kualitas Pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten Blora masih terdapat beberapa indikator yang menjadi perhatian. Seperti, angka partisipasi kesetaraan yang masih jauh dari target SPM 100%. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan setelah putus sekolah. Selain itu, banyak yang sudah bekerja sehingga tidak memiliki minat lagi untuk melanjutkan sekolah pada jenjang kesetaraan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; dan Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan disajikan dalam Tabel II.39 berikut.

Tabel II.39

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	68,46	95.07	92,43	93,43
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,08	98.80	97,22	98,21
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	11,11	4.3	11,05	11,05
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	51,39	55.37	62,97	79,18
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	38,81	41.6	50,9	72,59
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	60,1	67.25	71,92	79,7
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,81	56.33	63,2	75,04
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,07	83	82,98	82,98
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	61,95	78.2	80,81	80,81

No.	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
10	Indeks Iklim Keamanan SD	81,53	69.73	74,57	74,56
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	76,87	69.46	73,88	74,78
12	Indeks Inklusivitas SD	84,77	56.64	74,57	57,35
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	75,12	66.78	70,25	70,25
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	73,28	67.69	74,78	73,87
15	Indeks Inklusivitas SMP	73,26	55.23	57,02	57,02

Sumber: Satu Data Blora,2024

2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menjalani hidup sehat, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Keberhasilan upaya ini memerlukan kesinambungan program antar sektor dan kelanjutan dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya.

Fokus sektor kesehatan adalah meningkatkan pelayanan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan memperkuat pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care). Upaya ini mengutamakan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, didukung oleh inovasi serta pemanfaatan teknologi.

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang dinilai melalui beberapa indikator pembangunan kesehatan. Kondisi masyarakat kabupaten Blora dari indikator kesehatan digambarkan dalam Tabel II.45 berikut.

Tabel II.40
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Kasus Kematian Bayi	kasus	99	118	118	121	143
2.	Kasus Kematian Balita	kasus	18	13	21	22	15
3.	Kasus Kematian Ibu	kasus	10	23	10	13	13
4.	Jumlah Kematian Neonatal	kasus	49	81	75	103	104
5.	Jumlah Balita gizi buruk	kasus	70	73	68	51	48
6.	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita.						
	- Sangat Kurang	%	1,6	1,38	1,5	1,44	1,48

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
7.	- Kurang	%	9,3	8,1	11,6	12,34	12,47
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
8.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0-59 bulan (%)	0,15	0,15	0,14	0,11	0,10
9.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	%	5,7	5,9	7,8	7,48	7,61
10.	Jumlah Balita *stunting*	kasus	3.597	4.172	3.581	2.930	2.832
	Jumlah Baduta *stunting* (0-23 bulan)	kasus	855	783	981	733	669
	Jumlah Balita *stunting* (24-59 bulan)	kasus	3.597	3.389	2.600	2.197	2.153
11.	Prevalensi *stunting*	%	14,96	9,23	7,7	6,31	5,99
	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta (0-23 bulan)	%	1,8	1,64	2,11	4,55	3,95
	Persentase kasus *stunting* pada Balita (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita (24-59 bulan)	%	5,8	5,27	5,59	7,25	7,04
12.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	71,9	75,3	75,3	75,3	79,6
13.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	%	98,2	94,3	90,7	100	91,23
14.	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	100	100	100	100	100
15.	Jumlah penderita penyakit DBD	kasus	113	204	594	266	459
16.	Jumlah penderita kusta	kasus	45	45	83	39	50
17.	Jumlah penderita filiariasis	kasus	18	18	16	15	12
18.	Jumlah kasus HIV/AIDS	kasus	176	73	213	177	212
19.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	)*	)*	)*	)*
20.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	3,95	2,8	0,03	0	)*
21.	Persentase pelayanan rujukan kegawat daruratan di puskesmas	%	100	100	100	100	100
22.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	95	92	)*
23.	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	85	86	86	87	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
24.	Persentase kehamilan risiko tinggi yang tertangani	%	100	100	100	100	100
25.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
26.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	98,8	99,4	99,7	99,43	99,4
27.	Prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	angka	102	82	128	136	160,47
28.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (*success rate*)	%	94	89	86	88	82,13
29.	Kejadian malaria per 1000 org	ANGKA	0,009	0,016	0,03	0,55	0,03
30.	Jumlah kasus Hipertensi yang tercatat	kasus	87.366	230.100	265.146	264.345	277.017

Sumber: Satu Data Blora, 2024

) Data belum rilis*

Kasus gizi buruk menurun 3 kasus pada tahun 2024 menjadi 48 kasus. Gizi buruk yang menyebabkan kondisi *stunting* terkait dengan masalah asupan pangan, gizi dan malnutrisi. Ketiga komponen ini masih ditemukan adanya kasus di Kabupaten Blora. Tantangan pertambahan penduduk pada tahun 2030 perihal bahaya kelaparan, kekurangan pangan akibat perubahan iklim dan konflik antar negara menjadikan isu pemenuhan gizi pada bayi, balita dan ibu hamil merupakan isu strategis untuk diprioritaskan pencegahannya. Dalam hal ini, dampak kesehatan akibat kurang gizi dan pangan tidak bisa diselesaikan oleh urusan kesehatan sendiri, tetapi terkait dengan urusan pengendalian lingkungan hidup dan urusan ketahanan pangan.

Pembangunan kesehatan menganut paradigma sehat, yang mencakup tiga pendekatan utama: promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), dan kuratif (pengobatan penyakit). Paradigma ini diterapkan melalui peran aktif institusi pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik, serta didukung oleh sumber daya manusia kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kondisi institusi pelayanan kesehatan yang baik dengan fasilitas yang memadai, tenaga kerja yang kompeten, dan manajemen yang efisien akan secara langsung mendukung tercapainya indikator pembangunan kesehatan yang lebih baik, seperti peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, ibu, dan balita, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Hal ini

mencerminkan pentingnya penguatan institusi dan sumber daya kesehatan untuk memastikan keberlanjutan paradigma sehat.

Kondisi sarana kesehatan di Kabupaten Blora 2020- 2024 disajikan pada Tabel II.41 berikut:

Tabel II.41

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Sarana Kesehatan	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Posyandu	Unit	1.303	1.310	1.310	1.313	1.313
2.	Polindes/PKD	Unit	214	214	214	209	208
3.	Puskesmas						
	- Induk	Unit	26	26	26	26	26
	- Pembantu	Unit	56	56	56	53	53
	- Keliling	Unit	32	32	32	36	36
4.	Jumlah ambulans yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Unit	38	35	35	52	55
5.	RSU Daerah						
	- Tipe C	Unit	2	2	2	2	2
6.	RSU Pemerintah						
	- Tipe D	Unit	1	1	1	1	1
7.	RSU Swasta						
	- Tipe C	Unit	0	0	0	1	1
	- Tipe D	Unit	3	3	3	2	4
8.	RS Khusus Swasta (Tipe C)	Unit	0	0	1	1	2
9.	Klinik/Praktik Dokter	Unit	418	423	423	183	100
10.	Laboratorium Kesehatan						
	- Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1
	- Swasta	Unit	6	3	3	3	4

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Di tengah tantangan megatren pertumbuhan penduduk abad ke-21 dan meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan, Kabupaten Blora membutuhkan rumah sakit dengan fasilitas dan layanan yang lebih lengkap. Penurunan jumlah fasilitas laboratorium sejak tahun 2021 semakin memperburuk situasi, sehingga peningkatan layanan kesehatan yang mampu mengatasi kebutuhan diagnostik dan pengobatan masyarakat secara lebih komprehensif merupakan kebutuhan mendesak.

Tabel II.42 menyajikan jumlah tenaga medis di Kabupaten Blora pada tahun 2020–2024.

Tabel II.42

Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Tenaga Kesehatan	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
1.	Dokter Umum	Orang	216	196	216	285	285
	Rasio Dokter Umum	%	23,8	20,7	23,7	31,1	31,1
2.	Dokter Spesialis	Orang	77	81	107	124	124
	Rasio Dokter Spesialis	%	8,2	8,9	11,7	12,5	12,5
3.	Dokter Gigi	Orang	32	35	35	41	41
	Rasio Dokter Gigi	%	3,4	3,7	3,7	4,47	4,47
4.	Perawat	Orang	1023	1024	1111	1149	1149
	Rasio perawat	%	108,9	108,1	121,8	125,46	125,46
5.	Bidan	Orang	748	798	814	801	801
	Rasio Bidan	%	80	84	87	87,5	87,5
6.	Ahli Kes. Masy.	Orang	35	35	69	68	68
7.	Ahli Penyeh. Lingk.	Orang	52	47	46	48	48
8.	Apoteker	Orang	47	52	89	99	99
	Rasio	%	5	5,5	9,1	10,8	10,8
9.	Ahli Gizi	Orang	73	71	74	77	77
	Rasio ahli gizi	%	7,8	7,5	7,8	8,4	8,4
10.	Analis Lab.	Orang	94	103	126	137	137
11	Jumlah Tenaga Sanitarian	orang	52	47	46	48	48
	Rasio	%	5,5	5	4,9	5,2	5,2
12	Ahli Kes. Masy.	orang	35	35	69	68	68
	Rasio	%	3,7	3,7	7,5	7,4	7,4
13.	Bidan Desa	Orang	295	295	295	295	295

Sumber: Satu Data Blora, 2024

**) Data belum rilis*

Sesuai target Nasional terdapat standar rasio tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk sesuai yaitu 45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000 penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk. Berdasar standar tersebut, Kabupaten Blora belum memenuhi standar kecukupan dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan. Meskipun demikian, upaya peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk terus dilakukan setiap tahun.

Kabupaten Blora memiliki tiga rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah, yaitu RSUD Dr. R. Soetijono, Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto, Cepu, RSUD Samin Surosentiko, Randublatung. Kabupaten

Blora Kinerja layanan kedua RSUD yang menjadi pusat rujukan untuk wilayah Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.43.

Tabel II.43

Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Indikator/RSUD	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
BOR (%)	**55,99**	**65,26**	**65,79**	**81,77**	**81,77**
RSUD Blora	49,21	59,33	65,71	88,76	88,76
RSUD Cepu	62,76	71,18	65,87	74,77	74,77
RSUD Randublatung					
LOS (hari)	**5,34**	**3,53**	**3,41**	**4,28**	**4,28**
RSUD Blora	4,63	2,6	2,55	5,27	5,27
RSUD Cepu	6,04	4,46	4,26	3,29	3,29
RSUD Randublatung					
TOI (hari)	**4,19**	**2,81**	**2,69**	**1,01**	**1,01**
RSUD Blora	4,78	3,51	2,6	0,7	0,7
RSUD Cepu	3,59	2,11	2,78	1,31	1,31
RSUD Randublatung					
BTO (kali)	**38,41**	**49,17**	**50,2**	**64,36**	**64,36**
RSUD Blora	38,91	42,27	48,16	58,65	58,65
RSUD Cepu	37,91	56,07	52,24	70,06	70,06
RSUD Randublatung					
NDR (per 1.000 pasien keluar)	**1,048**	**0,328**	**0,61**	**0,036**	**0,036**
RSUD Blora	0,026	0,056	0,039	0,043	0,043
RSUD Cepu	2,07	0,6	1,18	0,028	0,028
RSUD Randublatung					

Sumber: Satu Data Blora, 2024

**) Data sementara*

Keterangan:

BOR: Bed Occupancy Rate (persentase penggunaan tempat tidur di rumah sakit dalam periode waktu tertentu)

LOS: Length of Stay (rata-rata lama rawat inap pasien di rumah sakit)

BTO: Bed Turn Over (rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu di rumah sakit)

NDR: Net Death Rate (angka kematian pasien 48 jam setelah dirawat di rumah sakit)

Merujuk standar yang dipublikasikan oleh Depkes, RI, 2005, BOR (*Bed Occupancy Rate*) yang ideal adalah antara 60–85%. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. LOS *(Length of Stay)* adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus

bersama dengan interpretasi BOR dan TOI *(Turn Over Interval).* LOS yang ideal antara 6–9 hari. RSUD Blora dan RSUD Cepu belum memenuhi standar ideal ini. TOI memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin buruk. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1–3 hari.

BTO *(Bed Turn Over)* adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. RSUD Blora dan RSUD Cepu belum memenuhi standar ideal BTO. Sedangkan NDR *(Net Death Rate)* adalah angka kematian >48 jam setelah di rawat untuk tiap-tiap 1000 penderita yang keluar baik hidup/mati. Standar ideal yang ditetapkan Depkes yaitu NDR : <25 per mil. BTO RSUD Blora Dan RS Cepu pada Tahun 2024 sebesar 58,65 dan 70,06 dengan rata-rata BTO sebesar 64,36, angka ini terlalu tinggi dan sudah melampaui standar toleran NDR.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana Kesehatan terutama di daerah Selatan, Pemerintah Kabupaten Blora pada bulan Maret 2024 telah meresmikan RS Samin Soeronsentiko Randublatung dengan Tipe D dengan penyediaan pelayanan instalasi rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD), Instalasi Intensive Care Unit (ICU), pelayanan instalasi PICU/NICU, Instalasi Bedah Sentral (IBS), farmasi, gizi, pemulasaraan jenazah, laboratorium, radiologi, dan fisioterapi dengan tenaga medis sejumlah 68 SDM tenaga medis dan empat dokter spesialis serrta 51 tempat tidur, serta menerima pelayanan kesehatan yaitu poli penyakit dalam, poli bedah, poli anak, dan poli *observed.*

Selanjutnya, untuk Kondisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tahun 2020–2024 disajikan dalam Tabel II.44 berikut.

Tabel II.44
Kondisi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	98,83	100,00	100,00	100,00	77,23
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	100,00	100,00	100,00	69,87
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,48	100,00	100,00	100,00	76,99

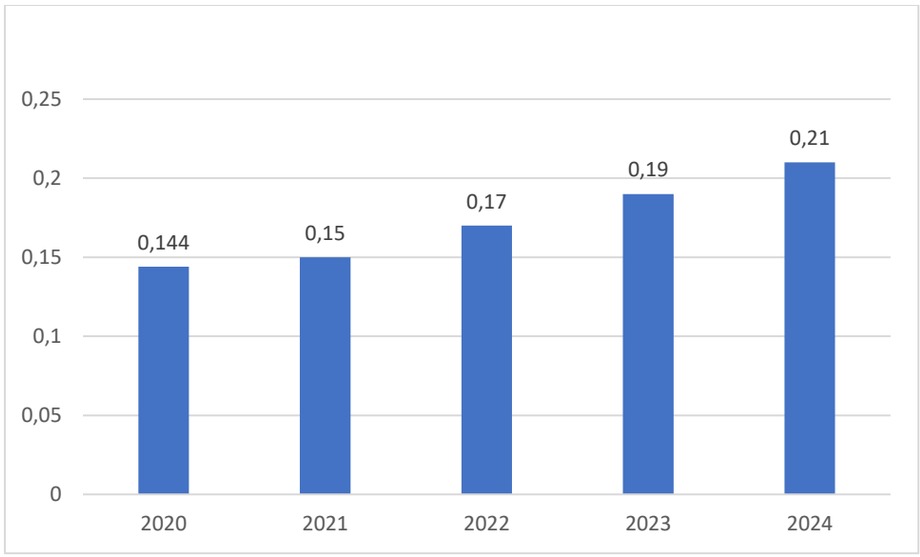
No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	Pelayanan kesehatan balita	98,09	98,28	99,90	100,00	91,27
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	75,34	96,87	100,00	92,78
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	30,41	78,13	100,00	100,00	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	75,70	85,94	93,27	100,00	88,41
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	33,54	77,00	100,00	100,00	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	96,51	98,51	100,00	100,00	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	98,18	100,00	100,00	100,00	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	58,98	62,17	67,94	100,00	100
12	Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi HIV	81,47	95,36	98,44	100,00	100

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Tantangan utama dalam perencanaan kesehatan di masa depan adalah pelayanan untuk usia lanjut. Berdasarkan proyeksi megatren 2030–2045, struktur usia penduduk diperkirakan akan semakin menua (*aging population*), yang berarti jumlah penduduk lansia akan meningkat pesat. Kondisi ini akan membawa dampak besar bagi pemerintah, karena kebutuhan layanan kesehatan untuk lansia akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan dan sistem layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan lansia dengan efisien dan berkelanjutan.

Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Terdapat tiga kategori dalam Indeks Keluarga Sehat: Keluarga Sehat dengan nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat dengan nilai IKS antara 0,5 dan 0,8, serta Keluarga Tidak Sehat dengan nilai IKS < 0,5.

Capaian IKS Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.29
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

Berdasarkan nilai Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Blora kurun waktu 2020-2024, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi jika melihat komponen yang dikur dalam IKS terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian rendah. Capaian terendah terlihat pada indikator penderita hipertensi yang berobat teratur sebesar 18,06 persen. Hal ini terjadi karena keengganan penderita melanjutkan pengobatan untuk menstabilkan kondisi serta Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 26,33 persen.

Nilai IKS di Kabupaten Blora pada selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 0,14 meningkat di tahun 2025 sebesar 0,21. Meskipun mengalami peningkatan, masyarakat Blora berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat karena masih di bawah 0,5. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan agar masyarakat Kabupaten Blora mencapai kategori Keluarga Sehat dengan meningkatkan program kesehatan preventif, memperluas cakupan layanan kesehatan, serta memperbaiki kondisi lingkungan yang mendukung pola hidup sehat. Faktor yang perlu diperhatikan adalah gaya hidup masyarakat, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta pola konsumsi makanan bergizi.

2.1.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur melalui aspek fasilitas dan infrastruktur wilayah yang terdiri dari lima komponen utama: (i) kebinamargaan, (ii) sumber daya air, (iii) keciptakaryaan, (iv) penataan ruang, dan (v) bangunan gedung. Kelima komponen ini memiliki kontribusi langsung terhadap kelancaran aktivitas perekonomian, pelayanan publik, kegiatan sosial-kemasyarakatan, serta penyediaan fasilitas umum yang nyaman, aman, dan tangguh.

Tabel II.45 menunjukkan kinerja urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel II.45
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jalan mantap	%	63,7	64,31	67,05	61,28	62,34
2.	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	44,14	45,54	50,24	32,41	53,82
Indikator Lainnya							
Sub bidang Kebinamargaan							
3.	Panjang jembatan baru yang terbangun	km	1	0,024	0,012	0,182	0
4.	Persentase jalan kondisi baik	%	22,29	40,36	39,75	47,28	43,11
5.	Persentase jembatan kondisi baik	%	86,06	22,76	0,9	1,50	0,63
6.	Presentase jembatan kondisi sedang	%	54,47	54,47	17,72	17,13	54,69
7.	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan kondisi baik	%	100	100	100	100	100
Sub bidang sumber daya air							
7.	Persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	44,13	51,03	50,24	50,51	58,76
8.	Persentase embung kondisi baik	%	51,67	52,5	52,5	52,5	58,66
9.	Persentase waduk kondisi baik	%	90	90	90	90	83,64
Sub bidang keciptakaryaan							
10.	Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	82	80	NA	*)	*)

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
11.	Panjang jalan lingkungan /lokal	Km	2.981	2.991	NA	7,708	Belum rilis
12.	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (drainase jalan lingkungan)	Km	580	560	168,665	*)	*)
13.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.	%	89	90	90,56	91,18	95,30
	Prosentase rumah tangga mengakses air minum yang layak	%	78,58	82,80	93		42,99
	Prosentase rumah tangga mengakses air minum yang aman	%	NA	7,20	9,5	7,49	52,31
	Prosentase rumah tangga mengakses air minum melalui jaringan perpipaan	%	NA	NA	25		52,31
	Prosentase rumah tangga mengakses air minum melalui bukan jaringan perpipaan	%	NA	NA	75		42,99
14.	Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman	%	95	70	70,71	70,85	90,14
	Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang layak	%	NA	NA	95.6	70,84	84,59
	Persentase Rumah tangga mengakses sanitasi yang aman	%	NA	NA	1,4		5,55
15.	Panjang turap/talud/ beronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	km	0,73	0,95	4,79	4,37	1,66
Sub bidang penataan ruang							
16.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital.	Dokumen	1	0	2	4	7
17.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan	%	100	100	100	100	100
18.	Jumlah kasus pelanggaran terhadap RTRW	kasus	0	0	0	0	0
Sub bidang Bangunan Gedung							

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
19.	Persentase bangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran selesai dibangun	%	100	100	100	100	100

Keterangan:
**) tidak menghitung*
***) tanpa poin kontinuitas dan kemudahan akses*
Sumber: Satu Data Blora, 2024

Pada tahun 2024 daerah irigasi terlayani irigasi di Kabupaten blora telah mencapai 53,83 persen, meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2023 sebesar 32,41 persen. Faktor yang dapat mendorong peningkatan Daerah Irigasi terlayani jaringan irigasi melalui kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibiayai dari DAK, APBD dan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan yang baik dan berkelanjutan setiap tahunnya, serta adanya koleborasi dan pertisipasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang baik dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Kelembagaan pengelola sumber daya air yang ada di Kabupaten Blora.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota pada Tahun 2024 tercatat sebesar 95,30%, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 91,18%.

Pemerintah Kabupaten Blora terus berusaha untuk memenuhi pencapaian target penyediaan air minum dengan segala keterbatasan yang ada. Usaha yang dilakukan di antaranya pengusulan pemanfaatan air baku Bendungan Randugunting untuk air minum. Pemerintah Kabupaten Blora belum mampu membangun sendiri jaringan SPAM karena anggaran yang sangat terbatas sehingga mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk dibangun SPAM Regional yang akan melayani wilayah Kabupaten Blora, Rembang dan Pati. Nantinya Pemkab Blora akan mendapatkan alokasi air minum sebesar 100 liter/detik, sedangkan Rembang dan Pati masing-masing 50 liter/detik. Biaya investasi untuk pembangunan SPAM Regional Randugunting diperkiraan sebesar Rp. 587 Milyar untuk melayani sebanyak 14.200 SR dan kawasan industri di Kecamatan Blora.

Selanjutnya telah berproses pelaksanaan konstruksi Bendungan Cabean oleh Pemerintah Pusat mulai Tahun 2024 untuk penyediaan irigasi di Blora dan Pati. Target pembangunan bendungan ini hingga Tahun 2026. Harapannya nantinya juga dialokasikan penyediaan air baku untuk air minum. Proses pembebasan lahan telah selesai dilaksanakan hingga akhir Tahun 2024 sehingga konstruksi bendungan dapat terus berproses hingga selesai nanntinya.

Demikian juga untuk rencana pembangunan Bendungan Karangnongko pada saat ini sedang berproses untuk pengadaan lahan yang ditangani oleh Kementerian PUPR. Dari pembangunan Bendungan Karangnongko ini, Kabupaten Blora mendapatkan alokasi untuk air bersih sebesar 200 liter/detik yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Blora bagian selatan. Namun demikian kegiatan ini mengalami kelambatan proses karena begitu besarnya dampak yang ditimbulkan. Warga terdampak dari wilayah Kabupaten Bojonegoro sudah sebagian besar menerima ganti untung. Sementara yang di wilayah Kabupaten Blora masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk pembebasan lahan. Pengerjaan konstruksi bendungan hingga saat ini juga masih di bawah 20% progresnya.

Keberadaan SPAM Strategis Cepu telah mencapai target 8000 sambungan rumah yang tersebar mulai dari Kecamatan Cepu, Sambong, Jiken, Jepon dan Blora. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum dari SPAM Strategis Cepu, telah diusulkan kegiatan Perluasan SPAM Kabupaten Blora kapasitas 100 liter/detik pada Program *Green Infrastructure Initiative* (GII) kerja sama RI–German. Dari program ini ditargetkan ada penambahan layanan air minum sebanyak 6.435 sambungan rumah di wilayah Kecamatan Cepu, Jiken dan Blora. Nilai investasi yang diusulkan dalam pembangunan SPAM ini sebesar kurang lebih Rp. 84 Milyar. Kondisi saat ini, usulan Perluasan SPAM sudah masuk dalam *Blue Book* usulan Bappenas yang berarti potensial untuk didanai. Diharapkan dan perlu diperjuangkan agar dapat masuk ke dalam *Green Book* yang berarti disetujui untuk didanai dari Program GII.

Capaian akses sanitasi yang layak dan aman pada tahun 2023 sebesar 70,85 % dan tahun 2024 meningkat menjadi 90,14%. Kenaikan akses air minum dan sanitasi berdasar hasil kegiatan Penyusunan Data Base Air Minum dan Penyusunan Data Base Sanitasi sehingga didapatkan

data akses yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini menjawab ketidaksinkronan data yang selama ini terjadi.

Peningkatan akses terhadap air minum maupun sanitasi juga banyak dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang berupa kegiatan PAMSIMAS, SANIMAS dan SANITASI LPK. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun dan Kabupaten Blora mendapatkan cukup banyak alokasi kegiatan.

Kesesuaian pemanfaatan ruang telah mencapai 100 persen sehingga kondisi ini perlu untuk dipertahankan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara terus menerus guna menciptakan daya dukung yang baik dalam penyelenggaraan tata ruang.

Berkaitan dengan bangunan gedung, Pemerintah Kabupaten Blora berusaha maksimal untuk menyelesaikan pembangunan utamanya untuk gedung-gedung instansi vertikal yang secara teknis tidak mempunyai kemampuan untuk membangun. Kemampuan TABG perlu terus ditingkatkan untuk menilai kelayakan bangunan baik bangunan milik pemerintah maupun non pemerintah. Pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan keahlian. Diperlukan pendataan yang akurat terkait keberadaan dan pengklasifikasian penyedia jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Blora.

Kondisi jalan dan jembatan sebagai infrastruktur utama konektivitas wilayah menjadi prioritas pembangunan. Gambar II.30 menunjukkan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten prioritas yang membentuk *backbone* wilayah. Sementara itu, secara detail, kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel II.46.

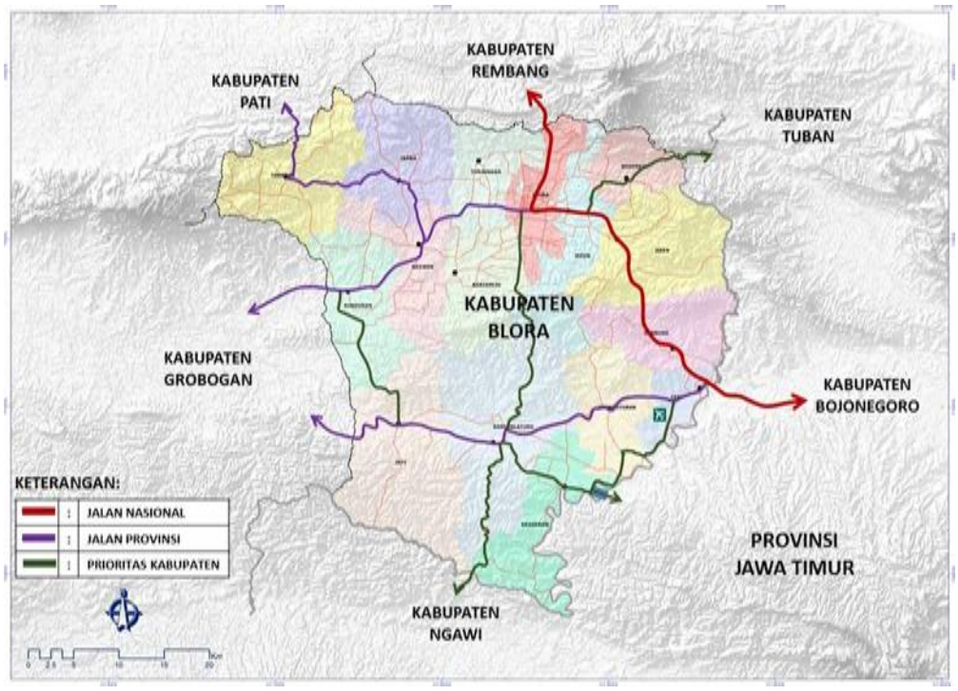
Tabel II.46

Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Total Jalan Nasional (km)	km	38.48	38.48	38.48	44,07	44,07
2.	Total Jalan Provinsi (km)	km	99.08	99.08	99.08	96,29	96,29
3.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (km)	km	269.93	488.65	481.35	433,20	394,96
4.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Baik (%)	%	22.29	40.36	39.75	47,28	43,11
5.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (km)	km	501.46	289.99	330.51	128,32	176,15

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Sedang (%)	%	41.41	23.95	27.30	14,00	19,23
7.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (km)	km	412.45	107.71	63.96	91,10	56,25
8.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Ringan (%)	%	34.06	8.89	5.28	9,94	6,14
9.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (km)	km	27.00	324.49	335.02	263,73	288,74
10.	Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Ruas Jalan Rusak Berat (%)	%	2.24	26.80	27.67	28,78	31,52
11.	Total Jalan Kabupaten/Kota (km)	km	1.210,84	1.210,84	1.210,84	916,3	916,10
12.	Jembatan kondisi baik	meter	86.06	NA	312.10	22,6	82,8
13.	Jembatan kondisi sedang	meter	8.00	NA	NA	97,55	1188,01

Sumber: Satu Data Blora, 2024



Gambar II.30
Peta Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Prioritas Kabupaten di Kabupaten Blora Tahun 2023

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022, jalan nasional (Jalan Kolektor Primer-1) yang melintasi wilayah Kabupaten Blora sepanjang 44,07 km. Sementara itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022, ruas jalan provinsi (Jalan Kolektor Primer-2) yang berada di wilayah Kabupaten Blora sepanjang 96,29 km. Sesuai

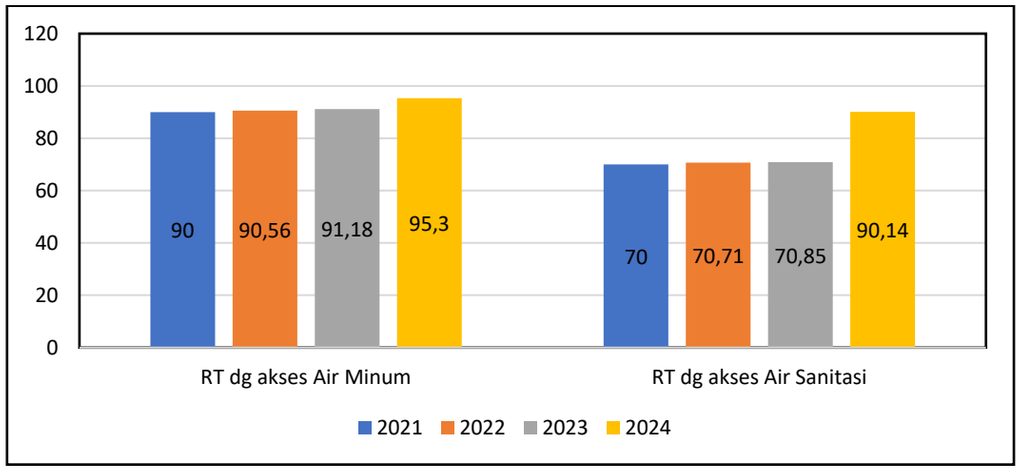
dengan Keputusan Bupati Blora Nomor 620/175/2023 menyebutkan status ruas jalan kabupaten sebanyak 206 ruas sepanjang 916,10 km.

Jalan kondisi mantap mengalami peningkatan dari sebesar 61,28 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 62,34 persen pada tahun 2024. Namun demikian realisasi kondisi jalan mantap ini masih jauh dari target RPJMD sebesar 71 persen. Demikian pula, jalan kondisi baik dari semula 47,28 persen pada tahun 2023, menurun pada tahun 2024 menjadi 43,11 persen. Jalan kondisi sedang dari semula sebesar 14 persen pada tahun 2023, mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 19,23 persen. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan peningkatan jalan sepanjang 24,416 km, rehabilitasi jalan sepanjang 1,734 km dan rehabilitasi jembatan 20 m. Realisasi anggaran yang terserap sebesar kurang lebih Rp. 58,6 Milyar dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Target capaian kemantapan jalan kabupaten tidak tercapai dikarenakan terdapat perubahan metode dan penilaian survey kondisi jalan yang dilaksanakan, sehingga mengurangi nilai kemantapan jalan yang telah tercapai. Adanya *updating* SK Jalan Kabupaten di tahun 2023 (terdapat *downgrade* dan *upgrade* ruas jalan) yang dapat mempengaruhi kemantapan jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang semakin pesat, kondisi cuaca dan ketersediaan alokasi anggaran yang terbatas juga banyak mempengaruhi penurunan kondisi jalan. Oleh karena itu pada tahun 2025 diambil kebijakan kembali melakukan pinjaman daerah untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan.

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah telah dibangun Jalan Randublatung – Getas – Batas Kabupaten Ngawi melalui dana Inpres Jalan. Tahun 2023 dialokasikan sebesar lebih kurang Rp. 53 Milyar untuk membangun 10 km. Pada tahun 2024 dilanjutkan dengan dana Inpres Jalan sebesar sekitar Rp. 25 Milyar untuk menuntaskan sepanjang 3 km. Tuntasnya pembangunan jalan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk akses lalu lintas dan menyingkat jarak dan waktu perjalanan menuju jalan tol di Ngawi dan Sragen maupun jalan nasional Solo – Ngawi.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk layanan wajib dasar. Oleh karena itu, terdapat Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi dengan capaian disajikan dalam Gambar II.31 berikut.



Gambar II.31

Grafik Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021-2024

2.1.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan adalah aspek penting dalam pembangunan yang berfokus pada penyediaan rumah layak huni serta pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat. Sementara itu, kawasan permukiman harus sejalan dengan pembangunan di tingkat lingkungan hunian, dengan tujuan untuk menciptakan kawasan permukiman yang tertata dengan baik, aman, nyaman, dan sehat. Peran tersebut yang membuat perumahan dan kawasan permukiman erat kaitannya dengan aspek sosial ekonomi masyarakat seperti kesehatan, perekonomian, keselamatan dalam bencana hingga kriminalitas. Kegiatan masyarakat dapat memunculkan permasalahan yang disatukan dalam isu perumahan dan Kawasan permukiman yaitu berupa rumah tidak layak huni, kawasan kumuh dan *backlog* perumahan.

Tabel II.47

Kondisi Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026 (Komponen Indikator Tingkat pembangunan infrastruktur daerah)							
1.	Persentase rumah layak huni	%	68,56	66	66,22	67,00	67,99
2.	Persentase kawasan perkotaan non kumuh	%		99,67	73,56	96,28	96,29
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lainnya							

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.	Luasan Kawasan Kumuh di perkotaan	Ha	18,01	347.25 Sk Baru	374,1	325,73 Sk Baru	324,44
4.	Pemakaman Umum yang terpelihara	Kawasan	24	24	24	24	24
5.	Jumlah peningkatan kualitas RTLH	Unit	1278	1261	970	1969	2507
6.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten (SPM)	%	100	100	100	100	100
7.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	%	100	100	100	100	100
8.	Jumlah Rumah tidak layak huni	unit	87.543	87.543	85.350	83.402	80.89
9.	Jumlah rumah layak huni	unit	165.152	165.152	167.309	169.293	171.800

Sumber: Satu Data Blora, 2024.

Kawasan kumuh di Kabupaten Blora berdasarkan pada perubahan Keputusan Bupati Blora Nomor: 663/515/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blora dengan luasan total kawasan kumuh seluas 369,28 ha di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Cepu (150,92 ha), Kecamatan Blora (134,96 ha), Kecamatan Randublatung (36,19 ha), Kecamatan Kunduran (16,67 ha), Kecamatan Ngawen (18,93 ha), dan Kecamatan Jepon (9,62 ha). Pada Tahun 2024 luasan kawasan kumuh berkurang menjadi 324,44 ha atau berkurang sebesar 1,29 ha. Pengurangan tergolong sagat rendah dibandingkan dengan pengurangan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh kawasan kumuh yang kurang menjadi perhatian penanganan. Sedangkan penanganan kumuh harus dilakukan oleh multi sektor yang melibatkan berbagai OPD. Sehingga apabila tidak ada komitmen kuat maka penanganan kumuh di Kabupaten Blora akan sulit tercapai.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dengan besaran 2497 unit rumah dalam bentuk penanganan berupa kolaborasi dari berbagai pendanaan. RTLH yang tertangani dengan APBD kabupaten (153 unit), Banprov (627 unit), Dana Desa (62 unit), BSPS (1544 unit), Kemensos (15 Unit), CSR Djarum (10 Unit), Baznas RI (10), Baznas Provinsi (45 Unit) dan Baznas kabupaten (31 Unit). Sementara itu, hambatan penanganan RTLH terletak

pada status kepemilikan rumah bukan hak milik atau menempati lahan yang tidak sah.

Selain itu, terdapat isu lain yang belum tertangani yaitu adanya backlog perumahan di Kabupaten Blora yang perlu mendapatkan perhatian. Backlog sendiri merupakan kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam kawasan atau wilayah tertentu dihitung dari jumlah yang menempati. Kabupaten Blora backlog 13.342 penghunian atau 3.14% daru jumlah rumah yang terdata di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu kendala penanganan yaitu backlog sendiri tidak memiliki nomenklatur khusus dalam skema program/kegiatan/sub kegiatan urusan perumahan dan pemukiman. Sehingga isu backlog saat ini masih memerlukan pendalaman mulai dari pendataan dan perencanaan kedepan serta koordinasi vertikal dalam memberikan gambaran backlog di Kabupaten Blora.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk dalam layanan wajib dasar dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi pada setiap tahunnya. Jenis pelayanan yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota serta Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berikut merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan:

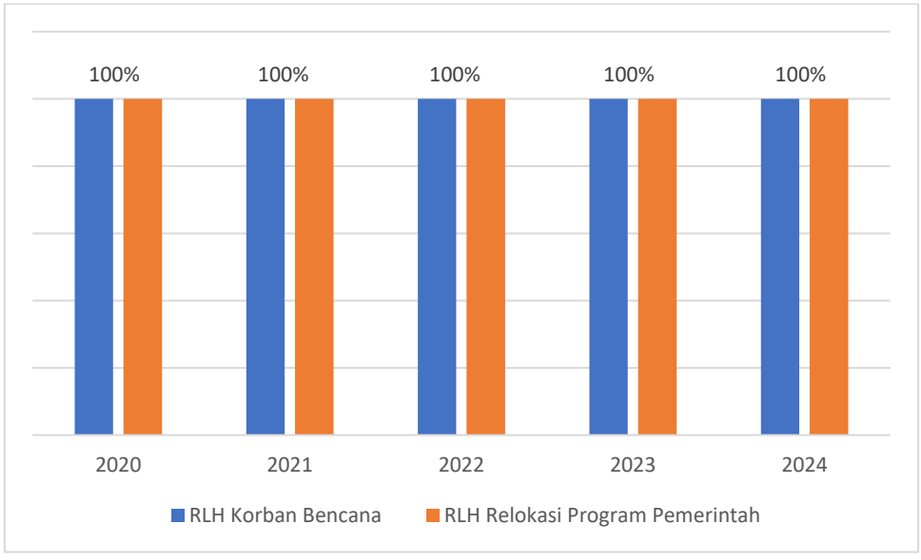
Tabel II.48
Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota		100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	6	50	42	9
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program		100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program oleh fasilitasi penyediaan rumah yang Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang layak huni	0	0	0	12	16

Sumber: Satu Data Blora, 2024.

Tingkat pencapaian pada setiap tahunnya mampu mencapai 100 persen didasarkan pada tahapan penerapan SPM berupa pendataan, perhitungan kebutuhan dan penyusunan rencana pemenuhan. Sementara itu, jumlah realisasi indikator fluktuatif dikarenakan fenomena bencana dan relokasi pembangunan pemerintah merupakan fenomena yang tidak bisa diukur secara tepat dalam rentang waku satu tahun saja. Sementara itu, kendala yang dihadapi yaitu kebijakan lembaga vertikal yang belum saling terintegrasi sehingga berdampak di daerah.



Gambar II.32
Capaian SPM Perumahan Permukiman pada Pengadaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

2.1.3.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kondusivitas wilayah merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatakan daya saing daerah. Kondusivitas wilayah diukur melalui aspek Gangguan Keamanan dan Ketertiban dengan komponen pembentuknya adalah Penanganan Penyakit masyarakat, Penanganan Kriminalitas, dan Penanganan Pelanggaran K3. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dari Perangkat Daerah Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Regulasi yang mendasari adalah (i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (ii) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (iii) Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan (iv) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blora periode 2020–2024 ditampilkan pada Tabel II.49 berikut:

Tabel II.49
Kondisi Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

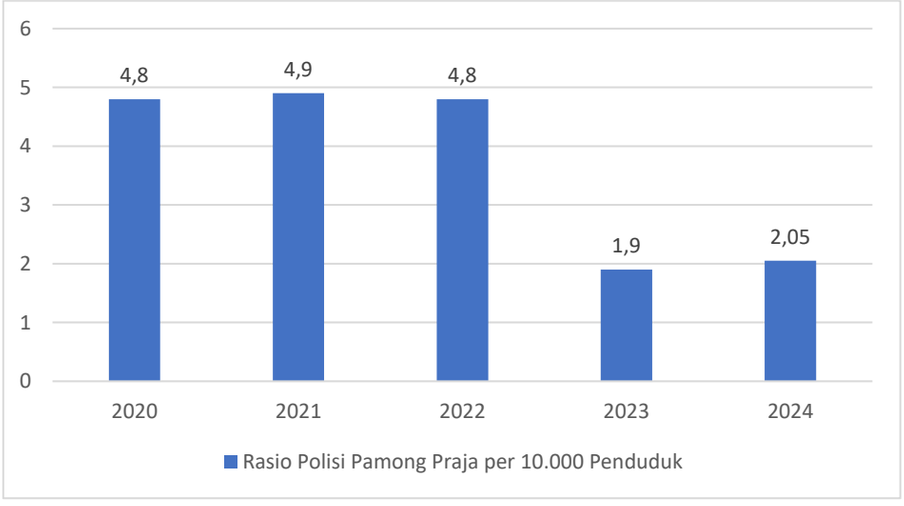
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada tertangani	%	100	100	100	100	100
Indikator Lainya							
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	56,25	56,25	56,25	56,25	75
3.	Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	181	180	180	171	134
4.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		4,8	4,9	4,8	1,9	2,05
5.	Jumlah Linmas	Orang	7.318	7.326	7.326	6.869	6..869
6.	Jumlah Pos Siskamling	Unit	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	100	100	100	100	0
8.	Jumlah warga negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	13	9.246	4.000	7.000	4.000
9.	Persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	100	0	0	0
10.	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang	599.006	599.006	723.809	851.796	851.796
11.	Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	%	0	100	0	0	0
12.	Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	0	0
13.	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	%	100	100	100	100	100
14.	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	400	400	350	350
15.	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase kecepatan respons	%	100	100	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)						
17.	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100
18.	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	100
19.	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	55,67	35	50	47	58
20.	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
21.	Jumlah penanganan kebakaran yang sesuai standar (sesuai dengan *time response*)	Kejadian	24	17	24	66	80
22.	Jumlah WNI memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	47	49	48	144	1647
23.	Jumlah Korban bencana						
	Meninggal	Orang	NA	0	0	1	0
	Luka	Orang	NA	0	0	0	0
	Hilang	Orang	NA	0	0	0	0
	Mengungsi	Orang	NA	0	0	0	0
24.	Jumlah Desa Tangguh bencana	Desa	NA	20	20	20	20
25.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kabupaten Blora tidak dapat sepenuhnya dihindari, karena kemungkinan terjadinya selalu ada dan berpotensi muncul kapan saja. Pada tahun 2024, Kabupaten Blora masih membutuhkan peningkatan sumber daya untuk menyelenggarakan layanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di mana terdapat penurunan jumlah Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 sebanyak 134 orang dibandingkan tahun 2023 sebanyak 171 orang. Penyelesaian pelanggaran K3 di angka 85%, dan kriminalitas tercatat 166 kejadian di tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2023. Adapun penyelesaian pelanggaran perda terus diupayakan guna menciptakan kepatuhan di masyarakat.



Gambar II.33
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Bencana adalah merupakan kondisi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, namun upaya mitigasi yang tepat sangat penting untuk mengurangi potensi dampaknya. Kesiapsiagaan terhadap bencana, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung, menjadi prioritas utama saat ini dan di masa depan, mengingat dampak perubahan iklim yang semakin kompleks dan menjadi ancaman global. Oleh karena itu, desa tangguh bencana harus diberi perhatian khusus sebagai dasar pengembangan sistem mitigasi yang lebih baik. Masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW, perlu memahami dan siap menghadapi sistem peringatan

dini mengenai cuaca, iklim, dan kebencanaan, seperti Early Warning System (EWS).

Dalam rangka penyiapan masyarakat tangguh bencana untuk mitigasi risiko bencana di Kabupaten Blora, Pada Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengembangkan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana melalui pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana pada 3 Desa, 3 Kecamatan dan 1.708 orang. Perkembangan penyiapan masyarakat dalam mitigasi bencana dapat dilihat pada Tabel II.50 di bawah ini.

Tabel II.50
Perkembangan Penyiapan Masyarakat Tangguh Bencana untuk Mitigasi Risiko Bencana di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah Desa yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Desa	3	20	25	4	3
2.	Jumlah Kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Kelurahan	0	3	0	0	0
3.	Jumlah Kecamatan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Kecamatan	16	4	4	1	3
4.	Jumlah Orang yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana	Orang	445	690	45.563	4891	1708

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk urusan wajib dasar, sehingga memiliki Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi. Dua dari tiga Capaian Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 telah tercapai 100 persen. Namun untuk indikator Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian Tahun 2024 sebesar 5 persen sama dengan capaian Tahun 2023. Capaian Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 seperti dapat dilihat pada Tabel II.51 di bawah ini.

Tabel II.51
Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Pelayanan informasi rawan bencana		%	100	100	100	100	95
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	NA	884.333	911.248	642.457	856.540
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		%	3	15,83	5	5	5
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	NA	219.339	45.563	32.150	45.081
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		%	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	NA	9.240	4.000	7.000	4.000

Sumber: Satu Data Blora,2024

2.1.3.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial, merupakan isu utama dalam urusan sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup kebijakan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta penguatan kehidupan beragama dan budaya. Pencapaian tujuan

pembangunan sosial difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, yang melibatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup pemberdayaan PMKS/PPKS dan pengelolaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pembangunan sosial harus berjalan secara terintegrasi, tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat dimensi sosial, budaya, dan agama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini capaian urusan sosial Kabupaten Blora periode 2020–2024 ditampilkan pada Tabel II.52 berikut:

Tabel II.52

Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
Indikator Penyelenggaraan Urusan Sosial yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	%	5,41	0,87	0,87	0,97	0,97
Indikator Penyelenggaraan Urusan Sosial Lainnya							
2.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	2	2	3,7	2,1	2,1
3.	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	50	50	60	65,83	65,83
4.	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	7	7	9	5	5
5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	7	7	96	97	97

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
7.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%	22	22	28	29	29
8.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Panti Sosial	Unit	25	24	28	29	29
10.	Panti Sosial Asuhan	Buah	21	21	23	24	24
11.	Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis	Buah	1	1	0	0	0
12.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	80	80	82	82	82
13.	Jumlah PPKS yang ditangani	Orang	52	176	189	156	156
14.	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	25	24	28	29	29

Sumber : Satu Data Blora,2024
**data belum rilis*

Cakupan penanganan PPKS selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Namun, cakupan sasaran yang terlayani masih berada di angka 65,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun skema bantuan dan intervensi penanganan PPKS bertambah baik dalam volume maupun variasinya, namun jumlah PPKS terus meningkat. Pada tahun 2023, dari 113.478 orang PPKS, baru 0,97 persen yang tertangani, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai 97 persen. Sedangkan persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya hanya 5 persen. Salah satu kategori PPKS adalah fakir miskin. Permasalahan bantuan sosial untuk kemiskinan menghadapi tantangan klasik, yaitu akurasi data. Sistem pendataan yang seragam dari skema pemerintah pusat turut berkontribusi pada persoalan tersebut. Di samping itu, karakter masyarakat yang berperilaku memanfaatkan peluang bantuan juga menyebabkan bias akurasi data.

Selanjutnya, capaian SPM bidang sosial terkait perlindungan dan jaminan sosial pada masa tanggap dan pascabencana untuk korban bencana di kabupaten/kota disajikan dalam Tabel II.53 berikut.

Tabel II.53

Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		%	100	100	100	100	100
		Warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	Orang	27	155	135	69	69
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		%	100	100	100	100	100
		Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	3	11	18	11	11
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		%	100	100	100	100	100
		Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	22	10	16	23	23
4	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak Terlantar yang Memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	orang	14	2	20	25	25
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban		%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
	bencana kab/kota							
		Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	orang	3.205	400	216	150	150

Keterangan:
**) Data sementara, data belum rilis*
Sumber : Satu Data Blora,2024

Pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). WKSBM memiliki peran penting sebagai aset daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Jika ada persoalan yang muncul di tingkat lingkungan, WKSBM dapat berperan langsung memberikan solusi yang sesuai. Pada tahun 2023, di Kabupaten Blora, sebanyak 82 persen WKSBM telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial. Di masa depan, diharapkan setiap kelurahan dapat membentuk WKSBM, sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara lebih efisien dan merata.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

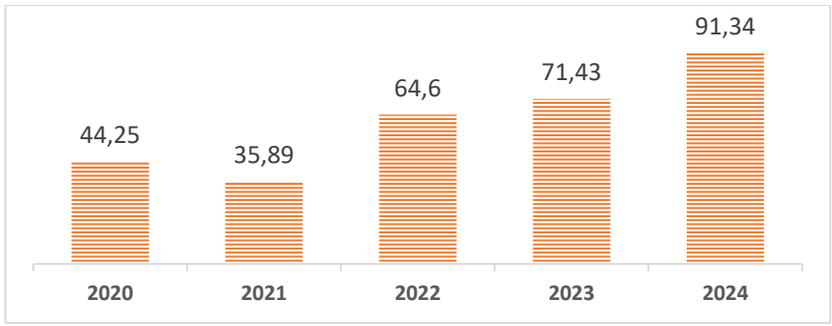
Kewenangan pemerintah kabupaten dalam bidang ketenagakerjaan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja di daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Melalui kewenangan ini, pemerintah kabupaten berupaya menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan melindungi hak-hak pekerja dalam berbagai sektor industri.

Kondisi bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Blora selama periode 2020–2024 ditampilkan pada Tabel II.54 sebagai berikut:

Tabel II.54
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,89	3,81	3,70	3,10	3,57
2.	Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	%	30,35	38,75	37,35	19,88	41,02%
3.	Jumlah peserta pelatihan	Orang	537	591	506	513	1453
4.	Jumlah peserta pelatihan yang diterima kerja	Orang	163	229	189	102	596
5.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	1,999	NA	4.708	3.816	5655
6.	Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)	%	95,11	96,19	72,3	96,89	96,43
7.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,9	70,54	75,08	78,02	6191
8.	Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)	%	44,25	35,89	64,4	71,43	91,34
9.	Jumlah Penawaran Tenaga Kerja	Pena-waran	4.518	6.765	6.947	5.342	6191
10.	Rasio UMK terhadap KHL (%)	%	94	NA	NA	NA	NA
11.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan	Orang	65.542	77.061	83.360	92.685	72.276
12.	Proporsi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	22	24	27	30	37,18
13.	UMK Kab. Blora	Rp	1.834.000	1.894.000	2.040.080	2.101.813	2.101.810
14.	Kebutuhan Hidup Layak	Rp	1.723.960	NA	NA	NA	NA
15.	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat/ lebih rendah	orang	234.628	233.402	290.238	NA	Belum Rilis
16.	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat	orang	98.027	106.363	93.298	NA	Belum Rilis
17.	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA/sederajat/lebih tinggi	orang	102.658	108.656	111.444	NA	Belum Rilis
18.	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma/sederajat/ lebih tinggi	orang	32.700	37.104	24.636	NA	Belum Rilis

Sumber: Satu Data Blora,2024



Gambar II.34
Persentase Penempatan Terhadap Penawaran Kerja di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja pada tahun 2024 sebesar 91,34 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan program pelatihan keterampilan dalam meningkatkan peluang kerja bagi pencari kerja telah menunjukkan hasil yang positif. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan yang mengikuti program tersebut berhasil mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan, yang menunjukkan efektivitas dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan ini juga mencerminkan peningkatan kualitas pelatihan yang diberikan dan lebih banyaknya peluang kerja yang tersedia di sektor-sektor yang relevan dengan keterampilan yang diajarkan.

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Blora saat ini masih menjadi kendala untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, sehingga ke depan diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dan lebih luas dengan *stakeholder* terkait guna meningkatkan *link and match* di pasar kerja daerah maupun luar daerah (regional, nasional dan luar negeri) serta upaya pemberdayaan pekerja untuk kewirausahaan baik dalam konteks untuk usaha mandiri maupun untuk kelembagaan usaha.

Urusan tenaga kerja perlu ditangani lebih intensif dengan pendekatan kemitraan, berbasis komunitas, dan mendorong inovasi masyarakat. Kemitraan dengan kelompok asosiasi pengusaha dan profesional lain di Kabupaten Blora berpeluang mendapatkan kesempatan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak anak. Kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Blora selama periode 2020–2024 ditampilkan pada Tabel II.55 berikut:

Tabel II.55
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
1.	Jumlah Focal point aktif	Unit	43	45	43	43	43
2.	Indeks Pembangunan Gender	%	83,88	84.59	84.92	85,68	85,68
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	%	64,37	64,36	62,64	60,86	60,86
4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	55	56	57	60	60
5.	Jumlah anggota DRPD Perempuan	Orang	5	5	4	4	4
6.	Jumlah perempuan pada jabatan eselon II	Orang	4	4	4	3	3
7.	Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten	Unit	2	2	2	2	2
8.	Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	%	90	90	90	90	90
9.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	0	20	18	21	21
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	%	100	100	100	100	100
12.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
	korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu						
13.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
14.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
15.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
16.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
17.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
18.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	0	0	100	100
19.	Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan	Kelompok	16	16	16	16	16

Sumber: Satu Data Blora, 2024
**data belum rilis*

Upaya pembangunan gender belum optimal, meskipun telah ada 43 focal point aktif dan 90 persen SKPD yang menyusun analisis gender. Salah satu dampak kesenjangan gender adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 21 kasus pada tahun 2023. Pemberdayaan anak ditunjukkan melalui pembentukan 16 kelompok forum anak di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Tantangan ke depan adalah menciptakan budaya adil gender untuk mendukung pembangunan inklusif.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam berbagai bentuk dan penanganan kasus dilakukan sesuai kebutuhan pemulihan korban. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya melalui sosialisasi dan memberikan edukasi kepada anak sekolah dan masyarakat serta

pendampingan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), koordinasi lintas sektoral melalui Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Blora telah memiliki 2 (dua) unit P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkeadilan menuju masyarakat sejahtera. Pembangunan kesetaraan gender bertujuan untuk menguatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih kompetitif.

2.1.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Masalah pangan merupakan tantangan kritis di masa mendatang sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan, termasuk di daerah menjadi sangat krusial dan harus menjadi prioritas. Kondisi pangan di wilayah Kabupaten Blora relatif aman baik dari sisi ketersediaan maupun pola konsumsi pangan oleh masyarakat (tercermin dari angka/skor Pola Pangan Harapan). Meskipun demikian, perlu strategi keberlanjutan untuk kecukupan di masa mendatang dengan menyinergikan dan mengoptimalkan subsistem ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang ada di Kabupaten Blora.

Salah satu yang dapat menjadi tolok ukur ketercapaian tujuan SDG's yaitu Tanpa Kelaparan adalah Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) yang dikeluarkan oleh BPS, Kabupaten Blora pada Tahun 2024 berada di angka 11,19 persen. Namun angka ini masih berada di bawah target dari amanat Perpres 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar lima persen pada tahun 2024.

Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Blora Tahun 2024 berdasarkan buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel II.56

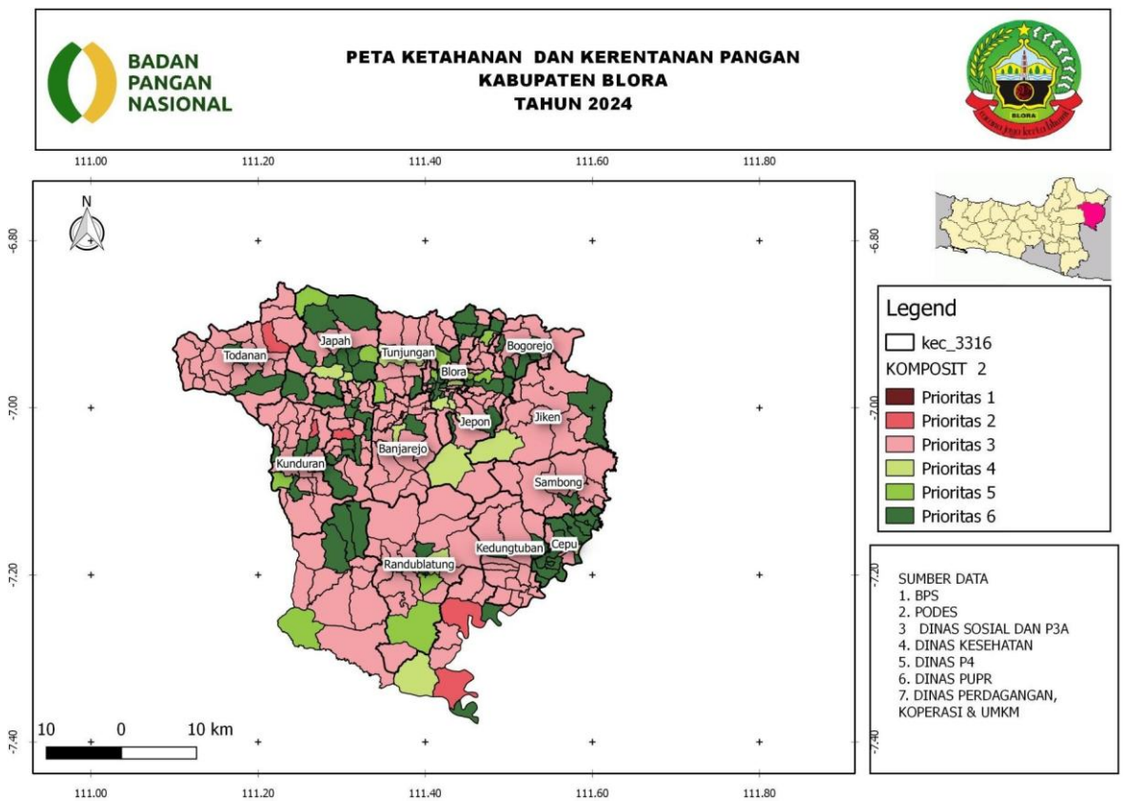
PoV dan IKP Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Uraian	Satuan	Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Prevalensi Ketidakcukupan	%	15,35	14,02	15,49	11,27	11,19

Uraian	Satuan	Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* Sumber data : BPS						
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumber data : Bappenas	angka	85,47	85,87	87,03	86,94	88,53

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Dalam FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) yang merupakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 menunjukkan ada lima desa di Kabupaten Blora yaitu di Desa Kembang Kecamatan Todanan, Desa Jetak Kecamatan Kunduran, Desa Nglebak dan Desa Menderejo Kecamatan Kradenan, dan Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen. Penyebab yang menunjukkan desa mengalami kerentanan pangan ditandai dengan 1) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kecil; 2) Kurangnya sarana prasarana pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3) Jumlah RT tanpa akses air bersih yang tinggi; 4) Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 5) Rasio luas lahan sawah terhadap luas lahan keseluruhan kecil.



Gambar II.35

Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Kabupaten Blora Tahun 2024

Intervensi program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten Blora diarahkan pada kegiatan: Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal; Pembukaan lahan pertanian baru dengan memanfaatkan lahan hutan /Perhutani. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah; Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan; Peningkatan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan; Mendorong masyarakat mewujudkan sarana dan prasarana pangan di desa yang jauh dari pusat kota/ kecamatan; Mendorong peningkatan kuantitas konsumsi pangan masyarakat agar memenuhi standar; Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA) dengan edukasi, pelatihan-pelatihan olahan pangan dan lomba; Pembangunan lumbung-lumbung pangan masyarakat desa dalam rangka memperkuat cadangan pangan pemerintah desa; Memperkuat cadangan pangan pemerintah kabupaten melalui penyediaan gabah/beras setiap tahun sesuai standar. Upaya-upaya intervensi yang dilakukan dapat di gambarkan pada diagram.



Gambar II.36
Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Indikator kualitas konsumsi pangan berupa skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Semakin tinggi skor PPH berarti konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Terdapat 9 kelompok pangan terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok pangan lainnya. PPH digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Di Tahun 2023 skor PPH Kabupaten Blora yaitu 93,9 namun di Tahun 2024 menurun menjadi 89,9. Skor PPH tahun 2024 ini jauh di bawah target Nasional yaitu 95,2. Beberapa faktor yang menjadi penentu yang mendukung penialain skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu besaran keluarga: Semakin besar besaran keluarga, maka semakin tinggi skor PPH; Tingkat pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi skor PPH; Tingkat pendapatan: Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi skor PPH. Pendapatan yang tinggi memudahkan masyarakat untuk membeli/mengolah makanan yang berkualitas dan bergizi melalui penyediaan aneka sayur dan buah serta sumber protein. Salah satu sasaran agar masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan pola pangan harapan yaitu dengan membangun ketahanan pangan daerah supaya kesadaran mereka akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi dan seimbang. Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Blora pada tabel berikut ini.

Tabel II.57
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah desa rawan pangan	Desa	4	4	4	1	0
2	Jumlah desa rawan pangan yang tertangani	Desa	0	2	1	1	0
3	Skor Pola Pangan Harapan	%	90,5	88	89,10	93,9	89,9
4	Tingkat Konsumsi protein hewani	gram/ kapita / hari	16,4	24,58	85,7	85,5	61,0
5	Tingkat konsumsi energi	kkal/ kapita /hari	2.178,20	2.176,00	2.162,00	2.128,00	2.091

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	Ketersediaan Energi Per Kapita	kkal/ kapita /hari	3.063	3.372	3.865	3.934	3.655
7	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/ kapita /hari	122,45	142,23	109,84	96,75	32
	Daging sapi dan kerbau	Ton	756,86	788,87	1.098,88	2.321,99	1.136
	Daging ayam	Ton	2.449,78	2.646,50	3.460,95	3.094,03	3.102
	Telur	Ton	2.449,78	2.646,50	2.058,52	12.639,72	12.640
	Susu	Ton	33,6	33,6	0	0	0
	Ikan	Ton	321,64	322	610,36	65	1.085
9	Tingkat Konsumsi Protein hewani	gram/kapita/ hari	16,4	24,58	89,10	85,5	61,0
10	Tingkat Ketersediaan Protein hewani	gram/Kapita/ Hari	122.45	142.23	109,84	105	32
11	Tingkat konsumsi energi	kkal/kapita/ hari	2.178,20	2.176,00	2.162,00	2.128	2.091
12	Tingkat Ketersediaan energi	Kal/kapita/ Hari	3,063.00	3,372.00	3.865	3.934	3.655
13	Jumlah Desa Rentan Pangan	desa	4	-	41	7	5
14	Jumlah desa rentan pangan yang tertangani	desa	0	-	41	7	5

Sumber: Satu Data Blora,2024

Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah harus terus diupayakan melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan keamanannya sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkesinambungan. Salah satu program peningkatan ketahanan pangan dari Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada awal Tahun 2025. Di samping itu promosi konsumsi pangan beragam dan bergizi serta pemenuhan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri melainkan dengan sistem Mitra kerja dalam urusan ketahanan pangan adalah Kementerian Pertanian, Bulog, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan mitra kerja dari masyarakat adalah gabungan kelompok tani, kelompok tani, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang berperan dalam produsen dan distribusi beras subsidi masyarakat dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan sebuah gerakan

sebagai solusi pemenuhan pangan keluarga yang sehat dan kaya akan kandungan gizi baik, sehingga mampu menekan angka *stunting*.

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA) serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui penyediaan aneka sayur dan buah serta sumber protein. Peran masyarakat untuk membangun ketahanan angan daerah perlu terus ditingkatkan untuk menggugah kesadaran mereka akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi dan seimbang. Penguatan kelembagaan pangan daerah harus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah berkelanjutan dan resilien terhadap kemungkinan bencana yang terjadi.

2.1.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan memberikan arah dan pedoman mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kabupaten/kota. Dalam hal ini, kewenangan urusan pertanahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan pertanahan secara lebih efektif di tingkat lokal. Beberapa kewenangan utama urusan pertanahan kabupaten/kota meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Gambaran urusan pertanahan di Kabupaten Blora tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II.58 di bawah ini.

Tabel II.58
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pertanahan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pertanahan ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1	Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan	%	NA	100	100	100	100

Sumber: Satu Data Blora,2024

Kewenangan pemerintah daerah untuk pengadaan tanah terakhir kali yang dapat dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Ngloram dan dapat terselesaikan dengan baik. Namun demikian sesuai dengan perubahan nomenklatur program kegiatan, pemerintah daerah tidak dapat lagi melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan. Kewenangan hanya pada koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian izin lokasi untuk investasi dan kemudahan berusaha.

Program pemerintah pusat dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko seperti tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2019, proses pembebasan lahan kawasan hutan produksi yang dikelola KHDTK UGM dan hutan lindung seluas 282,47 hektar terus dilakukan. Hambatan utama dalam penyelesaian ini adalah biaya pembebasan tanah di luar kawasan hutan yang mencapai 500 miliar rupiah untuk lahan seluas 103 hektar. Sehingga sesuai dengan kemampuan anggaran dan kewenangan, pengadaan lahan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui BBWS Bengawan Solo.

Kegiatan yang gencar dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah sertipikasi lahan warga yang belum bersertifikat melalui Program PTSL untuk mendukung kebijakan reformasi agraria pada level nasional.

2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi berbagai aspek seperti status mutu air, kualitas udara, pengelolaan sampah, serta kerentanannya terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, lahan

kritis sebagai bagian dari daya dukung lingkungan menjadi tanggung jawab Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali Jratun, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal pengelolaannya dan rehabilitasi.

Penghitungan IKLH Kabupaten Blora Tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada penghitungan IKLH Kabupaten Blora Tahun 2021 terdapat tiga basis perhitungan yang berbeda, namun pada tahun 2022-2024 hanya digunakan satu basis perhitungan sesuai peraturan yang terbaru sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.59.

Tabel II.59
Capaian IKLH Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Indikator	Nilai						
	Tahun 2020	Tahun 2021 (rumus lama)	Tahun 2021 (rumus baru)	Tahun 2021 (website)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKLH	70,25	72,5	68,11	63,38	71,31	71,62	71,83
IKA	50	49,3	49,31	50,00	54,29	58,00	53,40
IKU	76,46	89,5	89,5	76,46	87,81	88,05	91,36
IKL	80,77	80,9	60,85	60,87	70,02	64,65	67,36

Sumber: Satu Data Blora,2024

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora periode Tahun 2020–2024 secara umum mengalami peningkatan. Dengan peningkatan tersebut, mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik. Peningkatan IKLH menjadi 71,31 di tahun 2022 dan 71,62 di tahun 2023, dan 71,83 di tahun 2024 telah melebih target RPJMD yang ditetapkan sebesar 70,42.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dalam lima tahun terakhir penurunan sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan RPJMD. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pencemaran pada sumber air, fluktuasi debit air akibat cuaca dan iklim, perilaku penggunaan air dari masyarakat serta erosi dan sedimentasi pada badan air serta penyediaan ruang terbuka hijau dan penanganan terhadap lahan kritis yang akan mendukung upaya konservasi air. Pada tahun 2024

luasan ruang terbuka hijau sebesar 137,41 Hektar atau 4 persen dari total luas pemenuhan RTH sebesar 20 persen dan luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 115 ha.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang baik dan memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk Nilai Indeks Kualitas Lahan, peningkatan terlihat pada kurun waktu yang sama. Penurunan IKLH secara agregat terjadi karena perubahan rumus perhitungan. Laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang meningkat memiliki peran yang cukup besar terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah, Kabupaten Blora berada dalam kategori kerentanan sedang (skor indeks 3). Potensi terjadinya kekeringan ekstrim pada saat musim kemarau dan potensi terjadi peningkatan banjir pada musim penghujan masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Blora. Terutama potensi banjir terjadi di sepanjang Sungai Bengawan Solo yang berada di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu.

Data Emisi GRK Kabupaten Blora pada tahun 2023 adalah sebesar 2.125,96 TonCo2eq yang semuanya berasal dari sektor pertanian. Sedangkan untuk sektor lain seperti: energi, transportasi, hutan dan lahan, industri dan persampahan tidak ada data yang tercatat pada aplikasi AKSARA dari Bappenas. Walaupun belum ada penghitungan, Kabupaten Blora mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 46 % wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan atau seluas 90.674 hektar. Ke depan perlu dilakukan penghitungan data emisi dan potensi penurunan emisi GRK di semua sektor untuk memudahkan dalam melakukan mitigasinya. Aksi mitigasi yang sudah dilakukan berupa peningkatan penggunaan pupuk organik pada sektor pertanian dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada sektor hutan dan lahan.

Jumlah timbulan sampah 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024 jumlah timbulan sampah terolah di

Faslitas pengumpulan sampah sebesar 19.698 ton/tahun dan sampah yang dapat tertangani baru sebesar 72,72 persen. Sampah yang sebagian besar berupa sampah rumah tangga tersebut terkumpul di 2 TPA, yaitu TPA Temurejo (Kecamatan Blora) dan TPA Cepu. Selain timbulan sampah rumah tangga, peningkatan aktivitas pelayanan (rumah sakit, industri, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan.

Perizinan Lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Blora merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya dilakukan terhadap aduan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi juga dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha/industri yang beroperasi di Kabupaten Blora dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Tabel II.60 di bawah ini menunjukkan capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Blora tahun 2020-2024.

Tabel II.60

Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	%	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah	%	4	3,81	1	1,89	-
5.	Luas lahan kritis (ha)	Ha	607	483	22,84	35,48	38,8
6.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	%	100	100	-	100	100
7.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	perusakan lingkungan hidup (%)						
9	Sampah yang dihasilkan rumah tangga	Ton	57.947,40	59.130,00	103.415,45	141.433,02	144800,33
10	Sampah sejenis sampah rumah tangga	Ton	32.193,00	32.850,00	103.415,45	141.433,02	144800,33
11	Jumlah TPS	Unit	51	53	22	59	60
12	Persentase Penanganan Sampah	%	43,83	45,77	73,97	99,08	71
14	Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lokal	unit	2	2	2	2	2
15	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (Dump Truk dan Armroll)	Unit	12.00	12.00	10	10	10
16	Jumlah Motor Pengangkut Sampah (Roda Tiga Viar)	Unit	12.00	12.00	8	9	11
17	Jumlah Beco	Unit	1.00	1.00	2	2	2
18	Jumlah Buldozer	Unit	2.00	2.00	2	2	2

Sumber: Satu Data Blora,2024

Kualitas lingkungan hidup yang baik juga dipengaruhi oleh faktor kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan sampah turut disertakan sebagai indikator kinerja bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2021, volume sampah yang tertangani baru mencapai 45.77%, namun meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 73,97% dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 99,08%, akna tetapi terjadi penurunan di Tahun 2024 sebesar 71 persen. Meskipun saat ini telah terdapat 57 kelompok bank sampah yang aktif di Kabupaten Blora, akan tetapi belum dapat mengatasi penanganan timbunan sampah secara signifikan. Volume limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan sebanyak 32.047.075,99. Dalam rangka menjaga peningkatan penanganan sampah oleh masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat pencemaran, diperlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan (untuk pengelolaan sampah pasar), DPMPTSP, dan Dinas Pertanian sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran dari sumbernya melalui pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran

2.1.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan mencakup serangkaian kegiatan untuk mengatur dan menyusun dokumen serta data kependudukan

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi terkait penduduk. Oleh karena itu, kinerja dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat, karena proses ini menjadi dasar bagi identifikasi, pemenuhan hak-hak warga, dan akses terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KIA, dan Akta Kelahiran. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: (a) Kartu Keluarga (KK); (b) KTP-el; (c) Akta Kelahiran; (d) Akta perkawinan; (d) Akta Kematian; (e) Surat keterangan Pindah. Kualitas layanan tersebut terukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana juga termuat dalam indikator kinerja urusan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026.

Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blora tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.61 di bawah ini.

Tabel II.61
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil	%	0,1365	0,4525	87,09	88,89	97,78
Indikator Lainnya							
1	Kepemilikan KTP bagi wajib KTP	%	96,92	94,92	98,32	98,54	98.90
2	Rasio bayi berakta kelahiran	%	99,5	99,95	99,95	99,95	Belum rilis
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,57	98	99,32	99,48	99,60
4	Rasio pasangan berakta nikah	%	100	100	100	100	100
5	Ketersediaan *database* kependudukan	Kec	16	16	16	16	16
6	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora	%	100	100	100	100	100

7	Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	48,84	52,31	52,11	62,84	64,59
8	Jumlah inovasi layanan kependudukan	unit	17	15	15	18	5

Sumber: Satu Data Blora,2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perubahan mayoritas meningkat pada tertib administrasi kependudukan setiap tahunnya. Kepemilikan KIA di Kabupaten Blora kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sudah mengalami peningkatan. Hal ini karena meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA. Guna menjamin administrasi kependudukan anak, maka kepemilikan KIA masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan peran serta masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui dana desa dan alokasi dana desa, pembangunan di tingkat desa diharapkan dapat mempercepat pencapaian kinerja pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemandirian desa dapat dilihat dari capaian indeks desa membangun pada strata desa mandiri. Data pencapaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disajikan dalam Tabel II.62 berikut ini:

Tabel II.62
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1	Indeks Desa Membangun	Angka	0.6510	0.6539	0.6665	0,6693	0,7074
Indikator Lainnya							
2	Indeks Ketahanan Ekonomi	Angka	0.5455	0.5504	0.5739	0,5819	0,6344
3	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0.7467	0.7489	0.7597	0,7556	0,7653
4	Indeks Ketahanan Lingkungan	Angka	0.6608	0.6625	0.6659	0,6704	0,7225
5	Jumlah Desa	desa	271	271	271	271	271
6	Jumlah Desa Mandiri	desa	1	1	2	4	15
7	Prosentase Desa Mandiri	%	0.37	0.37	0.74	1,48	5,54
8	Jumlah Desa Maju	desa	21	26	37	34	91
9	Prosentase Desa Maju	%	7.75	9.59	13.65	12,54	33,57
1	Jumlah Desa Berkembang	desa	219	221	220	226	165
1	Prosentase Desa Berkembang	%	80.81	81.55	81.18	83,39	60,89
1	Jumlah Desa Tertinggal	desa	30	23	12	7	0
1	Prosentase Desa Tertinggal	%	11.07	8.49	4.43	0,25	0,00
1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	desa	0	0	0	0	0
1	Prosentase Desa sangat Tertinggal	%	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1	Jumlah BUMDes	Unit	233	245	264	270	270
1	Jumlah BumDes Bersama Aktif	unit	7	8	9	24	24
1	Jumlah BUMDes Maju	Unit	2	3	1	4	9
1	Jumlah BUMDes Berkembang	Unit	6	10	8	16	31
2	Jumlah Posyantek Aktif	Unit	2	51	10	13	15
2	Posyandu aktif	unit	1.310	1.310	1.313	1.313	1.313
2	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	kelompok	85	89	93	97	99
2	Persentase aparatur desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

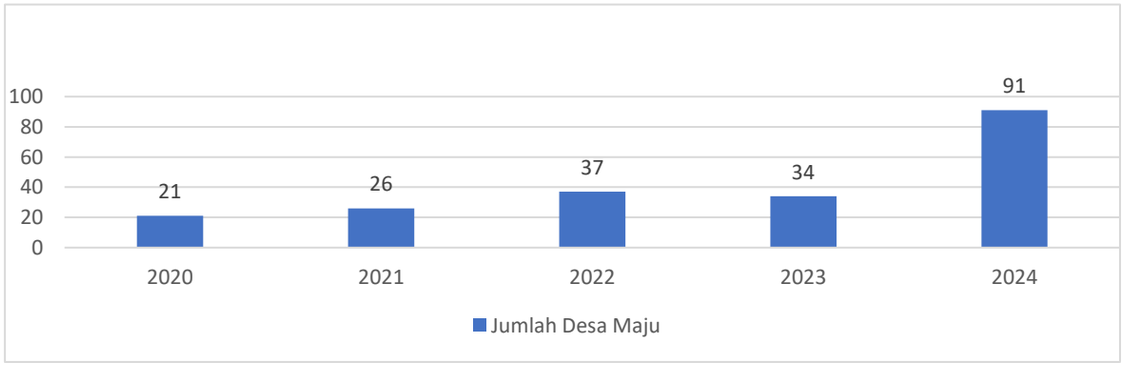
Sumber: Satu Data Blora,2024

Status desa di Kabupaten Blora pada tahun 2024 secara garis besar meningkat drastis dengan sudah tidak ada desa yang berstatus desa tertinggal. Mayoritas status desa berstatus desa berkembang yaitu sebanyak 165 Desa Berkembang atau 60,89%. Penurunan persentase ini

merupakan hasil dari naiknya status 11 Desa Mandiri dari 4 Desa Mandiri menjadi 15 Desa Mandiri, sedangkan untuk desa yang berstatus desa maju terjadi lonjakan yang signifikan yaitu dari 34 Desa Maju menjadi 91 Desa Maju.

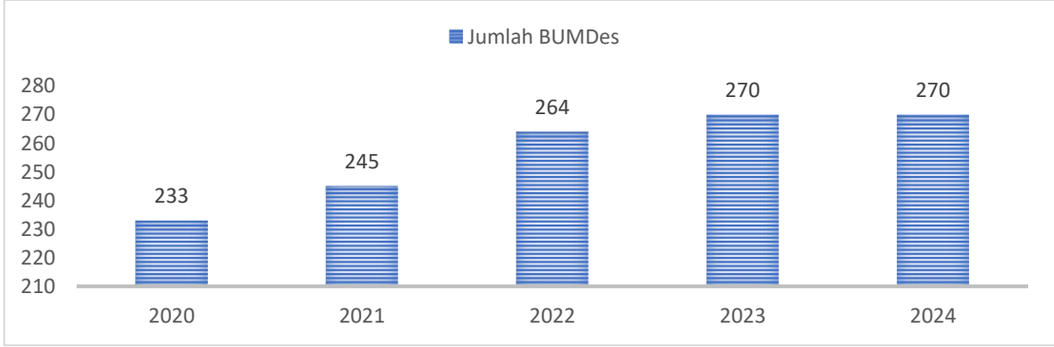
Kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) ini dipengaruhi dari naiknya 3 indikator pendukung yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dari 0,7564 menjadi 0,7653, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dari 0,5861 menjadi 0,6344 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dari 0,6716 menjadi 0,7225.

Data ini mengindikasikan pembangunan desa menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora. Meningkatnya tren capaian indeks desa membangun akan memberikan dampak positif bagi upaya mendorong ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.



Gambar II.37
Perkembangan Jumlah Desa Maju di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Selain itu, juga terdapat tantangan ketahanan ekonomi yang menjadi prioritas mengingat BUMDes terdaftar berjumlah 270 dengan BUMDes bersama aktif sebanyak 24 unit. Potensi lain yang dapat mendorong ketahanan ekonomi desa adalah pengembangan 15 posyantek aktif dan kelompok ekonomi produktif perempuan yang sudah terlatih meningkat dari 97 kelompok menjadi 99 kelompok. Belum ada kenaikan yang signifikan dalam meningkatkan kinerja BUMDes, perlu mengidentifikasi dan evaluasi terkait kinerja BUMDes. Setelah itu diharapkan dapat merumuskan solusi atas permasalahan yang ada dan memaksimalkan kinerja BUMDes.



Gambar II.38
Grafik Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

2.1.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya dilakukan, seperti pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur, mendorong pasangan usia subur untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana (KB), dan berbagai langkah lainnya yang mendukung pengelolaan pertumbuhan penduduk secara efektif.

Berikut disajikan perkembangan capaian kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Blora periode 2020–2024 pada Tabel II.63.

Tabel II.63
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

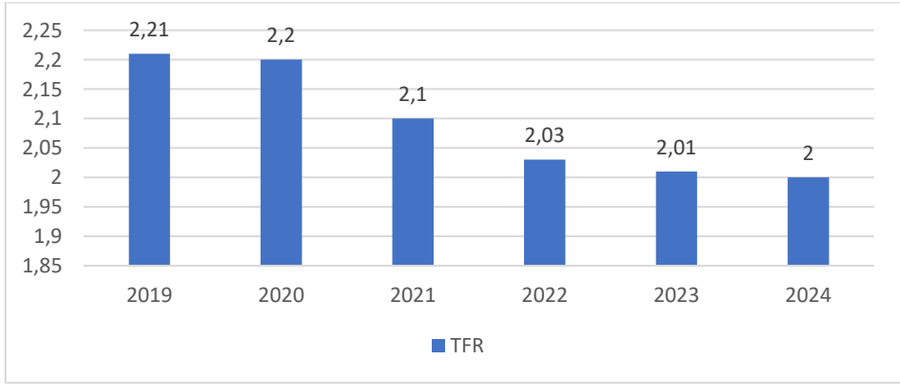
No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian				
			Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%		1,56	4,12	0,85	0,68	0,68
2.	Cakupan peserta KB aktif	%		74,33	76,61	77,34	77,97	77,97
	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)							
3.	*Total Fertility Rate* (TFR)	%		2,20	2,10	2,03	2,01	2
	Rata-rata jumlah anak per keluarga							
4.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmetneed)*	%		11,89	10,17	8,27	7,38	7,38

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian				
			Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
5.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%		80,38	80,45	na	na	na
6.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%		82,24	82,26	80,28	89,61	89,61
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kelompok		6	6	6	6	6
8.	ASFR (*Age Specific Fertility Rate*)	kelahiran		24,6	21	34,3	32,5	32,5
	Jumlah kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)							
9.	Indeks Pembangunan Keluarga			na	56,63	58,03	60,19	60,89
10.	Persentase Pemakaian MKJP	%		35,34	NA	26,26	22,09	22,09
11.	Pelayanan KB pasca persalinan	%		40,61	49,55	47,54	24,32	24,32

Sumber: Satu Data Blora,2024

**Data belum rilis*

Berdasarkan Tabel II.63 di atas dapat diketahui bahwa Data Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2023 menunjukan penurunan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukan intervensi pengendalian penduduk berlangsung dengan baik. *Total Fertility Rate* (TFR) tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,01%. TFR di Kabupaten Blora mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami penurunan. Berikut adalah grafik *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Blora Tahun 2019–2023.



Gambar II.39

Grafik *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Cakupan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB tahun 2023 yaitu sebesar 89,61%. Persentase tersebut naik sebesar 9,33% dari tahun sebelumnya. Kenaikan prevalensi tersebut sejalan dengan kepesertaan KB aktif yang terus mengalami kenaikan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 cakupan peserta KB aktif mengalami kenaikan sebesar 0,63% dari

tahun sebelumnya yang mempengaruhi penurunan *unmet need* sebesar 0,89%. Hal tersebut menunjukan adanya kesadaran Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya program Bangga Kencana melalui kesertaan ber-KB.

Meskipun persentase ber-KB meningkat, namun jumlah kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) meningkat cukup banyak ditahun 2023 sebanyak 18,4% dari tahun sebelumnya yang menyebabkan kenaikan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 0,08%. Kelahiran di usia remaja perlu diperhatikan karena berdampak pada masalah kependudukan. Hal tersebut juga menandakan tidak meratanya pembangunan dan juga keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dicetuskan oleh BKKBN.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif untuk mengendalikan kehamilan dan kelahiran. Beberapa contoh MKJP antara lain adalah *Intrauterin* (IUD); sterilisasi wanita; dan *implant/norplant*. Persentase Pemakaian MKJP tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 dari 26,26 menjadi 22,09. Rendahnya penggunaan MKJP dapat berpengaruh pada tingginya angka kelahiran, rapatnya jarak kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Tujuan dan manfaat Program Keluarga Berencana pada dasarnya adalah mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera yang nantinya akan menghasilkan keluarga yang berkualitas. KB Pasca Persalinan (PP) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/ alat/ obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. Pelayanan KB pasca persalinan di Kabupaten Blora mengalami penurunan cukup drastis dari 47,54% pada tahun 2022 menjadi 24,32% pada tahun 2023, pada tahun 2024 MKJP ditargetkan 6000 akseptor dengan realisasi 4897 akseptor atau pada kisaran 83 persen. Manfaat penggunaan KB Pasca Persalinan adalah untuk mengatur jarak kehamilan demi mencegah kehamilan yang terlalu dekat setidaknya 2 tahun, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Ibu memerlukan waktu yang cukup untuk memulihkan kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi serta energi sebelum kehamilan selanjutnya serta bayi perlu mendapat ASI eksklusif selama 6 bukan pertama dan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2

tahun, selain itu anak mungkin tidak mendapatkan cukup perhatian yang dibutuhkan pada usianya.

2.1.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sebagai wilayah perbatasan provinsi, Kabupaten Blora memiliki posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tengah Pulau Jawa. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan urusan perhubungan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengendara berdasarkan indikator tingkat pelayanan jalan, tetapi juga difokuskan pada peningkatan keselamatan pengguna jalan guna mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, urusan perhubungan juga bertujuan untuk memperbaiki layanan sarana dan prasarana perhubungan, yang akan mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah, sehingga mempermudah pergerakan orang dan distribusi barang/jasa dengan lebih lancar.

Selain jaringan jalan, sistem perhubungan Kabupaten Blora juga didukung oleh keberadaan jalur kereta api sebagai bagian dari lintasan Jakarta–Surabaya dengan empat stasiun, yaitu stasiun Cepu di Kecamatan Cepu, Stasiun Wado di Kecamatan Kedungtuban, Stasiun Randublatung di Kecamatan Randublatung dan Stasiun Doplang di Kecamatan Jati. Kewenangan Kabupaten terkait transportasi perkeretaapian adalah menjamin keselamatan masyarakat Blora terutama pada perlintasan sebidang antara pengguna jalan darat (kendaraan, motor, manusia) dengan kereta api. Terdapat 7 (tujuh) perlintasan yang memang difasilitasi/menjadi kewenangan PT. KAI dan sudah dilengkapi dengan sarana untuk meningkatkan keamanan perlintasan. Namun masih terdapat 30 perlintasan sebidang yang dikelola secara informal oleh masyarakat setempat atau tanpa pintu perlintasan. Sebaran perlintasan sebidang di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.64

Persebaran Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Blora Tahun 2024

No	KM/HM	No JPL	Lebar Jalan	Konstruksi Jalan	Nama Jalan	Perlintasan Sebidang					
						PT KAI		Pihak Lain		Resmi Tidak Dijaga	Liar
						OP	JJ	Pemda	Swasta		
Perlintasan Sebidang Wilayah Doplang											
1	49+267	79	4	Aspal	Gabusan	-	-	-	-	Tidak	-
2	50+582	80	4	Aspal	Mekuwon	-	-	-	-	Tidak	-

No	KM/HM	No JPL	Lebar Jalan	Konstruksi Jalan	Nama Jalan	Perlintasan Sebidang					
						PT KAI		Pihak Lain		Resmi Tidak Dijaga	Liar
						OP	JJ	Pemda	Swasta		
3	50+786	81	1,5	Tanah	Doplang	-	-	-	-	Tidak	-
4	51+058	82	4	Tanah	Doplang	-	-	-	-	Tidak	-
5	52+525	83A	1,5	Tanah	Doplang	-	-	-	-	Tidak	-
6	53+064	85	4	Aspal	Doplang	v	-	-	-	-	-
7	54+006	87	1,5	Tanah	Klatak	-	-	-	-	Tidak	-
8	54+386	88	5	Aspal	Klatak	-	V	-	-		-
9	55+446	89	1,5	Tanah	Ngasem	-	-	-	-	Tidak	-
10	56+644	90	2	Tanah	Ngrowo	-	-	-	-	Tidak	-
11	57+080	90	1,5	Tanah	Pengkoljagong	-	-	-	-	Tidak	-
12	58+051	91	1,5	Tanah	Plosorejo	-	-	-	-	Tidak	-
13	60+474	92	1,5	Tanah	Ngrawut	-	-	-	-	Tidak	-
14	60+838	93	1,5	Tanah	Plosorejo	-	-	-	-	Tidak	-
15	61+804	94	1,5	Tanah	Bekutuk	-	-	-	-	Tidak	-
16	61+550	95	1,5	Tanah	Bekutuk	-	-	-	-	Tidak	-
Perlintasan Sebidang Wilayah Randublatung											
1	65+202	99	4,5	Aspal	Wulung	v	-	-	-	-	-
2	66+281	100	3,3	Tanah	Wulung	-	-	-	-	Tidak	-
3	66+803	101	2,8	Tanah	Kediren	-	-	-	-	Tidak	-
4	67+329	102	2,8	Tanah	Kediren	-	-	-	-	Tidak	-
5	66+538	103	2,3	Tanah	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak	-
6	69+127	104	3,5	Aspal	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak	-
7	69+511	105	2,3	tanah	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak	-
8	69+965	106	2,3	Aspal	Sumberejo	-	-	-	-	Tidak	-
9	72+134	107	4,8	Aspal	Sumberejo	-	V	-	-	-	-
10	74+367	108	1	tanah	Sudung wadu	-	-	-	-	-	Liar
11	76+421	109	5,8	Aspal	Pulo	-	-	-	-	Tidak	-
12	77+145	110	4	aspal	Wadu	v	-	-	-	-	-
Perlintasan Sebidang Wilayah Cepu											
1	83+298	114	7,2	Aspal	Kapuan	V	-	-	-	-	-
2	88+942	118	8,4	Aspal	Balun	V	-	-	-	-	-

Sumber : PT Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang, 2024

Seperti dapat dilihat pada data di atas, masih ada kebutuhan penjaga perlintasan sebidang yang harus diprioritaskan pengadaannya untuk menurunkan resiko kecelakaan warga. Yang menjadi permasalahan dalam penyediaan palang perlintasan sebidang adalah kebanyakan jalan yang melewati merupakan jalan desa sehingga Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan pembangunannya. Selain itu biaya penyediaan yang meliputi sarana prasaran perlintasan dan penyediaan tenaga penjaga selama 1 tahun membutuhkan biaya yang sangat besar untuk setiap titiknya sehingga memberatkan bagi Pemerintah Daerah.

Untuk menentukan prioritas pembangunan pintu perlintasan diperlukan kajian yang lebih mendalam dan pendataan yang lebih cermat agar pintu perlintasan kereta api dapat dibangun secara bertahap.

Dari aspek perhubungan udara, Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu sudah beroperasi dengan rute Bandara Ngloram Blora-Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Jadwal penerbangan 2 kali seminggu ini diharapkan dapat menarik pendatang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penerbangan ini terwujud atas kerja sama Pemkab Blora, Kementerian Perhubungan dan maskapai Citilink. Dukungan akses dapat membuka peluang aktivitas ekonomi baru dari mobilitas yang meningkat dan akhirnya meningkatkan arus transfer orang-barang dan berdampak pada perputaran ekonomi riil di Kabupaten Blora.

Guna mendukung keberadaan Bandara Ngloram diperlukan integrasi antar moda angkutan mulai dari bandara menuju stasiun ke Terminal Cepu menuju Kota Blora. Kendala yang dihadapi adalah angkutan yang tersedia saat ini banyak yang berkondisi memprihatinkan sehingga susah untuk menarik minat pengguna jasa angkutan. Kebanyakan lebih memilih kendaraan pribadi atau angkutan *online*.

Yang patut disayangkan pada kondisi saat ini rute penerbangan Bandara Ngloram Blora-Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dalam kondisi tidak aktif. Pemerintah Kabupaten Blora sangat berat untuk menanggung biaya subsidi penerbangan yang memang sangat besar. Diperlukan usaha-usaha yang keras dan kreatif untuk mengaktifkan kembali jalur penerbangan ini Tabel II.65 di bawah ini menunjukkan kinerja urusan bidang perhubungan.

Tabel II.65

Kondisi Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Blora

Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Sub bidang terminal							
1.	Terminal						
	* Tipe A	Unit	1	1	1	1	1
	* Tipe B	Unit	1	1	1	1	1
	* Tipe C	Unit	4	4	4	4	4
2.	Jumlah terminal Tipe C yang beroperasi	Unit	4	4	4	4	4

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	70	70	100	100	100
4.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	16	16	15	15	15
Sub bidang fasilitas keselamatan jalan							
6.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	860	926	992	1048	1099
7.	Jumlah kasus Kecelakaan lintas	Kasus	313	377	441	450	520
8.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	87	89	91	92	93
9.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	80	83	85	90	91
10.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/Kota	%	85	89	90	92	93
Sub bidang uji laik kendaraan							
11.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor	1	1	1	1	1
		Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	11	11	9	9	9
12	Jumlah uji KIR angkutan umum (Persentase kendaraan yang lolos uji)	%	90	98	99	99	99
13	Kepemilikan KIR angkutan umum (Jumlah kendaraan yang mengajukan uji KIR)	Unit	6.273	5360	5616	4784	4895
14	Biaya uji kelayakan angkutan umum	JBB: 0–5000	39.000	39.000	75.000	75.000	0
		JBB: 5001-8000	44.000	44.000	80.000	80.000	0
		JBB: >8000	49.000	49.000	85.000	85.000	0
15	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	100	100	99	99	99
Sub bidang angkutan umum							
16	Jumlah angkutan kota	Unit	16	16	8	9	9
17.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	8	8	40	40	40

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
18.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	162.750	179.025	4.144.457	4.500.943	4.952.864
19.	Rasio izin trayek	%	55	55	40	50	50

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Dari Tabel II.65 di atas dapat diketahui jumlah uji KIR angkutan umum (persentase kendaraan yang lolos uji) pada tahun 2024 bertahan di angka 99% dan persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) juga bertahan di angka 99% sama dengan tahun 2023. Sementara itu, terhitung sejak 1 Januari 2024 sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, maka pemilik kendaraan dibebaskan dari biaya layanan uji kir dan diserahkan ke anggaran daerah. Kebijakan ini juga menyebabkan pendapatan asli daerah dari retribusi layanan uji menjadi nol. Selain itu, jumlah kendaraan yang mengajukan KIR semakin meningkat tetapi tidak disertai dengan peningkatan jumlah alat pengujian sehingga dapt menghambat kegitan pengujian. Dari sisi penggunaan angkutan umum masal, prosentase rasio ijin trayek baru terpenuhi 50% di tahun 2024 dengan angka sama dengan tahun 2023. Skala tersebut menunjukkan kurang lengkapnya rute transportasi masal di Kabupaten Blora.

Dari aspek kelengkapan fasilitas jalan, pada tahun 2024 sudah mencapai 93%, sedikit meningkat dari tahun 2023 sebesar 92%. Terkait dengan fungsi perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardgrill) sebagai alat informasi kewaspadaan pengguna jalan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan angka kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengingat Tahun 2023 tercatat 450 kecelakaan menjadi 520 (sumber data Satuan Lalu Lintas Polres Blora) kecelakaan pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat peduli keselamatan. Selain itu dari permasalahan lalu lintas di Kabupaten Blora yaitu penataan parkir di pusat kegiatan masyarakat yang belum tertata sehingga menyebabkan terpusatnya kepadatan kendaraan, menghambat lalu lintas, tidak teraturnya lalu lintas sehngga menyebabkan meningkatnya ancaman keselamatan pengguna jalan.

Kondisi saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan pribadi disebabkan oleh: 1) perubahan pola pergerakan masyarakat yang

bergeser menggunakan angkutan umum non konvensional (angkutan umum non massal), 2) usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis sehingga tidak nyaman untuk pengguna, 3) perilaku pengemudi angkutan umum kurang disiplin, 4) kurang terintegrasinya moda transportasi umum; dan 5) tidak terjadwalnya waktu transportasi.

Terminal sebagai titik pengumpul pergerakan, Kabupaten Blora berwenang pada empat terminal tipe C yang melayani rute angkutan perdesaan, kecuali pada Terminal tipe C Ngawen di Kecamatan Ngawen juga melayani transit antar kota antar provinsi jurusan Blora-Jakarta dengan kondisi yang relatif paling baik (60% baik). Sedangkan Terminal Wulung Kecamatan Randublatung, Terminal Todanan Kecamatan Todanan dan Terminal Kunduran Kecamatan Kunduran dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat karena kurang mendapatkan perawatan. Walaupun demikian, hingga saat ini semua terminal masih beroperasi melayani angkutan umum. Perbaikan kondisi terminal perlu menjadi agenda prioritas pembangunan infrastruktur perhubungan dengan memastikan pemenuhan aspek inklusif (ruang laktasi, ramah anak, lansia, dan difabel) serta menyediakan sarana mitigasi bencana (APAR dan area kumpul).

Keprihatinan kondisi angkutan umum di Kabupaten Blora yang semakin jauh dari layak dari data yang ada, jumlah trayek angkutan penumpang di Kabupaten Blora sebanyak 300 armada. Namun demikian yang masih aktif beroperasi saat ini tinggal sebanyak 70 armada. Hal ini karena sudah banyak angkutan dengan kondisi rusak dan melewati masa umur operasi. Untuk itu perlu dilakukan peremajaan angkutan atau dengan pengadaan BRT atau sejenisnya untuk mengintegrasikan moda angkutan. Integrasi antar moda diharapkan juga dapat mendukung keberadaan Bandara Ngloram dan Stasiun kereta api.

2.1.3.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penerapan *e-government* menjadi fokus utama dalam urusan komunikasi dan informatika untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Untuk mencapai hal ini, pengelolaan dan tata kelola SPBE secara nasional

juga sangat diperlukan guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem tersebut.

Penerapan *e-Government* dan pelayanan berbasis teknologi informasi semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan ini mengatur bahwa integrasi antar sistem layanan yang terbatas, serta jaringan intra-pemerintah, merupakan bagian penting dari layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterbukaan informasi publik serta memastikan komunikasi publik yang efektif.

Indeks SPBE Kabupaten Blora pada tahun 2023 sebesar 3,27 dan meningkat menjadi 3,28 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui sistem layanan publik yang transparan dan akuntabel menjadi semakin meningkat dan stabil. Selanjutnya, capaian kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.66 di bawah ini.

Tabel II.66
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026							
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,62	2,8	2,36	3,27	3,28
	Indikator Lainnya						
2.	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	187	188	188	245	245
3.	Jumlah SKPD telah memiliki website	SKPD	44	44	43	41	41
4.	Website milik pemerintah daerah	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	38	10	10	10	19
6.	Jumlah penyiaran radio/TV	Buah	10	10	11	10	10
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
7.	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Kali	12	6	6	6	13

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
8.	Media baru seperti website (media online)	Kali	365	240	240	240	342
9.	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Kali	0	6	7	11	9
10.	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	Kali	1	1	1	1	1
11.	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Kali	53	54	60	60	72
12.	% Perangkat Daerah yang Sudah Menerapkan E GOV/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi		na	na	100	100	100
13.	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	%	na	na	100	100	100
14.	Jumlah *WiFi* Publik yang disediakan pemerintah.	spot	24	26	26	28	28
15.	Jumlah Desa yang terlayani internet		295	295	*)	*)	*)
16.	Persentase penduduk yang menggunakan internet	%	na	na	*)	*)	*)
17.	Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam	%	57,02	na	*)	*)	*)
18.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	na	na	*)	*)	*)
19.	Nilai keterbukaan informasi	Angka	69,7	79,97	82,18	83,72	92,76

Keterangan:
**) tidak menghitung*
Sumber: Satu Data Blora, 2024

Media komunikasi berupa website yang dimiliki oleh SKPD masih tetap sama dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu sejumlah 41 SKPD yang memiliki website. Hal ini selaras dengan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik dalam hal ini adalah SKPD yang mempunyai website guna mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

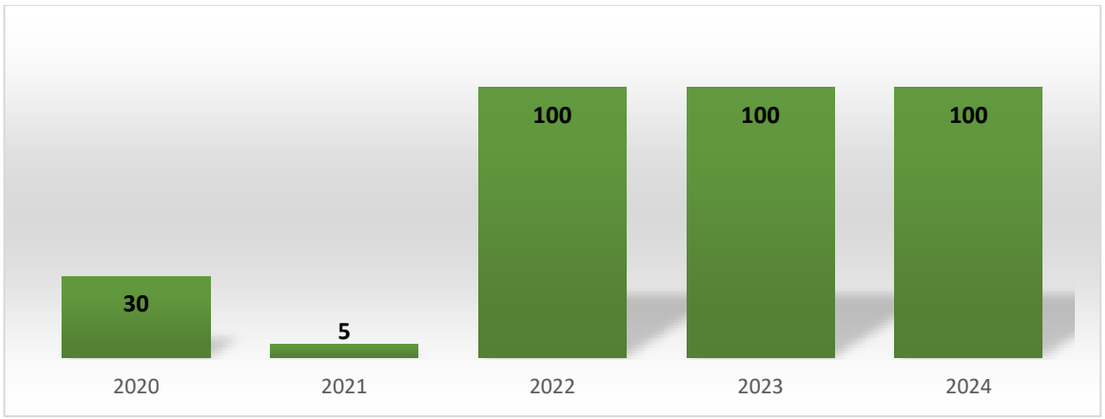
Sementara itu, jumlah surat kabar nasional/lokal meningkat pesat dari tahun 2023 sejumlah 10, kemudian pada tahun 2024 menjadi sejumlah 19. Hal tersebut berdampak positif untuk meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkini. Dengan semakin banyaknya jaringan dan media komunikasi, diharapkan dapat

semakin meningkatkan layanan akses informasi masyarakat dan mendukung meningkatnya tingkat literasi masyarakat.

Kabupaten Blora menggunakan berbagai jenis media konvensional dan media nonkonvensional (media sosial dan media interpersonal) untuk menjalankan fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik. Diseminasi atau penyebarluasan informasi melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi pada tahun 2023 sebanyak 6 kali, meningkat derastis pada tahun 2024 menjadi 13 kali. Penyebarluasan informasi melalui media baru seperti website (media online) juga bertambah pesat, pada tahun 2023 sebanyak 240 kali bertambah pada tahun 2024 menjadi 343 kali. Selain itu, ada juga penyebarluasan informasi melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho. Pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 60 kali, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 72 kali.

Pada tahun 2023, nilai Keterbukaan Informasi Publik dihitung dan mencapai angka 83,72 dan mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi 92,76 pada tahun 2024. Ini menunjukkan progres yang baik dalam upaya pengembangan e-government. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik telah dikembangkan aplikasi-aplikasi layanan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan layanan. Masing-masing SKPD sudah memiliki inovasi masing-masing sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

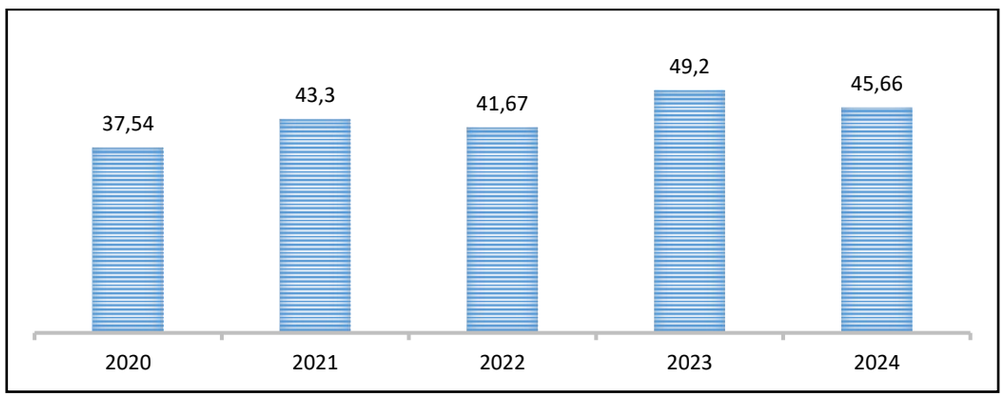
Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kemanfaatan jejaring komunikasi dengan bertanggung jawab disertai dengan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Blora untuk mendukung penyelesaian sengketa informasi publik yang ada. Hal ini akan mendukung upaya pemerintah meningkatkan transparansi informasi publik dan mendorong masyarakat kian melek informasi. Capaian penyelesaian sengketa informasi publik di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar II.40
Grafik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

2.1.3.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan bahwa kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang diklasifikasikan menjadi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Gambar II.41 di bawah ini menunjukkan bahwa kondisi koperasi sehat di Kabupaten Blora cukup stabil dan cenderung stagnan hingga tahun 2022 dengan capaian 41,67%, di tahun 2023 meningkat secara signifikan menjadi 49,2% namun mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian 45,66%.



Gambar II.41
Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Kabupaten Blora terus mengalami pertumbuhan, namun tidak signifikan yaitu dari tahun 2022 13.265 menjadi 13.652 di tahun 2023 dan bertumbuh menjadi 13.837 di tahun 2024. Sebanyak 45,88% dari jumlah tersebut telah memiliki badan hukum. Pengelompokan UMKM dilihat dari dua indikator, yakni modal usaha dan hasil penjualan.

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000.
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.O00 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000.
c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Tabel II.67 di bawah ini menunjukkan kondisi urusan koperasi dan UKM.

Tabel II.67
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026						
1.	Persentase usaha mikro naik kelas	%	0,08	0,15	0,23	0,26	0,93
	Indikator Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lainnya						
2.	Jumlah koperasi	Unit	714	737	780	788	798
3.	Persentase koperasi aktif	%	39,92	35,27	40	31,73	33,21
4.	Persentase koperasi sehat	%	37,54	43,3	41,67	49,2	45,66
5.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	13.224	13.244	13.265	13.652	13.837

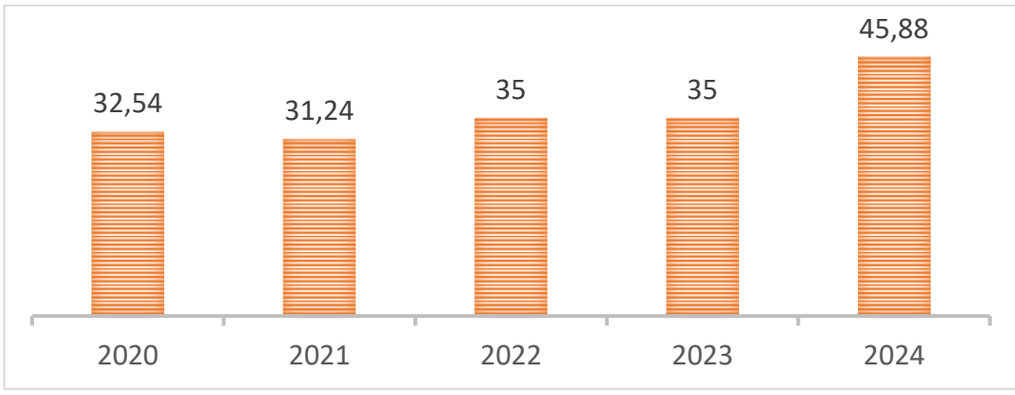
No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum	%	32,54	31,24	35	35	45,88
7.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0*	0*	5	2,48	1,55
8.	Volume usaha koperasi	Rupiah	463.375. 981.109	601.724. 213.951	625.449. 970.606	1.330.971. 101.046	1.728.707. 200.273
9.	Persentase pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	%	6	7	8	10,60	12

Sumber: Satu Data Blora, 2024

**) aktivitas pameran ditiadakan akibat pandemi covid-19*

***) tidak menghitung*

Data dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah koperasi aktif masih memerlukan prioritas untuk naik dari angka 40 persen. Pengembangan koperasi banyak diwarnai oleh tantangan pendataan yang menjadi dasar intervensi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas koperasi dalam menggunakan basis data online. Penggunaan basis data online juga memudahkan pemantauan terhadap kinerja koperasi oleh pemerintah. Selain unit koperasi, Kabupaten Blora memiliki UMKM yang mana juga memerlukan perhatian dalam pengembangan perekonomian, tentunya dengan strategi yang tepat sasaran.



Gambar II.42

Persentase UMKM Berbadan Hukum di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.42 menunjukkan persentase UMKM yang telah berbadan hukum pada tahun 2024 sebanyak 45,88 % dari jumlah total 13.837 UMKM dan yang sudah memiliki SIUP (NIB) sebanyak 6.349 UMKM. Selain

itu, terdapat pula target untuk meningkatkan kelas UMKM. Strategi yang dapat digunakan adalah mendongkrak pemasaran sehingga mencapai penjualan di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) melalui digital marketing dan konsistensi produksi. Kedua hal ini dapat menjadi prioritas rencana pengembangan UMKM Kabupaten Blora.

2.1.3.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penanaman modal (investasi) merupakan salah satu strategi pengembangan yang membawa dampak langsung yang positif bagi perekonomian riil seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan daya tarik investasi merupakan salah satu indikator meningkatnya *regional competitiveness* suatu wilayah. Tabel II.68 menunjukkan kondisi penanaman modal pada tahun 2020–2024.

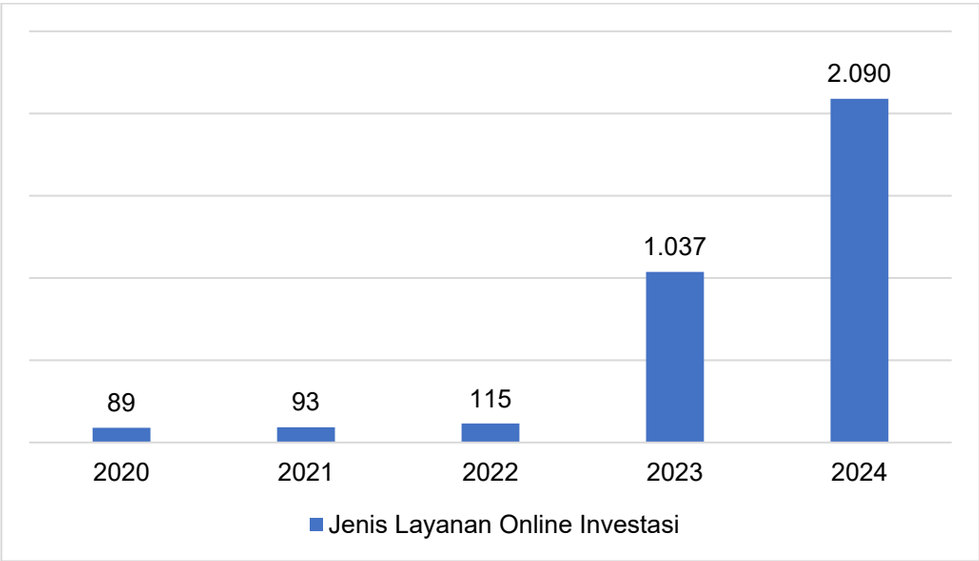
Tabel II.68
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026							
1.	Pertumbuhan Investasi	%	285	1322,33	61,8	2,9	3,01
Indikator Lainnya							
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMA	0	0	0	0	0
		PMDN	854	5.551	3.522	8.225	6.364
3.	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	6,9	0,864	1,3	0,14	1,1
4.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	3	6	6	6	8
5.	Jumlah jenis pelayanan secara online	Jenis	89	93	115	1.037	2090
6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	0	0	0	0	0
8.	dioperasikan OSS (One single submission)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Jumlah Proyek Berdasarkan LKPM						
	Jumlah Proyek PMDN Berdasarkan LKPM	proyek	40	30	508	228	198

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Jumlah Proyek PMA Berdasarkan LKPM	proyek	2	2	0	0	0
	Total	proyek	42	32	508	228	198
10.	Jumlah pertumbuhan proyek berdasarkan LKPM	%	285	1322,33	61,8	166,2	3,01
11.	Jumlah Nilai Proyek PMDN Berdasarkan LKPM	Triliun rupiah	0.27	0,864	1,3	0,14	0,937
12.	Jumlah Nilai Proyek PMA Berdasarkan LKPM	Triliun Rupiah	0.01	0.01	0	0	0
13.	Jumlah nilai investasi berdasarkan LKPM	triliun Rupiah	0.28	0,864	1,3	0,14	0,937
14.	Jumlah pertumbuhan nilai investasi	%	285	1322,33	61,8	0,5268	3,01
15.	Rata-rata lama waktu yang diperlukan untuk pelayanan perizinan	Hari	14	14	7	7	7
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Perijinan		89	89,5	91,04	91,03	92

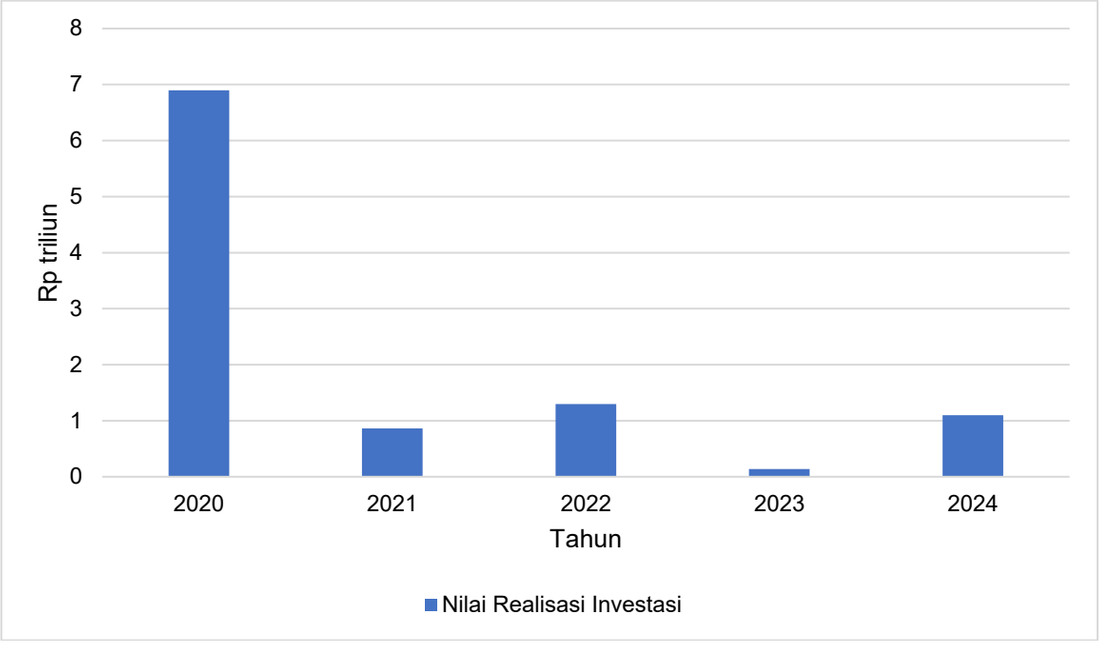
Sumber: DPMPTSP Kab. Blora 2025

Sampai dengan tahun 2024 ada 2.090 jenis pelayanan yang bisa dilakukan secara *online*. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Pemrosesan izin penanaman modal melalui OSS RBA (*One Single Submission Risk Based Approach*). Semenjak dilaksanakannya OSS RBA, tingkat perizinan dibagi menjadi empat level, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.



Gambar II.43
Jenis Layanan Online Investasi di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2023 mencapai 8.225, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah investor sebesar 6.864. Hal tersebut diikuti dengan nilai realisasi investasi di Kabupaten Blora yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp. 0,14 triliun menjadi Rp. 1,1 triliun pada tahun 2024.



Gambar II.44
Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Blora Tahun 2019–2024

Kerja sama pemerintah kabupaten Blora dan investor yang aktif pada tahun 2024 terdiri atas 3 kerja sama dengan nilai investasi potensial sebesar Rp116.500.000.000.

Tabel II.69
Kerja Sama dengan Investor Tahun 2024

NO	Nama Penerima	Jenis Usaha	Nilai Investasi (Rp)	Tahun Realisasi	Keterangan
1.	PT Budi Mulya Medika / RS Budi Mulya	Rumah Sakit	50.000.000.000	2024	Proses Pembebaan Lahan
2.	PT Kembang Rubah Indonesia	Developer Perumahan	61.350.000.000	2024	Proses Pembangunan
3.	PT Energi Bukit Delima	Energi Terbarukan	5.150.000.000	2024	Sudah Beroperasi

Sumber: DPMPTSP, 2024

Guna mengoptimalkan kinerja investasi daerah, perlu dukungan kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak, inovasi layanan dan dukungan kondusivitas sosial kemasyarakatan. Selain itu promosi keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional melalui ajang pameran investasi.

2.1.3.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan bagian integral dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora. Pemuda diharapkan berperan aktif sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan daerah melalui penerapan gaya hidup sehat, pencapaian prestasi, dan peningkatan produktivitas ekonomi, salah satunya melalui pengembangan wirausaha pemuda.

Pemerintah Kabupaten Blora telah merumuskan dan mengimplementasikan berbagai program strategis untuk mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, kreatif, dan produktif. Program-program tersebut mencakup peningkatan fasilitas olahraga, pelatihan kewirausahaan, kompetisi olahraga, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam membuka peluang ekonomi bagi pemuda.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Blora tahun 2026 bertujuan menciptakan generasi muda yang berdaya saing, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.

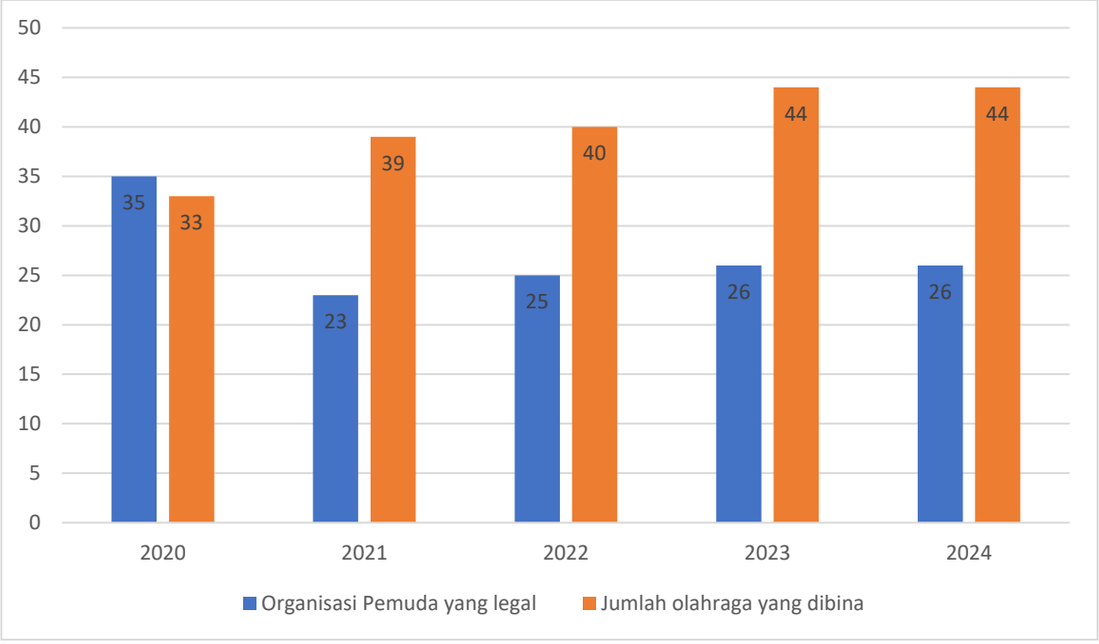
Tabel II.70
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026							
1.	Prestasi olahraga	Medali/ Piala	-*	68	79	181	128
Indikator lainnya							
2.	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	0*	0*	31	18	10

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.	Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina	%	64	65	1	100	100
4.	Jumlah Organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten	Organisasi	35	23	25	26	26
5.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Orang	0*	0*	3	1829	1829
6.	Jumlah Kelompok Pemuda produktif (KUPP)	Kelompok	0*	0*	0	0	0
7.	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Organisasi	33	39	40	44	44
8.	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Orang	0*	68	69	169	95
9.	Jumlah medali tingkat nasional yang diperoleh	Orang	0*	2	8	10	33
10.	Jumlah medali tingkat internasional yang diperoleh	Orang	0	1	2	2	0
11.	Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta)	Gelanggang	2	2	2	2	2
12.	Lapangan olahraga	Unit	760	753	754	775	771

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Pada tahun 2020, semua aktivitas olahraga ditiadakan karena adanya pandemi, Tahun 2021 membuka prestasi olahraga dengan 68 medali dan piala, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 79 medali dan piala. Di tahun 2023 prestasi olahraga meningkat pesat 181 medali saat ada Porprov Jawa Tengah yang dilaksanakan 4 tahun sekali. dapat dilihat pada Tabel II.70 di atas. Gambar II.45 menunjukkan bahwa organisasi pemuda menurun jumlahnya sepanjang pandemi dan belum tumbuh aktif kembali seperti tahun sebelum pandemi.

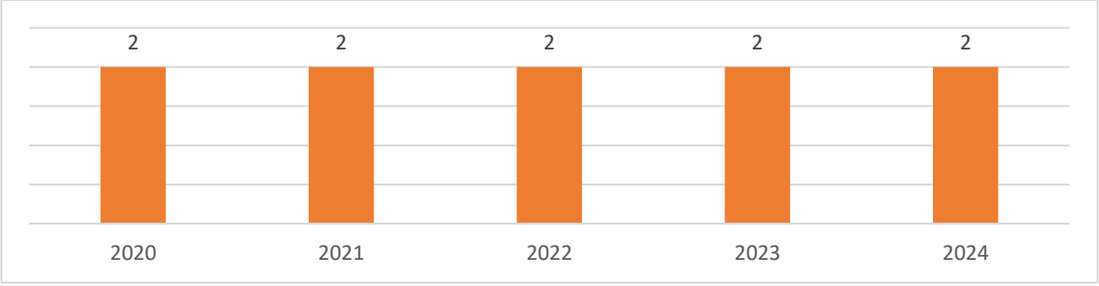


Gambar II.45
Grafik Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas pemuda melalui penguatan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan dukungan partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung kegiatan olahraga, seperti lapangan olahraga, menjadi prioritas untuk mendorong prestasi olahraga di kalangan pemuda.

2.1.3.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Statistik merupakan ujung tombak perencanaan pembangunan yang rasional dalam pengambilan keputusan. Objektivitas dari data statistik mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten Blora untuk pengembangan wilayah yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik yang komprehensif, akurat, dan diperbaharui secara berkala dan berkualitas menjadi penentu efektivitas pembangunan. Untuk itu, pengembangan sistem Satu Data Blora merupakan prioritas bidang statistik untuk dapat memberikan informasi dengan kebaruan yang tinggi untuk pengguna.



Gambar II.46
Grafik Jumlah Dokumen Sesuai Kebutuhan Perencanaan di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

Gambar II.46 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024, baru terdapat dua dokumen yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah. Hal ini perlu diperhatikan karena ketersediaan data tematik-sektoral yang seragam perlu dipercepat untuk menjamin konsistensi data wilayah yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari tingkat lokal, regional hingga nasional. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel II.71
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

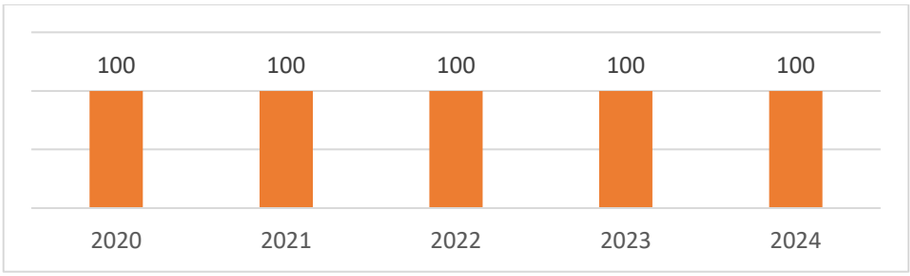
No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026							
1.	Persentase ketersediaan data pada portal open data daerah	%	NA	40	40	45	67,34
Indikator Lainnya							
2.	Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan	Buah	NA	NA	NA	1,72	2,30
3.	Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD	%	2	2	NA	2	2
4.	Jumlah data sektoral sosial, politik, hukum, dan HAM yang tersedia	buah	100	100	100	100	100
5.	Jumlah data sektoral ekonomi dan infrastruktur yang tersedia	buah	0	NA	14	14	7
6.	Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota yang Telah Mengikuti Bimtek Pengolahan Data	orang	21	NA	40	40	32

Sumber: Satu Data Blora,2024

IPS (Indeks Pembangunan Statistik) diperoleh dari hasil EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) yang diselenggarakan oleh BPS berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS. Pada tahun 2023, IPS (Indeks Pembangunan Statistik) Kabupaten Blora adalah 1,72 dengan predikat "Kurang". Kemudian, pada tahun 2024 IPS (Indeks Pembangunan Statistik) Kabupaten Blora naik menjadi 2,30 dengan predikat "Cukup". Hal tersebut menunjukkan peningkatan pada penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Blora.

Pada Tahun 2024 seluruh SKPD telah memiliki buku profil, hal ini dapat menjadi pendukung ketersediaan data publik mengingat ketersediaan data pada portal open data daerah masih belum 100 %, yaitu 67,34 % pada tahun 2024. Persentase tersebut sudah cukup meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 45 % data yang tersedia pada portal open data daerah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Pada Tahun 2024 seluruh SKPD telah memiliki buku profil, hal ini dapat menjadi pendukung ketersediaan data publik mengingat ketersediaan data pada portal open data daerah masih belum 100 %, yaitu 67,34 % pada tahun 2024. Persentase tersebut sudah cukup meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 45 % data yang tersedia pada portal open data daerah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar II.47
Grafik Persentase SKPD dengan Buku Profil di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Tantangan tata kelola data statistik sektoral yang ditemui antara lain: (1) Inkonsistensi data di beberapa sistem informasi maupun dokumen perencanaan pembangunan terutama pada data beberapa pemangku data dan perspektif yang berbeda; (2) integrasi dan data-*sharing* yang belum terbentuk pada seluruh pemangku data; (3) dinamika data daerah yang tinggi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengambilan keputusan belum ditunjang oleh sumber daya yang optimal dalam koleksi dan pengolahan data; (4) tidak semua pemangku data memahami metadata dan

urgensinya untuk menyediakan data yang bisa digunakan bersama secara cepat dan akurat; (5) kemampuan statistik dan penyajian data yang beragam dari berbagai pemangku data terutama pada level teknik sebagai produsen data.

Untuk menjaga ketepatan kuantitas dan validitas data diperlukan bimbingan teknis yang terstruktur dan terstandar kepada produsen data oleh wali data dengan BPS selaku Pembina Data. Selain itu, Sistem Satu Data Blora juga merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan pengembangannya dalam rangka meningkatkan koordinasi seluruh pemilik data strategis di Kabupaten Blora.

2.1.3.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan persandian terkait dengan keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah. Urgensi pengembangan persandian menguat seiring berkembangnya *e-government* yang meningkatkan aktivitas transfer data pada seluruh aspek layanan publik. Persandian memastikan data pemerintah dan warga negara tidak disalah gunakan sekaligus memastikan informasi publik dapat diakses secara transparan dan akuntabel. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota mengamanatkan daerah menyusun SOP persandian dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas persandian dan ditetapkan setiap tahun. Kondisi pembangunan urusan persandian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.72 sebagai berikut.

Tabel II.72
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Persandian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian yang ada di RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026							
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah	na	41,67	NA	20,16	51,47	31,16
Indikator Lainnya							
2.	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	tersampaikan kepada pihak terkait						
3.	Jumlah SOP persandian	Buah	NA	1	1	1	1
4.	Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian	%	NA	100	100	100	100

Sumber: Satu Data Blora,2024
**data belum rilis*

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah telah mencapai angka 51,47 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah mengalami cukup banyak penurunan menjadi 31,16. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat hambatan dalam upaya pengamanan informasi pemerintah daerah di Kabupaten Blora, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal.

Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Saat ini urusan persandian mulai bergeser ke arah keamanan sistem jaringan, dimana salah satunya adalah adanya sertifikat elektronik untuk keamanan informasi terkait surat-surat dinas. Pada tahun 2024 seluruh pengelola persandian telah memiliki kompetensi persandian. Hal ini akan mendukung terciptanya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah yang lebih baik. Prioritas pada bidang persandian juga dibutuhkan pada pengadaan sarana-prasarana pendukung keamanan digital seperti *jammer* dan lain sebagainya.

2.1.3.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

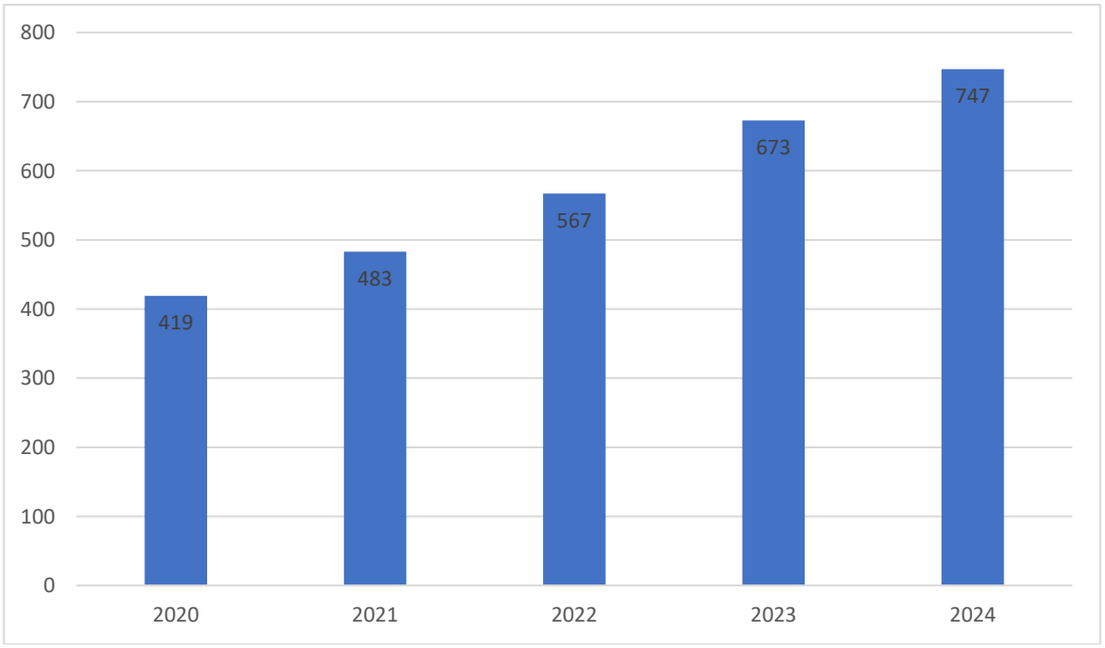
Kebudayaan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan identitas khas melalui penguatan nilai dan budaya lokal. Hal ini mendukung daya tarik daerah, terutama dalam menarik investasi di sektor jasa pariwisata. Pelestarian kebudayaan mencakup tidak hanya artefak berwujud, seperti monumen dan artefak, tetapi juga aktivitas budaya tak benda, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional. Tabel II.73 menunjukkan perkembangan kondisi pada bidang kebudayaan.

Tabel II.73
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kali	1	1	2	2	2
2.	Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah	Kali	0*	1	3	4	3
3.	Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya	%	10	10	16	16	16
4.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	7	8	18	18	18
5.	Jumlah grup kesenian	Grup	419	483	567	673	747
6.	Cakupan Kajian Seni	%	0*	0*	2	0	0
7.	Cakupan Fasilitasi Seni	%	0*	100	100	100	100
8.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	orang	0*	0*	30	85	50
9.	Cakupan Organisasi seni	%	87	87	92	92	93
10.	Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	100
11.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35	37,5	39,5	40	60
12.	Jumlah cagar budaya yang baru teridentifikasi	Buah	230	490	546	549	504

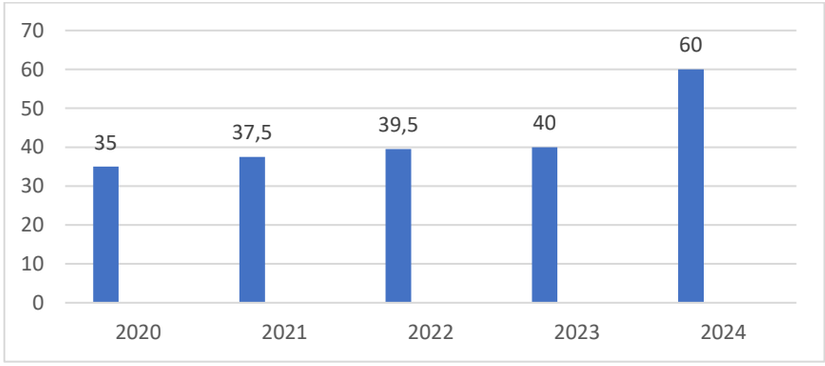
Keterangan:
**) tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19*
Sumber: Satu Data Blora,2024

Jumlah grup kesenian pada tahun 2024 sebanyak 747 grup yang meningkat dari tahun 2023 yang hanya 673 grup. Hal ini selaras dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni yang berjumlah 18 pada tahun 2024, tidak mengalami kenaikan dari tahun 2022.



Gambar II.48
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Blora telah menunjukkan peningkatan, dengan persentase mencapai 60% pada tahun 2024. Namun, upaya ini masih memerlukan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang konsisten. Salah satu tantangan dalam pelestarian cagar budaya adalah proses penetapan dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya yang memerlukan waktu cukup lama. Tanpa status legal sebagai cagar budaya, objek tersebut tidak dapat memperoleh dukungan anggaran kebudayaan untuk pengembangan lebih lanjut. Gambar II.49 di bawah ini menunjukkan perkembangan persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya cagar budaya yang dilestarikan.



Gambar II.49
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

2.1.3.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Blora merupakan sarana penting dalam mendukung sistem informasi yang mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian informasi. Perpustakaan di Kabupaten Blora tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga telah berkembang menjadi fasilitas rekreasi dan edukasi yang mendukung pengembangan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kabupaten Blora dalam meningkatkan literasi dan membudayakan gemar membaca sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Blora. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten Blora;

2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten Blora;
3. Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten Blora; dan
4. Pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

Kebijakan ini akan terus didorong agar perpustakaan di Kabupaten Blora menjadi pusat kegiatan literasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dan melestarikan warisan budaya lokal. Kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel II.74.

Tabel II.74
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Skor	84,08	84,48	84,61	85,19	85,22
Indikator Lainnya							
2.	Jumlah perpustakaan	Buah	661	661	767	767	767
	a. Perpustakaan Desa	unit	49	59	59	69	69
	b. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	unit	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	unit	1	1	1	1	1
	d. Jumlah Perpustakaan Keliling	unit	5	5	5	5	5
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	Orang	92.935	115.107	120.055	122.875	132.442
	a. Perpustakaan Umum dan Perpus Keliling	orang	91.110	111.930	93.691	96.399	87.329
	b. *Online*	orang	2.730	3.180	26.364	26.476	45.113
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	32.022	46.674	48.413	50.510	52.562
5.	Jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang dibina	Unit	320	330	382	402	404
6.	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam	Eksemplar	998	1.000	1.124	1.179	1.710
7.	SDM Pustakawan (fungsi pelayanan)	orang	5	9	10	13	13
8.	Pustakawan yang sudah uji kompetensi	orang	1	1	1	1	1
9.	Pustakawan yang lulus sertifikasi	orang	0.00	0.00	7	5	2

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
10.	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baik	OPD	44	44	44	43	44

Sumber: Satu Data Blora,2024

Kabupaten Blora terus berupaya mengembangkan literasi di masyarakat sampai ke tingkat desa. Jumlah perpustakaan desa pada tahun 2023 dan tahun 2024 masih sama. Secara total sampai saat ini sudah ada 69 perpustakaan desa/kelurahan dari 297 desa/kelurahan di Kabupaten Blora. Kunjungan perpustakaan tahun 2024 mengalami penurunan tetapi perpustakaan digital menunjukan kenaikan. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan di tahun 2024 sebesar 85,22. Namun masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti jumlah perpustakaan keliling yang mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 hanya berjumlah 5 unit (3 rusak) sementara melayani sekian banyak perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, rumah ibadah dan taman baca masyarakat yang tersebar di 16 Kecamatan

Sumber daya manusia pustakawan di Kabupaten Blora terbagi antara pustakawan yang ada di perpustakaan umum dan pustakawan sekolah. Jika melihat jumlah pustakawan yang ada di perpustakaan umum sampai tahun ini jumlahnya hanya 13 orang, 1 orang yang telah melaksanakan uji kompetensi dan 2 di antaranya telah memiliki sertifikasi. Sementara itu, jumlah pustakawan yang ada di sekolah sampai tahun 2024 sejumlah 45 orang dan 15 orang di antaranya sudah tersertifikasi.

2.1.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Blora merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam Urusan Kearsipan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan ini mencakup pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, serta perizinan terkait arsip. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang memerlukan, guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi Kabupaten Blora untuk menerapkan sistem pengelolaan arsip yang baik,

yang ditunjukkan dengan kemudahan dalam pengklasifikasian arsip baru dan kemudahan pencarian kembali arsip lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian arsip yang efisien dan efektif, yang dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terkandung dalam arsip secara tepat. Pemisahan arsip berdasarkan kategori yang relevan menjadi dasar untuk penataan arsip yang sistematis dan terstruktur, dengan tujuan mempermudah penemuan kembali arsip yang dibutuhkan di masa depan. Melalui pengelolaan arsip yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Blora.

Gambaran perkembangan capaian urusan kearsipan tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.75 berikut:

Tabel II.75

Kondisi Pembangunan Urusan Kearsipan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

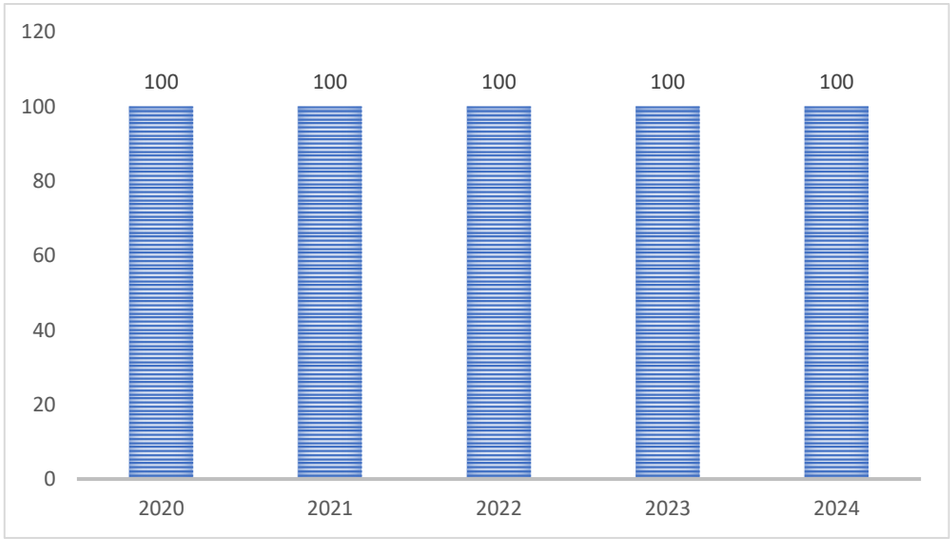
No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Skor	84,08	84,48	84,61	85,65	85,16
Indikator Lainnya							
2.	Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik	%	95	100	100	100	100
4.	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	95	100	96	96	95
5.	Persentase SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100
6.	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baik	OPD	44	44	44	43	44
7.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika	Berkas	28.987	28.987	42.564	45.153	51.486
8.	Tersedianya daftar arsip hasil alih media	Berkas	Na	5.000	8.576	9.656	10.771

Sumber:: *Satu Data Blora,2024*

Dalam rangka mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang baik** di Kabupaten Blora, dukungan terhadap sistem penyelenggaraan **kearsipan**

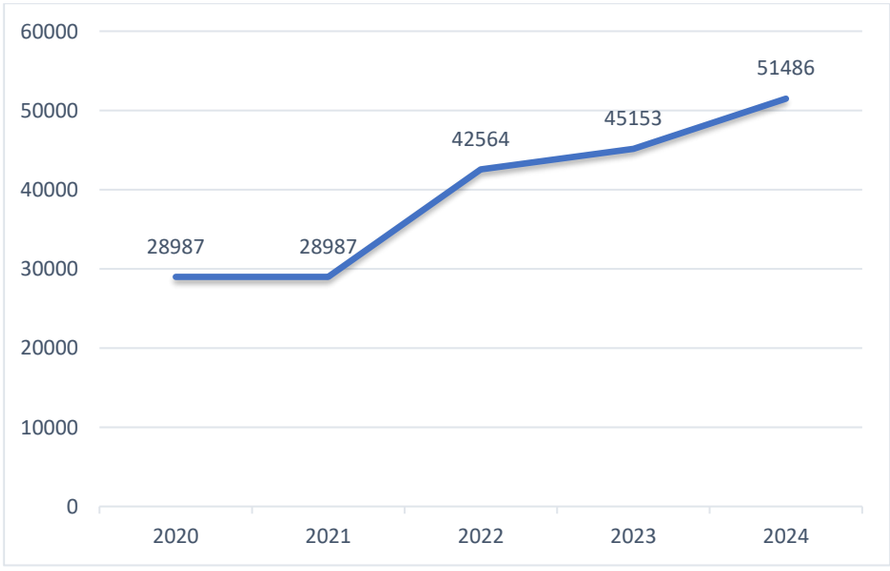
yang komprehensif dan terpadu sangat diperlukan. Sistem penyelenggaraan kearsipan harus memastikan ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban pemerintahan, serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan **peraturan perundang-undangan** yang berlaku. **Digitalisasi arsip** menjadi langkah strategis dalam pengamanan arsip, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Layanan kearsipan yang baik di Kabupaten Blora bertujuan untuk menjaga dan memastikan informasi penting masa lalu tetap terjaga, dengan tetap memperhatikan **autentifikasi arsip**. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam pengelolaan arsip, serta penyediaan ruang arsip yang memenuhi **standar kebutuhan kearsipan** sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Blora. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem informasi dan transparansi administrasi publik melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan sebagai indikator urusan kearsipan yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Blora 2021–2026 pada tahun 2024 mendapatkan penilaian sebesar 85,16. Hal ini menunjukkan penurunan terhadap kepuasan pengguna sistem kearsipan, di mana pada tahun 2023 penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,65.



Gambar II.50
Persentase Arsip yang Tersimpan dengan Baik di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Layanan kearsipan yang baik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menjaga informasi penting masa lalu dengan tetap menjaga autentifikasi arsip sehingga diperlukan kehati-hatian dan kecermatan serta ruang khusus yang memenuhi standar kebutuhan kearsipan. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan sebagai indikator urusan kearsipan yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Blora 2021–2026 pada tahun 2024 mendapatkan penilaian sebesar 85,16. Hal ini menunjukkan kepuasan pengguna sistem kearsipan yang memudahkan urusan pengguna. Gambar II.51 di bawah ini menunjukan bahwa digitasi arsip telah dilakukan pada lebih dari 51 ribu dokumen pada tahun 2024.



Gambar II.51
Grafik Jumlah Arsip Sudah Diduplikasi dalam *Softfile* di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada urusan kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota, dan (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sementara itu, untuk sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan. Data pada Tabel II.76 di bawah ini menunjukkan perkembangan kinerja

pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2020–2024 sebagai berikut.

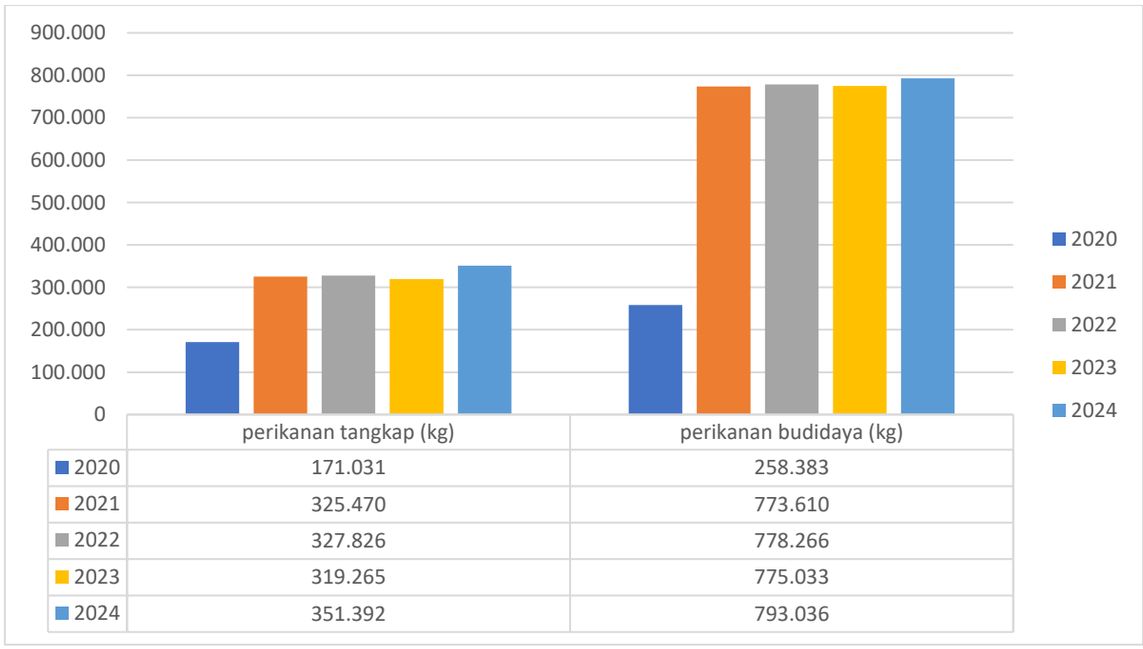
Tabel II.76
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Produksi perikanan	Kg	429.413,68	1.099.080	1.106.092	1.094.298	1.776.343
2.	Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	100	100	100	100	10
3.	Tingkat konsumsi ikan penduduk	Kg/ kapita	13,67	22.89	21,77	*)	Belum tersedia
4.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Kg	554.510	803.694	610.365	613.719	631.915,25
5.	Jumlah industri pengolahan ikan	Unit	25	38	37	39	31
6.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	21,27	22,35	22,35	21,45	Sumber Data BPS belum keluar

Sumber: Satu Data Blora, 2024
**) data tersaji dari Susenas bulan Agustus 2024.*

Secara umum, kondisi urusan perikanan di Kabupaten Blora relatif stabil dari tahun 2020-2024 apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB. Penurunan terjadi lagi di tahun 2023 sebesar 21,45 % yang disebabkan adanya perubahan cuaca ekstrim yang menjadikan ekosistem perairan seperti waduk mengalami gangguan, sehingga perkembangan ikan tidak maksimal. Produksi ikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2023 yaitu 1.094.298 kg. Produksi perikanan terbagi menjadi 1) produksi perikanan tangkap; 2) produksi perikanan budidaya.

Gambar II.52 di bawah ini menunjukkan dinamika produksi perikanan di Kabupaten Blora pada tahun 2020–2024.



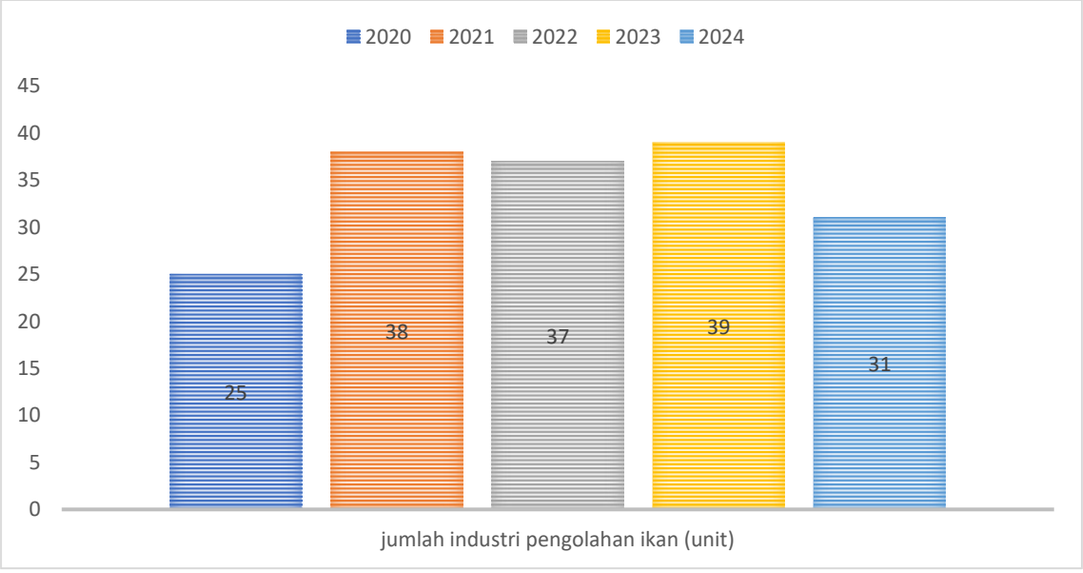
	perikanan tangkap (kg)	perikanan budidaya (kg)
2020	171.031	258.383
2021	325.470	773.610
2022	327.826	778.266
2023	319.265	775.033
2024	351.392	793.036

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Gambar II.52
Produksi Perikanan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Produksi perikanan tangkap dan budidaya dari tahun 2021–2023 mengalami produksi yang cenderung stabil. Namun yang produksi yang baik adalah perikanan budidaya di Kabupaten Blora yang memperlihatkan resiliensi yang baik dengan tidak adanya penutupan industri selama pandemi terjadi. Produksi perikanan tangkap kurang memenuhi atau masih kurang mendukung target IBEI dikarenakan wilayah tangkap paling besar bergantung pada perairan DAS Bengawan Solo, demikian juga perairan darat lainnya yang kurang berpotensi selain karena faktor cuaca dan bencana kekeringan serta kurang mendukung wilayah perairan di Kabupaten Blora yang tidak terlalu banyak.

Untuk perikanan budidaya Kabupaten Blora sebagian besar adalah budidaya ikan lele yang lebih berkembang dikarenakan lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak air dalam proses budidayanya.



Gambar II.53
Jumlah Industri Pengolahan Ikan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Semua industri pengolahan ikan tetap bertahan selama pandemi. Hal ini menunjukkan resiliensi yang baik dari industri pengolahan ikan. Resiliensi tersebut membuat kontribusi sektor perikanan pada PDRB relatif stabil walaupun sempat sedikit menurun pada saat pandemi Covid19 pada tahun 2020. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor perikanan pada tahun 2019 sebesar 23,33 %. Sementara itu, pada tahun 2021- 2022 berkontribusi naik sebesar 22,35 %, kemudian di tahun 2023 menjadi menurun sebesar 21,45 %. Kontribusi sektor perikanan menurut BPS mulai Tahun 2021 sektornya bersatu dengan KBLI yang Baru yaitu Sektor Pangan, Perikanan dan Kelautan.

Tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Blora terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 13,67 kg/kapita, menurun sebesar lebih dari 6 kg/kapita bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali sebesar 9 kg/kapita menjadi 23,35 kg/kapita seiring pulihnya pandemi. Data ini mengindikasikan kesadaran dan kebutuhan masyarakat mengonsumsi ikan meningkat, dan berarti peluang pengembangan produk olahan ikan memiliki potensi pasar juga meningkat. Untuk tingkat konsumsi ikan penduduk di tahun 2024 angkanya belum muncul diperkirakan oleh BPS bulan Agustus 2025.

2.1.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam urusan pariwisata meliputi: (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten, (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten, (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten, dan (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027, Kabupaten Blora termasuk dalam Daerah Pengembangan Pariwisata (DPP) Rembang–Blora dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Blora dan sekitarnya. Kawasan ini mencakup ruang pariwisata tertentu dengan tema produk wisata dominan sebagai identitas kawasan.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Blora dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kinerja sektor pariwisata diukur melalui peningkatan kunjungan wisatawan, promosi destinasi unggulan, dan penguatan sistem pendukung pariwisata.

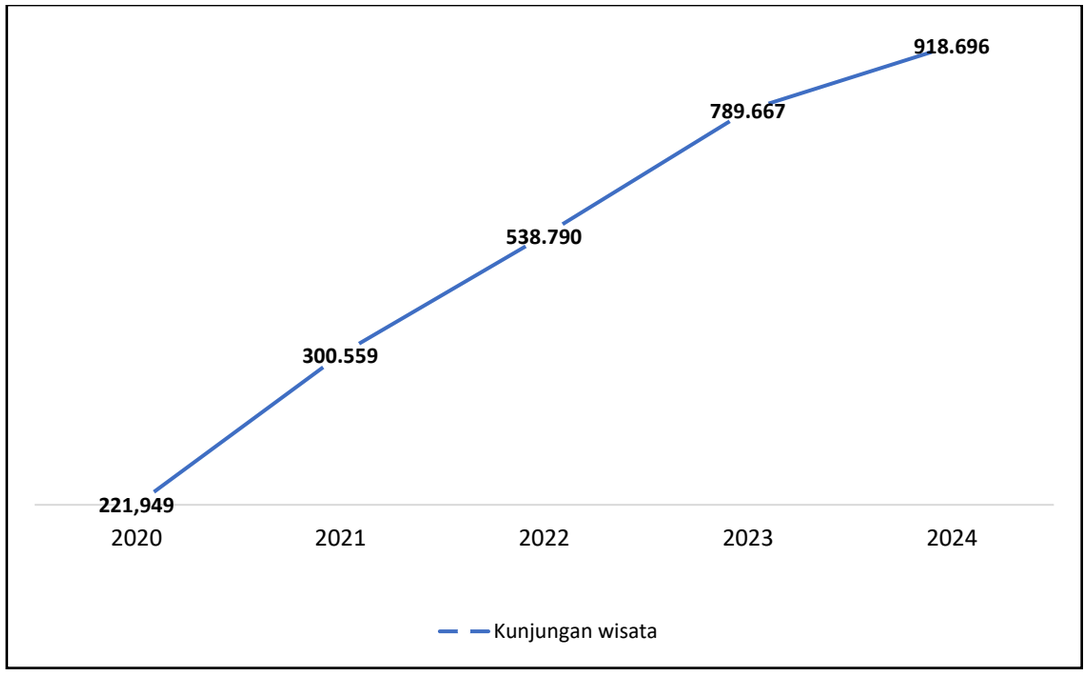
Ikon "Dolan Blora" menjadi representasi potensi wisata di Blora, mencakup destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah, seperti Goa, Taman dan Pemandian, Wisata Geologi, Makam, serta Bumi Perkemahan. Upaya ini dilandasi kesadaran untuk meningkatkan daya saing objek wisata. Pengembangan desa wisata dan penguatan daya tarik wisata seperti Tirtonadi, Taman Sarbini, menjadi bagian penting dari strategi promosi dan agenda kegiatan unik yang dapat menarik wisatawan. Tabel II.77 di bawah ini menunjukkan perkembangan sektor pariwisata dari tahun 2020–2024.

Tabel II.77
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	1,91	1,78	2,36	2,56	1,10
Indikator Lainnya							
1.	Kunjungan wisatawan	Orang	221.949	300.559	538.790	789.667	918.696
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100
3.	Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	22	23	23	23	23
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	hari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Even wisata yang diselenggarakan (skala kota ke atas)	kali	1	0	2	5	7
4.	Jumlah Pokdarwis Aktif	Kelp	8	17	22	22	22
5.	Jumlah restoran	Unit	95	111	111	111	112
6.	Jumlah penginapan / hotel	Unit	40	45	45	45	45
	Jumlah penginapan / hotel Bintang-5	unit	1	1	1	1	1
	Jumlah penginapan / hotel Bintang-4	unit	2	2	2	2	3
	Jumlah penginapan / hotel Bintang-3	unit	3	3	3	3	3
	Jumlah penginapan / hotel Bintang-2	unit	4	4	4	4	4
	Jumlah Home Stay	unit	26	26	26	26	26

Sumber: Satu Data Blora,2024

Berdasarkan Tabel II.77 di atas, Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Blora meningkat dari 789.667 orang pada tahun 2023 menjadi 918.696 orang di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam sektor pariwisata pascapandemi, dengan jumlah kunjungan yang terus bertambah setiap tahunnya.



Gambar II.54
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kelompok sadar wisata di Kabupaten Blora tahun 2024 ada 22 kelompok. Jumlah objek wisata 22 objek pada tahun 2020 naik menjadi 22 objek dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak ada kenaikan dari seluruhnya telah dipromosikan dalam program pemerintah Kabupaten Blora.

Sementara itu, jumlah objek wisata di Kabupaten Blora juga menunjukkan peningkatan. Seluruh objek wisata tersebut telah dipromosikan dalam program pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Perkembangan kinerja pariwisata diharapkan meningkatkan kontribusi pada PDRB. Kontribusi Sektor Pariwisata tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,10 persen dbandingkan tahun 2023 sebesar 2,56 persen. Pembukaan kawasan wisata baru dengan sinergi pengembangan desa wisata dan objek wisata lainnya dengan menghadirkan investor perlu terus dilakukan untuk meningkatkan nilai PAD dari sektor pariwisata.

2.1.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana

Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.78. Produksi tanaman pangan kabupaten Blora Tahun 2024 mengalami peningkatan karena cuaca sudah normal kembali dalam arti masa tanam I dan II curah hujan sudah stabil sehingga hasil produksi pertanian meningkat. Dari aspek produksi pertanian, sumbangan yang meningkat dari produk padi, kedelai, cabe merah, cabe rawit, bawang merah. Produksi perkebunan yang meningkat adalah tembakau. Harapan dengan meningkatnya produksi tembakau dapat meningkatkan pendapatan petani tembakau dan dengan demikian intervensi dari kegiatan DBHCHT di Kabupaten Blora dapat dinyatakan tepat guna.

Tabel II.78

Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	1,87	2,31	2,51	-0,14	0,48
Indikator lainnya							
Sub Bidang Pertanian							
1.	NTP	Angka	101.2	100.15	NA	117,11	117,11*
	indeks yang diterima petani (lt)	angka	101.4	100.77	NA	141,86	141,86*
	harga yang dibayar petani (lb)	angka	100.44	100.63	NA	121,13	121,13*
2.	Cakupan bina kelompok petani	%	86	90	100	100	100
3.	Jumlah promosi produk unggulan pertanian/perkebunan	Kali	0	0	1	1	1
4.	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	%	83	84	98	100	100
5.	Produksi pertanian:						
	Padi sawah	Ton	517.835	536.140,96	549.723,25	513.638,64	514.389
	Padi ladang	Ton	81.839	97.311,92	119.105,65	98.685	51.407
	Jagung	Ton	430.269	390.817,73	429.407,96	451.267,72	395.409
	Kedelai	Ton	4.441	5.229,43	1.944,04	2.181,52	3.3305

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Ubi kayu	Ton	42.914	28.713,31	28.168,70	12.075	9.581
	Cabe Merah	Ton	9.601,30	19.374,25	379,83	314	3.482,92
	Cabe Rawit	Ton	1.516,90	2.756,00	181,63	208.792	1.457,53
	Bawang merah	Ton	1.473,40	10.066,20	109,91	116,078	1.245,10
	Jeruk siam	Ton	976,8	8.551,80	30,9	107,5354	703,15
6.	Produksi perkebunan:						
	Tembakau	Ton	2.447,25	1.057,38	1.118,94	2.439,42	4.739,83
	Tebu	Ton	16.396,04	17.247,84	21.294,65	26.030,29	18.609,61
	Kelapa	Ton	61,65	56,54	134,77	39,953	39,57
	Mete	Ton	367,823	349,61	359,7	87,499	88,91
7.	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan	%	100	100	100	100	
Sub Bidang Peternakan							
1.	Angka prevalensi Helminthiosis pada sapi	%	39	37	35	32	2
2.	Angka prevalensi BEF pada sapi	%	25	24	23	22	2
3.	Populasi Ternak						
	Sapi Potong	Ekor	267.193	278.890	285.500	287.700	174.700
	Kerbau	Ekor	1.701	1.955	2.059	2.122	298
	Kambing	Ekor	143.622	146.489	149.350	152.200	109.500
	Domba	Ekor	18.121	19.720	20.118	20.615	3736
	Sapi Potong	Ekor	267,193.00	272,123	285.500	287.700	174.700
	Sapi Perah	Ekor	28.00	NA	-	0	10
	Kerbau	Ekor	1,850.00	NA	2.059	2.122	298
	Kambing	Ekor	143,622.00	149,032	149.350	152.200	109.500
	Domba	Ekor	19,284.00	NA	20.118	20.615	3736
	Kuda	Ekor	77.00	NA	45	45	77
	Babi	Ekor	17.00	NA	-	0	215
	Kelinci	Ekor	9,015.00	NA	9.515	9.815	2396
	Ayam Buras	Ekor	3,526,400.00	NA	3.677.260	3.686.500	664.100
	Ayam Ras Petelur	Ekor	226,500.00	NA	243.050	244.900	60.200
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	1,511,000.00	NA	1.529.545	1.540.100	3.150.500
	Itik	Ekor	62,561.00	NA	65.260	66.200	263.200
5	Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan	Kali	0	0	0	0	0

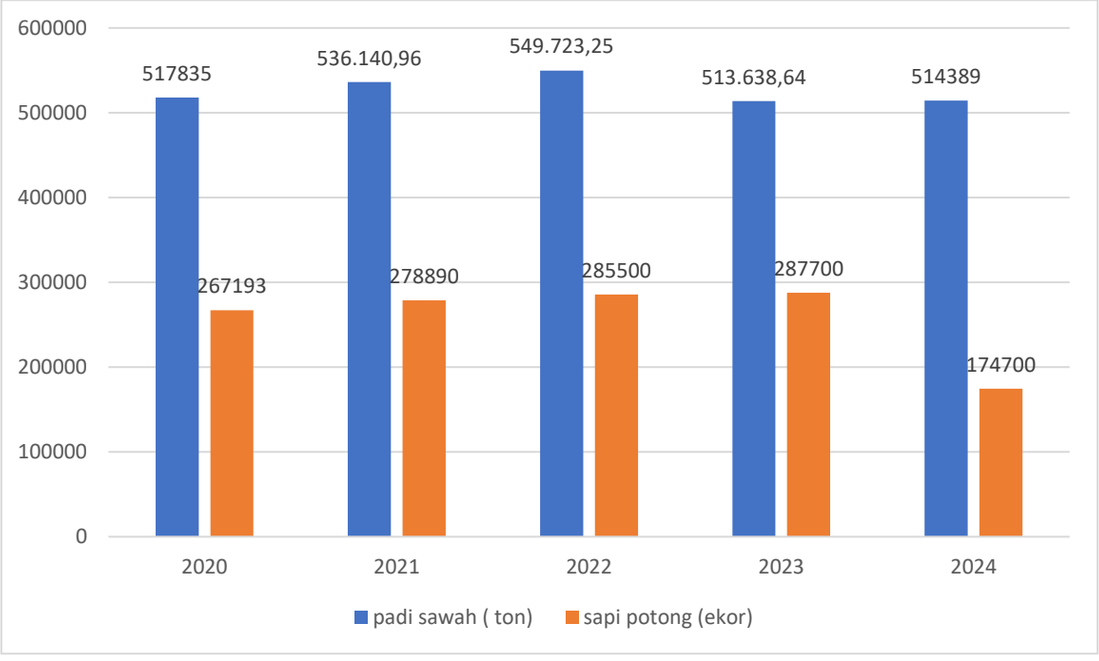
Sumber: Satu Data Blora,2024

**data belum rilis*

Salah satu inovasi Kabupaten Blora di Tahun 2024 melaksanakan penerapan teknologi pertanian pada kelompok tani muda/milenial, diwujudkan dalam penerapan program mengedapankan pembinaan petani

muda agar lebih inovatif, produktif dan berdaya saing, dengan fokus pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 99 pedati memberikan pelatihan dan kases pasar untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta mengembangkan potensi Kabupaten Blora secara maksimal

Besaran produksi direpresentasikan dari jumlah populasi ternak yang memperlihatkan peningkatan pada komoditas sapi potong, kerbau, kambing, domba, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik.



Gambar II.55
Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

Alih fungsi lahan pertanian perlu diantisipasi dengan pengembangan urban farming, yang dimaksud tidak/tanpa mengurangi Lahan Sawah yang Dilindungi. Urban farming dalam skala kecil adalah salah satu bentuk yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan multilayer lahan pekarangan hingga penggunaan pertanian vertikal. Perubahan iklim/bencana dan semakin terbatasnya kebutuhan pupuk juga berpengaruh sangat signifikan pada kelangsungan proses produksi. Serta berpotensi gagalnya panen dan harga panen jatuh. Risiko ini berdampak pada kehidupan petani yang pada akhirnya beralih pekerjaan untuk memenuhi hidup. Pemerintah Kabupaten Blora berupaya melakukan Pengembangan dan terobosan serta pelatihan untuk komoditas organik dengan nilai jual tinggi juga dapat digunakan sebagai cara untuk

meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk tindaklanjut atas penghargaan IGA Award 2023 atas pengembangan pembuatan pupuk organik dan beras organik, Kabupaten Blora terus melakukan pengembangan dan peningkatan agar produksinya mampu memenuhi kebutuhan baik masyarakat Kabupaten Blora dan sekitar.

2.1.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Pengelolaan hutan terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan di sekitarnya. Tidak hanya terbatas dalam aspek ekonomi saja, namun dengan upaya menjaga hutan tetap lestari dan berkelanjutan. Selaian itu, pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Blora, antara lain:

a. masih adanya lahan kritis pada kawasan resapan air hulu DAS sehingga fungsi hidroorologis DAS kurang optimal;
b. masih adanya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan;
c. masih rendahnya infrastruktur di kawasan hutan;
d. masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan;
e. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang aman dan berkelanjutan.

Wilayah kawasan hutan di Kabupaten Blora sekitar 46,63 persen dari total wilayah atau sekitar 90.674 hektar. Secara rinci terbagi sebagaimana Tabel II.79 berikut ini.

Tabel II.79
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Blora

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Hutan Produksi Tetap	72.215,83	-
2	Hutan Produksi Terbatas	270,20	-
3	Cagar Alam	25,00 31,00	Cagar Alam Bekutuk Cagar Alam Cabak I/II
4	Hutan Lindung	6,00	-
5	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	1.382,33 8.750,17	KHDTK Cemoro Modang (BPSI LHK Solo) KHDTK UGM Yogyakarta
6	Perhutanan Sosial	7.993,47	-
Total		90.674,00	

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041, diolah

Upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Blora guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi hutan sebagai berikut:

a. Mendukung Program LMDH dan Perhutanan Sosial;
b. Pemantapan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan untuk mendukung kegiatan produktif berbasis lahan hutan;
c. Pengembangan usaha produktif berbasis lahan hutan dengan sistem agroforestri modern melalui penerapan teknologi Smart Farming untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Hutan rakyat juga memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Blora. Setiap tahun, lebih dari 2 juta meter kubik kayu dari hutan rakyat menyuplai kebutuhan industri, mulai dari industri penggergajian sampai industri kerajinan mebel. Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terdapat lebih dari 900 unit Industri Pengolahan Hasil Hutan yang memiliki izin operasional di Jawa Tengah, di mana 80% di antaranya berkapasitas antara 2000 s.d <6000 m3/tahun. Potensi hutan rakyat di Kabupaten Blora perlu dimaksimalkan guna mendukung kecukupan industri hasil hutan seperti mebel dan kerajinan lainnya. Berdasarkan hasil pemetaan potensi hutan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah total luasannya adalah 4.678,02 hektar. Secara lengkap tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel II.80

Luas Kawasan Potensial Hutan Rakyat di Kabupaten Blora

Tahun 2024

No	Kategori Kawasan	Luas (Hektar)	Keterangan Vegetasi
1	Hutan Mangrove	0,00	Tanaman Mangrove ukuran Rendah - Tinggi
2	Hutan	7,96	Campuran dengan ukuran Sedang - Tinggi
3	Kebun	1.589,02	Campuran dengan ukuran Sedang - Tinggi
4	Pekarangan	0,00	Campuran dengan ukuran Rendah - Sedang
5	Tegalan	3.037,18	Campuran dengan ukuran Rendah - Sedang
6	Belukar	43,86	Campuran dengan ukuran Rendah
Total		4.678,02	

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

2.1.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Blora memiliki potensi besar di sektor energi, terutama dengan keberadaan Blok Cepu di Kecamatan Cepu. Namun, pengelolaan Blok Cepu tidak berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Blora. Selain itu, sumber daya bahan galian di Kabupaten Blora, yang sebagian besar merupakan bahan galian golongan C, juga berada di luar kewenangan pengelolaan pemerintah kabupaten.

Dalam urusan energi dan sumber daya mineral, prioritas diarahkan pada pengembangan energi alternatif untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan biogas oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi skala rumah tangga. Di sisi lain, penggunaan energi konvensional di Kabupaten Blora menunjukkan kemajuan signifikan, dengan rasio elektrifikasi mencapai 100% pada tahun 2020, yang mencerminkan akses penuh masyarakat terhadap energi listrik.

2.1.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sebagai sektor tersier dengan kontribusi terbesar secara konsisten di PDRB kabupaten Blora, sektor perdagangan memiliki potensi pengembangan dengan memanfaatkan lokasi yang strategis pada kawasan perbatasan Provinsi dan mobilitas pada Kawasan Strategis nasional di Kecamatan Cepu. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Blora selalu stabil. Penurunan kecil terjadi pada tahun 2020 yang ditengarai akibat pandemi Covid-19, namun telah berhasil pulih pada tahun 2022. Tabel II.81 di bawah ini menunjukkan kondisi sektor perdagangan pada tahun 2020–2024.

Tabel II.81
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	-3,65	4,92	4,19	4,36	6,38
Indikator Lainnya							
2.	Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,30	15,47	14,59	15,41	15,98
3.	Jumlah Pasar	Unit	16	16	17	17	13
4.	Jumlah Pasar yang Diawasi	Unit	16	16	17	17	13
5.	Persentase Pasar yang Diawasi	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	80	86,7	90	100	61,54
7.	Jumlah Bangunan Permanen Sarana Perdagangan dikelola Pemerintah	unit	17	19	20	21	21
8.	Jumlah Bangunan Permanen Sarana Perdagangan dikelola Masyarakat	unit	43	43	43	43	43
9.	Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toserba**	unit	4	4	4	4	5
10.	Minimarket**	unit	92	92	96	107	110
11.	Jumlah Rumah Potong Hewan Unggas dan Sejenisnya	unit	6	6	6	6	6
12.	Persentase Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) yang telah mengikuti pameran/ promosi produk.	%	0	0*	1	4	6
13.	Nilai Ekspor Bersih	Rp miliar	1.652,93	3.378,20	5.163,90	3.712,98	4.892,27
14.	Jumlah Produk yang Diterima Pasar Internasional	Produk	7	7	7	7	7
15.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	36,84	44,44	45	45	45

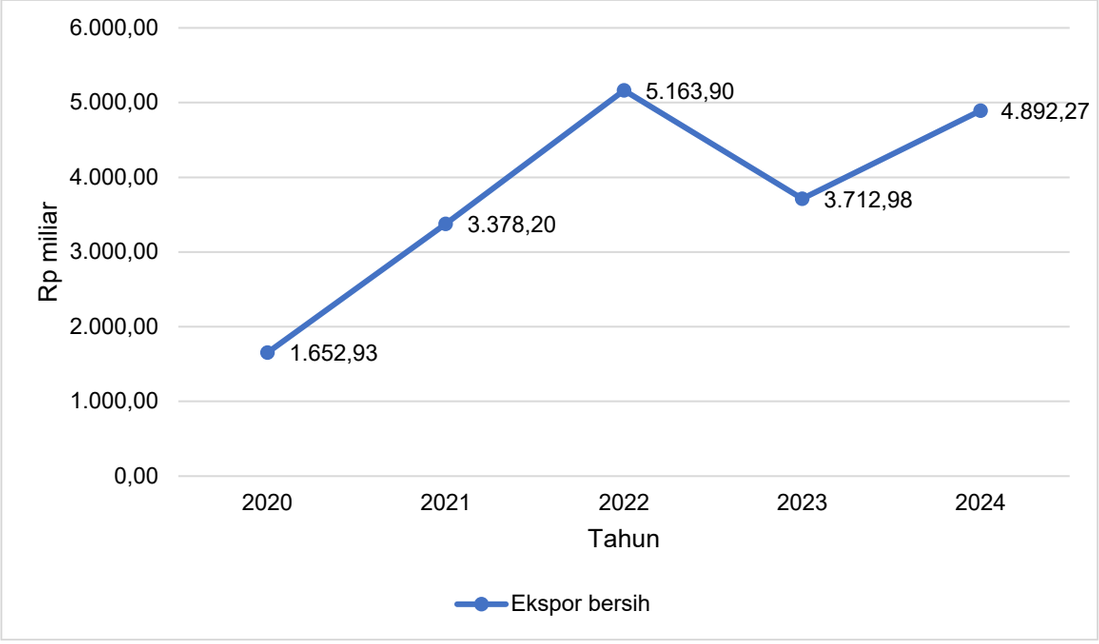
Sumber: Satu Data Blora,2024

**) aktivitas ditiadakan akibat pandemi covid-19*

Persentase PDRB Sektor perdagangan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Setelah turun semenjak pandemi tahun 2020, Laju pertumbuhan kontribusi sektoral perdagangan meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 6,38 %.

Peningkatan ini menandakan adanya pemulihan yang kuat dalam sektor perdagangan pasca dampak negatif dari pandemi. Pada tahun 2024, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi pertumbuhan sektor perdagangan masih cukup signifikan, yaitu sebesar 15,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi regional dan terus berkontribusi secara positif meskipun menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan ekonomi global dan nasional.

Stabilnya sektor perdagangan ditunjang dengan peningkatan jumlah sarana perdagangan yang dikelola pemerintah. Pada tahun 2024, total jumlah sarana perdagangan adalah sebanyak 64 unit, sebanyak 21 unit dikelola pemerintah dan 43 unit dikelola oleh masyarakat/swasta. Terdapat penurunan pada persentase pasar tradisional yang berada pada kondisi baik di tahun 2024, hal ini disebabkan oleh musibah kebakaran yang terjadi di Pasar Ngawen. Perdagangan internal yang menguat pasca pandemi juga dialami oleh perdagangan eksternal (ekspor). Nilai Ekspor Bersih juga mengalami peningkatan setelah memasuki fase stagnan akibat pandemi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang melarang aktivitas kerumunan massa, sehingga banyak produk yang tidak bisa dipamerkan dalam event regional maupun nasional. Tahun 2022 tercatat nilai ekspor bersih yang melebihi lima juta USD, menandakan kinerja yang sangat baik dalam hal perdagangan internasional. Hal ini memberikan sinyal positif tentang kemampuan Kabupaten Blora dalam memperluas pasar dan mempertahankan daya saingnya di pasar global. Nilai Ekspor Bersih tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, peningkatan yang melebihi satu juta USD dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil di Kabupaten Blora, dengan perdagangan internasional menjadi salah satu motor utama di belakang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan stabilitas dalam aktivitas perdagangan internasional.



Gambar II.56

Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pengembangan sektor perdagangan memerlukan sarana prasarana perdagangan yang memadai, termasuk dukungan untuk sektor informal dalam perdagangan. Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling terbuka bagi semua kelompok, dan strategis untuk jaring pengaman sosial ekonomi warga, termasuk PKL. Penataan PKL melalui fasilitasi di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan kesejahteraan PKL. Penataan yang dilakukan tidak hanya memperindah tampilan fisik sektor informal, namun juga diharapkan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan intensitas aktivitas ekonomi masyarakat.

2.1.3.3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu pila utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, sektor perindustian dapat memberikan peningkatan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan produk domestik bruto Sektor industir diharapkan mampu mengarahkan bahan baku lokal menjadi produk yang bernilai tinggi. Kondisi bidang perindustrian di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.82

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perindustrian

Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

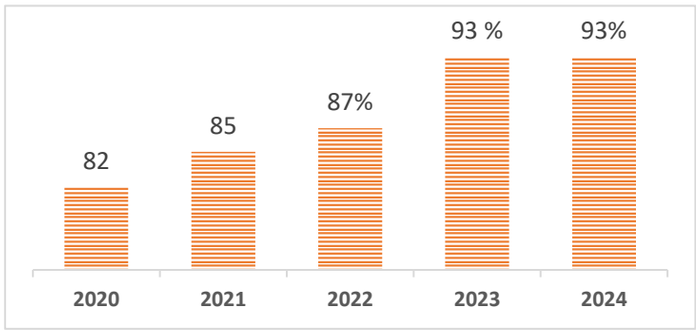
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021-2026						
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan ADHK	%	-1,85	3,03	4,62	5,31	5,16
	Indikator Lainnya						
2.	Jumlah Industri	Unit	12.085	12.172	12.182	12.197	12.217
3.	Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah)	Unit	11.800	12.051	12.122	12.125	12.155
4.	Persentase Pertumbuhan Industri	%	3,39	0,79	0,72	0,08	0,08*
5.	Distribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB	%	9,93	10.83	10,23	9,79	9,79*
6.	Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri	%	15	15,2	15	15,2	15,2*
7.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	%	56	58	60	65	66
8.	Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61
9.	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	1,42	1,49	1,51	1,58	1,98
10.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	82	85	87	93	93
11.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	43	45	48	52	58
12.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	37,5	39	40	44	45

Sumber: Satu Data Blora,2024

**data belum rilis*

Melihat tabel di atas, Sektor perindustrian menunjukan pertumbuhan yang menuju arah yang baik dilihat melalui jumlah industri,

jumlah industri kecil dan menengah, persentase jumlah industri kecil dan menegah yang memiliki ijin Sertifikat Produksi Pangan Industri, peningkatan omset penjualan produk industri kecil dan menengah, persentase klaster indsutri yang berkembang, dan seterusnya. Pengembangan pengelolaan interaksi antar pelaku industri kembali membaik ditunjukkan oleh adanya peningkatan persentase klaster industri yang berkembang, serta cakupan pembinaan kelompok pengrajin sudah sebesar 52 persen melalui kemajuan teknologi Pemerintah Blora berusahan untuk membina klaster lebih banyak lagi. Kondisi Klaster Industri tahun 2024 masih relatif setabil sebesar 94 persen pelaku IKM.



Sumber : Satu Data Blora, 2024

Gambar II.57
Persentase Pelaku IKM yang termasuk Kategori Klaster Industri Berkembang di Kabupaten Blora pada Tahun 2020-2024

Dukungan program dalam pengelolaan ini akan dapat mendorong peningkatan omset penjualan IKM. Optimasi produksi IKM diharapkan akan mendorong optimalisasi kinerja sektor ini. Intervensi pengenalan *supply chain management* pada kalangan IKM pada sisi produksi penting dilakukan guna mendorong efisiensi produksi. Pada sisi pemasaran, langkah tersebut dapat diintegrasikan dengan digitalisasi sektor perdagangan untuk memperluas pasar hasil produksi dan meningkatkan omset usaha Industri Kecil Menengah.

Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal baru pada tahun 2024 mencapai 66% dan Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru pada tahun 2024 mencapai 45%. Dalam pelaksanaan pembangunan urusan perindustrian, pemerintah Kabupaten Blora perlu terus mendorong para pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk tidak hanya bertolak dari jumlah omset industri namun juga perlu didorong dari sisi legalitas perijinan

industri dan didorong untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selain itu juga perlunya peningkatan kemandirian dan penguatan terhadap penguasaan teknologi produksi dan pemasaran.

2.1.3.3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi beberapa masalah yang ada di masyarakat. Adanya ketimpangan pendapatan, kemiskinan, ketimpangan kepemilikian tanah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keterbatasan masyarakat dalam menjangkau atau memiliki sumber daya ekonomi dapat dijawab melalui isu transmigrasi. Masyarakat yang mengikuti transmigrasi diberikan sumber daya ekonomi pada kawasan - kawasan strategis yang memerlukan peningkatan produktifitas. Kabupaten Blora memberangkatkan transmigrasi sebanyak 1 keluarga di tahun 2024 adapun rekam jejak pemberangkatan transmigrasi dapat dilihat pada Tabel II.83 Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2020–2024.

Tabel II.83
Kondisi Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	0	0	0	1	1

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Seiring dengan terbatasnya lahan transmigrasi di Kabupaten Blora, sehingga dilakukan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mencari lahan/daerah penerima transmigrasi yang tepat. Melalui proses identifikasi yang cermat, diharapkan dapat ditemukan lahan transmigrasi yang sesuai. Sebelum diberangkatkan, para calon transmigran akan diberikan sosialisasi dan pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan diri. Pendampingan yang intensif baik sebelum maupun setelah penempatan, sehingga para transmigran dapat beradaptasi dengan baik dan meraih kesuksesan di tempat tujuan.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 2 yakni membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat 3 (tiga) indikator penyelenggaraan urusan penunjang sekretariat daerah dan 12 (dua belas) indikator lainnya. Tabel II.84 di bawah menyajikan kondisi pada unsur Sekretariat Daerah pada tahun 2020–2024.

Tabel II.84
Kondisi Pembangunan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Nilai SAKIP	Skor	B	B	B	B	B
2.	Indeks Maturitas Kelembagaan	level	3	2,93	3,2	3	32,66
3.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,75	83,5	84,11	85,36	87,98
Indikator Lainya							
4.	Indeks reformasi birokrasi	-	56,11	57,09	59,23	69,22	69,22*
5.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik	%	NA	100	100	-	-
6.	Penataan SKPD (unit)	44	44	44	44	41	41
7.	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah		6	6	6	6	6
8.	Ketepatan waktu penyampaian LAKIP	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
9.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
10.	Persentase kerja sama yang diimplementasikan dari MoU yang ada	%	95	100	150	85	112,5
11.	LPSE	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
12.	Persentase penggunaan *e-procurement* / LPSE terhadap belanja pengadaan (tender)	%	100	100	100	100	100
13.	WBK/ZI	Unit pelayanan	0	0	0	0	0
14.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	NA	3,9	4,25	4,38	4,42
15.	Keberadaan mall pelayanan publik	ada	ada	ada	Ada	ada	ada

Keterangan:
-) Penilaian Mandiri RB sudah tidak dilakukan lagi
**) data belum rilis*
Sumber: Satu Data Blora,2024

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. SAKIP diterapkan untuk mendukung reformasi birokrasi dan Zona Integritas. Dengan SAKIP, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak bagi masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah: Menjaga komitmen dalam pembangunan SAKIP, Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, Memastikan kebutuhan proses evaluasi terpenuhi, Memenuhi tindak lanjut hasil evaluasi. Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 adalah 67,03 dengan Predikat “B”. Nilai tersebut naik 1,63 dari Tahun 2023 yaitu 65,40. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora yaitu 32,66 dengan tingkat kematangan sedang. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Blora, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,98. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024.

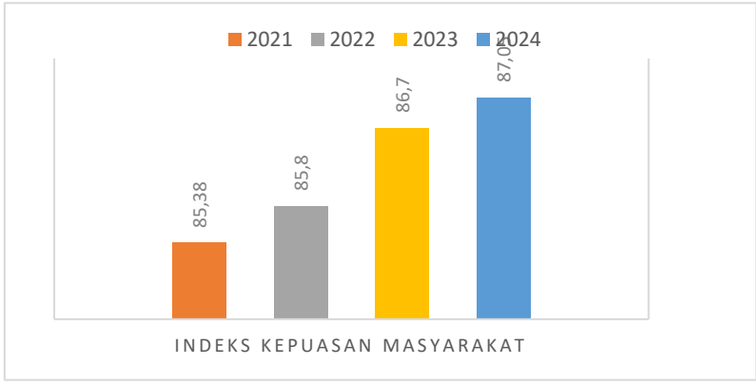
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah diamanatkan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disertai Maklumat Pelayanan. SPP ini diamanatkan dalam UU 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permen PAN-RB No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, serta Permen PAN-RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta PP No. 2 tahun 2018 tentang SPM. Kabupaten Blora sudah memiliki Mall Pelayanan Publik sejak tahun 2020. Detail hasil survei kepuasan masyarakat dari unit pelaksana pelayanan publik disajikan dalam Tabel II.85 berikut ini.

Tabel II.85
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Perangkat Daerah	Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Dinas PMPTSP	89,7	89,8	90,41	86,89	-
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,00	85,03	84,00	87,67	89,01
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,07	88,31	84.59	84,71	-
4.	Dinas Kesehatan	NA	NA	81,52	83,21	84,43
5.	Dinas Pendidikan	NA	NA	85,25	84,99	88,42
6.	Kecamatan Tunjungan	77,40	80,00	-	85,20	86,10
7.	Kecamatan Cepu	82,07	84,08	84,19	87,08	88,86
8.	Kecamatan Jati	80,2	83,02	86,14	87,60	87,61
9.	Kecamatan Kunduran	77,3	82,5	85,50	85,56	88,98
10.	Kecamatan Sambong	78,6	90,70	88,13	86,45	83,61
11.	Kecamatan Jepon	81,54	82,00	86,01	88,00	-
12.	Kecamatan Banjarejo	81,75	81,23	85,38	86,99	83,07
13.	Kecamatan Kradenan	80,00	88,26	84,73	88,12	84,65
14.	Kecamatan Japah	80,8	81,10	84,48	88,36	88,12
15.	Kecamatan Ngawen	80,97	82,10	86,24	85,86	88,01
16.	Kecamatan Blora	98,10	99,00	84.60	86,34	87,06
17.	Kecamatan Randublatung	83,242	84,00	86.53	88,05	88,24
18.	Kecamatan Jiken	82,36	83,00	87,60	86,35	87,92
19.	Kecamatan Bogorejo	80,45	87,25	86,57	90,59	86,79
20.	Kecamatan Todanan	82,00	84,00	85,24	86,9	88,,4
21.	Kecamatan Kedungtuban	89,5	86,84	87,21	85,9	89,06

Sumber: Satu Data Blora,2024



Gambar II.58
Grafik Kinerja IKM di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori penilaian adalah: (1) Nilai 25,00–64,99 mutu pelayanan D (Tidak baik); (2) Nilai 65,00–76,00 mutu pelayanan C (Kurang baik); (3) 76,61–88,30 mutu pelayanan B (Baik); (4) nilai 88,31–100,00 mutu pelayanan A (Sangat Baik). Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2024 secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,05. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Blora menunjukan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Tahun 2020–2024.

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Harmonisasi pembangunan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan publik dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Peran Sekretariat DPRD sebagai pendukung utama DPRD memainkan fungsi strategis dalam mendukung pengawasan, legislasi, dan administrasi pemerintahan.

Sekretariat DPRD memberikan layanan administratif kepada anggota dewan, mencakup fasilitasi kunjungan kerja, penyelenggaraan persidangan, dan proses pembentukan peraturan daerah. Pada tahun 2023, sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Raperda tersebut terdiri dari satu Perda inisiatif DPRD, tiga Perda kumulatif terbuka, dan

tiga Perda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang produktif antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Tabel II.86
Kondisi Pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	NA	NA	43,75	72,88	72,88
2.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD	Perda	7	11	16	7	7

*Keterangan: *)data belum rilis*
Sumber : Satu Data Blora,2024

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan kondisi kelima unsur tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.

2.1.3.5.1 Perencanaan

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah karena memberikan panduan tentang apa dan bagaimana intervensi harus dilakukan di masa

datang. Guna memastikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blora sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik ketika perencanaan pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Selain itu keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel II.87.

Tabel II.87
Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah	skor	21,22	21,22	20,64	20,81	21,37
2.	Persentase ketercapaian sasaran RPJMD	%	100	100	93,28	93,28	91,31*
3.	Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
4.	Ketersediaan hasil evaluasi RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1
5.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1
6.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1
7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (tahunan)	Dokumen	2	2	2	2	2

**data sampai dengan 19 Januari 2025. Sumber: Satu Data Blora, 2024*

Tabel II.87 di atas atas memberikan informasi Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang lumayan signifikan (dengan skor maksimal 30 poin). Penurunan yang terjadi di tahun 2022 dikarenakan perubahan cara penghitungan oleh Kemenpan-RB dimana komponen penilaian SAKIP menjadi 4 (empat) unsur pada tahun ini.

Peran perencanaan dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dimanifestasikan dalam evaluasi keselarasan antar dokumen perencanaan dan capaian hasil perencanaan pembangunan. Untuk presentase ketercapaian sasaran RPJMD, capaian per 19 Januari 2025 turun jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun masih dimungkinkan terjadi perubahan dikarenakan beberapa indikator yang belum *update*.

Tugas Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta pemanfaatannya dinyatakan dalam indikator Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah sudah diimplementasikan.

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah kabupaten Blora sudah mengimplementasikan *e-planning dan e-budgeting* terintegrasi. Prosedur pengajuan usulan program/kegiatan baik berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Aplikasi atau sistem integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang digunakan di Kabupaten Blora yaitu SIPD Kemendagri.

Bappeda menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pada urusan penyelenggaraan pemerintahan seluruh perangkat daerah dan menuangkannya dalam produk dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan. Dokumen perencanaan daerah berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah tersedia dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan hukum.

Dokumen perencanaan menurut area bidang urusan pembangunan, dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. Pemerintahan,
2. Pembangunan Manusia,
3. Sumber Daya Alam,
4. Perekonomian,

5. Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai amanat regulasi yang berlaku.

Peran perencanaan dalam pengendalian dan evaluasi dokumen pembangunan daerah dimanifestasikan dalam produk Dokumen evaluasi keselarasan antar dokumen perencanaan dan capaian hasil perencanaan pembangunan. Kinerja pengendalian dan evaluasi menemukan bahwa pada tahun 2022, persentase ketercapaian sasaran RPJMD sebesar 100% dan persentase realisasi ketercapaian sasaran RKPD pun sebesar 100%. Hal ini berarti secara kuantitatif, proses pengendalian perencanaan sudah maksimal. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu komponen penilaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan komponen yang berada pada ranah perangkat daerah.

Tugas Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta pemanfaatannya dinyatakan dalam indikator Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah sudah diimplementasikan. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah kabupaten Blora sudah mengimplementasikan *e-planning dan e-budgeting* terintegrasi. Prosedur pengajuan usulan program/kegiatan baik berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Aplikasi atau sistem integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang digunakan di Kabupaten Blora yaitu SIPD Kemendagri.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data agregat seringkali tidak dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan gender mempengaruhi variasi penyediaan layanan publik. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis. Tantangan lainnya adalah menjaga harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi hasil proses teknokratik, politik, *topdown, bottom-up*, dan partisipatif dalam keputusan perencanaan dan penganggaran.

2.1.3.5.2 Keuangan

Tanggung jawab keuangan termasuk di dalamnya kemampuan daerah mencari alternatif pendanaan termasuk dalam kewenangan yang berubah pasca pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD sepanjang masih berada dalam koridor hukum dan per Tanggung jawab keuangan termasuk di dalamnya kemampuan daerah mencari alternatif pendanaan termasuk dalam kewenangan yang berubah pasca pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD sepanjang masih berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. PAD Kabupaten Blora dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, walaupun ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil dari aktivitas masih tinggi proporsinya.

Tabel II.88 menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel II.88
Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indikator Lainnya							
2.	Jumlah PAD (Rupiah)	Rp.	231.045.355.000	242.789.402.162	325.966.473.177	325.966.473.177	444.809.501.390
3.	Persentase tanah milik Pemkab yang bersertifikat	%	40,73	62,04	388	283	100
4.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	70,42	69,83	75,1541	75,1541*	75,1541*
5.	Kesesuaian Nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS	%	100	100	42,2	42,2*	42,2*
6.	Kesesuaian nomenklatur KUA-PPAS dan APBD	%	0,93	0,97	94,3	94,3*	94,3*

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
7.	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS	%	100	100	20	20*	20*
8.	Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	%	0,01	0,17	22,6	22,6*	22,6*
9.	Rasio belanja operasional terhadap APBD	%	NA	85,45	77,92	63,79	63,79
10.	Rasio Belanja Modal terhadap APBD	%	NA	14,12	21,08	14,90	14,90
11.	Rasio anggaran belanja tidak terduga terhadap APBD	%	NA	0,13	0,69	0,02	0,02
12.	Rasio belanja transfer terhadap APBD	%	NA	0,3	0,31	18,10	18,10
13.	Persentase Alokasi anggaran belanja Fungsi pendidikan	% (standar 20%)	30,47	33,06	28,15	32,42	32,42
14.	Persentase Alokasi anggaran belanja urusan kesehatan (diuar gaji)	% (standar 10%	11,78	19,1	21,03	20,2	20,2
15.	Persentase Alokasi anggaran belanja Infrastruktur dari penerimaan dana transfer	% (standar 25%	8,21	44,66	39,96	25,19	25,19
16.	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
17.	Penetapan APBD perubahan tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
18.	Publikasi APBD yang dapat diakses dan diunduh secara umum dan terbuka untuk publik	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.	Rasio belanja operasional terhadap APBD	%	80,54	85,45	78,81	65,79	65,79
20.	Rasio Belanja Modal terhadap APBD;	%	16,55	14,12	21,19	14,90	14,90
21.	Rasio anggaran belanja tidak terduga terhadap APBD	%	2,56	0,13	0,32	0,02	0,02
22.	Rasio belanja transfer terhadap APBD	%	0,35	0,3	0,613	18,10	18,10

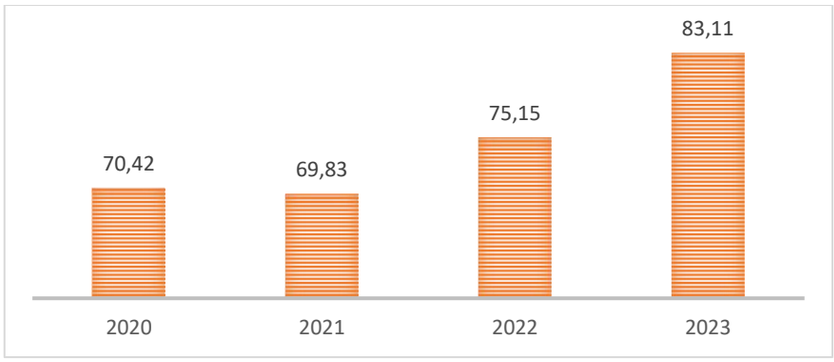
No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
23.	kemandirian keuangan,	%	0,0135	0,1739	0,5169	0,5169*	0,5169
24.	Fleksiblitas keuangan	%	0,2999	0,2969	0,5169	0,5169*	0,5169
25.	Solvabilitas operasional	%	0,5763	0,4942	0,2266	0,2266*	0,2266
26.	solvabilitas jangka pendek	%	0	0,042	0,0006	0,0006*	0,0006
27.	solvabilitas jangka panjang	%	0,0978	0,0736	0	0	0
28.	solvabilitas layanan	%	0,0112	0,064	0,0263	0,0263	0,0263
29.	Silpa	angka	112.205.265.151	225.496.337.229	145.955.777.733	114.427.043.588	114.427.043.588
30.	Implementasi Sistem Integrasi perencanaan penganggaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Keterangan:

**) Data belum rilis*

Sumber: Satu Data blora,2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pasal 2, huruf a dan huruf d. menyatakan bahwa IPKD dimaksudkan sebagai pengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu; dan pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki predikat IPKD terbaik secara nasional. IPKD (Indeks Pengelolaan keuangan daerah) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Indikator pengukurnya yaitu: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (e) Kondisi keuangan daerah; (f) Opini BPK atas LKPD. Kemampuan keuangan daerah dikategorikan: (1) Tinggi (Peringkat Baik/Nilai A); (2) sedang (peringkat perlu perbaikan/Nilai B); (3) Rendang (Peringkat sangat perlu perbaikan/Nilai C).



Gambar II.59
Grafik Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2020-2023

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu komponen penilaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah). Komponen yang berada di ranah PD unsur keuangan adalah (1) Kesesuaian Nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS; (2) Kesesuaian nomenklatur KUA-PPAS dan APBD; (3) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; (4) Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Kinerja Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Blora pada keempat komponen menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari: (1) ketepatan waktu dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah); (2) keteraksesan: dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diakses dan diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui SIPD. Kabupaten Blora sudah menerapkan Sistem Integrasi perencanaan penganggaran melalui pemanfaatan sistem/aplikasi SIPD Kemendagri.

Penyerapan anggaran disesuaikan struktur anggaran belanja dalam APBD: (1) Rasio belanja operasional terhadap APBD; (2) Rasio Belanja Modal terhadap APBD; (3) Rasio anggaran belanja tidak terduga terhadap APBD; (4) Rasio belanja transfer terhadap APBD. Silpa dari tahun 2020 sebesar lebih dari 112 miliar. Pada tahun 2021, SILPA tercatat naik dua kali lipat mencapai lebih dari 225 miliar rupiah. Pada tahun 2024, SILPA menunjukan tren penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar lebih dari 86 miliar.

Indikator keuangan mencakup (1) kemandirian keuangan, (2) Fleksibilitas keuangan, (3) Solvabilitas operasional, (4) solvabilitas jangka pendek, (5) solvabilitas jangka panjang, (6) solvabilitas layanan. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Derah yang diaudit selama tiga tahun terakhir berturut-turut. Kabupaten Blora sudah memenuhi WTP kurun 2020-2023.

2.1.3.5.3 Kepegawaian

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan "*merrit system*" semakin penting. Pembinaan teknis administratif dan mendorong kedisiplinan ASN dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menjadi landasan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN fokus pada beberapa aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengembangan Karier, Promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Tujuan dari penerapan sistem Merit adalah untuk ikut mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif. Data yang perlu diketahui untuk mendukung komitmen di atas, antara lain: data Indeks Sistem Merit, data ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, data penempatan ASN yang belum sesuai dengan kualifikasinya, data kompetensi pegawai, data analisa beban kerja, serta data e-kinerja dan data penilaian SKP.

Kabupaten menggunakan Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator kinerja utama penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks Profesionalitas ASN disebutkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019, yaitu: dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Tabel di bawah ini memuat komponen pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Tabel II.89
Profil ASN berdasar Komponen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Kriteria Pegawai	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A.	**Berdasarkan Golongan**						
	PNS						
1.	Golongan I	orang	179	161	101	63	40
2.	Golongan II	orang	1.179	1.129	1.096	816	749
3.	Golongan III	orang	4.053	3.869	3.787	3.856	3.669
4.	Golongan IV	orang	2.277	2.009	1.638	1.362	1.241
	Jumlah PNS	orang	7.688	7.168	6.622	6.097	5.699
	PPPK						
1.	Golongan V	orang	-	19	17	35	90
2.	Golongan VI	orang	-	-	-	22	50
3.	Golongan VII	orang	-	20	65	291	620
4.	Golongan IX	orang	-	319	1.070	2.563	3.822
5.	Golongan X	orang	-	-	4	19	6
	Jumlah PPPK	orang	-	358	1.156	2.930	4.651
	Jumlah ASN	orang	7.688	7.526	7.778	9.027	10.350
B.	**Pejabat Struktural**						
1.	Eselon I	orang	0	0	0	0	0
2.	Eselon II	orang	20	25	29	23	28
3.	Eselon III	orang	132	145	139	148	141
4.	Eselon IV	orang	564	549	335	344	331
	Pejabat Fungsional	orang	4.583	4.599	5.403	7.350	8.802
	Pensiunan	orang	568	543	506	525	400
C.	**Dimensi Kualifikasi : Tingkat Pendidikan**						
1	% ASN dengan kualifikasi Pendidikan Di bawah SLTA	%	3,60	3,34	3,33	2,10	1,74
2	% ASN dengan kualifikasi Pendidikan D-II /D-I / SLTA/sederajat	%	13,84	12,49	13,57	7,68	6,23
3	% ASN dengan kualifikasi DIII	%	10,63	11,02	10,48	11,21	12,97
4	% ASN dengan kualifikasi S1	%	64,13	65,27	63,97	70,00	70,44
5	% ASN dengan kualifikasi S2	%	7,80	7,88	8,63	8,98	8,61
6	% ASN dengan kualifikasi S3	%	0	0,01	0,02	0,02	0,01
D	**Dimensi Kompetensi: Riwayat pengembangan kompetensi**						
1	% ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	37,57	37,97	54,27	18,06	19,00
2	% ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	%	2,53	2,65	7,79	17,62	34,95
3	% ASN yang mengikuti Diklat Teknis	%	23,32	31,29	44,80	74,18	94,83
4	% ASN yang mengikuti Seminar/Workshop/Magang/ Kursus/sejenisnya	%	-	100	100	100	100

Sumber: Satu Data Blora,2024

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan pelayanan publik maka Pemrintah Kabupaten Blora pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan pengadaan Asn melalui P3k . Kebutuhan ini didasarkan pada analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) yang dilakukan oleh masing-masing instansi sehingga diharapkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN semakin meningkat pula. Jumlah pejabat struktural juga semakin berkurang karena *impassing* jabatan fungsional. Dalam jangka panjang diharapkan berdampak pada penghematan anggaran tunjangan struktural, akan tetapi jumlah tunjangan fungsional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi, di bawah Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 146 mengamanatkan bahwa belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari APBD.

Peserta diklat ASN tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini meliputi diklat kepimpinan, diklat teknis, dan diklat fungsional yang mengalami peningkatan dari tahun 2023, 17,62 persen menjadi 34,95 persen pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil. Selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) persentase ASN yang mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan kualitas ASN.

Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menjadi landasan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN fokus pada beberapa aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Tujuan dari penerapan sistem Merit adalah untuk ikut mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif.

Capaian kinerja urusan Kepegawaian dapat dilihat pada Tabel II.90 berikut ini.

Tabel II.90

Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yang Ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	70	52,22	73,11	80,42
Indikator Lainnya							
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	81,25	68,42	61,89	77,99	86,30

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Dari data Tabel II.90 di atas dapat diketahui bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Blora mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024, hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pada kualitas ASN di Kabupaten Blora. Indikator tingkat kesesuaian penempatan ASN sesuai kompetensi semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada kualitas dan profesionalitas pelayanan ASN di Kabupaten Blora. Ketersediaan dan validitas data pengukuran profesionalitas dan merit sistem menjadi tantangan dasar penyusunan peta jabatan dan analisis jabatan. Selain itu, kontestasi antara pendekatan teknokratik dan pendekatan praktis mengaburkan batas yang jelas apakah suatu jabatan ditempati personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai latar belakang pendidikan dan kriteria pendukung tertentu yang memang spesifik dibutuhkan untuk mendukung kinerja pada jabatan tersebut.

2.1.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kabupaten Blora juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat ASN. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan, prajabatan dan Orientasi PPPK. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat.

Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Upaya Peningkatan kinerja unsur Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut.

Tabel II.91
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Kriteria Diklat	Satuan	Jumlah				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Diklat Teknis	orang	143	146	148	180	224
2	Diklat Fungsional	orang	6	6	299	23	7
3	Diklat Prajabatan	orang	330	360	251	0	0
4	Diklat Pimpinan	orang	269	4	0	2	2
5	Orientasi PPPK	orang	0	0	0	850	1.774
	JUMLAH		**748**	**516**	**698**	**1055**	**2.007**

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Dari data Tabel II.91 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan diklat ASN yang cukup signifikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dari 1.055 orang yang mengikuti diklat menjadi 2.007 orang, jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahum sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena terjadi penambahan jumlah ASN dari unsur p3k pada tahun 2024 yang mengikuti diklat sebesar 1.774 pegawai.

Dengan bertambahnya kegiatan diklat ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas ASN di Kabupaten Blora. Berikut adalah tren grafik jumlah keikutsertaan ASN dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.92
Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Persentase ASN yang lulus Diklat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satu Data Blora, tahun 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun seluruh ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis,manajerial dan fungsional lulus ujian. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN di Kabupaten Blora merupakan ASN yang kompeten dan berkualitas, hal ini diharapkan bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

2.1.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Blora telah bertransformasi secara signifikan dari pendekatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ke arah penguatan tata kelola riset dan inovasi melalui Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Rinduk Kelitbangan). Perubahan ini diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2024. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) dan meningkatkan daya saing daerah.

1. **Dasar dan Tujuan Perubahan ke Rinduk Kelitbangan Transformasi ini dilatarbelakangi oleh:**
   - Kebutuhan Kebijakan Berbasis Bukti: Rinduk Kelitbangan menjadi dasar ilmiah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang akurat dan relevan.
   - Penguatan Daya Saing Daerah: Rinduk Kelitbangan mendukung pencapaian target pembangunan daerah melalui inovasi di berbagai sektor strategis.
   - Kesesuaian dengan Kebijakan Nasional: Implementasi Rinduk Kelitbangan mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya tata kelola riset dan inovasi di daerah.
2. **Ruang Lingkup Rinduk Kelitbangan**

   Rinduk Kelitbangan mencakup beberapa poin utama:

   a. Peta Jalan Riset dan Inovasi:
      - Menentukan tema prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD 2021–2026.

- Fokus pada isu strategis seperti pengembangan sektor unggulan (pertanian, peternakan, dan energi baru terbarukan).
- Penetapan target jangka pendek, menengah, dan panjang untuk penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan litbang dan sumber daya manusia di bidang penelitian.
- Membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset nasional, dunia usaha, dan masyarakat.
- Memperkuat jejaring riset dan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di Kabupaten Blora.

c. Rencana Aksi Tahunan:

- Penyusunan program dan kebijakan berbasis riset untuk mendukung percepatan pembangunan.
- Pengembangan produk unggulan berbasis inovasi seperti teknologi pengolahan hasil pertanian, energi baru terbarukan, dan produk kreatif lokal.

3. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blora

Penerapan Rinduk Kelitbangan telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan inovasi di Kabupaten Blora. Hal ini tercermin dari Indeks Inovasi Daerah yang dinilai dalam ajang Innovative Government Award (IGA). Pada tahun 2024, Kabupaten Blora berhasil meningkatkan indeks inovasinya menjadi 82,61, naik signifikan dari 74,90 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola riset dan inovasi, mendorong partisipasi pemangku kepentingan, serta menghadirkan solusi berbasis inovasi untuk pembangunan daerah. Capaian ini juga mengukuhkan posisi Kabupaten Blora sebagai daerah yang unggul dalam implementasi inovasi, baik di tingkat regional maupun nasional.

4. Strategi Implementasi Rinduk Kelitbangan.

Rinduk Kelitbangan diterapkan melalui beberapa strategi utama:

- Integrasi dengan Perencanaan Daerah: Setiap kegiatan riset dan inovasi diselaraskan dengan prioritas yang tercantum dalam RPJMD 2021–2026 dan RKPD.
- Penguatan Pendanaan: Alokasi anggaran ditujukan untuk inovasi strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti modernisasi pertanian dan energi ramah lingkungan.
- Monitoring dan Evaluasi: Program dalam Rinduk Kelitbangan dipantau secara berkala untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutannya.

5. Manfaat dan Dampak Rinduk Kelitbangan.

Implementasi Rinduk Kelitbangan memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain:

- Peningkatan kualitas kebijakan: Kebijakan berbasis riset menghasilkan solusi pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan.
- Optimalisasi potensi lokal: Sumber daya daerah, seperti komoditas unggulan pertanian dan energi, dapat dimanfaatkan lebih efektif melalui inovasi berbasis riset.
- Kolaborasi lintas sektor: Jejaring riset yang kuat meningkatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
- Keberlanjutan pembangunan: Inovasi berbasis riset memberikan solusi jangka panjang terhadap isu strategis daerah, termasuk ketahanan pangan, energi, dan lingkungan.

6. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan.

Pelaksanaan Rinduk Kelitbangan didukung penuh oleh perangkat daerah melalui Perbup 15 Tahun 2024. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana aksi berbasis kelitbangan untuk memastikan pencapaian target pembangunan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Tabel II.93

Kondisi Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1.704 (Sangat Inovatif)	51,36 (Inovatif)	64,13 (Sangat inovatif)	74,90 (sangat inovatif)	82,61 ((sangat inovatif)
Indikator Lainnya							
2.	Jumlah penelitian daerah yang difasilitasi (RUD)	Penelitian	0	1	1	2	1
3.	Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik	Inovasi	6	10	20	14	16
4.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dikembangkan	Inovasi	7	24	24	25	33
5.	Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi (Paket sederhana)		1	1	1	3	5
6.	Jumlah penelitian di Bappeda lintas bidang	Penelitian	9	2	15	17	16
7.	Teknologi tepat guna dari masyarakat yang difasilitasi	Unit TTG	3	5	5	5	2
8.	Peringkat Indeks Inovasi Daerah		100	80	16	12	13
9.	Jumlah Inovasi Daerah	Buah	69	207	253	274	439

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Blora menunjukkan kemajuan signifikan dalam periode 2020-2024. Indeks Inovasi Daerah terus menerus mengalami peningkatan dari 1,704 (2020, menggunakan metode lama) menjadi 82,61 (2024), hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan inovasi dalam pembangunan daerah. Jumlah penelitian daerah yang difasilitasi meningkat hingga puncaknya pada 2023 sebelum turun pada 2024, sedangkan inovasi untuk publik dan fasilitasi teknologi tepat guna (TTG) menunjukkan tren fluktuatif, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Inovasi perangkat daerah tumbuh signifikan, dari 7 inovasi (2020) menjadi 33 (2024), mengindikasikan penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah. Selain itu, kekayaan intelektual yang difasilitasi meningkat dari 1 (2020) menjadi 5 (2024), mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap perlindungan intelektual. Penelitian lintas bidang di Bappeda juga menunjukkan pertumbuhan stabil.

Jumlah total inovasi daerah melonjak dari 69 (2020) menjadi 439 (2024), didukung oleh perbaikan peringkat Indeks Inovasi Daerah, dari posisi 100 (2020) ke 13 (2024). Pencapaian ini menunjukkan produktivitas yang tinggi dan keberhasilan implementasi RPJMD, meskipun beberapa aspek memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan program inovasi.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Umum

Unsur pengawasan urusan pemerintahan umum meliputi inspektorat daerah. Penjelasan kondisi umum pembangunan untuk unsur ini dapat dilihat pada bagian berikut ini.

2.1.3.6.1 Inspektorat Daerah

Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan agar proses pemerintahan lebih terkontrol dan terukur, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyelewengan anggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah.

Rekomendasi atas hasil pengawasan memberikan arah perbaikan konkret untuk memperbaiki segala kelemahan yang ditemukan selama pengawasan. Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Fungsi pengawasan berperan untuk mengembangkan mitigasi risiko atas kebijakan pembangunan yang diputuskan oleh pengambil keputusan daerah. Kondisi sub bidang pengawasan dapat dikemukakan pada Tabel II.94 berikut:

Tabel II.94

Kondisi Pembangunan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Angka	NA	2,872	2,319	2,860	2,975
Indikator lainnya							
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	96	96	96	96	96
3.	Persentase laporan hasil pemeriksaan dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	2,93	2,7	3,033	3,145
5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	2,24	3,00	3,00
6.	Nilai MCP Korsupgah KPK	Angka	65,4	83,11	89,90	86,15	93,81
7.	Skor SPI	Angka	NA	79,48	72,46	77,61	75,43

Sumber: Satu Data Blora, 2024

**) data belum rilis*

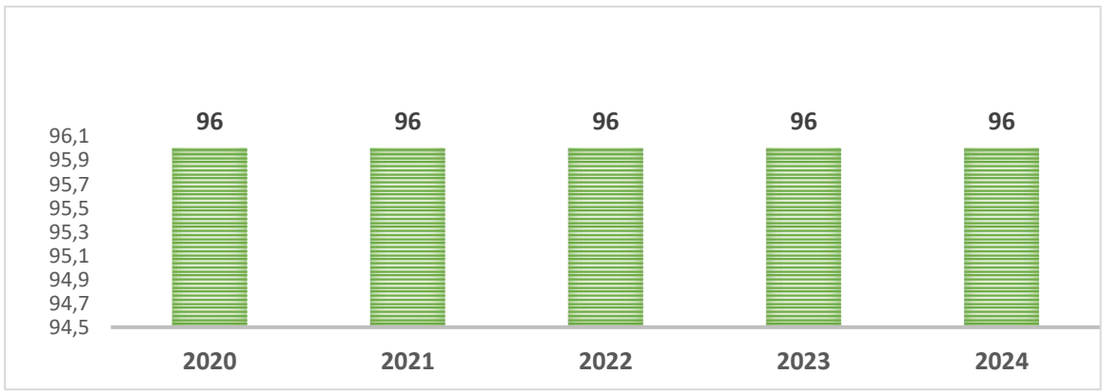
Kabupaten Blora menjadikan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebagai indikator utama penyelenggaraan urusan pengawasan. Indeks MRI menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan parameter penilaian pengelolaan risiko. Penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam kriteria berhasil ditunjukkan dengan identifikasi dan analisis risiko dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, yakni dampak dan kemungkinan terjadinya risiko untuk menyusun prioritas yang tepat dalam pengelolaan risiko. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan.

Komponen Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terdiri atas Kepemimpinan, Proses Manajemen Risiko, Aktifitas Penanganan Risiko dan Hasil Penerapan Manajemen Risiko. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko terbagi dalam 5 level:

1. Level 1: 0–29,99 (*Risk Naïve);*
2. Level 2: 30–54,99 (*Risk Aware*);

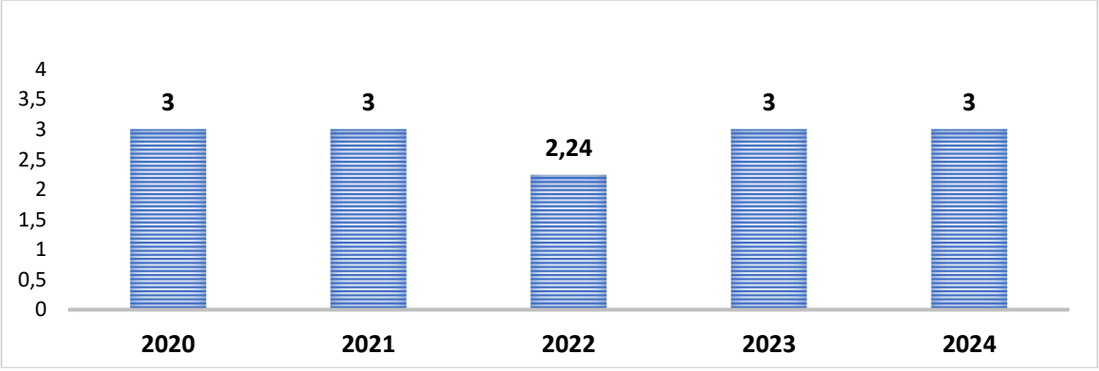
3. Level 3: 55–74,99 (*Risk Defined);*
4. Level 4: 75–89,99 (*Risk Managed);* dan
5. Level 5: 90–100 (*Risk Enabled).*

Dalam Bab 6 RKPD Blora Tahun 2024 tertulis target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah 2,47, artinya berada pada level 2 yaitu *Risk Aware*. *Risk Aware* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi sehingga kecil kemungkinan dilakukan pemantauan yang tepat atas keterkaitan risiko dengan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi. Indeks MRI Kabupaten Blora tahun 2024 sebesar 2,975 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,860. Data ini menunjukan bahwa tingkat kematangan dalam penerapan manajemen risiko di Kabupaten Blora semakin baik dan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan potensi risiko yang ada.



Gambar II.60
Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti tahun 2020–2024 dinilai 96 persen, artinya masih ada 4 persen hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. Kondisi ini berpengaruh pada tingkat kematangan SPIP terintegrasi (SPIP dan Manajemen Risiko).



Gambar II.61

Grafik Kapabilitas APIP Tahun 2020–2024

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan skala 1-5 yaitu Level 1 (Rintisan) : 1,00 ≤ Skor < 2,00, Level 2 (Berkembang) : 2,00 ≤ Skor < 3,00, Level 3 (Terdefinisi) : 3,00 ≤ Skor < 4,00, Level 4 (Terkelola dan Terukur) : 4,00 ≤ Skor < 4,50, dan Level 5 (Optimum) : ≥ 4,50. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Blora tahun 2024 di nilai 3,145 (Level Terdefinisi) mengalami kenaikan 0,112 poin dibandingkan tahun 2023 di nilai 3,033 (Level Terdefinisi). Berarti tahun 2023 status maturitas SPIP kabupaten Blora dalam kondisi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi tanpa dokumentasi yang memadai.

Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Blora sejak tahun 2020-2024 bertahan di level 3 (Level Integrated), yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang optimal. Walaupun sempat menurun pada tahun 2022 dengan nilai 2,24 (Level Infrastructure). Kematangan SPIP dan kapabilitas SPIP memerlukan kapabilitas APIP yang handal. Kapabilitas APIP level 3 menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Blora telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi

pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kondisi ini berarti inspektorat sebagai *consulting partner* dan *quality assurance*.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan meliputi kecamatan. Kabupaten Blora memiliki SKPD Kecamatan sebanyak 16. Penjelasan mengenai kondisi pembangunan SKPD kecamatan dapat dilihat pada bagian berikut ini.

2.1.3.7.1 Kecamatan

Kecamatan merupakan satuan administrasi pemerintahan yang setara dengan OPD/SKPD/Dinas dalam rantai wewenang dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan seperti yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kinerja Kecamatan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan. Tabel II.95 menunjukkan kinerja kecamatan di Kabupaten Blora.

Tabel II.95
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Capaian Tahun				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026						
1.	Kecamatan Tunjungan	77,4	80,00	81,00	85,20	87,06
2.	Kecamatan Cepu	82,07	84,08	81,15	87,08	88,86
3.	Kecamatan Jati	80,20	83,02	86,14	87,60	87,61
4.	Kecamatan Kunduran	77,30	82,50	85,50	85,56	88,98
5.	Kecamatan Sambong	78,6	90,70	88,13	86,45	83,61
6.	Kecamatan Jepon	81,54	82,00	80,89	88,00	-
7.	Kecamatan Banjarejo	81,75	81,23	84,35	86,99	83,07
8.	Kecamatan Kradenan	80,00	88,26	84,73	88,12	84,65
9.	Kecamatan Japah	80,8	81,10	90,49	90,32	88,12
10.	Kecamatan Ngawen	80,97	82,10	86,24	85,86	88,014
11.	Kecamatan Blora	98,10	99,00	84,60	86,34	-
12.	Kecamatan Randublatung	83,242	84,00	86,53	88,05	88,24
13.	Kecamatan Jiken	82,36	83,,00	87,60	86,35	87,92
14.	Kecamatan Bogorejo	80,45	87,25	85,17	90,59	86,79
15.	Kecamatan Todanan	82,00	84,00	85,24	86,90	-

No.	Uraian	Capaian Tahun				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
16.	Kecamatan Kedungtuban	89,5	86,84	90,47	85,90	89,06
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	**82.27**	**84.94**	**85.51**	**87,21**	**87,07**

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori penilaian adalah:

1. Nilai 25,00–64,99 mutu pelayanan D (Tidak baik);
2. Nilai 65,00–76,60 mutu pelayanan C (Kurang baik);
3. Nilai 76,61–88,30 mutu pelayanan B (Baik); dan
4. Nilai 88,31–100,00 mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Secara umum nilai Kepuasan masyarakat tingkat kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2024 sebesar 87,07. Ini berarti bahwa berada pada kategori mutu pelayanan B (Baik/76,61–88,30).

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum meliputi kesatuan bangsa dan politik. Penjelasan mengenai kondisi pembangunan unsur ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

2.1.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya mewujudkan Misi keempat Kabupaten Blora yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029, yaitu " Menciptakan Kondisi Wilayah yang Kondusif " Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik. Peran ini diwujudkan melalui pembinaan ideologi, penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan kewaspadaan nasional, serta upaya penanganan potensi konflik secara optimal dengan sasaran strategis peningkatan potensi konflik yang tertangani.

Tabel II.96 menunjukkan perkembangan kondisi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Tabel II.96

Kondisi Pembangunan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indikator Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada dalam RPJMD Kab. Blora 2021–2026							
1.	Persentase konflik sosial tertangani	%	na	100%	100%	100%	100%
Indikator Lainnya							
2.	**Jumlah Anggota DPRD**	Orang	45	45	45	45	45
	a. Pria	Orang	40	40	41	41	36
	b. Perempuan	Orang	5	5	4	4	9
	Jumlah Fraksi DPRD	Fraksi	7	7	7	7	7
3.	Partai Politik						
	Jumlah Parpol Daerah	Partai	13	13	16	16	16
	Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Partai	13	13	18	18	18
4.	Organisasi Kemasyarakatan						
	Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	Buah	10	3	2	3	20
	Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	Buah	11	4	11	11	5
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)						
	Jumlah LSM Lokal	Buah	52	37	6	10	12
	Jumlah LSM Nasional	Buah	1	2	2	2	13
	Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah	Buah	0	0	0	0	0*
6.	Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Orang	160	100	136	100	100*
7.	Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	650	150	180	240	60
8.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM	Kali	6	4	5	4	1
9.	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara.	Orang	75	50	60	120	120
10.	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan Program Penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba	Orang	400	725	240	240	100
11.	Kegiatan pembinaan politik daerah pada ormas dan LSM	Kali	15	5	6	6	20
12.	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	77,47	77,47	77,47	77,47	77,52
13.	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan	Orang	300	200	560	600	450

No.	Uraian	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	wawasan kebangsaan dan bela negara						
14.	Terpeliharanya konduktivitas wilayah melalui kerja sama Kominda	Kali	12	12	12	12	12

Sumber: Satu Data Blora,2024

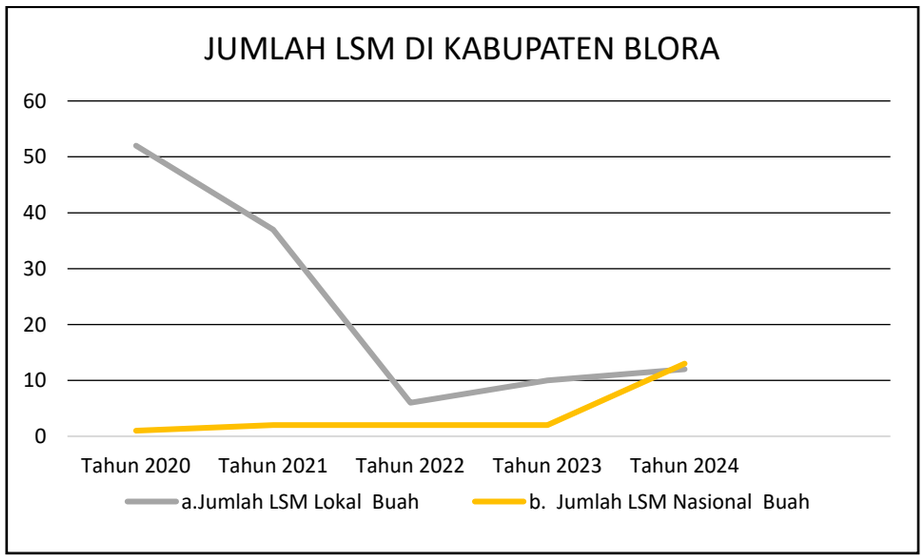
**)data belum rilis*

Tabel II.96 di atas menunjukkan stabilitas politik Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam keadaan stabil dan kondusif sebagaimana terlihat dalam indikator persentase konflik sosial tertangani sebagai indikator utama penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian 100 persen. Seluruh konflik sosial yang terjadi dalam lima tahun terakhir telah berhasil tertangani.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik di mana terdapat dua kali pelaksanaan Pemilu yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk memilih presiden dan wakil presiden serta Wakil Rakyat yang duduk di DPR, DPRD Propinsi, DPRD Daerah dan DPD. Pemiilihan kedua adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan tujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2025-2030. Dalam rangka meningkatkan minat jumlah pemilih untuk menggunakan hak suaranya serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif pada masa pemilu ini Kesbangpol telah melakukan beberapa kegiatan diseminasi seperti penyebaran informasi mengenai Pemilu yang diharapkan dapat mendorong pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya seperti menyelenggarakan Podcast Webinar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, dan meyakinkan kembali pemilih senior untuk tetap berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada, melakukan pembinaan kepada partai politik peserta Pemilu agar berkomitmen dalam menciptakan pemilu damai, serta berkoordinasi dengan Forkompinda agar Pemilu dapat berjalan lancar, damai dan tidak ada konflik yang terjadi. Dari hasil Pileg dan Pilkada yang diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 terdapat kenaikan peserta pemilu sebanyak 77,52 persen meningat daripada tahun sebelumnya sebanyak 77,47. Hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 jumlah DPT yang tidak dapat datang ke TPS disebabkan karena waktu Pemilu hanya libur satu hari sedangkan banyak jumlah DPT yang berada di luar kota tidak bisa pulang karena waktu yang terbatas. Meskipun KPU sudah memfasilitasi dengan adanya

surat pindah memilih (Formulir A5) masih belum dapat meningkatkan keikutsertaan peserta Pemilu menjadi 100 persen.

Dari hasil Pileg Tahun 2024 terdapat 45 anggota DPRD Kabupaten Blora terpilih dengan proporsi perempuan dalam lembaga legislatif meningkat menjadi 25 persen atau 9 anggota DPRD perempuan dari 45 anggota DPRD terpilih dari proporsi Tahun 2023 masih di bawah 20 persen atau 4 anggota DPRD perempuan dari total 45 anggota DPRD. Peningkatan partisipasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wujud kerja sama antar Pemerintah, stakeholder dan lembaga swasta yang perlu terus ditingkatkan perannya sehingga pada Pileg mendatang peran perwakilan perempuan dalam DPRD dapat terus mengalami peningkatan.



Gambar II.62
Jumlah Ormas dan LSM di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.62 di atas ini menunjukkan perkembangan jumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Blora tahun 2020 – 2024 yang menunjukkan peningkatan pada jumlah LSM yang beroperasi di Kabupaten Blora terutama LSM Nasional. Peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan berdasarkan profesi juga meningkat drastis hingga hampir dua kali lipat pada tahun 2024 sebesar 20 Ormas dari tahun 2023 sebanyak 3 ormas. Kenaikan jumlah Ormas ini perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan Ormas agar tidak terjadi konflik antar ormas.

Dalam rangka mendukung pemberantasan narkoba di Kabupaten Blora Badan Kesbangpol melakukan upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika (P4GN-PN) yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat umum untuk berbagi informasi, pengalaman, dan ide dalam menghadapi bahaya narkoba. Tahun 2024 Kesbangpol melakukan penyuluhan dengan sasaran pelajar sebanyak 100 peserta. Di samping itu dalam rangka upaya pencegahan bahaya Narkoba Pemerintah Kabupaten Blora telah melaksanakan kerja sama dengan BNN pada Kamis, 2 Mei 2024 melalui Penandatangan naskah perjanjian Hibah daerah antara BNN Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Hibah yang diebrikan oleh BNN untuk pendirian Kantor yaitu Tanah seluas 3000 m2 yang berlokasi di kelurahan kunden kecamatan Blora. Dengan adanya Kantor BNNK di Kabupaten Blora harapannya dapat meningkatkan upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika serta untuk rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Blora dan sekitarnya,terutama karena Kabupaten Blora berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Indikator utama yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026 sebagai pengukur keberhasilan aspek daya saing daerah adalah: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, (2) Nilai Tukar Petani, (3) Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, (4) Rasio Ekspor + impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), (5) Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, (6) Angka Kriminalitas, (7)Angka Ketergantungan. Aspek daya saing menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setidaknya merepresentasikan informasi terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

IDSD dapat menjadi acuan untuk memperkuat daya saing daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan, yang dapat mempresensetasikan daya saing daerah. Nilai Indeks Daya Saing Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2023 adalah 3,32 dan Tahun 2024 adalah 3,58 poin, termasuk kategori tinggi lebih tinggi dari Skor Nasional, namun masih lebih Rendah dari Provinsi Jawa Tenga dan rata-rata Skor Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, rincian Skor IDSD dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel II.97

Perbandingan Nilai Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora Tahun 2022, 2023, dan 2024

No.	Level	2022	2023	2024
1.	IDSD Nasional	3,26	3,44	3,43
2.	IDSD Provinsi Jawa Tengah	3,63	3,80	3,84
3.	IDSD Kabupaten Blora	3,16	3,32	3,58

Sumber : Satu data Blora,2024

Tabel II.98

Nilai Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 dan 2024

Pilar	Komponen	Kode	Sub Komponen	Indeks 2023	Indeks 2024
Pilar 1 : Institusi	Keamanan	1.01	Kejadian Pungutan Liar	5,00	4,95
		1.02	Jumlah Kejadian Tingkat Pembunuhan	3,89	4,80
	Checks and balances	1.06	Transparansi Anggaran	5,00	5,00
		1.08	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	5,00
		1.09	Kinerja Instansi Pemerintah	3,50	5,00
		1.10	Pelaksanaan reformasi birokrasi	3,33	5,00
	Transparansi	1.11	Upaya Pencegahan Korupsi	4,57	5,00
	Hak Atas Kepemilikan	1.12	Kejahatan Terhadap Hak Atas Kepemilikan	4,96	4,79
		1.13	Kualitas Administrasi Pertanahan (IKM Kantor Pertanahan)	4,70	4,10
	Orientasi Masa Depan Pemerintah	1.14	Tingkat pengelolaan lingkungan	3,08	5,00
	Indeks Pilar Institusi			**4,19**	**4,86**
Pilar 2: Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)	2.01	Aksesibilitas Jalan	1,13	5,00
		2.02	Kualitas Infrastruktur Jalan	3,44	5,00
	Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	2.03	Layanan Infrastruktur Stasiun Kereta Api	3,86	3,86
	Infrastruktur Transportasi (Udara)	2.04	Layanan Infrastruktur Bandara	0,00	0,00
	Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	2.05	Layanan Infrastruktur Pelabuhan	4,04	4,04

Pilar	Komponen	Kode	Sub Komponen	Indeks 2023	Indeks 2024
	Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	2.06	Rasio Elektrifikasi	5,00	5,00
	Infrastruktur Utilitas (Air)	2.08	Akses Air Minum Layak	2,76	4,68
		2.09	Tingkat Kehilangan Air	1,21	1,94
	Indeks Pilar Infrastruktur			**2,68**	**3,74**
Pilar 3: Adopsi TIK	Adopsi TIK	3.01	Pengguna Telepon Seluler	4,47	4,73
		3.02	Jangkauan jaringan 4G	5,00	5,00
		3.04	Pengguna Internet	3,74	3,68
	Indeks Pilar Adopsi TIK			**4,41**	**4,47**
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	4.01	Inflasi		3,80
		4.02	Kapasitas Fiskal Daerah	3,56	2,41
		4.03	Pertumbuhan Ekonomi	1,90	4,90
		4.04	Indeks Ketahanan Pangan	4,29	4,89
		4.05	Nilai ICOR (Investasi)	1,40	1,14
	Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro			**2,92**	**3,43**
Pilar 5: Kesehatan					
Pilar 5: Kesehatan	**Indeks Pilar Kesehatan**	**5.01**	**Angka Harapan Hidup**	**4,20**	**4,15**
Pilar 6: Keterampilan	Tenaga Kerja Saat Ini	6.01	Rata-rata tahun sekolah	2,34	3,86
		6.02	Keterampilan lulusan	2,14	2,53
		6.04	Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil	2,14	3,98
	Tenaga Kerja Masa Depan	6.05	Angka Harapan Sekolah	3,53	4,50
		6.06	Berpikir Kritis dalam Mengajar	4,62	3,30
		6.07	Rasio murid-guru pendidikan dasar	4,30	4,51
	Indeks Pilar Keterampilan			**3,18**	**3,78**
Pilar 7: Pasar Produk		7.02	Persaingan Sektor Jasa	2,55	3,64
	Indeks Pilar Pasar Produk			**2,55**	**3,64**
Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Fleksibilitas	8.01	Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	1,04	0,86
		8.02	Upah Pekerja	3,69	3,54
	Meritokrasi dan Insentif	8.03	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki	4,22	3,28
	Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja			**2,98**	**2,56**
Pilar 9: Sistem Keuangan	Kedalaman	9.01	Persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku (Persen)	1,30	5,00

Pilar	Komponen	Kode	Sub Komponen	Indeks 2023	Indeks 2024
		9.02	Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	5,00	0,87
		9.03	Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB		0,28
	Indeks Pilar Sistem Keuangan			**3,15**	**2,05**
Pilar 10: Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	10.01	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	4,38	4,39
	Indeks Pilar Ukuran Pasar			**4,38**	**4,39**
Pilar 11: Dinamisme Bisnis	Persyaratan Administrasi	11.01	Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1,70	2,18
		11.03	Kinerja Pelayanan Publik	4,91	4,97
	Indeks Pilar Dinamisme Bisnis			**3,30**	**3,57**
Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	Keanekaragaman dan Kolaborasi	12.01	Keanekaragaman tenaga kerja	4,16	4,45
		12.02	Pengembangan Klaster		2,65
	Riset	12.03	Publikasi ilmiah	3,10	2,60
		12.04	Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	1,70	2,27
		12.05	Belanja riset	0,22	0,43
		12.06	Indeks keunggulan lembaga riset	0,07	0,27
	Komersialisasi	12.07	Aplikasi merek dagang	1,84	3,20
	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi			**1,85**	**2,27**
Total					**3,58**

Dari sisi aspek, nilai terendah di Indeks Pilar Kapabilitas dengan nilai 1,85 berarti termasuk kategori kurang inovatif (interval 1–2,5). Dari sisi pilar daya saing, nilai terendah pada pilar Akses Keuangan (nilai 2,167), disusul oleh Kapabilitas Inovasi (nilai 2,27), dan indesk pilar tenaga kerja (2,56). Data di atas berarti Kabupaten Blora harus meningkatkan akses keuangan, kapasitas inovasi, dan tenaga kerja. Nilai dinamika bisnis mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya, pada Tahun 2024 pilar dinamika bisnis mendapatkan skor 3,57 Pilar Akses Keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Pengaruh faktor Keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Sistem keuangan yang

baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah; (2) Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

Pilar Dinamika Bisnis dilihat dari 2 Dimensi yaitu Regulasi dan Kewirausahaan. Kemajuan sektor bisnis membuahkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran. Perluasan produksi dan diversifikasi akan menumbuhkan integrasi sektor dan industri sehingga menciptakan rantai nilai tambah yang akan menguatkan struktur ekonomi dan *income generation* bagi pemerintah dan masyarakat. Regulasi kemudahan perijinan Iklim bisnis, investasi dan persaingan dibutuhkan untuk mengefektifkan pengembangan daya saing. Pilar Kapasitas Inovasi dilihat dari 2 Dimensi yaitu interaksi dan Keberagaman dan Penelitian dan Pengembangan (R dan D). Kegiatan R dan D yang dimaksud adalah kegiatan berbasis ilmu pengetahuan untuk menghasilkan alternatif solusi prioritas bukan hanya untuk solusi masalah efisiensi atau produktivitas yang dihadapi, melainkan juga untuk membangun daya saing.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Blora, dengan kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, ketergantungan pada sektor migas membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan lainnya.

Potensi Ekonomi di Kabupaten Blora di antaranya: (1) Sektor Migas: Meskipun menghadapi tantangan fluktuasi harga, sektor migas tetap menjadi tulang punggung perekonomian Blora. Potensi pengembangan hilirisasi produk migas perlu terus digali untuk meningkatkan nilai tambah; (2) Sektor Pertanian: Lahan yang luas dan sumber daya air yang memadai mendukung pengembangan pertanian, terutama tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan; (3) Sektor Pariwisata: Potensi wisata alam dan budaya yang cukup besar, seperti Gua Jepang, Waduk Kedung Ombo, dan berbagai situs sejarah, dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. (4) Sektor UMKM: Sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Blora. Pengembangan UMKM perlu didukung untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Adapun Tantangan yang dihadapi yaitu: (1) Ketergantungan pada Sektor Migas: Fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi kondisi ekonomi daerah; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan; (3) Infrastruktur: Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi. (4) Pemasaran Produk: Produk UMKM masih menghadapi kendala dalam pemasaran, baik dalam skala lokal maupun nasional.

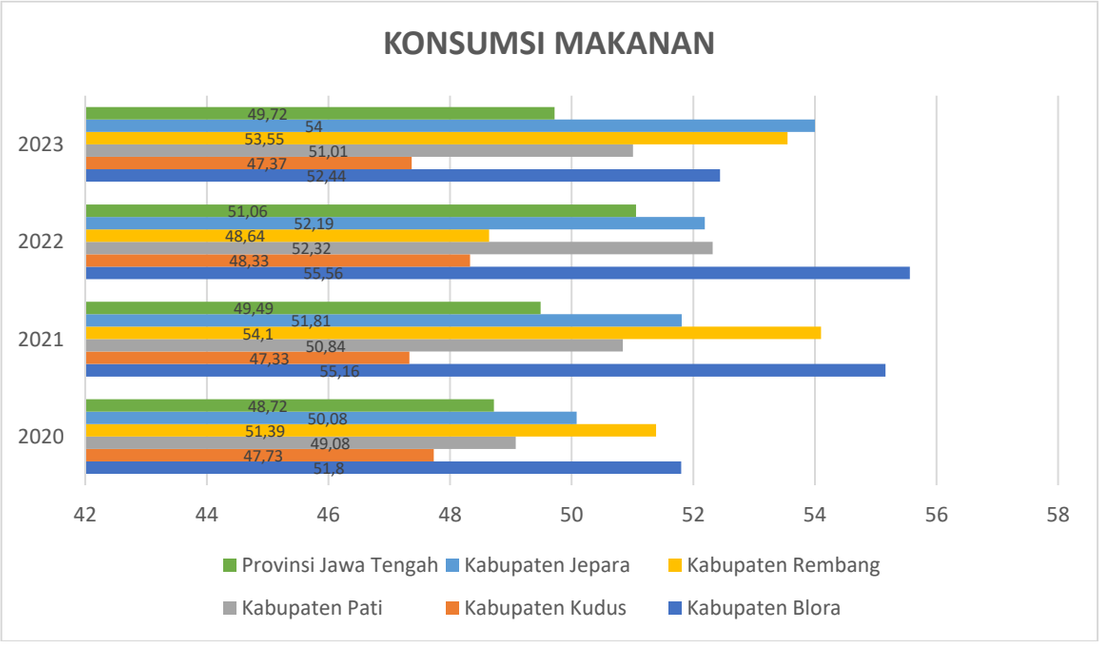
Arah Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Blora yaitu mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: (1) diversifikasi Ekonomi: Memperkuat sektor-sektor unggulan selain migas, seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM; (2) pengembangan Sumber Daya Manusia: meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi; (3) peningkatan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan energi; (4) pengembangan UMKM: Memberikan dukungan kepada UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran; (5) pemanfaatan Teknologi: Menerapkan teknologi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi; (6) Kerja sama Antar Daerah: Membangun kerja sama dengan daerah lain untuk memperluas pasar produk lokal.

Strategi Pengembangan yang dapat dilakukan di antaranya: (1) Membangun Kawasan Industri: Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur yang memadai untuk menarik investasi. (2) Mengembangkan Wisata Berbasis Alam dan Budaya: Mengembangkan potensi wisata alam dan budaya dengan melibatkan masyarakat setempat. (3) Meningkatkan Kualitas Produk UMKM: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya; (4) Memperkuat Jejaring Bisnis: Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan potensi investor dan mitra bisnis; (5) Meningkatkan Promosi Produk Lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media dan *event*.

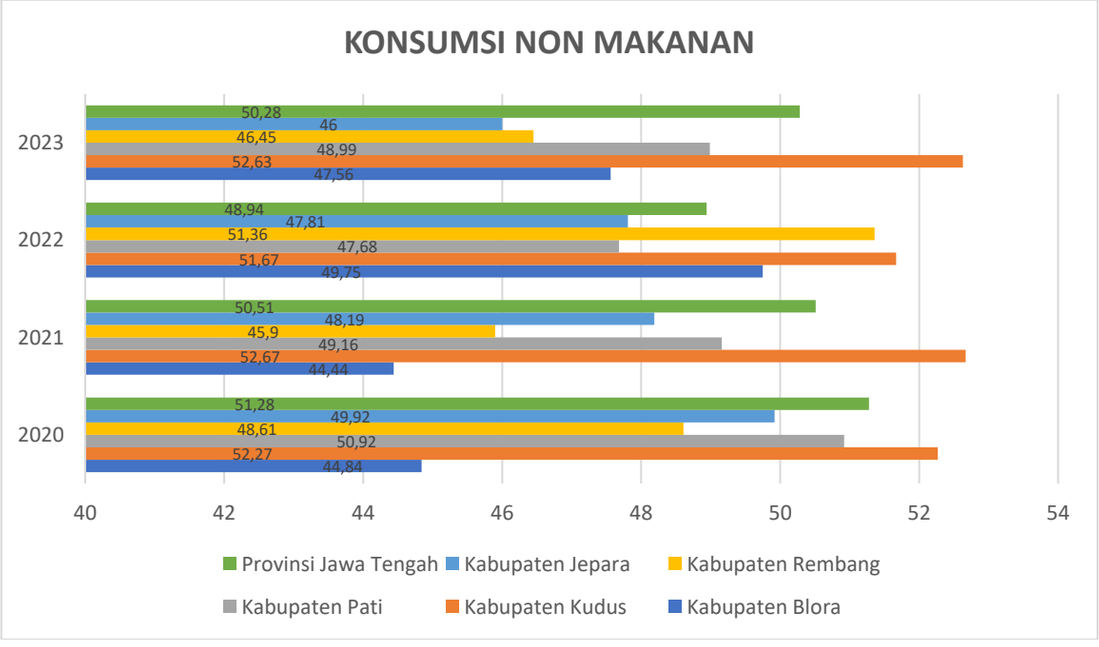
Kabupaten Blora memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang memadai, Blora dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dan Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita

Kemampuan ekonomi daerah secara kontekstual merupakan kemampuan setiap daerah yang mempunyai daya tarik bagi pelaku ekonomi yang ada dan yang akan masuk ke daerah tersebut untuk menciptakan peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.



Gambar II.63
Grafik Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi Makanan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023



Gambar II.64
Grafik Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi Non Makanan di Kabupaten Blora Tahun 2019-2023

Analisis Kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan dan pengeluaran konsumsi pangan.

Tabel II.99
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Blora dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020–2024

Kabupaten / Kota	Makanan					Bukan Makanan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Grobogan	5,45	53,79	55,95	56,15	53,79	94,55	46,21	44,05	43,85	46,20
Kabupaten Blora	**51,80**	**55,16**	**55,56**	**52,44**	**55,15**	**44,84**	**44,44**	**49,75**	**47,56**	**44,84**
Kabupaten Rembang	5,14	54,10	48,64	53,55	54,10	94,86	45,90	51,36	46,45	45,89
Kabupaten Pati	0,49	50,84	52,32	51,01	50,84	99,51	49,16	47,68	48,99	49,15
Kabupaten Kudus	47,73	47,33	48,33	47,37	47,33	52,27	52,67	51,67	52,63	52,66
Kabupaten Jepara	50,08	51,81	52,19	54,00	51,81	49,92	48,19	47,81	46,00	48,18
Prov. Jawa Tengah	**48,72**	**49,49**	**51,06**	**49,72**	**49,49**	**51,28**	**50,51**	**48,94**	**50,28**	**50,50**

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangan, Pengeluaran per kapita merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak konsumsi yang dilakukan. Artinya, besarnya nilai pengeluaran menggambarkan daya beli penduduk kabupaten Blora terhadap harga-harga sejumlah komoditas pangan maupun bukan pangan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur yaitu: (1) kondisi rumah tangga baik, apabila pengeluaran non pangan 50%≤; (2) kondisi sedang, jika pengeluaran non pangan di kisaran 20-49%; (3) kondisi buruk, jika pengeluaran non pangan kurang dari 20%.

Tingkat konsumsi non pangan masyarakat kabupaten Blora menunjukkan tren menurun di bawah 50%. Tingkat pengeluaran di atas 40% sehingga digolongkan dalam kondisi rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan menengah/sedang. Dilihat dari persentase pengeluaran non makanan semakin menurun, hal ini dapat mengindikasikan adanya stagnasi kesejahteraan masyarakat. Terlihat kecenderungan proporsi

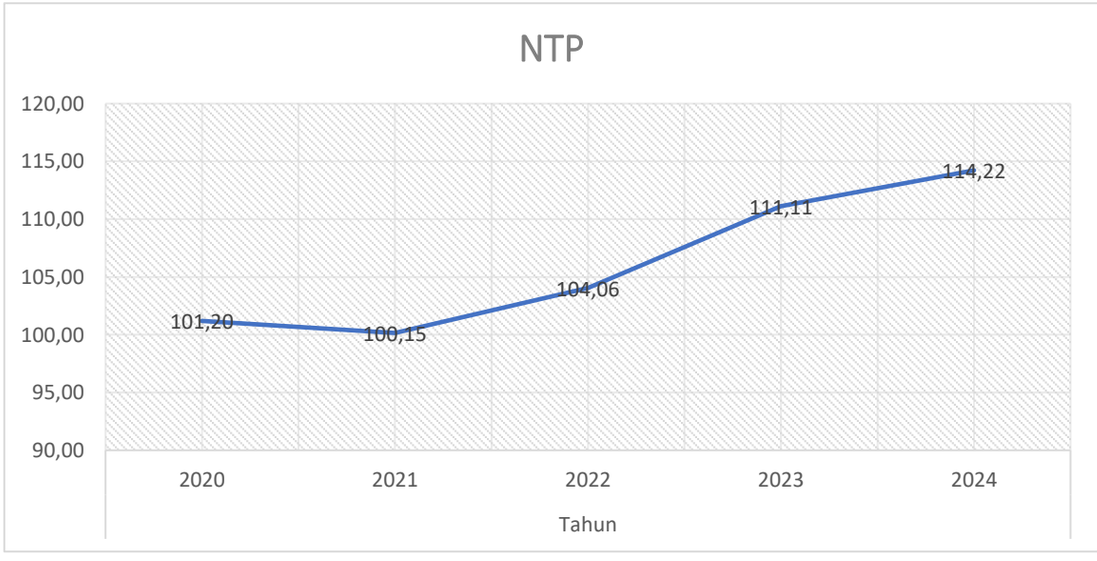
pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan, melampaui 50%.

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang harus dibayar petani untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib), sebagaimana rumus sebagai berikut.

$$NTP = \frac{Indeks\ Harga\ yang\ Dibayar\ Petani\ (Ib)}{Indeks\ Harga\ yang\ Diterima\ Petani\ (It)} \times 100$$

NTP Kabupaten Blora tersedia data sampai dengan tahun 2021 karena BPS Kabupaten Blora tidak lagi melakukan penghitungan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk data tahun 2022 sampai tahun 2024 menggunakan data NTP Provinsi Jawa Tengah, fluktuasi nilainya disajikan pada Gambar II.65 berikut ini



Gambar II.65
Grafik Nilai Tukar Petani Kabupaten Blora Tahun 2017-2023

Berdasarkan NTP tahun 2024 sebesar 114,22 (NTP>100) menggambarkan kondisi petani yang lebih **sejahtera** karena pendapatan dari hasil pertanian lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi dan kebutuhan hidup. Kondisi petani saaat

NTP tinggi antara lain: pendapatan petani meningkat, daya beli petani naik, keberlanjutan usaha pertanian lebih baik tingkat kesejahteraan membaik dan minat bertani meningkat. Namun, jika NTP tinggi disebabkan oleh kenaikan harga hasil panen yang terlalu tinggi akibat kelangkaan pangan, hal ini bisa berdampak negatif bagi konsumen karena harga bahan makanan menjadi mahal. Oleh karena itu, keseimbangan antara harga jual petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap perlu dijaga

Perkembangan NTP Kabupaten Blora Tahun 2021-2022 beserta indeks yang diterima serta harga yang dibayar petan dapat dilihat pada Tabel II.100 di bawah ini:

Tabel II.100
Perbandingan Nilai Tukar Petani, indeks LT dan Indeks LB Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	NTP (Nilai Tukar Petani)	angka	101,20	101.07	104,56	101,20	100.15
2	indeks yang diterima petani (lt)	angka	126,50	143.64	149,36	101,40	100.77
3.	harga yang dibayar petani (lb)	angka	128,00	145.17	142,54	100,44	100.63

Sumber: Satu Data Blora, 2024

Nilai tukar petani Kabupaten Blora sebagaimana Tabel II.100 di atas menunjukkan nilai yang semuanya di atas 100, walaupun hanya 100,15 di tahun 2021. Menurunnya NTP ini diduga karena perkembangan nilai tambah produksi pertanian kurang maksimal, sementara harga barang kebutuhan pokok semakin tinggi sebagai dampak pandemi dan kelesuan ekonomi global. Variabel lainya adalah kurangnya inovasi sektor pertanian. Hal ini terdukung oleh data Ekosistem Inovasi kabupaten Blora termasuk kategori kurang inovatif dengan nilai 2.456.

2.1.4.1.3 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Rasio ekspor impor terhadap PDRB menunjukkan keterbukaan ekonomi Kabupaten Blora terhadap perdagangan internasional. Rasio Ekspor dan impor terhadap PDRB menjadi salah satu indikator kualitas ekonomi. Hal ini menjadi pendorong daya saing daerah, jika didukung oleh iklim kesiapan pasar dan teknologi keuangan yang memudahkan jangkauan internasional.

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 9,10 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 11,65, meskipun nilai ekspor bersih mengalami peningkatan sebesar 4.892,27 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pertumbuhan PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perdagangan internasional sebesar 33.231,25 pada tahun 2024. Kenaikan ekspor bersih menunjukkan kinerja perdagangan yang positif, tetapi tidak cukup kuat untuk mengimbangi perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara rinci Perkembangan rasio ekspor dan Impor terhadap PDRB Kabupaten Blora sebagai berikut.

Tabel II.101
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) di Kabupaten Blora 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	6,89	12,55	16,70	11,65	9,10
2.	Nilai Ekspor Bersih	Rp miliar	1.652,93	3.378,20	5.163,90	3.712,98	4.892,27
3.	PDRB ADHB	Rp miliar	24.004,21	26.928,61	30.937,30	31,738,44	33,231,25

Sumber: Satu Data Blora

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Indikator yang digunakan pemerintah kabupaten Blora untuk fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung daya saing daerah adalah prasarana transportasi darat dan udara, fasilitas pendidikan tinggi migas, ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri dan fasilitas akomodasi lainnya.

a. Prasarana Transportasi Darat dan Udara

Ketersediaan infrastruktur wilayah di Kabupaten Blora dapat dikatakan cukup lengkap terutama pada infrastruktur transportasi. Dengan keberadaan jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang-Blora-Cepu sepanjang 44,07 km, dan beberapa ruas jalan provinsi (JKP-2) sepanjang 96,29 km, akses menuju Kabupaten Blora dari wilayah eksternal maupun sebaliknya sudah terakomodir dengan

baik. Hal ini memberikan dampak positif sebagai pembentuk daya saing daerah karena membuka wilayah Kabupaten Blora untuk investasi dan konsumsi dari luar wilayah.

Rencana peningkatan status jalan Randublatung–Getas–Perbatasan Kab Ngawi dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sesuai Perpres No 79 Tahun 2019 dan telah selesai dibangun di Tahun 2024 akan makin memudahkan akses lalu lintas keluar dan masuk Kabupaten Blora.

Keberadaan terminal angkutan penumpang di Kabupaten Blora juga lengkap yang meliputi Terminal Tipe A di Kota Cepu, Terminal Tipe B Gagak Rimang di Kota Blora, dan Terminal Tipe C yang terletak di Ngawen, Kunduran, Todanan dan Randublatung memberikan kemudian akses bagi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Kabupaten Blora juga dilalui jalur kereta api Surabaya – Jakarta dengan keberadaan Stasiun Besar Cepu dan beberapa stasiun kecil mulai dari Stasiun Kapuan, Wado, Randublatung dan Doplang. Keberadaan akses jalur kereta api ini juga memberikan kontribusi yang besar untuk pengembangan Kabupaten Blora.

Selain itu, kehadiran Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu sebenarnya juga merupakan pintu masuk yang sangat potensial bagi akses orang dan kegiatan usaha di Kabupaten Blora. Sayangnya penerbangan dari Blora–Jakarta yang terlayani dua kali penerbangan dalam seminggu tidak dapat berlanjut karena *load factor* yang sangat rendah dan membebani keuangan Pemkab Blora dalam menyubsidi biaya operasional penerbangan.

b. fasilitas pendidikan tinggi migas

Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kampus yang berlokasi di Cepu ini menyediakan pendidikan Sarjana Terapan/D4 yang lulusannya adalah tenaga profesional bersertifikasi yang siap kerja di perusahaan minyak dan gas (migas).

Keberadaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas dan PEM AKAMIGAS di Kecamatan Cepu yang merupakan satu-satunya di Indonesia juga diharapkan dapat mendukung

perkembangan sektor akomodasi, serta perdagangan dan jasa lainnya. Hal ini merupakan efek pengganda dari masuknya tenaga kerja luar di Kecamatan Cepu.

c. ketersediaan air bersih

Untuk pengembangan ekonomi, ketersediaan air merupakan hal yang krusial. Kondisi wilayah Kabupaten Blora yang terdiri atas pegunungan kapur mempersulit usaha penyediaan air. Pemanfaatan DAS yang ada berupa pembangunan bendungan dan embung, seperti bendungan Randugunting dan Bendungan Cabean serta rencana peningkatan kapasitas SPAM Cepu diharapkan dapat mendukung cadangan air dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Blora melalui pariwisata, pertanian dan pengembangan perkebunan.

d. ketersediaan kawasan peruntukan industri

Untuk pengembangan sektor industri, pengembangan lokasi-lokasi industri baru telah dilakukan dengan total luasan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 14 lokasi kawasan peruntukan industri. Peningkatan jumlah industri terutama kelompok industri kecil dan menegah disokong dengan penyediaan ruang-ruang industri terintegrasi yang memudahkan upaya peningkatan kualitas industri, baik berupa SDM maupun dukungan infrastruktur industri.

e. fasilitas akomodasi lainnya

Penginapan/ Hotel juga merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau amenitas yang utama. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel dan lama hunian.

Salah satu pendukung dalam mengembangkan sektor jasa pariwisata adalah keberadaan restoran dan pusat kuliner. Restoran atau rumah makan yang memiliki nilai historis maupun memiliki keunikan tersendiri semakin mendukung pariwisata. Pengembangan pusat-pusat kuliner yang memfasilitasi banyak PKL mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Tabel berikut adalah data keberadaan fasilitas penginapan di Kabupaten Blora.

Tabel II.102

Jenis Fasilitas Penginapan di Kabupaten Blora Tahun 2024

Hotel dan Akomodasi	Jumlah	Fasilitas Kuliner	Jumlah
Hotel Bintang 5	1	Restoran/rumah makan	129
Hotel Bintang 4	3	Pusat kuliner	3
Hotel Bintang 3	3	Hotel Melati	26
Hotel Bintang 2	4		

Sumber : Satu Data Blora, 2025

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi mengacu pada serangkaian faktor yang mempengaruhi investor untuk menanamkan modal. Iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk meningkatkan daya tarik investasi, baik dari wilayah Kabupaten Blora maupun luar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Fokus iklim investasi perlu menekankan pada potensi dan karakteristik daerah. Namun, secara umum ada beberapa fokus yang menjadi perhatian dalam menarik investasi, yaitu (1) infrastruktur fisik dan digital yang baik akan menarik investor karena dapat mengurangi biaya logistik dan operasional, (2) kemudahaan proses perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan kepastian hukum serta regulasi yang jelas dan konsisten, (3) ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai kebutuhan industri, serta tingkat upah tenaga kerja yang kompetitif penting dalam menarik investasi, (4) Pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, identifikasi dan pengembangan sektor unggulan daerah, (5) iklim usaha melalui stabilitas ekonomi dan politik untuk mencipatkan iklim usaha yang kondusif, serta dukungan yang proaktif dan serponsif terhadap kebutuhan investor.

Selain fokus-fokus di atas ada elemen-elemen lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik investasi, yaitu (1) promosi investasi secara aktif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor, (2) kerja sama antar daerah untuk memperluas jaringan investasi, (3) peningkatan daya saing daerah melalui inovasi dan perbaikan di berbagai bidang. Dengan memperhatikan fokus – fokus tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya tarik investasi yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2.1.4.3.1 Perizinan dan Investasi

Bila melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Blora berdasarkan fakta-fakta kinerja urusan penanaman modal sebagaimana disebutkan pada aspek pelayanan umum di atas, investasi dari luar daerah merupakan kebutuhan input pengembangan wilayah. Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi, terdapat empat elemen kebijakan pembangunan yang dikuatkan, yaitu (1) pengembangan insentif daerah berupa kemudahan prosedur investasi dan pengurangan pajak dan retribusi, (2) pengembangan kebijakan stabilisasi kondisi sosial kemasyarakatan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum, (3) kebijakan penyediaan lahan untuk industri dan investasi lain, dan (4) kebijakan pengembangan promosi daerah melalui penyelenggaraan *event* promosi maupun keikutsertaan dalam *event-event* yang diselenggarakan pada skala regional, nasional, maupun global.

Upaya untuk mendukung kemudahan proses investasi, Kabupaten Blora melalui sistem elektronik untuk penanaman modal yang telah mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penanaman Modal disetiap tahunnya, dan menjadi sebesar 92% pada tahun 2024. Selain itu, juga telah dikembangkan kegiatan pembinaan untuk masyarakat dalam rangka memperkenalkan prosedur investasi secara elektronik.

Dilihat dari perkembangan investasi yang masuk ke Kabupaten Blora, jumlah investor dan nilai investasi terus menunjukkan peningkatan. Hal ini perlu terus dikembangkan dan mulai menyasar pada PMA berskala nasional. Untuk itu, pengembangan kebijakan pembangunan dalam insentif investasi, stabilisasi kondisi sosial kemasyarakatan, ketersediaan lahan pengembangan, dan promosi daerah, perlu diprioritaskan. Prioritasi tersebut akan meningkatkan daya saing daerah dalam pengembangan produktivitas daerah. Kabupaten Blora telah menetapkan 14 Kawasan yang akan dikembangkan menjadi sentra industri, 9 dari 14 kawasan tersebut telah ditempati oleh industri, tersisa 5 kawasan yang akan ditawarkan ke investor guna menanamkan modal.

Penanaman modal perlu adanya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung

kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kemudahan perijinan dan berinvestasi di Kabupaten Blora juga mempertimbangkan prinsip *green economy* untuk pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Blora yaitu: (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewajiban investasi /usaha tidak merusak lingkungan.

2.1.4.3.2 Angka Kriminalitas

Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.103 berikut:

Tabel II.103
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	135	129	125	164	166
2.	Jumlah demonstrasi	Kasus	2	6	8	5	6

Sumber: Satu Data Blora, 2025

Angka kriminalitas relatif menurun dalam 5 tahun terakhir, namun terdapat kenaikan pada tahun 2024 yang menunjukkan 166 tindak kriminal.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar daya saing daerah terutama dalam pengembangan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Blora.

2.1.4.4.1 Kualitas Pendidikan

Kualitas Pendidikan merupakan implikasi dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus diupayakan oleh Kabupaten Blora. Saat ini, untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di mana salah satu dimensi yang membentuk IPM tersebut adalah dimensi Pendidikan yang diwakili oleh dua indikator yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Tahun 2024 RLS dan HLS Kabupaten Blora mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blora sebesar 12,60 tahun, artinya secara rata-rata usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2024 diharapkan akan dapat bersekolah setara setingkat Diploma I. selanjutnya, Rata-rata lama sekolah sebesar 7,26 artinya secara rata-rata penduduk Blora usia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan setara SMP. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar RLS dan HLS Kabupaten Blora seperti Kabupaten Grobogan, angka RLS Blora masih di bawah 0,03 namun untuk HLS lebih tinggi 0,04.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora juga merilis data angka melek huruf Kabupaten Blora, di mana tahun 2023 sebesar 88,33. Artinya, penduduk Blora usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya adalah sebesar 88,33 persen atau masih ada 11,67 persen penduduk blora yang belum mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Sementara itu, dengan indikator yang sama, Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 93,75.

Tabel II.104

Jumlah Penduduk dengan Kualifikasi S1, S2 dan S3 Kabupaten Blora Tahun 2024

No	WILAYAH	DIPLOMA IV/STRATA I(JML)	STRATA II(JML)	STRATA III(JML)
1.	BLORA	23416	1104	18

No	WILAYAH	DIPLOMA IV/STRATA I(JML)	STRATA II(JML)	STRATA III(JML)
2.	JATI	696	53	1
3.	RANDUBLATUNG	1505	45	0
4.	KRADENAN	541	14	0
5.	KEDUNGTUBAN	1261	35	0
6.	CEPU	3950	213	2
7.	SAMBONG	533	20	1
8.	JIKEN	675	33	0
9.	JEPON	1528	60	1
10.	BLORA	6193	404	5
11.	TUNJUNGAN	991	37	0
12.	BANJAREJO	1068	50	2
13.	NGAWEN	1288	61	0
14.	KUNDURAN	1156	28	5
15.	TODANAN	1193	25	0
16.	BOGOREJO	366	10	1
17.	JAPAH	472	16	0

Sumber: Satu Data Blora, 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah lulusan S1, S2 dan S3 penduduk yang ada di Kabupaten Blora. Jumlah penduduk lulusan S1 di Kabupaten Blora semakin bertambah dikarenakan adanya program unggulan 1 desa 2 sarjana yang diterapkan sejak 2021. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blora yang berkualitas dan dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja maupun dalam upaya berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Blora

2.1.4.4.2 Kualitas Kesehatan

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi prioritas penting dalam fokus sumber daya manusia. Kabupaten Blora telah berhasil mencapai target dalam pelayanan kesehatan pada kelompok usia sekolah walaupun pada masa pandemi mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan strategi pelayanan kesehatan usia sekolah yang tidak berbasis pada kegiatan pendidikan. Pandemi menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang berpindah ruang ke virtual

akibat pembatasan mobilitas telah menurunkan secara signifikan (lebih dari 25%) layanan kesehatan pada kelompok usia sekolah. Layanan terhadap kelompok usia produktif masih membutuhkan peningkatan signifikan dengan hanya mencapai 78,31% penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora. Selain itu, program unggulan Bupati Kabupaten Blora juga menyentuh pembangunan mental spiritual, program unggulan adalah satu desa satu hafiz dan pelaksanaan Blora mengaji di semua elemen baik di Pemerintahan maupun di masyarakat.

2.1.4.4.3 Angka Ketergantungan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora 2021–2026 mencantumkan Rasio Ketergantungan sebagai salah satu indikator untuk aspek daya saing daerah. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Apabila *Dependency Ratio* menunjukkan angka yang semakin tinggi, maka tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Blora bisa dilihat pada Tabel II.105 berikut:

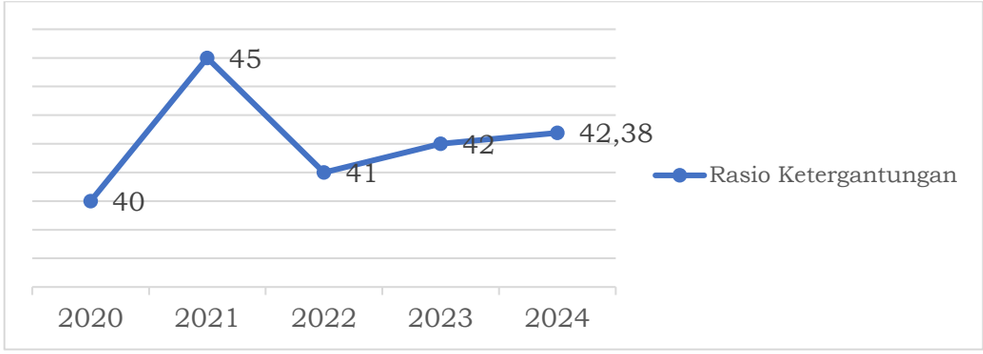
Tabel II.105
Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Ketergantungan	Naik/Turun
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2019	177014	647.947	81.499	0.40	(-) 0.02
2020	181.719	660.863	96.232	0.42	(+) 0.02
2021	182.360	661.728	102.906	0.45	(+) 0.03
2022	171.654	630.268	86.302	0.40	(-) 0.05
2023	174.876	636.249	90.496	42	(+)1
2024*	175.158	637.732	95.103	42,38	(+) 0.038

Sumber : Satu Data Blora, 2024

Laju pertumbuhan penduduk usia non produktif tahun 2024 di Kabupaten Blora lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk usia produktif. Hal tersebut menjadi penyebab naiknya angka ketergantungan di Kabupaten Blora. Peningkatan angka ketergantungan pada aspek

kesehatan didorong karena peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Blora.



Gambar II.66
Grafik Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu: (i) angka ketergantungan rendah (≤50); (ii) angka ketergantungan sedang (51-69); (iii) angka ketergantungan tinggi (69≤). Dari data di atas pada tahun 2020 disimpulkan bahwa Angka Ketergantungan Kabupaten Blora termasuk kategori rendah karena bernilai kurang dari 50. Kondisi ini akan berdampak pada daya beli masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah termasuk dengan menelisik lebih dalam lagi terkait struktur usia penduduk Kabupaten Blora sehingga di masa mendatang akan dapat menetapkan kebijakan terkait kependudukan.

2.1.4.5 Inovasi

Inovasi merupakan pilar penyangga daya saing daerah dan terobosan pelayanan publik. Inisiatif usulan inovasi daerah dapat berasal dari masyarakat, ASN, perangkat daerah, anggota legislatif dan kepala daerah. Adapun tata cara pengusulan inovasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah.

Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah berupaya melakukan inovasi baik berupa program kegiatan/ sistem aplikasi dengan berbagai latar belakang yang pada intinya adalah mengupayakan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga mempermudah akses layanan kepada masyarakat, mengupayakan pelayanan terbaik kepada pegawai pemerintah sehingga mempermudah/melancarkan dalam proses

pekerjaannya. Berikut perkembangan serta capaian inovasi Kabupaten Blora.

Tabel II.106

Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik	Inovasi	6	10	20	14	16
2	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dikembangkan	Inovasi	7	24	24	25	33
3	Jumlah Inovasi Daerah	Buah	69	207	253	274	439
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1.704	51,36	64,13	74.90	82,61
5	Peringkat IID		100	80	16	12	13
6	Kategori Inovasi Daerah	Klaster	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Satu Data Blora, 2025

Berdasarkan Tabel II.106 di atas, tingkat capaian inovasi di Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga perlu diberikan wadah agar inovasi tersebut dapat diimplementasikan agar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Blora.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021–2026 yang terbagi dalam beberapa aspek, fokus dan urusan bidang serta program pembangunan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bapperida. Bapperida melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.107

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1.	91%≤100%	Sangat Tinggi	●
2.	76%≤90%	Tinggi	■
3.	66%≤75%	Sedang	▲
4.	51%≤65%	Rendah	▬
5.	≤50%	Sangat Rendah	▼

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017 dan analisis tim Bapperida Kabupaten Blora 2025

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Evaluasi capaian indikator kinerja Kabupaten Blora Tahun 2023 terhadap target RPJMD Tahun 2021–2026 disajikan pada 4 bagian, yaitu:

1. Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama (*Tujuan Daerah*);
2. Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah;
3. Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah (*impact*); dan
4. Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Program (*outcome*).

2.2.1 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2024 terhadap Target RPJMD 2021–2026

Sembilan indikator tujuan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blora. Seluruh IKU mendapatkan status/predikat Sangat Tinggi. Tabel berikut menunjukkan Rekapitulasi Capaian Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2024.

Tabel II.108
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2024

No.	Simbol	Level Capaian	Jumlah Indikator	%
1.	●	Sangat Tinggi	8	88,89
2.	■	Tinggi	0	0
3.	▲	Sedang	0	0
4.	▬	Rendah	1	11,11
5.	▼	Buruk	0	0
Total			**9**	**100%**

Secara lebih lengkap, evaluasi capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 terhadap target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut untuk 9 IKU yang ditetapkan.

Tabel II.109

Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Tahun 2023	RKPD 2026				
						Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Komposit dari Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi	Indeks	70,04	70,63	69,64	71,42	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
2.	Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	Indeks	84,19	85,68	84,09	85,85	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
3.	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)	%	87,49	78,62	86,79	82,24	94,75	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Indeks	70,13	71,62	69,89	71,83	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	Indeks	71	69,22	67	78,95	100	●	Sekretariat Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Tahun 2023	RKPD 2026				
						Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
6.	Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)		Indeks	0,68	0,80	0,66	0,80*	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
7.	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	%	3-5	3,1	3-5	3,06	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
8.	Laju Inflasi	Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dikali 100	%	2,5-6	2,96	2,5-6	1,71	53,80	▬	Semua Perangkat Daerah pendukung
9.	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	10,28	11,49	10,84	11,42	96,67	●	Semua Perangkat Daerah pendukung

Keterangan:

*) = Capaian tahun 2023 (tahun 2024 belum rilis)

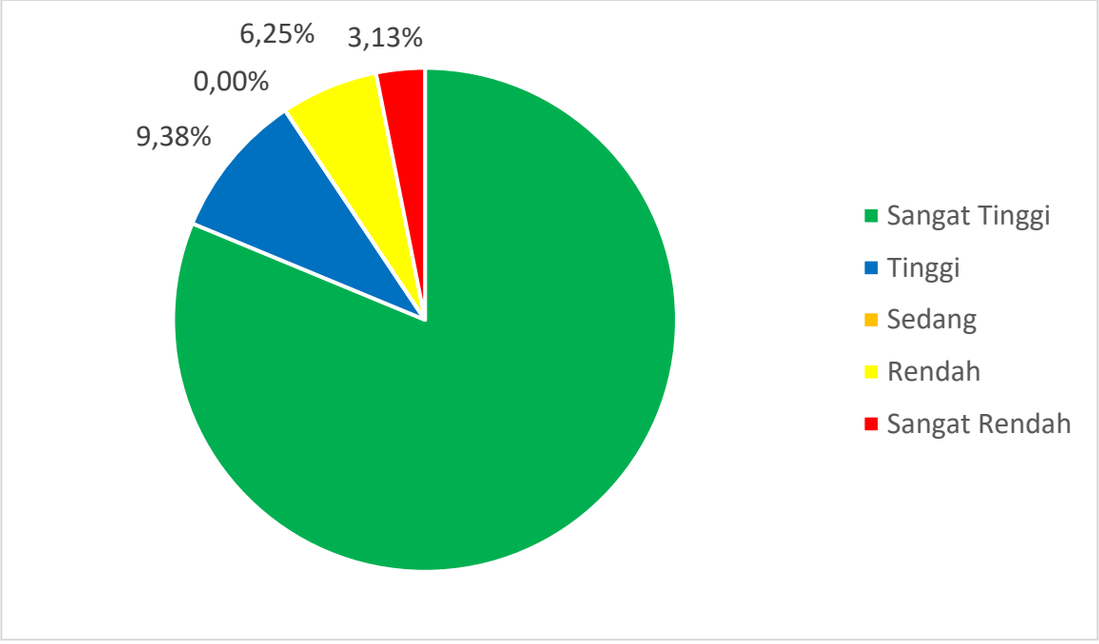
**)= Capaian bersifat sementara

2.2.2 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Sasaran Daerah meliputi 32 indikator yang ditetapkan dalam Bab 5 RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029. 25 indikator mendapatkan status/predikat Sangat Tinggi dan 4 indikator mendapatkan predikat Kinerja Tinggi yang diperkirakan akan tercapai dan 3 indikator mendapatkan status rendah dan sangat rendah. Tabel dan gambar berikut menunjukkan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.

Tabel II.110
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024

No.	Simbol	Level Capaian	Jumlah Indikator	%
1.	●	Sangat Tinggi	26	81,25
2.	■	Tinggi	3	9,38
3.	▲	Sedang	0	0
4.	▬	Rendah	2	6,25
5.	▼	Sangat Rendah	1	3,12
Total			**32**	**100**



Gambar II.67
Diagram Rekapitulasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024

Secara lebih lengkap, evaluasi capaian target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel II.115 berikut untuk 32 indikator yang ditetapkan.

Tabel II.111

Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

NO	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah		Tahun	7,55	7,08	7,31	7,26	99,31		Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah		Tahun	12,5	12,51	12,40	12,60	100		Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya usia harapan hidup	Usia Harapan Hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Tahun	75,07	74,71	74,85	74,92	100		Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG = ⅓ [(I par + I Dm + I inc- dis)] I par = Indeks keterwakilan di parlemen I Dm = Indeks pengambilan keputusan I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan	Indeks	65,73	85,68	65,69	73,96	100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah rumah dikali 100	%	73,50	67	70,5	67,99	96,44		Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan
		Persentase kawasan perkotaan Non kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh di wilayah perkotaan dibagi luas kawasan	%	99,90	96,28	99,81	96,29	96,47		Dinas Perumahan, Permukiman

NO	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
			permukiman di wilayah perkotaan dikali 100								dan Perhubungan
		Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	98	91,13	95	95,30	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses sanitasi layak dibagi rumah tangga dikali 100	%	100	70,79	100	90,14	90,14	■	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan dikali 100	%	75	61,28	71	62,34	87,80	■	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	47,5	50,51	46,5	53,82	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Jumlah pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dibagi Jumlah pemanfaatan ruang dikali 100	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase sarana perhubungan kondisi baik	Jumlah sarana perhubungan kondisi baik dibagi Jumlah sarana perhubungan dikali 100	%	94	92	92	92	100	●	Dinas Perumahan, permukiman

NO	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
											dan Perhubungan
5.	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air		%	54,74	58	54,54	53,40	97,90	●	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara		%	88,76	88,05	88,56	91,36	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas Lahan		%	62,11	64,65	61,73	67,36	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB	Skor	80 (A)	65,4 (B)	75 (BB)	67,03 (B)	89,37	■	Sekretariat Daerah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP*	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	3,00	2,86	2,47	2,98	100	●	Inspektorat Daerah
7	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	hasil pengukuran kematangan organisasi berdasarkan sub variabel organisasi, SDM, Tata laksana, dan manajemen.	Level	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	100	●	Sekretariat Daerah

NO	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
			(Permendagri 99 tahun 2018)								
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,15	3,27	3,05	3,28	100	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Pengukuran berdasarkan dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin	Indeks	77	73,11	77	80,42	100	●	Badan Kepegawaian Daerah
8.	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh unit pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks	75,5	85,36	74,5	87,98	100	●	Sekretariat Daerah
9.	Meningkatnya penanganan konflik dan pelanggaran peraturan daerah	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah konflik sosial yang di tangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100	%	100	100	100	100	100	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani dibagi Jumlah Pelanggaran Perda/perkada dikali 100	%	87	100	85	100	100	●	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB ADHK Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor	%	1,79	-0,14	1,79	0,48	26,81	▼	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan

NO	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
			Pertanian, dan Perikanan Tahun n-1 dikali 100								
		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	PDRB ADHK Sektor industri pengolahan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor industri pengolahan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor industri pengolahan Tahun n-1 dikali 100	%	10,2	5,31	10,02	5,16	51,49		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	PDRB ADHK Sektor perdagangan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor perdagangan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor perdagangan Tahun n-1 dikali 100	%	10,82	4,33	10,82	6,38	58,96		Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun	%	4,5	15	4,20	9,97	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
11.	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Nilai Investasi tahun n dikurangi Nilai Investasi tahun n-1 dibagi Nilai Investasi	%	4	2,6	3,1	9,97	100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	5,1	3,1	5,3	3,67	100		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

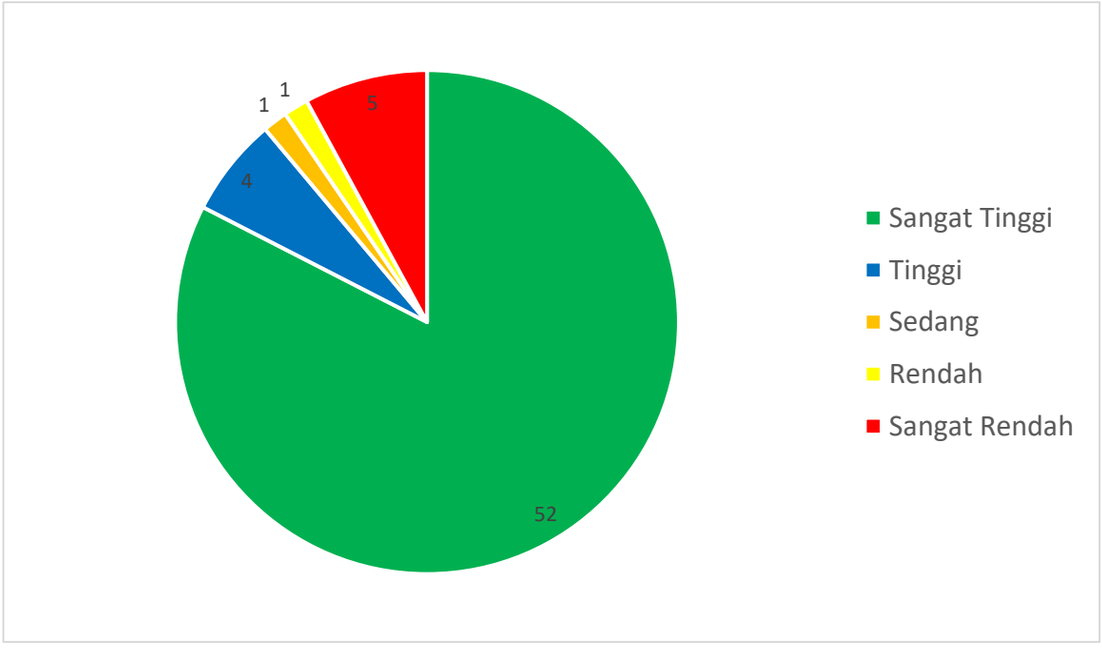
NO	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target 2024	Status/ Predikat	Perangkat Daerah
13.	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan dikali 100	%	0,80	0,97	0,75	1,74	100		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh desa. Indeks Desa Membangun dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Indeks	0,6530	0,6693	0,6515	0,7074	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.3 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah bersumber dari Tabel 8.2 RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029. Dari 65 indikator, 57 indikator (87,69) berkinerja sangat baik dan baik, sementara hanya 3 indikator (14,28%) dan 3 (5,35%) indikator yang berkinerja buruk.

Tabel II.112
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024

No.	Simbol	Level capaian	Jumlah Indikator	%
1.	●	Sangat Tinggi	57	87,70
2.	■	Tinggi	2	3,08
3.	▲	Sedang	0	0
4.	▬	Rendah	3	4,61
5.	▼	Buruk	3	4,61
Total			**65**	**100**



Gambar II.68
Diagram Rekapitulasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024

Secara lebih lengkap, evaluasi capaian target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 dapat dilihat yang disusun berdasarkan 3 aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

Tabel II.113

Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
1.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Komposit dari Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi	Indeks	70,04	70,63	69,64	71,42	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
1.1.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	Indeks	84,19	85,68	84,09	85,85	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
1.1.3.	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan	%	87,49	78,62	86,79	82,24	94,75	●	Semua Perangkat Daerah pendukung

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
		Persentase sarana perhubungan kondisi baik)								
1.1.4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Indeks	70,13	71,62	69,89	71,83	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	71	69,22	67	69,22	100	●	Sekretariat Daerah
1.1.6.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		Indeks	0,68	0,80	0,66	0,80*	100	●	
1.1.7.	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	%	3-5	3,1	3-5	3,06	100	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
1.1.8.	Laju Inflasi	Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dikali 100	%	2,5-6	2,96	2,5-6	1,71	53,80	▬	Semua Perangkat Daerah pendukung
1.1.9.	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	10,28	11,49	10,84	11,42	94,65	●	Semua Perangkat Daerah pendukung
2.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
2.1.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.1.1.	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	7.55	7,08	7,31	7,26	99,31	●	Dinas Pendidikan
2.1.2.	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n)	Tahun	12,5	12,51	12,4	12,60	100	●	Dinas Pendidikan
2.2.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
2.2.1.	Usia Harapan Hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Tahun	75,07	74,71	74,85	74,92	100	●	Dinas Kesehatan
2.3.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
2.3.1.	Persentase jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan dikali 100	%	75	61,28	71	62,34	87,80	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.2.	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	47,5	50,51	46,50	53,82	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.3.3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Jumlah pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dibagi Jumlah pemanfaatan ruang dikali 100	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.4.	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	98	91,13	95	95,30	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.5.	Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman	Jumlah rumah tangga mengakses sanitasi layak dibagi rumah tangga dikali 100	%	100	70,79	100	90,14	90,14	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.4.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
2.4.1.	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah rumah dikali 100	%	73,5	67	70,5	67,99	96,43	●	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
2.4.2.	Persentase kawasan permukiman non kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh di wilayah perkotaan dibagi luas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dikali 100	%	99,90	96,28	99,81	96,29	96,47	●	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
2.5.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN,**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
	KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT									
2.5.1.	Persentase Pelanggaran Perda/perkada tertangani	Jumlah penyelesaian penegakan Perda/Perkada dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada dikali 100 %	%	87	84	85	100	100		Satuan Polisi Pamong Praja
2.5.2.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks yang diukur menggunakan komponen: Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;dan Pengembangan sistem pemulihan bencana	Indeks	0,46	0,51	0,45	0,51	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.6.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
2.6.1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan dikali 100	%	0,80	0,97	0,75	1,74	100		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.7.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
2.7.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	5,1	3,1	5,3	3,67	100	●	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.8.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**									
2.8.1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDJ = ⅓ [(I par + I Dm + I inc-dis)] I par = Indeks keterwakilan di parlemen I Dm =Indeks pengambilan keputusan I inc-dis =Indeks distribusi pendapatan	Indeks	65,73	60,86	65,69	73,96	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.9.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2.9.1.	Skor Pola Pangan Harapan	Energi dari masing-masing kelompok pangan dikali bobot	skor	100	93,90	97,9	89,80	91,72	●	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.10.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
2.10.1.	Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan	Jumlah penyediaan tanah untuk pembangunan dibagi jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan dikali 100	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2.11.1.	Indeks kualitas air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	%	54,74	58	54,54	53,40	97,90	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.2.	Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (\text{Ieu} - 0,1)\right)$	%	88,76	88,05	88,56	91,36	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3.	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54,3}\right)$	%	62,11	64,65	61,73	67,36	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.12.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	%	90	88,89	89,4	91,58	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2.13.1.	Indeks Desa Membangun	Rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh desa. Indeks Desa Membangun dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.	Indeks	0,6530	0,6693	0,6520	0,7074	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
2.14.1.	Total Fertility Rate (TFR)		%	2,2	2,03	2,2	2,00	90,90		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
		$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49								
2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
2.15.1.	Persentase sarana perhubungan kondisi baik	Jumlah sarana perhubungan kondisi baik dibagi Jumlah sarana perhubungan dikali 100	%	94	92	92	92	100	●	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2.16.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,15	3,27	3,05	3,28	100	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
2.17.1.	Persentase usaha mikro naik kelas	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dibagi	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Perdagangan Koperasi dan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi/terbina dikali 100								Usaha Kecil Menengah
2.18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2.18.1.	Pertumbuhan Investasi	Nilai Investasi tahun n dikurangi Nilai Investasi tahun n-1 dibagi Nilai Investasi tahun n-1 dikali 100	%	4	2,6	3	3,1	100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**									
2.19.1.	Prestasi olahraga	Jumlah Prestasi olahraga	Medali/ Piala	65	169	80	128	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
2.20.1.	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Jumlah data yang tersedia pada portal satu data daerah dibagi Jumlah data yang seharusnya	%	60	58,14	50	67,35	100		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
		terisi dalam portal open data daerah								
2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2.21.1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian dikali 100	%	40	51,47	31	31,16	100	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
2.22.1.	Jumlahobyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	buah	60	61	50	69	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
2.23.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	%	85,57	84,71	85,07	85,22	99,61	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.24.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	%	85,57	85,65	85,07	85,16	100	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
2.25.1.	Pertumbuhan PDRB Sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	1,79	-0,14	1,79	0,48	26,82	▼	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
2.26.1.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	4,5	15	4,20	9,97	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
2.27.1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	PDRB ADHK Sektor Pertanian tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor Pertanian Tahun n-1 dikali 100	%	1,79	-0,14	1,79	0,48	26,82	▼	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan
2.28.	**URUSAN PEMERINTAHAN**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
	BIDANG PERDAGANGAN									
2.28.1.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	10,82	4,33	10,82	6,38	58,96		Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.29.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
2.29.1.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	10,02	5,31	10,02	5,16	51,49		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.30.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DAERAH**									
2.30.1.	Nilai SAKIP	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB	Skor	80 (A)	65,4 (B)	75 (BB)	67,03 (B)	89,37		Sekretariat Daerah
2.30.2.	Indeks Maturitas Kelembagaan	hasil pengukuran Maturitas Kelembagaan berdasarkan sub variabel organisasi, SDM, Tata laksana, dan manajemen.	level	4	3	3	3	100		Sekretariat Daerah
2.30.3.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata dari Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh unit pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks	75,5	85,4	74,5	87,98	100		Sekretariat Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.31.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DPRD**									
2.31.1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Totaldari Nilai Persepsi Per Unsur dikali nilai penimbang dibagi total unsur yang terisi	Indeks	70	72,88	70	76,99	100	●	Sekretariat DPRD
2.32.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN: PERENCANAAN**									
2.32.1.	Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	27	20,81	25	21,37	85,48	■	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.33.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN: KEUANGAN**									
2.33.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadapLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP*	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.34.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN: KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.34.1.	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Pengukuran berdasarkan dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin	Indeks	77	73,11	76,5	80,42	100		Badan Kepegawaian Daerah
2.35.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
2.35.1.	Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran berdasarkan pengisian pada http://indeks.inovasi.otda.go.id/ la yanan/44. Variabel yang diukur: a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; b. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Indeks	2.040	74,9	82,61	82,61	100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.36.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN: INSPEKTORAT DAERAH**									
2.36.1.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	level	3	2,86	2,47	2,98	100		Inspektorat Daerah
2.37.	**UNSUR KEWILAYAHAN: KECAMATAN**									

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
2.37.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Indeks	83,26	85,90	82,96	85,90	100	●	Seluruh Kecamatan
2.38.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
2.38.1.	Persentase potensi konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tahun n dikurangi jumlah konflik sosial tahun n-1 dibagi jumlah konflik social tahun n-1 dikali 100	%	100	50	100	100	100	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
3.1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	902.132	1.093.858	905.797	1.180.266	100	●	
3.1.2.	Nilai Tukar Petani	Indeks harga yang diterima petani (It) dibagi Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dikali 100	%	101	117,11	104,56	112,98**	100	●	
3.1.3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Jumlah pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dibagi Jumlah pengeluaran konsumsi dikali 100	%	48	48	49,75	46,25	92,96	●	
3.1.4.	Rasio Ekspor+ impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Ekspor ditambah impor dibagi PDRB dikali 100	%	24,83	9,61	24,83	8,29	33,39	▼	

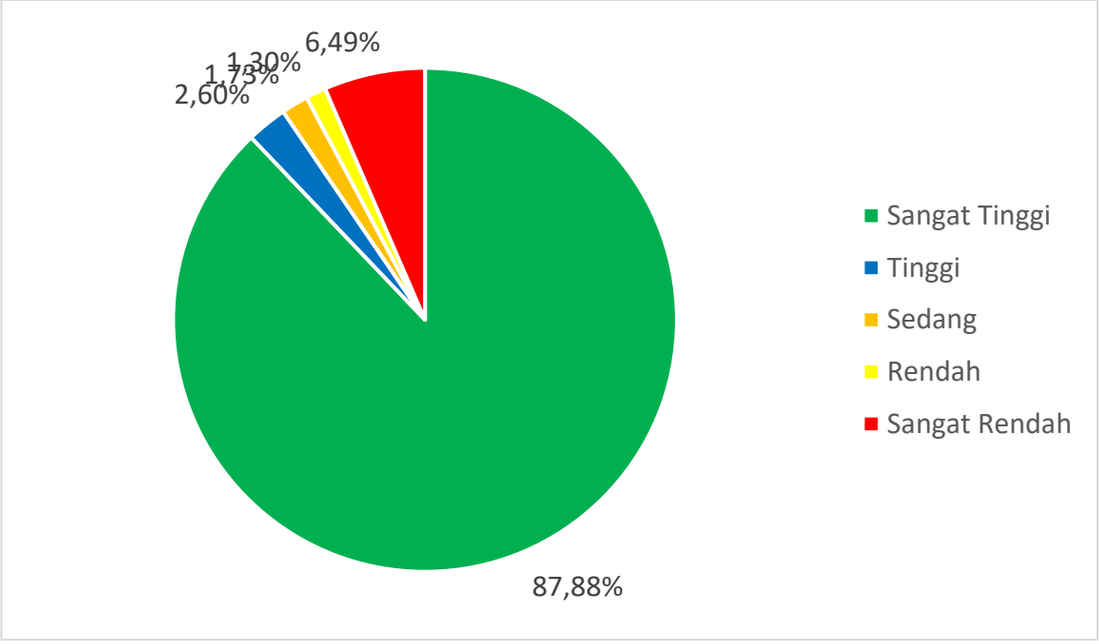
No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2020-2026	Realisasi Capaian Tahun 2023	RKPD 2024			Status	Perangkat Daerah
						Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 20234 terhadap Target 2024		
3.1.5.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Jumlah pinjaman dibagi jumlah simpanan di BPR dikali 100	%	87	100,96	91,54	92,10	100		
3.1.6.	Angka kriminalitas	Jumlah Angka kriminalitas	kasus	135	140	155	157	98,71		
3.1.7.	Rasio Ketergantungan	Jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	47	41,71	46,84	42,38	100		

2.2.4 Evaluasi Capaian Target Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Program dievaluasi berdasarkan target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 pada tahun 2024. Dari 231 indikator kinerja program, sebanyak 203 indikator (87,88%) berkinerja sangat tinggi dan baik 6 indikator bekerja mencapai level tinggi. Sementara itu, 4 indikator (1,73%) berkinerja cukup dan 18 indikator (7,79%) berkinerja rendah dan sangat rendah.

Tabel II.114
Indikator Kinerja Program Menurut Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029

No.	Simbol	Level capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1.	●	Sangat Tinggi	199	86,16
2.	■	Tinggi	8	3,44
3.	▲	Sedang	6	2,60
4.	▬	Rendah	5	2,17
5.	▼	Sangat Rendah	13	5,63
Total			**231**	**100,00%**



Gambar II.69
Diagram Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Target RPJMD

Secara lebih lengkap, evaluasi capaian target Indikator Kinerja Program Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.115

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 terhadap Target RPJMD Tahun 2021–2026

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
1.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**									
1.1.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1.1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD	%	93,25	93,1	93,15	99,90	100		Dinas Pendidikan
		Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	%	63	54	56	41,39	73,91		Dinas Pendidikan
		APS SMP	%	74,25	74,1	74,15	96,63	100		Dinas Pendidikan
		Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	%	60	79	56	44,12	78,79		Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	86	71,56	82	74,94	91,39		Dinas Pendidikan
		Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik	%	68	38,08	62	33,48	59,79		Dinas Pendidikan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		APS Kesetaraan	%	95	80	85	57,12	67,20	▲	Dinas Pendidikan
1.1.2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Dengan Kurikulum Muatan Lokal	%	55	52	53	100	100	●	Dinas Pendidikan
1.1.3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru per Jumlah Penduduk	%	83	63	72	15	100	●	Dinas Pendidikan
1.1.4.	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	Persentase Pengendalian Izin Sekolah	%	32,5	31	31,5	100	100	●	Dinas Pendidikan
1.2.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1.2.1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	90	100	50	50	▼	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama	%	19	13	16	26	100		Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan Upaya kesehatan	%	100	100	100	100	100		
		Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama	%	73	100	61,5	100	100		
		Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK	%	100	100	100	100	100		
1.2.2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan strategis	%	95	80	85	100	100		Dinas Kesehatan
		Cakupan tenaga kesehatan yang	%	95	95	95	100	100		Dinas Kesehatan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		mengikuti uji kompetensi								
		Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memenuhi standar kompetensi	%	95	92	92	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	%	94	91	92	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	%	100	100	100	100	100	●	
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	%	79	NA	77	3,4589	4,49	▼	
1.2.3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan dan Minuman	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	80	80	80	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase penggunaan obat	%	84	78	80	100	100	●	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		rasional di puskesmas								
1.2.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga	%	100	98	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
1.3.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1.3.1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	%	47,5	46	46,5	53,82	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	%	75	60	65	65	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	100	99	100	90,14	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar dan terevitalisasi	%	85	82	84	93,50	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung	%	85	100	83	100	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		dalam kondisi baik dan terpelihara								
1.3.6.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi Mantap	%	75	69	73	62,34	85,40	■	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang jalan drainase yang dibangun	meter	5000	5000	5000	638	12,75	▼	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.9.	Program Pembangunan Jasa Konstruksi	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	20	20	20	51,90	100	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
1.4.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1.4.1.	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	1,5	NA	1,5	3,09	100	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	1.300	NA	83.828	80.895	96,50	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
1.4.2.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
1.4.3.	Program Kawasan Pemukiman	Persentase penanganan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	%	5	5	5	0,35	6,99	▼	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
1.4.4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU)	%	90	75	80	62,20	77,76	■	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
1.5.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**									

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
1.5.1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Perda	%	87	84	85	100	100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.6.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	63	57	59	97,56	100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.7.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	95	95	95	95	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5	5	5	5	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	%	95	95	95	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		evakuasi korban bencana								
1.8.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1.8.1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	72	72	0,72	0,99	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.8.2.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	73	73	0,73	1	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.8.3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	33	33	33	86,15	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.8.4.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.8.5.	Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		terpelihara sesuai standar								Perlindungan Anak
2.	URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.1.1.	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	58,12	52,47	53,94	85,48	100	●	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.1.2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	48,44	44,75	45,91	93,66	100	●	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.1.3.	Program Hubungan Industrial	Besaran perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	%	31	24	27	42,33	100	●	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.2.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
2.2.1.	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.3.	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**									
2.3.1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	%	90	90	90	100	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5	5	5	5	100	●	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3.2.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan layanan terhadap perempuan korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Sosial, dan PPPA
2.3.3.	Program Pemenuhan Hak anak (PHA)	Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak Kecamatan	kelompok	14	1	1	16	100	●	Dinas Sosial, dan PPPA
		Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan	Unit	8	1	1	16	100	●	Dinas Sosial, dan PPPA

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		anak (P2TP2A) tingkat kecamatan								
2.3.4.	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Persentase keluarga dan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Sosial, dan PPPA
2.3.5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data profil anak	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Sosial, dan PPPA
2.3.6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase peningkatan layanan terhadap anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Sosial, dan PPPA
2.4.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2.4.1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 2.200 kkal/kapita/hari.	%	8,39	9,03	8,72	11,19	71,64	▲	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2.4.2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	87,5	24,69	87,5	93,8	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2.5.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.5.1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	90	100	100	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	indeks	1,77	1,2	1,19	2,13	21	▼	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemaran Udara	Indeks	13,16	13,19	13,18	0,26	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase tutupan vegetasi	Indeks	63,55	63,49	63,51	67,36	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani	%	1,33	1,33	1,33	54,89	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang	%	85	70	75	44,44	59,25	▬	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
2.5.6.	Program Pengakuan Keberadaan masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH	%	100	50	50	100	100		Dinas Lingkungan Hidup
2.5.7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	paket	3	3	3	3	100		Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.5.8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	keg	3	3	3	2	66,67	▲	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/ atau penaatan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.10.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70	72	71	70,08	98,70	●	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	31	27	28	28,96	100	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.11.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah regional	Persentase fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik	%	100	90	95	90	94,73	●	Dinas Lingkungan Hidup
2.5.12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk	%	100	99	100	90,14	90,14	■	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		mengakses Sanitasi layak dan aman								
2.6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.6.1.	Program Pendataan penduduk	Cakupan kepemilikan KTP	%	98,9	98,6	98,7	98,90	100	●	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KIA	%	70,6	70,3	70,4	64,59	91,75	●	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.6.2.	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	100	100	100	99,51	99,51	●	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.6.3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	60	28	50	0	0	▼	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.6.4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah dan lembaga yang memanfaatkan	%	60	45	50	98,48	100	●	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Profil kependudukan.								
2.7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.7.1.	Program Penataan Desa	Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.7.2.	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Kerja sama antar desa terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.7.3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	%	100	80	85	100	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase BUMDes berkembang dan Maju	%	13,56	8,47	10,17	13,61	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Desa meningkat Stratanya	%	22,88	7,38	11,81	31	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase produk hukum tentang	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		desa yang ditetapkan								
2.7.4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, dan Kemasyarakatan Hukum Adat	Persentase PKK desa aktif	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	%	88,24	52,94	64,71	88,24	100	●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.8.1.	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	22,5	23,5	23	32,3	59,57	▬	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian MKJP	%	33	31,5	32	23,2	72,5	▲	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak	%	8,75	10,5	10,2	4,94	100	●	Dinas Pengendalian Penduduk dan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		terpenuhi (*unmet need*)								Keluarga Berencana
2.8.3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	%	85	83,9	82,4	89,61	100	●	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.9.1.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana penyeberangan sungai dan danau dalam kondisi baik	%	70	40	50	55,56	100	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
2.9.2.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase sarana dan prasarana perlintasan kereta api dalam kondisi aman	%	19	16	17	7	41,18	▼	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
2.9.3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardgrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	97	90	92	92,004	100	●	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
		Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	%	96	93	94	99,46	100		Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.10.1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	40	47	47	100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	%	34	20	25	65,85	100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.11.1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase penerbitan izin pembukaan	%	100	100	100	100	100		Dinas Perdagangan, Koperasi, dan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas simpan pinjam untuk USP dan KSP								Usaha Kecil Menengah
2.11.2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang patuh	%	53,2	43,38	50	51,32	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah Koperasi yang melaksanakan Audit Eksternal	unit	36	24	28	10	35,71	▼	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
2.11.3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	%	84,84	83,33	83,87	88,24	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
2.11.4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/ Pengawas /Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	33,5	27	30	32,33	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.11.5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	11	10,4	10,6	27,84	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
2.11.6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah wirausaha baru	UKM	60	30	60	120	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	%	0,59	0,22	0,41	0,42	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
2.11.7.	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usahanya	%	2,38	1,12	1,53	1,55	23,53	●	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
2.12.	PENANAMAN MODAL									
2.12.1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	1	0	0	▼	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.12.2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti	Kali	2	2	2	3	100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,9	89,3	89,5	92	100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan PM	perusahaan	50	2	40	391	100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola	dokumen	1	1	1	1	100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
2.13.1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	63	100	63	100	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader	orang	6	3	5	8	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.13.2.	Program Peningkatan kapasitas Daya saing saing Keolahragaan	persentase sarpras olahraga yang layak	%	8	7	7	7	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase atlet berprestasi	%	16,4	41,42	16,4	25,7	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.13.3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	%	86	84	85	34,76	40,89	▼	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Bumi Perkemahan yang layak	%	66,6	16,6	33,3	16,67	50,05	▼	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.14.1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem satu data yang terintegrasi	%	60	45	50	67,35	100	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.15.1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	event	52	50	50	51	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase OPK yang dilestarikan	%	49,5	36,3	41,3	46,34	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah desa/ kelurahan budaya	desa	5	3	3	3	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.15.2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian	Orang	70	50	60	60	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.15.3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	buah	511	491	496	504	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan								Kebudayaan dan Pariwisata
2.15.4.	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah pengunjung rintisan museum / museum	Orang	1500	1000	1200	1796	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.15.5.	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Lembaga sejarah lokal daerah yang aktif	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSATAKAAN									
2.16.1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	38.000	35.000	36.000	52.562	100	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase perpustakaan yang dibina	%	46,45	39,12	41,56	52,67	100	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16.2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi bahan pustaka dan Koleksi Perpustakaan yang dilestarikan	%	33,3	3,23	3,25	3,27	100	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
2.17.1.	Program Pengelolaan arsip	Persentase pengawasan kearsipan internal	%	50	50	50	60,47	100	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	100	74	76	76,58	100	●	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.18.1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	portal	44	5	5	5	100	●	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	URUSAN PILIHAN									
3.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.1.1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	310,36	296,8	301,25	351,39	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	%	90,91	63,64	72,73	50,02	68,77	▲	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.1.2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	ton	327,99	310,9	316,49	793,04	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Cakupan bina kelompok budidaya	%	8,2	310,9	8,2	17,75	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.1.3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan	Kg	565.000	8,2	560.000	631.915,25	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.2.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
3.2.1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata	orang	819	771	787	2.239	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Revitalisasi destinasi wisata	%	33,3	13,3	20	20	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah desa wisata/jumlah DTW	Desa	15	18	14	18	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
3.2.2.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah event pariwisata	Event	3	1	2	2	100		Dinas Kepemudaan Olahraga

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
										Kebudayaan dan Pariwisata
3.2.3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih)	%	22,5	11,2	15	15	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	%	30	15	20	11,2	56		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
3.2.4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi	unit	1	1	1	1	100		Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
3.3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.3.1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat adopsi teknologi pertanian	%	59	55	63	50,57	80,28		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Persentase kelompok tani menggunakan benih unggul	%	99	99	99	100	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Populasi ternak Sapi	ekor	294.275	277.984	282.843	575.500	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Populasi ternak Kambing	Ekor	161.955	152.094	155.235	152.200	98,04		Dinas Pangan, pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.3.2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat produksi tanaman pangan utama	Ton	843.772	797.359	827.146	974.091	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Tingkat produksi tanaman hortikultura (Bawang Merah)	Ton	1.560	1520	1540	12.451,02	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Merah/Keriting)	Ton	9.820	9720	9750	34.829,19	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Tingkat produksi tanaman holtikultura (Cabai Rawit)	Ton	1.570	1550	1550	14.575,34	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Tingkat produksi tanaman hortikultura (Jeruk Siem)	Ton	1200	1000	1000	7.031,01	100		Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Jumlah Produksi Mete	Ton	270	255	260	89,21	34,31	▼	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Tebu	Ton	19.250	18800	18950	42.869,36	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara	unit	2	2	2	25,00	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.3.3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali (%)	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	ekor	19.550	8.700	12.100	17.038	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak dikonsumsi		87	80	83	96	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
3.3.4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan kasus bencana pertanian	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.3.5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	7	8	100	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok ternak	%	47	44	100	90	100	●	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.4.1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	%	100	100	100	100	100	●	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.4.2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan.	%	89	69	77	61,54	79,92	■	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
3.4.3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pasar yang diawasi	%	100	100	100	100	100		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok)	%	3	4	4	3,83	96		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi	%	100	100	100	100	100		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.4.4.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase eksportir yang terbina	%	100	100	100	100	100		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.4.5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Unit	948	930	938	939	100		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.4.6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah event promosi produk dalam negeri	event	1	0	1	3	100		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
3.5.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3.5.1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri	%	0,3	0,1	0,15	0,16	100	●	Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja
3.5.2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM berizin	%	0,11	0,091	0,095	0,53	100	●	Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja
3.5.3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar di SIINAS	%	0,2	0,12	0,15	0,16	100	●	Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja
3.6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI									
3.6.1.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	%	40	40	40	100	100	●	Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.1.	SEKRETARIAT DAERAH									
4.1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	%	100	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik	%	100	100	100	100	100		Sekretariat Daerah
		Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / / kategori " Baik "	%	83	75	78	75,71	97,07		Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B		80	70	80	100	100		Sekretariat Daerah
4.1.2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra	%	100	97	98	99	100		Sekretariat Daerah
		Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD	%	100	90	95	95	100		Sekretariat Daerah
		Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra	%	100	100	100	100	100		Sekretariat Daerah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		Persentase produk hukum yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100		Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi kerjasama daerah	%	100	100	100	100	100		Sekretariat Daerah
4.1.3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	%	93	93	93	95	100		Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi	%	90	90	90	96	100		Sekretariat Daerah
		Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam	%	90	90	90	96	100		Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target	%	90	90	90	90	100		Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah paket tender yang	%	100	100	100	100	100		Sekretariat Daerah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		berhasil dilaksanakan								
4.2.	URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DPRD									
4.2.1.	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	97	100	100	●	Sekretariat DPRD
4.2.2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan keuangan terhadap Anggota DPRD	%	100	95	97	100	100	●	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah	%	100	95	97	100	100	●	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD	%	100	95	97	100	100	●	Sekretariat DPRD

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
5.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.1.	PERENCANAAN									
5.1.1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	100	94	96	87,70	91,35		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase indikator program perangkat daerah dalam RPJMD yang tercapai	%	92,5	85	87,5	80	91,43		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai	%	100	94	96	80	83,33		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai	%	100	100	100	84,40	84,40		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase indikator Program RPJMD bidang	%	100	100	100	65,91	65,91		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		infrastruktur yang tercapai								
5.2.	KEUANGAN									
5.2.1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	97	95	96	97,32	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	100	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya)	%	100	100	100	100	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian pensertifikatan	%	100	100	100	100	99	●	Badan Pendapatan Pengelolaan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		tanah milik Pemerintah Daerah								Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	%	100	100	100	113	100	●	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.3.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN									
5.3.1.	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD	indeks	85	79	81	98,32	100	●	Badan Kepegawaian Daerah
5.3.2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai prioritas Kebutuhan Organisasi	%	76,68	76,68	76,68	76,68	100	●	Badan Kepegawaian Daerah
5.4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.4.1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	80	85	100	100	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	URUSAN BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN									

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
6.1.	URUSAN BIDANG PENGAWASAN									
6.1.1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	100	100	100	100	●	Inspektorat Daerah
		Persentase penanganan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	%	100	100	100	100	100	●	Inspektorat Daerah
		Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	●	Inspektorat Daerah
6.1.2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	PMPRB	nilai	75 (B)	67	71	69	97,49	●	Inspektorat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat WBK dan WBBM	%	13,64	6,82	9,09	0	0	▼	Inspektorat Daerah
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.1.	**URUSAN BIDANG KECAMATAN**									
7.1.1.	Program Penyelenggaraan Urusan Umum	Persentase kelompok masyarakat	%	100	100	100	100	100	●	Kecamatan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
		(kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan								
7.1.2.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	98	95,27	98	95,27	97,21	●	Kecamatan
7.1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	100	●	Kecamatan
7.1.4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●	Kecamatan
8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021–2026	Capaian 2023	RKPD *2024			Status	Perangkat Daerah
						Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2024 (%)		
8.1.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
8.1.1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	85	90	100	100	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.2.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang terbina	%	100	70	80	81,73	100	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	%	100	100	100	100	100	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	%	100	85	90	100	100	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	79,5	-	79,5	77,53	97,52	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : RPJMD Kabupaten Blora 2021–2026, 2024, Data Terolah

2.3 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Kabupaten Blora Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2025 memberikan pengaruh langsung dengan periodisasi kepemimpinan kepala daerah dari semula periode RPJMD 2021-2026 menjadi RPJMD periode 2025-2029.

Masa transisi kepemimpinan ini menjadikan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024. Adapun acuan perencanaan pembangunan jangka menengah masih belum tersedia mengingat penetapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) kepemimpinan kepala daerah periode 2025-2029 direncanakan pada bulan Agustus 2025 yaitu 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada bulan Juni 2025.

Penyelarasan rencana kerja kepemimpinan baru ke dalam RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan isu, permasalahan pembangunan dan program kerja kepala daerah terpilih yang disampaikan baik dalam dokumen resmi ke Komisi Pemilihan Umum maupun janji-janji politik selama masa kampanye.

2.3.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora dalam RKPD Tahun 2026 dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
2. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal,
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
4. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel),

5. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Selanjutnya disajikan permasalahan urusan pembangunan sebagai hasil evaluasi RKPD tahun 2024 sebagai berikut:

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yaitu:

1. Kualitas Pendidikan yang belum merata
   Kualitas guru secara langsung akan memengaruhi dalam membentuk siswa yang berkualitas. Kualifikasi Guru, untuk jenjang PAUD guru yang berkualifikasi lulusan DIV/S1 saat ini sebesar 80,81 persen, hal tersebut menandakan masih terdapat PAUD yang tenaga pengajarnya berkualifikasi di bawah DIV/S1. Selain itu, masih adanya sekolah yang ruang kelasnya mengalami rusak berat merupakan masalah serius yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora bahwa untuk jenjang PAUD masih ada tujuh sekolah yang ruang kelasnya rusak berat, untuk jenjang SMP masih ada 14 sekolah yang ruang kelasnya rusak berat dan untuk jenjang SD masih ada 120 sekolah yang rusak sedang dan berat. Kualitas Pendidikan juga dapat dilihat dari predikat akreditasi yang diterima oleh satuan Pendidikan. Tahun 2024 jumlah akreditasi untuk jenjang SD sederajat masih didominasi oleh predikat B dengan jumlah 433 sekolah, sementara sekolah dengan akreditasi A sebesar 155 sekolah. Pada jenjang SMP Sederajat sedikit lebih baik di mana jumlah sekolah dengan akreditasi A sebesar 45, akreditasi B sebesar 40 sekolah dan akreditasi C ada 15 sekolah.

2. Kesadaran akan pentingnya Pendidikan di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

   Angka Rata-rata lama sekolah yang dikeluarkan BPS Kabupaten Blora tahun 2024 sebesar 7,26. Angka tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan Pendidikan hingga SMP. Nilai yang masih kecil tersebut salah satunya disebabkan karena jumlah penduduk yang berpendidikan rendah masih lebih banyak dibanding penduduk yang berpendidikan tinggi. Angka yang rendah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan partisipasi penduduk dalam mengikuti Pendidikan kesetaraan yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

   Angka putus sekolah Kabupaten Blora hingga tahun ajar 2024/2025 untuk jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat cukup tinggi. Data dari Dinas Pendidikan yang diambil dari Pangkalan Data Kementerian Pendidikan Dasar menyatakan bahwa jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD Sederajat sebesar 194 siswa dan siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP Sederajat sebesar 570 siswa.

   Dinas Pendidikan membuat sistem informasi yang dapat mencatat jumlah anak tidak sekolah dan anak belum pernah sekolah yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Blora. Sistem informasi tersebut dinamakan SILAT. Sampai saat ini data anak tidak sekolah yang tercatat di SILAT sebesar 8.255. selanjutnya sebanyak 4.715 anak yang sudah diintervensi dan masih ada sekitar 3.282 anak yang belum diintervensi. Dari catatan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD P-ATS) Kabupaten Blora 2025-2027 menyebutkan bahwa penyebab siswa akhirnya tidak sekolah atau putus sekolah adalah masalah ekonomi apakah karena bekerja atau keluarganya tidak mampu, tingginya kasus perkawinan anak/menikah/mengurus rumah tangga, hamil di luar nikah, berkebutuhan khusus dan sebagainya.

2.3.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yaitu:

1. Tingginya Angka kematian ibu, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita.

Angka kematian ibu, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita di Kabupaten Blora Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2023. 48 balita mengalami gizi buruk, 3571 berstatus gizi kurang, dan 538 berstatus obesitas pada penimbangan serentak Bulan Agustus.

2. Prevalensi stunting masih tinggi

   Hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 menunjukkan, terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia. Di antaranya stunting, wasting, underweight, dan overweight. Stunting atau ukuran badan pendek merupakan salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian pemerintah dan publik karena prevalensinya kini masih cukup tinggi, mencapai 21,2% pada 2023 Berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia). Angka tersebut menempatkan Kabupaten Blora masuk dalam 12 Kabupaten dengan stunting tertinggi di Jawa Tengah. Angka tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa stunting di Indonesia masih tergolong kronis. Sedangkan prevalensi stunting Berdasarkan laporan dari EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di Kabupaten Blora Tahun 2024 sebesar 5,99% (Penimbangan serentak Agustus 2024) turun dari tahun 2023 dengan jumlah balita stunting sebanyak 2832 balita. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 memberi target sebesar 14% untuk persentase stunting. Di Kabupaten Blora total keluarga beresiko stunting tahun 2024 sebanyak 19178 keluarga.

3. Belum semua Penduduk Blora memperoleh atau mendaftar jaminan Kesehatan.

   kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten melalui program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah mencapai 98% dan dengan keaktifan masih 69,2% (belum memenuhi syarat) untuk Universal Health Coverage (UHC).

4. Banyaknya kasus penyakit menular utamanya tuberculosis.

   Kejadian tuberculosis di Blora meningkat dari 136 menjadi 160,47 per 100.000 penduduk di Tahun 2024 dari tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan pasien TBC sudah ada sistim informasi TBC "SI TB", disamping itu juga ada kegiatan screening TBC masif, sehingga penanganan pasien TBC lebih intensif. Ada inovasi juga terkait

kegiatan ini "Ojek Dahak" untuk pasien TBC untuk pemeriksaan dahak & distribusi obat lebih cepat. Pemantauan Minum Obat pasien TBC menjadi kegiatan yang harus intensif dievaluasi. Adanya peningkatan prevalensi TBC cenderung resiko penularan TBC semakin meningkat

2.3.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu:

1. Masih rendahnya kondisi kualitas jalan mantap

   Jalan kondisi mantap mengalami peningkatan dari sebesar 61,28 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 62,34 persen pada tahun 2024. Namun demikian realisasi kondisi jalan mantap ini masih jauh dari target RPJMD sebesar 71 persen. Demikian pula, jalan kondisi baik dari semula 47,28 persen pada tahun 2023, menurun pada tahun 2024 menjadi 43,11 persen.

   Target kemantapan jalan tidak tercapai dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang semakin pesat, kondisi cuaca dan ketersediaan alokasi anggaran yang terbatas mempengaruhi penurunan kondisi jalan.

2. Masih rendahnya jembatan dengan kondisi baik

   Berdasarkan data kondisi jembatan, di Kabupaten Blora terdapat 479 jembatan. Dari jembatan sebanyak itu hanya 3 jembatan dengan kondisi baik, 71 jembatan rusak ringan dan sisanya sebanyak 405 jembatan dalam kondisi rusak sedang, rusak berat dan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa jembatan di Kabupaten Blora memerlukan perhatian yang serius untuk menjaga kelancaran lalu lintas.

3. Masih banyak daerah irigasi yang belum terlayani jaringan irigasi

   Luas total Daerah Irigasi di Kabupaten Blora sebesar 13.351 hektar, yang sudah terbangun jaringan/saluran irigasi seluas 7.186 hektar (53,82%). Sisanya seluas 6.165 hektar belum terbangun jaringan irigasi atau jaringan irigasi dalam kondisi rusak.

4. Belum ada database kondisi drainase kabupaten

   Kegiatan penanganan drainase diampu oleh Bidang Bina Marga,

Bidang Cipta Karya DPUPR, Dinas Rumkimhub. Banyaknya pengampu membuat penyediaan data saling menunggu sehingga data drainase tidak terkelola dengan baik dan kevalidan data tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Masih rendahnya akses air minum yang layak dan aman

   Tahun 2024, rumah tangga mengakses air minum yang layak sebesar 42,99%, rumah tangga mengakses air minum yang aman sebesar 52,31%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang mengakses air minum dibawah standar kesehatan.

6. Masih rendahnya akses sanitasi yang aman, Rumah tangga mengakses sanitasi yang aman pada Tahun 2024 sebesar 5,55%. Hal ini menunjukkan bahwa akses sanitasi masih sangat rendah dari standar keamanan.

7. RTRW belum mengakomodasi kebijakan provinsi dan pusat, dengan ditetapkannya RTRW Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 maka RTRW Kabupaten Blora perlu disesuaikan karena terdapat perubahan kebijakan tata ruang provinsi di wilayah Kabupaten Blora.

8. Belum ada RDTR yang ditetapkan untuk mempercepat investasi dan proses perijinan, hingga saat ini dari 16 kecamatan belum ada yang mempunyai regulasi penataan ruang yang sah sehingga perlu percepatan untuk penetapannya agar investasi tidak terhambat

2.3.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dan penyediaan lingkungan tempat tinggal di Kabupaten Blora tidak lepas dari permasalahan. Kurangnya penanganan di Kawasan kumuh di Kabupaten Blora terlihat pada akhir tahun 2024 kawasan kumuh masih menyisakan 324,44 Ha dari luas awal 369,28 ha. Luas kawasan yang telah tertangani baru tercapai 12% dari luas keseluruhan. Angka tersebut tergolong rendah mengingat jenis kawasan kumuh di Kabupaten Blora yang tergolong ringan hingga sedang. Beberapa penyebab rendahnya penanganan kumuh yaitu dari segi komitmen penanganan dan pendanaan yang semakin berkurang. Kurangnya

komitmen dan kerja sama dalam pengentasan kumuh terlihat dari lokasi pembangunan yang tidak berada di lokasi kumuh atau pembangunan di satu instansi hanya mengurangi aspek tertentu dan masih terdapat aspek penyumbang kekumuhan lainnya. Sedangkan, kekumuhan terdiri dari tujuh aspek yang terbagi di beberapa kewenangan instansi. Selain itu, kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi sangat sulit untuk mendapat intervensi dikarenakan tidak ada penaganggaran dari pusat dan provinsi.

2. Tingginya jumlah Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) di Kabupaten Blora hingga mencapai 80.890 Unit pada akhir Tahun 2024. Besaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) setara dengan 32% dari jumlah rumah di Kabupaten Blora berdasarkan pada basis data 2015 sehingga kemungkinan kondisi aslinya melebihi jumlah tersebut. Sementara itu, penanangan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) sangat bergantung dengan pendanaan di luar APBD yaitu dari APBN, sehingga apabila alokasi APBN berkurang maka akan kesulitan dalam penanganan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) di Kabupaten Blora.
3. Kurangnya efektivitas dalam proses penanganan rumah rusak akibat bencana. Pada Tahun 2023 terdapat rumah rusak akibat bencana tanah longsor dan angin puting beliung. Sebagian penanganan diserahkan pada pendanaan lain yang lebih cepet turun ke masyarakat terdampak sedangkan sebagian lainnya baru bisa dianggarkan pada Tahun 2024 atau pada tahun setelahnya. Selanjutnya proses yang berlaku adalah harus tersusunnya surat keterangan bencana alam sebagai persyaratan, akan tetapi bencana dengan skala kecil memiliki kesulitan dalam penyusunannya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU). Hal tersebut dapat dilihat di hampir seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Blora. Salah satunya, berupa penutupan saluran drainase secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai bangunan hunian atau teras rumah serta kurangnya normalisasi saluran drainase skala lingkungan. Alih fungsi dan tidak terjaganya drainase menyebabkan limpasan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan permasalahan baru berupa banjir.
5. Belum terdapat kebijakan penanganan backlog di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora memiliki backlog 13.342 penghunian atau 3.14%

terhitung dari jumlah rumah yang terdata di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu backlog sendiri belum memiliki nomenklatur khusus dalam skema program/kegiatan/sub kegiatan urusan perumahan dan pemukiman. Sehingga permasalahan backlog saat ini masih memerlukan pendalaman mulai dari pendataan dan perencanaan kedepan serta koordinasi vertikal dalam memberikan gambaran backlog di Kabupaten Blora.

2.3.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat yaitu:

1. Kurangnya sumber daya penyelenggaraan layanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini diindikasikan dari jumlah Polisi Pamong Praja yang menurun di tahun 2024 sebanyak 134 orang sedangkan di tahun 2023 sebanyak 171 orang. Selain itu terjadi peningkatan angka kriminalitas di tahun 2024 menjadi 166 kasus, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 164 kasus.
2. masih terdapat akses jalan rusak berat mengakibatkan terdapat 2 kejadian kebakaran tidak tertangani / gagal *respons time* dikarenakan terkendala akses jalan yang rusak.
3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana. Kabupaten Blora terletak di wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Wilayah Blora memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan. Kondisi geografis ini membuat Blora rentan terhadap bencana alam, sehingga penting bagi warga negara untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang potensi bencana dan cara menghadapinya dan memiliki tantangan besar dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang potensi bencana kepada warga negaranya. Dengan kondisi geografis yang beragam dan rentan terhadap bencana alam, penting bagi warga negara untuk memperoleh informasi yang

memadai tentang cara menghadapi bencana. Namun, masih banyak warga negara yang belum memperoleh layanan informasi rawan bencana yang memadai, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses ke informasi dan meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana."

4. Permasalahan Desa Tanggap Bencana (Destana) di Kabupaten Blora: Permasalahan Destana di Kabupaten Blora. Desa Tanggap Bencana (Destana) di Kabupaten Blora masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi:
    a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Blora masih belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya Destana. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Destana.
    b. Keterbatasan Sumber Daya: Pembentukan Destana memerlukan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, maupun sumber daya material. Namun, beberapa desa di Kabupaten Blora masih memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga proses pembentukan Destana menjadi terhambat.
    c. Kurangnya Kapasitas Aparat Desa: Aparat desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan Destana. Namun, beberapa aparat desa di Kabupaten Blora masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pembentukan Destana.
    d. Keterbatasan Anggaran: Pembentukan Destana memerlukan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait. Namun, beberapa desa di Kabupaten Blora masih memiliki keterbatasan anggaran, sehingga proses pembentukan Destana menjadi terhambat.

2.3.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yaitu:

1. Rendahnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):
   - Dari 63.444 orang PPKS pada tahun 2022, hanya 0,87% yang tertangani. Hal ini menunjukkan penanganan yang masih sangat minim.
   - Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hanya sebesar 7%.
   - Persentase PMKS yang memperoleh program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya 7%.
2. Tantangan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial:
   - Target pelayanan tanggap dan pasca bencana untuk korban belum sepenuhnya terpenuhi.
   - Masih banyak kategori PPKS yang tidak tertangani akibat kendala akurasi data dan keterbatasan sumber daya.
3. Keterbatasan Peran Organisasi Sosial :
   - Meski keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) telah mencapai 80% , masih ada desa yang belum memiliki WKSBM, sehingga penanganan masalah sosial kurang optimal.
4. Rendahnya Sarana dan Prasarana untuk Rehabilitasi Sosial :
   - Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan tuna sosial di luar panti masih sangat terbatas dengan capaian yang fluktuatif.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan, akurasi data, dan penguatan peran masyarakat dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yaitu:

1. Terdapat masyarakat yang belum bekerja

   Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Blora pada tahun 2022 sebanyak 519.616 dan pada tahun 2023 sebanyak 568.103, terdapat pertambahan angkatan kerja baru sebanyak 48.487. Angkatan kerja

yang belum bekerja sebanyak 19.243 pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 sejumlah 17.627. Angkatan kerja yang belum bekerja juga dapat disebut Pencari Kerja. Pencari kerja yang berjumlah sebagaimana disebutkan perlu ditanggani agar memberikan dampak yang positif kepada sosial dan masyrakat

2. Adanya potensi konfilik pemberi kerja dan tenaga kerja

   Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja di Kabupaten blora sebanyak 500.373 pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 50.103 menjadi 550.476. Hubungan tenaga kerja dan pemberi kerja merupakan hubungan yang memiliki potensi konstruktif yang harus ditingkatkan dan potensi dekstruktif yang harus dimitigasi. Potensi deskruktif dapat berasal dari pemberi kerja ataupun tenaga kerja, oleh karena itu hubungan baik antara kedua harus tetap dijaga supaya memberikan manfaat utamanya kepada pemberi kerja dan tenaga kerja, dan umumnya memberikan dampak yang positif kepada Kabupatan Blora.

2.3.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Rendah :
   - Capaian IDG Kabupaten Blora tahun 2022 sebesar 62,64, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (76,69) dan Provinsi Jawa Tengah (73,78). Penurunan ini menunjukkan masih minimnya kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja, keterwakilan perempuan di parlemen, dan pengambilan keputusan.
2. Partisipasi Perempuan yang Rendah :
   - Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah hanya mencapai 5%, jauh dari angka ideal 20%. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam peran strategis pemerintah .
3. Minimnya Infrastruktur Layanan (layanan apa?):
   - Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih terbatas, hanya terdapat 2 unit di tingkat

kecamatan dan kabupaten, sehingga kurang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

4. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak :
   - Pada tahun 2022 terdapat 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun sudah ada penanganan hingga 100%, frekuensi kejadian masih cukup tinggi dan menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan.
5. Keterbatasan Sumber Daya (sumber daya apa?) untuk Anak :
   - Terdapat tantangan dalam pemberdayaan anak, seperti kebutuhan peningkatan jumlah kelompok anak atau forum anak yang saat ini ada di 16 lokasi. Perlu ada penguatan kapasitas dan cakupan.
6. Kurangnya Kesadaran Gender dalam Perencanaan :
   - Meskipun 90% SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan, implementasinya masih perlu diperkuat untuk mencapai pembangunan yang inklusif.

2.3.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan yaitu:

1. Belum optimal melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan teknologi sumber daya lokal dan masih minimnya penerapan teknologi non beras yang bisa mendukung program ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan, perihal tersebut dapat ditunjukkan pada angka prevalensi ketidakcukupan pangan (presentase penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar) tercantum sebesar 11,27 % di tahun 2024 dan masih sangat jauh diatas target amanat Perpres No. 111 Tahun 2022 yang mentargetkan tahun 2024 sebesar 5%.
2. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk membangun ketahanan pangan lokal, yang ditunjukan pentinganya akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi, seimbang dan Aman. Ini terlihat menurunnya skor Pola Pangan Harapan dari 93,9 di Tahun 2023 menjadi 89,9 di Tahun 2024.
3. Pelaksanaan penyaluran cadangan pangan masih belum maksimal, cadangan pangan ini terdiri beras, minyak goreng, gulam pasir. Penyaluran ini terlihat dari data stok akhir tahun 2023 terinci beras

35.070 kg, gula pasir 507 kg, minyak goreng 257 liter dan akhir tahun 2024, beras 42.428 kg, gula pasir 3.852 kg, minyak goreng 3.897 liter.

4. Banyaknya lumbung pangan yang non aktif sehingga menyebabkan kelembagaan pangan di desa-desa tidak optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah berkelanjutan dan resilien terhadap kemungkinan bencana yang terjadi. Banyaknya lumbung pangan yang tidak aktif sejumlah 19 unit dari 24 unit yang telah berdiri.

2.3.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan yaitu:

Terdapat alih fungsi lahan di Kabupaten Blora, yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (misalnya menjadi kawasan industri atau permukiman), hal ini tidak hanya menjadi masalah pertanahan karna juga dapat berdampak pada ketahanan pangan, pengalihan fungsi tanah ini juga seringkali disertai dengan permasalahan legalitas dan pengaturan tata ruang.

2.3.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Penurunan Kualitas Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dalam lima tahun terakhir yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pencemaran pada sumber air, fluktuasi debit air akibat cuaca dan iklim, perilaku penggunaan air dari masyarakat serta erosi dan sedimentasi pada badan air serta penyediaan ruang terbuka hijau dan penanganan terhadap lahan kritis yang akan mendukung upaya konservasi air.
2. Indeks Pencemar Udara menjadi tinggi saat terjadi kondisi khusus seperti badai el nino atau banyaknya kebakaran hutan yang terjadi.
3. Beberapa Area restorasi dan Rehabilitasi yang diserahkan kepada masyarakat tidak terpelihara keberlanjutannya.
4. RTH yang tertangani baru 0,73 % dari luas RTH
5. penyediaan Sarpas Penyimpanan Sementara Limbah B3 enggan dipenuhi oleh badan usaha.

6. setelah Pertek disetujui, badan usaha tidak memiliki anggaran untuk membuat IPAl. atau setelah memiliki IPAL tidak dilakukan pengujian keluaran cairannya.
7. MHA di Kabupaten Blora belum di naungi Perda.
8. Perluasan TPA dibutuhkan untuk menampung sampah yang semakin bertambah, sedangkan Luas daerah pelayanan tidak sebanding dengan sarana prasarana

2.3.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

1. Rendahnya Kemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah.

   Kemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pemerintah masih rendah, sampai dengan tahun 2024 belum ada lembaga pemerintah yang menggunakan data kependudukan sesuai nama dan alamat untuk menunjang dalam mengambil keputusan. Hal tersebut disebabkan karena persyaratan lembaga pemerintah yang dapat menggunakan data kependudukan sesuai nama dan alamat yaitu lembaga pemerintah yang sudah menerapkan ISO 27001.
2. Cakupan Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) masih rendah.

   Tujuan kepemilikan KIA menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2024 yaitu pendataan anak, melindungi hak anak, memenuhi hak konstitusional anak, memudahkan untuk mengurus dokumen kependudukan, dan memudahkan untuk mendapatkan pelayanan publik. Cakupan kepemilikan KIA Kabupaten Blora tahun 2024 yaitu 64,59 persen dengan target pada tahun 2024 yaitu 70,4 persen. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA Kabupaten Blora untuk memudahkan anak mengakses layanan publik, khususnya pendidikan formal pada level yang lebih lanjut.

2.3.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

1. Masih rendahnya Kategori Desa Mandiri.

   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berkelanjutan yaitu menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Tahun 2024, Kabupaten Blora sudah tidak terdapat desa tertinggal, namun untuk desa mandiri masih rendah. Jumlah desa mandiri Kabupaten Blora tahun 2024 sejumlah 15 desa dari 271 desa. Persentase desa mandiri tahun 2024 yaitu 5,54 persen, sedangkan persentase desa mandiri nasional tahun 2024 yaitu 23,02 persen.
2. Tingginya Bumdes Kategori dasar/ perintis.

   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa tujuan pendirian Bumdes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Namun, jumlah bumdes yang paling banyak yaitu bumdes dengan kategori dasar/perintis. Jumlah Bumdes kategori dasar/ perintis sebanyak 232 bumdes dari 270 bumdes atau 85,93 persen, sehingga belum dapat dirasakan manfaat bumdes untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga yaitu:

1. Rendahnya Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR).

TFR Kabupaten Blora tahun 2024 yaitu 2,01 yang menunjukkan bahwa angka TFR Kabupaten Blora berada dibawah standar TFR yang telah ditetapkan BKKBN yaitu 2,1. Rendahnya TFR menjadi perhatian untuk pengendalian penduduk agar tetap terjaga di angka 2,1.

2. Tingginya ASFR usia 15-19 tahun.

   ASFR usia 15-19 tahun digunakan untuk memantau masalah kelahiran remaja. Target ASFR Nasional tahun 2024 yaitu 18 kelahiran per 1.000 perempuan. ASFR Kabupaten Blora yaitu 32,5 dengan target tahun 2024 sebesar 23. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelahiran remaja di Kabupaten masih tinggi

2.3.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu:

1. Belum maksimalnya kondisi sarana dan prasarana jalan yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu lalu lintas. Pada akhir tahun 2024 sarana dan prasarana perhubungan dalam kondidi baik baru mencapai 93% dari keseluruhan yang terpasang. Hal tersebut memperlihatkan sarana dan prasarana yang terpasang mengalami kerusakan dan belum dapat tertangani dengan baik. Sejalan dengan pembangunan baru ruas jalan di Kabupaten Blora di beberapa titik juga belum disertai dengan pemasangan sarana dan prasarana jalan.
2. Kurangnya moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Blora dari segi kuantitas, variasi moda transportas dan belum saling terintegrasi satu sama lain. Jumlah trayek angkutan penumpang di Kabupaten Blora sebanyak 300 armada, akan tetapi yang masih aktif beroperasi saat ini tinggal sebanyak 70 armada dikarenakan sudah banyak angkutan dengan kondisi rusak dan melewati masa umur operasi. Selain itu, ijin trayek baru terpenuhi 50% yang menunjukkan kurang lengkapnya rute transportasi masal di Kabupaten Blora. Belum terintegrasinya moda transportasi di Kabupaten Blora terlihat dari belum terpenuhinya akses menuju dan dari terminal utama, stasiun serta bandara, sehingga mayoritas kendaraan masih menggunakan kendaraan pribadi.
3. Belum terbentuknya kesadaran di masyarakat dalam menjaga keselamatan lalu lintas saat berkendara. Kasus kecelakaan lalu lintas

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengingat Tahun 2023 tercatat 450 kecelakaan menjadi 520 (sumber data Satuan Lalu Lintas Polres Blora) kecelakaan pada Tahun 2024. Sementara itu, kelengkapan fasilitas jalan (rambu, marka dan guardgrill) pada tahun 2024 sudah mencapai 93%. Perbandingan tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang menyebabkan kenaikan angka kecelakaan salah satunya kesadaran masyarakat. Belum terciptanya kesadaran untuk berlalu lintas merupakan ancaman bagi keselamatan berkendara penggunajalan dan sekitarnya.

4. Regulasi mengenai KIR belum tersusun sehingga banyak pemilik kendaraan angkutan barang yang KIR-nya sudah tidak berlaku akan tetapi tidak segera melaksanakan pengujian kembali untuk pembaharuan. Hal tersebut akan berdampak pada kendaraan yang mengalami kerusakan dan tidak layak tetap beroprasi dan meningkatkan bahaya di jalan. Selain itu, dalam jangka waktu lebih lama akan meningkatnya pencemaran udara akibat dari kendaraan. Regulasi diperlukan untuk mengatur para pemilik kendaraan umum untuk lebim memperhatikan dampak pentingnya uji KIR.

2.3.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yaitu:

1. Belum adanya Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK.

    a. Aspek Penerapan Manajemen SPBE (nilai 1,38) dan Aspek Audit TIK (nilai 1,67) tercakup dalam Domain Manajemen SPBE, terendah dibandingkan dengan tiga domain lain yang menjadi penentu nilai indeks SPBE Kabupaten Blora tahun 2024 yaitu 3,28 dengan predikat “Baik”. Secara keseluruhan penerapan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Kabupaten Blora.
    b. Penerapan Manajemen SPBE meliputi 8 aspek yaitu : Kebijakan dan Perencanaan; Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); Infrastruktur Teknologi; Integrasi Sistem; Pengelolaan Data dan Informasi; Keamanan Informasi; Pelayanan Publik; dan Evaluasi dan Pemeliharaan.

c. Pelaksanaan Audit TIK meliputi Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE.

2. Rendahnya nilai Self Assesment Quisioner (SAQ) dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.

   a. SAQ merupakan salah satu indikator penilaian yang dipertimbangkan dalam monitoring dan evaluasi Badan Publik untuk menentukan Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
   b. Nilai SAQ Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2024 hanya mencapai 4,5 (dari 100). Meskipun demikian, nilai Skor KIP tahun 2024 sudah tergolong tinggi yaitu 92,76 yang termasuk dalam kategori “Informatif” karena terbantu oleh indikator lainnya.

2.3.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu:

1. Masih lemahnya kualitas administrasi usaha Koperasi;
2. Permasalahan dalam administrasi usaha koperasi di Kabupaten Blora muncul karena rendahnya partisipasi koperasi dalam melaksanakan audit. Hanya beberapa koperasi besar yang bersedia melakukan audit, sementara sebagian besar koperasi menilai biaya pengauditan relatif mahal. Koperasi beranggapan bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk audit lebih baik digunakan untuk mendukung kegiatan usaha atau operasional koperasi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, terutama bagi koperasi kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan finansial.
3. Mayoritas KSP di Kabupaten Blora masih berkategori belum sehat;
4. Kabupaten Blora memiliki total 798 koperasi yang terdaftar, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 265. Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara konsisten selama tiga tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024, hanya 136 koperasi yang berhasil melaksanakan RAT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 koperasi dikategorikan sebagai koperasi sehat. Koperasi sehat merupakan koperasi yang mampu mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mencapai

kemandirian, akuntabilitas, serta memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah koperasi yang berkinerja baik, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kesadaran bagi koperasi lainnya agar dapat memenuhi standar kesehatan dan keberlanjutan organisasi.

5. Banyak UMKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan;
6. Banyak UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, seperti ketiadaan agunan, catatan keuangan yang tidak tertata, atau minimnya pemahaman tentang produk keuangan formal. Selain itu, persepsi risiko yang tinggi dari pihak lembaga keuangan terhadap UMKM juga turut menghambat proses penyaluran kredit. Padahal, akses terhadap permodalan yang terjangkau dan berkelanjutan dari lembaga keuangan formal dapat menjadi kunci peningkatan produktivitas, perluasan usaha, dan peningkatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian.
7. Sistem produksi UMKM masih sederhana;
8. Kabupaten Blora memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, namun sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan sistem produksi yang sederhana dan tradisional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Penggunaan sistem produksi yang sederhana oleh sebagian besar UMKM di Blora menjadi salah satu faktor stagnannya pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih tinggi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM melalui adopsi teknologi yang lebih modern.
9. Banyak UMKM yang belum memiliki kompetensi serta pengetahuan dalam menghadapi IPTEK;
10. Meskipun Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) telah melaksanakan berbagai program pembinaan, termasuk pelatihan digital marketing dan fasilitasi akses ke pasar modern seperti Bravo dan Indomaret, namun permasalahan utama yang dihadapi UMKM Blora tetap belum teratasi. Rendahnya daya saing produk UMKM yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak

konsisten dan terbatasnya jangkauan pemasaran menjadi tantangan utama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Blora.

11. Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap penguasaan teknologi dan pemenuhan sarana / prasarana usaha;
12. Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blora masih menghadapi tantangan ganda, yaitu keterbatasan teknologi dan sarana prasarana. Ketergantungan pada metode produksi tradisional serta kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi membuat UMKM sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, keterbatasan infrastruktur fisik juga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha, terutama untuk UMKM yang bergerak di sektor produksi.
13. Lemahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha
14. Banyak pelaku UMKM di Blora mengeluhkan sulitnya mengakses pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, seperti bank. Persyaratan yang ketat, seperti agunan dan riwayat kredit, seringkali menjadi penghalang utama. Sebagian besar UMKM di Blora berskala mikro dengan aset terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Di sisi lain, Koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat juga menghadapi masalah serupa. Koperasi di Blora seringkali kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan stakeholders lainnya. Pemerintah Kabupaten Blora perlu meningkatkan sosialisasi tentang program-program pembiayaan yang tersedia, sekaligus mempermudah akses bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu, pelatihan literasi keuangan dan pendampingan usaha juga menjadi hal penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan mengakses sumber permodalan.

2.3.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi di Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Mengacu data tahun 2023 statistik investasi Jawa Tengah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi Kabupaten Blora pada tahun 2023 dengan rincian PMDN mencapai Rp.120.665,10 juta dan PMA mencapai

Rp.19.081,62 juta. Berdasarkan realisasi tersebut Kabupaten Blora menempati peringkat 31 untuk PMA dan peringkat 33 untuk PMDN.

Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi merupakan salah satu dampak rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Blora. Kajian potensi yang komprehensif, merupakan peluang investasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Investor memiliki informasi yang cukup untuk menilai potensi keuntungan dan risiko dari suatu proyek atau sektor tertentu melalui kajian potensi investasi. Tanpa data dan analisis yang tepat daya tarik investasi akan berkurang. Kajian potensi yang lengkap dan mendalam sangat penting untuk menarik investor, terutama yang berskala besar.

Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah: (1) Prosedur yang panjang dan berbelit-belit seringkali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Hal ini bisa menghambat para investor dalam memulai atau melanjutkan investasi. (2) proses pelayanan melibatkan berbagai instansi dan lembaga yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kurangnya keterpaduan ini dapat memperlambat proses dan membingungkan investor. (3) sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan terbatas, maka kualitas pelayanan belum maksimal. (4) sarana prasarana yang belum optimal dalam mendukung proses perijinan atau pelayanan penanaman modal dapat menghambat efisiensi dan transparansi. (5) regulasi atau peraturan yang sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian bagi para investor dan pelaku usaha, yang berujung pada ketidaktertarikan untuk berinvestasi. (6) kurangnya perlindungan hukum terhadap investor dapat membuat proses penanaman modal menjadi lebih berisiko dan tidak menarik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi birokrasi, penguatan sistem digitalisasi, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyederhanaan prosedur perijinan dan penanaman modal yang transparan dan jelas.

2.3.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu:

1. Penurunan jumlah pemuda berprestasi disebabkan oleh: Pada tahun 2023, diadakan seleksi Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Blora, namun pada tahun 2024 tidak ada seleksi tersebut.
2. Penurunan perolehan medali meskipun melebihi target disebabkan oleh:
    - Beberapa cabang olahraga tidak menghitung perolehan medali karena jumlah peserta kurang dari lima kabupaten.
    - Beberapa atlet mengikuti Training Center (TC) PON sehingga tidak diperbolehkan untuk bertanding.
    - Beberapa atlet sudah melewati batas usia pelajar.
    - Pada tahun 2023, dilaksanakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
    - Penurunan jumlah medali Tingkat Provinsi disebabkan oleh: Pada tahun 2023, dilaksanakan Porprov (event yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali), sementara pada tahun 2024 tidak ada Porprov.

Secara keseluruhan, pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga Kabupaten Blora menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam pembinaan organisasi, pencapaian medali, dan pemberdayaan pemuda untuk berwirausaha. Namun, beberapa indikator seperti kelompok pemuda produktif masih membutuhkan perhatian lebih untuk peningkatan ke depan.

2.3.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik yaitu:

1. Kurangnya Integrasi Data;
2. Kurangnya Kapasitas Pengelola Data Sektoral;
3. Belum Optimalnya Kemudahan Akses Publik Terhadap Data Sektoral.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2024, yaitu 2,30 dengan kategori “Cukup”. Aspek dalam penilaian IPS terdiri dari Prinsip SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional yang secara keseluruhan masih rendah terutama Kualitas Data.

2.3.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yaitu:

1. Sarana dan prasarana pendukung kinerja yang belum memadai.
2. Kurangnya Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi menyebabkan rendahnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.
   - Hal ini dibuktikan dengan menurunnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menjadi 31,16 pada tahun 2024, sementara pada tahun 2023 sebesar 51,47.
   - Aspek-aspek yang mempengaruhi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah diantaranya adalah Tata Kelola Keamanan Informasi; Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi; Kerangka Kerja Keamanan Informasi; Pengelolaan Aset Informasi; dan Teknologi dan Keamanan Informasi.

2.3.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yaitu:

1. Stabilitas dan Tantangan:
   Beberapa indikator, seperti jumlah sarana seni dan budaya serta kegiatan pelestarian adat, cenderung stabil tanpa peningkatan. Namun, jumlah grup kesenian menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
2. Fluktuasi SDM dan Cagar Budaya Baru:
   Penurunan jumlah SDM kesenian serta cagar budaya yang baru teridentifikasi dapat menjadi perhatian khusus untuk pengelolaan budaya berkelanjutan.
3. Fokus pada Kajian Seni:
   Kajian seni yang belum dilakukan selama dua tahun terakhir mencerminkan adanya potensi yang belum digarap, meskipun fasilitasi seni telah dilakukan secara penuh.
4. Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya:
   Kenaikan persentase pelestarian cagar budaya menjadi 60% pada tahun 2024 adalah pencapaian yang penting dan patut diapresiasi.

2.3.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kebutuhan gedung sekretariat yang terpisah dari gedung perpustakaan, Sesuai dengan peraturan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas), kantor sekretariat tidak boleh berada dalam satu atap dengan perpustakaan yang dibangun menggunakan anggaran DAK, karena gedung perpustakaan diperuntukan khusus untuk pelayanan. Selain itu, belum adanya sertifikat layak fungsi untuk memastikan kelayakan gedung perpustakaan juga menjadi hambatan dalam pengembangan fasilitas ini. Adapun permasalahan yang lainnya terdiri dari;

1. **Koleksi Perpustakaan yang Belum Memadai dan Kurang Terupdate** (Perlu adanya upaya untuk memperbarui koleksi perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru).
2. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai** (Sarpras perpustakaan masih perlu perbaikan dan penambahan agar dapat mendukung kegiatan pelayanan dan pemanfaatan informasi secara optimal).
3. **Kurangnya Komitmen dari Kepala Desa dan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan Desa yang Terbatas** (Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan komitmen kepala desa dalam pengelolaan perpustakaan desa serta penambahan jumlah tenaga pengelola yang kompeten).
4. **Kurangnya Promosi dan Sosialisasi tentang Perpustakaan Desa** (Perlu adanya program promosi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan desa serta menarik minat masyarakat untuk mengakses layanan perpustakaan).
5. **Belum Tersedianya Payung Hukum yang Mengatur Pengelolaan Perpustakaan Desa** (Perlunya pembentukan kebijakan atau regulasi yang jelas terkait pengelolaan perpustakaan desa, guna memberikan kepastian hukum dalam operasional dan pengembangan perpustakaan)

2.3.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan yaitu:

1. **Keterbatasan SDM Arsiparis di Lembaga Kearsipan Daerah** (Saat ini terdapat 4 Arsiparis, yang sangat terbatas untuk melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan pada 43 Perangkat Daerah dan desa-desa se-Kabupaten Blora, sehingga perlu penambahan tenaga profesional di bidang kearsipan).
2. **Ketiadaan Tenaga Arsiparis di Beberapa Perangkat Daerah** (Saat ini hanya ada 13 Arsiparis yang tersebar di Kabupaten Blora, sehingga pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah masih membutuhkan perhatian dan penambahan tenaga arsiparis).
3. **Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah** (Perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah agar lebih efisien dan efektif).
4. **Kurangnya Kesadaran dari Perangkat Daerah untuk Menyerahkan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah** (Perangkat Daerah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah untuk menjaga kelestarian arsip sebagai aset berharga).
5. **Kurangnya Koordinasi Antara Perangkat Daerah dan Bagian Umum terkait Pengelolaan Arsip Event Penting** (Diperlukan peningkatan koordinasi antara perangkat daerah dan Bagian Umum untuk memastikan arsip dari event-event penting dapat dikelola dan disimpan dengan baik di Lembaga Kearsipan Daerah agar dapat dilayani kepada masyarakat dengan maksimal).

Dengan pengembangan kedua aspek ini, diharapkan pengelolaan arsip di daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Produksi perikanan di Kabupaten Blora juga masih tergolong rendah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya.hal in i disebabkan karena masih terbatasnya lokasi perairan tangkap, sedangkan untuk perairan budidaya disebabkan masih rendahnya pembudidaya ikan dan sarana serta prasarananya dan pasokan air sehingga hanya mampu memanfaatkan daerah genangan waduk sebagai sarana budidaya perikanan. Data tebar benih yang dilaksanakan berada di lahan waduk randugunting, tempuran, rowo karangjati, greneng. Mahalnya harga pakan ikan yang juga telah menjadi isu nasional, di Tahun 2024 harga sudah mencapai Rp13.000/kg dan naik lagi menjadi Rp15.000/kg di Tahun 2025.
2. Produksi perikanan di Kabupaten Blora belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi ikan dan belum mampu melaksanakan pembibitan benih ikan, selain itu produksi perikanan budidaya sebagian besar dari ikan lele, sementara ini benih bibit ikan dipasok seperti nila dan gurame harus didatangkan dari Kabupaten Ngawi, Pati, Magelang dan Grobogan.
3. Menurunnya jumlah unit Industri pengolahan ikan yang, terlihat pada tahun 2024 dari 39 unit menjadi 31 unit. Dari hasil survey didapati terjadinya penurunan unit usaha disebabkan kecenderungan yang monoton, kurang diminati, peralatan masih manual/tradisional serta minimnya modal usaha.

2.3.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu:

1. **Keterbatasan Infrastruktur Pendukung**

   Beberapa obyek wisata unggulan mungkin belum memiliki Infrastruktur memadai, seperti akses jalan yang sulit, fasilitas umum yang kurang (toilet, tempat istirahat), serta minimnya sarana transportasi publik menuju lokasi wisata.

2. **Promosi dan Pemasaran yang Terbatas**

   Meskipun semua obyek wisata unggulan dilaporkan telah dipromosikan, strategi promosi yang kurang kreatif dan terbatasnya penggunaan media digital dapat menghambat daya tarik wisatawan, terutama wisatawan dari luar daerah.

3. **Minimnya Keterlibatan Komunitas Lokal**

   Kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, seperti melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dapat menghambat upaya pelestarian dan pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

4. **Tantangan Pendanaan**

   Pengembangan fasilitas dan promosi membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Kabupaten Blora menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sehingga pengembangan destinasi wisata unggulan tidak berjalan optimal.

5. **Pengelolaan yang Belum Terintegrasi**

   Pengelolaan wisata unggulan sering kali bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dengan sektor lainnya, seperti transportasi, UMKM, dan kebudayaan. Hal ini dapat mengurangi daya saing destinasi wisata.

6. **Minimnya Daya Tarik Wisatawan Menginap**

   Berdasarkan data, rata-rata lama tinggal wisatawan hanya 0,5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi wisata unggulan belum mampu menawarkan pengalaman yang cukup menarik untuk memperpanjang durasi kunjungan wisatawan.

7. **Kurangnya Event Wisata yang Konsisten**

   Meskipun jumlah event wisata meningkat dari tahun ke tahun, konsistensi dalam penyelenggaraan event berskala besar atau internasional masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menarik lebih banyak wisatawan.

8. **Kerusakan Lingkungan dan Kurangnya Kesadaran**

   Beberapa destinasi mungkin menghadapi masalah kerusakan lingkungan akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan atau

perilaku wisatawan yang kurang peduli pada kelestarian alam dan budaya.

2.3.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yaitu;

1. Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab berkurangnya luas lahan produktif, sehingga menurunkan kapasitas produksi pangan. Perlu dilakukan penetapan LP2B untuk mempertahankan lahan sawah tetap Lestari.
2. Kebutuhan air baku irigasi masih kurang, dari luas sawah 46.593 hektar (BPS Kabupaten Blora) hanya sekitar 15.218 hektar atau 33% sawah yang beririgasi selebihnya sawah tadah hujan.
3. Jalan usaha tani masih belum bisa menjangkau seluruh sawah, dari 989 sebaran lokasi sawah hanya tersedia 122 JUT yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian.
4. Kurangnya Alsintan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Cultivator baru tersedia 266 unit untuk lahan tembakau 3.200 hektar, lahan cabai 2.110 hektar dan lahan bawang merah 159 hektar. Handtraktor tersedia 709 unit dan combine harvester tersedia 68 unit untuk luas tanam padi 92.176 hektar.
5. Keterbatasan kuota pupuk bersubsidi yang masih rendah menambah beban petani dalam meningkatkan hasil panen. Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora Tahun 2024 sebesar; Urea: 65.815 ton, NPK: 50.754 ton dan Organik: 40.000 ton.
6. Permasalahan bidang kesehatan hewan adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang muncul kembali, penanganan PMK perlu langkah-langkah yang berkelanjutan, seperti:
    a. Pengobatan hewan ternak yang terkena kasus PMK perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak.
    b. Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak di titik-titik perbatasan wilayah Kabupaten Blora, di pasar hewan Blora dan Randublatung.
    c. Vaksinasi PMK pada ternak untuk mengebalkan ternak perlu ditingkatkan alokasinya.

7. Jumlah SDM kesehatan hewan yang hanya 22 orang, masih kurang untuk melayani 16 kecamatan se-Kabupaten Blora.
8. Pelayanan kesehatan hewan, yang ujung tombaknya di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), sarana dan prasarana yang memadai baru tersedia di 3 Puskeswan yaitu: Puskeswan Blora (membawahi 6 kecamatan), Puskeswan Kunduran (membawahi 5 kecamatan) dan Puskeswan Cepu (membawahi 5 kecamatan), sehingga perlu ditingkatkan pelayanannya.
9. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) Cepu yang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Blora perlu direnovasi karena kondisinya tidak memadai sesuai standar aturan yang ada. Dan pemotongan hewan di luar milik Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan agar sesuai standart aturan yang berlaku.

2.3.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan yaitu:

2.3.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan energi dan sumber daya mineral dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, industri dan pembangunan infrastruktur. Permasalahan ESDM yang memerlukan perhatian di Kabupaten Blora, yaitu:

1. Masih rendahnya pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam bauran energi.
2. Kurangnya pemahaman penambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*good mining practice*). Masih ditemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan di wilayah Kabupaten Blora. Seperti kegiatan pertambangan pasir kuarsa di Desa Ngampel Kecamatan Blora yang beroperasi tanpa adanya izin operasional.
3. Masih perlunya peningkatan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam menjaga konservasi air. Terutama untuk wilayah Kabupaten

Blora di sekitar Sungai Bengawan Solo (Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Kradenan) yang memanfaatkan air tanah dalam untuk kegiatan pertanian. Perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang intensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan degradasi lingkungan.

2.3.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan yaitu:

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien;

   Kabupaten Blora, sebagai salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, masih menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai. Jalan-jalan di beberapa wilayah Blora, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, masih dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini menyebabkan proses distribusi barang menjadi lambat dan biaya transportasi meningkat. Selain itu, fasilitas penyimpanan (gudang) yang memadai juga masih terbatas, sehingga seringkali terjadi penumpukan atau kekurangan stok di titik-titik distribusi tertentu.

   Selain infrastruktur, sistem logistik yang belum terintegrasi juga menjadi kendala. Banyak pelaku distribusi, baik dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer, masih bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik. Akibatnya, sering terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.
2. Masih terbatasnya cakupan wilayah pemantauan harga dan stok kebutuhan dan barang pokok disebabkan oleh ketersediaan sarpras dan SDM yang terbatas;

   Saat ini, cakupan wilayah pemantauan harga dan stok di Kabupaten Blora masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana transportasi dan teknologi yang mendukung proses pengumpulan data. Selain sarpras, keterbatasan SDM juga menjadi tantangan serius. Jumlah petugas yang bertugas memantau harga dan stok barang pokok masih terbatas, sementara wilayah yang harus dijangkau cukup luas.

3. Kurangnya tenaga ahli di bidang perdagangan (PPNS perlindungan konsumen) dan kemetrologian (PPNS kemetrologian, penera ahli, penera dan pengamat tera);

   Keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian di Kabupaten Blora menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpotensi merugikan konsumen.
4. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk lokal;

   Masalah pertama yang dihadapi adalah kualitas produk yang belum konsisten. Banyak pelaku usaha lokal, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menghadapi kendala dalam menjaga standar mutu produk. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang proses produksi yang baik, kurangnya akses terhadap teknologi modern, dan minimnya pendampingan dari pihak terkait. Akibatnya, produk yang dihasilkan seringkali tidak memenuhi standar pasar yang lebih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan produk dari daerah lain.

   Selain mutu, desain produk juga menjadi kendala besar. Banyak produk lokal Blora yang sebenarnya memiliki nilai jual tinggi, tetapi kurang menarik secara visual karena desain yang kurang inovatif. Kurangnya kreativitas dalam pengemasan dan desain membuat produk tersebut kurang diminati oleh konsumen, terutama generasi muda yang lebih tertarik pada produk dengan tampilan modern dan menarik.

   Tantangan lain adalah lemahnya pengembangan merek dagang (branding). Banyak produk lokal Blora yang belum memiliki identitas merek yang kuat. Minimnya pemahaman tentang pentingnya branding dan strategi pemasaran membuat produk-produk tersebut sulit dikenali dan diingat oleh konsumen. Selain itu, kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif juga menyebabkan produk lokal Blora kurang dikenal di luar daerah.
5. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya utamanya barang elektronika, mesin dan peralatan listrik serta pakaian jadi;

Keterbatasan pilihan produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan terhadap barang impor di Kabupaten Blora. Minimnya variasi produk lokal, baik dari segi desain maupun kualitas, membuat konsumen lebih memilih produk impor yang dianggap lebih modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil dan Menengah;

   Sebagian besar pelaku usaha Usaha Dagang Kecil dan Menengah di Blora berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap pelatihan dan teknologi. Banyak di antara mereka yang mengelola usaha dengan cara tradisional, bergantung pada pengalaman semata tanpa dukungan pendidikan formal yang memadai. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menghadapi perkembangan pasar yang semakin kompetitif, baik dalam aspek manajerial, pemasaran, maupun inovasi produk.

   Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha juga menjadi hambatan. Di era digital seperti saat ini, kemampuan untuk memanfaatkan platform online sebagai sarana pemasaran atau transaksi menjadi krusial. Namun, banyak pelaku usaha di Blora, khususnya di desa-desa, yang belum mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan usaha mereka secara maksimal. Hal ini membatasi jangkauan pasar mereka dan mengurangi daya saing usaha.

   Keterbatasan SDM juga terlihat dalam kemampuan untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti perizinan usaha, standar produk, serta perpajakan. Tanpa pemahaman yang cukup, pelaku usaha sering kali terjebak dalam masalah hukum atau kewajiban administratif yang menghambat kelangsungan usaha mereka.

7. Kurangnya promosi dagang melalui pemasaran online.

   Salah satu penyebab utama kurangnya promosi online adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM di Blora yang masih mengandalkan metode pemasaran konvensional, seperti penjualan langsung atau melalui pasar tradisional. Banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan media

sosial, marketplace, atau website untuk memasarkan produk mereka. Akibatnya, produk-produk lokal Blora tidak dikenal secara luas, bahkan oleh calon konsumen di luar daerah.

Kurangnya dukungan dan pendampingan dari pihak terkait juga turut memengaruhi. Banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi tentang pentingnya pemasaran online dan cara melakukannya secara efektif. Padahal, dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Dampak dari kurangnya promosi online ini cukup signifikan. Produk-produk lokal Blora, meskipun memiliki kualitas yang baik, seringkali hanya dikenal di lingkup lokal atau regional. Padahal, dengan pemasaran online yang efektif, produk-produk tersebut bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Selain itu, pelaku usaha juga kehilangan peluang untuk meningkatkan omzet dan mengembangkan bisnis mereka.

Pasar Daerah yang tersebar di Kabupaten Blora sejumlah 13 Pasar Rakyat / Tradisional memberikan potensi terhadap kontribusi/pemasukan Pendapatan asli Daerah, namun masih banyak kendala untuk pengembangannya n adalah :

- Regulasi yang berkaitan dengan retribusi dan penataan pasar perlu ditata kembali dalam pelaksanaan e-retribusi, baik yang di kios, los ataupun dasaran / pelataran;

  Pelaksanaan retribusi pasar masih perlu diperbaiki, terutama dengan penerapan sistem e-retribusi. Hal ini mencakup penataan kios, los, serta pelataran pasar yang harus lebih terstruktur dan efisien agar proses pembayaran retribusi lebih transparan dan mudah bagi pedagang.
- Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional;

  Kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional di Kabupaten Blora masih tergolong rendah. Fasilitas yang ada belum memadai untuk mendukung kenyamanan pedagang dan pengunjung, sehingga perlu adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur pasar yang lebih baik dan memadai.
- Masih kurang optimal dalam pengelolaan persampahan;

Pengelolaan sampah di pasar tradisional masih kurang optimal, yang berpotensi menyebabkan masalah kebersihan dan kenyamanan. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam pengelolaan sampah, baik dari segi pengumpulan, pengangkutan, maupun pemrosesan limbah.

- Sumber daya aparatur dan manajemen perlu ditingkatkan;
  Pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial serta pengelolaan pasar secara profesional harus menjadi prioritas agar pasar dapat dikelola dengan lebih efisien.
- Masih banyak pedagang pasar daerah / pasar tradisional yang belum difasilitasi sarana dan prasarana;
  Banyak pedagang pasar tradisional yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini menghambat potensi pertumbuhan usaha mereka dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- Dagangan yang bersifat makanan saji mempunyai kesan kurang higienis;
  Masih ada kesan bahwa dagangan makanan saji di pasar tradisional kurang higienis. Ini perlu menjadi perhatian agar para pedagang dapat menjaga standar kebersihan dan kesehatan makanan, yang akan berimbas pada daya tarik pasar.
- Pasar Modern / pasar swalayan yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius pasar daerah / pasar tradisional;
  Pasar swalayan dan pasar modern lainnya terus berkembang pesat dan menjadi pesaing yang serius bagi pasar tradisional. Untuk itu, pasar tradisional perlu beradaptasi dengan tren yang ada, dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan agar tetap relevan.
- Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat dasaran yang ditentukan;
  Kesadaran pedagang untuk mengembangkan usaha dan mematuhi aturan yang ada, seperti menempati tempat yang ditentukan di dasaran pasar, masih rendah. Hal ini memerlukan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif agar pasar tradisional dapat berkembang secara lebih teratur dan terorganisir.
- Ada 1 (satu) lokasi pasar rakyat / tradisional yang sebagian tanah milik PT. Kereta Api Indonesia dan sebagian milik pemerintah daerah;
  Terdapat satu pasar rakyat yang sebagian lahannya dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, sementara sebagian lainnya dimiliki oleh

pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian status lahan yang perlu diselesaikan agar pasar dapat dikelola secara lebih efektif.

- Banyak pedagang yang sampai saat ini tidak beroperasi secara maksimal karena adanya pesaing pasar lain sehingga perlu pemanfaatan lokasi secara efektif;

  Banyak pedagang yang tidak dapat beroperasi secara maksimal karena adanya pesaing pasar lain. Oleh karena itu, pemanfaatan lokasi pasar perlu lebih optimal agar pasar tetap menjadi tempat yang ramai dan menguntungkan bagi pedagang dan konsumen.
- Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi terutama melalui e-retribusi;

  Kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, terutama melalui e-retribusi, masih rendah. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses untuk mendorong pedagang lebih taat membayar kewajiban tersebut.
- Masih adanya pasar yang kegiatanya hanya pada hari pasaran.
- Beberapa pasar hanya beroperasi pada hari pasaran tertentu, yang membatasi kegiatan ekonomi di pasar tersebut. Dengan adanya pemanfaatan pasar yang lebih fleksibel dan efektif, pasar dapat menjadi pusat ekonomi yang lebih hidup sepanjang minggu.

2.3.2.3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu:

1. Kontribusi Sektro Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto Kabupataen Blora yang perlu ditingkatkan

   Sektor Industri Pengolahan masih memberikan peran yang kecil dibandingkan dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora pada tahun 2022 sebesar 10,25 % sedangkan pada tahun 2023 sebesar 10,5 %. Kontribusi sektor industri pengolahan perlu ditingkatkan karena proses pengolahan barang jadi memberikan nilai tambah, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Kecilnya Prosentase peningkatan omzet penjualan Sektor Industri

   Prosentase peningkatan omzet penjualan Sektor Industri pada tahun 2023 sebesar 1,53 persen dan pada tahun 2024 sebesar 1.98

persen. Peningkatan omzet penjualan sektor industri yang belum mencapai 2 persen tersebut perlu ditingkatkan melalui upaya seperti pembinaan, pelatihan dan pengawasa serta ketaatan pelaku industri. Pelaku industri diwajibkan untuk melaporkan kegiatan industri kepada pemerintah melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah diamantkan pada Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

2.3.2.3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yaitu:

Jumlah masyarkat miskin yang ada di Kabupaten Blora sebesar 99.140 jiwa. Upaya yang dilakukan untuk mensejahterkan salah satunya dengan memberikan modal baik dalam bentuk keterampilan atapun materi melalui program transmigrasi. Transmigran tidak serta diberangkatkan tetepi perlu juga diberikan pelatihan, penyuluhan dan penempatan agar produktif di lokasi transmigrasi

.

2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.2.4.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur pendukung pemerintahan sekretariat daerah yaitu:

1) Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Blora dan sebagian unit kerja utama sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Pada Tahun 2024, dari 4 (empat) komponen yang dinilai diperoleh hasil evaluasi bahwa Nilai Perencanaan Kinerja yaitu 21,37 dari bobot 30, Nilai Pengukuran Kinerja yaitu 22,12 dari bobot 30, Nilai Pelaporan Kinerja yaitu 9,74 dari bobot 15 dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 13,80 dari bobot 25.
   Sekretariat Daerah berperan dalam menjadi pengungkit nilai pelaporan kinerja. Dari hasil evaluasi, masih ada pelaporan kinerja

perangkat daerah yang tidak mengacu pada kinerja strategis di Perjanjian Kinerja tetapi langsung mengacu pada kinerja level program. Sehingga selanjutnya perlu memastikan pelaporan kinerja perangkat daerah agar mengacu pada kinerja strategis pada Perjanjian Kinerja. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan informasi data capaian kinerja agar lebih relevan dengan kedalaman informasi yang merata serta memadai seperti eksplorasi analisis faktor atau penghambat dalam pencapaian kinerja.

2) Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih berfokus pada tata kelola pemerintah yang bersifat umum dan instansional, belum mampu menjawab isu strategis tata kelola pemerintahan yang bersifat lintas sektor atau antar instansi pemerintahan untuk menjawab isu pembangunan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora saat ini adalah 69,22, dengan kategori Baik yang terdiri dari Nilai RB general yaitu 60,19 dari bobot 100 dan Nilai RB Tematik yaitu 9,03 dari bobot 20.

2.3.2.4.2 Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur pendukung pemerintahan bidang sekretariat DPRD yaitu:

Adanya keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses administrasi dan komunikasi, seperti sistem manajemen data yang tidak terintegrasi atau kurangnya pelatihan teknologi bagi staf, yang berdampak pada keterlambatan informasi dan pengambilan keputusan.

2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.2.5.1 Perencanaan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan yaitu:

1. Pada penyelenggarakan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan masih kurang maksimal skor capaian komponen Perencanaan Strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah. Capaian

pada tahun 2024 sebesar 21,37 dari target 24 poin. Skor maksimal pada komponen perencanaan strategis ini adalah 30 poin.

2. Komponen perencanaan strategis dalam SAKIP Pemda untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntable masih belum maksimal. Target tahun 2024 sebesar 25. Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Menpan RB tercapai di angka 21,37 (capaian ini masih di bawah target). Secara predikat kinerja masuk level tinggi (85,48) meskipun harus ada upaya untuk mencapai nilai maksimal yakni 30. Target akhir tahun 2026 sebesar 27.
3. *Logical framework* pemda secara umum sudah memenuhi prinsip penyusunan yaitu tidak menghiraukan struktur perencanaan, namun hubungan sebab akibat masih perlu penyempuranaan. Pohon kinerja kabupaten juga masih terbatas pada isu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola, isu lain yang krusial belum disusun.
4. Masih dijumpai rumusan kinerja rumusan kinerja pada Renstra, PK dan IKU yang tidak selaras, sebagai contoh pada Dinas Pendidikan.
5. Selain itu masih terdapat perencanaan kinerja yang belum mengawal mandat unit kerja, seperti Kecamatan yang hanya mengawal kepuasan layanan masyarakat, belum menyentuh kinerja peningkatan daya saing wilayah.
6. Tantangan lainnya adalah menjaga harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi hasil proses teknokratik, politik, *topdown, bottom-up*, dan partisipatif dalam keputusan perencanaan dan penganggaran.

2.3.2.5.2 Keuangan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan bidang keuangan yaitu:

1. Belum optimalnya pemanfaatan aset (*idle asset*);
   Banyaknya aset yang tidak dimanfaatkan dengan optimal menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Aset yang tidak produktif atau dibiarkan tidak terkelola dengan baik (idle asset) menambah beban keuangan daerah tanpa memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola aset yang ada, seperti memanfaatkan aset tak terpakai untuk disewakan atau dijual, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Perlunya regulasi terkait pungutan pajak yang lebih memudahkan masyarakat;

   Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kompleksitas regulasi yang ada. Birokrasi yang panjang dan prosedur yang rumit seringkali menjadi kendala bagi masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih sederhana, jelas, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat mencakup kemudahan dalam prosedur pembayaran, transparansi informasi pajak, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah transaksi.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak;

   Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan daerah. Namun, hingga saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, kurangnya kesadaran, serta adanya persepsi bahwa pajak hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah saja, seringkali menjadi alasan utama. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan Pajak Daerah;

   Pengelolaan pajak daerah yang masih belum optimal menjadi kendala utama dalam meningkatkan PAD. Sistem yang kurang efektif dan kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola pajak dapat menghambat proses pemungutan pajak yang efisien. Diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem administrasi pajak daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.
5. Permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat beragam dan melebihi kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola pajak daerah;

   Permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin beragam dan terus berkembang. Hal ini seringkali melebihi kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada di instansi pengelola pajak daerah. Keterbatasan SDM yang terampil dan berkompeten di bidang perpajakan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas

dan pelatihan kepada SDM sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien.

6. Masih kurangnya kualitas belanja daerah;
   Belanja daerah yang tidak berkualitas seringkali menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran, pengalokasian dana yang tidak efisien, serta rendahnya kualitas proyek-proyek pembangunan dapat mengurangi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih matang, transparansi dalam pengelolaan dana, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa belanja daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

2.3.2.5.3 Kepegawaian

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan bidang kepegawaian yaitu:

1. Belum optimalnya Manajemen Talenta dalam proses pengisian jabatan dan pengembangan karir ASN, yang disebabkan oleh belum adanya sistem manajemen talenta yang terstruktur;
2. Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Blora masih rendah. Berdasarkan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN (IPASN), pada Tahun 2024, nilai IPASN komponen kompetensi PPPK tercatat sebesar 19,94 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan PNS yang memperoleh nilai 29,04 persen.

2.3.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yaitu:

Kurangnya kesadaran ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi atau meningkatkan kompetensi, hal ini terlihat dari data pada Tahun 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pengembangan kompetensi melalui diklat hanya sejumlah 233 orang hal ini sangat rendah jika dibandingkan jumlah ASN di Kabupaten Blora yang berjumlah 10.350 orang.

2.3.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penelitian.
2. Keterbatasan data dan informasi yang valid sebagai bahan kajian penelitian.
3. Rendahnya penerapan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.2.6.1 Inspektorat Daerah

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan bidang inspektorat daerah yaitu:

1. Skor Survei Penilaian Integritas perlu ditingkatkan
   Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan penilaian secara mandiri terhadap kinerja instansi dimana penilaian tersebut berpedoman terhadap roadmap reformasi birokrasi yang sudah disusun oleh perangkat daerah. Capaian Nilai PMPRB Kabupaten Blora tahun 2024 sebesar 69 termasuk dalam kategori B (Baik) namun belum mencapai target tahun 2024 (71). Beberapa hal yang menyebabkan nilai PMPRB masih belum mencapai target yaitu komitmen OPD terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang masih rendah, Tim Asesor PMPRB belum memahami tugasnya, dan Keterbatasan waktu penilaian PMPRB. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam PMPRB, sehingga perlu koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kementerian penilai dan peningkatan pelaksanaan evaluasi PMPRB pada OPD, karena tahun sebelumnya belum semua OPD dievaluasi.
2. Menurunnya skor SPI.
   Sejak tahun 2020 Inspektorat selaku Tim Penilai Internal dalam pembangunan ZI sudah mengajukan Perangkat Daerah percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun hasil penilaian dari Kemenpan RB selaku Tim Penilai

Ekstrnal belum ada Perangkat Daerah yang lolos penilaian. Capaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih 0. Hal ini disebabkan karena Komitmen pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas suatu unit kerja masih rendah, Kinerja belum menjadi dasar pembangunan zona integritas, Unit kerja yang diusulkan belum memberi pengaruh pada unit kerja lain untuk melakukan pembangunan menuju WBK, Rendahnya konsistensi dalam mewujudkan pelayanan publik pada unit kerja, serta Kurangnya kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM Perangkat Daerah harus memahami parameter penilaian yaitu komponen pengungkit yang diberi bobot 60% dan komponen hasil diberi bobot 40%. Selain itu perlu adanya pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan, dan peningkatan koordinasi daerah dan Kementerian Penilai.

2.3.2.7 Unsur Kewilayahan

2.3.2.7.1 Kecamatan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur kewilayahan bidang kecamatan yaitu:

1. Belum meratanya pembangunan insfrastruktur kewilayahan
   Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu perwujudan layanan publik yang akan menunjang aktivitas kehidupan masyarakat khususnya di tingkat desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Di Kabupaten Blora permasalahan infrastruktur masih menjadi isu strategis yang selalu menjadi prioritas pada setiap musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah usulan pembangunan infrastruktur pada musrenbang RKPD yang mendominasi hampir 90% di tiap kecamatam. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur kewilayahan yang lebih sistematis dan berbasis digital agar memudahkan dalam menentukan prioritas pembangunan insfrastruktur secara berkala dan berkelanjutan.
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di tingkat kecamatan masih terbatas pada kegiatan yang bersifat top-down seperti PKK, Posyandu, dll. Padahal untuk memperkuat sistem ekonomi berbasis masyarakat perlu campur tangan kecamatan sebagai pendorong kreativitas masyarakat di desa/kelurahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ada saat ini hanya berupa pasar murah yang dilaksanakan setahun sekali. Pasar murah di tingkat kecamatan perlu dilakukan inovasi agar lebih banyak lagi melibatkan UMKM di wilayah kecamatan sehingga mampu menjadi roda perekonomian berbasis masyarakat di wilayah kecamatan.

2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.3.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

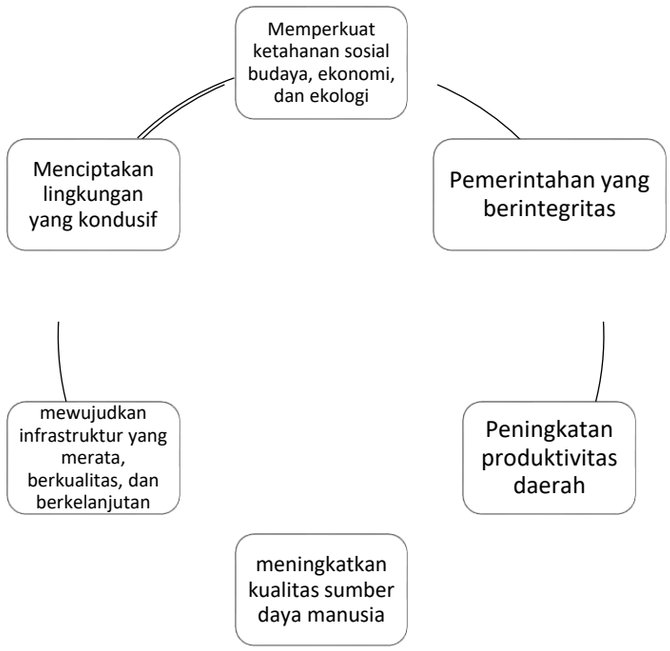
Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu:

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah;
2. Mulai pudarnya pemahaman generasi muda terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan serta kesadaran bela Negara;
3. Masih adanya kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa;
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi terutama pada Pilkada;
5. Masih minimnya tingkat kesadaran Ormas dan LSM untuk mencatatkan diri, sehingga gerak operasional dan keberadaannya masih belum terpantau secara maksimal, sehingga pelaksanaan monitoring belum bisa dilaksanakan secara optimal; Semakin kompleksnya permasalahan yang timbul dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.

2.3.3 Isu Strategis Daerah Tahun 2026

Isu strategis RKPD 2026 merujuk kepada isu strategis RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 dengan penekanan pada permasalahan yang teridentifikasi dari hasil capaian pembangunan hingga tahun 2023, serta merujuk kepada prioritas pembangunan tahun 2025. Perumusan isu

strategis juga melihat tantangan dan peluang eksternal yang berdampak pada urusan pembangunan di kabupaten Blora.



Gambar II.1
Isu Strategis

Adapun kelompok isu strategis makro yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 yaitu: (i) mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan; (ii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (iii) peningkatan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi; (iv) Perwujudan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif; (v) Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi; (vi) Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan

Isu strategis untuk RKPD Kabupaten Blora 2026 sebagai berikut:

a. Isu mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

   Isu strategis terkait infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu utama adalah keterbatasan **jaringan jalan** yang menghubungkan antarwilayah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan panjang jalan, diperlukan peningkatan infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas dan

aksesibilitas masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai hampir satu juta jiwa pada tahun 2045, panjang jalan yang dibutuhkan terus meningkat. Di Kabupaten Blora, persentase jalan pada kondisi mantap stabil pada kisaran 60-70% pada lima tahun terakhir. Selain itu, capaian Indeks Daya Saing Daerah pada komponen pilar infrastruktur masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam memastikan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi menjadi perhatian strategis bagi Kabupaten Blora. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) juga meningkat untuk menjamin akses komunikasi yang merata. Diproyeksikan bahwa jumlah BTS yang dibutuhkan akan terus bertambah hingga tahun 2045. Ketersediaan **infrastruktur telekomunikasi** yang memadai sangat penting dalam mendukung sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan digital yang semakin berkembang di era teknologi informasi.

Aspek ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air juga menjadi isu strategis infrastruktur di Kabupaten Blora. Kabupaten ini memiliki keterbatasan dalam **ketersediaan air bersih** akibat kondisi geologi dan topografi wilayahnya yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan kapur. Pada musim kemarau, banyak wilayah mengalami krisis air bersih dan **kekeringan**, sementara pada musim hujan, ancaman banjir dan tanah longsor menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terencana dan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih merata.

Isu strategis lainnya berkaitan dengan pengembangan kawasan budidaya dan permukiman. Kabupaten Blora memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan industri, namun ketersediaan lahan harus dikelola dengan bijak untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. **Alih fungsi lahan** pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman perlu diatur secara ketat agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan **ketahanan pangan daerah**.

Terakhir, **risiko bencana** juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Blora. Wilayah ini memiliki indeks risiko bencana yang cukup tinggi, dengan ancaman

utama berupa gempa bumi, kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, infrastruktur yang dibangun harus memiliki daya tahan terhadap bencana serta didukung dengan sistem mitigasi yang efektif. Peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan kapasitas mitigasi bencana menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Blora.

b. Isu meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora yang mempengaruhi pembangunan daerah salah satunya adalah tingkat **pendidikan** yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun Angka Harapan Lama Sekolah telah mencapai target 12,60 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,26 tahun (96% dari target 2026), masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dengan baik. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs masih di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa belum semua anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Selain itu, isu **kesehatan** masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas SDM. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Blora telah mencapai 74,92 tahun, menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengatasi kasus prevalensi ***stunting***, kematian ibu, bayi, dan balita yang masih terjadi. Faktor seperti kemiskinan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan rendahnya kesadaran akan pola hidup sehat menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Blora perlu memperkuat program intervensi gizi, memperluas cakupan layanan kesehatan, dan meningkatkan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Daya saing **tenaga kerja** menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora mengalami tren peningkatan, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 73,51% dari 78,02% di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasional dan program peningkatan daya saing harus diperkuat untuk

mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi bagian dari isu strategis SDM. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Blora telah mencapai 100% dari target 2024, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam akses perempuan terhadap sektor ekonomi dan kepemimpinan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mendorong lebih banyak program yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan sektor ekonomi.

Terakhir, **kualitas lingkungan sosial dan keluarga** turut memengaruhi pembangunan SDM. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kabupaten Blora masih rendah, dengan nilai 60,89. Kondisi ini mencerminkan kerentanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, kesehatan, dan sosial-psikologis. Pemerintah Kabupaten Blora perlu meningkatkan perlindungan sosial, akses terhadap layanan dasar, dan program pemberdayaan keluarga agar masyarakat lebih mandiri dan sejahtera.

c. Isu peningkatan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

Isu strategis terkait produktivitas daerah di sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi di Kabupaten Blora mencerminkan tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan**, yang menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengalami kontraksi sebesar -0,14% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan produktivitas, termasuk optimalisasi sistem irigasi, pengembangan varietas unggul, dan perbaikan manajemen pascapanen.

Dalam sektor peternakan**, populasi ternak sapi** mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah sapi mencapai 287.700 ekor, tetapi menurun drastis menjadi 174.700 ekor pada tahun 2024. Meskipun angka prevalensi penyakit helminthiosis menurun drastis hingga hanya 2%, penurunan jumlah ternak ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan industri peternakan sebagai bagian dari ekonomi daerah.

Sektor UMKM juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan jumlah wirausaha muda. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pemuda yang memiliki keterampilan berwirausaha mengalami penurunan, dari 31 orang pada 2022 menjadi hanya 10 orang pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan jaringan pasar bagi UMKM agar tetap bertahan dan berkembang.

Dari sisi investasi, pertumbuhan **investasi** daerah hanya mencapai 2,6%, masih di bawah target (65%) yang ditetapkan dalam RPJMD. Iklim investasi perlu diperkuat dengan pemberian insentif bagi investor, penyederhanaan proses perizinan, serta **stabilisasi kondisi sosial dan keamanan**. Selain itu, ketersediaan lahan industri yang tersisa lima dari 14 kawasan yang telah ditetapkan perlu segera ditawarkan kepada calon investor guna meningkatkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

d. Perwujudan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif

Isu strategis terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blora mencerminkan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satu tantangan utama adalah peningkatan **akuntabilitas birokrasi** yang tercermin dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kabupaten Blora saat ini mencapai 67,03 (kategori B), yang menunjukkan adanya peningkatan namun masih belum mencapai target kategori A. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada perbaikan dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja, masih diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Selain itu, **digitalisasi pemerintahan** menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang **adaptif**. Kabupaten Blora telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks SPBE mencapai 3,28, yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan telah mengalami kemajuan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih luas dan merata.

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi faktor kunci dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blora saat ini mencapai 80,42, yang telah memenuhi target 100% dalam RPJMD 2026. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan kompetensi berbasis kinerja serta peningkatan **integritas, etika dan disiplin** pegawai agar pelayanan publik semakin berkualitas.

Di sisi lain, **transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah** juga menjadi perhatian. Kabupaten Blora berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah dikelola dengan baik sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, penguatan dalam **pengelolaan risiko keuangan** tetap diperlukan. Selain pengelolaan risiko keuangan, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengembangkan **inovasi** dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan **berkesinambungan**.

Upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang kondusif menjadi salah satu fokus strategis. Pemerintah Kabupaten Blora telah mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam menangani konflik sosial dan penegakan peraturan daerah. Namun, pemerataan dalam aspek pengamanan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan di beberapa kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam membangun **sinergi dan kolaborasi** antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

e. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi

Isu strategis terkait ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi di Kabupaten Blora mencerminkan berbagai tantangan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari sisi sosial budaya, **pelestarian budaya daerah** menjadi prioritas utama, terutama dalam meningkatkan jumlah kegiatan pelestarian adat dan cagar budaya. Jumlah kegiatan pelestarian budaya daerah tetap stagnan pada angka dua kali per tahun, sementara jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya mencapai 16%. Meskipun ada

peningkatan pelestarian benda dan situs cagar budaya hingga 60% pada 2024, upaya pengembangan budaya lokal masih perlu diperkuat melalui dukungan pemerintah dan masyarakat.

Dalam aspek **ekonomi**, daya saing sektor pertanian, industri, dan perdagangan masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -0,14%, sedangkan industri pengolahan dan perdagangan masih berada di bawah target yang ditetapkan. **Sebaliknya**, sektor pariwisata mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 15%, mencapai target RPJMD 2026 lebih awal. Investasi daerah juga masih lemah dengan capaian 2,6%, yang menunjukkan perlunya insentif lebih kuat bagi investor dan penguatan infrastruktur pendukung.

Ketahanan sosial menjadi isu yang menjadi perhatian utama dalam penanganan kesejahteraan sosial. Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah berhasil menangani sekitar 0,97% target populasi **yang** membutuhkan layanan ini. Namun, dengan meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, perlu ada strategi lebih efektif dalam pemberdayaan sosial dan distribusi bantuan secara merata di seluruh wilayah.

Dari perspektif **ekologi**, Kabupaten Blora menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan risiko lingkungan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor industri dan permukiman mencapai 0,28% dari total luas wilayah, dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar terhadap konversi lahan. Sementara itu, ketersediaan air tahunan mencatat surplus sekitar 1,7 juta m^3, tetapi distribusi air yang tidak merata menyebabkan krisis di beberapa kecamatan selama musim kemarau.

Tantangan dalam ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi di Kabupaten Blora membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih holistik. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan agar pembangunan daerah dapat berkelanjutan dan inklusif. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Blora dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

f. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan

Salah satu tantangan utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Blora adalah **daya saing daerah** yang masih perlu ditingkatkan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Blora berada pada angka 3,32 pada tahun 2023, masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (3,89) dan nasional (3,44). Pilar-pilar yang memerlukan perhatian khusus adalah infrastruktur (2,68), pasar produk (2,55), serta sistem keuangan dan tenaga kerja, yang berperan besar dalam menarik investasi.

Selain itu, **stabilitas sosial dan keamanan** menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kabupaten Blora mengalami peningkatan jumlah kasus kriminalitas dari 164 kasus pada tahun 2023 menjadi 166 kasus pada tahun 2024. Jumlah demonstrasi juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang dapat berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Kabupaten Blora masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan investasi daerah. Pertumbuhan investasi hanya mencapai 2,6%, di bawah target RPJMD. Salah satu kendala adalah **terbatasnya kawasan industri** yang masih tersedia untuk ditawarkan kepada investor, yaitu hanya lima dari 14 kawasan yang telah ditetapkan. Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih menarik, menyederhanakan proses perizinan, serta memperluas promosi daerah.

Pengelolaan tata ruang dan alih fungsi lahan juga menjadi isu strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Sepanjang tahun 2023, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian sebesar 0,28% dari total luas wilayah. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar dalam konversi lahan, mencapai lebih dari 1.300 hektar. Meskipun sektor pertambangan memiliki dampak positif terhadap perekonomian, diperlukan regulasi yang ketat agar tidak merusak keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian. Kabupaten Blora perlu menerapkan strategi yang mencakup penguatan daya saing daerah, peningkatan stabilitas sosial dan keamanan, reformasi kebijakan investasi, serta

pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan,. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan Kabupaten Blora dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional dan Jawa Tengah serta arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025- 2029.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global tahun 2025 masih menghadapi tantangan untuk mencapai kondisi yang stabil dan diperkirakan tumbuh di angka 2,8 persen menurut World Economic Outlook (WEO). Pertumbuhan ekonomi tersebut menurun dari sebesar 0,5 persen dari tahun 2024. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena Kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada April 2025 menjadi pemicu perang tarif dan kembalinya kebijakan proteksionisme, sehingga beberapa negara mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2025.

Harga komoditas global, khususnya pangan mulai mengalami penurunan setelah fenomena El-nino pada tahun 2024. Kondisi berbeda terjadi pada harga Crude Palm Oil (CPO) yang mengalami kenaikan karena kekhawatiran atas kekurangan stok. Harga minyak dunia, gas alam dan batu bara sampai dengan awal Mei 2025 tertahan di level rendah yang disebabkan karena penurunan permintaan global.

Inflasi global diperkirakan terus mengalami penurunan dari 6,7 persen di tahun 2023 menjadi 5,7 persen di tahun 2024. Tahun 2025, diperkirakan inflasi akan turun di angka 4,3 persen (World Economic Outlook, 2025). Tren penurunan inflasi global direspon dengan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara di Eropa. Pelonggaran suku bunga memicu penurunan nilai tukar dan arus modal keluar (capital outflow) bagi negara berkembang.

Kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen. Kontribusi dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi

pemerintah. Terjaganya konsumsi masyarakat dan inflasi yang terkendali menjadi penentu dalam stabilitas daya beli masyarakat. Konsumsi pemerintah melalui program pelayanan publik dan kesejahteraan sosial memberikan stimulan untuk penguatan perekonomian, khususnya untuk masyarakat kelas menengah.

Pada sisi produksi, industri manufaktur masih menjadi sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kinerja manufaktur nasional harus tetap dijaga daya saingnya. Berdasarkan skor Purchasing's Manager Index (PMI) pada April 2025 menunjukkan kinerja manufaktur nasional berada 46,7. Kondisi tersebut menandakan bahwa manufaktur nasional berada pada kondisi kontraksi atau pelambatan aktivitas.

Berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2024, maka sasaran indikator makro pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel III.1

Target Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2026

No	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-5,8
2	Inflasi	%	1,5-3,5
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	16.500-16.900
4	Yield SBN 10 Tahun	%	6,6-7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	USD/barel	60-80
6	Lifting Minyak	Rbph	600-605
7	Lifting Gas	rbsmph	953-1017

Sumber: KEM PPKF Tahun 2026

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2026

Secara umum, perekonomian Kabupaten Blora bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB ADHB tahun 2023 sebesar 23,47% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,45%. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi paling besar pada PDRB Kabupaten Blora, namun hal tersebut didukung dari pertambangan minyak, yang secara pengelolaan berada di

bawah wewenang Pemerintah Pusat. Kondisi demikian, maka struktur perekonomian yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Blora masih didukung oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Berdasarkan kondisi tersebut, perubahan pasar domestik dan internasional berdampak ringan terhadap perekonomian Blora.

Peningkatan kualitas ekonomi Kabupaten Blora terlihat dari membaiknya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2022 sebesar 2,68 persen naik menjadi 3,1 persen pada tahun 2023. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan per kapita. Kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 11,49 persen menjadi 11,42 persen pada tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 3,1 persen pada tahun 2023 menjadi 3,67 persen pada tahun 2024.

Tabel III.2

Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Blora

No	Indikator Makro Daerah	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun 2024	Target 2026
1.	PDRB per kapita ADHB	Rp Juta	36,60	41,77 s.d 43,48
2.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	11,96	13,25-13,99
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,1	3,25-4,05
4.	TPT	%	3,67	3,40-2,85
5.	Kemiskinan	%	11,42	10,89-10,28
6.	Inflasi	%	2,96	1,5-3,5
7	IPM	Indeks	71,42	72,61
8	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	273.910*	202.456,65
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,83	78,62

Penguatan stabilitas ekonomi Kabupaten Blora akan terus dijaga melalui arah kebijakan ekonomi 2026 yaitu “**Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”** yang sesuai dengan tema pembangunan. Arah kebijakan ekonomi tahun 2026 disusun untuk mencapai target indikator makro pembangunan Kabupaten Blora.

Sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Blora tahun 2026, pembangunan perekonomian diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan agribisnis, penguatan daya beli masyarakat, peningkatan penanaman modal, melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penguatan wilayah yang kondusif.
2. Mengendalikan inflasi melalui menjaga stabilitas harga kelompok *volatile food*, menjaga pasukan barang kebutuhan masyarakat dan penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blora.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan tenaga kerja, penempatan peserta pelatihan kerja yang sesuai kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja, khususnya pada sektor pertanian.
4. Menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi peran CSR dan penguatan fungsi Baznas.
5. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif serta inkubasi sektor ekonomi kreatif yang berorientasi ekspor.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena bergantung pada kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan terukur, terarah dan cermat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Blora didasarkan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah yang disertai dengan penyajian proyeksi keuangan daerah yang terdiri atas struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Proyeksi pendapatan daerah harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Target pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp527.680.436.000 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.660.272.521.000.

Pendapatan terbesar pemerintah daerah Kabupaten Blora berasal dari dana perimbangan, namun dana perimbangan tersebut berada di luar kendali Pemerintah Daerah, karena pengalokasian dana perimbangan ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Maka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Besar kecilnya Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak ini sangat bergantung pada perolehan pajak dan harga minyak dunia.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Retribusi Daerah, pendapatan dari BLUD dimasukkan dalam retribusi daerah. Dalam RKPD Tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp527.680.436.000. Pajak Daerah pada RKPD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp145.307.000.000 yang telah memperhitungkan Opsen PKB dan BBNKB. Untuk mencapai target itu Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan sinergi dengan UPPD Kabupaten Blora dalam optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB. Sementara itu, Retribusi Daerah pada RKPD Tahun 2026 diproyeksikan akan mencapai pada Rp259.264.500.000 Retribusi yang mengalami penyesuaian rekening belanja dari rekening lain-lain PAD yang sah antara lain rekening pendapatan BLUD masuk dalam rekening retribusi pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Dalam RKPD Tahun 2026, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu diproyeksikan sebesar Rp118.707.936.000 Sementara itu, lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp4.401.000.000.

Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas: 1) dana perimbangan yaitu Dana Transfer Umum (DTU) berupa Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik; 2) Dana Insentif Daerah (DID); dan 3) Dana Desa. Sementara itu, dana transfer antar-daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam RKPD Tahun 2026, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Tengah tidak diproyeksikan. Sementara DBH dan DAU diproyeksikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam RKPD Tahun 2026, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.660.272.521.000, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.566.901.641.000 dan pendapatan transfer antar daerah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar

Rp93.370.880.000. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya merupakan dana yang diterima daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu.

Selanjutnya proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 disandingkan dengan APBD Tahun 2025 disajikan pada Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026

Kode	Uraian	APBD 2025 (Rp)	Proyeksi RKPD 2026 (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.596.096.453.000**	**2.187.952.957.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	488.850.000.000	527.680.436.000
4.1.01	Pajak Daerah	134.000.000.000	145.307.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	250.196.000.000	259.264.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.000.000.000	118.707.936.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.654.000.000	4 .401.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.107.246.453.000**	**1.660.272.521.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.013.875.573.000	1.566.901.641.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.370.880.000	93.370.880.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 meliputi:

1. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui:
   a. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis *online system*
   b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat
2. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah

3. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Blora untuk membantu peningkatan PAD di luar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
6. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
7. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkanpendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, penguatan kerjasama antar wilayah serta antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan peran swasta melalui kegiatanTanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/TJSLP (Corporate SocialResponsibility/CSR), peningkatan peran filantropi, dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan, lingkungan hidup, dan/atau lainnya dalam kegiatan pembangunan

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama yaitu untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dan prioritas ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja

untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Belanja daerah digunakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar dan teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk dialokasikan dalam penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional. Program/kegiatan/sub kegiatan tertentu yang diarahkan untuk mencapai prioritas nasional ditetapkan untuk meningkatkan kontribusi sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Blora terhadap Prioritas Nasional. Selain itu, dukungan program/kegiatan/sub kegiatan juga diarahkan dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Blora dan pencapaian prioritas provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Pemetaan dilakukan menggunakan sub kegiatan yang telah dimutakhirkan dan disesuaikan dengan prioritas daerah.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu:

   a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan.

      Ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

   b. Alokasi Anggaran Kesehatan.

      Alokasi anggaran kesehatan memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja berdasarkan amanat Pasal 409 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

   c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

      Proporsi belanja infrastruktur daerah secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027. sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Pusat dan Daerah untuk belanja infrastruktur dialokasikan sebesar 40% yang di fokuskan pembangunan infrastruktur dasar dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan pada Belanja Langsung, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kabupaten Blora Tahun 2025 berupaya semaksimal mungkin mengalokasikan belanja infrastruktur di kisaran 30–40% dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Penyediaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling sedikit 0,16 % dari total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan diarahkan pada paling sedikit 0,50% dari total belanja daerah pada Inspektorat Daerah.

g. Belanja Pendidikan Dasar dari Pendapatan DBH-Migas

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DBH yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3),

Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan alokasi minimal 0,5 %;

h. Dana Kelurahan dari APBD

Dana Kelurahan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, Pada RKPD tahun 2026, Dana Kelurahan telah direncanakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

4. Alokasi Anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 untuk SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan SPM Bidang Sosial.

5. Belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*)

   a. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi:

      - Hasil Penerimaan Opsen PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, belum hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten / kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, Pada RKPD Tahun 2025, belanja jenis ini diarahkan pada urusan perhubungan untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

      - Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik paling sedikit sebesar 10% wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2023.

      - Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten /kota, dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, Pada RKPD Tahun 2026, belanja jenis ini direncanakan pada urusan kesehatan untuk jaminan kesehatan masyarakat, urusan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk penegakan hukum;

      - Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

   b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Alokasi Dana Desa Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi dana Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Di samping hal tersebut terkait penyaluran alokasi dana desa yang di tentukan untuk tambahan penghasilan perangkat dalam pendanaan terkait pembiayaan BPJS ketenagakerjaan;

6. Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah

   Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah dianggarkan untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sinergi program dan anggaran dalam mensasar individu dan rumah tanggal miskin ekstrem sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026.

7. Alokasi anggaran penanggulangan *stunting* di daerah.

   Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

8. Alokasi anggaran pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pasca bencana.

9. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja operasi terdiri atas:

a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, rencana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan honorarium bagi ASN.

   Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD). Belanja ini diproyeksikan sebesar Rp1.078.537.922.087.

   Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN yang memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dengan dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Penyediaan anggaran tambahan penghasilan ASN dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran penggunaan anggaran dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD.

Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD berupa belanja uang representasi DPRD, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, dan belanja tunjangan transportasi DPRD. Anggaran belanja memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun. 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2024 yang memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan dimaksud.

b. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ini termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja jasa non ASN tetap dianggarkan untuk pemenuhan gaji tenaga kontrak yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan metode *outsourcing* sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat. Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dapat dianggarkan pengadaan

barang dan jasa berupa barang yang di jual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), dan dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;

c. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan non ASN seperti Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Adli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

d. Penyediaan anggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang merupakan insentif bagi ASN atas pungutan Pajak Daerah dan Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

e. Penyediaan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden nomor 109 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.

f. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusivitas wilayah, pembinaan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan partai politik. Hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten pada tahun 2026 sesuai hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2024.

g. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan di antaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

10. Belanja Modal

Belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

11. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut

dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja Tidak Terduga diproyeksi sebesar Rp33.440.837.143.

12. Belanja Transfer

    Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:

    a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota pada Tahun Anggaran 2026, Dalam RKPD Tahun 2026, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Selain itu pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Blora juga memberikan tambahan penghasilan perangkat desa guna pembayaran iuran BPJS bagi perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

    b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan untuk tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintahan desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 disandingkan dengan APBD 2025 disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026

Kode	Uraian	APBD 2025 (Rp)	Proyeksi RKPD 2026 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**2.831.796.453.000**	**2.163.952.957.000**
5.1	BELANJA OPERASI	**1.893.109.077.894**	**1.550.898.187.175**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.183.865.110.439	1.078.537.922.087
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.463.687.455	408.969.728.688
5.1.03	Belanja Bunga	2.400.000.000	11.241.840.000
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	57.815.880.000	50.880.696.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.334.400.000	1.268.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**476.108.677.906**	**148.689.176.682**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.155.363.064	26.239.484.682
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.236.234.892	48.144.601.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.537.079.950	74.105.091.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000	200.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**28.044.823.000**	**33.440.837.143**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.044.823.000	33.440.837.143
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**434.533.874.200**	**30.924.756.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.000.000.000	15.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	425.533.874.200	415.924.756.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, sumber penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Blora

terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, Sebagaimana amanat Permendagri 77 Tahun 2021 bahwa penyertaan modal untuk dilengkapi dengan kajian analisis penyertaan modal (Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko).

a. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Dalam RKPD tahun 2026, Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp41.000.000.000.

b. Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2026 digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000 dan pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp60.000.000.000.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026 disandingkan dengan APBD 2025 disajikan pada Tabel III.3.

Tabel III.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026

Kode	Uraian	APBD 2025 (Rp)	Proyeksi RKPD 2026 (Rp)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**260.700.000.000**	**41.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.700.000.000	41.000.000.000
6.1.04	Pinjaman Daerah	215.000.000.000	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000**	**65.000.000.000**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	5.000.000.000
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.000.000.000	60.000.000.000
	Pembiayaan Netto	**235.700.000.000**	**-24.000.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

Proyeksi pendanaan pada tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4

Capaian dan Proyeksi Pendanaan Kabupaten Blora Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	REALISASI APBD 2024	% REALISASI 2024	RKPD 2025	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.952.839.183.000**	**2.647.221.010.000**	**2.660.177.528.320**	**100,49**	**2.221.850.765.000**	**2.596.096.453.000**	**2.187.952.957.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**326.113.070.000**	**427.788.564.000**	**444.809.501.390**	**103,98**	**488.850.000.000**	**488.850.000.000**	**527.680.436.000**
4.1.01	Pajak Daerah	63.400.000.000	81.550.000.000	92.163.286.949	113,01	134.000.000.000	134.000.000.000	145.307.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	166.835.000.000	238.505.000.000	242.698.299.058	101,76	250.278.700.000	250.196.000.000	259.264.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.058.070.000	98.164.000.000	98.214.926.711	100,05	100.000.000.000	100.000.000.000	118.707.936.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.820.000.000	9.569.564.000	11.732.988.672	122,61	4.571.300.000	4.654.000.000	4 .401.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.626.726.113.000**	**2.219.432.446.000**	2.215.368.026.930	99,82	1.733.000.765.000	**2.107.246.453.000**	**1.660.272.521.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.490.726.113.000**	**1.713.080.392.000**	1.762.353.921.959	100,77	1.624.800.765.000	2.013.875.573.000	1.566.901.641.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**136.000.000.000**	**211.396.382.000**	194.058.432.971	91,80	108.200.000.000	93.370.880.000	93.370.880.000
5	**BELANJA DAERAH**	**1.936.739.183.000**	**2.253.419.695.088**	**2.180.947.583.639**	**96,78**	**2.457.550.765.000**	**2.831.796.453.000**	**2.163.952.957.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.279.904.379.300**	**18.885.569.458.980**	**1.834.779.504.135**	**97,29**	**1.589.375.001.200**	**1.893.109.077.894**	**1.550.898.187.175**
5.1.01	Belanja Pegawai	**885.487.184.600**	**1.101.967.018.624**	1.080.061.753.290	98,01	1.092.635.947.989	1.183.865.110.439	1.078.537.922.087
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	**298.537.434.700**	**663.482.320.356**	636.618.081.774	95,95	445.231.897.211	646.463.687.455	408.969.728.688
5.1.03	Belanja Bunga	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	812.077.706	81,21	2.400.000.000	2.400.000.000	11.241.840.000
5.1.04	Belanja Subsidi	**0**		0		0	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	**60.517.760.000**	**115.923.220.000**	113.835.873.075	98,20	46.010.156.000	57.815.880.000	50.880.696.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	**34.362.000.000**	**3.496.900.000**	3.451.718.290	98,71	3.097.000.000	2.334.400.000	1.268.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**216.171.090.000**	**365.473.275.307**	**346.144.893.915**	**94,71**	**402.465.927.800**	**476.108.677.906**	**148.689.176.682**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	**40.000.000**	**0**	0		0	-	-

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	REALISASI APBD 2024	% REALISASI 2024	RKPD 2025	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**17.372.950.000**	**117.307.040.752**	111.634.593.537	95,16	40.989.911.800	77.155.363.064	26.239.484.682
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**87.826.040.000**	**114.772.550.000**	108.335.996.401	94,39	48.147.819.000	65.236.234.892	48.144.601.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**110.474.200.000**	**132.368.684.555**	125.256.769.152	94,63	312.933.197.000	333.537.079.950	74.105.091.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**425.000.000**	**1.025.000.000**	917.534.825	89,52	295.000.000	400.000.000	200.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	**32.900.000**	**0**	0		100.000.000	10.000.000	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.700.000.000**	**2.076.960.801**	**23.185.589**	**1,12**	**17.672.823.000**	**28.044.823.000**	**33.440.837.143**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	**6.700.000.000**	**2.076.960.801**	23.185.589	1,12	17.672.823.000	28.044.823.000	33.440.837.143
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**433.963.713.700**	**457.628.358.500**	**457.494.302.790**	**99,97**	**448.037.013.000**	**434.533.874.200**	**30.924.756.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	**23.045.000.000**	**10.190.524.800**	10.190.524.800	100,00	15.100.000.000	9.000.000.000	15.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	**410.918.713.700**	**447.437.833.700**	447.303.777.990	99,97	432.937.013.000	425.533.874.200	415.924.756.000
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**26.200.000.000**	**129.427.043.588**	**114.555.366.588**	**88,51**	**260.700.000.000**	**260.700.000.000**	**41.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**26.200.000**	**114.427.043.588**	114.427.043.586	100,00	45.700.000.000	45.700.000.000	41.000.000.000
6.1.04	Pinjaman Daerah	0	15.000.000.000		-	215.000.000.000	215.000.000.000	0
6.1.05	Penerimaan kembali Dana Bergulir	0	0	128.323.000	-	0	0	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**42.300.000**	**65.600.000.000**	**49.842.586.000**	**75,98**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**65.000.000.000**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	10.800.000.000	10.050.000.000	93,06	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	REALISASI APBD 2024	% REALISASI 2024	RKPD 2025	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.800.000.000	54.800.000.000	39.792.586.000	72,61	15.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000
	Pembiayaan Netto	**-16.100.000.000**	**63.827.043.588**	**64.712.780.588**	**101,39**	**235.700.000.000**	**235.700.000.000**	**-24.000.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	86.448.422.479	0,00	0	0	0

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun 2025 untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun keempat atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029. RKPD Kabupaten Blora tahun 2026 disusun berdasarkan pada: (1) visi dan misi RPJMD beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2024; (3) Isu strategis Daerah; (4) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026; dan (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Tujuan Kabupaten Blora dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Kabupaten Blora yang Maju dan Berkelanjutan.** Tujuan ini dicapai dalam semangat Sesarengan mbangun Blora. Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2025–2029, ditetapkan dua indikator utama sebagai ukuran keberhasilan:

1. PDRB per kapita, sebagai ukuran kinerja Blora dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta
2. Tingkat kemiskinan, sebagai ukuran keberhasilan Blora dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok rentan.

Kedua indikator ini menjadi representasi utama dari capaian jangka panjang (*ultimate goal*) pembangunan yang bersifat lintas sektor dan multidimensi. Keduanya juga merupakan hasil akhir dari penguatan enam pilar pembangunan daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blora yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 yakni **"Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan"** yang memiliki arti:

1. Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan

mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta.

2. Maju memiliki orientasi yang menyatakan bahwa pendapatan penduduk yang meningkat, struktur masyarakat menuju industri, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Ini bermakna Kabupaten Blora adalah kabupaten yang telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi, sosial, budaya, yang tinggi, dan adaptif dengan perkembangan teknologi.
3. Berkelanjutan sebagai wujud komitmen pembangunan tingkat global. Ini bermakna bahwa Kabupaten Blora berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan perkembangannya yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Dalam melaksanakan visi tersebut perlu dijabarkan dalam misi guna tercapai pembangunan antara lain:

1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi
4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
5. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi
6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan.

Untuk menjawab isu pembangunan strategis menuju pencapaian visi misi daerah, maka dirumuskan tema pembangunan selama lima tahun. **Tema** tahun 2026 adalah **“Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”.**

Misi yang telah ditetapkan kemudian diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blora yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Blora tahun 2025-2029. Untuk memastikan pencapaiannya, maka target tahunan ditetapkan di setiap indikator kinerjanya. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 serta memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan penetapan kinerja tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut.

Tabel IV.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja RPJMD 2026	Target Kinerja RKPD 2026
Tujuan: Terwujudnya Kabupaten Blora yang Maju dan Berkelanjutan				
	PDRB per kapita	Rp juta	41,77 s.d. 43,48	41,77 s.d. 43,48
	Tingkat kemiskinan	persen	10,47 s.d. 9,87	10,47 s.d. 9,87
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.				
	Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	persen	59	59
	Indeks Desa	persen	71,22	71,22
Sasaran 2: Terwujudnya SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan.				
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	72,61	72,61
	Persentase cakupan perlindungan sosial	persen	44,27	44,27
Sasaran 3: Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.				
	Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,5–4,0	3,5–4,0
	PDRB Harga Berlaku Sektor Unggulan Daerah	Rp miliar	19.341,12	19.341,12
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,00–2,70	3,00–2,70

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja RPJMD 2026	Target Kinerja RKPD 2026
Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif.				
	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,50	76,50
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,00	80,00
Sasaran 5: Terwujudnya ketahanan wilayah dan masyarakat.				
	Indeks Ketahanan Pangan	angka	87,45	87,45
	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	62,39 s.d. 66,00	62,39 s.d. 66,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,62	78,62
	Indeks Risiko Bencana	Angka	108,52 s.d. 108,14	108,52 s.d. 108,14
Sasaran 6: Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah				
	Indeks Harmoni Indonesia	angka	7	7
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,45	0,45

Keterangan:

*)Target Indikator Makro Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Angka Kemiskinan, TPT dan IPM, disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sumber: RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029 dan Analisis Tim Penyusun, 2025

Untuk mencapai sasaran daerah dan target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Blora untuk Tahun 2026, sebanyak 145 program prioritas dengan 579 indikator kinerja dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026 untuk mendukung 6 (enam) sasaran daerah yang ditetapkan. Tabel IV.2 menunjukkan dukungan program prioritas daerah.

Tabel IV.2

Target Tujuan Sasaran Daerah beserta Outcome dan Program Prioritas Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
Tujuan: Terwujudnya Kabupaten Blora Maju dan Berkelanjutan.	**a. PDRB per kapita**	Rp juta						41,77 s.d. 43,48	41,77 s.d. 43,48
	b. Tingkat kemiskinan	persen						10,89-10,28	10,89-10,28
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.	**a. Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah**	persen						66,53	66,53
	b. Indeks Desa (ID)	angka						71,17	71,17
			1.1.Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	angka			23,89	23,89
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			1.2.Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan layanan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen			65,75	65,75
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			1.3. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	angka			0,36	0,36
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
			1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	persen			18,08	18,08
						PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
						PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			1.5. Meningkatnya kapasitas koordinatif kecamatan dalam mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan desa dan kelurahan yang berkelanjutan	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan	persen				
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN		
Sasaran 2: Terwujudnya SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan.	**a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**							72,61	72,61
	b. Persentase Cakupan Perlindungan Sosial							44,27	44,27
			2.1.Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan lama sekolah	tahun			13,16	13,16
				Rata-rata lama sekolah	tahun			7,49	7,49
				Kemampuan Literasi SD	angka			72,47	72,47
				Kemampuan Literasi SMP	angka			74,65	74,65
				Kemampuan Numerasi SD	angka			66,14	66,14
				Kemampuan Numerasi SMP	angka			67,23	67,23

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN		
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		
			2.2. Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka			75,01	75,01
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			2.3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	tahun			74,95-76,18	74,95-76,18
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAERAH		
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAERAH		
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN DAERAH		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAERAH		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			2.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka			81,75	81,75
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAERAH		
						PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
Sasaran 3: Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.	a. Pertumbuhan Ekonomi	persen						3,5–4,0	3,5–4,0
	b. PDRB Harga Berlaku Sektor Unggulan Daerah	Rp. Juta						19.341,12	19341,12
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen						3,40–2,85	3,40–2,85
			3.1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	rupiah/ tenaga kerja			38.142.979,29	38142979,29
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			3.2. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian	Kontribusi Koperasi terhadap PDRB	Persen		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6,56	6,56
				Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro	Persen		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,22	0,22

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			3.3. Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen			10,98	10,97836883
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			3.4. Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6,58	6,58
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
						PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			3.5. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	persen			12,55	12,55
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			3.6. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	persen		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA	3,5	3,5

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
			3.7 Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen			1.006.146,79	1006146,79
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
			Tersedianya kepastian hukum tata ruang dalam investasi	Persentase wilayah kabupaten yang memiliki peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang	persen			3,7	3,7
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif.	a. Indeks Integritas Nasional	angka						76,50	76,5
	b. Indeks Reformasi Birokrasi	angka						89,40	89,4
			4.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Pemda	angka			70,50	70,5
				Tingkat Implementasi RB	angka			89,4	89,4
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEMUA PERANGKAT DAERAH		
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEMUA PERANGKAT DAERAH		
			4.2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	persen		SEKRETARIAT DPRD	78,5	78,5
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			4.3.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	angka		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	84,00	84

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			daerah berbasis riset						
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
			4.4.Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka			85	85
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4.5.Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	angka		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80,5	80,5
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4.6.Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29,05	29,05
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			4.7.Meningkatnya peran riset dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	50	50
						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
			4.8.Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka		INSPEKTORAT DAERAH	3,16	3,16
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH		
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH		
			4.9.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka			3,37	3,37
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			4.10.Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	angka		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	92,25	92,25
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			4.11.Terwujudnya penyelenggaraan kecamatan yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			4.12.Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	angka		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,86	2,86
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			4.13.Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	angka		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			4.14.Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	angka		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	74,28	74,28
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			4.15. Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	angka			100	100
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		
Sasaran 5: Terwujudnya ketahanan wilayah dan masyarakat.	a. Indeks Ketahanan Pangan	angka						90,13	90,13
	b. Indeks Pembangunan Keluarga	angka						62,36 - 62,44	62,36 - 62,44
	c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka						78,62	78,62
	d. Indeks Risiko Bencana.	angka						107,41 - 106,57	107,41 - 106,57
			5.1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka			85,91	85,91
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG	angka			0,31 - 0,291	0,31 - 0,291

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
				Indeks Perlindungan Anak	angka			63,5	63,5
						PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			5.2.Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka			90,1	90,1

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
			5.3.Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Air	angka			0,00	0
				Indeks Kualitas Udara	angka			0	0
				Indeks Kualitas Lahan	angka			0	0
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			5.4. Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Angka Kelahiran Total Fertility Rate/ TFR	angka			2,01	2,01
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			5.5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda yang menduduki posisi/ jabatan strategis/ meraih prestasi di ajang nasional	orang			3	3
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
			5.6. Terwujudnya kebudayaan maju	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen			14,29	14,29
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		
			5.7.Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	angka			0,57	0,57
				Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran	angka			66	66
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
Sasaran 6: Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah.	a. Indeks Harmoni	angka						7,00	7
	b. Rasio Pajak terhadap PDRB	persen						0,45–0,45	0,45–0,45
			6.1.Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	74,73	74,725
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN		
			6.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia Dimensi Sosial	angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,2	7,2
				Indeks Harmoni Indonesia Dimensi Keberagaman	angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,15	7,15

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
			6.3.Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen			15,1	15,1
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH		

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora tahun 2026, mempertimbangkan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Untuk mewujudkan sinergi dan keselarasan dengan pembangunan nasional maka perlu dukungan Kabupaten yang tertuang dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, yang tertuang dalam arah kebijakan bidang urusan yang mendukung Asra Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana berikut:

Tabel IV.3

Dukungan Arah Kebijakan untuk Asta Cita

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Sosial	Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Lingkungan Hidup	Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualita	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
		ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Penanaman Modal	Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
		(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Perindustrian	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)..

Delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencangkup rencana pembangunan di berbagai sektor dengan langkah-langkah konkret berupa program dengan hasil terbaik tercepat *quick wins*, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama dalam pembangunan, untuk mendukung upaya tersebut Kabupaten Blora memberikan dukungan dalam mewujudkan program prioritas dan program hasil terbaik tercepat sebagaimana berikut;

Tabel IV.4

Dukungan Terhadap 17 Program Prioritas Nasional

No	17 Program Prioritas Nasional	Dukungan Kabupaten
1.	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
2.	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	Peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
3.	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	Peningkatan tata kelola organisasi pemerintah daerah
4.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Peningkatan pengawasan perangkat daerah
5.	Pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
6.	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada

No	17 Program Prioritas Nasional	Dukungan Kabupaten
7.	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi sleuruh rakyat Indonesia; peningkatan BPJS kesehatan dan pelayanan obat untuk rakyat.	Peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
8.	Penguatan pendidikan, dan teknologi, serta digitalisasi.	Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan
9.	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
10.	Penguatan kesataraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
11.	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati.
12.	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
13.	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	Peningkatan kualitas kawasan permukiman
14.	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.	Peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
15.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	Peningkatan produksi perikanan
16.	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
17.	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga

Tabel IV.5

Dukungan Terhadap Program Terbaik Tercepat

NO	Program Terbaik Tercepat	Dukungan Kabupaten
1.	Memberikan makan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.	Pemberian Makan Bergizi Gratis serta bantuan perbaikan gizi untuk balita dan ibu hamil disukseskan melalui • Pemantauan pelaksanaan program agar program yang dicanangkan pusat dapat teralisasi dan terlaksana dengan baik di daerah. • Pemantauan kualitas Sanitasi dan dapur MBG untuk menjamin keamanan dan kesehatan makanan bagi penerima manfaat. • Penyediaan data dan informasi penerima MBG, serta penyusunan peta dan laporan pelaksanaan MBG agar dapat diketahui ketimpangan distribusi untuk upaya intervensi yang tepat sasaran • Stimulasi pemberian makan bergizi dan sehat untuk menurunkan prevalensi stunting sebagai investasi SDM berkualitas jangka Panjang
2.	Menyelnggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.	Pemeriksaan kesehatan Gratis, penuntasan TBC, dan membangun fasilitas kesehatan lengkap, di sukseskan melalui • Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Germas, dengan tujuan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dan menekan angka penularan TBC • Pembangunan Rumah Sakit daerah dengan fasilitas lengkap, berkualitas degan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi • Melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan tes kesehatan secara berkala
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Peningkatan Produktivitas lahan pertanian disukseskan melalui • Peningkatan komoditas pangan utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional. • Optimalisasi Budidaya Perikanan dengan peningkatan produksi perikanan budidaya dan mendorong pengembangan budidaya ikan serta upaya memenuhi kebutuhan pasar dan protein masyarakat. • Subsidi Pupuk bagi petani agar dapat meningkatkan hasil pertanian. • Pembinaan dan Pendampingan serta fasilitasi akses teknologi dan informasi kepada petani, peternak, dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki	Pembanguan Sekolah unggul dan terintegrasi ditingkatkan melalui • Meningkatkan kerjasama peningkatan mutu pendidikan dengan pemerintah

NO	Program Terbaik Tercepat	Dukungan Kabupaten
	sekolah-sekolah yang perlu renovasi	• Peningkatan Skor Literasi dan numerasi • Peningkatan rehabilatasi dan renovasi sekolah yang perlu mengalami perbaikan • Penambahan laboratorium pada tiap sekolah • Penembahan ruang TIK untuk meningkatkan keahlian anak
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.	Pengentasan kemiskinan absolut melalui penambahan kartu kesejahteraan sosial disukung melalui • Pemberian Kartu BPJS-PBI bagi masyarakat yang membutuhkan • Pemberian kartu BPJS Tenagakerjaan untuk masyarakat yang bekerja pada sektor non-formal
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara.	-
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Pembangunan Infrastruktur Desa dan penyediaan rumah layak huni dicapai melalui • Pembangunan jala desa, jalan usaha tani, jaringan irigasi • Memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak hubi bagi keluarga miskin
8.	Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhdap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.	-

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan "Mewujudkan Jawa Tengah Yang Maju Dan Berkelanjutan" dengan kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada tema **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional",** dengan 8 (delapan) upaya dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut;

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;

2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki kebijakan untuk pencapaian tujuan serta sasaran yang dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai berikut Tabel IV.6 berikut.

Tabel IV.6
Kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Prioritas Provinsi Jateng Tahun 2026	Fokus Upaya
Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	a. pelayanan publik yang merata dan inklusif; b. penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, risiko, dan riset; c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian; d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah; e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabiltas APIP; f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum; g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan; h. kelembagaan pangan efektif; i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum; j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional; l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; p. serta penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan; b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;

Prioritas Provinsi Jateng Tahun 2026	Fokus Upaya
	c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan; f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal; g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah; i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana; k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana; l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa; m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi; n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa; o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan; serta p. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia.
Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan; b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding; c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan; d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying; e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan; f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer; g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan; h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah; i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko; j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan; k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial; l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah; m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat; n. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan; p. pemetaan kerja sama dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan; q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan; r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan; s. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian; t. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial; u. peningkatan pembangunan berbasis gender; v. peningkatan ketahanan keluarga; w. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tabel IV.7

Program Prioritas Daerah pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 yang Mendukung Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No.	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	PROGRAM Prioritas RKPD Kabupaten Blora 2026 yang Mendukung
1	**Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan**	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - PROGRAM PENCATATAN SIPIL - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	PROGRAM Prioritas RKPD Kabupaten Blora 2026 yang Mendukung
	Berintegritas Dan Dinamis	- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - PROGRAM PENATAAN DESA - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DPRD - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANAGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	PROGRAM Prioritas RKPD Kabupaten Blora 2026 yang Mendukung
		- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (PUPR) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (PUPR) -
2	**Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan**	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

No.	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	PROGRAM Prioritas RKPD Kabupaten Blora 2026 yang Mendukung
		- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (PUPR) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (PUPR) - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya**	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

No.	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	PROGRAM Prioritas RKPD Kabupaten Blora 2026 yang Mendukung
	Saing Dan Berkarakter	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.2.3 Keselarasan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Tahun 2026

Rencana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora tahun 2026 ditetapkan selain dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026, juga disusun dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026 dan pembangunan daerah provinsi dalam RKPD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 ditunjukkan dengan keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, target pengembangan wilayah, dan dukungan program prioritas daerah.

Tabel IV.8
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan Provinsi Tahun 2026

No	Indikator Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	Satuan	Target RKP Tahun 2026	Target RKPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2026	Indikator Daerah	Satuan	Target RKPD Kab. Blora Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80-6,3	5,7 – 6,00	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,25-4,05
2.	PDRB perkapita	Ribu/ Rupiah	5.870 (GNI per Kapita, US$)	54,2 – 55,7	PDRB perkapita	Ribu/ Rupiah	41,77 s.d. 43,48
3.	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5	8,70-8,58	Tingkat Kemiskinan	%	10,89-10,28
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96	4,27 – 4,71	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,40-2,85
5.	Indeks Rasio Gini	Indeks	0,377 – 0,380	0,351 – 0,361	Indeks Rasio Gini	Indeks	-
6.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57	0,63	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,61
7.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	37,14	5,32	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,67	75,73	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,62

Keterangan :
*) target Jawa Tengah berdasarkan Permendagri No 10 Tahun 2025

Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah Kabupaten Blora tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan. Pembangunan Kabupaten Blora tidak terlepas dari sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Target pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Blora dan keselarasannya terhadap target Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel IV.9 berikut:

Tabel IV.9

Persandingan Sasaran Makro RKPD Kabupaten Blora dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Sasaran Makro	Satuan	RKPD Kab. Blora 2026	RKPD Prov. Jateng 2026	RKP 2026
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	3,25-4,05	5,00 - 5,80	5,80-6,30
2.	Inflasi	%	2,5-6	3,0 ± 1	2,7
3.	Tingkat Kemiskinan	%	10,89-10,28	8,67-7,28	6,5-7,5
4.	IMM/IPM (Kab. Blora)	Indeks	72,61	74,55	0,57
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,19	93,23	92,11-92,21
6.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	12,98	13,36
7.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,55	8,20	9,45
8.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,07	74,68	74,68
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,4-2,85	4,90 - 4,30	4,44-4,96
10.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	87,49	-	-
11.	Gini Rasio	Angka		0,360	0,37-0,38
12.	Indeks ketahanan Pangan (IKP)	Nilai	87,35		75,4
13.	POU (*(Prevalence of Undernourishment)*)	Nilai	11,26		6,55

4.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blora Tahun 2026

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Blora. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana berikut:

1. Prioritas Program Infrastruktur
   a. Infrastruktur jalan dan jembatan yang lebih berketahanan dalam menghadapi cuaca ekstrem.
   b. Pemeliharaan drainase secara menyuluruh dan periodik sehingga dapat menanggulangi bencana banjir.
2. Prioritas Program Pendidikan
   a. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
   b. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah.
   c. Peningkatan peran dan kompetensi guru.
   d. Peningkatan perhatian kepada siswa ABK secara khusus.
3. Prioritas Program Kesehatan

a. Pengembangan lingkungan sehat.
b. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
c. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
d. Inovasi program penanganan stunting yang terintegrasi dengan dukungan dan partisipasi dari seluruh perangkat daerah serta dari berbagai elemen masyarakat.

4. Prioritas Program Sosial
   a. Memiliki basis data kemiskinan dan pengangguran yang jelas dan terperinci.
   b. Program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, kolaboratif dan adaptif.
5. Prioritas Program Ekonomi Dan Investasi
   a. Pengembangan koperasi melalui akselerasi pembiayaan dan investasi.
   b. Penguatan ekonomi UMKM.
   c. Peningkatan hard skill dan soft skill pelaku UMKM dengan memberikan fasilitasi platform digital marketing.
   d. Memperbanyak Pameran, festival dan event-event.
   e. Peningkatan investasi daerah dengan integrasi perizinan yang mudah dan cepat.
   f. Pemanfaatan asset daerah dengan lebih optimal untuk peningkatan PAD.
   g. Penguatan BUMD untuk inovasi peningkatan PAD dan pelayanan masyarakat.
6. Prioritas Program Pertanian

   Pertanian merupakan sektor yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat lokal, bagaimana menarik minat masyarakat kembali bertani, mengolah sawah, menghasilkan beras. untuk kembali merangsang minat masyarakat bercocok tanam padi, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pengadaan pupuk, benih dan alat tractor serta teknik penamanan pagi modern yang hasil panennya lebih banyak dan cepat.

4.2.5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah “**Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan**”**.** Tema pembangunan Kabupaten

Blora diselaraskan dan mendukung tema dalam RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah. Persandingan tema RKPD Kabupaten Blora tahun 2026 dengan tema pembangunan dalam RPJMN dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel IV.10
Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tema Pembangunan dalam RKP Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional	Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan

Tema Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2026 tersebut akan dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2026. Prioritas RKPD Kabupaten Blora tahun 2025 disusun berdasar permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan tahun 2024 dan Isu strategis daerah 2025-2029 serta keterkaitan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab II. Bab ini akan menyajikan rumusan akhir permasalahan pembangunan, isu strategis disandingkan dengan prioritas RKPD 2026, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora tahun 2026. Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Blora 2026 juga mengacu dan mempertimbangkan muatan prioritas RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2026 untuk menjaga sinergi Pusat-Daerah dan menjaga koherensi pendekatan *top down.*

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten pada Tahun 2025, selain memedomani RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029, dan memedomani RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045, serta disusun sejalan dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2025-2045 dengan Visi “Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya”, dan 6 Misi sebagaiman berikut

1. Transformasi Sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas,
2. Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan,

3. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan
5. Tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan
6. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut prioritas pembangunan Kabupaten Blora dalam RKPD Tahun 2026 dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan
2. Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif
3. Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif
5. Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat
6. Penguatan landasan wilayah yang Kondusif dan stabil untuk mewujudkan kemandirian daerah

Prioritas RKPD adalah instrumen yang mengarahkan supaya RKPD tahun 2026 fokus menangani isu strategis dan efektif mengeksekusi janji politik kepala daerah saat kampanye, yang dirumuskan dalam program unggulan daerah, serta mempertimbangkan pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari pendekatan politik perencanaan pembangunan.

Beberapa program dan kegiatan yang langsung memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 6 isu strategis dan permasalahan pembangunan dan mendapatkan perhatian khusus karena sesuai prioritas pembangunan tahun 2026. Tabel IV.11 menyajikan dukungan rencana program prioritas berdasar kelompok prioritas RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026.

No	Isu Strategis Daerah	Program Prioritas yang mendukung
1	Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

No	Isu Strategis Daerah	Program Prioritas yang mendukung
		- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
3	Peningkatan produktivitas daerah	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

No	Isu Strategis Daerah	Program Prioritas yang mendukung
		- PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (PUPR) - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Isu Strategis Daerah	Program Prioritas yang mendukung
4	Pemerintahan yang berintegritas	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - PROGRAM PENCATATAN SIPIL - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DPRD - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

No	Isu Strategis Daerah	Program Prioritas yang mendukung
		- PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA - PROGRAM PENANGANAN BENCANA - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANAGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
6	Menciptakan lingkungan yang kondusif	- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

No	Isu Strategis Daerah	Program Prioritas yang mendukung
		- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tabel IV.11

Program Prioritas yang Mendukung untuk Prioritas Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026

No	Prioritas Daerah Kabupaten Blora	PROGRAM Prioritas RKPD 2026 Yang Mendukung
1	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
2	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No	Prioritas Daerah Kabupaten Blora	PROGRAM Prioritas RKPD 2026 Yang Mendukung
		- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
3	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

No	Prioritas Daerah Kabupaten Blora	PROGRAM Prioritas RKPD 2026 Yang Mendukung
		- PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (PUPR) - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4	Penguatan landasan tata kelola	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - PROGRAM PENCATATAN SIPIL

No	Prioritas Daerah Kabupaten Blora	PROGRAM Prioritas RKPD 2026 Yang Mendukung
	pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DPRD - PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

No	Prioritas Daerah Kabupaten Blora	PROGRAM Prioritas RKPD 2026 Yang Mendukung
		- PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA - PROGRAM PENANGANAN BENCANA - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANAGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
6	Penguatan landasan wilayah yang Kondusif dan stabil untuk mewujudkan kemandirian daerah.	- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.2.5.1 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2026 adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seluruh jenis pelayanan dasar dalam SPM ditargetkan 100% kecuali pada bidang pekerjaan umum dan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Tabel IV.12 menunjukkan target pemenuhan standar pelayanan minimal tahun 2026.

Tabel IV.12
Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Blora Tahun 2026

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan	Pendidikan anak usia dini	100%
		Pendidikan dasar	100%
		Pendidikan kesetaraan	100%
2.	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
		Pelayanan kesehatan balita	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%
3.	Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	91,68%
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	71,00%
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	
		Pelayanan informasi rawan bencana	100%
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
6.	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100%
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	100%
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dukungan RKPD Kabupaten Blora terhadap pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) disajikan pada Tabel IV.13 di bawah ini.

Tabel IV.13
Dukungan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Layanan Dasar SPM Kab/Kota	PROGRAM/Kegiatan Prioritas RKPD 2026 yang Mendukung	Perangkat Daerah
0.	**SPM Bidang Pendidikan**		
0.1.	Pendidikan anak usia dini	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
0.2.	Pendidikan dasar		
0.3.	Pendidikan kesetaraan		
1.	**SPM Bidang Kesehatan**		
1.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1.2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
1.3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
1.4.	Pelayanan Kesehatan Balita		
1.5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
1.6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
1.7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
1.8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
1.9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		

No.	Jenis Layanan Dasar SPM Kab/Kota	PROGRAM/Kegiatan Prioritas RKPD 2026 yang Mendukung	Perangkat Daerah
1.10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		
1.11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
1.12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
2.	**SPM Bidang Pekerjaan Umum**		
2.1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	**SPM Bidang Perumahan Rakyat**		
3.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
3.2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
4.	**SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		
4.1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
4.2.	Pelayanan informasi rawan bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
4.4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;		

No.	Jenis Layanan Dasar SPM Kab/Kota	PROGRAM/Kegiatan Prioritas RKPD 2026 yang Mendukung	Perangkat Daerah
		- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
4.5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - Investigasi Kejadian Kebakaran - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	**SPM Bidang Sosial**		
5.1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		
5.3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
5.4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
5.5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		

4.2.5.2 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan masih menjadi agenda prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026. Persentase angka kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah 11,42% belum mencapai target pada RPJMD sebesar 10,84%. Sedangkan target persentase angka kemiskinan Tahun 2026 sebesar 10,28%. Untuk mencapai tersebut diperlukan sinergi bersama antar perangkat daerah dengan program lintas sektoral.

Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar pemangku kepentingan dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai

lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Blora masih berfokus untuk menyelesaikan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0,6% melalui konversi program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan berbagai sektor baik BUMD, BUMN, Pemerintah Desa maupun Lembaga Non pemerintah seperti TJSP/CSR. Selanjutnya Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Blora akan melanjutkan kegiatan penanggulangan kemiskinan ke desil 2 dan desil 3 dengan tetap berpedoman pada 3 (tiga) strategi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan untuk menjamin untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program baik yang berdampak langsung, tidak langsung atau hanya sebagai penunjang untuk mengurangi angka kemiskinan. Berikut program-program pendukung strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora:

Tabel IV.14
Strategi dan Program Prioritas Tahun 2026 yang Mendukung

Strategi Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM Prioritas yang Mendukung	Perangkat Daerah
Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

Strategi Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM Prioritas yang Mendukung	Perangkat Daerah
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DP4
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
Meningkatkan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM Prioritas yang Mendukung	Perangkat Daerah
Meminimalkan Kantong Wilayah Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

4.2.5.3 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*

Percepatan penurunan *stunting* menjadi kebijakan melalui Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Penurunan *stunting* penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak, terhambatnya perkembangan otak, dan menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit kronis.

Melihat pentingnya penanganan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Blora telah menghimbau semua *stakeholder*, khususnya camat dan kepala desa atau lurah untuk memberikan dukungan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Blora, baik kebijakan maupun penganggarannya.

Merujuk pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, terdapat Lima pilar utama yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu (i) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah; (ii) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (iii) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan; (iv) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan (v) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten/ Kota yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan melalui aksi yang terintegrasi. Aksi Integrasi merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama sehingga institusi penanggung jawab Aksi Integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Tim yang sudah ditunjuk oleh Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh Aksi Integrasi yang diperlukan untuk memastikan intervensi lintas sektor untuk penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Stunting dapat dicegah melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan sasaran remaja putri, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga berisiko *stunting*, masa 1000 (seribu)

Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/ penyakit.

Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi. Untuk itu perlunya pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi pencegahan *stunting*.

Intervensi penurunan *stunting* terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yaitu:



Gambar IV.1

Akur Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi *Stunting*

Pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan *stunting* dilakukan dengan kerangka 8 Aksi Konvergensi Stunting. Kerangka 8 Aksi ini dilakukan sebagai aksi yang konvergen (kolaborasi) semua *stakeholder*.

Persoalan *stunting* tidak hanya persoalan kesehatan, sehingga aksi konvergensi *stunting* harus melibatkan semua pihak.

Tahapan 8 aksi konvergensi *stunting* meliputi:

1. Analisis situasi, yaitu mengidentifikasi sebaran jumlah dan prevalensi *stunting*, Keluarga berisiko *stunting*, kondisi cakupan 29 indikator layanan esensial dan 35 indikator layanan *supply*, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat identifikasi sebaran *stunting*. Dari analisis situasi ini ditentukan desa/kelurahan lokus stunting tahun rencana berdasarkan kriteria desa/kelurahan dengan Jumlah keluarga berisiko *stunting*-nya tinggi, jumlah balita dan prevalensi balita *stunting*-nya tinggi serta cakupan layanannya masih belum optimal.
2. Rencana Kegiatan, yaitu Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi dan target 64 Indikator layanan esensial dan *supply*. Dalam tahapan ini Kabupaten Blora berupaya mendorong *stakeholders*/perangkat daerah dan lintas sektor untuk menyusun rencana kegiatan dengan lokus desa/kelurahan lokus *stunting*. Kegiatan yang didesain tidak harus sama/baru, tetapi dapat juga kegiatan yang sudah ada/lama yang diberi afirmasi *stunting*. Berpedoman pada SE Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel IV.15

Daftar Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2026

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	OPD
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan	Dinas Kesehatan

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	OPD
		pemberian obat massal)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten kota	Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan kebijakan evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosil	Sekretariat Daerah
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	OPD
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	OPD
	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	

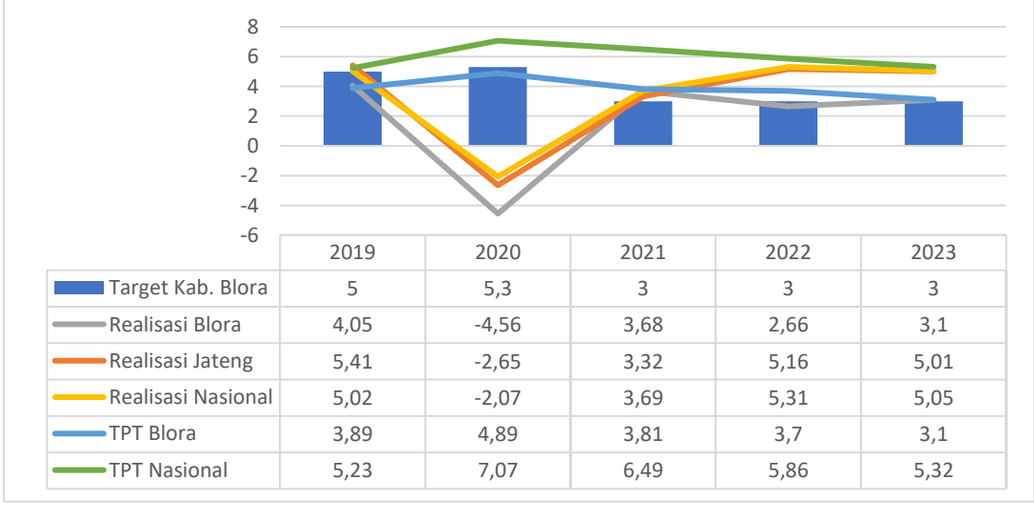
3. Rembuk *stunting*, yaitu upaya memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara OPD dengan non-pemerintah dan masyarakat luas secara melalui Rembuk Stunting tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Rembuk *stunting* dapat disebut sebagai “Musrenbang Stunting”. Agar selaras dengan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan Rembuk Stunting harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan sebelumnya telah menetapkan lokus prioritas dan mengidentifikasi usulan rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan percepatan penurunan *stunting* tahun rencana.
4. Terkait Peraturan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *stunting*, di Kabupaten Blora telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora.
5. Pembinaan Pelaku dan Pemerintah Desa/ Kelurahan, yaitu pembinaan pemerintah Desa/kelurahan dan Masyarakat di antaranya

KPM, TPK dan TPPS tingkat Desa/Kelurahan. Pembinaan tersebut diusulkan untuk dilaksanakan oleh OPD terkait yang membawahi masing-masing unsur terkait.

6. Sistem Manajemen Data, yaitu Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
7. Pengukuran dan Publikasi Stunting, yaitu melakukan publikasi hasil analisis prevalensi dan hasil audit kasus *stunting*.
8. Reviu Kinerja Tahunan, yaitu Reviu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja program percepatan penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir

4.2.5.4 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Blora tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2019 sampai dengan 2023 masih berada dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Tengah. Sedangkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blora tahun 2019 sampai dengan 2023 berada dibawah TPT nasional.



	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kab. Blora	5	5,3	3	3	3
Realisasi Blora	4,05	-4,56	3,68	2,66	3,1
Realisasi Jateng	5,41	-2,65	3,32	5,16	5,01
Realisasi Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05
TPT Blora	3,89	4,89	3,81	3,7	3,1
TPT Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Gambar IV.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Serta Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019–2023

Berdasarkan Gambar IV.2 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blora belum memberikan dampak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui:

1. Peningkatan investasi

   Peningkatan investasi merupakan hal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dan penyerapan tenaga kerja, karena memiliki daya ungkit yang lebih baik untuk stabilitas ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi yaitu:

   a. Kemudahan perijinan investasi dan dukungan perijinan.
   b. Promosi potensi Kabupaten Blora.
   c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan peruntukan industri.
   d. Kepastian lingkungan yang kondusif.

2. Peningkatan produktivitas sektor unggulan.

   Peningkatan produktivitas merupakan ukuran efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga meningkatkan daya saing. Peningkatan produktivitas sektor unggulan diutamakan dari lapangan usaha yang masuk kategori sektor basis. Berdasarkan pengukuran, sektor basis Kabupaten Blora meliputi:

   a. pertanian, kehutanan dan perikanan.
   b. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
   c. Penyediaan akomodasi makan minum.
   d. Jasa keuangan dan asuransi.
   e. Jasa lainnya.

   Peningkatan produktivitas sektor unggulan meliputi:

   a. Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
   b. Diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan.
   c. Penguatan promosi produk perikanan.
   d. Penguatan daya beli masyarakat.
   e. Penguatan produk lokal untuk penyediaan akomodasi makan minum.
   f. Peningkatan kapasitas produksi melalui pelatihan ketrampilan teknis dan manajemen produksi, penerapan teknologi dan inovasi dalam proses produksi serta pengembangan produk lokal.

3. Peningkatan aksesibilitas

   Aksesibilitas yang baik sangat penting untuk mendukun pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Pemerintah Kabupaten Blora akan berfokus pada peningkatan aksesibilitas transportasi dan

konektivitas antar daerah yang mendukung kelancaran berbagai aktivitas ekonomi. Beberapa langkah yang akan diambil adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur Transportasi – Peningkatan konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten, dan antar provinsi akan menjadi prioritas. Pembangunan dan perbaikan jalan raya, fasilitas transportasi umum, serta jaringan logistik yang efisien akan memperlancar distribusi barang dan mempercepat akses pasar untuk produk-produk lokal.
b. Peningkatan Infrastruktur Digital – Dalam era digital, aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Pemerintah Kabupaten Blora akan memperluas jaringan internet dan menyediakan pelatihan teknologi digital untuk UMKM dan masyarakat umum agar dapat memanfaatkan peluang di dunia digital, termasuk untuk pemasaran produk melalui e-commerce dan platform digital lainnya.

Tabel IV.16
Strategi dan Program Prioritas Tahun 2026 yang Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Prioritas yang Mendukung	Perangkat Daerah
Peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	
Peningkatan produktivitas sektor unggulan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DP4
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Program Penyediaan dan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Prioritas yang Mendukung	Perangkat Daerah
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	DINDAGKOP
	Program Pengembangan Umkm	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	Program Pengembangan Ekspor	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
	Program Hubungan Industrial	
	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	Program Penataan Bangunan Gedung	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
Peningkatan Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
	Program Pengelolaan Pelayaran	DINRUMKIMHUB
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO

4.2.5.5 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pembangunan Kewilayahan

Strategi pengembangan wilayah Kawasan Banglor merupakan bagian dari percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Adapun terkait pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, pengembangan wilayah juga memperhatikan Keputusan Menteri Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) wilayah ekoregion. Kabupaten Blora dalam kaitan wilayah ekoregion tersebut masuk bagian dari ekoregion kompleks dataran fluvial Batang-Demak-Pati-Blora di mana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada pada Ekoregion tersebut meliputi Batang, Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Tembang dan Semarang.

Dalam konstelasi regional Blora termasuk dalam kawasan Banglor bersama dengan Kabupaten Rembang. Menurut Perpres tersebut, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kawasan Banglor merupakan gerbang sebelah timur Jawa Tengah sebagai jalur penghubung antara Kedungsepur (PKN Semarang) dengan Gerbangkertosusila dan (PKN Surabaya) melalui jalur Pantura. Banglor berfungsi sebagai penyuplai minyak dan gas bumi melalui Blok Cepu di Blora. Arah kebijakan pengembangan Rembang Blora (Banglor) sesuai dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Tengah.

1. Blora terletak di perbukitan lipatan dan memiliki potensi Blok Migas Cepu yang merupakan Kawasan Strategis Nasional;
2. Hasil produksi sektor kehutanan (kayu) di Banglor merupakan suplai bagi industri mebel/ furnitur di Jepara;
3. Sektor pertanian di Blora memiliki komoditas unggulan padi sawah (582 ribu kuintal) dan jagung (362 ribu kuintal);
4. Potensi wisata yang dapat dikembangkan Goa Terawang, Goa Sentono, Museum Mahameru, Kraton Jipang, Grojogan Bengawan Sewu, Waduk Tempuran, dan Wana Wisata Kedung Pupur.

Pembangunan dengan pendekatan spasial merupakan salah satu skenario perencanaan pembangunan untuk mengurangi risiko terjadinya ketimpangan wilayah. Dengan pendekatan spasial ini diharapkan perencanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan dimensi ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Selain itu, pendekatan spasial juga diharapkan dapat terfokus pada lokus yang menjadi prioritas daerah, seperti lokus kemiskinan ekstrem, lokus *stunting*

dan prioritas lainnya yang perlu segera dilakukan penanganan. Deskripsi program/kegiatan RKPD 2026 yang terkait dengan aspek spasial disajikan sebagai berikut.

Tabel IV.17

Intervensi Program Spasial Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	Deskripsi Intervensi Program / Kegiatan Indikatif	Lokasi Prioritas / Kelompok Prioritas
1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 3. Program Pengembangan Permukiman 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Prioritas pembangunan: Pemenuhan penanganan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi serta PJU	Kabupaten Blora
2	Pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah	1. Program Perekonomian Dan Pembangunan 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Blora Kelompok sasaran khusus: 1. Pelaku usaha rumah tangga –Mikro –kecil 2. Petani dan Petani Milenial
3	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 4. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Kabupaten Blora
4	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Masyarakat	1. Program Perekonomian Dan Pembangunan 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Kelompok sasaran: Kelompok masyarakat miskin dan rentan Lokasi: Seluruh Masyarakat Kabupaten Blora;

4.2.5.6 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Hasil Perencanaan Partisipatif

4.2.5.6.1 Musrenbang RKPD di Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pagu Indikatif Kecamatan, kebijakan yang diambil pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah dengan mengalokasikan sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD. Batasan anggaran yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah sebesar Rp20.000.000.000. Besaran alokasi PIK dihitung untuk masing-masing kecamatan secara proporsional berdasarkan indikator penilaian yakni jumlah penduduk miskin, keterjangkauan wilayah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan. Adapun kebijakan yang diambil dalam RKPD Tahun 2026, yaitu:

1. Minimal 90% dari pagu dialokasikan untuk bidang fisik. Program dan kegiatan untuk bidang fisik dialokasikan kepada SKPD yang memiliki kewenangan kabupaten dalam pembangunan atau penanganan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Hal ini untuk mendukung alokasi minimal 40% belanja infrastruktur dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Maksimal 5% dari pagu dialokasikan untuk bidang sosial budaya.
3. Maksimal 5% dari pagu dialokasikan untuk bidang ekonomi.

4.2.5.6.2 Musrenbang Gen-Z, Perempuan dan Kelompok Rentan

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sedapat mungkin bersifat inklusif, di mana perencanaan pembangunan memberikan ruang bagi semua unsur untuk memberikan masukan dan usulan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengusul dengan mempertimbangkan prioritas dan pentingnya usulan tersebut untuk dapat diakomodir. pelaksanaan Musrenbang Keren merupakan salah satu medium yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora untuk

menampung usulan dari unsur Perempuan dan Kelompok Rentan (Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas).

4.2.5.7 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Pembangunan Daerah Jangka Panjang

Target Indikator Makro pada RKPD Tahun 2026 memperhatikan target indikator makro (Indikator Utama Pembangunan) pada RPJPD 2025-2045 yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Adapun Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.18
Dukungan Program yang Mendukung Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Blora Tahun 2026

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
2.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	
3.	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	
4.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	
5.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	
6.	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	
7.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	
	c) Numerasi SD/Sederajat	
	d) Numerasi SMP/Sederajat	
8.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	
9.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	
10.	Harapan Lama Sekolah	
11.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
12.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
13.	Tingkat Kemiskinan	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - PROGRAM PENANGANAN BENCANA - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - PROGRAM PENCATATAN SIPIL - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN - PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR - MINUM - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA - KONSTRUKSI - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN - PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN - TRADISIONAL - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN - PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR - MINUM - PROGRAM PENGELOLAAN DAN - PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS - DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN - BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN - PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENATAAN DESA - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN - TRANSMIGRASI - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
15.	PDRB per kapita	- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
16.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
17.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
18.	Rasio Kewirausahaan Daerah	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
19.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
20.	*Return on Asset* (ROA) BUMD	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
21.	Disparitas harga	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
23.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
24.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
25.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
26.	Persentase Desa Mandiri	- PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - PROGRAM PENATAAN DESA
27.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
28.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
29.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
30.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
31.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DA USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
32.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	- PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
33.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
34.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
35.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
36.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
37.	Indeks Pembangunan Keluarga	- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
38.	Indeks Ketimpangan Gender	- PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
39.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	- PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
40.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	- PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL
41.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
42.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
43.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM -
44.	Indeks Ketahanan Pangan	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
45.	Penurunan emisi GRK	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
46.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
47.	Indeks Reformasi Birokrasi	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
48.	Indeks Reformasi Hukum	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
49.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
50.	Indeks Pelayanan Publik	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
51.	Indeks Integritas Nasional	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
52.	Jumlah kejadian Konflik SARA	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Indikator Utama Pembangunan	Program Prioritas
		- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANAGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
53.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
54.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
55.	Total Kredit/PDRB	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
56.	Kapabilitas Inovasi	- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.2.5.8 Prioritas Pembangunan Daerah yang Mendukung Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik tidaklah muncul dan tumbuh dalam ruang hampa. Akan tetapi inovasi muncul karena banyaknya permasalahan dan tuntutan atas persoalan dimasyarakat. Kepercayaan dan kepuasan publik merupakan sendi yang substantif dalam paradigma birokrasi *new public service* yang menempatkan masyarakat sebagai preferensi utama. Implikasinya, birokrasi harus benar-benar melayani publik sebagai konsekuensi dari karakteristik organisasi sektor publik, sehingga inovasi menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan harapan memenuhi kebutuhan publik. Keberadaan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Blora menjadi penting guna memperbaiki kinerja pemerintah sehingga lebih efektif, efisien, dan memperkuat legitimasi kepercayaan masyarakat. Maraknya inovasi pelayanan publik menjadi penanda positif yang dapat dibaca sebagai komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

Solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam inovasi, seperti menggalakkan *collaborative governance* termasuk di dalamnya *collaborative innovation*, yang melibatkan interaksi berbagai aktor dalam proses inovasi. Budaya inovasi di Kabupaten Blora telah ada sejak tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019

tentang Inovasi Daerah. Perda tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau novasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Blora setiap tahunnya juga memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka merangsang agar perangkat daerah dan masyarakat untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan mendorong masyarakat untuk selalu meningkatkan SDM-nya sehingga Kabupaten Blora mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, Pemberdayaan Masyarakat serta peningkatan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) dan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 maka disusunlah Penguatan Riset dan Inovasi dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penguatan riset dan inovasi dapat mendukung keberhasilan pencapaian misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah maka Tema Prioritas Riset dan Inovasi ditetapkan untuk mendukung salah satu misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Blora yaitu “mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat serta misi pembangunan jangka menengah, yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan” maka Tema prioritas riset dan inovasi Kabupaten Blora adalah **“Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”.**

4.2.5.8.1 Gerakan Sejuta Kotak Umat (Menjadikan Kotoran Ternak Bermutu Dan Bermanfaat)

Inovasi Gerakan Sejuta Kotak Umat adalah sebuah gerakan masif yang bertujuan untuk mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik bermutu tinggi, dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh. Program ini dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Secara ekonomi, Inovasi Gerakan Sejuta Kotak Umat atau Geseku membantu menekan biaya produksi petani hingga 80% melalui substitusi pupuk kimia dengan pupuk organik. Di sisi sosial, gerakan ini memberdayakan peternak dan petani kecil melalui pelatihan intensif, sehingga mereka mampu mengolah limbah ternak menjadi produk bernilai tambah. Dari segi lingkungan, Inovasi ini mampu mengatasi permasalahan pencemaran akibat limbah ternak dengan memanfaatkannya secara produktif. Teknologi sederhana seperti dekomposer digunakan untuk mempercepat proses fermentasi, memastikan efisiensi dalam produksi pupuk organik.

4.2.5.8.2 99 Pedati (99 Petani Muda Kreatif dan Berprestasi)

Kabupaten Blora mempunyai pada Tahun 2024 mengangkat Inovasi 99 Pedati (99 Petani Muda Kreatif dan Berprestasi) yang sangat relevan dengan tema "**Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan**", Inovasi ini bertujuan untuk

1. Membangun Generasi Petani Unggul dan Berdaya Saing

   Program ini bertujuan mencetak generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam sektor pertanian, sehingga mampu menghadapi tantangan modern seperti digitalisasi pertanian dan pasar global.

   Petani muda yang terlatih akan mengembangkan pertanian berbasis teknologi dan inovasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

2. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lokal

   Fokus pada pengelolaan potensi unggulan Blora seperti jagung, kedelai, dan produk hortikultura, sekaligus memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things (IoT) untuk efisiensi.

   Mendorong keberlanjutan sektor pertanian sekaligus menjadikannya lebih menarik bagi generasi muda.

3. Kolaborasi dan Pemberdayaan Masyarakat

   Melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas tani, dan dunia usaha dalam pelatihan dan pendampingan petani muda.

   Hal ini mencerminkan semangat "sesarengan" dalam membangun Blora dengan kolaborasi semua pihak.

4. Meningkatkan Ekonomi Lokal dan Mencegah Urbanisasi

   Dengan memberdayakan pemuda di pedesaan melalui pertanian inovatif, program ini dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mencegah migrasi generasi muda ke kota.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta unsur pendukung, unsur penunjang dan unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Program prioritas merupakan program utama yang harus diutamakan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan *outcome* yang mendukung capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah yang dilaksanakan tahun 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025-2029.

Bab ini menyajikan deskripsi rencana kerja dan pagu pendanaan RKPD Kabupaten Blora tahun 2026 yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026;
2. Deskripsi seluruh program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan.

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan dalam upaya mewujudkan visi Bupati Blora **"Sesarengan Mbangun Blora: Maju dan Berkelanjutan",** dengan prioritas pada Tahun 2026 adalah **Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan** Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III maka kerangka pendanaan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel V.1

Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.187.952.957.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	527.680.436.000
4.1.01	Pajak Daerah	145.307.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	259.264.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	118.707.936.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	.401.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.660.272.521.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.566.901.641.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.370.880.000
	Jumlah Pendapatan	**2.187.952.957.000**
5	**BELANJA DAERAH**	2.163.952.957.000
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.550.898.187.175**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.078.537.922.087
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.969.728.688
5.1.03	Belanja Bunga	11.241.840.000
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.05	Belanja Hibah	50.880.696.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.268.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**148.689.176.682**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.239.484.682
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.144.601.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.105.091.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**33.440.837.143**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	33.440.837.143
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**30.924.756.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	415.924.756.000
	Jumlah Belanja	**2.160.832.521.000**
	Total Surplus/(Defisit)	**44.000.000.000**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**65.000.000.000**

KODE	URAIAN	JUMLAH
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**65.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**-24.000.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

5.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan perangkat daerah Kabupaten Blora tahun 2026 dijabarkan ke dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Program telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selengkapnya daftar program dan kegiatan untuk RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 sebagai berikut:

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan khususnya pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang meliputi pelaksanaan penanganan pengurangan Anak Tidak Sekolah (ATS), pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan, pembinaan dan pengembangan

potensi peserta didik melalui pembelajaran digital dan pemanfaatan teknologi informasi serta partisipasi siswa dalam lomba dan olimpiade pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan tata kelola Pendidikan pada semua jenjang, peningkatan iklim inklusivitas dan keamanan melalui unit layanan disabilitas, penyediaan bantuan biaya kepada siswa kurang mampu melalui pelaksanaan Kartu Blora Pintar, penyediaan Beasiswa bagi pelajar dan pembiayaan operasional sekolah melalui BOS

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini berada pada dua jenjang SD dan SMP yang di mana diarahkan untuk peningkatan kualitas guru Bahasa jawa dan pembinaan spiritual kesehatan mental melalui *sekolah sisan ngaji*

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi guru melalui bimbingan teknis, peningkatan kesejahteraan guru PAUD melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas kedisiplinan ASN guru, peningkatan kualitas guru melalui uji kompetensi dan kenaikan jabatan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan dan pendampingan pendirian sekolah melalui layanan ijin pendirian sekolah.

5.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif dan kesehatan lansia, melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan data, pemenuhan standar operasional (SOP), peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar, Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; Peningkatan kesehatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan penyelenggaraan

kabupaten sehat; Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, pengendalian vektor demam berdarah dengue dan malaria, penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan; Pengelolaan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ); pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan universal child immunization (UCI) desa; Pemenuhan fasilitas dan peningkatan layanan primer dan rujukan melalui fasilitasi akreditasi kesehatan, peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, Penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) serta pemenuhan layanan unggulan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi), Pendampingan institusi layanan primer, Pelayanan pengujian kalibrasi; serta pemenuhan prasarana dan sarana di 3 RSUD; Pengelolaan sistem informasi kesehatan; serta Distribusi dan pengadaan alat kesehatan, obat bahan habis pakai, vaksin, makan dan minuman di fasilitas kesehatan melalui pengembangan tanaman obat tradisional; serta penyediaan obat, reagen dan vaksin esensial.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga Kesehatan; Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan/ seminar/ workshop/ magang/ yang lainnya yang mendukung program prioritas; Perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat Kabupaten; Peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengawasan Perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dan

pemeriksaan *post market* pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (Ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lain-lain), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, daycare, home visit/home care, dan edukasi pasien dan keluarga pasien.

5.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan rehabilitasi check dam; pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten; Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir; Operasi dan Pemeliharaan Check Dam; Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya; Pembangunan Kanal Banjir; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Pembangunan Tanggul Sungai; Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya; kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Bendung Irigasi; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja; Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota; Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; Rekonstruksi Jalan; Pemeliharaan Rutin Jembatan; Rehabilitasi Jembatan; Survey Kondisi Jalan/Jembatan; Rehabilitasi Jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis; kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota; kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi

k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota melalui Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang; kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan

ruang; kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

5.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan rumah terdampak bencana atau relokasi pemerintah dimulai melalui pendataan rumah korban bencana atau relokasi, sosialisasi dan persiapan kepada pemilik rumah korban bencana atau relokasi serta pembangunan dan rehabilitasi. Selain itu juga terdapat penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung guna memberikan legalitas secara hukum.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan upaya penyelenggaraan kawasan permukiman yang layak huni salah satunya berupa rumah layak huni sehingga dapat menjadi salah satu aspek dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (>10 Ha) yang juga disertai bentuk penanganan lain.

a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan rumah tidak layak huni yang berada dalam lingkup perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi bentuk penanganan pada kawasan kumuh.

b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana perumahan serta utilitas umum guna memenuhi kebutuhan perumahan.

5.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini, menyiapkan SOP dalam menjalakan penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System*/EWS) di daerah rawan bencana, melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P), Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Melakukan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota , Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, melakukan respons cepat darurat bencana dengan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan melakukan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sesudah bencana melakukan koordinasi pasca bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat, melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran dan menyediakan sarana dan prasarana untuk relawan / masyarakat.

5.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan sosial utamanya untuk peningkatan kapasitas PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan Karangtaruna)

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan SPM Bidang Sosial (Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Tuna Sosial dan Pengemis)

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian bantuan sosial di antaranya verifikasi dan finalisasi DTKS; Bantuan Beasiswa 1 Desa 2 Sarjana; Bantuan Sembako Sosial (Ngopeni Kadang Kekurangan); Bantuan uang kepada lansia, disabilitas, dan veteran; Bantuan Sosial kepada LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial); dan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari DBHCHT.

3. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana)

4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan untuk pemeliharaan 3 TMP (Blora, Cepu dan Randublatung) serta fasilitasi ziarah, renungan suci dan upacara ketika peringatan Hari Kemerdekaan dan Peringatan Hari Pahlawan)

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi melalui Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja Swasta.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan mengelola Informasi Pasar kerja dengan memberikan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online serta melaksanakan *Job Fair* /Bursa Kerja.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan menjaga kondusivitas hubungan industri di Kabupaten Blora melalui pelaksanaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang berakibat/Berdampak Pada kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; pelembagaan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; dan penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.

c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan upaya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; dan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.

5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.

5.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kuantitas ataupun kualitas infrastruktur guna mendukung kemandirian pangan Kabupaten/Kota dengan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur lantai jemur lumbung pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk memenuhi Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 2.200 kkal/kapita/hari yang dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok yaitu melaksanakan Gerakan Pangan Murah 12 kali; menyusun Neraca Bahan Makanan; Pemantauan harga pangan di 16 Kecamatan; pengisian cadangan pangan pemerintah (gabah, gula dan minyak goreng); melaksanakan lomba cipta menu, PSAT dan pemanfaatan teras pangan; penyusunan Laporan Pangan Per Kapita; Pelatihan pengolahan pangan lokal tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan desa rawan pangan dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kemudian menyusun Peta FSVA dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta melaksanakan pendampingan desa mandiri pangan

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan keamanan pangan segar, adapun pelaksanaannya adalah sosialisasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ke pelaku usaha; pendataan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan; pendampingan ijin edar (PSAT); dilaksanakan Rapid test pestisida; pengawasan keamanan pangan; bimtek Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

5.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, dan pemberian ijin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

5.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH dan upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah serta fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan Limbah B3.

8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL,

dokumen evaluasi lingkungan hidup/DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

d. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH pada masyarakat sedulur sikep/samin.

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda/anak sekolah tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan serta upaya meningkatkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.

5.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, penyelesaian

masalah pendaftaran penduduk, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, sosialisasi pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi yang berkaitan dengan penatausahaan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil, penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi terkait pencatatan sipil. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan dan sosialisasi terkait pengelolaan informasi kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/ kota dan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan.

5.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui penataan sarana dan prasarana desa dengan melakukan pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa baik dari Kabupaten maupun Provinsi.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (di antaranya dilaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa untuk Program Sarjana sesuai dengan Nota Kesepahaman No: 10/BPSDM/HKM.07.01/III/2023, No: 421.53/1088 dan No. T/2955/UN37/KS/2023), Fasilitasi penyusunan produk hukum yang mengatur tentang desa, Melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas wilayah desa, Pembinaan manajemen pemerintahan desa, Melaksanakan Koordinasi Fasilitasi dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Pengangkataan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa – P3PD di mana merupakan program Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (P3PD bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa dilokasi program), Fasilitasi pengelolaan dan penataan keuangan desa melalui Dana Desa, Fasilitasi pengelolaan aset desa, serta pembinaan evaluasi terhadap pencatatan dan update data (Profil Desa, SDG's, Indeks Desa Membangun di mana dibentuk berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)) dan informasi pemerintah desa, serta Usulan THR bagi perangkat desa pada ADD tahun 2025 (berdasarkan hasil rapat rencana pemberian THR dan pembahasan Perbup No. 53 Tahun 2022) yang berjumlah 2.885 Orang dan Jabatan yang masing kosong belum terisi sejumlah 243 Orang.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada kegiatan upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Penguatan dan pemberdayaan lembaga

masyarakat, adat dan sosial budaya, Penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, dan penguatan lembaga usaha ekonomi masyarakat di desa, Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG), serta melaksanakan Pembinaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu).

5.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan dan penyediaan sarana media Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan kelengkapan jalan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas serta pengelolaan terminal skala kabupaten yaitu terminal tipe C dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan terminal guna memenuhi kelancaran akan transportasi angkutan orang dan barang sesuai kewenangan.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berada di badan air yang berbentuk penyeberangan sungai atau danau dapat layak digunakan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengamanan sarana dan prasarana perlintasan kereta api yang masuk dalam wilayah administrasi kabupaten.

5.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan tata kelola komisi informasi di daerah, penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas, dan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dan kegiatan pengelolaan *e-*

government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota ditekankan pada upaya penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota diarahkan pada upaya penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan pusat data pemerintahan daerah, koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas, pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO).

5.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Blora.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayahnya dalam Kabupaten Blora.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Blora, serta Pendidikan dan Latihan UKM dalam daerah Kabupaten Blora.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Blora.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.

5.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan PMTB pada kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan memberikan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terpadu melalui sistem satu pintu. Hal ini mencakup koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan pemberian fasilitas atau insentif daerah serta penyediaan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah mempermudah dan mempercepat proses penanaman modal bagi para pelaku usaha dengan memanfaatkan teknologi dan proses yang efisien.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, serta memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Selain itu, program ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal guna memastikan bahwa semua kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, diharapkan dapat tercipta sistem yang transparan, cepat, dan akurat dalam memberikan layanan perizinan, serta memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi para pemohon.

5.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan kepemudaan dan olah raga menjadi bagian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda berkontribusi sebagai agen perubahan melalui gaya hidup sehat, berprestasi dan produktif secara ekonomi melalui pengembangan wirausaha pemuda. Pemerintah Kabupaten Blora telah mengembangkan berbagai program untuk mendorong tumbuhnya generasi muda yang sehat dan produktif

b. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pemerintah kabupaten Blora memperkuat penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan memperkuat dukungan untuk mengikuti POPDA pada tingkat yang lebih tinggi, dan disertai pembinaan terhadap organisasi olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi dan produktivitas pemuda. Selain itu, juga perlu diprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung kegiatan olahraga seperti lapangan olahraga

c. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Pramuka yang sudah bersertifikat KMD dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan seperti Bumi perkemahan yang layak.

5.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi; membangun metadata statistik sektoral; peningkatan kapasitas kelembagaan

statistik sektoral; dan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah

5.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pengamanan informasi difokuskan pada penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik, dan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

5.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, serta Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

5.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembuatan kartu anggota perpustakaan, penyusunan Perda khusus perpustakaan, pembuatan kliping tentang Blora, Penjilidan Koran, Majalah serta Tabloid, Pembinaan Perpustakaan Sekolah berstandar Nasional, Pembinaan Perpustakaan Khusus (Desa, Instansi dll) untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan dan peningkatan karier pustakawan, Pengadaan, Buku, majalah, tabloid dan e-book, Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan CFD untuk meningkatkan minat baca masyarakaat pada anak-anak sekolah, Kegiatan Pelatian Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan penelusuran, pencarian, dan pengalihmediaan NASKAH KUNO dan Pengalihmediaan Naskah Kuno**.**

5.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pembenahan dan penataan arsip desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan pengarsipan di lingkup Pemerintah Desa, fumigasi arsip (Pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan pemberian pestisida pada ruang simpan arsip guna untuk menghindari arsip dari rayap / Binatang yang dapat merusak kertas), pengawasan kearsipan internal dilakukan pada OPD (Badan/Dinas/RSUD) se-Kabupaten Blora, pengawasan kearsipan internal dilakukan pada OPD (Badan/Dinas/RSUD) se-Kabupaten Blora, pengawasan kearsipan internal dilakukan pada OPD (Badan/Dinas/RSUD) se-Kabupaten Blora, pengawasan kearsipan eksternal LKD / Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan audit oleh ARPUS Provinsi, nilai dari pengawasan internal dan eksternal

digunakan untuk mengisi Nilai Indeks Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, Rakor pengawasan kearsipan Rapat Koordinasi Antar OPD (Badan/Dinas/RSUD) tentang penyampaian hasil pengawasan kearsipan Internal Se- Kabupaten Blora, pengolahan arsip hasil akuisisi Mengolah arsip hasil akuisisi dari OPD dan pembuatan daftar arsip guna untuk mempermudah penemuan Kembali arsip yang telah diolah, pameran kearsipan Kegiatan yang diadakan oleh ARPUS Prov yang membutuhkan partisipasi dari LKD Daerah untuk memamerkan / menampilkan khasanah-khasanah arsip statis daerah untuk dinikmati dan memberikan edukasi kepada masyarakat, RAKOR JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) Rapat Koordinasi Simpul Jaringan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), monitoring dan evaluasi aplikasi srikandi dilakukan ke seluruh OPD terkait penggunaan dan implementasi aplikasi SRIKANDI

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan sosialisasi dan alih media arsip keluarga di lingkungan desa / mat siaga (Penyelamatan Arsip Keluarga) Pemberian Sosialisasi kepada Masyarakat Desa tentang Pentingnya Pengelolaan Arsip Keluarga dan pemberian layanan Alih Media Arsip Keluarga kepada masyarakat.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan pada kelompok nelayan yaitu mendata sumber daya ikan; pemberian bantuan prasarana tangkap untuk nelayan; penebaran benih ikan di perairan umum; pemberian bantuan fasilitas kemudahan akses keuangan bagi kelompok nelayan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelompok budidaya dan jumlah produksi perikanan budidaya. Di antaranya yang dilaksanakan yaitu pendampingan dan sosialisasi bagi pokdakan

(identifikasi, pembentukan, pengukuhan dan pengembangan); memfasilitasi akses keuangan untuk pokdakan; pelatihan atau studi tiru untuk pokdakan; pendataan statistik perikanan budidaya; pemberian bantuan prasarana ke pokdakan; penyediaan induk ikan unggul dan pakan serta sarana lainnya untuk BBI.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan pelaku usaha perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penanganan risiko *stunting* melalui pembagian paket gemar ikan.

5.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dan juga Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

5.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan bimtek pengolahan alsintan tembakau, pengadaan alsintan tembakau, bantuan pupuk ZA, sosialisasi rencana implementasi asuransi tembakau, bimtek pembuatan pupuk organik, belanja bahan praktek pupuk organik, bimtek unit pengolahan Jasa Alsintan, pengadaan alsintan; melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak akan dilaksanakan pengujian mutu SNI semen beku *survielance* sertifikat ISO 9001, pengadaan bibit rumput, melaksanakan sertifikasi sapi bull/pejantan, produksi semen beku, pengadaan alat *printing straw*, pengadaan sapi pejantan /bull; pendistribusian benih/bibit ternak kepada kelompok tani/ternak; pendampingan kegiatan APBN untuk meningkatkan adopsi teknologi pertanian dan meningkatkan presentase kelompok tani yang menggunakan benih unggul.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani, pembangunan kandang ternak dan gudang pakan, pembangunan irigasi, pembangunan pipanisasi, pembangunan sumur bor, pembangunan sumur lapang/gali, pembangunan sarana prasarana pendukung RPH (IPAL)

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan pelaku usaha hewan dan produk hewan, pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban di 16 kecamatan, pengawasan kualitas produk hewan di pasar. Pengadaan pestisida, pelaksanaan gerakan pengendalian (gerdal) tanaman hortikultura dan perkebunan, pelatihan pembuatan pestisida organik, sosialisasi dan pendampingan petani terhadap bencana pertanian (AUTP), pelaksanaan gerakan pengendalian (gerdal) tanaman pangan serta pengadaan rumah burung hantu.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan *training* penyuluh tingkat kabupaten, program penyuluhan, *training* BPP, pertemuan rutin koordinator, pembekalan penyuluhan bagi P3K, pengembangan posluhdes, pelatihan petani milenial, pertemuan KTNA, lomba poktan/gapoktan berprestasi, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, pengadaan srpras BPP (laptop), sekolah lapang penggunaan pupuk organik.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan memberikan rekomendasi maupun melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang beredar

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pelatihan-pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyuluh maupun petani

5.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan tanda daftar gudang, serta pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten Blora

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten Blora, serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Blora

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada Kabupaten Blora

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

5.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disertai juga Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta melibatkan masyarakat dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan informasi Industri seluas luasnya kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu dilakukan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Penyebaran dilakukan informasi dengan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

5.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (Satu) daerah kabupaten/kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penyuluhan Transmigrasi

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.4.1 Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah meliputi fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; pengoordinasian dan fasilitasi di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri yang terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan pemetaan potensi kerja sama daerah; Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan yang terdiri dari Penataan administrasi pemerintahan berupa fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, pengelolaan administrasi kewilayahan berupa penegasan batas desa/kelurahan, dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah berupa penyusunan dokumen LPPD, LKPJ dan SPM; Program Pemerintahan juga diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum berupa fasilitasi penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan; fasilitasi bantuan hukum berupa fasilitasi penyelesaian

masalah hukum; dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum berupa pengelolaan *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Blora.

Program Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

Selain itu, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Terakhir, program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah; pengendalian evaluasi program pembangunan; dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

5.2.4.2 Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran.

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.5.1 Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan berupa pelaksanaan konsultasi publik, koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan berupa analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah dan penyusunan profil pembangunan daerah; pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah berupa koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pelaksanaan

asistensi, sinergi dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) meliputi pelaksanaan asistensi, sinergi dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi pelaksanaan asistensi, sinergi dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan. Dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

5.2.5.2 Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan KUA dan PPAS, penjabaran APBD, penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pembinaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan aset pemerintah daerah termasuk peningkatan jumlah aset yang diamankan, fasilitasi sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, penyelesaian sengketa/ kasus aset milik pemerintah daerah, pembinaan penatausahaan aset yang ada di perangkat daerah, penyusunan standar harga, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu dan fasilitasi kegiatan lelang barang milik daerah

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), program ini memfasilitasi kegiatan ASN Lunas Pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak air tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan retribusi.

5.2.5.3 Kepegawaian

Rencana program prioritas pada unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas pada unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas pada unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program prioritas urusan penunjang pada bidang penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, pengembangan ekosistem inovasi dan teknologi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual pada bidang riset dan inovasi.

5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Umum

5.2.6.1 Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Dalam penyelenggaraan pengawasan di dalamnya terdapat proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Penilai Reformasi Birokrasi dan manajemen resiko, Pencegahan Pemberantasan Korupsi, dan Penegakan Integritas.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

5.2.7.1 Kecamatan

Rencana program prioritas unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan perupa koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dan Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; Kegiatan pemberdayaan kelurahan berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah meliputi Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berupa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi Masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**.

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut.

Tabel V.2
Rencana Program Prioritas Kabupaten Blora Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
X.XX	**Non Urusan**	
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	**Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
2	**Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.04		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.05		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.06		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
2.10.02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.15.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
3.	**Urusan Pilihan**	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.30.06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.04		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3.31.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	
3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4.01	Sekretariat Daerah	
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.02	Sekretariat DPRD	
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	
5.01	Perencanaan	
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02	Keuangan	
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	Kepegawaian	
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04.	Pendidikan dan Pelatihan	
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	Penelitian dan Pengembangan	
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	
6.01.	Inspektorat Daerah	
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
7.	**Unsur Kewilayahan**	
7.01.	Kecamatan	
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
8.	**Unsur Pemerintahan Umum**	
8.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Unsur	Program Prioritas
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, yang diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan. Indikator kinerja menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan pencapaian hasil pembangunan. Bab ini memuat rincian indikator kinerja beserta target yang direncanakan untuk dapat dicapai di akhir pelaksanaan perencanaan tahun 2026 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan, yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sedangkan, IKK menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Penyajian informasi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/*impact*); dan
2. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel VI.1 berikut.

Tabel VI.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
1.	PDRB per kapita	Rp juta	41,77 s.d 43,48
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,89-10,28
3.	Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	66,53
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,61
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,65
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,40
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,62
8.	Rasio Pajak terhadap PDRB	Persen	0,40

6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Blora tahun 2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.2 berikut.

Tabel VI.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	90,13	90,13
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	persen	11,26	11,26
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	persen	96,10	96,10
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	angka	78,62	78,62
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	8,29	8,29
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	ton/tahun	20.209	20.209
8	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	202.456,65	202.456,65
9	Indeks Risiko Bencana	angka	107,41 - 106,57	107,41 - 106,57
10	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,57	0,57
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,65	0,65

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
12	Rasio Penduduk (sex ratio)	persen	99,87	99,87
13	Kepadatan Penduduk	orang/km2	470	470
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)**	persen	3,25 – 4,05	3,25 – 4,05
2	**Tingkat Kemiskinan**	persen	10,89-10,28	10,89-10,28
3	**PDRB Per Kapita**	Rp juta	41,77 s.d. 43,48	41,77 s.d. 43,48
4	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	persen	2,65	2,65
5	**Indeks Gini**	angka	0,34	0,34
6	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	angka	72,61	72,61
7	Usia Harapan Hidup	tahun	75,49	75,49
9	Prevalensi Stunting	persen	19,11	19,11
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,49	7,49
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,16	13,16
12	Kemampuan Literasi SD	angka	72,47	72,47
13	Kemampuan Literasi SMP	angka	74,65	74,65
14	Kemampuan Numerasi SD	angka	66,14	66,14
15	Kemampuan Numerasi SMP	angka	67,23	67,23
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	75,01	75,01
17	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	angka	45,75	45,75
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	persen	32,00	32,00
19	Indeks Desa/Indeks Desa Membangun	angka	87,45	87,45
20	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	62,36 - 62,44	62,36 - 62,44
21	indeks Harmoni Indonesia	persen	7,00	7,00
22	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	angka	0,94	0,94
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Angka Ketergantungan	persen	45,9	45,9
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	10,98	10,98
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	persen	4,01	4,01
4	Rasio Kewirausahaan	persen	3,77	3,77
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	72,90	72,90
6	lndeks Inovasi Daerah	angka	85,00	85,00
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	Rupiah	4.578.146.000	4.578.146.000
8	Ekspor Barang dan Jasa	Rupiah	4.015.506.610	4.015.506.610
9	Indeks Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	angka	23,89	23,89
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	71,04	71,04
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,4	0,4
14	Skor Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,04	3,04

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
15	Disparitas Harga	persen	± 10	± 10
16	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten	persen	41,77 s.d. 43,48	41,77 s.d. 43,48
17	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	persen	19,09–17,61	19,09–17,61
12	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	4,60	4,60
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	98,54	98,54
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,37	3,37
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,65	4,65
4	Indeks Integritas Nasional	angka	76,50	76,50
5	Persentase Penegakan Perda	persen	100,00	100,00
6	Persentase Capaian Aksi HAM	persen	10,00	10,00
7	Indeks Harmoni	persen	7,60	7,60
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	78,40	78,40
10	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	angka	3,62	3,62
11	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	82,78	82,78
V	**INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**			
1	Urusan Pendidikan			
	Kemampuan Literasi SD	angka	72,47	72,47
	Kemampuan Literasi SMP	angka	74,65	74,65
	Kemampuan Numerasi SD	angka	66,14	66,14
	Kemampuan Numerasi SMP	angka	67,23	67,23
	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,16	13,16
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,49	7,49
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	7,69	7,69
1.2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	persen	99,48	99,48
1.3	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	persen	94,92	94,92
1.4	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SD	persen	83,69	83,69
1.5	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SMP	persen	80,83	80,83
1.6	Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SD	persen	82,68	82,68
1.7	Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SMP	persen	79,29	79,29
1.9	Iklim Inklusivitas SD	angka	66,67	66,67
1.10	Iklim Inklusivitas SMP	angka	62,09	62,09
1.11	Iklim Keamanan SD	angka	80,01	80,01
1.12	Iklim Keamanan SMP	angka	73,57	73,57
1.1	Iklim Kebhinekaan SD	angka	75,15	75,15
1.2	Iklim Kebhinekaan SMP	angka	73,20	73,20
2	Urusan Kesehatan			
2.1	Strata Kabupaten Sehat	strata	Padapa	Padapa
	Usia Harapan Hidup	tahun	74,95-76,18	74,95-76,18

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	10	10
	Prevalensi Stunting	persen	19,11	19,11
2.3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	persen	90	90
2.4	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	persen	90	90
2.5	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart berdasarkan siklus hidup	persen	82	82
2.6	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang kesehatan	persen	100	100
2.7	Rasio dokter terhadap populasi	rasio	0,52	0,52
2.8	Rasio perawat terhadap populasi	rasio	1,47	1,47
2.9	Rasio bidan terhadap populasi	rasio	1,08	1,08
2.10	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	persen	77	77
2.11	Persentase penduduk dengan aktivitas fisik Cukup	persen	97	97
2.12	Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun	persen	1,4	1,4
2.1	Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	persen	100	100
2.2	Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4	23,4
2.3	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	persen	100	100
2.4	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	persen	87	87
2.5	proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	persen	100	100
2.6	presentase fasyankes terakreditasi paripurna	persen	89	89
2.7	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen) sesuai standar	persen	86	86
2.8	Jumlah Kematian Bayi	kasus	125	125
2.9	Jumlah Kematian Balita	kasus	13	13
2.11	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	82	82
2.12	Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	100	100
2.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)	persen	73,83	73,83
2.2	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	persen	90,00	90,00
2.3	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	persen	20	20
2.4	Persentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	97	97
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
3.1	Indeks Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	angka	23,89	23,89
3.2	Persentase Kecamatan yang Diakses Jalan Kabupaten Minimal 50% dengan Kondisi Mantap	persen	64,11	64,11
3.3	Persentase indeks kualitas pengelolaan sumber daya air	angka	57,36	57,36
	Persentase rumah tangga akses air minum aman	persen	20,51	20,51
3.4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan Regional	persen	14,01	14,01
3.5	persentase penurunan luasan daerah genangan dan banjir	persen	0,8	0,8
3.6	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar	persen	1,15	1,15
3.7	Persentase Peningkatan Pembinaan Kinerja Jasa Konstruksi	persen	15	15
3.8	Persentase Wilayah Kabupaten yang Memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang	persen	3,7	3,7
3.9	Tersediaanya Perda tentang RTRW	Perda	1	1
3.10	Tersedianya Perkada tentang RDTR	Perkada	1	1
3.11	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	persen	100	100
3.12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	59,49	59,49
3.13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	8,29	8,29
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4.1	**Persentase akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan**	persen	65,75	65,75
	Persentase Rumah Layak Huni	persen	69,10	69,10
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Kawasan Permukiman	persen	78	78
5	Urusan Sosial			
	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka	62	62
	Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	angka	250	250
	Persentase PPKS yang mengalami peningkatan fungsi sosial	persen	27	27
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	angka	82,9	82,9
	Nilai Manajemen Risiko Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	angka	3,1	3,1

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	angka	90,3	90,3
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	angka	98,4	98,4
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar panti bagi PPKS	persen	100	100
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten/ kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	persen	100	100
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	46	46
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen	92	92
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	0,8	0,8
	Persentase Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial	persen	23,08	23,08
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	persen	0,5	0,5
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen	53	53
	Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	persen	100	100
	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	persen	100	100

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100	100
6	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
6.1	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,57	0,57
6.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	persen	74,50	74,50
6.3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	angka	74,73	74,73
6.4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	78,40	78,40
6.6	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	angka	65	65
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
7.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Tenaga Kerja	38.142.979,29	38.142.979,29
	kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	10,98	10,98
	Persentase kasus yang terselesaikan	persen	100	100
	Persentase penempatan tenaga kerja	persen	91,39	91,39
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	85,91	85,91
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,308	0,308
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	63,5	63,5
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka	73,98	73,98
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen	65	65
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	100
	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sestiai Standar	persen	100	100

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	dokumen	3	3
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka	57,03	57,03
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	100
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	72,65	72,65
9	Urusan Pangan			
9.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	angka	10,79	10,79
9.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	90,1	90,1
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	persen	100	100
	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset	persen	100	100
	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	persen	100	100
11	Urusan Lingkungan Hidup			
11.1	Indeks Kualitas Air	angka	76,83	76,83
	Indeks Kualitas Udara	angka	85,01	85,01
	Indeks Kualitas Lahan	angka	69,88	69,88
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	persen	59	59
11.2	Persentase Lahan Kritis yang Tertangani	persen	0,10	0,10
11.3	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik dikawasan Perkotaan		4,2	4,2
11.4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	14.25	14.25
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	angka	92,25	92,25
	Cakupan dokumen administrasi kependudukan	persen	87	87
	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan data agregat kependudukan	persen	25	25
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten			
13.2	Persentase Desa Mandiri	persen	9,23	9,23
	Skor Dimensi Tata Kelola Indeks Desa	persen	58	58
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
14.1	TFR (Total Fertility Rate)	angka	2,10	2,10
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR))	persen	74,30	74,30
14.2	Persentase Keluarga Berisiko Stunting	persen	4,00	4,00
15	Urusan Perhubungan			
	Rasio Konektivitas	angka	0,36	0,36
	Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	persen	93,50	93,50
16	Urusan Komunikasi dan Informatika			
16.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	3,37	3,37
16.2	Skor Domain Tata Kelola SPBE	skor	2,77	2,77
16.3	Skor Domain Manajemen SPBE	skor	1,60	1,60
16.4	Skor KIP	skor	92,95	92,95
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
17.1	Kontribusi Koperasi terhadap PDRB	persen	6,56	6,56
17.2	Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro	persen	0,22	0,22
17.3	Usaha mikro naik kelas	Unit Usaha	30	30
17.4	Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	3,77	3,77
17.5	Volume Usaha Koperasi	persen	11,00	11,00
18	Urusan Penanaman Modal			
	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	persen	12,55	12,55
18.1	Presentase Peningkatan Investasi	persen	3,40	3,40
18.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	92,03	92,03
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
19.1	Jumlah Pemuda yang Menduduki Posisi/Jabatan Strategis/Meraih Prestasi di Ajang Nasional	orang	3	3
19,2	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	orang	36	36
20	Urusan Statistik			
20.1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,86	2,86
21	Urusan Persandian			
21.1	Indeks KAMI	angka	462	462
22	Urusan Perpustakaan			
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	75,01	75,01
22.2	Tingkat Kegemaran Membaca	persen	65,89	65,89
23	Urusan Kearsipan			
23.1	Indeks Kearsipan	angka	70,48	70,48
23.2	Indeks Budaya Tertib Arsip	angka	52,00	52,00
23.3	Indeks Memori Kolektif Bangsa	angka	18,10	18,10
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
24.1	**Persentase warisan budaya yang dilestarikan**	persen	20	20
	Persentase OPK yang diperkenalkan ke publik melalui media tertentu	persen	14,63	14,63
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
	Produksi Perikanan dan Olahan ikan	ton	1800,83	1800,83
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
26.1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	persen	3.51	3.51
26.2	Tingkat hunian akomodasi	persen	17,85	17,85
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
27.1	Jumlah Produksi Hasil Pertanian Komoditas Unggulan	Angka	1.006.146,79	1.006.146,79
27.2	Persentase Produksi Hasil Pertanian Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Unggulan	persen	997.652	997.652
27.3	persentase peningkatan populasi ternak unggulan	persen	289.912	289.912
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
28.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	persen	6,58	6,58
28.2	Nilai Ekspor	US$	4.692.000	4.692.000
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
29.1	kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	10,98	10,98
29.2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	persen	0.8	0.8
	Persentase industri kecil meningkat nilai produksinya	persen	1.99	1.99
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
30.1	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	persen	100	100
31	Unsur Sekretariat Daerah			
31.1	**Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi**	persen	89,40	89,40
31.2	Nilai EPPD	angka	3,35	3,35
31.3	Indeks Pengendalian Inflasi daerah	angka	3,5 - 1,5	3,5 - 1,5
31.4	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	skor	70,50	70,50
31.5	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,48	4,48
32	Unsur Sekretariat DPRD			
32.1	**Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Layanan Sekretariat DPRD**	angka	78,50	78,50
	Nilai Survei Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan anggota DPRD yang disediakan Sekretrariat DPRD	angka	77,50	77,50
33	Unsur Perencanaan			
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	persen	84,00	84,00

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
33.1	Skor Komponen Perencanaan pada SAKIP	nilai	22,39	22,39
33.2	Skor Komponen Kualitas Perencanaan pada Nilai MRI	skor	3,73	3,73
	Persentase perangkat daerah dengan nilai komponen perencanaan pada sakip perangkat daerah di atas 25	persen	82,93	82,93
34	Unsur keuangan			
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka	85	85
34.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	opini	WTP	WTP
	Indeks Pengelolaan Aset	angka	1,7	1,7
	Rasio Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan daerah	persen	15,1	15,1
34.3	Persentase Kenaikan PAD	persen	18,5	18,5
	Unsur Kepegawaian			
	Indeks Profesionalitas ASN	angka	80,5	80,5
	Indeks Sistem Merit	angka	262,00	262,00
	Indeks BerAkhlak	angka	79,1	79,1
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	angka	98,33	98,33
	Unsur Pendidikan dan Pelatihan			
	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka	29,05	29,05
	Unsur Penelitian dan Pengembangan			
	Persentase kebijakan berbasis bukti	persen	50	50
	Persentase policy brief yang disusun berdasarkan permasalahan pembangunan untuk mendukung perencanaan	persen	60	60
	Indeks Inovasi Daerah	angka	86	86
35	Unsur Pengawasan			
	Tingkat Maturitas SPIP	angka	3,16	3,16
	NIlai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	angka	3,010	3,010
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	angka	2,95	2,95
	NIlai *Monitoring Controling, Supervision of Prevention* (MCSP)	angka	94,50	94,50
	Kapabilitas Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP)	level	3,10	3,10
	Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora	angka	83,00	83,00
36	Unsur Pemerintahan Umum			
36.1	**Indeks Harmoni Indonesia Dimensi Sosial**	skor	7,20	7,20
36.2	**Indeks Harmoni Indonesia Dimensi Keberagaman**	skor	7,15	7,15
36.3	Indek harmoni Indonesia dimensi keberagamanan Variabel toleransi	skor	7,20	7,20

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
			2026	2026
36.4	Indek harmoni Indonesia dimensi Sosial Variabel Pluralisme	skor	7,20	7,20
36.5	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	persen	83,82	83,82

Keterangan:
**) Indikator yang menggunakan perhitungan baru*

6.3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2026

Target Indikator Makro pada RKPD Tahun 2026 memperhatikan target indikator makro (Indikator Utama Pembangunan) pada RPJPD 2025-2045. Adapun target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel VI.3
Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Blora dan Target Tahun 2026

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2026
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,26
2.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	9
3.	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,11
4.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	%	92,50
5.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)		90,25
6.	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,86
7.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	63,74
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	72,67
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	53,15
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	63,98
8.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,69
9.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	96,81
10.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16
11.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,49
12.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0.34
13.	Tingkat Kemiskinan	%	10,47-9,87
14.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	32
15.	PDRB per kapita	RP juta	41,77-43,48
16.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,02

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2026
17.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	12
18.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,77
19.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	10,77
20.	*Return on Asset* (ROA) BUMD	%	11,70
21.	Disparitas harga	%	±10
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,95-2,65
23.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Angka	10,98
24.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	85,08
25.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	13,43
26.	Persentase Desa Mandiri	%	1,39
27.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	68,88
28.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	63,38
29.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	31,06
30.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	angka	47,50
31.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	angka	20,86-21,16
32.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	angka	69,08
33.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	24,03
34.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	1.625
35.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	82,45
36.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	23,23
37.	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	62,39-66,00
38.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,254-0,240
39.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,62
40.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,37
41.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,29
42.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,26
43.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	92,33
44.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,35
45.	Penurunan intensitas emisi GRK	Ton $C0_2eq$	222.703,42
46.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	107,41-106,57
47.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71
48.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	50,43
49.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,35
50.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,47
51.	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,05
52.	Jumlah kejadian Konflik SARA	Kali	0
53.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,45

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2026
54.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	1,40
55.	Total Kredit/PDRB	%	1,41
56.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,06

Daftar Penerima Hibah pada RKPD 2026

No.	Nama Penerima	Alamat
	Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)	
1	Lembaga Pendidikan Muslimat Ngumbul	Dk. Watuondo RT 03 RW 03 Desa Ngumbul Kec. Todanan Kab. Blora
2	Perkumpulan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah	Desa Sonokulon RT 03 RW 01 Kec. Todanan Kab. Blora
3	Perkumpulan Madrasah Tsanawiyah Al Kautsar	Jalan Raya Ngumbul - Todanan Km. 0,5 Ngumbul, Kec. Todanan Kab. Blora
4	Perkumpulan Madrasah Tsanawiyah Al Kautsar	Jalan Raya Ngumbul - Todanan Km. 0,5 Ngumbul, Kec. Todanan Kab. Blora
5	PERKUMPULAN Madrasah Tsanawiyah Hidayatussubban Dringo	Desa Dringo Kecamatan Todanan Kab. Blora
6	RAUDHLATUL ATHFAL HIDAYATUSSUBBAN DK. SERUT DESA DRINGO	DK. Serut RT.03 RW.02 Desa Dringo Kec. Todanan Kab. Blora
7	Taman kanak kanak Nurul Ilmi Desa Ketringan Jiken	Dk. Gempol RT 01 RW 04 Desa Ketringan Kec. Jiken Kab. Blora
8	Yayasan Soeradji Sastrodiharjo	Desa Sumberejo Kec. Ngawen Kab. Blora
9	Yayasan Al Mansur Todanan	Desa Kedungwungu Kec. Todanan Kab. Blora
10	Yayasan Al Mansur Todanan	Desa Kedungwungu Kec. Todanan Kab. Blora
11	Yayasan Al-Ikhsan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa Sambonganyar Kecamatan Ngawen Kab. Blora
12	Yayasan Ar Raihan	Desa Jetakwanger RT.03 RW.01 Kecamatan Ngawen Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
13	Yayasan Chandra Kirana Singget	Desa Singget Kecamatan Jati Kab. Blora
14	Yayasan Kemala Bhayangkari	Jl. Sanjaya I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
15	Yayasan Mutiara Insan Cepu	Jl. Diponegoro V no. 21 Cepu Kecamatan Cepu Kab. Blora
16	Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Harapan Keluarga Sejahtera Bangkle	Jl. Putodewo 2 No. 1 Bangkle Kecamatan Blora Kab. Blora
17	Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Mustika Sari Pelemsengir	Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan Kab. Blora
18	Yayasan Pendidikan dan Sosial Winso Sarjono	Dukuh Jagong RT.12 RW.03 Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kab. Blora
19	Yayasan Pendidikan Hidayatussubban	Desa Dringo RT 02 RW 01 Kec. Todanan Kab. Blora
20	Yayasan Pertiwi Desa Gotputuk	Desa Gotputuk Kec. Ngawen Kab. Blora
21	Yayasan Pertiwi Sendangmulyo	Desa Sendangmulyo Kec. Ngawen Kab. Blora
22	Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tanggel	Dukuh Kalipang RT 001 RW 003 Desa Tanggel Kec. Randublatung Kab. Blora
23	Yayasan pondok pesantren walisongo wado	Jalan Pasar No. 3 Ponpes Walisongo Wado Kedungtuban Kab. Blora
24	Yayasan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa Sendangrejo Kec. Ngawen Kab. Blora
25	Yayasan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Banjarejo Kecamatan Banjarejo	Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
26	Yayasan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Punggursugih Kecamatan Ngawen	Kelurahan Punggursugih Kecamatan Ngawen Kab. Blora
27	Yayasan Mulia Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Doplang Kecamatan Jati	Desa Doplang Kecamatan Jati Kab. Blora
28	SMPS AT-TAJDID	Jl. Raya Randublatung Km. 2,5
29	SMP ISLAM MATHOLI'UL FALAH	Ds Nglengkir Rt 1/3
30	SMP IT MUTIARA INSAN	Jl. Diponegoro V/ 21 Cepu
31	SMP MUHAMMADIYAH 1 BLORA	Jl. KH.A. Dahlan No. 09 Blora
32	SMP MUHAMMADIYAH 5 RANDUBLATUNG	Ds. Sambongwangan Kec. Randublatung
33	SMP MUHAMMADIYAH 9 TODANAN	Jl. Raya Todanan - Blora
34	SMP MUHAMMADIYAH KEDUNGTUBAN	Ds. Wado RT 3/ RW 3
35	SMP PGRI BLUNGUN	Desa Blungun Rt.03 Rw.01 Kec. Jepon
36	SMP PGRI TODANAN	Jl. Raya Todanan 12
37	SMP AL MUHAMMAD CEPU	Jl. Blora No. 151 Wonorejo Cepu
38	SMP BHAKTI KEDUNGTUBAN	Jl. Cepu - Randublatung Km. 13
39	SMP ISLAM CEPU	Jl. Diponegoro Lr. II/ 17 B Cepu
40	SMP ISLAM JIKEN	Jl. Lapangan No. 2 Boleran
41	SMP KARTAYUDA KEDUNGTUBAN	Jl. Ngraho - Ketuwan Km. 4
42	SMP KATOLIK ADISUCIPTO BLORA	Jl. A Yani No. 19 A Blora
43	SMP KATOLIK ST. LOUIS CEPU	Jl. Rumah Sakit No. 46 Cepu

No.	Nama Penerima	Alamat
44	SMP ISLAM MOETIAH	JL. GUNUNG LAWU LORONG 1 NO 20 SAWAHAN Kel.Tempelan, Kec. Kota Blora
45	SMP KRIDA DOPLANG	Jl. Sumur Umum Ds. Doplang Kec. Jati Kab. Blora
46	SMP KRISTEN 1 BLORA	Jl. Dr. Sutomo No. 44 Blora
47	SMP KRISTEN 3 CEPU	Gang Diponegoro No. 3 Cepu
48	SMP MERDEKA NGAWEN	Jl. Raya Ngawen
49	SMP MUHAMMADIYAH CEPU	Jl. RSU No. 99 Cepu
50	SMP MUHAMMADIYAH 4 NGAWEN	Jl. Purwodadi 89 Ngawen
51	SMP MUHAMMADIYAH 6 KRADENAN	Ds. Sumber Kec. Kradenan
52	SMP MUHAMMADIYAH 7 DOPLANG	Kel. Jati Blora
53	SMP MUHAMMADIYAH 2 KRADENAN	Jl. Perhutani Guderan Getas
54	SMP PGRI 1 JAPAH	Jl. Raya Ngawen - Todanan Km. 6 Japah
55	SMP IT PANCASILA	DUKUH JAGONG RT 012 RW 003 Desa Pengkoljagong Kec.Jati
56	SMP SION BLORA	Jl. Gunung Sumbing 18 Blora
57	SMP WALISONGO	Jl. Semawur Rt 002/ Rw 004
58	SMPS AL HIKMAH CEPU	JL. Diponegoro Lr. VII No. 22 Cepu
59	SMP PLUS INSAN GEMILANG	Jl. Sumodarsono No. 52 Blora
60	SMP ISLAM BAITUNNUR	Jl. RA. Kartini No. 48 Blora
61	SMP IT PERMATA MULIA	Jl. Lingkar Barat Tamanrejo Rt. 8/ 4
62	SMP ISLAM UMMINA	Dk. Sukorame RT 04/02

No.	Nama Penerima	Alamat
63	SMP PLUS AL-AZHAR JOLOTUNDO	Jl. Jolotundo RT 06/ Rw. 03
64	SMP Islam PLUS EL-MUBARAK	Jl. Gatot Subroto Km. 4 Maguan, Kel. Tamanrejo, Tunjungan
65	SMP ISLAM TERPADU WALISONGO BOARDING SCHOOL	Ds. Wado Kedungtuban
66	SMP ALAM QUWWATUL UMMAH	Ngraho Kedungtuban
67	SMP ISLAM MUTIARA QUR'AN	Ds. Muraharjo Kunduran
68	SMP ISLAM PLUS AL MUHIBBIN	Sumber Kec. Kradenan
69	SMP PLUS NU AN-NURHADI	Desa Pulo RT 008 RW 001 Kedungtuban Blora
70	SMP IP FATIMAH AZ ZAHRA	Jl. Ronggolawe No. 15 Rt.001 Rw. 003
71	SMP SUNAN AMPEL	Ds. Sambiroto
72	SMP TAHFIDZ AN NURONIYYAH	Dk. Kejiwan Rt. 002 Rw.003
	Urusan Pertanian (Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikana	
73	Kelompok Tani Margo Sari	Desa Jeruk Kec. Bogorejo
74	Kelompok Tani Sri Rejeki 2	Dusun Bapangan RT.07 RW. 03 Desa Mendenrejo Kec. Kradenan
75	Kelompok Tani Sidodadi	Desa Balongsari Kec. Banjarejo
76	Kelompok Tani Makmur Berkah Sembongin	Desa Sembongin Kec. Banjarejo
77	Kelompok Ngudi Wilujeng	Dk Bendo RT 06 RW 02 Desa Sendangwungu Kec. Banjarejo
78	Kelompok Tani Unggul	Desa Tempuran Kec. Blora
79	Kelompok Tani Jaya Makmur	Dukuh Kaliweden, Desa Temurejo Kec. Blora
80	Kelompok Tani Lestari 1	1 Rt 02 Rw 1 Desa Gembol Kec. Bogorejo
81	Sumber Rejeki VII	DK Belimbing Desa Gandu Kec. Bogorejo
82	Kelompok Tani Ngudi Santoso	Desa Gadon Kec. Cepu

No.	Nama Penerima	Alamat
83	Lumintu Jaya Farm	Kel/desa: Balun Kec. Cepu
84	Kelompok Ternak Trijaya Mandiri Farm"	Kel/desa: Kapuan Kec. Cepu
85	Kelompok Tani Sido Ayem 1	Desa Ngrambitan Kec. Japah
86	Kelompok Tani dadi rejeki Keduwang	Desa Gedangdowo Kec. Jepon
87	Kelompok Tani Subur Makmur	Desa Jomblang Kec. Jepon
88	Kelompok Sumber Rejeki	Dk Nglorok Desa Bangsri Rt 04 Rw 02 Kec. Jepon
89	Kelompok Tani Budidaya	Desa Geneng Kec. Jepon
90	Kelompok Tani Sambong Tani Makmur	Dk Sambong Desa Janjang RT 02/03 Kec. Jiken
91	Kelompok Tani Barokah	Dukuh Talun Desa Ketringan Kec. Jiken
92	Kelompok Tani Subur	Desa Kemantren Kec. Kedungtuban
93	Kelompok Ternak Deha Pitulimo	Desa Jimbung Kec. Kedungtuban
94	Kelompok Ternak Gendhis Migunani	Desa Ngraho Kec. Kedungtuban
95	Kelompok Ternak Lumintu Berkah Sogo	Desa Sogo RT 01 RW 01 Kec. Kedungtuban
96	Kelompok Ternak Sidodadi	Desa Gondel Kec. Kedungtuban
97	Kelompok Tani Sabar Subur	Dk. Kalikangkung Rt. 03 Rw. 01 Desa Nglebak Kec. Kradenan
98	Kelompok Tani Manunggal Karya	Dk. Ngelebak Rt. 08 Rw. 01 Desa Ngelebal Kec. Kradenan
99	Kelompok Ternak Mbah Beji Dua	Desa Bejirejo Kec. Kunduran
100	Kelompok Sido Maju	Desa Jagong Kec. Kunduran

No.	Nama Penerima	Alamat
101	Kelompok Tani Ternak Berkah Makmur	Desa Kalangrejo Kec. Kunduran
102	Kelompok ternak rojo koyo	desa Kedungwaru Kec. Kunduran
103	Kelompok Tani Subur Makmur	Desa Kemiri Kec. Kunduran
104	Kelompok Tani Sri Widodo I	Desa Ngilen Kec. Kunduran
105	Kelompok Tani Suka Damai II	Desa Plosorejo Kec. Kunduran
106	Kelompok Tani Margo Rahayu	Dukuh Pacing Desa Klokah, Kec. Kunduran
107	Kekompok Tani Ngudi Raharjo III	RT 06 RW 01 Desa Kendayaan Kec. Ngawen
108	Kelompok Tani Margo Santoso	RT.02 RW.01, Ds. Plumbon Kec. Ngawen
109	Kelompok Tani Kidang Kencana	Desa Tanggel RT 007 RW 001 Kec. Randublatung
110	Kelompok Tani Sri Rejeki	Dk Pulo Desa Pilang Rt 03 Rw 04 Kec. Randublatung
111	Kelompok Tani Sri Sadono 1	Desa Gagakan Rt.01 Rw.01 Kec. Sambong
112	Kelompok Tani Lohjinawe	Desa Ledok Kec. Sambong
113	Kambing Kelompok Tani Gotong Royong	Desa Pojokwatu Kec. Sambong
114	Kelompok Tani Margo Makmur	Desa Sambongrejo Kec. Sambong
115	Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Sambongrejo Kec. Sambong
116	Kelompok Tani Ternak Kambing Mendho PE Jaya Abadi	Kel/desa: GaduKec. Sambong
117	Kelompok Tani Maju Makmur	Desa Dringo Kec. Todanan
118	Kelompok Tani Sido Lancar	Desa KajenganKec. Todanan
119	Kelompok Ternak Margo Mulyo	Desa Pelemsengir Kec. Todanan
120	Kelompok Tani Maju Jaya	Desa Sonokulon Kec. Todanan

No.	Nama Penerima	Alamat
121	Kelompok Tani Asem Bagus	Desa Tinapan Kec. Todanan
122	Kelompok Tani Subur Makmur	Dukuh Kedung Mulyo Desa Tinapan Kec. Todanan
123	Kelompok Tani Mitra Buana	Dukuh Bedingin Desa Bedingin Kec. Todanan
124	Kelompok Tani Sido Lancar	Dukuh Kacangan Desa Kacangan Kec. Todanan
125	Kelompok Tani Berkah Berkarya	Dukuh Soronini Desa Sonokulon Kec. Todanan
126	Kelompok Tani Sidojoyo	Dukuh Ngetrep RT. 07 RW. 04 Desa Kacangan Kec. Todanan
127	Kelompok Ternak Gadang Makmur	Rt 002/005 Dukuh Gadang Desa Sambeng Kec. Todanan
128	Kelompok Tani Sido Mulyo	RT. 02 RW. 01 Desa Sendang Kec. Todanan
129	Kelompok Tani Tunjung Sari	Desa Tunjungan Kec. Tunjungan
130	Kelompok Tani Sumber Waluyo	Tambakampel, RT.04 RW.03 Kel. Tambahrejo Kec. Tunjungan
131	Kelompok Tani Sido Mekar	Desa Sambeng Kec. Todanan
132	Kelompok Tani Tirto Aji	Desa Ngumbul Kec. Todanan
133	Kelompok Tani Maju Jaya	Desa Sonokulon Kec. Todanan
134	Kelompok Tani Barokah Sejahtera	Desa Ketileng Kec. Todanan
135	Kelompok Tani Tani Mulyo	Dk Banat Desa Bedingin Kec. Todanan
136	Kelompok Tani Suka Maju	Dk. Ngledok Desa Tawangrejo Kec. Tunjungan

No.	Nama Penerima	Alamat
137	Kelompok Tani Salimna	Dukuh Kalisangku, Desa Gempolrejo, Kec. Tunjungan
138	Kelompok Tani Gotong Royong	Desa Pojok Watu Kec Sambong
139	Kelompok Tani Sumber Rejeki	Dukuh Kadengan Desa Kamolan, Kab. Blora
140	Kelompok Tani Klagen Maju Jaya	Desa Klagen Kec Kedungtuban
141	Kelompok Tani Kidang Kencana	Desa Tanggel Kec. Randublatung
142	Kelompok Tani Sido Dadi	Dukuh Kedungdendeng Desa Kembang Kec. Todanan
143	Kelompok Tani Sedulur Makmur	Ds. Bandungrojo, Kec. Ngawen
144	Kelompok Tani Sumber Makmur III	Desa Cabean Kec. Cepu
145	Kelompok Tani Jaya	Dk Dagel Desa Puledagel Kec. Jepon
146	Kelompok Tani Karang Tani II	Desa Karanganyar Kec. Todanan
147	Kelompok Tani Umpak Jaya	Desa Sonokulon Rt. 01 Rw. 02 Kec. Todanan
148	Kelompok Tani Mukti	Dukuh Pucung Desa Bedingin Kec. Todanan
149	Kelompok Tani Sido Mekar	Desa Sambeng, Kec. Todanan
150	Kelompok Tani Adyatma Sangkara	Desa Bedingin Kec Todanan
151	Kelompok Tani Sumber Makmur	Desa Bedingin Kec Todanan
152	Kelompok Tani Rahayu Mukti Barokah	Ds. Ketileng Kec. Todanan
153	Kelompok Tani Dewi Sri I	Desa Dologan Kec. Japah
154	Kelompok Tani Berkah Makmur	Desa Tlogowungu Kec. Japah
155	Kelompok Tani Dewi Sri 1	Desa Dologan Kec Japah

No.	Nama Penerima	Alamat
156	Kelompok Tani Bejirejo IV	Desa Bejirejo rt 01 Rw 01 Kec. Kunduran
157	Kelompok Tani Sri Widodo 2	Desa Ngilen Rt 07 Rw 01 Kec Kunduran
158	Kelompok Tani Tirto Tani	Desa Muraharjo Kec. Kunduran
159	Kelompok Tani Sido Dadi	Desa Sendangwates Kec. Kunduran
160	Kelompok Tani Sumber Mulyo	Desa Rowobungkul Kec. Ngawen
161	Kelompok Tani Sumber Mulyo	Desa Sambongrejo Kec. Ngawen
162	Kelompok Tani Subur II	Desa Sendang Mulyo Kec. Ngawen
163	Kelompok Tani Sri Lestari	Desa Srigading Kecamatan Ngawen
164	Kelompok Tani Sri Sumber Makmur	Desa Sambonganyar Kec. Ngawen
165	Kelompok Tani Sejahtera I	Desa Gedebeg RT 01 RW 01 Kec. Ngawen
166	Kelompok Tani Sejahtera IV	Desa Gedebeg, Kec. Ngawen
167	Kelompok Tani Subur Tani	Desa Karangtengah Kec. Ngawen
168	Kelompok Tani Subur 1	Ds. Sendangmulyo Kec. Ngawen
169	Kelompok Tani Maju	Desa Plumbon Kec. Ngawen
170	Kelompok Tani Rahayu	Desa Rowobungkul kec Ngawen
171	Kelompok Tani Barokah	Kelurahan Karangjati Rt 08 Rw 02 Kec. Blora
172	Kelompok Tani Karang Rejo	Desa Plantungan Kec. Blora
173	Kelompok Tani Sido Makmur	Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo
174	Kelompok Tani Makmur I	Desa Banjarejo, Kec. Banjarejo
175	Kelompok Tani Margo Utomo	Desa Jeruk Kec. Bogorejo

No.	Nama Penerima	Alamat
176	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Desa Sarirejo Kec. Bogorejo
177	Kelompok Tani Tunas Muda	Desa Tempurejo Kec. Bogorejo
178	Kelompok Tani Sari Bumi	Desa Tempurejo Kec. Bogorejo
179	Kelompok Tani Sido Makmur Abadi	Desa Jeruk Kec. Bogorejo
180	Kelompok Tani Makmur	Dk Grojogan Desa Bogorejo Kec. Bogorejo
181	Kelompok Tani Sido Dadi II	Desa Gombang Kec Bogorejo
182	Kelompok Tani Tunas Muda	Desa Tempurejo, Kec. Bogorejo
183	Kelompok Tani Sari Bumi	Desa Tempurejo, Kec. Bogorejo
184	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Desa Sarirejo Kec. Bogorejo
185	Kelompok Tani Makmur	Dk Grojogan Desa Bogorejo Kec. Bogorejo
186	Kelompok Tani Subur	Dk Kedungjangan Desa Bogorejo Kec. Bogorejo
187	Kelompok Tani Sido Makmur Abadi	Desa Jeruk, Kec. Bogorejo
188	Kelompok Tani Budidaya	Ds. Geneng Kec. Jepon
189	Kelompok tani Tripadi Dresta Bhumi	Desa Geneng Kec. Jepon
190	Kelompok Tani Sari Roso III	Ds. Seso Kec. Jepon
191	Kelompok Tani Karya Tani Desa Sumurboto	Desa Sumurboto Rt 04 Rw 02, Kec Jepon
192	Kelompok Tani Sido Maju	Ds Semanggi Kec Jepon
193	kelompok Tani Sinar Tani	Kel. Jepon Kec. Jepon
194	Kelompok Tani Rahayu 2	Desa Waru Rt 03 Rw 02 , Kec. Jepon
195	Kelompok Tani Sido Mulyo	Dk Tambi desa Nglebur Kec. Jiken
196	Kelompok Tani Sido Mulyo	Dk Tambi Desa Nglebur Kec. Jiken
197	Kelompok Tani Timbul Mulya	Desa Bangoan Kec. Jiken

No.	Nama Penerima	Alamat
198	Kelompok Tani Sedulur Loji	Ds Nglebur Kec Jiken
199	Kelompok Tani Bersemi	Desa Jiken Rt. 01 Rw. 05 Kec. Jiken
200	Kelompok Tani Ngudi Subur	Dk Watulumbung Desa Jiken Kec. Jiken
201	Kelompok Tani Sambong Tani Makmur	Desa Janjang Kec. Jiken
202	Kelompok Tani Sido Dadi I	Desa Bangowan Kec. Jiken
203	Kelompok Tani Timbul Mulya	Desa Bangoan Kec. Jiken
204	Kelompok Tani Trembalang Makmur	Desa Pojokwatu Kec. Sambong
205	Kelompok Tani Subur 3	Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban
206	Kelompok Tani Sinar Mulia	Gedang Becici Desa Kutukan Kec. Randublatung
207	Kelompok Tani Amanah Tani	Dukuh Suru Desa Tanggel Kec. Randublatung
208	Kelompok Tani Taman Tani	Dk. Tlogo Desa Plosorejo Kec. Randublatung
209	Kelompok Tani Rukun Tani	Pulo Pilang Desa Pilang Kec. Randublatung
210	Kelompok Tani Sido Makmur	Kelurahan Randublatung Kec. Randublatung
211	Kelompok Tani Jaya	Desa Jeruk Kec. Randublatung
212	Kelompok Tani Teladan	Dk Sambong Kel. Wulung Kec. Randublaatung
213	Kelompok Tani Gemah Ripah	Dk Karang Desa Jati Kec. Jati
214	Kelompok Tani Sumber Makmur III	Desa Cabeaan Kec. Cepu
215	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Dk Bapangan Desa Mendenrejo Kec. Kradenan
216	Kelompok Tani Subur 2	Desa Sendangmulyo Kec. Ngawen

No.	Nama Penerima	Alamat
217	Kelompok Ngudi Raharjo III	Desa Kendayaan Kec. Ngawen
218	Kelompok Tani Dewi Sri II	Desa Dologan Kec. Japah
219	Kelompok Pembudidaya Ikan Panolan Mina Makmur	Dusun Kenongogong Desa Panolan Kec.Kedungtuban
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Kepemudaan, Olahgara, Kebudayaan dan Pariwisata)	
220	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN BLORA	Jl. Kolonel Sunandar 63 RT 03 RW 02 Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora
221	KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA KABUPATEN BLORA	Jl. Gor No. 3 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora (Komplek Gor Mustika Blok Timur)
222	PERKUMPULAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA KABUPATEN BLORA	Jl. Gor No. 3 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora (Komplek Gor Mustika Blok Barat)
223	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BLORA	Jl. GOR No. 5 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora
224	PADEPOKAN PENCAK SILAT PAGAR NUSA KABUPATEN BLORA	Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
225	PERKUMPULAN SATRIO WISNU PININGIT CAMPURSARI	Kelurahan Kunduran RT 007 RW 003 Kecamatan Kunduran Kab. Blora
226	PERKUMPULAN SENI KETOPRAK KARYA ASMARA SRI BUDAYA	Dukuh Kalirejo RT 007 RW 001 Desa Banjarejo Kec. Banjarejo Kab. Blora
227	PERKUMPULAN SENI BARONGAN WISANG ABIYOSO DESA BULUROTO KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA	Dukuh Pojok RT 004 RW 005 Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
228	PERKUMPULAN KAMAR BELAJAR MUSIK CEPU BLORA	Jl. Arya Jipang lr No.2 barat no. 35 Balun Srikaton RT 004 RW 003 Kecamatan Cepu Kab. Blora
229	PERKUMPULAN JAMIAH EL ASYIQ KARANGBOYO	Dukuh Tambakwatu RT 001 RW 002 Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora
230	PERKUMPULAN GROUP HADROH EL ALANS DESA KARANGGENENG KECAMATAN KUNDURAN BLORA	Desa Karanggeneng RT 003 RW 001 Kecamatan Kunduran Kab. Blora
231	PERKUMPULAN KELOMPOK SENI BARONG KYAI SINGO LODOYO	Desa Sambongrejo RT 002 RW 001 Kec. Ngawen Kab. Blora
232	PERKUMPULAN DANGDUT RAFFI AUDIO EXPERIENCE	Desa Buloh RT 004 RW 003 Kecamatan Kinduran Kab. Blora
233	PERKUMPULAN SENI ORKES KUNDURAN DELAPAN DELAPAN	Kelurahan Kunduran RT 006 RW 002 Kec.Kunduran Kab. Blora
234	PERKUMPULAN SENI KARAWITAN TEMPUR LARAS	Desa Tempuran RT 001 RW 002 Kecamatan Blora Kab. Blora
235	PERKUMPULAN SENI TUNAS MUSTIKA	Dukuh Peting RT 004 RW 002 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kab. Blora
236	PERKUMPULAN SENI BARONG BREMONO KURDO	Desa Biting RT 002 RW 004 Kecamatan Sambong Kab. Blora
237	PERKUMPULAN GENAH MUSTIKA ART	Jl. KNPI No. 43 Kelurahan Bangkle RT 002 RW 005 Kecamatan Blora Kab. Blora
238	PERKUMPULAN SENI KARAWITAN PUTRO LARAS DESA KARANG	Dukuh Punggur RT 004 RW 002 Desa karang Kecamatan Bogorejo Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
239	PERKUMPULAN SANGGAR MUSIK PELANGI	Jl. Diponegoro Gang Unyer C/1B RT 001 RW 009 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kab. Blora
240	PERKUMPULAN GROUP CAMPURSARI LARAS SABDA	Desa Sendangrejo RT 005 RW 001 Kecamatan Bogorejo Kab. Blora
241	PERKUMPULAN IRVANA NADA MUSIK	Dukuh Soronini RT 006 RW 002 Desa Sonokulon Kec. Todanan Kab. Blora
242	PERKUMPULAN GROUP CAMPURSARI ZANNETA MUSIC AUDIO	Desa Kalangrejo RT 005 RW 002 Kecamatan Kunduran Kab. Blora
243	PERKUMPULAN KELOMPOK SENI BARONGAN SINGO BROJO KUNDURAN	Kelurahan Kunduran RT 008 RW 002 Kecamatan Kunduran
244	PERKUMPULAN KARAWITAN SATRIO WISNU PININGIT LARAS	Kelurahan Kunduran RT 007 RW 003 Kecamatan Kunduran
245	PERKUMPULAN REBANA MODERN AL MUSTOFA BAPANGAN	Dusun Bapangan RT 004 RW 003 Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kab. Blora
246	PERKUMPULAN WAHYU CEMPOKO MULYO	Dukuh Pulo RT 002 RW 003 Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kab. Blora
247	PERKUMPULAN SENI KARAWITAN DWIJO JATI LARAS	Desa Doplang RT 013 RW 002 Kecamatan Jati Kab. Blora
	Urusan Perdagangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	
248	KELOMPOK USAHA MASHOLEH GALLERY	Desa Dringo RT 03 RW 01, Kec. Todanan
249	KELOMPOK BERSAMA MEKAR JAYA PUTRA DESA DRINGO TODANAN	Dukuh Serut RT 02 RW 02, Desa Dringo, Kec. Todanan

No.	Nama Penerima	Alamat
250	PERKUMPULAN KELOMPOK SENTRA PANDE BESI USAHA MANDIRI BANDUNGROJO KECAMATAN NGAWEN BLORA	Desa Bandungrojo, Kec. Ngawen, Kab. Blora
251	PERKUMPULAN GALIPAT JAYA KUNDURAN	Kelurahan Kunduran RT 04 RW 04, Kec. Kunduran, Kab. Blora
252	PERKUMPULAN NYADONG BERKAH FAZA SASAK	Desa Buluroto, Dukuh Sasak RT 01 RW 02, Kec. Banjarejo, Kab. Blora
	Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjas)	
253	YAYASAN MATHOLIUL ANWAR PULEDAGEL	Dukuh Pule Rt. 001 Rw. 001 Desa Puledagel Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
254	YAYASAN NUR ROHMAN CEPU	Jln Duku No 57 Rt.03 Rw. 06 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu , Kabupaten Blora
255	YAYASAN GUNUNG SLAMET TEMPELAN	Jl. Gunung Slamet 4 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora
256	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA KERIPIK MUSTIKA	Jalan Barito Nomor 20 B, Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kedungjenar Kecamatan Blora Kabupaten Blora
257	YAYASAN SANTREN JATI BANJAR	Desa Sembongin, Rt. 002 Rw. 004, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
258	YAYASAN AL ASYROF TEMPUR NGILEN	Desa Ngilen RT.009 RW. 001 Kecamatan Kunduran, Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
259	YAYASAN KESEJAHTERAAN MUSLIMAT NAHDOTUL ULAMA JAWA TENGAH	Graha Nahdliyin Jln Kauman alon-alon Selatan No 2 Blora, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora
260	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA NGUDI BARAKAH TEKNIK	Desa Gabusan, Rt. 008 Rw. 005, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
261	PERKUMPULAN ARSYLAA BEAUTY RAHAYUU	Desa Gayam Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora
262	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA KARYA PUTRA ABADI DESA JIKEN BLORA	Desa Jiken, RT. 002 RW. 012, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
263	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA ALAMI TUGU JIKEN	Desa Jiken, RT. 004 RW. 007 Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
264	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA TUNAS JAYA DESA JEPANGREJO	Desa Jepangrejo RT.002/RW. 009 Kecamatan Blora Kabupaten Blora
265	PERKUMPULAN RIZHALIM BHUMI MUSTIKA	Dukuh Denguk RT. 001/ RW. 002 Desa Andongrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora
266	PERKUMPULAN KELOMPOK PEMUDA SORBAN MULIA	Desa Tempellemahbang RT. 002/ RW. 004 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
267	PERKUMPULAN KELOMPOK UMKM MUSTIKA KAMOLAN KABUPATEN BLORA	Desa Genjahan RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora
268	PERKUMPULAN BENGKEL MULYA MULYOREJO	Desa Mulyorejo RT.002/ RW. 003 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
269	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA JATI PERDANA	Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora
270	PERKUMPULAN KELOMPOK PERTUKANGAN JATI SEMI DESA KACANGAN	Dukuh Ngetrep, RT.006/RW.004 Desa Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
271	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA SUMBER JAYA ABADI DALANGAN	Dukuh Dalangan RT.001/ RW.001 Desa Dalangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
272	PERKUMPULAN BERKAH JAYA MOTOR	Dukuh Gayam RT. 010/ RW. 003 Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
273	PERKUMPULAN KELOMPOK BERSAMA PANGESTU SAMBONG	Desa Ledok RT. 001/ RW. 003 Kecamatan Sambong Kabupaten Blora
274	PERKUMPULAN KELOMPOK PERAJIN KAYU PUTRA AGUNG	Desa Gempolrejo RT.005/RW.005 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
275	PERKUMPULAN KELOMPOK MEUBELAIR PANORAMA JATI	Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
	Urusan Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah)	
276	PERKUMPULAN MUSHOLA NURUL HIDAYAH LEDOKAN	Rt.02, Rw.02,Kel. Wulung, Kec. Randublatung
277	YAYASAN HASAN DZURIAH ALI KARTAYUDA BLORA	Ds. Sumber Rt. 03, Rw. 13, , Kec. Kradenan
278	TAJUK PADAMARAN TIROZUL ASIKIN KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA	Dk. Beran, Ds. Beganjing, Kec. Japah
279	YAYASAN PERGURUAN HIKMATUN NAJAH BLORA DISINGKAT YPHNB	Desa Dolongan RT 001 RW 001 Kecamatan Japah
280	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH TARBIYATUL ISLAMIYYAH DUKUH KLUMPIT	Desa Pelemsengir RT 003 RW 001 Kecamatan Todanan

No.	Nama Penerima	Alamat
281	YAYASAN SAFINATUN NAJAH WOTBAKAH	Desa Wotbakah RT 005 RW 001 Kecamatan Japah
282	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL MUBTADIIN KEDUNGWARU	Desa Kedungwaru RT 006 RW 001 Kecamatan Kunduran
283	YAYASAN SABILUL MUTTAQIN SEMUT	Dusun Medalem RT. 05 RW. 01 Desa Medalem Kec. Kradenan, Kab. Blora
284	YAYASAN AL FATIMIYYAH KEDUNGTUBAN BLORA	Ds. Ketuwan, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Kedungtuban
285	YAYASAN HIDAYATUL ISLAMIYAH DESA BAJO	Dukuh. Bangsan Rt.02 Rw.04 Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab.Blora, Kab. Blora
286	TPq Yayasan Pendidikan Islam Taman Pendidikan Al Qur'an Al Azhar Desa Ngraho	Dk. Ningalan Rt.01 Rw.06 Desa Ngraho Kec. kedungtuban kab.Blora, Kab. Blora
287	PERKUMPULAN PENGURUS TA'MIR MASJID JA'MI NAHDHOTUL SUBAH DUKUH NGETREP DESA KACANGAN KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA	Desa Kacangan Kecamatan Todanan
288	YAYASAN ISLAM AN NURONIYYAH KEJIWAN	Dk. Kejiwan, Rt.01, Rw.03,Ds. Klagen, Kec. Kedungtuban
289	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH HIDAYATUS SIBYAN DESA SEMAWUR	Rt. 04, Rw.01, Ds. Semawur, Kec. Ngawen
290	YAYASAN JONGBIRAJI MULYA KARANGJONG	Dkh. Pule, Ds. Karangjong, Kec. Ngawen
291	YAYASAN AL AMIN KARANGPUNG SONOKIDUL	Desa Sonokidul RT 001 RW 004 Kecamatan Kunduran
292	PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN AN NUR KEDUNGWARU	DUKUH KEDUNGPETING DESA KEDUNGWARU RT 01 RW 04 KECAMATAN KUNDURAN, Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
293	YAYASAN AN-NUJUM	Desa Kedungwaru RT 004 RW 001 Kecamatan Kunduran
294	PERKUMPULAN TPQ FASHICHUL LISAN	Desa Kodokan RT 002 RW 002 Kecamatan Kunduran
295	Yayasan Masjid Al Istiqomah Madani	Dk. Karangpung, Ds. Plosorejo, Kec. Kunduran
296	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH NURUL HUDA PLOSOREJO	Desa Plosorejo RT 005 RW 001 Kecamatan Kunduran
297	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL ULUM NGAWENOMBO	Ds. Ngawen ombo, Kec. Kunduran
298	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH AN NASHRIYAH CUNGKUP	DESA CUNGKUP RT 07 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN, Kab. Blora
299	PERKUMPULAN TAKMIR MASJID AN NUR DESA KEDUNGWARU KEDUNGWARU KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH	Desa Kedungwaru RT 001 RW 006 Kecamatan Kunduran
300	YAYASAN MAHDLATUL ISLAM AL ILMIYAH	Dkh.Dawung RT 007 RW 002 Ds. Buloh, Kec. Kunduran
301	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH TARBIYATUL MUBTADIIN KLOKAH	Ds. Kokah RT 001 RW 002 Kec. Kunduran
302	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL HUDA DUKUH SASAK DESA BULUROTO KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA	Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo
303	YAYASAN DARUL AMIN BULUROTO	Desa Buluroto RT 001 RW 008 Kecamatan Banjarejo

No.	Nama Penerima	Alamat
304	YAYASAN WAKAF PESANTREN ASSALAM CEPU	Jalan Diponegoro Lr. 3 Cepu, Kab. Blora
305	PERKUMPULAN PONDOK PESANTREN ROHMAN AL FALAH	Jl. Gajah Mada No. 20 Kel. Ngelo, Kec. Cepu, Kab. Blora
306	YAYASAN TAKMIR MASJID AL MUJAHIDDIN BETHEKAN	Dkh. Betekan, Rt.01, Rw.03,Ds.Ngraho, Kec. Kedungtuban
307	YAYASAN NURUDH DHOLAM JIMBUNG	Desa Jimbung, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora
308	Madrasah Diniyyah Irsyadiyyah Assyafi'iyyah	Kel. Tambakromo, Ke. Cepu, Kab. Blora
309	YAYASAN ROUDLOH ASKURIYAH PULO	Ds.Pulo, Kec.Kedungtuban
310	PKBM Al Fatimiyyah Kedungtuban Blora	Desa Ketuwan Kec. Kedungtuban Kab. Blora, Kab. Blora
311	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH AL MUSLIM KEDUNGWARU	Desa Kedungwaru RT 002 RW 005 Kecamatan Kunduran
312	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL MUBTADIIN KEDUNGWARU	Desa Kedungwaru RT 006 RW 001 Kecamatan Kunduran
313	YAYASAN AL AMIN KARANGPUNG SONOKIDUL	Desa Sonokidul RT 001 RW 004 Kecamatan Kunduran
314	PERKUMPULAN TAKMIR MASJID NURUL ANWAR BEJIREJO KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA	Desa Bejirejo RT 005 RW 001 Kecamatan Kunduran
315	BAITURROHMAN KAJENGAN TODANAN	Desa Kajengan RT 002 RW 002 Kecamatan Todanan
316	Gereja Isa Almasih Kacangan Anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI	Jl.Kacangan Bicak, Rt. 05,Rw.01, Kacangan, Kec. Todanan

No.	Nama Penerima	Alamat
317	YAYASAN DARUSSALAM TRISUCI	Ds. Doplang, Rt. 028, Rw.004, Kec. Jati, Kab. Blora
318	YAYASAN AL ISTIQOMAH DESA ADIREJO	Dukuh Sembung Desa Adirejo RT 02 RW 02 Kecamatan Tunjungan, Kab. Blora
319	YAYASAN DARUL MUNA KLOKAH	Ds. Klokah, Kec. Kunduran
320	LEMBAGA PENDIDIKAN AL QURAN DARUL HUDA	Desa Bogorejo, Kec. Bogorejo, Kab. Blora
321	MADRASAH DINIYAH BAITUL HIMAH DUKUH NGEBRINGIN DESA KACANGAN KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA	Dk Geneng Desa Pringi Kec. Todanan Kab Blora , Kab. Blora
322	PERKUMPULAN MASJID AT TAQWA DUKUH WATES DESA SUMBER	Dukuh Wates Desa Sumber Kecamatan Kradenan
323	Lembaga Pendidikan Islam Ponpes Al Hikmah Ngadipurwo-Blora	Jl.Tempuran Gg III Ngadipurwo Blora
324	PERKUMPULAN PENGURUS TA'MIR MASJID JA'MI NAHDHOTUL SUBAH DUKUH NGETREP DESA KACANGAN KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA	Desa Kacangan Kecamatan Todanan
325	BAITURROHMAN KAJENGAN TODANAN	Desa Kajengan RT 002 RW 002 Kecamatan Todanan
326	YAYASAN AL HAMIDAH DESA BLUNGUN JEPON	Desa Blungun Kecamatan jepon , Kab. Blora
327	GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) CEPU	Jl. Taman Bahagia No. 12 Kelurahan Cepu RT 004 RW 008 Kecamatan Cepu
328	YAYASAN BAITUN NURROHIM KUNDURAN	Rt.02, Rw. 03, Ds.Sempu, Kec. Kunduran
329	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL QURAN AL BAROKAH JEPON	Rt. 03, Rw.01, Kel. Jepon, Kec.Jepon

No.	Nama Penerima	Alamat
330	PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN AL-IKHLAS DUKUH NGANGGIL DESA MOJOWETAN	Desa Mojowetan RT 003 RW 002 Kecamatan Banjarejo
331	YAYASAN SIROJUL HUDA BOGOREJO	Jl. Jepon-Jatirogo Desa Bogorejo RT 001 RW 001 Kecamatan Bogorejo
332	PERKUMPULAN TAKMIR MASJID MIFTAHURROHMAH DESA GONDANG KECAMATAN NGAWEN	Rt.01, Rw.02, Dk.Beran, Ds. Gondang, Kec. Ngawen
333	YAYASAN SALAFIYAH KHALAFIYAH AL-HIKMAH NGADIPURWO	Jl. Sayuran Gang 3 RT. 02 Rw. 01 Desa Ngadipurwo Kec.Blora Kab. Blora, Kab. Blora
334	YAYASAN BUMI AMANAH SENDANGWATES	Dukuh Goito RT. 07 RW. 01 Desa Mendenrejo Kec. Kradenan, Kab. Blora
335	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL HUDA SAMBENG	Desa Sambeng, Kec. Todanan, Kab. Blora, Kab. Blora
336	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH RIYADUL JANNAH	Dukuh Goito RT. 07 RW. 01 Desa Mendenrejo Kec. Kradenan, Kab. Blora
337	TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN ARROHMAN BAPANGAN	Dusun Bapangan, Ds. Mendenrejo, Kec. Kradenan
338	YAYASAN MASJID BAITUL MUTTAQIIN BAPANGAN	Dusun Bapangan RT.05 RW.03 Desa Mendenrejo Kec. Kradenan, Kab. Blora
339	Musholla Baitur Rohman	Desa Sumberejo Kecamatan Japah, Kab. Blora
340	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL ISTIQOMAH	Ds. Sonokidul, Kec.Kunduran
341	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL ULUM DESA NGUMBUL TODANAN	Ds. Ngumbul, Kec. Todanan, Jl. Goa Terawang-Tegalrejo Km 05 Todanan

No.	Nama Penerima	Alamat
342	Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Blora	Jln. Dr.Sutomo No.44 Blora
343	YAYASAN HIDAYAH BAROKAH RANDULAWANG	DUKUH KARANGGENENG RT05 RW06 DESA RANDULAWANG KECAMATAN JATI, Kab. Blora
344	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL MAUNAH KLOKAH	Desa Klokah RT 001 RW 002 Kecamatan Kunduran
345	YAYASAN PEMBERDAYAAN KELUARGA MUTIARA ASRI SENDANGREJO	Ds. Sendangrejo, Rt.01, Rw.03, Kec. Bogorejo
346	YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL MANFAAT GADU BOGOREJO	Ds. Gandu, Kec. Bogorejo
347	PERKUMPULAN MASJID NURUL HUDA DESA JERUK KECAMATAN BOGOREJO	Ds. Jeruk, Kec. Bogorejo
348	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL JANNAH KESER	Ds. Keser,Rt.02,Rw.03, Kec. Tunjungan
349	PERKUMPULAN MUSHOLLA AL AMIN DESA SITIREJO	Desa Sitirejo RT 009 RW 002 Kecamatan Tunjungan
350	YAYASAN KHOZINATUL ULUM AL-MUBAROK	Desa Tamanrejo RT 004 RW 001 Kecamatan Tunjungan
351	PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN MATHOLIUL FALAH DUKUH TEMETES	Ds. Banjarejo, Rt.04,Rw.05, Kec. Banjarejo
352	PERKUMPULAN TAKMIR MUSHOLLA AL-KHIDMAH GEDONGSARI	Ds. Gedongsari, Rt.04,Rw.01, Kec. Banjarejo
353	YAYASAN AL-ICHSAN BALONGSARI	Ds. Balongsari, Rt.03, Rw.01, Kec. Banjarejo

No.	Nama Penerima	Alamat
354	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN AL QUR'AN MATHOLIBUL HUDA DUKUH NGABLAK DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA	Ds. Sumberagung,Rt.06,Rw.04, Kec. Banjarejo
355	YAYASAN AR RAUDL BANJAREJO	Ds.Buluroto, Rt. 005, Rw.08, Kec. Banjarejo
356	YAYASAN AL IKHLAS DUKUH WANGIL DESA SAMBONGANYAR	Desa Sambonganyar RT 002 RW 002 Kecamatan Ngawen
357	YAYASAN AL MUNAWWAR GANDU BOGOREJO	Desa Gandu Kecamatan Bogorejo, Kab. Blora
358	PERKUMPULAN TAKMIR MASJID BAITUL MAKMUR DESA SINGONEGORO	Rt.03, Rw. 03 Dk. Kedungprahu , Ds. Singonegoro
359	PERKUMPULAN LPI MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL ISLAM KARANGAYAR	Dk. Kemuneng Desa. Karangayar Kec. Todanan , Kab. Blora
360	YAYASAN SIROJUL HIKMAH BAKAH	Desa Bakah RT 006 RW 001 Kecamatan Kunduran
361	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH AL MUTTAQIN DUKUH GUWARAN	Desa Pelem RT 001 RW 001 Kecamatan Jati
362	YAYASAN AN NUR HIDAYATUR ROHMAN NGASEM TANGGUNG	Dukuh Ngasem Tanggung RT 011 RW 006 Desa Randulawang Kecamatan Jati
363	YAYASAN AL MUBAROK DUKUH BESI DESA JEGONG	Dukuh Besi Desa Jegong Kecamatan Jati, Kab. Blora
364	YAYASAN JAJAR NURUL IMAN	Rt.03, RW.06, Dk. Jajar, Ds. Pengkolrejo, Kec. Japah
365	PERKUMPULAN MUSHOLLA AL AMIN DESA SITIREJO	Desa Sitirejo RT 009 RW 002 Kecamatan Tunjungan

No.	Nama Penerima	Alamat
366	YAYASAN AGENG WALUYO JATI	Dk. Maguan RT 05 RW. 01 Ds. Tamanrejo Tunjungan Blora, Kab. Blora
367	YAYASAN AL ASYKUR BLORA	Kelurahan Sonorejo Kec. Blora, Kab. Blora
368	MADRASAH DINIYAH DARUL ULUM	Desa Jati RT 004 RW 004 Kecamatan Jati
369	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MADRASAH DINIYAH HIDAYATUT THOLIBIN	Ds. Nglebur, Rt.04, Rw.05, Kec. Jiken
370	PERKUMPULAN PONDOK PESANTREN AL-ADNAN PULEDAGEL	DESA PULEDAGEL, KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH
371	PERKUMPULAN MUSHOLLA AL AMIN DESA SITIREJO	Desa Sitirejo RT 009 RW 002 Kecamatan Tunjungan
372	PERKUMPULAN TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN AN NUR DESA JANJANG JIKEN BLORA	Rt.03,Rw.01, Ds. Janjang, Kec. Jiken
373	YAYASAN ROUDLOTUL MUTAABBIDIN	Dk.Tambak ,Rt.01, Rw. 13, Ds. Sumber, Kec. Kradenan, Kab. Blora
374	YAYASAN BAITURRAHMAN TREMBULREJO NGAWEN	Ds. Trembulrejo, Kec. Ngawen
375	MASJID AL BAROKAH	KELURAHAN CEPU RT. 006 RW. 011 KELURAHAN CEPU KEC. CEPU
376	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH IRSYADIYYAH ASYSYAFI'IYYAH TAMBAKROMO	Kelurahan Tambakromo RT 003 RW 002 Kecamatan Cepu
377	YAYASAN AL HIKMAH KAPUAN BARAT	Desa Kapuan RT 004 RW 002 Kecamatan Cepu
378	YAYASAN AS SANUSIYYAH	Ds. Bacem, Rt.02, Rw.01, Kec. Banjarejo

No.	Nama Penerima	Alamat
379	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH HIDAYATUS SHIBIYAN TEMPUREJO	Ds. Tempurejo, Kec. Blora
380	YAYASAN AL BOQIR ULLUM JANNAH DUKUH GIRING DESA SAMBONGWANGAN KECAMATAN RANDUBLATUNG	DESA SAMBONGWANGAN DUKUH GIRING RT01 RW04, Kab. Blora
381	YAYASAN HASANAH CENTER CEPU	Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu
382	YAYASAN DARUL FALAH TEGALGUNUNG BLORA	Kelurahan Tegalgunung RT.02 RW.01 Kec. Blora
383	PERKUMPULAN PONDOK PESANTREN ROHMAN AL FALAH	Jl. Gajah Mada No. 20 Kel. Ngelo, Kec. Cepu, Kab. Blora
384	Pengakuan Gereja Kristen Jateng Utara	Jl Raya Blora Cepu Km 6,8 Kelurahan Jepon, Kab. Blora
385	Gereja Kristen Jawa (GKJ) Blora	Jalan Kolonel Sunandar No 32a, Mlangsen, Blora
386	Badan Gereja Katolik Paroki Santo Pius X	Jl. Pemuda No. 42 Blora
387	YAYASAN KUNCORO NGUNDUHING PAKARTI	Ds. Bandungrejo Kec. Ngawen
388	PERKUMPULAN PONDOK PESANTREN AL HASANY	JL. KH ZAINAL ABIDIN RT/RW 2 KEC. NGAWEN
389	PERKUMPULAN PENGURUS TA'MIR MASJID AL-HUDA KEDUNGWUNGU	Desa Kedungwungu RT 013 RW 003 Kecamatan Todanan
390	YAYASAN ROUDLOTUL MUTAABBIDIN	Dk.Tambak ,Rt.01, Rw. 13, Ds. Sumber, Kec. Kradenan, Kab. Blora
391	YAYASAN GERBANG IMAN AL MUSTHOFA	Dk. Trisinan, Rt.04 Rw.02, Ds. Giyanti, Kec. Sambong
392	PERKUMPULAN PENGURUS TA'MIR MASJID LUHUR AL JANNAH KAJENGAN	Desa Kajengan RT 005 RW 002 Kecamatan Todanan

No.	Nama Penerima	Alamat
393	Taman Pendidikan Al-Qur`an An-Nur, Ds. Janjang , Kec. Jiken	Rt.03,Rw.01, Ds. Janjang, Kec. Jiken
394	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL ISLAM KARANGANYAR	Ds. Karanganyar, Kec. Todanan
395	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH NURONIYYATUL ISTIQOMAH	Ds. Trembulrejo RT 001 RW 003, Kec. Ngawen
396	YAYASAN KUNCORO NGUNDUHING PAKARTI	Ds. Bandungrejo Kec. Ngawen
397	PERKUMPULAN PONDOK PESANTREN AL HASANY	JL. KH ZAINAL ABIDIN RT/RW 2 KEC. NGAWEN
398	PERKUMPULAN TAKMIR MASJID AL BADAR DUKUH MANGGIR	Dkh. Manggir, Ds. Ngumbul, Kec. Todanan
399	YAYASAN TARBIYATUL ATFAL EDUCATION	Desa Ganjahan RT 003 RW 001 Kecamatan Jiken
400	YAYASAN MIFTAHUL HUDA DUKUH JAMBANGAN DESA KETILENG KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA	Desa Ketileng RT 002 RW 005 Kecamatan Todanan
401	YAYASAN MUSHOLLA AR ROHMAN	Ds. Doplang, Rt. 025, Rw.03, Kec.Jati
402	YAYASAN DARUL KHIDMAH DOPLANG	Ds. Doplang, Rt.013, Rw. 002, Kec. Jati
403	YAYASAN NURUL HIDAYAH DESA BICAK	Ds. Bicak RT 006 RW 002 Kec. Todanan
404	Musholla An nur	Dk. Ngriking Desa Kemiri Kec. Kunduran, Kab. Blora
405	Yayasan Al Amanah	Ds. Sarirejo, Kec. Bogorejo
406	YAYASAN MASJID SUBULUL HUDA SAMBONGANYAR DESA SUMBER	Dusun Sambanganyar RT 004 RW 009 Ds. Sumber Kec. Kradenan
407	YAYASAN MIFTAHUR ROSYID ASSALAM	Dk. Semut RT 004 RW 006 Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan

No.	Nama Penerima	Alamat
408	YAYASAN AL MA'RUF JEPANGREJO	Ds. Jipangrejo Kec. Blora, Kab. Blora
409	TA'MIR MASJID JAMI' DARUS SOLIKHIN DUKUH BALONGKAL DESA GABUSAN KECAMATAN JATI	Desa Gabusan Kecamatan Jati
410	Yayasan Al Amanah	Ds. Sarirejo, Kec. Bogorejo
411	MADRASAH DINIYAH NURUL FALAQ DESA SIDOMULYO	Desa Sidomulya RT 002 RW 004 Kecamatan Banjarejo
412	YAYASAN BAITURROHMAN DUKUH KARANG DESA JATI	Desa Jati RT 004 RW 004 Kecamatan Jati
413	PERKUMPULAN PENGURUS TA'MIR MASJID JAMI' BAITUN NA'IM GONDEL	Ds. Gondel, Rt. 07, Rw. 02, Kec. Kedungtuban
414	YAYASAN AL IKHLAS DUSUN JAMPI BEKUTUK	Desa Bekutuk Dusun Jampi Rt 001 Rw 006 Kecamatan Randublatung
415	Gereja Bethel Indonesia	Jl.Arumdalu No.21A Desa Mlangsen Blora 58215, Kab. Blora , Kab. Blora
416	YAYASAN NURUL ISTIQOMAH GABUSAN	Desa Gabusan RT 001 RW 006 Kecamatan Jati
417	YAYASAN MISBAHUL HUDA DUKUH TOBO	Desa Tobo RT 005 RW 002 Kecamatan Jati
418	YAYASAN KHOZINATUL ULUM AN-NADA	Jl. Mr. Iskandar No.42, Rt.04, Rw.02, Kel. Mlangsen, Kec. Blora
419	YAYASAN KHOZINATUL ULUM AL-AZHAR BLORA	Jl. Mr. Iskandar, Gg XII, No. 02, Kaliwangan-Mlangsen , Kec. Blora
420	YAYASAN MASJID AN NUUR KELURAHAN WULUNG RANDUBLATUNG	Dukuh Sambong RT 005 RW 004 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung, Kab. Blora
421	YAYASAN GERBANG IMAN AL MUSTHOFA	Dk. Trisinan, Rt.04 Rw.02, Ds. Giyanti, Kec. Sambong

No.	Nama Penerima	Alamat
422	YAYASAN AL FATIMIYYAH KEDUNGTUBAN BLORA	Ds. Ketuwan, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Kedungtuban
423	YAYASAN AL FATIMIYYAH KEDUNGTUBAN BLORA	Ds. Ketuwan, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Kedungtuban
424	PERKUMPULAN MADRASAH DINIYAH NURONIYYATUL ISTIQOMAH	Ds. Trembulrejo RT 001 RW 003, Kec. Ngawen
425	YAYASAN AL KHODIJAH DUKUH KETANGGI DESA SENDANGREJO	Ds. Sendangrejo, Kec. Ngawen
426	PERKUMPULAN TAKMIR MASJID BAITUS SYIFA DUKUH KARANGMOJO	Dk. Karangmojo, Ds. Talokwohmojo, Kec. Ngawen
427	YAYASAN AS SANUSIYYAH	Ds. Bacem, Rt.02, Rw.01, Kec. Banjarejo
428	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL FIRDAUS NGRAMBITAN	Rt.05, Rw.01, Ds.Ngrambitan, Kec. Japah
429	PERKUMPULAN AL HIDAYAH DUKUH WEGIL DESA BACEM	DESA BACEM KEC. BANJAREJO, Kab. Blora, Kab. Blora
430	Masjid Baitus Syifa	Dk. Karangmojo, Ds. Talokwohmojo, Kec. Ngawen
431	Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al Firdaus	Rt.05, Rw.01, Ds.Ngrambitan, Kec. Japah
432	masjid baitun nurrohim	RT 002 RW 003 dukuh guplo kulon desa Sempu kecamatan Kunduran kabupaten Blora , Kab. Blora
433	Yayasan Pendidikan Dan Sosial Khozinatul Anwar	Dusun Banaran RT03 RW 01, Ds. Pengkoljagong, Kec. Jati, Kab. Blora
434	PERKUMPULAN AL HIDAYAH DUKUH WEGIL DESA BACEM	DESA BACEM KEC. BANJAREJO, Kab. Blora, Kab. Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
435	YAYASAN TAKMIR AL MUJAHIDDIN BETHEKAN	Desa Ngraho RT 001 RW 003 Kecamatan Kedungtuban
436	BAZNAS KABUPATEN BLORA	Jl. Kolonel Sunandar No.63 Blora
437	YAYASAN BAITUL MUTTAQIN DESA BULOH	Desa Buloh RT 004 RW 004 Kecamatan Kunduran
438	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL ITTIHADIYYAH TAMBAKROMO	Jl. Raya Tambakromo KM 2,5 Cepu, Kab. Blora
439	YAYASAN MIFTAHUS SAA'DAH BLORA	Jalan Tempuran Gang 1 Desa Ngadipurwo RT 002 RW 001 Kecamatan Blora
440	PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	Jl. Reksodiputro No.17 RT 005 RW 002 Kel. Mlangsen Kec. Blora Kab Blora, Kab. Blora
441	PERKUMPULAN MUSHOLLA AL AMIN DESA SITIREJO	Desa Sitirejo RT 009 RW 002 Kecamatan Tunjungan
442	YAYASAN ISLAM AN NURONIYYAH KEJIWAN	Ds. Klagen RT. 002 RW. 003 Kec. Kedungtuban
443	Yayasan Khozinatul Ulum An-Nada	Jl. Mr. Iskandar No.42, Rt.04, Rw.02, Kel. Mlangsen, Kec. Blora
	Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	
444	Perkumpulan Tanduran Organik Jawa Tengah	Dk. Denguk 001/002 Ds. Andongrejo Kec. Blora Kab. Blora
445	Yayasan Tunas Karya Utama	Desa Sempu RT 002 RW 002 Kec. Kunduran Kabupaten Blora
446	Yayasan Amanah Sahabat Alquran	Dk. Maguan RT 04 RW 01, Desa Tamanrejo, Kec. Tunjungan Kab. Blora
447	Perkumpulan Gagak Rimang Blora Shooting Club	Jl. Bima No. 4 RT 001 RW 002, Kel. Bangkle, Kec. Blora Kab.Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
448	Yayasan Pendidikan Ronggolawe Cepu	Mentul RT 003 RW 004 Kelurahan Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora
449	Perkumpulan Keluarga Besar Putra Putri Polri	Jl. Agil Kusumodiyo Lr.1 No. 39 B RT 003 RW 002 Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
450	Perkumpulan Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Jl. RA. Kartini Lr. 1/7 Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora
451	Perkumpulan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Raya Blora Cepu Km 6 Jepon No.8B RT 001 RW 001 Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora
452	Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Blora	Jl. Sumbawa No 11 Jetis Blora
453	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Blora	Jl. Gunung Lawu No. 74 Blora
454	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora	Jl. Raya Blora-Cepu Km 3 Blora
455	Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora	Jl. Gatot Subroto Km 3 Blora
456	Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kabupaten Blora	Jl. Blora Rembang Km 7 Desa Keser Kec Tunjungan Kab. Blora
457	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Blora	Jl. Tuntang No 6 B Kedungjenar Blora
458	Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Blora	Jl. Gunung Slamet No 29 Blora
459	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Blora	JL.Tentara Pelajar No 51 A Tempelan Blora

No.	Nama Penerima	Alamat
460	Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Blora	Jl. Halmahera II No 21C Kelurahan Tambahrejo Blora
461	Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Blora	Jl. Mr. Iskandar No.133 Blora

Daftar Penerima Bantuan Sosial pada RKPD 2026

No.	Penerima	Alamat
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan)	
1	MARKUM [BANSOS-BRG]	RT. 03 RW. 02 Desa Gadu Kecamatan Sambong
2	LESTARI PURWANINGSIH [BANSOS-BRG]	RT. 05 RW. 02 Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban
3	DEWI PATRIANINGSIH [BANSOS-BRG]	RT. 01 RW. 02 Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu
4	DEWI FATMAWATI [BANSOS-BRG]	RT. 09 RW. 02 Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban
5	WIJI	DESA PLANTUNGAN RT 03 RW 02 , KECAMATAN BLORA
6	JEMI	DESA PLANTUNGAN RT 03 RW 02, KECAMATAN BLORA
7	SARWI	DK KEMIREN PLANTUNGAN RT 02 RW 01, KECAMATAN BLORA
8	WALOYO	DK. KEMLOKO RT 003 RW 003, DESA GENENG, KECAMATAN JEPON
9	JAYADI	DK. KEMLOKO RT 002 RW 003, DESA GENENG, KECAMATAN JEPON
10	SARPI	DK PUNGGUR TEGALAN RT 002 RW 003, DESA TEMUREJO, KECAMATAN BLORA
11	ANDI SETIYO SUTRISNO	JL. GUNUNG LAWU NO 57 RT 001 RW 002, KELURAHAN TEMPELAN, KECAMATAN BLORA

No.	Penerima	Alamat
12	SUPARNO	JEPON RT 002 RW 004, KELURAHAN JEPON, KECAMATAN JEPON
13	RASINAH	KUNDURAN RT. 008 RW. 003 KELURAHAN KUNDURAN KECAMATAN KUNDURAN
14	SULATIN	KUNDURAN RT. 004 RW. 001 KELURAHAN KUNDURAN KECAMATAN KUNDURAN
15	SUTATIK	KEL. SONOREJO RT 003 RW 002, KELURAHAN SONOREJO, KECAMATAN BORA
16	MUHAMMAD SAMI'UN	RT 002 RW 002 KEL SONOREJO KECAMATAN BORA
17	MOHAMMAD SOLEH	JL. KNPI GG. CENDERAWASIH RT 05 RW 05 KEL. BANGKLE
18	SUKARMI	RT. 06 RW. 01 KELURAHAN TEGALGUNUNG KECAMATAN BORA
19	BAGIYO WALUYO	RT. 05 RW. 01 KELURAHAN TEGALGUNUNG KECAMATAN BLORA
20	SANGKI	TAMBAKWATU RT 009 RW 002, KELURAHAN KARANGBOYO, KECAMATAN CEPU
21	SUYATI	NGRAMBITAN RT 004 RW 001 DS NGRAMBITAN
22	SUMARDI	NGRAMBITAN RT 004 RW 001 DS NGRAMBITAN
23	RENDY SAPTO ANGGORO	JL.BARITO NO.32 RT 4 RW 2

No.	Penerima	Alamat
24	ANDI WIDIANTORO	JL .KNPI GG MERPATI NO.10 RT 006 RW 005 KELURAHAN BANGKLE
25	PRIYANTI	DK GULINGAN TEMPUREJO RT 001 RW 004
26	TRI SUKIRNO	JL. BERINGIN TIMUR RT 008 RW 003 KELURAHAN MLANGSEN KECAMATAN BLORA
27	RASIDAN	JEPANGREJO RT 003 RW 001 JEPANGREJO
28	LASMUJI	DK. TEMBORO RT 008 RW 005 DS SUMBERAGUNG KECAMATAN BANJAREJO BLORA
29	DARSI	KARANGTALUN RT 004 RW 001 DESA KARANGTALUN, KECAMATAN BANJAREJO
30	SITI MUTMAINAH	KARANGTALUN RT 004 RW 001 DESA KARANGTALUN, KECAMATAN BANJAREJO
31	WIDYA UTA AGUS ARI	KP. SIDOARJO LR.II/15 CEPU RT 004 RW 002, KELURAHAN CEPU, KECAMATAN CEPU
32	JOKO WAHONO	NGELO RT 004 RW 005, KELURAHAN NGELO, KECAMATAN CEPU
33	JONO	NGELO BRONGKAH RT 003 RW 005, KELURAHAN NGELO, KECAMATAN CEPU
34	YATMI	NGELO RT 004 RW 005, KELURAHAN NGELO, KECAMATAN CEPU

No.	Penerima	Alamat
35	LEGIYONO	NGLANJUK RT 003 RW 002, DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU
36	IMAM TABUT	NGLANJUK RT 001 RW 002, DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU
37	PARMIN	DK KIDANG ULET RT 004 RW 002, DESA SINGONEGORO, KECAMATAN JIKEN
38	TAMPI	DK KEDUNG PRAHU RT 001 RW 003, DESA SINGONEGORO, KECAMATAN JIKEN
39	YAMI	JOMBLANG RT 005 RW 003, DESA JOMBLANG, KECAMATAN JEPON
40	SAKRONI	DS JOMBLANG RT 005 RW 001, DESA JOMBLANG, KECAMATAN JEPON
41	NGATIMIN	DK BLUNGUN RT 002 RW 001, DESA BLUNGUN, KECAMATAN JEPON
42	SAMANI	DESA BLUNGUN RT 002 RW 002, DESA BLUNGUN, KECAMATAN JEPON
43	DJIMAN	DK NGAWEN RT 004 RW 005, KELURAHAN JEPON, KECAMATAN JEPON
44	AGUS SETIYAWAN	KELURAHAN JEPON RT 003 RW 005, KELURAHAN JEPON, KECAMATAN JEPON
45	KARYONO	JL.CIMANUK NO.9 RT 005 RW 003, KEL.KEDUNGJENAR

No.	Penerima	Alamat
46	SUKARTI(ISTRI DARI SUTRISNO ALM)	JL. GAJAHMADA RT 001 RT 008, KELURAHAN NGELO, KECAMATAN CEPU
47	HARIYANTO	PILANG, RT 002 RW 003, DESA NGLANDEYAN, KECAMATAN KEDUNGTUBAN
48	NANTIONO	NGLANDEYAN RT 001 RW 003, DESA NGLANDEYAN, KECAMATAN KEDUNGTUBAN
49	SAIT	GROJOGAN, RT 004 RW 003, DESA BOGOREJO, KECAMATAN BOGOREJO
50	FARID AANG KUNAIFI	DK. KARANG PANDAN RT 003 RW 004, DESA NGLENGKIR, KECAMATAN BOGOREJO
51	SURAJI	BOGOREJO GROJOGAN RT 004 RW 003, DESA BOGOREJO, KECAMATAN BOGOREJO
52	BEJO	BOGOREJO RT 004 RW 003, DESA BOGOREJO, KECAMATAN BOGOREJO
53	SUBIYONO	BOGOREJO RT 002 RW 002 DESA BOGOREJO, KECAMATAN BOGOREJO
54	SUROSO	BOGOREJO RT 001 RW 002, DESA BOGOREJO,, KECAMATAN BOGOREJO
55	AHMAD MUHYIDDIN	DK. WANU TENGAH RT 004 RW 002, DESA TEMPUREJO, KECAMATAN BOGOREJO
56	ZAINAL ARIFIN	TEMPUREJO RT 002 RW 002, DESA TEMPUREJO, KECAMATAN BOGOREJO

No.	Penerima	Alamat
57	TARNO	BOGOREJO RT 002 RW 003, DESA BOGOREJO, KECAMATAN BOGOREJO
58	MASTURI	DS BOGOREJO, RT 003 RW 001, DESA BOGOREJO, KECAMATAN BOGOREJO
59	YASMIN	BANJARKERTO RT 003 RW 002 DESA BANDUNGROJO,KEC NGAWEN
60	YATI	JAGONG RT 006 RW 001,DESA JAGONG,KEC KUNDURAN
61	PARYONO	KALANGREJO RT 004 RW 002 DESA KALANGREJO.KEC KUNDURAN
62	MASRUKIN	DS. KLOKAH RT 002 RW 002, DESA KLOKAH, KECAMATAN KUNDURAN
63	SRIYONO	DK. PULE RT 003 RW 001, DESA PULEDAGEL, KECAMATAN JEPON
64	SUWARTI	KLOKAH. RT 004 RW 005, DESA KLOKAH . KEC KUNDURAN
65	JAMI	JETAK. RT 003 RW 001, DS JETAK. KEC KUNDURAN
66	TAMI	JETAK RT 003 RW 001, KECAMATAN KUNDURAN , KAB. BLORA
67	SURATI	RT 01 RW 03 DK BLIMBING DESA GANDU, KEC. BOGOREJO, KAB. BLORA
68	KATIJAH	RT 02 RW 04 DUKUH GANDU DESA GANDU KEC. BOGOREJO, KAB. BLORA

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BLORA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**550.866.157.000,00**							**609.679.258.658,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**550.866.157.000,00**							**609.679.258.658,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**550.866.157.000,00**							**609.679.258.658,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan pelayanan Perangkat Daerah***	**-**			**100 %**	**509.848.306.000,00**						**-**	**514.898.306.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	420.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	370.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	505.975.306.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	505.965.306.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6000 Orang/bulan	505.965.306.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		505.965.306.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	250.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD*	-			100 %	1.380.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	370.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD*	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Mojowetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	1.113.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	5.170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	790.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	208.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		4.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	610.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.188.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APK PAUD*** ***APS Kesetaraan*** ***APS SMP*** ***APS SD***	**-**			**86 %** **95 %** **74.25 %** **93.25 %**	**40.137.851.000,00**						**-**	**93.700.952.658,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Presentase SD yang terakreditasi minimal B*	-			94,60 %	19.818.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	20.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	3.951.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	1.550.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				7000 Peserta Didik	2.100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		3.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				185 Orang	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2975 Orang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				592 Satuan Pendidikan	92.452.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				592 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				2060 Orang	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	7.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				12 Komunitas	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				500 Buku	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	850.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	542.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				210 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				592 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		985.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	4.200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				600 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	2.035.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Presentase SMP yang terakreditasi B*	-			80 %	11.520.601.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	54.597.380.658,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	894.100.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	950.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	575.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				600 Peserta Didik	160.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				4000 Peserta Didik	960.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				185 Orang	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				694 Orang	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				102 Satuan Pendidikan	195.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				102 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		32.507.380.658,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				10000 Orang	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				3 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				306 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				12 Komunitas	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				102 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	700.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				20 Buku	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	396.501.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	1.200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Presentase TK yang terakreditasi B*	-			29,50 %	6.320.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	6.660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	110.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				700 Peserta Didik	315.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				146 Orang	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				400 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				867 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				10000 Orang	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				400 Orang	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				16 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				600 Orang	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				28 Komunitas	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	2.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	450.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	490.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				867 Satuan Pendidikan	1.350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	600.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Presentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi B*	-			16,95 %	2.479.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	12.173.572.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				48 Peserta Didik	44.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		197.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				27 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		6.011.472.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				30 Orang	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				75 Orang	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	0,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1100 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				2 unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				4 Paket	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Presentase Sekolah Dengan Kurikulum Muatan Lokal***	**-**			**100 %**	**385.000.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar*	-			100 %	300.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				600 Orang	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	85.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				600 Buku	65.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase guru SD bersertifikat pendidik Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik***	**-**			**38 % 25.5 % 45 %**	**400.000.000,00**						**-**	**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Rasio Guru per siswa SMP* *Rasio Guru per siswa SD*	-			32 % 28 rasio	400.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	***Persentase pengendalian ijin sekolah***	**-**			**100 %**	**95.000.000,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*jumlah rekomendasi izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan*	-			3 lembaga	30.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	65.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN DAERAH						**179.629.890.500,00**							**296.102.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**179.629.890.500,00**							**296.102.300.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**179.629.890.500,00**							**296.102.300.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**118.183.686.000,00**						**-**	**236.077.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Perancanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			100 %	100.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				5 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	115.329.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai	-	230.205.300.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2500 Orang/bulan	115.211.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		230.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	68.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		105.300.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian pada PD*	-			100 %	123.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	123.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian pada PD*	-			100 %	966.246.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai	-	1.784.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	14.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		18.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	212.686.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	303.787.489,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	83.560.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	346.212.511,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		625.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	531.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai	-	2.550.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				27 Unit	281.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	609.440.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai	-	678.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	301.440.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	525.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai	-	610.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	pegawai		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**60.379.326.392,00**						**-**	**57.430.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan sesuai standar*	-			100 %	22.565.982.992,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan	-	11.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	215.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	4.335.654.192,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	9.991.726.500,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				26 Unit	549.871.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				26 Paket	6.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				26000 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	fasilitas kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				26 Paket	23.731.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	fasilitas kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*	-			100 persen	37.643.343.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	warga blora	-	45.855.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9655 Orang	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	warga blora		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8564 Orang	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40391 Orang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				601731 Orang	130.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				127484 Orang	178.200.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290941 Orang	125.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14263 Orang	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2553 Orang	367.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		740.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7378 Orang	125.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10500 Orang	125.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	616.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	641.167.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	62.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	182.424.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	632.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	30.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		36.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				60 Paket	46.100.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	897.952.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				26 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	65.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1366 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				170 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				12 0	300.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	warga blora		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK*	-			100 persen	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	sistem informasi kesehatan	-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	sistem informasi kesehatan		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				3 Unit	35.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**326.878.108,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi*	-			95 persen	62.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memenuhi standart kompetensi* *Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota*	-			95 % 94 %	150.078.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan	-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	75.078.108,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan tenaga kesehatan tertentu yang memenuhi standart kompetensi*	-			95 %	114.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan	-	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	114.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	tenaga kesehatan		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**190.000.000,00**						**-**	**195.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Prosentase Pemberian Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat*	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				70 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Prosentase Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Industri Rumah Tangga	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				80 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Industri Rumah Tangga		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Prosentase serifikat laik sehat yang diterbitkan untuk pengelola TPM*	-			100 %	40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Prosentase sampel Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar sesuai standart*	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Industri Rumah Tangga	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Industri Rumah Tangga		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**550.000.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)*	-			295 desa	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan rumah tangga.*	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase posyandu meningkat strata*	-			98 %	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
		UPTD PUSKESMAS DOPLANG						**3.560.820.000,00**							**2.750.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.560.820.000,00**							**2.750.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.560.820.000,00**							**2.750.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.750.000.000,00**						**-**	**2.750.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.750.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	2.750.000.000,00	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.750.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Doplang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		2.750.000.000,00	UPTD PUSKESMAS DOPLANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**810.820.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	810.820.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	810.820.000,00	Kab. Blora, Jati, Doplang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
		UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG						**1.474.420.000,00**							**1.474.420.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.474.420.000,00**							**1.474.420.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.474.420.000,00**							**1.474.420.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**905.000.000,00**						**-**	**905.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	905.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	905.000.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	905.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Randulawang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		905.000.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**569.420.000,00**						**-**	**569.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	569.420.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	569.420.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	569.420.000,00	Kab. Blora, Jati, Randulawang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		569.420.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
		UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG						**3.933.470.000,00**							**3.933.470.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.933.470.000,00**							**3.933.470.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.933.470.000,00**							**3.933.470.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.400.000.000,00**						**-**	**3.400.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.400.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	3.400.000.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.400.000.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		3.400.000.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**533.470.000,00**						**-**	**533.470.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	533.470.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	533.470.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	533.470.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		533.470.000,00	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
		UPTD PUSKESMAS KUTUKAN						**2.436.120.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.436.120.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.436.120.000,00**							**2.400.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.900.000.000,00**						**-**	**1.850.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.900.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	1.850.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Kutukan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		1.850.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**536.120.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	536.120.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	550.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	536.120.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Kutukan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		550.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
		UPTD PUSKESMAS MENDEN						**4.160.747.000,00**							**4.160.747.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.160.747.000,00**							**4.160.747.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.160.747.000,00**							**4.160.747.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.577.000.000,00**						**-**	**3.577.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.577.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	3.577.000.000,00	UPTD PUSKESMAS MENDEN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	3.577.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		3.577.000.000,00	UPTD PUSKESMAS MENDEN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**583.747.000,00**						**-**	**583.747.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	583.747.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	583.747.000,00	UPTD PUSKESMAS MENDEN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	583.747.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		583.747.000,00	UPTD PUSKESMAS MENDEN
		UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN						**3.373.368.000,00**							**583.368.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.373.368.000,00**							**583.368.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.373.368.000,00**							**583.368.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.790.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.790.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.790.000.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**583.368.000,00**						**-**	**583.368.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	583.368.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	583.368.000,00	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			0				12 0	583.368.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		583.368.000,00	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
		UPTD PUSKESMAS KETUWAN						**1.920.780.000,00**							**1.920.780.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.920.780.000,00**							**1.920.780.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.920.780.000,00**							**1.920.780.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.380.000.000,00**						**-**	**1.380.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.380.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	1.380.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				0 0	1.380.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		1.380.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**540.780.000,00**						**-**	**540.780.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	540.780.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	540.780.000,00	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				50 Dokumen	540.780.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		540.780.000,00	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
		UPTD PUSKESMAS CEPU						**3.436.200.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.436.200.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.436.200.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.850.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.850.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CEPU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	2.850.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CEPU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**586.200.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	586.200.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CEPU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	586.200.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CEPU
		UPTD PUSKESMAS NGROTO						**1.534.540.000,00**							**1.655.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.534.540.000,00**							**1.655.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.534.540.000,00**							**1.655.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.020.000.000,00**						**-**	**1.020.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.020.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.020.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGROTO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.020.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Ngroto	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.020.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGROTO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**514.540.000,00**						**-**	**635.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	514.540.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	635.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGROTO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	514.540.000,00	Kab. Blora, Cepu, Ngroto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		635.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGROTO
		UPTD PUSKESMAS KAPUAN						**1.525.240.000,00**							**1.496.240.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.525.240.000,00**							**1.496.240.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.525.240.000,00**							**1.496.240.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**990.000.000,00**						**-**	**961.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	990.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	961.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	990.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		961.000.000,00	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**535.240.000,00**						**-**	**535.240.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	535.240.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	535.240.000,00	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				85 Dokumen	535.240.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		535.240.000,00	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
		UPTD PUSKESMAS SAMBONG						**2.158.122.000,00**							**1.853.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.158.122.000,00**							**1.853.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.158.122.000,00**							**1.853.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.620.000.000,00**						**-**	**1.853.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.620.000.000,00			-	-	-	-	1.853.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.620.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		1.853.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**538.122.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	538.122.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	538.122.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
		UPTD PUSKESMAS JIKEN						**3.553.800.000,00**							**3.098.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.553.800.000,00**							**3.098.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.553.800.000,00**							**3.098.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**2.675.000.000,00**						**-**	**2.698.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Prosentase BLUD di lingkungan Dinkes yang dapat mencapai 80 % target pendapatan* *rsu blora* *rs.Cepu*	-			90 % 100 % 100 %	2.675.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	2.698.000.000,00	UPTD PUSKESMAS JIKEN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.675.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.698.000.000,00	UPTD PUSKESMAS JIKEN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**878.800.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	878.800.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	400.000.000,00	UPTD PUSKESMAS JIKEN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	878.800.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		400.000.000,00	UPTD PUSKESMAS JIKEN
		UPTD PUSKESMAS BOGOREJO						**2.378.040.000,00**							**2.378.040.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.378.040.000,00**							**2.378.040.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.378.040.000,00**							**2.378.040.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.790.000.000,00**						**-**	**1.790.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.790.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.790.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.790.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.790.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**588.040.000,00**						**-**	**588.040.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	588.040.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	588.040.000,00	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	588.040.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		588.040.000,00	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
		UPTD PUSKESMAS JEPON						**2.803.180.000,00**							**2.722.180.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.803.180.000,00**							**2.722.180.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.803.180.000,00**							**2.722.180.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.181.000.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.181.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	2.100.000.000,00	UPTD PUSKESMAS JEPON
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.181.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.100.000.000,00	UPTD PUSKESMAS JEPON
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**622.180.000,00**						**-**	**622.180.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	622.180.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	622.180.000,00	UPTD PUSKESMAS JEPON
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	622.180.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		622.180.000,00	UPTD PUSKESMAS JEPON
		UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL						**1.674.120.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.674.120.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.674.120.000,00**							**1.950.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.145.000.000,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.145.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				0 0	1.145.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		1.100.000.000,00	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**529.120.000,00**						**-**	**850.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	529.120.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			0				12 0	529.120.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		850.000.000,00	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
		UPTD PUSKESMAS BLORA						**5.177.540.000,00**							**5.100.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.177.540.000,00**							**5.100.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.177.540.000,00**							**5.100.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.350.000.000,00**						**-**	**4.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.350.000.000,00			-	-	-	-	4.200.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BLORA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				0 0	4.350.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		4.200.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BLORA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**827.540.000,00**						**-**	**900.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	827.540.000,00			-	-	-	-	900.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BLORA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			0				0 0	827.540.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		900.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BLORA
		UPTD PUSKESMAS MEDANG						**2.096.340.000,00**							**1.893.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.096.340.000,00**							**1.893.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.096.340.000,00**							**1.893.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.550.000.000,00**						**-**	**1.893.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.550.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.893.000.000,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.550.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.893.000.000,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**546.340.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*	-			undefined Dokumen	546.340.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			0				0 0	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	546.340.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			0				0 0	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEDANG
		UPTD PUSKESMAS BANJAREJO						**5.084.868.000,00**							**5.084.868.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.084.868.000,00**							**5.084.868.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.084.868.000,00**							**5.084.868.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.453.000.000,00**						**-**	**4.453.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.453.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	4.453.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.453.000.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		4.453.000.000,00	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**631.868.000,00**						**-**	**631.868.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	631.868.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	631.868.000,00	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	631.868.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		631.868.000,00	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
		UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN						**2.793.540.000,00**							**3.278.540.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.793.540.000,00**							**3.278.540.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.793.540.000,00**							**3.278.540.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.230.000.000,00**						**-**	**2.715.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.230.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	2.715.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.230.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		2.715.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**563.540.000,00**						**-**	**563.540.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	563.540.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	563.540.000,00	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	563.540.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		563.540.000,00	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
		UPTD PUSKESMAS JAPAH						**3.640.140.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.640.140.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.640.140.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.000.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS JAPAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	3.000.000.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS JAPAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**640.140.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	640.140.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS JAPAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	640.140.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS JAPAH
		UPTD PUSKESMAS NGAWEN						**4.356.900.000,00**							**3.954.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.356.900.000,00**							**3.954.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.356.900.000,00**							**3.954.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.550.000.000,00**						**-**	**3.160.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.550.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	3.160.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.550.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		3.160.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**806.900.000,00**						**-**	**794.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	806.900.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	794.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	806.900.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		794.000.000,00	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
		UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL						**2.120.411.000,00**							**19.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.120.411.000,00**							**19.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.120.411.000,00**							**19.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.494.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.494.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.494.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**626.411.000,00**						**-**	**19.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	626.411.000,00			-	-	-	-	19.000.000,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				266 Orang	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2196 Orang	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				69 Orang	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				183 Orang	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		19.000.000,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1000 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				210 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				188 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				500 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1000 Dokumen	626.411.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				9 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				138 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Rowobungkul	-	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
		UPTD PUSKESMAS KUNDURAN						**4.396.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.396.400.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.396.400.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.700.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.700.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.700.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**696.400.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	696.400.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	696.400.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
		UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL						**1.689.653.000,00**							**1.574.653.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.689.653.000,00**							**1.574.653.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.689.653.000,00**							**1.574.653.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.150.000.000,00**						**-**	**1.035.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.150.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.035.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Sonokidul	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.035.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**539.653.000,00**						**-**	**539.653.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	539.653.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	539.653.000,00	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	539.653.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Sonokidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		539.653.000,00	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL
		UPTD PUSKESMAS TODANAN						**5.422.515.000,00**							**5.842.515.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.422.515.000,00**							**5.842.515.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.422.515.000,00**							**5.842.515.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.700.000.000,00**						**-**	**5.120.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.700.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	5.120.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TODANAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.700.000.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		5.120.000.000,00	UPTD PUSKESMAS TODANAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**722.515.000,00**						**-**	**722.515.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	722.515.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	722.515.000,00	UPTD PUSKESMAS TODANAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	722.515.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		722.515.000,00	UPTD PUSKESMAS TODANAN
		UPTD PUSKESMAS GONDORIYO						**1.396.400.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.396.400.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.396.400.000,00**							**1.400.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**830.000.000,00**						**-**	**800.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	830.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	800.000.000,00	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	830.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		800.000.000,00	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**566.400.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	566.400.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	600.000.000,00	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	566.400.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		600.000.000,00	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA						**152.811.742.000,00**							**130.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**152.811.742.000,00**							**130.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**152.811.742.000,00**							**130.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**148.857.000.000,00**						**-**	**130.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	31.857.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4932 Orang/bulan	31.857.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Tempelan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*BOR* *LOS* *NDR*	-			73 % 4 Hari 25 ‰	117.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Pasien RSUD dr. R. Soetijono Blora	-	130.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				1 0	117.000.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Pasien RSUD dr. R. Soetijono Blora		130.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**3.954.742.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.954.742.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	3.954.742.000,00	Kab. Blora, Blora, Tempelan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU						**102.566.442.000,00**							**157.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**102.566.442.000,00**							**157.500.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**102.566.442.000,00**							**157.500.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**98.189.000.000,00**						**-**	**109.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.189.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	-	-	29.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	28.189.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	-		29.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	70.000.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	80.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	70.000.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		80.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**4.377.442.000,00**						**-**	**45.500.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.377.442.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	45.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		18.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		15.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				30 Paket	4.377.442.000,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**3.000.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	0,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG						**17.670.142.000,00**							**10.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.670.142.000,00**							**10.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**17.670.142.000,00**							**10.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**15.120.000.000,00**						**-**	**10.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.520.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	10.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/bulan	6.520.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		10.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	8.600.000.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	8.600.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**2.550.142.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan sesuai standar*	-			100 %	550.142.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	550.142.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**82.448.091.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**82.448.091.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**82.448.091.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**12.550.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	10.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan administrasi Keuangan PD*	-			100 %	9.796.360.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/bulan	9.640.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	156.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum PD*	-			100 %	1.020.473.418,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.615.698,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	159.054.480,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	259.500.095,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.900.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	518.403.145,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	56.250.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	56.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	1.067.076.582,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.026.382,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	260.078.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.820.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	763.152.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	599.840.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	199.840.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				15 Unit	300.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi***	**-**			**47,5 %**	**12.612.924.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi Tersedianya air embung untuk irigasi pertanian*	-			47.50 % 55 %	6.629.550.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,1 KM	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				50 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				50 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,1 KM	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam														
			Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0.05 KM	1.529.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				0,2 KM	690.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,2 KM	650.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1.410.550.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung														
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik*	-			54.75 % 52.75 %	5.983.374.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,01 KM	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1.39 KM	2.323.374.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	2.500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	510.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 UNIT	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase SPAM dalam kondisi baik***	**-**			**75 %**	**1.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman*	-			98 %	1.000.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**352.175.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	352.175.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				1 Ton/hari	2.175.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai***	**-**			**100 %**	**547.825.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai*	-			100 %	547.825.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				500 Rumah Tangga	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Penyelenggara	97.825.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				1 Rumah Tangga	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Panjang jalan drainase yang dibangun***	**-**			**5000 m**	**4.100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Drainase dalam kondisi baik*	-			41.5 %	4.100.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2 Sistem Drainase Perkotaan	1.950.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	1.950.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Prosentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar dan terevitalisasi***	**-**			**85 %**	**2.830.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase pelayanan bangunan gedung yang memenuhi standar peraturan*	-			78 %	2.830.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara														
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				100 Bangunan Gedung Negara	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	90.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				60 Bantuan Teknis	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2.070.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				70 Orang	225.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				100 Dokumen	315.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase jalan mantap***	**-**			**75 %**	**46.785.167.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan dalam kondisi baik persentase jalan mantap*	-			47.5 % 75 %	46.785.167.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				916.1 KM	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				55 KM	5.500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.85 KM	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				14 Meter	1.200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	36.285.167.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				12 Meter	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Presentase kenaikan SDM penyedia jasa kontruksi yang kompeten***	**-**			**20 %**	**670.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga konstruksi yang lulus pelatihan*	-			100 %	340.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan*	-			1 sistem	330.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				3 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	75.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang***	**-**			**100 %**	**1.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*prosentase penetapan RTRW dan RRTR kab/Kota*	-			100 %	500.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase pelaksanan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaaatan tata ruang daerah*	-			100 %	150.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang daerah*	-			100 %	350.000.000,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN						**27.569.320.000,00**							**40.505.971.554,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.502.520.000,00**							**26.877.500.554,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**15.502.520.000,00**							**26.877.500.554,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.616.482.000,00**						**-**	**11.600.956.554,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.760.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	91.020.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	5.810.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				1 0	16.950.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		85.020.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.719.886.846,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	7.034.940.054,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	7.658.806.846,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.974.700.054,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	61.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		60.240.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	128.972.500,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	373.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	105.922.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			0				1 0	23.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		23.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	655.064.919,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.204.449.500,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		29.940.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		431.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	301.774.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		332.589.500,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			0				1 0	70.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	28.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.920.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	800.047.735,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.549.327.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		367.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	44.470.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	365.577.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.123.827.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	289.750.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	686.220.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	239.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		306.440.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		354.780.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**355.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	16.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				2 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				4 Unit Rumah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				16 Unit Rumah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	130.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	9.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**1.226.038.000,00**						**-**	**4.387.544.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	1.226.038.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	4.387.544.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				40 Unit Rumah	1.223.721.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.098.544.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		114.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Unit	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0,5 Ha	816.625,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**			**-**	**4.305.000.000,00**						**-**	**10.239.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	4.305.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	10.239.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		37.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				16 Lokasi	4.265.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		10.202.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.066.800.000,00**							**13.628.471.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**24.000.000,00**							**24.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000,00**						**-**	**2.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**			**-**	**22.000.000,00**						**-**	**22.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**12.042.800.000,00**							**13.604.471.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**12.034.800.000,00**						**-**	**13.394.471.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.690.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	10.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit	265.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				600 Unit	9.275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		9.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				300 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2400 Unit	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	150.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	985.034.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		85.034.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	550.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	679.437.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		679.437.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	250.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	642.900.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	142.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		165.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		62.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	210.800.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	261.630.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				20 Laporan	165.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		21.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		48.170.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				40 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		22.920.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		169.040.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	18.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	25.470.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				20 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		25.470.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	43.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	55.299.900,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		55.299.900,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	93.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	180.060.100,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	93.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		180.060.100,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	14.640.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		14.640.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**			**-**	**4.000.000,00**						**-**	**5.000.000,00**	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**-**	**-**			**-**	**4.000.000,00**						**-**	**205.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-			-	0,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**13.796.780.000,00**							**15.023.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.796.780.000,00**							**15.023.400.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.796.780.000,00**							**15.023.400.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.332.000.000,00**						**-**	**13.650.400.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.806.400.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	12.026.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				190 Orang/bulan	10.780.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		12.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	26.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	290.500.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				190 Paket	245.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				190 Orang	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	503.300.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	503.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	27.594.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.569.890,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.575.050,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	120.913.260,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	259.647.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.350.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	246.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	110.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	81.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	504.450.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	515.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	310.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	49.450.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan*** ***Persentase penegakan PERDA***	**-**			**100 %** **87 %**	**1.150.000.000,00**						**-**	**478.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada* *Persentase Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda/ Perkada*	-			100 % 100 %	250.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat	-	403.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				40 Orang	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				200 laporan	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	900.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	855.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**314.780.000,00**						**-**	**895.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	284.780.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				63 Laporan	209.780.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	75.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	5.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	5.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0004	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	15.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				25 Orang	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	5.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**5.954.430.000,00**							**3.750.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.954.430.000,00**							**3.750.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.954.430.000,00**							**3.750.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**-**			**100 %**	**5.577.194.213,00**						**-**	**3.525.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	24.999.100,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	9.999.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	14.999.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	4.446.560.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	3.515.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.424.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22.560.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	381.321.458,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			0				1 0	24.994.605,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				1 0	61.419.150,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	84.997.703,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.940.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	179.970.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	119.733.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	105.021.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	14.712.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	419.368.200,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	89.998.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	24.970.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	299.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	185.212.455,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	124.432.455,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.780.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana***	**-**			**95 %**	**377.235.787,00**						**-**	**225.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana*	-			95 %	30.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	Masyarakat Daerah Rawan Bencana	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	Masyarakat Daerah Rawan Bencana		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	-			5 %	129.800.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				400 Orang	49.995.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	9.720.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	40.010.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	13.075.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	-			95 %	168.245.787,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	11.397.787,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				4000 Orang	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	106.938.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	4.910.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			100 %	49.190.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	9.200.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	29.940.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	10.050.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**15.438.432.833,00**							**21.220.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.384.996.733,00**							**20.180.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**14.384.996.733,00**							**20.180.500.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.884.000.000,00**						**-**	**10.895.500.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	928.800,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	14.071.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.059.600.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	5.228.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	5.038.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		5.200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	723.138.325,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	927.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	135.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.225.810,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	108.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	446.912.515,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		625.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	102.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	3.175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	832.011.675,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.065.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.980.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	142.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	31.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	655.481.675,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		750.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	137.250.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	425.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	135.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**301.000.000,00**						**-**	**440.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	301.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	440.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				45 Orang	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**395.000.000,00**						**-**	**415.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	315.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	195.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	80.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	80.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**6.549.996.733,00**						**-**	**8.150.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.549.996.733,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	8.150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				400000 Orang	400.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				650 Orang	6.149.996.733,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**180.000.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	180.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**			**-**	**75.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				3 Makam	75.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.053.436.100,00**							**1.040.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.053.436.100,00**							**1.040.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**513.436.100,00**						**-**	**510.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	140.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				45 Lembaga	140.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	373.436.100,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				10 Lembaga	373.436.100,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**70.000.000,00**						**-**	**95.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				12 laporan	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				10 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**300.000.000,00**						**-**	**275.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**			**-**	**70.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				2 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN						**39.705.315.600,00**							**5.322.823.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**300.000.000,00**							**1.135.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**300.000.000,00**							**1.135.000.000,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**10.735.000,00**						**-**	**340.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.735.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	340.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	10.735.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**213.248.000,00**						**-**	**470.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	48.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	48.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	110.528.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	69.050.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				10 Ton	41.478.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				1 Ton	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	54.220.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	48.220.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**25.675.000,00**						**-**	**190.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	25.675.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	9.060.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				13 Dokumen	16.615.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**50.342.000,00**						**-**	**135.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.342.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	15.390.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				3 Dokumen	27.488.400,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	7.463.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**39.405.315.600,00**							**4.187.823.700,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.000.000,00**							**352.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**			**-**	**91.500.000,00**						**-**	**75.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	79.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	62.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		37.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.500.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	12.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				1 Orang	12.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		12.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**153.500.000,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			0				2 0	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	103.500.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	180.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	102.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		80.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**55.000.000,00**						**-**	**47.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	40.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	32.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				41 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		32.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	15.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**39.105.315.600,00**							**3.835.823.700,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**24.312.625.000,00**						**-**	**1.240.823.700,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.592.560.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				306 Orang/bulan	20.530.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	61.560.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.250.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	41.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	31.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	8.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	2.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.089.893.300,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	1.233.823.700,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		87.482.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.564.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		231.980.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		31.470.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	545.703.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		438.956.400,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		63.290.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		7.200.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	290.625.800,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		373.445.300,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	231.967.980,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	78.967.980,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.424.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	541.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	850.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	902.453.720,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	7.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	279.448.720,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	10.380.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.825.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**11.176.690.600,00**						**-**	**1.005.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	6.137.690.600,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1.646.690.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	4.491.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.453.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	155.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1.184.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	269.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.586.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	650.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				1 Ton	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	220.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		400.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	3.366.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				12 Ton Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.646.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	211.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	110.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota														
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.435.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				32 Unit	910.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				11 Unit	519.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan														
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**187.000.000,00**						**-**	**595.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	165.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		165.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	210.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		210.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	42.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	220.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				2 Unit Usaha	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**110.000.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	110.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	115.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				110 Ha	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		85.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				210 Ha	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis														
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**23.000.000,00**						**-**	**240.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	120.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		120.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-			-	23.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	120.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		120.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				50 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.650.000.000,00**						**-**	**440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.650.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	440.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			0				16 0	160.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				200 0	1.350.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			0				16 0	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				5 0	40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**18.607.698.000,00**							**26.830.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.607.698.000,00**							**26.830.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**18.607.698.000,00**							**26.830.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**13.314.249.200,00**						**-**	**17.931.000.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	-			100 %	15.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	26.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan*	-			100 %	11.070.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	15.075.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	11.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum*	-			100 %	435.649.200,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	932.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	70.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	35.649.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.503.600.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	1.497.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	761.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup***	**-**			**100 %**	**275.000.000,00**						**-**	**325.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan*	-			100 %	125.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P*	-			100 %	150.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Indeks pencemaran air Indeks pencemaran udara Persentase tutupan vegetasi***	**-**			**1,17 indeks 13,16 indeks 63,55 %**	**977.500.000,00**						**-**	**1.204.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*	-			100 %	837.500.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	1.024.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	11.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				1 Lokasi	119.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan														
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	14.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				2 Unit	165.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	91.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	270.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota*	-			100 %	140.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1,5 Ha	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase RTH yang tertangani*** ***Persentase RTH yang tertangani***	**-**			**1,33 %** **100 %**	**967.623.000,00**						**-**	**1.700.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati*	-			1,33 %	967.623.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	867.623.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**-**			**-**	**193.000.000,00**						**-**	**450.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	65.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)														
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3														
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				30 Usaha	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	128.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota														
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				40 Usaha	98.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	**-**			**-**	**120.000.000,00**						**-**	**225.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				50 Badan Usaha	40.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase fasilitasi peningkatan pengetahuan MHA terkait dengan PPLH***	**-**			**100 %**	**30.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Persentase peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH*	-			100 %	30.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat***	**-**			**3 pelatihan**	**287.900.000,00**						**-**	**310.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat*	-			100 %	287.900.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	217.900.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup***	**-**			**3 penghargaan**	**260.000.000,00**						**-**	**270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat*	-			100 %	260.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	260.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/atau penataan terkait perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan***	**-**			**100 %**	**20.000.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH*	-			100 %	20.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				5 Pengaduan	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R Persentase jumlah sampah yang tertangani Persentase jumlah sampah yang tertangani***	**-**			**31 % 78 % 69 %**	**2.162.425.800,00**						**-**	**4.350.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sampah yang terkelola*	-			100 %	2.162.425.800,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	4.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				8 Kelompok	12.900,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	12.900,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				147145 Ton	2.162.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**7.517.758.090,00**							**12.375.320.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.517.758.090,00**							**12.375.320.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**7.517.758.090,00**							**12.375.320.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.257.377.090,00**						**-**	**11.003.920.000,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.383.080.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.529.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	5.354.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	29.080.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		29.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	989.920.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	2.095.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.400.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		444.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	500.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	6.020.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		9.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	175.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		520.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	2.015.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				1 0	75.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	695.377.090,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.112.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	498.377.090,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		580.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	70.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		158.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			0				12 0	125.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		370.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	246.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		69.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				61 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		26.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				1 0	58.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**28.581.000,00**						**-**	**505.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	305.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				24 Laporan	0,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		185.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				24 Laporan	0,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	28.581.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	28.581.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**			**-**	**21.000.000,00**						**-**	**720.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	0,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	21.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				100 Laporan	21.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**			**-**	**200.800.000,00**						**-**	**146.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	200.800.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	146.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	160.800.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		146.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**16.643.300.000,00**							**14.450.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.643.300.000,00**							**14.450.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**16.643.300.000,00**							**14.450.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**8.680.400.000,00**						**-**	**5.930.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	12.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	7.256.132.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora	-	4.045.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	7.216.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		4.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	40.132.500,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah*	-			100 %	803.267.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora	-	745.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	250.375.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	267.892.500,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora	-	310.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	446.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora	-	580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	270.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	157.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora	-	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	7.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase kegiatan pembangunan desa yang terselenggara dengan baik***	**-**			**100 %**	**2.734.400.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa*	-			100 Desa	2.734.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	Desa di Kabupaten Blora	-	2.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				75 Desa	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				175 Unit	2.684.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Prosentase kerjasama desa yang terfasilitasi***	**-**			**100 %**	**33.500.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat dokumen kerjasama antar desa*	-			3 Desa	33.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase desa meningkat stratanya Prosentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik Prosentase BUMDes berkembang dan Maju***	**-**			**22,9 % 100 % 13,1 %**	**4.433.000.000,00**						**-**	**5.095.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*	-			271 Desa	4.433.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora	-	5.095.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				271 Dokumen	2.800.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		3.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				8 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				271 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				271 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				271 Orang	1.408.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				16 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				2 Desa	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	Desa di Kabupaten Blora		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG*** ***Prosentase Posyandu Aktif***	**-**			**88,24 %** **100 %**	**762.000.000,00**						**-**	**1.275.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat*	-			90 Desa	762.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora	-	1.275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	472.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	Desa di Kabupaten Blora		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**8.760.306.790,00**							**22.635.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.760.306.790,00**							**22.635.000.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**8.760.306.790,00**							**22.635.000.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.985.310.000,00**						**-**	**7.687.000.000,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	21.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.498.802.964,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	6.536.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	6.469.042.964,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		6.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29.760.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		36.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	748.871.246,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	548.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.495.646,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	86.580.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	249.896.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	34.900.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.999.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	492.607.640,00			-	-	-	-	297.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.040,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	29.670.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	305.437.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.028.150,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	100.018.150,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	25.010.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Tempelan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**134.250.000,00**						**-**	**990.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	47.250.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				15 Kegiatan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan	27.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	87.000.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				16 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota														
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan														
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				3 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				240 Unit	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**			**-**	**321.390.000,00**						**-**	**8.625.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	46.690.000,00			-	-	-	-	1.035.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Unit	5.690.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				16 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	169.750.000,00			-	-	-	-	4.875.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				960 Orang	158.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				2 Organisasi	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	77.950.000,00			-	-	-	-	2.465.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				5000 Orang	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				50 Orang	33.144.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	41.806.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	27.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				235 Kampung	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				16 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**			**-**	**319.356.790,00**						**-**	**5.333.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	317.356.790,00			-	-	-	-	790.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			0				0 0	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			0				0 0	315.356.790,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				13 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	4.543.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.043.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**8.068.440.000,00**							**8.702.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.068.440.000,00**							**8.702.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**7.938.440.000,00**							**8.402.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.153.500.000,00**						**-**	**7.607.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.770.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.385.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2.385.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.048.560.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.640.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	5.014.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	34.560.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	962.650.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	840.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	243.290.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	279.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	585.520.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.230.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	280.290.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	322.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	122.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**356.000.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	356.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			0				0 0	5.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				10 Persentase	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				60 Persentase	325.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				0 Media	5.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**428.940.000,00**						**-**	**615.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			0				0 0	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	418.940.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	595.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				41 Perangkat Daerah	323.940.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				1 Aplikasi	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				41 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**80.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**80.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				50 %	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				50 %	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				50 %	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				41 Perangkat Daerah	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**18.490.700.000,00**							**23.442.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.210.700.000,00**							**19.866.500.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**15.210.700.000,00**							**19.866.500.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan pengelolaan pendapatan retribusi daerah*** ***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD***	**-**			**0,3 %** **100 %**	**14.460.700.000,00**						**-**	**19.275.500.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	10.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	22.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	11.687.360.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	13.560.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	11.636.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		13.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	51.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang teradministrasi dengan baik*	-			100 %	5.985.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				6 Laporan	5.985.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Pendapatan Retribusi Pasar dan Retribusi Tera-tera Ulang*	-			9000000000 Rupiah	100.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	1.680.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		1.680.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD*	-			100 %	896.803.135,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	1.095.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	97.758.180,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	48.735.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	204.221.976,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	149.965.579,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		180.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	29.996.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	356.125.800,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		410.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD*	-			100 %	0,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	1.520.589.050,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	2.091.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		6.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	487.394.400,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	81.520.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	945.674.650,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		1.425.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	239.962.815,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	270.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	139.962.815,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Jumlah Koperasi yang melaksanakan Audit Eksternal*** ***Persentase Koperasi yang patuh***	**-**			**12 Unit** **51,56 %**	**50.000.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan*	-			57,2 %	50.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				105 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya***	**-**			**83,98 %**	**30.000.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP koperasi yang kinerjanya sehat (sehat,dan cukup sehat)*	-			105 Unit Usaha	30.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				105 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase Pengurus /Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan***	**-**			**30,5 %**	**70.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM (Pengurus,pengawas dan pengelola Koperasi) Yang Terbina*	-			30,5 %	70.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	70.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase peningkatan volume usaha koperasi***	**-**			**11 %**	**50.000.000,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha koperasi yang dibentuk*	-			1 Unit Koperasi	50.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan Jumlah wirausaha baru***	**-**			**0,59 % 60 UKM**	**105.000.000,00**						**-**	**96.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan dan Penguatan Kelembagaan.*	-			13600 UMKM	105.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	96.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				80 Orang	55.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		21.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usahanya***	**-**			**2,36 %**	**445.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usahanya*	-			60 UMKM	445.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				60 Unit Usaha	395.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.280.000.000,00**							**3.576.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.280.000.000,00**							**3.576.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi***	**-**			**100 %**	**10.000.000,00**						**-**	**60.500.000,00**	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang*	-			6 Izin	5.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengawasan bahan berbahaya yang terkelola dengan baik*	-			4 Pengawasan	5.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan***	**-**			**89 %**	**2.700.000.000,00**						**-**	**2.740.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Bangunan dan sarana distribusi perdagangan yang dikelola*	-			13 Unit	2.600.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	2.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	2.600.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		2.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pengelola Pasar (Kepala UPTD, Ka.TU, Administrasi Umum, Pemungut Retribusi, Pengelola Keamanan, Petugas Kebersihan dan Paguyuban Pasar) yang dibina dan diberdayakan*	-			100 %	100.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				13 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok)*** ***Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi***	**-**			**3 %** **100 %**	**180.000.000,00**						**-**	**210.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting*	-			100 %	5.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pemantauan atas Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	-			16 Kecamatan	145.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	130.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kecamatan yang terdapat Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang diawasi*	-			16 Kecamatan	30.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase eksportir yang terbina***	**-**			**100 %**	**150.000.000,00**						**-**	**210.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten*	-			1 Pameran	150.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang***	**-**			**948 Unit**	**90.000.000,00**						**-**	**145.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP yang diawasi*	-			5.400 UTTP	90.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	145.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4300 Unit	76.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	13.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah event promosi produk dalam negeri***	**-**			**1 event**	**150.000.000,00**						**-**	**210.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah pameran produk dalam negeri*	-			1 Pameran	150.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				100 UMKM	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**5.548.000.000,00**							**7.691.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.548.000.000,00**							**7.691.200.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.548.000.000,00**							**7.691.200.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.958.000.000,00**						**-**	**6.611.200.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.132.280.000,00			-	-	-	-	3.520.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.115.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	17.280.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	652.050.000,00			-	-	-	-	1.180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	195.050.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	929.070.000,00			-	-	-	-	1.501.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	528.070.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240.600.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	90.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.600.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**88.500.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.500.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	88.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**88.500.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	88.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**129.800.000,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	129.800.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	41.300.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	88.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**265.500.000,00**						**-**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	265.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				25 Kegiatan Usaha.	59.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				0 Pelaku Usaha	118.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	88.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola***	**-**			**1 dokumen**	**17.700.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang dikelola*	-			1 dokumen	17.700.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	17.700.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**22.896.080.000,00**							**21.885.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.318.320.000,00**							**20.295.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**19.110.150.000,00**							**18.855.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**7.762.986.630,00**						**-**	**9.865.000.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya dokumen perencanaan dan evaluasi kerja*	-			3 Dokumen	25.300.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan*	-			100 %	5.973.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	8.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	5.973.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kedisiplinan Aparatur dan Meningkatnya SDM Aparatur*	-			100 %	32.470.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	19.950.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	12.520.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*	-			100 %	501.945.930,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	520.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.837.920,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	19.515.530,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	123.922.480,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	314.670.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Barang Milik Daerah untuk menunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terpenuhinya Barang Milik Daerah untuk menunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 % 100 %	178.018.100,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	166.018.100,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	857.962.600,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	955.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	399.342.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	107.420.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	349.200.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			100 %	194.290.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	144.290.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha muda, Pemuda Kader*** ***Prosentase organisasi pemuda yang aktif***	**-**			**6 Orang** **63 %**	**3.200.450.000,00**						**-**	**3.345.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan*	-			2 Kegiatan	3.156.200.000,00			-	-	-	-	3.290.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	44.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				100 Orang	2.950.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		2.950.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	17.700.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				1 Orang	144.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		155.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan kepemimpinan kepelopotran dan kesukarelawanan pemuda*	-			1 kegiatan	44.250.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	44.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Prosentase atlet berprestasi*** ***Prosentase sarpras olah raga yang layak***	**-**			**16,4 %** **7 %**	**7.351.713.370,00**						**-**	**4.945.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan terpelihara*	-			100 %	108.013.370,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				6 Unit	108.013.370,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah*	-			3 kegiatan	459.350.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	206.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		375.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota														
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				1 Kegiatan	50.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	252.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		470.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah medali yang diperoleh*	-			45 medali	266.350.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	840.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	265.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		825.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				1 Orang	850.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga*	-			1 pembinaan	6.318.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.318.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi*	-			1 kegiatan	200.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Prosentase pembina pramuka yang sudah bersertifikat KMD Prosentase bumi perkemahan yang layak***	**-**			**86 % 66,6 %**	**795.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*prosentase pembina pramuka yang bersertifikat*	-			86 %	795.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	795.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.208.170.000,00**							**1.440.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Prosentase OPK yang dilestraikan Jumlah penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya Juamlah desa/kelurahan budaya***	**-**			**49,5 % 52 event 5 desa/kel**	**708.170.000,00**						**-**	**1.280.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rangkaian hari jadi yang terselenggara*	-			2 Dokumen	394.066.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	755.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	352.066.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				5 Orang	42.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rangkaian Kegiatan Hari Jadi yang Terselenggara*	-			2 Kegiatan	314.104.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	525.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	314.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian***	**-**			**70 orang**	**1.402.000.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesenian yang masyarakat pelaknya dalam daerah kabupaten/kota*	-			70 orang	1.402.000.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	1.362.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**			**-**	**18.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Benda struktur kawasan bangunan situs cagar budaya yang dilindungi dikembangkan dan di manfaatkan***	**-**			**511 buah**	**80.000.000,00**						**-**	**95.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	-			18 Buah	55.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda														
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan				1 Objek	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola*	-			3 Buah	25.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				25 Objek	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.577.760.000,00**							**1.590.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.577.760.000,00**							**1.590.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Prosentase revitalisasi destinasi wisata*** ***Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata*** ***Jumlah desa wisata***	**-**			**33,3 %** **819 orang** **15 desa**	**566.602.260,00**						**-**	**575.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata*	-			2 lokasi	95.686.900,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				30 Orang	95.686.900,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten/kota*	-			2 tujuan	455.764.360,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	405.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	66.882.700,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			0				1 0	302.481.660,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		280.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	86.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*PemenuhanTanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota*	-			80 persen	15.151.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				0 Usaha Pariwisata	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				5 Pelaku Usaha	15.151.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah event pariwisata***	**-**			**2 kali**	**414.511.300,00**						**-**	**460.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya event pemasaran pariwisata, daya tarik wisata, destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata*	-			3 event	414.511.300,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	362.802.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	51.709.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang terfasilitasi***	**-**			**1 buah**	**150.503.790,00**						**-**	**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif*	-			1 Dokumen	136.428.190,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	136.428.190,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	14.075.600,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				3 Produk	14.075.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0023	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)														
			Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP)				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Prosentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)*** ***Prosentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih)***	**-**			**30 %** **22,5 %**	**446.142.650,00**						**-**	**390.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	-			1 dokumen	446.142.650,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	390.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	125.342.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30 Orang	253.023.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				15 Orang	67.776.650,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**7.745.385.000,00**							**11.439.340.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.745.385.000,00**							**11.439.340.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7.671.192.500,00**							**10.734.340.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.597.000.000,00**						**-**	**9.954.840.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.168.760.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	4.528.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	6.142.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	26.760.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	361.987.200,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	817.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.009.109,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	94.391.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	118.301.603,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	18.903.488,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15.382.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		17.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	2.800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	709.090.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	787.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	284.340.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		314.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	408.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.162.800,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.009.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	112.152.800,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	36.010.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**			**-**	**74.192.500,00**						**-**	**749.500.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.302.500,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	504.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	11.339.400,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				0 Perpustakaan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	8.110.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	6.280.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				48 Eksemplar	3.318.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				48 Eksemplar	10.755.100,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	10.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		47.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	23.890.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	245.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				25 Perpustakaan	7.700.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	16.190.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				0 Eksemplar	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**74.192.500,00**							**705.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**73.418.090,00**						**-**	**635.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	43.577.904,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				900 Berkas	6.655.804,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3500 Berkas	30.887.100,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Laporan	6.035.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.461.186,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3500 Arsip	20.461.186,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	9.379.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				200 Pengguna	9.379.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**774.410,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	774.410,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				500 Berkas	774.410,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						**10.338.270.000,00**							**10.519.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.621.930.000,00**							**2.293.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.621.930.000,00**							**2.293.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**1.049.700.000,00**						**-**	**592.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	464.700.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	525.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang	393.700.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	65.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		177.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				10 Unit	6.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		73.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	585.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	67.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	585.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		67.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**175.230.000,00**						**-**	**299.000.000,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	175.230.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	299.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				200 Orang	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		134.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				200 Orang	160.230.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**1.397.000.000,00**						**-**	**1.402.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.380.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	1.382.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		62.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				6975 Orang	1.320.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		1.320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.716.340.000,00**							**8.226.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**7.671.500.000,00**							**8.146.000.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.389.000.000,00**						**-**	**7.655.000.000,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	23.650.394,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	98.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		77.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8.650.394,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.149.680.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	5.145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	5.109.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		5.103.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.680.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	31.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				61 Paket	30.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		31.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	443.180.106,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	838.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.965.115,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.831.260,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		154.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.992.731,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	32.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	14.996.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	151.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		292.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	26.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	520.589.500,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	1.004.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	202.209.500,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		465.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	47.380.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		62.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	269.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		473.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.400.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	514.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	100.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		187.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		112.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**1.253.000.000,00**						**-**	**426.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	1.253.000.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	426.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	35.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1.207.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		412.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**	**-**			**-**	**29.500.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	29.500.000,00			-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**44.840.000,00**							**80.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**44.840.000,00**						**-**	**80.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	44.840.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		34.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				1 Kepala Keluarga	21.840.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		36.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				25 Kepala Keluarga	8.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		SEKRETARIAT DAERAH						**60.137.110.000,00**							**92.554.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**60.137.110.000,00**							**92.554.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**60.137.110.000,00**							**92.554.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**26.430.300.000,00**						**-**	**56.317.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.620.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	21.272.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				195 Orang/bulan	16.487.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		21.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		108.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	8.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	51.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.485.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	7.585.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	89.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	750.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	90.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.027.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	6.280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	6.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				350 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				230 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.015.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	185.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	817.800.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	6.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	317.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	325.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	703.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	98.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		243.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	57.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		129.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	122.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Dokumen	47.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		125.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.075.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	825.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**32.413.262.000,00**						**-**	**34.616.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	363.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	811.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	51.855.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		188.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	261.145.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		538.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	31.587.262.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	32.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	31.227.262.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		32.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	313.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				15 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	130.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	73.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**1.293.548.000,00**						**-**	**1.621.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	315.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	316.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen Dokumen	99.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan Laporan	129.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen Dokumen	85.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen Dokumen	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	314.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	355.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	313.548.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	112.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 dokumen Dokumen	97.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				180 Orang	104.548.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	351.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen Dokumen	350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen Dokumen	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**68.479.500.000,00**							**9.180.931.600.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**68.479.500.000,00**							**9.180.931.600.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**68.479.500.000,00**							**9.180.931.600.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD***	**-**			**100 %**	**51.978.633.000,00**						**-**	**48.284.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	20.801.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora	-	23.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.380.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	10.421.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	5.628.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora	-	6.042.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	5.586.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	42.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		42.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD*	-			100 %	80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	80.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	1.702.615.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora	-	1.570.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.250.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	186.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	55.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	510.580.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	293.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		295.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	536.685.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	860.945.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora	-	2.040.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	310.732.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30.213.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	90.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	130.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	1.240.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora	-	1.325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.920.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	377.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	851.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Sekretariat DPRD Blora		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah yang dipelihara*	-			100 %	1.675.542.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	1.818.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	889.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		890.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	400.722.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		610.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	3.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	212.520.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	160.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*	-			100 %	40.084.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora	-	34.656.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	39.500.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		34.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	524.550.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		136.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD*	-			100 %	684.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora	-	710.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				24 Laporan	684.860.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		710.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Prosentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD , Prosentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah***	**-**			**100 %**	**16.500.867.000,00**						**-**	**9.132.647.000.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Prosentase pemenuhan pelayanan dalam pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD*	-			100 %	4.060.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat	-	6.730.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1.474.524.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	2.232.146.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	42.350.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	286.050.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				100 Orang	24.970.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yan Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	4.153.404.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pemda Kabupaten Blora	-	9.390.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	136.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Pemda Kabupaten Blora		140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	3.417.350.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Pemda Kabupaten Blora		8.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	101.320.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang bersih integritas dan transformatif	Pemda Kabupaten Blora		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	498.434.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pemda Kabupaten Blora		520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan*	-			100 %	552.218.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah	-	885.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	9.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	9.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	9.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	9.360.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	41.160.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah		42.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	473.618.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD dan Perangkat Daerah		795.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Prosentase peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan*	-			100 %	3.039.475.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora	-	3.330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1.903.825.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	175.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	38.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	821.900.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Prosentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan*	-			100 %	1.188.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora	-	1.758.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	109.290.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	46.620.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora		48.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.032.810.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Prosentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*	-			100 %	682.133.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD, OPD dan Masyarakat	-	9.096.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	682.133.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD, OPD dan Masyarakat		9.096.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Prosentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD*	-			100 %	2.824.877.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora	-	14.454.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	1.566.863.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	865.374.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	392.640.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Anggota DPRD Blora		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**10.770.600.000,00**							**15.031.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.770.600.000,00**							**15.031.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**10.068.800.000,00**							**13.571.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**8.455.000.000,00**						**-**	**10.926.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	15.880.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.980.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5.900.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	6.597.640.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	8.535.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	6.565.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.640.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD*	-			100 %	90.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	90.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	561.900.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	680.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	104.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	120.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	22.100.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	275.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	40.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 % 100 %	898.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	911.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	214.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	673.100.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		680.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 % 100 %	251.080.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	324.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	3.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	47.780.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Prosentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD***	**-**			**100 %**	**642.800.000,00**						**-**	**1.265.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai peraturan perundangan*	-			2 0	405.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	795.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	28.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0 Berita Acara	0,00	Kab. Blora, Blora, Karangjati Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	172.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				144 Usulan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Data untuk Kebutuhan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			200 data	117.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				0 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				55 Orang	87.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah*	-			3 dokumen	120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai Prosentase indikator program perangkat daerah dalam RKPD yang tercapai***	**-**			**100 % 92,5 %**	**971.000.000,00**						**-**	**1.380.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Prosentase terpenuhinya Dokumen/Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya*	-			100 %	485.500.000,00			-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 laporan Laporan	150.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	185.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Prosentase terpenuhinya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang disepakati dan ditindaklanjuti*	-			100 %	265.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-	-	320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	138.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif	-		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	126.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Prosentase terpenuhinya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disepakati dan ditindaklanjuti* *Prosentase terpenuhinya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disepakati dan ditindaklanjuti*	-			100 % 100 %	220.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	187.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	33.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**701.800.000,00**							**1.460.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah***	**-**			**100 %**	**0,00**						**-**	**770.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			1 Dokumen	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Kependudukan*	-			1 Dokumen	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			3 Dokumen	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*prosentase PD yang melaksanakan inovasi daerah sesuai urusan*	-			100 %	0,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**701.800.000,00**						**-**	**690.000.000,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	345.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				3 Naskah	260.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	85.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	356.800.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	26.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah														
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi														
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**502.120.993.143,00**							**510.204.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**502.120.993.143,00**							**510.204.500.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**502.120.993.143,00**							**510.204.500.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah di SKPD***	**-**			**100 %**	**23.582.000.000,00**						**-**	**20.424.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	43.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	49.500.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		3.500.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	27.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	20.720.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	15.855.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	20.672.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		15.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	48.720.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	86.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	86.280.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah*	-			100 %	890.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	1.147.500.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		22.500.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	300.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		375.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	35.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		420.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	200.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	1.150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	1.230.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	1.610.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	425.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	750.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		1.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora	-	525.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	125.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Pegawai BPPKAD Kabupaten Blora		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya) Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah***	**-**			**100 % 97 %**	**476.772.433.143,00**						**-**	**484.335.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah*	-			100 %	410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora	-	910.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	146.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	132.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	93.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan tepat waktu*	-			100 %	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora	-	520.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				17 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	218.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				44 Orang	82.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan*	-			100 %	305.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora	-	755.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				43 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				43 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora		155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	-			100 %	475.657.433.143,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora	-	482.150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				4 Laporan	11.241.840.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		10.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	415.924.756.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		450.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	33.440.837.143,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		10.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	15.000.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		12.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah***	**-**			**100 %**	**400.000.000,00**						**-**	**1.275.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah*	-			100 %	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora	-	1.275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				44 Laporan	150.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				20 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		225.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase realisasi pendapatan pajak daerah***	**-**			**100 %**	**1.366.560.000,00**						**-**	**4.170.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap potensi Pajak Daerah*	-			85 %	1.366.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora	-	4.170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		215.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		455.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				30000 Obyek Pajak	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	731.560.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		1.850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				4 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora dan Masyarakat Kabupaten Blora		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**8.809.000.000,00**							**11.781.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.809.000.000,00**							**11.781.700.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**8.009.000.000,00**							**9.931.700.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**-**			**100 %**	**6.626.000.000,00**						**-**	**7.346.700.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	4.728.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	5.549.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	4.686.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	42.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		49.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD*	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	551.048.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	514.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.020.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	86.816.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	77.760.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	181.319.210,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	17.740.600,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	13.996.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	166.396.090,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	421.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	21.060.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	300.720.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	598.267.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	663.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	148.161.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.606.500,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	421.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		490.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	318.804.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora	-	367.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	149.484.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.320.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		12.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kantor BKD Kabupaten Blora		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD***	**-**			**98,32 Indeks**	**1.383.000.000,00**						**-**	**2.585.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Tingkat Penyelesaian Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN*	-			100 %	600.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora	-	1.105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				400 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				9512 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN*	-			100 %	330.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora	-	725.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Tingkat Penyelesaian Pengembangan Kompetensi ASN*	-			100 %	248.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora	-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	198.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Tingkat Penyelesaian Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN*	-			100 %	205.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora	-	405.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				75 Orang	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	105.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**800.000.000,00**							**1.850.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Prioritas Kebutuhan Organisasi***	**-**			**100 %**	**800.000.000,00**						**-**	**1.850.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis sesuai prioritas kebutuhan organisasi*	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora	-	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				95 Orang	200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN*	-			100 %	600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora	-	1.550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				20 Laporan	600.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	ASN Kabupaten Blora		1.550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						**10.244.885.180,00**							**13.727.736.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.244.885.180,00**							**13.727.736.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**10.244.885.180,00**							**13.727.736.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.062.699.280,00**						**-**	**11.442.736.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.044.840.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	8.016.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7.032.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	12.840.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		16.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	87.640.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-	-	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	87.640.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	823.178.880,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	879.676.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.590.480,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.676.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	285.192.500,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	48.734.900,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	11.008.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		9.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	458.653.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	188.321.300,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	877.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		477.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	188.321.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	639.469.100,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	744.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80 Laporan	3.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	201.365.200,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		210.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	434.503.900,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		530.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	279.250.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	111.340.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	67.910.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Prosentase penyelenggaraan pengawasan internal***	**-**			**100 %**	**1.138.685.900,00**						**-**	**1.345.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya pengawasan internal*	-			100 %	1.103.928.900,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.315.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				36 Laporan	222.585.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		265.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				89 Laporan	469.200.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		510.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				55 Laporan	233.760.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	178.383.900,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	34.757.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	34.757.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**	**-**			**-**	**43.500.000,00**						**-**	**940.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	43.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	940.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42 perangkat daerah	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				42 perangkat daerah	10.530.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	10.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan perekonomian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	-		75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	22.370.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BLORA						**16.353.777.370,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**16.353.777.370,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**16.353.777.370,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**16.154.722.370,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	6.090.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.090.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	11.897.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	11.774.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	123.120.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	39.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	39.900.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD*	-			100 %	1.019.448.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.603.700,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	371.757.570,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	364.737.080,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.700.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	91.175.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	160.475.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD*	-			100 %	217.219.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				38 Unit	124.500.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	92.719.620,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	2.559.810.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.235.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136.725.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.950.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.396.900.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	415.134.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	47.934.400,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	17.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Blora***	**-**			**95 %**	**52.260.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	-			100 %	30.570.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	21.730.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.840.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			100 %	21.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1500 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	12.090.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**78.695.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*	-			16 Kali	33.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	6.150.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	15.750.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	11.720.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	45.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				34000 Keluarga	45.075.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**28.450.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	28.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	9.660.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	18.790.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Prosentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**16.980.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	-			100 %	16.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				360 Orang	9.900.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	7.080.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu di Wilayah Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**22.670.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	22.670.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora	-	0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	8.735.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	13.935.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Blora		0,00	KECAMATAN BLORA
		KELURAHAN BERAN						**972.000.175,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**972.000.175,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**972.000.175,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**972.000.175,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	972.000.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Beran	-	0,00	KELURAHAN BERAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Beran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Beran		0,00	KELURAHAN BERAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	800.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Beran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Beran		0,00	KELURAHAN BERAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	168.800.175,00	Kab. Blora, Blora, Beran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Beran		0,00	KELURAHAN BERAN
		KELURAHAN BANGKLE						**948.013.104,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**948.013.104,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**948.013.104,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**948.013.104,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	948.013.104,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Bangkle	-	0,00	KELURAHAN BANGKLE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Bangkle	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Bangkle		0,00	KELURAHAN BANGKLE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	750.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Bangkle	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Bangkle		0,00	KELURAHAN BANGKLE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	194.813.104,00	Kab. Blora, Blora, Bangkle	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Bangkle		0,00	KELURAHAN BANGKLE
		KELURAHAN KEDUNGJENAR						**1.212.999.845,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.212.999.845,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.212.999.845,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**1.212.999.845,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.212.999.845,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kedungjenar	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGJENAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Kedungjenar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kedungjenar		0,00	KELURAHAN KEDUNGJENAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	950.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kedungjenar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kedungjenar		0,00	KELURAHAN KEDUNGJENAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	259.799.845,00	Kab. Blora, Blora, Kedungjenar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kedungjenar		0,00	KELURAHAN KEDUNGJENAR
		KELURAHAN MLANGSEN						**796.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**796.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**796.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**796.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	796.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Mlangsen	-	0,00	KELURAHAN MLANGSEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Mlangsen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Mlangsen		0,00	KELURAHAN MLANGSEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	600.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Mlangsen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Mlangsen		0,00	KELURAHAN MLANGSEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	192.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Mlangsen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Mlangsen		0,00	KELURAHAN MLANGSEN
		KELURAHAN JETIS						**1.361.874.087,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.361.874.087,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.361.874.087,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**1.361.874.087,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.361.874.087,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Jetis	-	0,00	KELURAHAN JETIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Jetis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Jetis		0,00	KELURAHAN JETIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	1.175.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Jetis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Jetis		0,00	KELURAHAN JETIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	183.674.087,00	Kab. Blora, Blora, Jetis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Jetis		0,00	KELURAHAN JETIS
		KELURAHAN TAMBAHREJO						**1.180.066.902,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.180.066.902,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.180.066.902,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**1.180.066.902,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.180.066.902,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tambahrejo	-	0,00	KELURAHAN TAMBAHREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Tambahrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tambahrejo		0,00	KELURAHAN TAMBAHREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	1.010.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Tambahrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tambahrejo		0,00	KELURAHAN TAMBAHREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	166.866.902,00	Kab. Blora, Blora, Tambahrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tambahrejo		0,00	KELURAHAN TAMBAHREJO
		KELURAHAN KAUMAN						**884.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**884.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**884.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**884.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	884.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kauman	-	0,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kauman		0,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	700.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kauman		0,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	180.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Kauman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kauman		0,00	KELURAHAN KAUMAN
		KELURAHAN SONOREJO						**782.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**782.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**782.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**782.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	782.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Sonorejo	-	0,00	KELURAHAN SONOREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Sonorejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Sonorejo		0,00	KELURAHAN SONOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	600.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Sonorejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Sonorejo		0,00	KELURAHAN SONOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	178.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Sonorejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Sonorejo		0,00	KELURAHAN SONOREJO
		KELURAHAN KUNDEN						**772.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**772.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**772.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**772.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	772.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kunden	-	0,00	KELURAHAN KUNDEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Kunden	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kunden		0,00	KELURAHAN KUNDEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	600.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Kunden	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kunden		0,00	KELURAHAN KUNDEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	168.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Kunden	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Kunden		0,00	KELURAHAN KUNDEN
		KELURAHAN TEMPELAN						**1.048.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.048.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.048.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**1.048.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.048.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tempelan	-	0,00	KELURAHAN TEMPELAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Tempelan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tempelan		0,00	KELURAHAN TEMPELAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	850.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Tempelan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tempelan		0,00	KELURAHAN TEMPELAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	194.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Tempelan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tempelan		0,00	KELURAHAN TEMPELAN
		KELURAHAN TEGALGUNUNG						**772.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**772.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**772.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**772.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	772.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tegalgunung	-	0,00	KELURAHAN TEGALGUNUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Tegalgunung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tegalgunung		0,00	KELURAHAN TEGALGUNUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	600.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Tegalgunung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tegalgunung		0,00	KELURAHAN TEGALGUNUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	168.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Tegalgunung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Tegalgunung		0,00	KELURAHAN TEGALGUNUNG
		KELURAHAN KARANGJATI						**1.125.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.125.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.125.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Blora***	**-**			**100 %**	**1.125.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.125.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Karangjati	-	0,00	KELURAHAN KARANGJATI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	Kab. Blora, Blora, Karangjati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Karangjati		0,00	KELURAHAN KARANGJATI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	900.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Karangjati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Karangjati		0,00	KELURAHAN KARANGJATI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	221.800.000,00	Kab. Blora, Blora, Karangjati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelurahan Karangjati		0,00	KELURAHAN KARANGJATI
		KECAMATAN JEPON						**4.459.658.800,00**							**4.982.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.459.658.800,00**							**4.982.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.459.658.800,00**							**4.982.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.265.202.300,00**						**-**	**4.663.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon	-	3.500.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	989.800,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		1.500.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.000.200,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		2.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.987.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon	-	3.025.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.964.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		3.000.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	23.160.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		25.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	341.708.338,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon	-	490.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.519.593,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		5.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	51.471.430,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		100.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	159.530.329,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		200.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	43.224.282,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		50.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		5.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	81.162.704,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		130.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	475.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon	-	500.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				- Unit	0,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		50.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				- Unit	400.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		400.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		50.000.000,00	KECAMATAN JEPON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	378.304.802,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon	-	420.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.674.412,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		5.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	74.480.390,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		100.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.750.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		15.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	290.400.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		300.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.039.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon	-	224.500.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	20.660.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		35.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1.109.160,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		7.500.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5.270.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		12.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		100.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jepon		70.000.000,00	KECAMATAN JEPON
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**54.922.500,00**						**-**	**69.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	44.515.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	50.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	30.140.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		35.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24 Dokumen	14.375.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	10.407.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	19.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	2.807.500,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		4.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	7.600.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN JEPON
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**67.354.000,00**						**-**	**105.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	37.354.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	55.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	14.670.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.184.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN JEPON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	50.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				625 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		50.000.000,00	KECAMATAN JEPON
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**18.420.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	18.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	45.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.950.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	7.470.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN JEPON
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**18.875.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan*	-			100 %	18.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	35.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				25 Orang	13.575.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	5.300.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN JEPON
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**34.885.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	34.885.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	65.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	23.045.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		40.000.000,00	KECAMATAN JEPON
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	11.840.000,00	Kab. Blora, Jepon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN JEPON
		KELURAHAN JEPON						**2.270.555.000,00**							**2.110.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.270.555.000,00**							**2.110.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.270.555.000,00**							**2.110.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.270.555.000,00**						**-**	**2.110.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*	-			100 %	2.270.555.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	2.110.000.000,00	KELURAHAN JEPON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		10.000.000,00	KELURAHAN JEPON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17 Unit	2.055.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		1.500.000.000,00	KELURAHAN JEPON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	210.555.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		600.000.000,00	KELURAHAN JEPON
		KECAMATAN BOGOREJO						**5.825.736.000,00**							**2.656.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.825.736.000,00**							**2.656.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.825.736.000,00**							**2.656.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***NIlai sakip perangkat daerah untuk tahun n-1 yang dinilai pada tahun n***	**-**			**72 %**	**5.646.821.000,00**						**-**	**2.402.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Presentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			100 % 8 dokumen 100 % 8 dokumen	5.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan	-	7.500.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.750.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.750.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		3.500.000,00	KECAMATAN BOGOREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah* *Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah* *Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 bulan 100 % 100 %	5.278.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan	-	1.806.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	5.272.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		1.800.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.700.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	7.700.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Bogorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan kebutuhan administrasi umum pada perangkat daerah*	-			100 %	160.221.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan	-	192.500.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	3.029.200,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	39.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan		50.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	44.820.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		50.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.731.800,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		3.500.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68.240.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Kecamatan		80.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur*	-			100 %	92.300.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	158.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	21.300.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		23.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Bogorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		110.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	80.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan	-	73.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		40.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	41.700.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik*	-			100 %	23.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan	-	157.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	18.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		35.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		18.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan		100.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bogorejo***	**-**			**100 %**	**43.555.000,00**						**-**	**58.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	-			100 %	21.825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat, Dinas Instansi Lintas sektoral, Kepala Desa	-	30.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	21.825.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat, Dinas Instansi Lintas sektoral, Kepala Desa		30.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Presentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa*	-			100 %	21.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat, Kepala Desa	-	28.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1500 Dokumen	9.975.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat, Kepala Desa		14.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	11.755.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat, Kepala Desa		14.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat yang aktif***	**-**			**100 %**	**64.020.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*	-			100 %	33.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	83.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	27.020.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		50.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6.840.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		33.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	30.160.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	32.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				150 Keluarga	30.160.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		32.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan***	**-**			**100 %**	**9.635.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	-			100 %	9.635.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat	-	12.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	9.635.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat		12.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan***	**-**			**100 %**	**53.570.000,00**						**-**	**57.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	-			100 %	53.570.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelompok masyarakat	-	57.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				150 Orang	53.570.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kelompok masyarakat		57.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**8.135.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	-			100 %	8.135.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kepala Desa	-	12.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	8.135.000,00	Kab. Blora, Bogorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kepala Desa		12.000.000,00	KECAMATAN BOGOREJO
		KECAMATAN TUNJUNGAN						**4.950.722.450,00**							**2.118.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.950.722.450,00**							**2.118.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.950.722.450,00**							**2.118.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah***	**-**			**100 %**	**4.812.762.450,00**						**-**	**1.919.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	4.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	7.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	2.500.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		3.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				0 0	1.500.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		3.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	3.921.760.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	1.514.760.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				12 Bulan 0	3.907.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		1.500.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	14.760.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		14.760.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Paket	82.754.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	101.440.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.498.300,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		3.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				0 0	37.046.100,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		45.240.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	1.500.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		3.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		4.200.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	37.110.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		45.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			3 Unit	40.950.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	15.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	40.950.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		15.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD*	-			12 Laporan	46.758.200,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	54.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		1.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.118.200,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		39.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.640.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		14.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		0,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD*	-			16 Unit	716.539.850,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	226.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	26.540.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		26.500.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	499.999.936,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		150.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	189.999.914,00	Kab. Blora, Tunjungan, Tunjungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		50.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tunjungan***	**-**			**90 %**	**34.220.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan IKM Terhadap Pelayanan Kecamatan Tunjungan*	-			12 Laporan	24.940.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	30.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	14.940.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			0				0 0	10.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			150 Dokumen	9.280.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				150 Dokumen	5.175.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			0				0 0	4.105.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Lembaga Masyarakat Aktif Kecamatan Tunjungan***	**-**			**100 %**	**41.990.000,00**						**-**	**66.200.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			12 Dokumen	23.350.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	41.200.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		15.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	13.350.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		26.200.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	18.640.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				130 Keluarga	18.640.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tunjungan***	**-**			**100 %**	**5.750.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			6 Laporan	5.750.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			0				0 0	5.750.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Tingkat Kecamatan Tunjungan***	**-**			**95 %**	**37.000.000,00**						**-**	**42.400.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	-			95 %	37.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah, Forkompincam, Kades	-	42.400.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			0				0 0	32.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah, Forkompincam, Kades		34.400.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			0				0 0	5.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah, Forkompincam, Kades		8.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Tingkat Kecamatan Tunjungan***	**-**			**92 %**	**19.000.000,00**						**-**	**21.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	-			200 Orang	19.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah	-	21.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			0				0 0	13.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		15.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			0				0 0	6.000.000,00	Kab. Blora, Tunjungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Perangkat Daerah		6.000.000,00	KECAMATAN TUNJUNGAN
		KECAMATAN BANJAREJO						**2.733.275.200,00**							**13.097.150.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.733.275.200,00**							**13.097.150.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.733.275.200,00**							**13.097.150.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.452.273.865,00**						**-**	**11.194.150.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.265.450,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	29.300.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.725.450,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		14.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.220.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		13.300.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.320.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.165.840.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	10.043.600.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.153.000.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		10.000.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12.840.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		43.600.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.420.099,00			-	-	-	-	374.500.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.052.790,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.279.601,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		60.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4.251.308,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		37.500.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.080.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		25.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	82.756.400,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		244.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.728.316,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	555.500.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		20.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.928.316,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		182.750.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	40.800.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		352.750.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.020.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	191.250.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	23.420.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		132.250.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2.240.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		23.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	5.360.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		36.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**28.861.000,00**						**-**	**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	19.910.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	265.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	16.000.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		137.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3.910.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		128.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	8.951.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	240.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1600 Dokumen	4.966.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		120.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	3.985.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		120.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**104.635.835,00**						**-**	**847.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	39.940.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	782.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	20.760.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		354.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	13.680.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		328.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	64.695.835,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				80 Keluarga	64.695.835,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		65.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**26.965.000,00**						**-**	**149.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	26.965.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	149.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	15.135.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		45.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	11.830.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		104.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**96.417.500,00**						**-**	**287.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	96.417.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	287.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				132 Orang	93.657.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		237.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2.760.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		50.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**24.122.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	24.122.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	115.000.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	19.812.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		62.500.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3 Dokumen	4.310.000,00	Kab. Blora, Banjarejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		52.500.000,00	KECAMATAN BANJAREJO
		KECAMATAN CEPU						**8.278.896.160,00**							**7.846.941.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.278.896.160,00**							**7.846.941.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.278.896.160,00**							**7.846.941.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**-**			**100 %**	**8.035.870.160,00**						**-**	**7.493.941.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	5.802.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	6.050.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5.753.950.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		6.000.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	48.120.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD*	-			100 %	38.227.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	38.227.600,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD*	-			100 %	520.650.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	490.000.000,00	KECAMATAN CEPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	9.936.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	38.016.430,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	96.763.830,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		15.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	199.940.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		220.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.739.600,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	158.255.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		200.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD*	-			100 %	666.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	290.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	6.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	510.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		200.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	677.621.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	238.941.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	181.501.700,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		100.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.200.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	479.920.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		103.941.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	321.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu	-	385.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	43.050.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	26.250.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		200.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	175.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Cepu		50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan kecamatan Cepu***	**-**			**99 %**	**68.555.000,00**						**-**	**68.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan*	-			100 %	62.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	60.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	52.495.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		45.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	9.575.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		15.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaam urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			100 %	6.485.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	8.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10000 Dokumen	2.285.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		3.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**66.664.000,00**						**-**	**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*	-			100 %	16.664.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	25.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		5.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	9.664.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		15.000.000,00	KECAMATAN CEPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan*	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				17000 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Cepu***	**-**			**100 %**	**50.300.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum*	-			100 %	15.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	20.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	5.300.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah*	-			100 %	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		50.000.000,00	KECAMATAN CEPU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan Cepu***	**-**			**97 %**	**42.170.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	42.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	110.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	36.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		100.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	6.170.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		10.000.000,00	KECAMATAN CEPU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**15.337.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	15.337.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu	-	30.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	12.337.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		15.000.000,00	KECAMATAN CEPU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Cepu		15.000.000,00	KECAMATAN CEPU
		KELURAHAN TAMBAKROMO						**819.814.720,00**							**1.580.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**819.814.720,00**							**1.580.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**819.814.720,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**819.814.720,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	819.814.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Tambakromo	-	1.580.000.000,00	KELURAHAN TAMBAKROMO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Tambakromo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Tambakromo		30.000.000,00	KELURAHAN TAMBAKROMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	660.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Tambakromo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Tambakromo		1.250.000.000,00	KELURAHAN TAMBAKROMO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	144.814.720,00	Kab. Blora, Cepu, Tambakromo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Tambakromo		300.000.000,00	KELURAHAN TAMBAKROMO
		KELURAHAN BALUN						**1.749.774.030,00**							**1.580.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.749.774.030,00**							**1.580.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.749.774.030,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**1.749.774.030,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.749.774.030,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Balun	-	1.580.000.000,00	KELURAHAN BALUN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Balun		30.000.000,00	KELURAHAN BALUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Balun		1.250.000.000,00	KELURAHAN BALUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	234.774.030,00	Kab. Blora, Cepu, Balun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Balun		300.000.000,00	KELURAHAN BALUN
		KELURAHAN CEPU						**1.572.373.740,00**							**1.580.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.572.373.740,00**							**1.580.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.572.373.740,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**1.572.373.740,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.572.373.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Cepu	-	1.580.000.000,00	KELURAHAN CEPU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Cepu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Cepu		30.000.000,00	KELURAHAN CEPU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	1.330.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Cepu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Cepu		1.250.000.000,00	KELURAHAN CEPU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	227.373.740,00	Kab. Blora, Cepu, Cepu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Cepu		300.000.000,00	KELURAHAN CEPU
		KELURAHAN KARANGBOYO						**990.932.560,00**							**1.580.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**990.932.560,00**							**1.580.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**990.932.560,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**990.932.560,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	990.932.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Karangboyo	-	1.580.000.000,00	KELURAHAN KARANGBOYO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Karangboyo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Karangboyo		30.000.000,00	KELURAHAN KARANGBOYO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	790.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Karangboyo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Karangboyo		1.250.000.000,00	KELURAHAN KARANGBOYO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	185.932.560,00	Kab. Blora, Cepu, Karangboyo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Karangboyo		300.000.000,00	KELURAHAN KARANGBOYO
		KELURAHAN NGELO						**1.068.192.490,00**							**1.580.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.068.192.490,00**							**1.580.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.068.192.490,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**1.068.192.490,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	1.068.192.490,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngelo	-	1.580.000.000,00	KELURAHAN NGELO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Ngelo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngelo		30.000.000,00	KELURAHAN NGELO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	930.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Ngelo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngelo		1.250.000.000,00	KELURAHAN NGELO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	123.192.490,00	Kab. Blora, Cepu, Ngelo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngelo		300.000.000,00	KELURAHAN NGELO
		KELURAHAN NGROTO						**761.251.100,00**							**1.580.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**761.251.100,00**							**1.580.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**761.251.100,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat aktif Kecamatan Cepu***	**-**			**98 %**	**761.251.100,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-			100 %	761.251.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngroto	-	1.580.000.000,00	KELURAHAN NGROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Ngroto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngroto		30.000.000,00	KELURAHAN NGROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	600.000.000,00	Kab. Blora, Cepu, Ngroto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngroto		1.250.000.000,00	KELURAHAN NGROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	146.251.100,00	Kab. Blora, Cepu, Ngroto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kelurahan Ngroto		300.000.000,00	KELURAHAN NGROTO
		KECAMATAN JIKEN						**2.535.563.000,00**							**3.097.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.535.563.000,00**							**3.097.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.535.563.000,00**							**3.097.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.268.339.647,00**						**-**	**2.697.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya penyusunan ,perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken	-	6.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		6.000.000,00	KECAMATAN JIKEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD*	-			100 %	1.833.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken	-	1.835.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.823.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		1.823.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		12.000.000,00	KECAMATAN JIKEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD*	-			100 %	141.186.373,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken	-	217.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.703.400,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		6.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.100.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		40.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.040.830,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		30.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	41.188.332,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		60.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.404.811,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		6.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.749.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		5.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	78.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		70.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan barang milik daerah pada PD*	-			100 %	20.394.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken	-	100.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		30.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4.500.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		50.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.894.450,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		20.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Jiken, Jiken	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	Kecamatan Jiken		0,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang PD*	-			100 %	112.308.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken	-	194.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		2.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	38.316.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		45.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.830.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		3.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	67.662.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		144.000.000,00	KECAMATAN JIKEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dipelihara*	-			100 %	154.650.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken	-	345.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	47.350.824,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		40.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	7.300.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		5.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		200.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Jiken		100.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**61.196.975,00**						**-**	**80.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan*	-			100 %	42.211.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken	-	50.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	32.671.975,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		35.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		15.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*	-			100 %	18.985.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken	-	30.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		15.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	11.035.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		15.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**105.096.378,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*	-			100 %	45.695.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken	-	120.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				2 0	11.035.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		10.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	23.040.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		40.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	11.620.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		70.000.000,00	KECAMATAN JIKEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	59.401.378,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	59.401.378,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**19.250.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	-			100 %	19.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken	-	30.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	11.300.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		15.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	7.950.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		15.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**58.610.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksannya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	-			100 %	58.610.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken	-	65.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		50.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	8.610.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat kec jiken		15.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**23.070.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	-			100 %	23.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Desa se kec Jiken	-	55.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	13.070.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Desa se kec Jiken		35.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Jiken, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Desa se kec Jiken		20.000.000,00	KECAMATAN JIKEN
		KECAMATAN SAMBONG						**2.274.085.000,00**							**3.124.840.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.274.085.000,00**							**3.124.840.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.274.085.000,00**							**3.124.840.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.133.340.813,00**						**-**	**2.674.840.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.992.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.992.800,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.520.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	1.812.840.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.509.000.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		1.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	11.640.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		12.840.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.357.013,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	353.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.003.931,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.741.130,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		140.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.602.952,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		60.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.998.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.005.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45.006.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		95.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		100.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	237.721.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	329.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.750.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.251.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		75.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.920.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	171.800.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.630.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	24.630.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**34.587.850,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	18.579.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	15.399.850,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	16.008.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6000 Dokumen	7.991.700,00	Kab. Blora, Sambong, Sambong Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	8.016.300,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**62.976.037,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	27.976.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	7.951.700,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	5.025.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	34.999.337,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10 Keluarga	34.999.337,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		45.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**7.996.200,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	7.996.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	7.996.200,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**19.996.000,00**						**-**	**135.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	19.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	135.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				150 Orang	19.996.000,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		110.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	0,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**15.188.100,00**						**-**	**65.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	15.188.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	7.992.600,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	7.195.500,00	Kab. Blora, Sambong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN SAMBONG
		KECAMATAN KEDUNGTUBAN						**3.902.540.000,00**							**4.225.360.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.902.540.000,00**							**4.225.360.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.902.540.000,00**							**4.225.360.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.723.536.961,00**						**-**	**3.983.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	-			100 %	2.775.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban	-	6.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.775.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		6.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan*	-			100 %	3.350.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban	-	3.514.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.336.000.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		3.500.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	14.040.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		14.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	161.845.753,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban	-	237.600.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.316.600,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		10.100.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.391.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		30.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.233.200,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		7.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.204.953,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		75.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.750.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		4.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		1.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83.850.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		110.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur*	-			100 %	1.877.383,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban	-	9.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	877.383,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		7.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		2.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	176.793.325,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban	-	182.200.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		1.200.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.503.325,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		40.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.990.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		11.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	131.300.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		130.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	-			100 %	30.205.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban	-	33.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	25.100.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		25.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.050.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		6.300.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.038.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		1.100.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.017.500,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Kedungtuban		1.100.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**31.818.539,00**						**-**	**45.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan*	-			100 %	23.418.089,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	31.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	22.358.089,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		29.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	1.060.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat*	-			100 %	8.400.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban	-	14.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1200 Dokumen	3.050.500,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		5.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17 Laporan	5.349.950,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		9.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**92.869.500,00**						**-**	**108.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 %	42.869.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban	-	48.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	2.735.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		6.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	28.591.100,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		40.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	11.543.400,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		2.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Kedungtuban	-	60.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				75 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat Kecamatan Kedungtuban		60.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**9.080.000,00**						**-**	**24.060.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			100 %	9.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban	-	24.060.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	8.550.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		23.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	530.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		1.060.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**32.350.000,00**						**-**	**31.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Ssuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	32.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban	-	31.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				300 Orang	32.350.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		31.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**12.885.000,00**						**-**	**33.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	12.885.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban	-	33.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	7.100.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		12.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				17 Dokumen	5.785.000,00	Kab. Blora, Kedungtuban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Masyarakat di Kecamatan Kedungtuban		21.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGTUBAN
		KECAMATAN NGAWEN						**5.189.531.150,00**							**5.018.170.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.189.531.150,00**							**5.018.170.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.189.531.150,00**							**5.018.170.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota***	**-**			**100 %**	**4.912.361.150,00**						**-**	**4.479.170.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.650.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	29.190.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.550.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		16.940.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9.100.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		12.250.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.356.600.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	3.358.880.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	3.325.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.325.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	28.440.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		23.880.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.160.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	430.676.850,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	311.100.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.691.210,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	176.572.950,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	192.278.040,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.134.650,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.100.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	223.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		23.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		200.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	390.208.300,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	357.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47.708.300,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		47.300.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.300.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.700.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	331.200.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		300.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	470.226.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	20.226.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		180.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		0,00	KECAMATAN NGAWEN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan***	**-**			**92 %**	**70.738.000,00**						**-**	**105.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan*	-			1 Kegiatan	43.448.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	60.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	27.958.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		35.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	15.490.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		25.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa*	-			100 %	27.290.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	45.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1200 Dokumen	11.650.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		20.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	15.640.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		25.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase lembaga masyarakat yang aktif***	**-**			**100 %**	**102.287.000,00**						**-**	**154.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*	-			100 %	49.627.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	69.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	13.935.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		20.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	25.480.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		24.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	10.212.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		25.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	52.660.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				435 Keluarga	52.660.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		85.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan***	**-**			**95 %**	**40.790.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			100 %	40.790.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	45.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	26.140.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		25.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	14.650.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		20.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan***	**-**			**100 %**	**31.285.000,00**						**-**	**185.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	31.285.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	185.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	20.295.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		160.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	10.990.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		25.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**32.070.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	32.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN	-	50.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				27 Dokumen	16.130.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		20.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	15.940.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	KECAMATAN NGAWEN		30.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
		KELURAHAN PUNGGURSUGIH						**643.748.150,00**							**780.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**643.748.150,00**							**780.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**643.748.150,00**							**780.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**643.748.150,00**						**-**	**780.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	643.748.150,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	780.000.000,00	KELURAHAN PUNGGURSUGIH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Punggursugih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KELURAHAN PUNGGURSUGIH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	500.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Punggursugih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		600.000.000,00	KELURAHAN PUNGGURSUGIH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	138.748.150,00	Kab. Blora, Ngawen, Punggursugih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		170.000.000,00	KELURAHAN PUNGGURSUGIH
		KELURAHAN NGAWEN						**666.000.100,00**							**780.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**666.000.100,00**							**780.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**666.000.100,00**							**780.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**666.000.100,00**						**-**	**780.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	666.000.100,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	780.000.000,00	KELURAHAN NGAWEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Ngawen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KELURAHAN NGAWEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	500.000.000,00	Kab. Blora, Ngawen, Ngawen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		600.000.000,00	KELURAHAN NGAWEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	161.000.100,00	Kab. Blora, Ngawen, Ngawen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		170.000.000,00	KELURAHAN NGAWEN
		KECAMATAN KUNDURAN						**5.416.950.000,00**							**5.029.585.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.416.950.000,00**							**5.029.585.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.416.950.000,00**							**5.029.585.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.242.307.300,00**						**-**	**3.877.985.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.161.350,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	4.985.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.040.250,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		1.985.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	1.121.100,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.095.960.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	2.916.500.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.080.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		2.900.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	15.960.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		16.500.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	536.984.570,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	315.500.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.469.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		8.500.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	220.879.465,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		70.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.226.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	195.546.105,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		100.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.400.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		9.500.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		4.500.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.664.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		120.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	229.695.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	215.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	29.695.500,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		15.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		200.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	252.959.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	326.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		3.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.059.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		80.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.200.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		8.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	166.200.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		235.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.546.880,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	54.086.880,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		57.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	3.200.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		6.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	16.260.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		12.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		25.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**49.524.900,00**						**-**	**80.800.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	29.932.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	52.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	21.163.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		23.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	8.769.500,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		29.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	19.592.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	28.800.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	9.547.400,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		11.800.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	10.045.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		17.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**953.881.000,00**						**-**	**993.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	49.412.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	88.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				26 Lembaga Kemasyarakatan	3.178.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		6.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	8.545.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		22.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	37.689.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		60.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	898.380.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	845.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.380.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Kunduran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		5.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	700.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Kunduran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		600.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	194.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Kunduran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		240.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	6.089.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				4 Keluarga	6.089.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		60.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**21.022.800,00**						**-**	**33.800.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	21.022.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	33.800.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	16.252.800,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		29.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	4.770.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		4.800.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**138.000.000,00**						**-**	**16.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	138.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	135.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		11.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		5.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**12.214.000,00**						**-**	**28.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	12.214.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-	-	28.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25 Dokumen	8.146.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		16.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	4.068.000,00	Kab. Blora, Kunduran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat	-		12.000.000,00	KECAMATAN KUNDURAN
		KECAMATAN TODANAN						**2.345.940.620,00**							**2.917.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.345.940.620,00**							**2.917.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.345.940.620,00**							**2.917.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.168.263.220,00**						**-**	**2.448.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.460.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.960.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.500.000,00	KECAMATAN TODANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.710.055.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.915.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.699.000.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.900.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			0				12 0	11.055.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN TODANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	131.460.098,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	218.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			0				4 0	9.900.326,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	23.634.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	2.226.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	46.239.772,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.820.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	41.640.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	175.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	175.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		45.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	132.878.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	117.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.500.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.407.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	7.430.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102.041.600,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		75.000.000,00	KECAMATAN TODANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.234.522,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	145.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	28.109.522,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		45.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	162.125.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**43.850.000,00**						**-**	**84.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	25.810.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25.810.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	18.040.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5000 Dokumen	7.665.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25 Laporan	10.375.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**66.692.400,00**						**-**	**195.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	25.075.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	12.375.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		45.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	KECAMATAN TODANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	41.617.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				500 Keluarga	41.617.400,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		65.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**14.185.000,00**						**-**	**37.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	14.185.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	37.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	8.685.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	5.500.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**38.650.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	38.650.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	115.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				75 Orang	33.150.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		100.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**14.300.000,00**						**-**	**38.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	14.300.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25 Dokumen	10.125.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		18.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	4.175.000,00	Kab. Blora, Todanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN TODANAN
		KECAMATAN JAPAH						**2.719.868.800,00**							**1.900.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.719.868.800,00**							**1.900.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.719.868.800,00**							**1.900.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.512.132.800,00**						**-**	**1.900.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.096.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	1.900.000.000,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.085.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		1.900.000.000,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	11.640.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	117.597.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.914.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.120.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	32.643.320,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.320.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	44.404.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	21.825.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	22.579.830,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.720.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	46.174.650,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	112.546.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.770.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	48.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	23.370.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**62.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*undefined*	-			undefined undefined	48.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	43.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	14.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2000 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**66.006.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	31.006.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	21.006.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				1000 Keluarga	35.000.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**20.550.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	20.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	11.000.000,00	Kab. Blora, Japah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	9.550.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**49.180.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	49.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	44.180.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah	-	0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Japah		0,00	KECAMATAN JAPAH
		KECAMATAN RANDUBLATUNG						**5.129.084.819,00**							**5.132.574.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.129.084.819,00**							**5.132.574.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.129.084.819,00**							**5.132.574.500,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.900.774.819,00**						**-**	**4.886.864.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.300.000,00			-	-	-	-	5.830.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.120.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.650.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.590.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.590.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.590.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.590.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.566.521.162,00			-	-	-	-	3.560.040.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.543.001.162,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.543.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	23.520.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.040.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	395.034.037,00			-	-	-	-	264.994.500,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.237.418,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.414.500,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	86.395.550,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.580.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	97.843.589,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		68.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.585.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.772.480,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	176.200.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		146.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	353.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	368.279.620,00			-	-	-	-	356.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.550.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	54.029.620,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.100.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	303.600.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		288.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.640.000,00			-	-	-	-	347.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	47.950.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	17.690.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**50.230.000,00**						**-**	**45.740.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	44.400.000,00			-	-	-	-	41.500.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.600.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	31.800.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.500.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	5.830.000,00			-	-	-	-	4.240.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.120.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	2.650.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.120.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**76.960.000,00**						**-**	**74.180.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	23.960.000,00			-	-	-	-	29.180.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.650.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	18.550.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.180.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.760.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	53.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100 Keluarga	53.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**15.900.000,00**						**-**	**8.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	15.900.000,00			-	-	-	-	8.300.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.600.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.300.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	5.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**76.740.000,00**						**-**	**101.590.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	76.740.000,00			-	-	-	-	101.590.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	75.150.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1.590.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.590.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**8.480.000,00**						**-**	**15.900.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.480.000,00			-	-	-	-	15.900.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	5.300.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.300.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.600.000,00	KECAMATAN RANDUBLATUNG
		KELURAHAN RANDUBLATUNG						**1.791.530.500,00**							**701.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.791.530.500,00**							**701.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.791.530.500,00**							**701.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.791.530.500,00**						**-**	**701.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.791.530.500,00			-	-	-	-	701.000.000,00	KELURAHAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	5.300.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Randublatung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	1.670.000.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Randublatung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		600.000.000,00	KELURAHAN RANDUBLATUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	116.230.500,00	Kab. Blora, Randublatung, Randublatung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN RANDUBLATUNG
		KELURAHAN WULUNG						**1.166.152.081,00**							**701.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.166.152.081,00**							**701.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.166.152.081,00**							**701.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.166.152.081,00**						**-**	**701.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.166.152.081,00			-	-	-	-	701.000.000,00	KELURAHAN WULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Blora, Randublatung, Wulung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN WULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	1.050.000.000,00	Kab. Blora, Randublatung, Wulung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		600.000.000,00	KELURAHAN WULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	116.152.081,00	Kab. Blora, Randublatung, Wulung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN WULUNG
		KECAMATAN JATI						**2.816.003.911,00**							**2.783.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.812.003.911,00**							**2.778.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.812.003.911,00**							**2.778.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.645.943.911,00**						**-**	**2.490.600.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.950.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.167.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.909.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.158.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.900.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		9.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	111.776.911,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	190.600.000,00	KECAMATAN JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.977.851,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.410.900,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3.946.500,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	23.238.360,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.003.300,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.600.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	66.200.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		90.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191.231.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	240.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	75.071.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		70.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.760.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	107.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		150.000.000,00	KECAMATAN JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	167.986.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	145.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	12.636.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5.350.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	KECAMATAN JATI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**33.300.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	17.400.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	15.900.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000,00	KECAMATAN JATI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**55.910.000,00**						**-**	**132.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	32.060.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	92.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	5.660.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		12.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	15.900.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		60.000.000,00	KECAMATAN JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	23.850.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				12 Keluarga	23.850.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		40.000.000,00	KECAMATAN JATI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**15.900.000,00**						**-**	**28.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	15.900.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	28.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN JATI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**39.750.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	39.750.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				150 Orang	31.800.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN JATI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**21.200.000,00**						**-**	**13.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	21.200.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	13.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	10.600.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	10.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.000.000,00	KECAMATAN JATI
	X	**NON URUSAN**						**4.000.000,00**							**5.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.000.000,00**							**5.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.000.000,00**						**-**	**5.000.000,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN JATI
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Blora, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	KECAMATAN JATI
		KECAMATAN KRADENAN						**2.783.822.000,00**							**2.512.204.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.783.822.000,00**							**2.512.204.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.783.822.000,00**							**2.512.204.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.540.602.000,00**						**-**	**2.325.204.200,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.245.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	8.245.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.996.679.586,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	1.881.660.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.993.679.586,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		1.877.700.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.960.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	154.665.414,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	120.144.200,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.954.828,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	28.770.900,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		13.200.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	42.539.686,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		44.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.450.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		11.024.200,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		7.920.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	46.750.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		33.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	96.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		96.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.252.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	184.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.300.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	59.852.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		49.500.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	179.400.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		132.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	38.760.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	29.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	9.760.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**49.400.000,00**						**-**	**39.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	33.400.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	33.400.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	16.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	17.600.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**94.850.000,00**						**-**	**61.600.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	40.350.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	28.600.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	20.150.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.200.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	54.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	54.500.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		33.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**17.970.000,00**						**-**	**19.800.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	17.970.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	19.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	7.970.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**61.000.000,00**						**-**	**44.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	61.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1200 Orang	61.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		44.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000,00**						**-**	**22.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KRADENAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Blora, Kradenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		13.200.000,00	KECAMATAN KRADENAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**9.150.780.000,00**							**9.565.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**9.150.780.000,00**							**9.565.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**9.150.780.000,00**							**9.565.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.050.700.000,00**						**-**	**4.740.000.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.400.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.900.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.518.120.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	3.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.485.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		3.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	33.120.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.600.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	19.600.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	180.648.300,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.528.300,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.320.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	102.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		134.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		560.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	182.931.700,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-	-	205.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.345.700,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	128.586.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	64.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	8.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang ber integritas dan transformatif	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**-**			**-**	**825.000.000,00**						**-**	**935.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	825.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	935.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				400 Orang	50.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				60 Orang	55.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				80 Orang	700.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		725.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**-**			**-**	**2.745.080.000,00**						**-**	**2.770.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	2.745.080.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	2.770.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Orang	2.710.080.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		2.710.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				80 Orang	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**-**			**-**	**840.000.000,00**						**-**	**235.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	840.000.000,00			-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	235.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	755.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				120 Orang	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**170.000.000,00**						**-**	**190.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	170.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Orang	145.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**520.000.000,00**						**-**	**695.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	520.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-	-	695.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				90 Orang	30.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	60.000.000,00	Kab. Blora, Blora, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	410.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan landasan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan	-		530.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**2.163.952.957.000,00**							**11.424.384.695.612,00**	

BAB VII
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2026 merupakan dokumen awal perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun sebagai pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tahun Pertama. Tema pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah "**Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan**". Penyusunan RKPD dilakukan dengan menyinergikan pendekatan proses dan substansi, dengan melibatkan pemangku kepentingan, yang diharapkan menjadi dokumen yang lebih inklusif dan berkualitas.

Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Blora tahun 2026 yang perlu diatur agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif adalah sebagai berikut:

RKPD tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RKPD tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan akan dilaksanakan dalam dokumen anggaran yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. Kedua dokumen ini dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 ke dalam dokumen Renja PD, KUA dan PPAS, dan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2026.

Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga dengan terimplementasikannya RKPD Tahun 2026, pembangunan semakin terarah menuju pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2025-2029 yaitu: **“Sesarengan Mbangun Blora Maju dan Berkelanjutan**"

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN